



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TULUNGAGUNG
NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 6 TAHUN 2019**

**Perubahan
RPJMD**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
**Kabupaten Tulungagung
2018-2023**



BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023, sudah tidak sesuai dengan kondisi lingkungan strategis saat ini, potensi daerah, isu strategis baik internasional, nasional dan lokal, sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

- Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 16. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau

- Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
 18. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo – Lamongan, Kawasan Bromo – Tengger – Semeru serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
 19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 20. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
 21. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka

- Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1447 Tahun 2019);
 29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
 31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15);
 32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
 33. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

- Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2008 Nomor 1 Seri E);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 Nomor 1 Seri E);
 35. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2021 Nomor 1 Seri D);
 36. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 Nomor 19 Seri E);
 37. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 1 Seri C);
 38. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 7 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

dan

BUPATI TULUNGAGUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2018-2023.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 1 Seri C) diubah, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 29 Desember 2021
BUPATI TULUNGAGUNG,
ttd.
MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 29 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH,
ttd.

Drs. SUKAJI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19640119 198508 1 003

Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2021 Nomor 1 Seri C

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPTEN TULUNGAGUNG NOMOR 341-11/2021

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


CATUR HERMONO, S.H., M.H
Pembina Tk. I
NIP. 19700418 199503 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2018 - 2023

I. PENJELASAN UMUM

Sistem perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian penting untuk mendukung keberhasilan sistem perencanaan pembangunan nasional. Dalam hal ini, peran kepala daerah sangat menentukan daerah yang di pimpinnya agar lebih baik lagi dan dapat meningkatkan pembangunan daerah kedepannya.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, pemerintah memerlukan perencanaan jangka menengah yakni lima tahunan dan jangka pendek pada setiap tahunnya yang substansinya saling berkaitan. Perencanaan yang baik akan menjadi arah bagi cita-cita pembangunan serta strategi dan cara pencapaiannya. Landasan hukum pelaksanaan perencanaan daerah harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ini disusun untuk memberikan landasan bagi berbagai bentuk perencanaan dari pusat hingga daerah dan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi. Selanjutnya landasan hukum perencanaan pembangunan daerah juga harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun perencanaan pembangunan.

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023 menjabarkan visi, misi dan program Bupati terpilih pada Tahun 2018. Untuk mencapai tujuan pembangunan daerah, maka visi, misi dan program tersebut dijabarkan melalui strategi pembangunan daerah berupa kebijakan dan program pembangunan, beserta kerangka pendanaan pembangunan serta kaidah pelaksanaannya.

Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih merupakan penjabaran dari janji-janji politik yang harus diterjemahkan pada dokumen RPJMD Kabupaten

Tulungagung Tahun 2018-2023. Namun demikian, selain menerjemahkan Visi dan Misi, dokumen RPJMD juga harus mengakomodir hasil evaluasi kinerja periode sebelumnya, isu-isu strategis serta potensi-potensi unggulan Kabupaten Tulungagung. Keseluruhan hal tersebut dianalisis berdasarkan ketentuan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Tulungagung 2018-2023 dilakukan dengan memperhatikan RPJM Nasional, RPJMD Provinsi Jawa Timur, kondisi lingkungan strategis di daerah, potensi daerah, isu strategis baik internasional, nasional maupun lokal, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya.

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 342 ayat (1) huruf c bahwasanya Perubahan RPJMD dapat dilakukan karena terjadi perubahan yang mendasar. Lebih lanjut pada ayat (3) dijelaskan bahwa perubahan mendasar tersebut mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah atau perubahan kebijakan nasional. Atas dasar tersebut maka dilakukan Perubahan RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023.

Mengacu pada pasal 342 ayat (1) dan (3), serta adanya perubahan asumsi makro dan krisis ekonomi global dimana salah satunya akibat terjadinya wabah pandemi Covid-19 memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian nasional dan regional, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi capaian target indikator kinerja utama dan target kinerja pembangunan daerah beserta anggarannya. Selain itu dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, menjadi dasar dilakukan Perubahan RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023.

Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023 ini selanjutnya harus dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan perencanaan tahunan dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Sehingga Seluruh Perangkat

Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung berkewajiban untuk melakukan revisi terhadap Renstra PD dengan menyesuaikan tujuan, sasaran, indikator kinerja, program beserta anggaran yang tertuang dalam dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023 untuk menjamin konsistensi dan kontinuitas program, kegiatan beserta pendanaan yang ditetapkan dan disahkan oleh Bupati.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

LAMPIRAN



**Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung
Nomor 11 Tahun 2021
tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah
Nomor 6 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023**



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karuniaNya, Dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023 dapat disusun. Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023 merupakan perubahan atas dokumen perencanaan pembangunan yang memuat Visi Misi Bupati-Wakil Bupati lima tahunan, dengan tujuan dan sasaran, strategi serta arah kebijakan, program pembangunan disertai pendanaan yang bersifat indikatif dan indikator pencapaian pembangunan.

Perubahan RPJMD Kabupaten Tulungagung ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana pemerintah daerah harus menyusun perencanaan pembangunan dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya. Perubahan RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023 merumuskan strategi pembangunan daerah berupa kebijakan dan program pembangunan, beserta kerangka pendanaan pembangunan serta kaidah pelaksanaannya dalam rentang tahun 2018-2023. Perubahan RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023 juga berpedoman pada RPJM Nasional, RPJMD Provinsi Jawa Timur, kondisi lingkungan strategis di daerah, potensi daerah, isu strategis baik internasional, nasional maupun lokal, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya. Dengan demikian, Perubahan RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023 ini menjadi pedoman/acuan bagi Perangkat Daerah (PD) dalam penyusunan perubahan Rencana Strategis (Renstra) PD 2018-2023, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Adanya keterbatasan sumber daya manusia maka penyusunan Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023 ini tidak luput dari kesalahan ataupun kekeliruan, sehingga sangat dibutuhkan saran dan masukan dari berbagai pihak untuk penyempurnaannya.

Terima kasih disampaikan kepada Pimpinan Perangkat Daerah dan stakeholder yang telah memberikan masukan/data dalam penyusunan dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023 ini. Semoga melalui Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023, Visi “Terwujudnya Masyarakat Tulungagung yang Sejahtera, Mandiri, Berdaya Saing dan Berakhlak Mulia” dapat tercapai dengan dukungan dari semua pihak. Aamiin.

Tulungagung, Desember 2021

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GRAFIK	xiv
DAFTAR GAMBAR	xix
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I-4
1.3 Hubungan Antar Dokumen	I-7
1.4 Maksud dan Tujuan	I-8
1.5 Sistematika Penulisan	I-9
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-2
2.1 Aspek Geografi dan Demografi.....	II-2
2.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi	II-3
2.1.2 Topografi	II-3
2.1.3 Hidrologi.....	II-5
2.1.4 Klimatologi	II-7
2.1.5 Penggunaan Lahan	II-7
2.1.6 Potensi Pengembangan Wilayah.....	II-8
2.1.7 Wilayah Rawan Bencana	II-16
2.1.8 Demografi	II-20
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-24
2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	II-24
2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial	II-36
2.2.3 Fokus Budaya dan Olahraga	II-41
2.3 Aspek Pelayanan Umum.....	II-43
2.3.1 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib	II-44
2.3.2 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan	II-151
2.3.3 Fokus Layanan Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan... ..	II-165

2.4	Aspek Daya Saing Daerah	II-171
2.4.1	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	II-171
2.4.2	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	II-172
2.4.3	Fokus Iklim Investasi.....	II-183
2.4.4	Fokus Sumberdaya Manusia	II-184
BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH		III-1
3.1	Kinerja Keuangan Masa Lalu	III-1
3.1.1	Kinerja Pelaksanaan APBD	III-2
	A. Pendapatan.....	III-5
	B. Belanja Daerah	III-7
	C. Pembiayaan Daerah.....	III-8
3.1.2	Neraca Daerah	III-10
3.2	Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	III-15
3.2.1	Proporsi Penggunaan Anggaran.....	III-15
3.2.2	Analisis Pembiayaan.....	III-17
3.3	Kerangka Pendanaan.....	III-20
3.3.1	Proyeksi Pendapatan dan Belanja.....	III-20
3.3.2	Penghitungan Kerangka Pendanaan	III-25
BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH		IV-1
4.1	Permasalahan Pembangunan	IV-2
4.2	Isu Strategis	IV-11
4.2.1	Isu Internasional	IV-11
4.2.2	Isu Nasional.....	IV-21
4.2.3	Isu Regional Provinsi Jawa Timur	IV-35
4.2.4	Telaah Keterkaitan Dokumen Pembangunan Daerah.....	IV-41
BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN		V-1
5.1	Visi.....	V-1
5.2	Misi	V-2
5.3	Tujuan dan Sasaran	V-4
BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		VI-1
6.1	Strategi.....	VI-1

6.2 Arah Kebijakan.....	VI-44
6.3 Agenda Pembangunan Kab. Tulungagung Tahun 2021-2023	VI-62
6.3.1 Gerakan Terpadu Berantas <i>Stunting</i> (Gerdu Beranting)	VI-62
6.3.2 Pengembangan Mall Pelayanan Publik (MPP)	VI-67
6.3.3 Tulungagung Percepat Penanggulangan Kemiskinan (Tulungagung Pepak)	VI-69
6.3.4 Pengembangan Pariwisata Kabupaten Tulungagung.....	VI-74
BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	VII-1
7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan	VII-1
7.2 Indikasi Rencana Program Prioritas.....	VII-4
BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH.....	VIII-1
8.1 Indikator Kinerja Utama	VIII-1
8.2 Indikator Kinerja Daerah	VIII-5
BAB IX PENUTUP	IX-1
9.1 Pedoman Transisi Tahun 2024 Merupakan Tahun Transisi Pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati	IX-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Daftar Kecamatan dan Desa/Kelurahan Di Kabupaten Tulungagung.....	II-3
Tabel 2. 2 Luas Lahan Kabupaten Tulungagung Berdasarkan Kemiringan Tanah.....	II-4
Tabel 2. 3 Sungai di Kabupaten Tulungagung.....	II-6
Tabel 2. 4 Kawasan Rawan Gerakan Tanah	II-16
Tabel 2. 5 Daerah/Desa Rawan Bencana di Kabupaten Tulungagung Tahun 2020	II-19
Tabel 2. 6 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Tulungagung Tahun 2020	II-21
Tabel 2. 7 Kepadatan Penduduk di Kab. Tulungagung Tahun 2020	II-21
Tabel 2. 8 Jumlah Penduduk Per Usia di Kabupaten Tulungagung Tahun 2020	II-22
Tabel 2. 9 Jumlah Penduduk Kabupaten Tulungagung Tahun 2020	II-23
Tabel 2. 10 Dinamika Kependudukan Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020	II-24
Tabel 2. 11 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020	II-24
Tabel 2. 12 Capaian Indikator Aspek Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020.....	II-25
Tabel 2. 13 Produk Domestik Regional Bruto Kab. Tulungagung Menurut Harga Berlaku 2016-2020 (dalam juta rupiah)	II-25
Tabel 2. 14 Produk Regional Bruto Kabupaten Tulungagung Menurut Harga Konstan 2016-2020 (dalam juta rupiah).....	II-27
Tabel 2. 15 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tulungagung Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020	II-30
Tabel 2. 16 Status Desa di Kabupaten Tulungagung 2020	II-33
Tabel 2. 17 Capaian Indikator Fokus Kesejahteraan Sosial Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020	II-36
Tabel 2. 18 Indikator Pembentuk IPM Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020	II-37
Tabel 2. 19 Jumlah Penduduk Miskin, Garis Kemiskinan, dan Persentase Penduduk Miskin Kab. Tulungagung Tahun 2016 – 2020	II-38
Tabel 2. 20 Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2020	II-39
Tabel 2. 21 Capaian Indikator Fokus Budaya dan Olahraga Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020	II-41
Tabel 2. 22 Seni Budaya yang Dilestarikan Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020	II-43
Tabel 2. 23 Jumlah Atlet di Kab. Tulungagung Tahun 2016-2020	II-43
Tabel 2. 24 Capaian Indikator Urusan Pendidikan Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020	II-44
Tabel 2. 25 Capaian Indikator TPB Urusan Pendidikan Kabupaten Tulungagung 2016-2020	II-49
Tabel 2. 26 Capaian Indikator Urusan Kesehatan Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 – 2020	II-51
Tabel 2. 27 Sarana dan Prasarana Kesehatan Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020	II-56
Tabel 2. 28 Variabel Penyakit Menular dan Tidak Menular Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020	II-56

Tabel 2. 29	Desa Lokus Penanganan Stunting Kabupaten Tulungagung Tahun 2021	II-57
Tabel 2. 30	Desa Lokus Penanganan Stunting Tahun 2022	II-58
Tabel 2. 31	Capaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2018-2020	II-58
Tabel 2. 32	Capaian Indikator TPB Urusan Kesehatan Kabupaten Tulungagung 2016-2020	II-63
Tabel 2. 33	Capaian Indikator Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020	II-68
Tabel 2. 34	Capaian Indikator TPB Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulungagung 2016-2020	II-71
Tabel 2. 35	Capaian Indikator Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kab. Tulungagung Tahun 2016-2020.....	II-72
Tabel 2. 36	Jumlah Perumahan Rakyat di Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020	II-75
Tabel 2. 37	Capaian Indikator TPB Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tulungagung 2016-2020.....	II-76
Tabel 2. 38	Capaian Indikator Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 - 2020	II-77
Tabel 2. 39	Capaian Indikator TPB Urusan Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat Kab. Tulungagung 2016-2020.....	II-78
Tabel 2. 40	Capaian Indikator Urusan Sosial Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020	II-81
Tabel 2. 41	Variabel Sosial Kabupaten Tulungagung Tahun 2020.....	II-86
Tabel 2. 42	Penanganan PPKS di Kab. Tulungagung Tahun 2016-2020 .	II-86
Tabel 2. 43	Capaian Indikator TPB Urusan Sosial Kabupaten Tulungagung 2016-2020	II-86
Tabel 2. 44	Capaian Indikator Urusan Ketenagakerjaan Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 - 2020	II-89
Tabel 2. 45	Capaian Indikator TPB Urusan Tenaga Kerja Kabupaten Tulungagung 2016-2020	II-93
Tabel 2. 46	Capaian Indikator Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020	II-95
Tabel 2. 47	Jumlah Perempuan di DPRD Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020	II-101
Tabel 2. 48	Persentase Menurunnya Kasus Kekerasan Anak di Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020	II-101
Tabel 2. 49	Capaian Indikator TPB Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tulungagung 2016-2020 ...	II-102
Tabel 2. 50	Data Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 - 2020	II-105
Tabel 2. 51	Capaian indikator Urusan Pangan Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020	II-106
Tabel 2. 52	Produksi Padi Sawah di Kab.Tulungagung Tahun 2020	II-107
Tabel 2. 53	Produksi Padi Gogoh di Kab. Tulungagung Tahun 2020	II-107
Tabel 2. 54	Data Produksi, Konsumsi dan Surplus Beras di Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020	II-108
Tabel 2. 55	Capaian Indikator TPB Urusan Pangan Kabupaten Tulungagung 2016-2020	II-111
Tabel 2. 56	Capaian Indikator Urusan Lingkungan Hidup di Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 - 2020	II-112

Tabel 2. 57	Capaian Indikator TPB Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung 2016-2020	II-117
Tabel 2. 58	Indikator Capaian Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil di Kab. Tulungagung Tahun 2016-2020	II-120
Tabel 2. 59	Capaian Indikator TPB Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung 2016-2020	II-122
Tabel 2. 60	Capaian Indikator Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Tulungagung Tahun 2017-2020	II-123
Tabel 2. 61	Capaian Indikator TPB Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tulungagung 2016-2020	II-124
Tabel 2. 62	Capaian Indikator Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020	II-125
Tabel 2. 63	Capaian Indikator TPB Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tulungagung 2016-2020..	II-128
Tabel 2. 64	Capaian Indikator Urusan Perhubungan Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 - 2020	II-130
Tabel 2. 65	Jumlah Penumpang Bus dan Keberadaan di Terminal Kabupaten Tulungagung Tahun 2015-2020	II-132
Tabel 2. 66	Capaian Indikator TPB Urusan Perhubungan Kabupaten Tulungagung 2016-2020	II-133
Tabel 2. 67	Capaian Indikator Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 – 2019.....	II-134
Tabel 2. 68	Capaian Indikator TPB Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung 2016-2020.....	II-137
Tabel 2. 69	Perkembangan Pembangunan Koperasi dan UMKM Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 – 2021	II-138
Tabel 2. 70	Persentase Pertumbuhan Omset Koperasi Dan Persentase Pertumbuhan Omset Usaha Mikro Kab. Tulungagung Tahun 2017-2021	II-140
Tabel 2. 71	Capaian Indikator TPB Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kabupaten Tulungagung 2016-2020	II-140
Tabel 2. 72	Capaian Indikator Urusan Penanaman Modal Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020	II-141
Tabel 2. 73	Capaian Indikator TPB Urusan Penanaman Modal Kabupaten Tulungagung 2016-2020	II-143
Tabel 2. 74	Capaian Indikator urusan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tulungagung tahun 2016-2020.....	II-144
Tabel 2. 75	Perkembangan Karang Taruna Kabupaten Tulungagung Tahun 2017.....	II-144
Tabel 2. 76	Capaian Indikator Urusan Statistik Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020	II-145
Tabel 2. 77	Capaian Indikator TPB Urusan Satatistik Kabupaten Tulungagung 2016-2020	II-146
Tabel 2. 78	Capaian Indikator Urusan Persandian Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020	II-147
Tabel 2. 79	Capaian Indikator Pembangunan Urusan Kebudayaan Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020	II-147
Tabel 2. 80	Jumlah Kunjungan Museum dan Cagar Budaya Tahun 2016 – 2020.....	II-149
Tabel 2. 81	Capaian Indikator Pembangunan Urusan Perpustakaan Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2019	II-150

Tabel 2. 82	Capaian Indikator Urusan Kearsipan Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2019	II-150
Tabel 2. 83	Perkembangan Pembangunan Urusan Pariwisata Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020	II-151
Tabel 2. 84	Tempat Wisata Kabupaten Tulungagung Tahun 2020.....	II-152
Tabel 2. 85	Capaian Indikator TPB Urusan Pariwisata Kabupaten Tulungagung 2016-2020	II-155
Tabel 2. 86	Potensi Sektor Pertanian Tanaman Pangan dan Tanaman Sayuran Kabupaten Tulungagung Tahun 2020	II-157
Tabel 2. 87	Potensi Sektor Pertanian Tanaman Buah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020	II-158
Tabel 2. 88	Capaian Indikator TPB Urusan Partanian Kabupaten Tulungagung 2016-2020	II-158
Tabel 2. 89	Perkembangan Ekspor Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020	II-160
Tabel 2. 90	Komoditas Perdagangan Antar Daerah di Kabupaten Tulungagung Tahun 2020	II-160
Tabel 2. 91	Capaian Indikator TPB Urusan Perdagangan Kabupaten Tulungagung 2016-2020	II-161
Tabel 2. 92	Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi Persentase Ekonomi Lapangan Usaha Industri Pengolahan Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020	II-163
Tabel 2. 93	Sentra Produk Industri di Kab. Tulungagung Tahun 2020 .	II-163
Tabel 2. 94	Capaian Indikator TPB Urusan Perindustrian Kabupaten Tulungagung 2016-2020	II-164
Tabel 2. 95	Indikator Bidang Pemerintahan Umum Tahun 2016-2020 .	II-165
Tabel 2. 96	Capaian Indikator TPB Urusan Bidang Pemerintah Umum Kabupaten Tulungagung 2016-2020.....	II-166
Tabel 2. 97	Indikator Bidang Penunjang Keuangan Tahun 2016-2020 .	II-167
Tabel 2. 98	Capaian Indikator TPB Urusan Penunjang Keuangan Kabupaten Tulungagung 2016-2020	II-168
Tabel 2. 99	Indikator Urusan Perencanaan Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020	II-168
Tabel 2. 100	Indikator Urusan Kelitbangan Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020	II-169
Tabel 2. 101	Indikator Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020	II-170
Tabel 2. 102	Rata-rata Pengeluaran perkapita Sebulan menurut Kelompok Komoditas di Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020 (Rupiah).....	II-172
Tabel 2. 103	Jumlah Perumahan Rakyat di Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2019	II-180
Tabel 2. 104	Panjang Jalan dalam Kondisi Baik di Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020	II-181
Tabel 2. 105	Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 - 2020	II-181
Tabel 2. 106	Jumlah Listrik Kilowatt (KWH) Pemakaian Menurut Pengguna di Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 - 2020	II-181
Tabel 2. 107	Jumlah Hotel/Akomodasi di Kabupaten Tulungagung.....	II-182
Tabel 2. 108	Kantor Bank Menurut Jenis di Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020	II-182

Tabel 2. 109 Perizinan dan Nilai Investasi Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020	II-183
Tabel 2. 110 Angka Kriminalitas di Kabupaten Tulungagung Tahun 2015-2019	II-184
Tabel 2. 111 Penerimaan Pajak Pusat Menurut Jenis Pajak (Rupiah) di Kabupaten Tulungagung Tahun 2015-2019	II-184
Tabel 2. 112 Rasio ketergantungan Kabupaten Tulungagung tahun 2018-2020	II-185
Tabel 2. 113 Pencari Kerja yang telah Disalurkan menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Tulungagung Tahun 2015-2019	II-185
Tabel 2. 114 Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 - 2020	II-186
Tabel 3. 1 Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2016-2020 Kabupaten Tulungagung	III-2
Tabel 3. 2 Perkembangan Pembiayaan Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020	III-9
Tabel 3. 3 Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020	III-12
Tabel 3. 4 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Tulungagung	III-15
Tabel 3. 5 Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Tulungagung.....	III-17
Tabel 3. 6 Defisit Riil Anggaran Kabupaten Tulungagung	III-18
Tabel 3. 7 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kab. Tulungagung.	III-19
Tabel 3. 8 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Tulungagung.....	III-19
Tabel 3. 9 Proyeksi Pendapatan dan Belanja Kab. Tulungagung	III-20
Tabel 3. 10 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2021 - 2023	III-25
Tabel 3. 11 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2021-2023	III-26
Tabel 4.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Urusan Pembangunan Daerah	IV-2
Tabel 4.2 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	IV-7
Tabel 4.3 Capaian KLHS Kabupaten Tulungagung	IV-18
Tabel 4.4 Arah Kebijakan Pembangunan Berbasis Kewilayahan.....	IV-24
Tabel 4.5 Strategi Pembangunan Berbasis Kewilayahan	IV-24
Tabel 4.6 Arah Kebijakan dan Strategi dalam Pembangunan Manusia ..	IV-25
Tabel 4.7 Arah Kebijakan dan Strategi Pemerintah dalam Upaya Membangun Budaya dan Karakter Bangsa	IV-27
Tabel 4.8 Arah Kebijakan dan Strategi dalam Penhembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	IV-28
Tabel 4.9 Arah Kebijakan dan Strategi Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	IV-30
Tabel 4.10 Fokus Kebijakan Memperkuat Stabilitas POLHUKHANKAM dan Transformasi Pelayanan Publik.....	IV-31
Tabel 4.11 Arah Kebijakan dan Strategi untuk Memperkuat Stabilitas POLHUKHANKAM dan Transformasi Pelayanan Publik.....	IV-31
Tabel 4.12 Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok RPJPD	IV-41

Tabel 4.13 Isu Strategis Prioritas KLHS Kabupaten Tulungagung	IV-49
Tabel 4.14 Telaah RPJMD Daerah Sekitar.....	IV-60
Tabel 4.15 Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis	IV-65
Tabel 4.16 Nilai Skor Kriteria Alternatif Isu Strategis.....	IV-66
Tabel 4.17 Kriteria Penilaian/Pembobotan Isu Strategis	IV-68
Tabel 4.18 Analisis SWOT	IV-68
Tabel 5. 1 Perumusan Visi RPJMD Kabupaten Tulungagung	V-1
Tabel 5. 2 Perumusan Misi RPJMD Kabupaten Tulungagung.....	V-2
Tabel 5. 3 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Tulungagung (Sebelum Perubahan)	V-8
Tabel 5. 4 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Tulungagung (Setelah Perubahan)	V-10
Tabel 6.1 Cascading Perencanaan Misi 1	VI-3
Tabel 6.2 Pemetaan SWOT pada Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas dan Akses Pendidik	VI-4
Tabel 6.3 Analisis SWOT dalam penetapan Strategi Pembangunan Daerah Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Pendidikan.....	VI-5
Tabel 6.4 Pemetaan SWOT pada sasaran 2: Meningkatnya Kualitas Kesehatan	VI-6
Tabel 6.5 Pemetaan SWOT Silang dalam Pembangunan Daerah Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas Kesehatan.....	VI-6
Tabel 6.6 Pemetaan SWOT pada sasaran 3: Meningkatnya Daya Beli Masyarakat Terhadap Komoditas Bahan Pokok.....	VI-7
Tabel 6.7 Pemetaan SWOT Silang dalam Pembangunan Daerah Sasaran 3: Meningkatnya Daya Beli Masyarakat Terhadap Komoditas Bahan Pokok	VI-8
Tabel 6.8 Pemetaan SWOT pada sasaran 4: Meningkatnya Keadilan dan Kesetaraan Gender	VI-8
Tabel 6.9 Pemetaan SWOT Silang dalam Pembangunan Daerah Sasaran 4: Meningkatnya Keadilan dan Kesetaraan Gender	VI-10
Tabel 6.10 Cascading Perencanaan Misi 2	VI-11
Tabel 6.11 Pemetaan SWOT pada sasaran 5: Meningkatnya Ekonomi Kerakyatan	VI-12
Tabel 6.12 Pemetaan SWOT Silang dalam Pembangunan Daerah	VI-13
Tabel 6.13 Pemetaan SWOT pada sasaran 6: Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	VI-14
Tabel 6.14 Pemetaan SWOT Silang dalam Pembangunan Daerah	VI-15
Tabel 6.15 Pemetaan SWOT pada Sasaran 7: Meningkatnya Realisasi Investasi	VI-16
Tabel 6.16 Pemetaan SWOT Silang dalam Pembangunan Daerah Sasaran 7: Meningkatnya Realisasi Investasi.....	VI-17
Tabel 6.17 Cascading Perencanaan Misi 3	VI-18
Tabel 6.18 Pemetaan SWOT pada Sasaran 8: Terjaminnya Perlindungan Sosial Masyarakat.....	VI-19
Tabel 6.19 Pemetaan SWOT Silang dalam Pembangunan Daerah sasaran 8: Terjaminnya Perlindungan Sosial Masyarakat	VI-20
Tabel 6.20 Pemetaan SWOT pada Sasaran 9: Meningkatnya Kesempatan Kerja Masyarakat	VI-20
Tabel 6.21 Pemetaan SWOT Silang dalam Pembangunan Daerah	VI-21
Tabel 6.22 Pemetaan SWOT pada Sasaran 10: Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Mewujudkan Pembangunan.....	VI-22

Tabel 6.23 Pemetaan SWOT Silang dalam Pembangunan Daerah Sasaran 10: Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Mewujudkan Pembangunan	VI-23
Tabel 6.24 Pemetaan SWOT pada Sasaran 11: Meningkatnya Rasa Aman di Masyarakat.....	VI-23
Tabel 6.25 Pemetaan SWOT Silang dalam Pembangunan Daerah	VI-24
Tabel 6.26 Pemetaan SWOT pada Sasaran 12: Meningkatnya Toleransi Pada Kehidupan Masyarakat	VI-25
Tabel 6.27 Pemetaan SWOT Silang dalam Pembangunan Daerah Sasaran 12: Meningkatnya Toleransi Pada Kehidupan Masyarakat ...	VI-25
Tabel 6.28 Cascading Perencanaan Misi 4	VI-26
Tabel 6.29 Pemetaan SWOT pada Sasaran 13: Meningkatnya Infrastruktur Dasar yang merata.....	VI-27
Tabel 6.30 Pemetaan SWOT Silang dalam Pembangunan Daerah Sasaran 13: Meningkatnya Infrastruktur Dasar yang merata	VI-29
Tabel 6.31 Pemetaan SWOT pada sasaran 14: Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Yang Menjamin Pembangunan Berkelanjutan	VI-30
Tabel 6.32 Pemetaan SWOT Silang dalam Pembangunan Daerah Sasaran 14: Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Yang Menjamin Pembangunan Berkelanjutan	VI-31
Tabel 6.33 Cascading Perencanaan Misi 5	VI-32
Tabel 6.34 Pemetaan SWOT pada Sasaran 15: Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	VI-33
Tabel 6.35 Pemetaan SWOT Silang dalam Pembangunan Daerah Sasaran 15: Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	VI-35
Tabel 6.36 Pemetaan SWOT pada Sasaran 16: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	VI-36
Tabel 6.37 Pemetaan SWOT Silang dalam Pembangunan Daerah Sasaran 16: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.....	VI-36
Tabel 6.38 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi	VI-37
Tabel 6.39 Fokus Pembangunan Lima Tahunan.....	VI-44
Tabel 6.40 Program Pembangunan Prioritas Daerah disertai Pagu Indikatif Kabupaten Tulungagung	VI-48
Tabel 6. 41 Prevalensi Stunting Balita Usia 0-59 Bulan Kabupaten Tulungagung Tahun 2015-2019	VI-62
Tabel 6. 42 Capaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2017-2019	VI-62
Tabel 6. 43 Peran OPD Lintas Sektor dalam Intervensi	VI-63
Tabel 6. 44 Penanganan Stunting.....	VI-64
Tabel 6. 45 Mall Pelayanan Publik	VI-68
Tabel 6. 46 Tulungagung PEPAK	VI-70
Tabel 6. 47 Pengembangan Pariwisata Kabupaten Tulungagung.....	VI-75
Tabel 7. 1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2019-2023 Kabupaten Tulungagung	VII-2
Tabel 7. 2 Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Tulungagung	VII-5
Tabel 8. 1 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023 (Sebelum Perubahan).....	VIII-1
Tabel 8. 2 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023 (Setelah Perubahan).....	VIII-3
Tabel 8. 3 Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023	VIII-6

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2. 1 Persentase Penggunaan Lahan di Kab. Tulungagung.....	II-8
Grafik 2. 2 Pertumbuhan Penduduk Menurut Tahun di Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 – 2020.....	II-20
Grafik 2. 3 Piramida Jumlah Penduduk Kabupaten Tulungagung Tahun 2020	II-23
Grafik 2. 4 Tiga Besar Pembentuk PDRB Kabupaten Tulungagung Tahun 2020	II-28
Grafik 2. 5 PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020.....	II-29
Grafik 2. 6 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur dan Nasional 2016-2020	II-29
Grafik 2. 7 Capaian Indikator Inflasi Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional 2016-2020	II-31
Grafik 2. 8 Indeks Gini Kabupaten Tulungagung 2016-2020	II-32
Grafik 2. 9 Indeks Desa Membangun Kab. Tulungagung Tahun 2020	II-34
Grafik 2. 10 Survey Kepuasan Masyarakat Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020	II-36
Grafik 2. 11 Indeks Pembangunan Manusia Nasional, Provinsi, dan Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020	II-37
Grafik 2. 12 Indeks Pembangunan Manusia Kab/Kota di Jawa Timur Tahun 2020	II-37
Grafik 2. 13 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2016-2020	II-38
Grafik 2. 14 Jumlah Pengangguran Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020	II-40
Grafik 2. 15 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020.....	II-40
Grafik 2. 16 Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Kesempatan Kerja Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020	II-41
Grafik 2. 17 Jumlah Seni Budaya yang Mendapatkan Penghargaan Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020	II-42
Grafik 2. 18 Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020	II-45
Grafik 2. 19 Angka Partisipasi Murni Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020	II-46
Grafik 2. 20 Angka Kelulusan Kab. Tulungagung Tahun 2016-2020	II-46
Grafik 2. 21 Angka Putus Sekolah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020	II-47
Grafik 2. 22 Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020.....	II-48
Grafik 2. 23 Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020	II-48
Grafik 2. 24 Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020.....	II-52
Grafik 2. 25 Cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020	II-53
Grafik 2. 26 Jumlah Puskesmas Kab. Tulungagung Tahun 2016-2020 ..	II-53
Grafik 2. 27 Angka Kematian Bayi Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020	II-54
Grafik 2. 28 Angka Harapan Hidup Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020	II-55

Grafik 2. 29 Angka Kematian Ibu Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020	II-55
Grafik 2. 30 Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar Pelayanan Antenatal (SPM) Kab. Tulungagung Tahun 2018-2020	II-60
Grafik 2. 31 Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar Pelayanan Persalinan Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2020	II-61
Grafik 2. 32 Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar Pelayanan Kesehatan Balita Kab. Tulungagung Tahun 2018-2020	II-61
Grafik 2. 33 Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut Sesuai Standar <i>Skrining</i> Kesehatan Usia Lanjut Kabupaten Tulungagung Tahun 2017-2020	II-62
Grafik 2. 34 Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV Sesuai Standar Pemeriksaan HIV Kab. Tulungagung Tahun 2017-2020	II-63
Grafik 2. 35 Persentase desa/kelurahan yang Mendapatkan Layanan Infrastruktur dan Lingkungan Berkualitas Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2020	II-69
Grafik 2. 36 Persentase Desa/Kelurahan Terlayani Sistem Perpipaan Air Minum Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2020	II-69
Grafik 2. 37 Persentase Desa/Kelurahan Dengan Jumlah Rumah Tangga Terlayani Sanitasi >80% Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020	II-70
Grafik 2. 38 Persentase Desa/Kelurahan Dengan Jalan Kondisi Baik > 80% Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020	II-70
Grafik 2. 39 Persentase Rumah Layak Huni Kabupaten Tulungagung Tahun 2017-2020	II-73
Grafik 2. 40 Persentase PSU yang diserahkan Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020	II-74
Grafik 2. 41 Persentase Peningkatan Penyelesaian Pelanggaran Perda/Perbup Kab. Tulungagung Tahun 2016-2020	II-77
Grafik 2. 42 Persentase Capaian Indikator urusan Ketertiban dan Keamanan Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020	II-78
Grafik 2. 43 Persentase Penyandang Disabilitas Telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti Kab. Tulungagung Tahun 2016-2020	II-82
Grafik 2. 44 Persentase Anak Telantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Di Luar Panti Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020	II-83
Grafik 2. 45 Persentase Lanjut Usia Telantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti Kab. Tulungagung 2016-2020	II-84
Grafik 2. 46 Persentase Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020	II-85
Grafik 2. 47 Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020	II-85
Grafik 2. 48 Jumlah Tenaga Kerja Yang Memenuhi Ketentuan Standar Kompetensi Kerja Kab. Tulungagung Tahun 2016-2020	II-90
Grafik 2. 49 Jumlah Pencari Kerja yang Ditempatkan Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020	II-90
Grafik 2. 50 Sengketa Pengusaha dan Buruh Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020	II-91

Grafik 2. 51	Persentase Transmigran Yang Ditempatkan Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020	II-92
Grafik 2. 52	Angka Partisipasi Angkatan Kerja Dan Tingkat Kesempatan Kerja Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020.....	II-92
Grafik 2. 53	Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020	II-96
Grafik 2. 54	Persentase Pelayanan Penyelesaian Tindak Kekerasan Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020	II-97
Grafik 2. 55	Layanan anak berkebutuhan khusus Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020.....	II-98
Grafik 2. 56	Persentase Pemenuhan Hak Anak Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020.....	II-99
Grafik 2. 57	Perkembangan Indikator Kinerja Daerah Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2016-2020	II-99
Grafik 2. 58	Perkembangan Indikator Kinerja Daerah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2016 - 2020	II-100
Grafik 2. 59	Luas Panen dan Produksi Padi Sawah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020.....	II-106
Grafik 2. 60	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020	II-109
Grafik 2. 61	Persentase Kelembagaan Distribusi Pangan, Usaha Pangan Dan Lumbung Pangan Masyarakat Dalam Peningkatan Ekonomi Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020	II-110
Grafik 2. 62	Skor PPH Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020.....	II-110
Grafik 2. 63	Mata Air Yang Mendapatkan Perlindungan Dengan Penanaman Pohon Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020	II-113
Grafik 2. 64	Jumlah Perusahaan Yang Menyusun Dokumen Lingkungan Kabupaten Tulungagung 2016-2020	II-114
Grafik 2. 65	Persentase Penanganan Kasus Pencemaran Lingkungan Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020	II-114
Grafik 2. 66	Keberadaan keanekaragaman hayati yang terkelola Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020	II-115
Grafik 2. 67	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020.....	II-116
Grafik 2. 68	Rasio Penduduk Ber-KTP Per Satuan Penduduk Wajib KTP Kabupaten Tulungagung Tahun 2015-2020	II-120
Grafik 2. 69	Jumlah bayi berakta kelahiran Kabupaten Tulungagung Tahun 2015-2020	II-121
Grafik 2. 70	Jumlah Pemohon Kartu Keluarga Kabupaten Tulungagung Tahun 2015-2020.....	II-121
Grafik 2. 71	Jumlah Penerbitan Kartu Identitas Anak Kabupaten Tulungagung Tahun 2015-2020.....	II-122
Grafik 2. 72	Jumlah Desa Tertinggal Kab. Tulungagung 2016-2020	II-124
Grafik 2. 73	Angka Kelahiran Total Kab. Tulungagung 2016-2020.....	II-126
Grafik 2. 74	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020.....	II-127
Grafik 2. 75	Persentase Unmet Need KB	II-127
Grafik 2. 76	Persentase Usia Kawin Pertama (UKP) dibawah 20 Tahun Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020	II-128

Grafik 2. 77 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perhubungan Kab. Tulungagung Tahun 2016-2020.....	II-131
Grafik 2. 78 Persentase Angkutan Yang Melayani Masyarakat Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2020.....	II-131
Grafik 2. 79 Persentase Informasi Yang Dipublikasikan Dan Persentase Implementasi TIK Kabupaten Tulungagung Tahun 2017-2019	II-134
Grafik 2. 80 Nilai Investasi PMA/PMDN Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020	II-142
Grafik 2. 81 Izin Usaha Yang Diterbitkan Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020	II-143
Grafik 2. 82 Persentase Cagar Budaya Yang Dilestarikan Dan Dikelola Kabupaten Tulungagung 2016-2020	II-148
Grafik 2. 83 Jumlah seni budaya yang mendapatkan penghargaan Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020	II-149
Grafik 3. 1 Realisasi Pendapatan Kab. Tulungagung Tahun 2016-2020 ..	III-5
Grafik 3. 2 Persentase Komponen Pendapatan Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020.....	III-5
Grafik 3. 3 Persentase Komponen Pendapatan Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020.....	III-6
Grafik 3. 4 Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020	III-7
Grafik 4. 1 Rekapitulasi Pencapaian Indikator TPB Kab. Tulungagung..	IV-19
Grafik 4. 2 Pertumbuhan PDB Beberapa Lapangan Usaha (%).....	IV-22

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Keterkaitan Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	I-8
Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran Potensi Pengembangan Kawasan Budidaya	II-2
Gambar 2. 2 Peta Batas Administrasi Kabupaten Tulungagung	II-5
Gambar 2. 3 Peta Zona Gerakan Tanah Kabupaten Tulungagung	II-17
Gambar 2. 4 Pertimbangan dalam Penentuan Sempadan Patahan Aktif Kabupaten Tulungagung	II-18
Gambar 2. 5 Peta Kawasan Rawan Gempa Bumi Kab.Tulungagung	II-18
Gambar 2. 6 Peta Kawasan Rawan Bencana Kabupaten Tulungagung ...	II-20
Gambar 2. 7 Kawasan Produktif Kabupaten Tulungagung	II-173
Gambar 2. 8 Kawasan Perkotaan Kabupaten Tulungagung	II-174
Gambar 2. 9 Kawasan Resiko Banjir Kabupaten Tulungagung	II-176
Gambar 2. 10 Kawasan Resiko Banjir Bandang	II-177
Gambar 2. 11 Kawasan Resiko Gempa Bumi	II-177
Gambar 2. 12 Kawasan Resiko Tsunami	II-178
Gambar 2. 13 Kawasan Resiko Tanah Longsor	II-178
Gambar 2. 14 Kawasan Resiko Tanah Kekeringan	II-179
Gambar 2. 15 Kawasan Resiko Kebakaran Hutan dan Lahan	II-179
Gambar 4. 1 Proses Telaah Isu Strategis	IV-1
Gambar 4. 2 Pilar dan tujuan pembangunan berkelanjutan menurut Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia	IV-17
Gambar 4. 3 Titik Tolak Perubahan Industri	IV-19
Gambar 4. 4 Isu Strategis KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Tulungagung	IV-60
Gambar 5. 1 Misi Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023	V-2
Gambar 5. 2 Pohon Kinerja Pencapaian Misi 1	V-4
Gambar 5. 3 Pohon Kinerja Pencapaian Misi 2	V-5
Gambar 5. 4 Pohon Kinerja Pencapaian Misi 3	V-6
Gambar 5. 5 Pohon Kinerja Pencapaian Misi 4	V-6
Gambar 5. 6 Pohon Kinerja Pencapaian Misi 5	V-7
Gambar 6.1 Keterkaitan Sasaran dengan Strategi	VI-1
Gambar 6. 2 Gerakan Terpadu Brantas Stunting	VI-62
Gambar 6. 3 Mall Pelayanan Publik	VI-67
Gambar 6. 4 Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (PEPAK)	VI-69
Gambar 6. 5 Penguatan Ekonomi Lokal	VI-70
Gambar 6. 6 Pengembangan Pariwisata Tulungagung	VI-74

BAB I

.....

Pendahuluan



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Tulungagung adalah salah satu kabupaten di selatan Provinsi Jawa Timur yang memiliki potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan letak geografis yang strategis guna mendukung perkembangan pembangunannya sendiri maupun kabupaten sekitarnya. Hal ini berarti Kabupaten Tulungagung mempunyai potensi besar serta tantangan dan permasalahan yang lebih kompleks dibandingkan daerah sekitarnya. Untuk mengembangkan potensi-potensi dan menangani tantangan serta permasalahan tersebut, diperlukan suatu perencanaan pembangunan yang terarah, terpadu, dan menyeluruh dengan memperhatikan 5 (lima) pilar pembangunan yaitu pilar pembangunan manusia, ekonomi, sosial, infrastruktur dan aparatur atau birokrasi.

Sistem perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian penting untuk mendukung keberhasilan sistem perencanaan pembangunan nasional. Dalam hal ini, peran kepala daerah sangat menentukan daerah yang di pimpinnya agar lebih baik lagi dan dapat meningkatkan pembangunan daerah kedepannya.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, pemerintah memerlukan perencanaan jangka menengah yakni lima tahunan dan jangka pendek pada setiap tahunnya yang substansinya saling berkaitan. Perencanaan yang baik akan menjadi arah bagi cita-cita pembangunan serta strategi dan cara pencapaiannya. Landasan hukum pelaksanaan perencanaan daerah harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ini disusun untuk memberikan landasan bagi berbagai bentuk perencanaan dari pusat hingga daerah dan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi. Selanjutnya landasan hukum perencanaan pembangunan daerah juga harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun perencanaan pembangunan.

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023 adalah dokumen perubahan perencanaan pembangunan daerah 5 (lima) tahunan yang menjabarkan visi, misi dan program Bupati terpilih pada Tahun 2018. Untuk mencapai tujuan pembangunan daerah, maka visi, misi dan program tersebut dijabarkan melalui strategi pembangunan daerah berupa kebijakan dan program pembangunan, beserta kerangka pendanaan pembangunan serta kaidah pelaksanaannya.

Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih merupakan penjabaran dari janji-janji politik yang harus diterjemahkan pada dokumen RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023. Namun demikian, selain menerjemahkan Visi dan Misi, dokumen RPJMD juga harus mengakomodir hasil evaluasi kinerja periode sebelumnya, isu-isu strategis serta potensi-potensi unggulan

Kabupaten Tulungagung. Keseluruhan hal tersebut dianalisis berdasarkan ketentuan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Tulungagung 2018-2023 dilakukan dengan memperhatikan RPJM Nasional, RPJMD Provinsi Jawa Timur, kondisi lingkungan strategis di daerah, potensi daerah, isu strategis baik internasional, nasional maupun lokal, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya. Penyusunan dokumen perubahan RPJMD Kabupaten Tulungagung 2018-2023 dilandasi atas dasar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 342 ayat (1) huruf c, Perubahan RPJMD dapat dilakukan karena terjadi perubahan yang mendasar. Lebih lanjut pada ayat (3) dijelaskan bahwa perubahan mendasar tersebut mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah atau perubahan kebijakan nasional. Dengan demikian mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 342 ayat (1) huruf c, maka faktor-faktor penyebab dilakukannya perubahan RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

Pertama, berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang bertujuan untuk menyediakan informasi secara berjenjang melalui penggolongan, pemberian kode dan daftar penamaan yang akan digunakan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan keuangan daerah. Adapun informasi tersebut, memiliki maksud sebagai berikut:

- 1) Membantu kepala daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan dan anggaran daerah serta laporan pengelolaan keuangan daerah;
- 2) Membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah;
- 3) Membantu kepala daerah dalam melakukan evaluasi kinerja dan keuangan daerah;
- 4) Menyediakan statistik keuangan pemerintah daerah;
- 5) Mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat;
- 6) Mendukung penyelenggaraan sistem informasi pemerintahan daerah; dan
- 7) Melakukan evaluasi perencanaan pembangunan daerah dan pengelolaan keuangan daerah.

Kedua, Menjelaskan adanya penyempurnaan permendagri 90 melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Menteri Dalam Negeri melakukan pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur

berdasarkan usulan pemerintah daerah, perubahan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan.

Ketiga, Telaah Peraturan Presiden Republik Indonesia 80 tentang Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan.

Keempat, Telaah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 terkait dengan kebijakan pembangunan kewilayahan diarahkan pada:

- 1) Peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat melalui peningkatan kompetensi dan pemerataan distribusi tenaga kesehatan dan pendidikan, pengembangan kurikulum pendidikan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja serta peningkatan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dan pendidikan.
- 2) Pengembangan dan peningkatan sektor unggulan dalam mengembangkan perekonomian yang produktif, efisien dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan produktivitas sektor unggulan, peningkatan nilai tambah sektor primer dengan hilirisasi produk unggulan, peningkatan kerjasama antardaerah dalam pengembangan kawasan, penyederhanaan regulasi untuk kemudahan investasi, peningkatan akses masyarakat terhadap sumber pendanaan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin.
- 3) Pemerataan pembangunan antarwilayah melalui peningkatan layanan prasarana transportasi dalam rangka mendukung sistem logistik peningkatan kualitas lingkungan permukiman, peningkatan pengelolaan limbah, pengoptimalan dukungan pendanaan pembangunan melalui kemitraan *stakeholder*, dan peningkatan konektivitas ekonomi.

Kelima, berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Melalui perubahan regulasi ini, maka berdampak pula terhadap perubahan klasifikasi belanja dalam struktur APBD.

Keenam, berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perangkat Daerah sebagai perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.

Ketujuh, adanya Enam (6) Arahkan Presiden dalam Rangka Membendung Covid-19 yaitu:

- 1) Pengujian sampel secara masif harus ditingkatkan sehingga tingkat pengujian sampel yang masif harus dilakukan dengan pelacakan yang agresif serta dengan diikuti isolasi yang ketat;
- 2) Memanfaatkan teknologi informasi berupa aplikasi kesehatan atau *telemedicine*;
- 3) Melakukan komunikasi secara efektif dan transparan kepada publik dengan detil dan baik;
- 4) Menegakkan hukum dengan bantuan aparat negara, sehingga masyarakat memiliki kedisiplinan yang kuat dalam rangka memutus rantai penyebaran Covid-19;

- 5) Menjaga kelancaran distribusi logistik yang dibutuhkan masyarakat dalam kebijakan tanggap darurat, baik kelancaran logistik dari pusat ke daerah maupun dari gudang-gudang logistik ke daerah; dan
- 6) Melaksanakan stimulus ekonomi secara tepat sasaran dalam rangka pemutusan rantai penyebaran covid-19.

Penetapan dokumen perencanaan Kabupaten Tulungagung sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal berupa kondisi sebelum dan sesudah ditetapkan sehingga selaras dengan perkembangan zaman. Hal ini tidak terlepas dari adanya pandemi Covid-19 yang belum berakhir yang menuntut perhatian lebih dari pemerintah untuk melakukan upaya penanganan pasca Covid-19. Upaya yang dilakukan diantaranya adalah pemulihan sektor ekonomi, kerawanan sosial dan sektor pendidikan dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran yang dimiliki Kabupaten Tulungagung.

Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023 ini selanjutnya harus dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan perencanaan tahunan dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Sehingga Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung berkewajiban untuk melakukan revisi terhadap Renstra PD dengan menyesuaikan tujuan, sasaran, indikator kinerja, program beserta anggaran yang tertuang dalam dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023 untuk menjamin konsistensi dan kontinuitas program, kegiatan beserta pendanaan yang ditetapkan dan disahkan oleh Bupati.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dalam penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Tulungagung ini, terdapat sejumlah peraturan yang berskala Nasional maupun lokal yang secara langsung terkait dengan penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023 digunakan sebagai rujukan yaitu:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
17. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo – Lamongan, Kawasan Bromo – Tengger – Semeru serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
20. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1447 Tahun 2019);

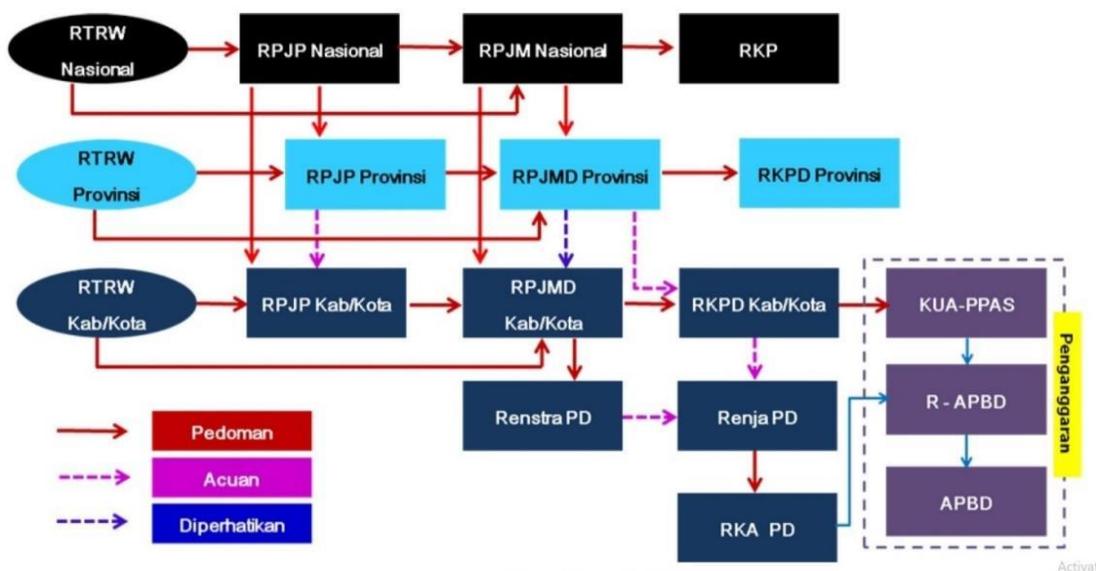
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15);
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 SeriD);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2008 Nomor 1 Seri E);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 Nomor 1 Seri E);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2019);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 Nomor 19 Seri E);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 1 Seri C);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, RPJMD merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. Sehingga RPJMD harus tersinkronisasi dan sinergis antar daerah, antar waktu, antar ruang dan

antar fungsi pemerintah serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.

RPJMD sebagai dokumen perencanaan lima tahunan merupakan penjabaran RPJPD yang memiliki kurun waktu 20 tahun, berpedoman RTRW Kabupaten Tulungagung dan KLHS Tulungagung, serta memperhatikan RPJMN dan RPJMD Provinsi Jawa Timur. RPJMD selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan perencanaan tahunan dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Pemerintah Kabupaten Tulungagung. Hubungan antar dokumen perencanaan dapat dilihat melalui Gambar 1.1.



Gambar 1. 1 Keterkaitan Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023 adalah menjabarkan visi, misi, dan program Bupati, sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bagi seluruh pihak baik pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan pihak-pihak terkait lainnya untuk mewujudkan visi pembangunan. Selain itu, maksud dari penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023 merupakan bentuk respon kebijakan terhadap perubahan asumsi makro dan krisis ekonomi global dimana salah satunya akibat terjadinya wabah *pandemic* Covid-19 serta diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 sebagai penyempurnaan keputusan menteri dalam negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menjadi dasar dilakukan Perubahan RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023.

Berpijak dari maksud tersebut, maka tujuan penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023, sebagai berikut:

1. Memberikan pedoman bagi PD dalam melakukan reuiu Renstra PD;

2. Memberikan pedoman penyusunan RKPD setiap tahun selama Periode RPJMD;
3. Menjadi tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dibawah kepemimpinan bupati;
4. Menjadi instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam mengendalikan penyelenggaraan pembangunan daerah dan menyalurkan aspirasi masyarakat sesuai dengan arah kebijakan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD;
5. Mewujudkan terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antardaerah, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah; dan
6. menjabarkan visi dan misi kepala daerah ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023 yang sekaligus memuat keterkaitan antar bab sepenuhnya mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang terdiri atas 9 (sembilan) Bab, dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini berisi tentang gambaran umum penyusunan Perubahan RPJMD yang terdiri dari Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Hubungan antar Dokumen, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

Bab II : Gambaran Umum Kondisi Daerah

Pada Bab ini menjelaskan dan menyajikan Gambaran Umum Kondisi Daerah selama beberapa tahun terakhir, yang meliputi Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum dan Aspek Daya Saing Daerah.

Bab III : Gambaran Keuangan Daerah

Bab ini menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah terdiri dari Kinerja Keuangan Masa Lalu, Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu dan Kerangka Pendanaan 5 (lima) tahun.

Bab IV : Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah

Bab ini berisi penyajian isu-isu strategis meliputi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis yang memperhatikan isu/kebijakan internasional, nasional, regional, dan daerah sekitar sebagai pijakan dalam merumuskan isu strategis pembangunan Kabupaten Tulungagung.

Bab V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi penyajian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah.

Bab VI : Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah

Bab ini berisi strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih untuk

menggambarkan fokus pembangunan setiap tahun selama 5 (lima) tahun.

Bab VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

Bab ini menguraikan hubungan urusan pemerintah dengan PD terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab PD. Pada bab ini, disajikan pula pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan.

Bab VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Bab ini menguraikan indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah pada akhir periode masa jabatan.

Bab IX : Penutup

Bab ini menguraikan tentang pedoman transisi serta kaidah pelaksanaan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulungagung.

BAB II



Gambaran Umum Kondisi Daerah



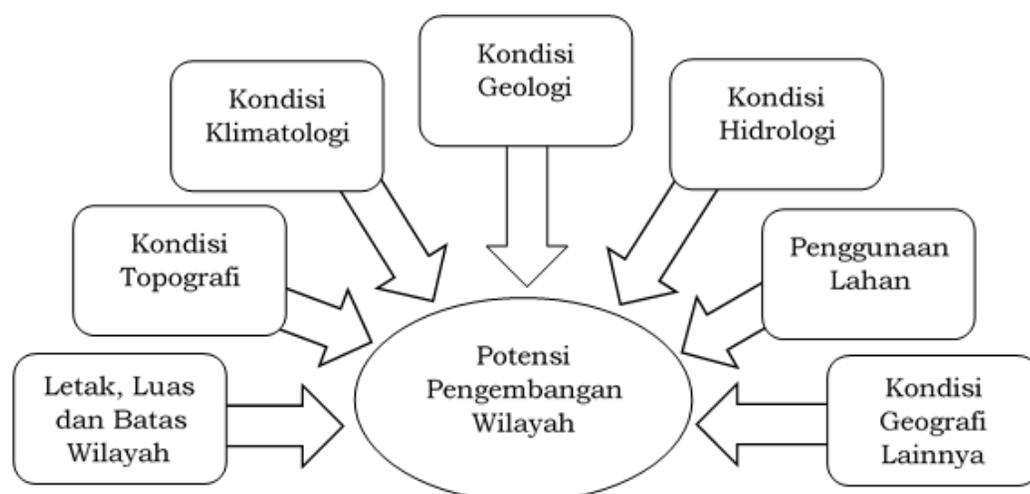
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Gambaran umum kondisi daerah memberikan informasi yang relevan dan penting terkait kondisi daerah Kabupaten Tulungagung. Informasi yang relevan dan penting tersebut selaras dan mendukung permasalahan pembangunan daerah, isu strategis, visi/misi Kabupaten Tulungagung, tujuan, sasaran pokok dan kebutuhan perumusan arah kebijakan. Hal ini berarti gambaran umum kondisi daerah merupakan bagian yang sangat penting untuk menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis. Gambaran umum kondisi daerah meliputi aspek geografis dan demografis serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung.

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

Aspek geografi dan aspek demografi merupakan hal yang sangat penting dalam pembangunan suatu daerah. Analisis pada aspek geografi Kabupaten Tulungagung perlu dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah dan kerentanan wilayah terhadap bencana. Sedangkan aspek demografi, menggambarkan kondisi penduduk secara keseluruhan atau kelompok dalam waktu tertentu. Aspek demografi di Kabupaten Tulungagung dapat digambarkan melalui kondisi demografi seperti ukuran, struktur dan distribusi penduduk serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Analisis kependudukan dapat merujuk pada populasi masyarakat secara keseluruhan atau kelompok tertentu yang didasarkan kriteria seperti pendidikan, kewarganegaraan, agama, atau etnis tertentu.

Adapun kerangka pemikiran hubungan antara kondisi geografi daerah dengan potensi pengembangan kawasan budidaya adalah sebagai berikut.



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran Potensi Pengembangan Kawasan Budidaya

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

2.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Tulungagung terletak kurang lebih 154 km ke arah Barat Daya dari Kota Surabaya. Kondisi Kabupaten Tulungagung jika dilihat dari aspek fisik wilayah dapat diidentifikasi atas beberapa kriteria fisik. Kriteria fisik tersebut yang akan menentukan ciri-ciri wilayah yang ada diberbagai kawasan Kabupaten Tulungagung. Secara geografis Kabupaten Tulungagung terletak diantara 111°43' – 112°07' Bujur Timur dan 7°51' – 8°18' Lintang Selatan, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Kediri.
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Blitar.
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia.
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Trenggalek.

Kabupaten Tulungagung memiliki luas 1.055,65 km² yang terbagi kedalam 19 kecamatan dan 271 desa/kelurahan. Kecamatan Gondang merupakan kecamatan yang memiliki desa terbanyak yaitu 20 desa dengan luas 44,02 km² sedangkan Kecamatan Tanggunggunung dengan 7 desa merupakan kecamatan yang paling sedikit jumlah desanya namun dengan luas wilayah yang paling besar, mencapai 117,73 km², dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Daftar Kecamatan dan Desa/Kelurahan Di Kab. Tulungagung

No	Kecamatan	Desa / Kelurahan	Luas Wilayah (km ²)
1.	Besuki	10	82,16
2.	Bandung	18	41,96
3.	Pakel	19	36,06
4.	Campurdarat	9	39,56
5.	Tanggunggunung	7	117,73
6.	Kalidawir	17	97,81
7.	Pucanglaban	9	82,94
8.	Rejotangan	16	66,49
9.	Ngunut	18	37,70
10.	Sumbergempol	17	39,28
11.	Boyolangu	17	38,44
12.	Tulungagung	14	13,67
13.	Kedungwaru	19	29,74
14.	Ngantru	13	37,03
15.	Karangrejo	13	35,54
16.	Kauman	13	30,84
17.	Gondang	20	44,02
18.	Pagerwojo	11	88,22
19.	Sendang	11	96,46
Jumlah		271	1.055,65

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, 2021

2.1.2 Topografi

Luas Wilayah Kabupaten Tulungagung secara keseluruhan sebesar 105.565 ha dengan kondisi topografi bervariasi, yang meliputi:

- a. Kawasan seluas ± 35.353,72 ha atau 33,49% dari wilayah Tulungagung berketinggian 0-100 meter diatas permukaan air laut.

- b. Kawasan seluas ± 58.926,38 Ha atau 55,82% dari wilayah Tulungagung berketinggian 100-500 meter diatas permukaan air laut.
- c. Kawasan seluas ± 8.096,84 Ha atau 7,67% dari wilayah Tulungagung berketinggian 500-1.000 meter diatas permukaan air laut.
- d. Kawasan seluas ± 3.188,06 Ha atau 3,02% dari wilayah Tulungagung berketinggian lebih dari 1.000 meter diatas permukaan air laut.

Kabupaten Tulungagung memiliki wilayah dataran rendah, sedang, dan tinggi dengan konfigurasi datar, perbukitan, dan pegunungan. Dataran rendah merupakan daerah dengan ketinggian di bawah 500 m dari permukaan laut. Daerah ini hampir di semua wilayah Kabupaten Tulungagung, kecuali di Kecamatan Pagerwojo dan Kecamatan Sendang yang dataran rendahnya hanya 4 desa. Dataran sedang dengan ketinggian 500–700 m dari permukaan laut meliputi Kecamatan Pagerwojo sebanyak 6 desa dan Kecamatan Sendang 5 desa. Dataran tinggi dengan ketinggian di atas 700 m dari permukaan laut terdiri dari 1 desa di Kecamatan Pagerwojo dan 2 desa di Kecamatan Sendang.

Secara garis besar wilayah Kabupaten Tulungagung ini dapat dikelompokkan ke dalam tiga bagian, yakni:

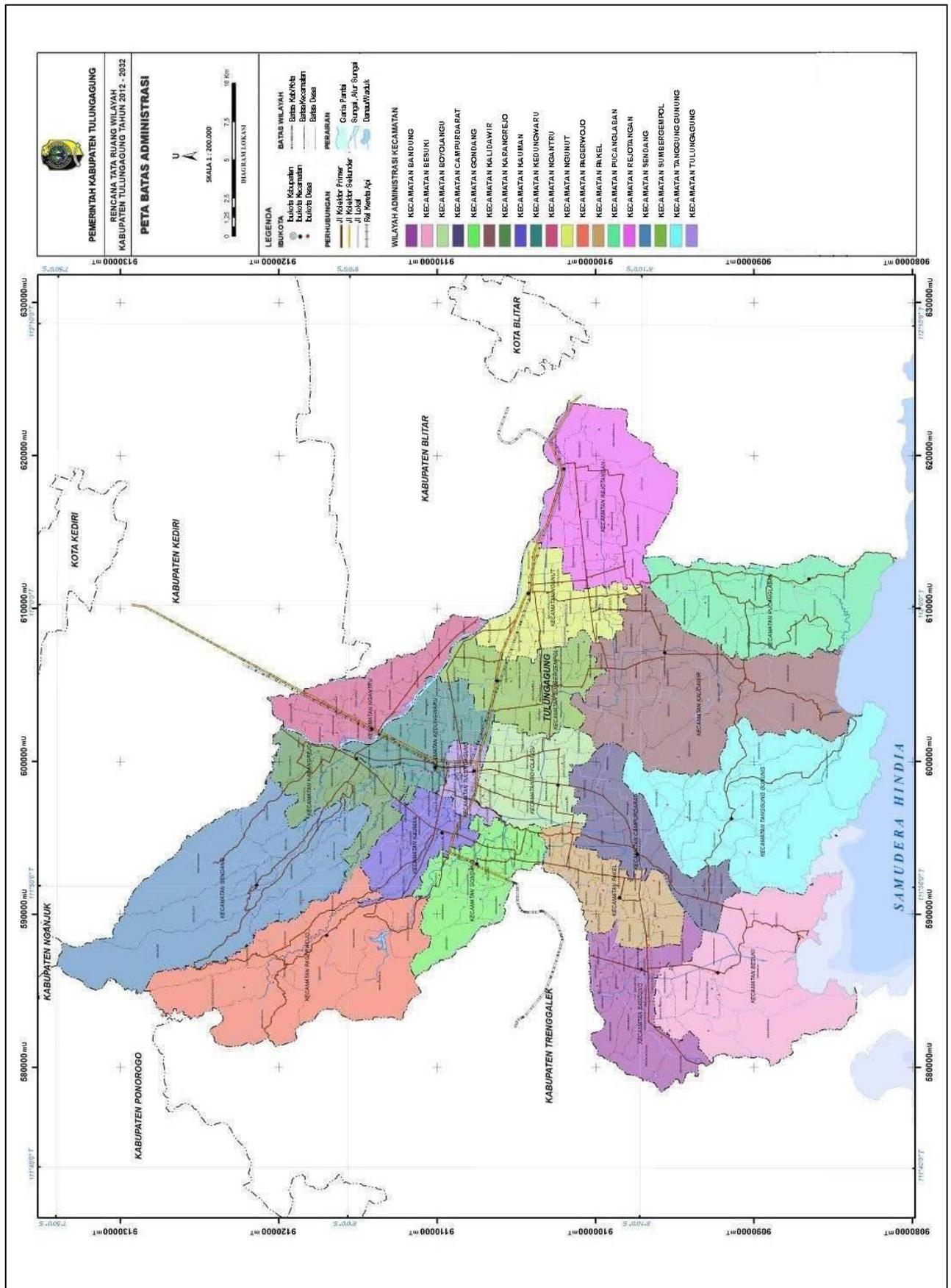
- a. Bagian Utara (Barat Daya) merupakan daerah pegunungan yang relatif subur, yang merupakan bagian tenggara dari pegunungan Wilis; mencakup areal seluas ± 25%;
- b. Bagian Selatan merupakan daerah pegunungan yang relatif tandus, namun kaya akan potensi hutan dan bahan tambang, yang merupakan bagian dari pegunungan kapur selatan Jawa Timur; mencakup areal seluas ± 40 %;
- c. Bagian Tengah merupakan dataran rendah yang subur, yang dilalui oleh Sungai Brantas dan Kali Ngrowo (Parit Agung) beserta cabang-cabangnya, meliputi areal seluas ± 35 %.

Secara umum luasan yang merupakan dataran rendah berada di tengah kabupaten, sedangkan dataran tinggi dengan kondisi tanah bergelombang ataupun bukit/pegunungan berada di sebelah barat laut dan selatan. Kemiringan tanah dapat dinyatakan dalam bentuk persentase (%). Pernyataan untuk setiap 1% kemiringan tanah (kelerengan) berarti terdapat perbedaan tinggi sebesar 1 meter dari dua tempat berjarak 100 meter. Kabupaten Tulungagung memiliki kelas kelerengan yang beragam. Jika diklasifikasi, setidaknya terdapat enam kelas wilayah kemiringan tanah, sebagaimana terdapat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 2 Luas Lahan Kab. Tulungagung Berdasarkan Kemiringan Tanah

No	Wilayah	Kelerengan (%)	Luasan (hektar)	Persentase
I	Datar	0 – 2	43.070,52	40,8
II	Datar – landai	2 – 8	5.172,69	4,9
III	Landai – berombak	8 – 15	7.600,68	7,2
IV	Berombak – bergelombang lemah	15 – 25	14.567,96	13,8
V	Bergelombang lemah – kuat	25 – 40	21.113,00	20,0
VI	Bergelombang kuat	> 40	14.040,15	13,3

Sumber: RTRW Kabupaten Tulungagung, 2012-2032



Gambar 2. 2 Peta Batas Administrasi Kabupaten Tulungagung

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, 2021

2.1.3 Hidrologi

Di wilayah Kabupaten Tulungagung terdapat beberapa sungai yang memiliki aliran sepanjang tahun. Beberapa sungai tersebut memiliki daerah

pengaliran sungai yang cukup luas dan membentuk suatu Daerah Aliran Sungai (DAS). Kabupaten Tulungagung termasuk dalam DAS Brantas dimana terdapat sungai - sungai kecil yang bermuara di Kali Brantas. Selain dialiri oleh sungai - sungai tersebut diatas keadaan hidrologi juga ditentukan oleh adanya waduk, dam, mata air, pompa air dan sumur bor. Air permukaan merupakan air tawar yang terdapat pada sungai, saluran, danau/telaga, rawa, empang dan sebagainya.

Tabel 2. 3 Sungai di Kabupaten Tulungagung

No	Kecamatan	Nama Sungai	Panjang (km)
1	Besuki	Keboireng	10,00
		Karangtuwo (batas wilayah)	-
		Parit Raya	3,00
		Parit Agung	1,80
2	Bandung	Parit Agung	3,30
		Karangtuwo	18,00
		Parit Raya	7,00
3	Pakel	Parit Agung	4,40
		Ngasinan Lama	5,50
4	Campurdarat	Tlogo Buret	5,50
		Parit Agung	7,50
5	Tanggunggunung	-	-
6	Kalidawir	Kalidawir	20,50
7	Pucanglaban	-	-
8	Rejotangan	Rowo Remang	15,70
		Kali Brantas	8,50
		Kali Kandung	6,15
9	Ngunut	Kali Brantas	7,15
10	Sumbergempol	Kali Brantas	2,75
		Kali Dawir	7,10
11	Boyolangu	Kali Dawir	9,40
		Parit Agung	6,80
12	Tulungagung	Parit Agung	7,00
		Kali jenes	3,50
		Song	1,50
13	Kedungwaru	Kali Brantas (batas wilayah)	-
		Ngrowo	6,00
		Parit Agung	200
		Wudu	2,50
		Kali Jenes	2,50
14	Ngantru	Kali Brantas	18,85
		Boto	33,00
15	Karangrejo	Kali Brantas (batas wilayah)	-
		Catut	6,00
		Wantur	1,50
		Babaan	56,00
		Bajal Picisan	7,25
		Wudu (batas wilayah)	-
16	Kauman	Song	10,70

No	Kecamatan	Nama Sungai	Panjang (km)
		Wudu	10,90
17	Gondang	Ngasinan Kanal	4,25
		Blendis	14,00
		Sengon	12,55
		Gondang	11,40
18	Pagerwojo	Song	30,30
		Gondang /Bodeng	18,60
19	Sendang	Babaan	17,40
		Bajal Picisan	7,25
		Klantur	10,50
		Catut	6,00

Sumber: Kabupaten Tulungagung Dalam Angka Tahun 2021

2.1.4 Klimatologi

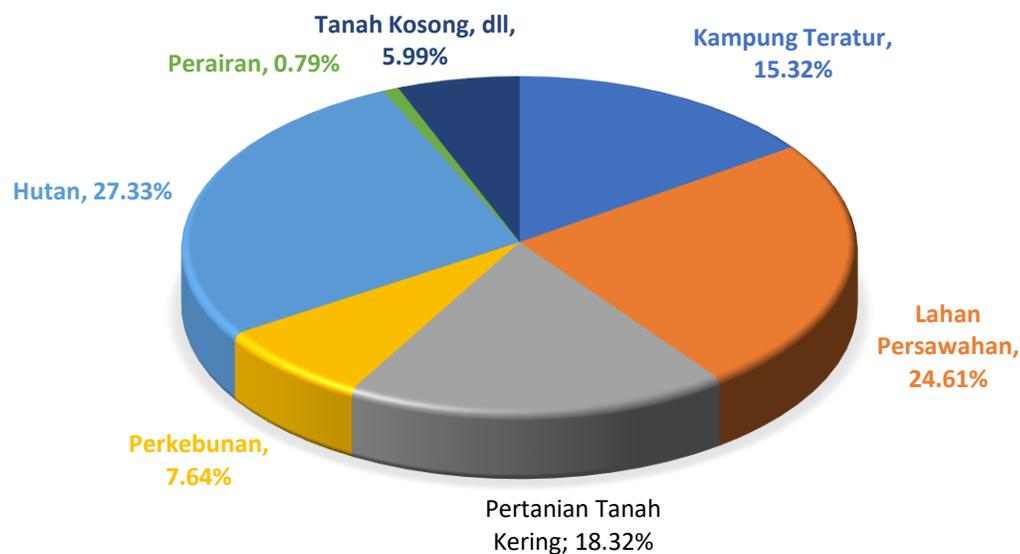
Tipe iklim Kabupaten Tulungagung secara umum termasuk tipe iklim hujan tropis bermusim. Tipe hujan dicirikan oleh turunnya hujan bermusim (bulan Nopember sampai April), dan adanya musim kemarau pada bulan Mei sampai Oktober. Suhu rata-rata mencapai 27°C dengan suhu terendah 24°C dan suhu tertinggi 30°C. Kelembaban udara berkisar antara 74-77% dan curah hujan tahunan rata-rata berkisar 2.155-3.292 mm.

Perubahan iklim saat ini telah menjadi persoalan global yang melibatkan berbagai negara dan berbagai disiplin ilmu untuk mengatasinya. Dampak perubahan iklim telah mulai dirasakan beberapa tahun terakhir ini termasuk di Kabupaten Tulungagung. Peningkatan suhu udara, musim panas lebih pendek serta musim penghujan lebih panjang dengan curah hujan yang tinggi dan angin kencang merupakan dampak yang nyata.

2.1.5 Penggunaan Lahan

Pola penggunaan wilayah merupakan salah satu faktor yang mencerminkan aktivitas manusia. Dalam aktivitas ini tercermin tindakan manusia yang terbaik terhadap sebidang lahan untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik sebagian maupun keseluruhan. Pola penggunaan wilayah pada hakekatnya adalah gambaran ruang dari hasil jenis usaha dan tingkat teknologi, jumlah manusia dan keadaan fisik daerah, sehingga pola penggunaan wilayah di suatu daerah dapat mencerminkan kegiatan manusia yang berada di daerah tersebut.

Penggunaan wilayah di Kabupaten Tulungagung bersifat dinamis, artinya penggunaan wilayah dapat berubah tergantung dari dinamika pembangunan yang ada. Sehingga dalam menyusun rencana pembangunan atau rencana umum tata ruang juga memperhatikan fakta wilayah yang ada diantaranya penggunaan wilayah yang saat ini ada. Hal ini dimaksudkan agar alokasi kegiatan yang direncanakan sesuai dengan potensi dan daya dukung wilayah. Penggunaan wilayah di Kabupaten Tulungagung dapat dilihat pada diagram berikut:



Grafik 2. 1 Persentase Penggunaan Lahan di Kab. Tulungagung

Sumber: RTRW Kabupaten Tulungagung, 2012-2032

- a. Lahan Persawahan
Secara umum lahan persawahan terdapat di bagian tengah Kabupaten Tulungagung dengan luas kurang lebih 24,61%. Lahan ini merupakan lahan yang tergolong sangat baik atau subur dengan permukaan rata-rata datar dengan kelerengan 0-3%. Tanah tidak peka terhadap erosi, tekstur lempung dan mudah diolah.
- b. Pertanian Tanah Kering
Pertanian tanah kering adalah pertanian kering semusim, dengan jenis tanaman umur pendek saja. Di Kabupaten Tulungagung lahan pertanian tanah kering mempunyai luasan kurang lebih 18,32%.
- c. Perkebunan
Perkebunan adalah areal yang ditanami jenis tanaman keras. Di Kabupaten Tulungagung perkebunan menempati areal seluas kurang lebih 7,64%.
- d. Hutan
Di Kabupaten Tulungagung hutan menempati areal seluas 27,33 % menempati sebagian daerah lereng Tenggara Gunung Wilis dan sebagian menempati daerah pegunungan selatan.
- e. Perairan
Perairan adalah areal lahan yang tergenang yang berfungsi untuk perikanan air tawar. Di Kabupaten Tulungagung menempati areal seluas 0,79 %.
- f. Kampung Teratur
Kampung teratur adalah lahan yang dimanfaatkan untuk permukiman penduduk dengan luas 15,32%.
- g. Tanah Kosong dan Lain-Lain
Tanah kosong dan lain-lain adalah areal yang belum dimanfaatkan dengan luas 5,99%.

2.1.6 Potensi Pengembangan Wilayah

Perkembangan wilayah yang semakin meningkat pada dasarnya diimbangi oleh adanya perkembangan ekonomi di semua sektor oleh semua

stakeholders pembangunan. Dalam rangka perkembangan wilayah terdapat paradigma pembangunan yang semakin berkembang yang mengantarkan kepada suatu pemikiran baru mengenai pembangunan yang lebih komprehensif, sebagaimana telah tertuang pada RTRW Kabupaten Tulungagung 2012-2032 telah memuat sistem perkotaan yang meliputi:

a. Penetapan Pusat Perkotaan

1. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) berada di Perkotaan Tulungagung;
2. Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) meliputi:
 - a. PKLp Perkotaan Karangrejo;
 - b. PKLp Perkotaan Ngunut; dan
 - c. PKLp Perkotaan Campurdarat.
3. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) meliputi:
 - a. Perkotaan Boyolangu;
 - b. Perkotaan Kauman;
 - c. Perkotaan Gondang;
 - d. Perkotaan Sendang;
 - e. Perkotaan Ngantru;
 - f. Perkotaan Pagerwojo;
 - g. Perkotaan Pakel;
 - h. Perkotaan Bandung;
 - i. Perkotaan Sumbergempol;
 - j. Perkotaan Besuki;
 - k. Perkotaan Rejotangan;
 - l. Perkotaan Kalidawir;
 - m. Perkotaan Pucanglaban; dan
 - n. Perkotaan Tanggunggunung.

b. Rencana Fungsi Pusat Pelayanan

1. PKL yang berada di Perkotaan Tulungagung dengan fungsi pusat pelayanan sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, kesehatan, olahraga, perdagangan, dan jasa;
2. PKLp yang berada di Perkotaan Karangrejo dengan fungsi pusat pelayanan sebagai kawasan agropolitan, penyangga perkotaan, pariwisata, industri, dan kawasan lindung atau konservasi;
3. PKLp yang berada di Perkotaan Ngunut dengan fungsi pusat pelayanan sebagai pusat pengembangan kawasan pertanian, peternakan, perikanan, industri, perdagangan, dan jasa; dan
4. PKLp yang berada di Perkotaan Campurdarat dengan fungsi pusat pelayanan sebagai penyangga perkotaan, industri, perikanan, dan pariwisata.

c. Pengembangan Fasilitas Kawasan Perkotaan

1. PKL Perkotaan Tulungagung direncanakan dikembangkan sebagai fasilitas perkotaan berupa pusat pemerintahan Kabupaten, pusat perdagangan dan jasa skala regional, pusat pendidikan skala regional, pusat kesehatan skala regional, pusat pelayanan pariwisata, terminal penumpang tipe A, pusat pelayanan transportasi skala kabupaten, dan peribadatan;

2. PKLp Perkotaan Karangrejo direncanakan dikembangkan sebagai fasilitas perkotaan berupa perdagangan dan jasa, pendidikan, kesehatan, olahraga, terminal tipe C, terminal barang, industri, dan peribadatan;
 3. PKLp Perkotaan Ngunut direncanakan dikembangkan sebagai fasilitas perkotaan berupa pasar, pendidikan, industri, kesehatan, terminal tipe C, olah raga, dan peribadatan; dan
 4. PKLp Perkotaan Campurdarat direncanakan dikembangkan sebagai fasilitas perkotaan berupa pasar, pendidikan, kesehatan, terminal tipe C, olahraga, industri, dan peribadatan.
- d. Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan peruntukan industri ditetapkan dengan kriteria berupa wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan industri, tidak mengganggu kelestarian fungsi lingkungan hidup dan/atau tidak mengubah lahan produktif. Kawasan peruntukan industri terbagi ke dalam 3 (tiga) golongan, yaitu industri mikro dan kecil, industri menengah, dan industri besar. Menurut Peraturan Kementerian Perindustrian No. 6 Tahun 2016 industri kecil adalah industri yang memiliki karyawan maksimal 19 orang, memiliki nilai investasi kurang dari Rp.1.000.000.000,00 tidak termasuk tanah dan tempat usaha. Sedangkan yang dimaksud dengan industri menengah adalah industri yang memiliki karyawan minimal 19 orang dan nilai investasi minimal Rp.1.000.000.000,00 atau memiliki karyawan 20 orang dan nilai investasi maksimal Rp.15.000.000.000,00.

Selain itu juga terdapat kelompok non sentra industri yang juga tersebar di seluruh kecamatan yang didominasi (83%) oleh industri rumah tangga. Lebih jelasnya persebaran industri di Kabupaten Tulungagung adalah sebagai berikut:

1. Kawasan peruntukan industri besar meliputi:
 - a. Kecamatan Kauman;
 - b. Kecamatan Kedungwaru;
 - c. Kecamatan Besuki;
 - d. Kecamatan Sumbergempol;
 - e. Kecamatan Campursari;
 - f. Kecamatan Ngunut; dan
 - g. Kecamatan Ngantru.
2. Industri menengah berbagi jenis terdapat di:
 - a. Kecamatan Besuki;
 - b. Kecamatan Ngunut;
 - c. Kecamatan Kedungwaru;
 - d. Kecamatan Tulungagung;
 - e. Kecamatan Ngantru;
 - f. Kecamatan Karangrejo; dan
 - g. Kecamatan Kauman.
3. Kawasan sentra industri kecil marmer dan onix meliputi:
 - a. Kecamatan Campurdarat; dan
 - b. Kecamatan Besuki;

4. Kawasan sentra industri makanan dan minuman meliputi:
 - a. Kecamatan Tulungagung;
 - b. Kecamatan Boyolangu; dan
 - c. Kecamatan Kedungwaru.
5. Kawasan sentra tembakau meliputi:
 - a. Kecamatan Gondang;
 - b. Kecamatan Boyolangu;
 - c. Kecamatan Pakel; dan
 - d. Kecamatan Campurdarat.
6. Kawasan sentra industri batik meliputi:
 - a. Kecamatan Kedungwaru; dan
 - b. Kecamatan Kauman.
7. Kawasan sentra industri konveksi meliputi:
 - a. Kecamatan Tulungagung;
 - b. Kecamatan Kedungwaru; dan
 - c. Kecamatan Boyolangu.
8. Kawasan sentra industri kelapa meliputi:
 - a. Kecamatan Rejotangan;
 - b. Kecamatan Kalidawir;
 - c. Kecamatan Pucanglaban;
 - d. Kecamatan Ngunut;
 - e. Kecamatan Tanggunggunung; dan
 - f. Kecamatan Bandung.

Subsektor yang memberikan sumbangan terbesar dalam aktivitas industri di Kabupaten Tulungagung dalam lima tahun terakhir adalah makanan, minuman dan tembakau; tekstil, barang kulit dan alas kaki, dan bahan galian non logam; kayu dan sejenisnya; serta kertas, percetakan dan penerbitan. Untuk subsektor makanan, minuman, dan tembakau merupakan subsektor yang memberikan sumbangan sebesar 39% untuk sektor industri. Dalam waktu mendatang subsektor tersebut akan semakin menjadi subsektor andalan bagi perkembangan ekonomi Kabupaten Tulungagung.

Salah satu industri makanan minuman yang dapat dikembangkan adalah industri pengolahan kelapa dengan penerapan industri simbiosis dimana semua hasil dari kelapa dimanfaatkan untuk menghasilkan berbagai macam produk. Pada umumnya kelapa tumbuh di wilayah pesisir pantai, demikian pula halnya dengan wilayah Kabupaten Tulungagung. Batang, daun, buah, tempurung, sabut dan air kelapa, semuanya merupakan bahan yang sangat berguna dan dapat dijadikan bahan baku industri berbagai produk baik keperluan lokal maupun ekspor. Selain itu juga terdapat potensi budidaya di wilayah lainnya. Rencana pengelolaan kawasan industri dan perdagangan, yaitu :

1. Pengembangan kawasan sentra industri rumah tangga terutama pada kawasan perdesaan dan perkotaan;
2. Pengembangan fasilitas perekonomian berupa koperasi pada setiap pusat kegiatan perkotaan dan perdesaan;
3. Pengembangan ekonomi dan perdagangan dengan pengutamaan UMKM; dan

4. Penetapan skenario ekonomi wilayah yang menunjukkan kemudahan dalam berinvestasi dan penjelasan tentang kepastian hukum yang menunjang investasi.

e. Kawasan Industri

Sedangkan arahan pengembangan kawasan industri yang direncanakan di Kecamatan Ngantru dan Sumbergempol adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan kawasan industri dilakukan dengan mempertimbangkan aspek ekologis, memperhatikan daya dukung lahan dan tidak mengkonversi lahan pertanian secara besar-besaran;
2. Pengembangan kawasan industri harus didukung oleh adanya jalur hijau sebagai penyangga antar fungsi bawahan;
3. Pengembangan kegiatan industri harus didukung oleh sarana dan prasarana industri;
4. Pengembangan kegiatan industri berbasis sumberdaya lokal yang berkelanjutan;
5. Industri yang dikembangkan memiliki keterkaitan proses produksi mulai dari industri dasar/hulu dan industri hilir serta industri antara yang dibentuk berdasarkan pertimbangan efisiensi biaya produksi, biaya keseimbangan lingkungan dan biaya aktifitas sosial; serta
6. Setiap kegiatan industri sejauh mungkin menggunakan metoda atau teknologi ramah lingkungan, dan harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan terhadap kemungkinan adanya bencana industri.

f. Kawasan Peruntukan Pariwisata

Kabupaten Tulungagung merupakan wilayah potensial untuk pengembangan pariwisata sebagai salah satu alternatif daerah tujuan wisata unggulan Jawa Timur maupun Nasional, karena keanekaragaman destinasi wisata yang dimiliki. Proses perencanaan dan pengembangan sektor Pariwisata Kabupaten Tulungagung menggunakan analisis cluster destinasi wisata. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan kawasan perencanaan yang mencakup beberapa destinasi wisata sehingga mempermudah dalam proses perencanaan dan pengembangannya. Penetapan pusat pengembangan didasarkan kepada pertimbangan sebagai berikut:

1. Kemudahan aksesibilitas

Aksesibilitas merupakan salah satu faktor perkembangan suatu wilayah maupun kawasan. Semakin mudah pencapaian/akses suatu tempat, maka semakin besar peluang berkembangnya suatu wilayah/kawasan tersebut.

2. Jarak antara destinasi wisata

Obyek-destinasi wisata yang ada di wilayah perencanaan tersebar di seluruh wilayah. Karena pertimbangan jarak dari obyek yang satu dengan obyek yang lain maka perlu dilakukan pembagian berdasarkan cluster. Salah satunya dilihat dari kedekatan/jarak antara destinasi wisata yang ada.

3. Banyaknya pergerakan

Pola pergerakan wisatawan adalah kegiatan/perjalanan wisatawan ke obyek-obyek yang akan maupun telah dikunjungi. Pada umumnya wisatawan memiliki kecenderungan untuk berkunjung ke destinasi wisata lain dengan jarak yang dekat dengan lokasi destinasi wisata yang telah dikunjungi dan memiliki kegiatan/ragam wisata yang berbeda dan variatif.

4. Arahan oleh rencana tata ruang

Didalam arahan rencana tata ruang dalam pengembangan kawasan dilakukan dengan menumbuhkan embrio-embrio pertumbuhan baru. Embrio-embrio ini diletakkan pada daerah-daerah yang belum berkembang. Adanya embrio ini akan dilengkapi dengan sarana prasarana. Pembagian cluster salah satunya menjadikan obyek sebagai magnet penarik pertumbuhan. Harapan adanya pembagian cluster ini adanya penyebaran sarana prasarana berdasarkan kebutuhan. Kawasan peruntukan pariwisata di Kabupaten Tulungagung diantaranya:

1. Kawasan wisata alam terdiri atas:
 - a) daya tarik wisata goa;
 - b) daya tarik wisata air;
 - c) daya tarik wisata pantai; dan
 - d) agrowisata berada di Desa Sendang Kecamatan Sendang.
2. Kawasan wisata budaya terdiri atas:
 - a) daya tarik wisata peninggalan sejarah dan purbakala.
3. Kawasan wisata buatan sebagaimana terdiri atas:
 - a) pesanggrahan Argowilis berada di Kecamatan Sendang.

g. Kawasan Peruntukan Pertanian

Sektor pertanian merupakan sektor utama dalam pembangunan ekonomi di Kabupaten Tulungagung hal ini didukung dengan wilayah Kabupaten Tulungagung merupakan daerah agraris sehingga sangat cocok untuk tetap mempertahankan sektor unggulan pertanian. Kemudian berdasarkan kontribusinya dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), peranan sektor pertanian dalam pengembangan ekonomi sangat luas, yaitu sebagai sektor penyerap tenaga kerja terbesar, sebagai penghasil makanan atau kebutuhan pangan penduduk dan sebagai penentu stabilitas harga.

Potensi pertanian di Kabupaten Tulungagung cukup besar yang terdiri dari lahan sawah dan tegalan dengan luas total sekitar 42,93% dari luas lahan di Kabupaten Tulungagung. Lahan sawah dan tegalan tersebar merata di seluruh kecamatan di Kabupaten Tulungagung. Hasil produksi pertanian di Kabupaten Tulungagung menunjukkan trend meningkat seperti produksi padi, sayuran, ubi kayu, kedelai dan jagung. Prospek pengembangan kawasan pertanian di Kabupaten Tulungagung adalah sebagai berikut:

1. Mengadakan pembinaan secara terus-menerus melalui berbagai media penyuluhan dan percontohan kepada kelompok tani untuk meningkatkan produksi pertanian melalui penerapan teknologi.

2. Peningkatan ketrampilan masyarakat yang bertujuan untuk menjaga areal persawahan dari ancaman banjir, hama, kekeringan dan OPT (Organisme Pengganggu Tanaman) melalui penyuluhan lapangan.
3. Pembuatan sumur air tanah dalam lebih dari 100 meter di lokasi daerah rawan kekeringan seperti di Kecamatan Besuki, Pakel, Karangrejo, dan Campurdarat.
4. Pengembangan produksi pertanian dengan cara mempertahankan luasan sawah dan tegalan yang ada, misalnya melalui peningkatan pengelolaan DAS Brantas dan sumber air perdesaan bila terjadi pergeseran alih fungsi lahan sawah dan tegalan.
5. Pemberian bantuan kepada petani yang terkena bencana alam kekeringan maupun banjir berupa benih, pompa air, sumur pantek dan sebagainya.
6. Mengupayakan Perluasan Areal Tanam (PAT) dan mengadakan evaluasi penggunaan lahan.

h. Kawasan Peruntukan Pemukiman

Pengembangan permukiman di Kabupaten Tulungagung terdapat dua pendekatan yaitu pendekatan pada kawasan permukiman perkotaan, dan permukiman pedesaan, secara faktual Kabupaten Tulungagung masih didominasi wilayah pedesaan. Luas kawasan permukiman di Kabupaten Tulungagung seluas 20.709,19 Ha.

Secara umum, kawasan permukiman di Kabupaten Tulungagung memiliki kecenderungan berkembang secara linier atau memanjang (*ribbon development*). Pola perkembangan seperti ini menunjukkan ketidakmerataan perembetan areal ke perkotaan di semua bagian sisi-sisi luar dari pada daerah kota utama. Perkembangan terjadi di sepanjang jalur transportasi yang ada, khususnya yang bersifat menjari (*radial*) dari pusat kota. Perkembangan linier ini juga dikarenakan adanya lahan pertanian yang menjadi penghalang bagi pertumbuhan permukiman. Di bagian selatan terdapat areal pertambangan dan hutan yang menyebabkan perkembangan permukiman hanya berkembang di sekitar jalur transportasi yang ada.

Hal ini menyebabkan adanya inefisiensi dalam pemerataan fasilitas dan utilitas, karena perkembangan yang linier tersebut menyebabkan pola perkembangan fasilitas dan utilitas mengikuti pola jaringan jalan yang ada. Didalam pengembangan permukiman harus disesuaikan dengan kebutuhan dan pangsa pasar. Dengan demikian diharapkan perumahan yang telah dikembangkan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan kondisi seperti ini, maka didalam penyediaan perumahan diarahkan untuk masyarakat dengan pendapatan menengah kebawah, yaitu berupa rumah sederhana. Dengan komposisi perbandingan luas kapling yang akan dikembangkan antara kapling besar, sedang, dan kapling kecil adalah 1:3:6.

i. Peruntukan Pemukiman Perkotaan

Kawasan permukiman perkotaan adalah merupakan pusat pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi perkotaan, jumlah penduduk yang padat menduduki lahan yang relatif

sempit dan dinamika kehidupan yang relatif tinggi dan merupakan orientasi pergerakan penduduk yang ada pada wilayah sekitarnya. Penggunaan lahan perkotaan (urban) termasuk didalamnya penggunaan lahan untuk perumahan/permukiman, kegiatan perdagangan/jasa, perusahaan/industri dan fasilitas sosial yang terletak di kota kabupaten maupun kota-kota kecamatan.

Kawasan permukiman perkotaan adalah merupakan pusat pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi perkotaan, jumlah penduduk yang padat menduduki lahan yang relatif sempit dan dinamika kehidupan yang relatif tinggi. Penggunaan lahan perkotaan (urban) termasuk didalamnya penggunaan lahan untuk perumahan/permukiman, kegiatan perdagangan/jasa, perusahaan/industri dan fasilitas sosial yang terletak di kota kabupaten maupun kota-kota kecamatan. Permukiman perkotaan diarahkan sebesar 8.448 Ha dikembangkan di Kecamatan Tulungagung, Kecamatan Kedungwaru, Kecamatan Boyolangu, Kecamatan Nganut, Kecamatan Bandung, Kecamatan Sumbergempol, Kecamatan Ngantru, Kecamatan Campurdarat dan Kecamatan Kauman. Permukiman lahan perkotaan berdasarkan deliniasi rencana kawasan perkotaan meliputi Kecamatan yang merupakan daerah pusat pengembangan kegiatan pelayanan. Selain itu perkembangan permukiman perkotaan di arahkan pada lokasi-lokasi yang disusun dalam perencanaan IKK.

j. Kawasan Pemukiman Pedesaan

Kawasan permukiman pedesaan adalah suatu kawasan untuk permukiman pada lokasi sekitarnya masih didominasi oleh lahan pertanian, tegalan, perkebunan dan lahan kosong serta aksesibilitas umumnya kurang, jumlah sarana dan prasarana penunjang juga terbatas atau hampir tidak ada, kawasan dengan ciri dan karakteristik sifat serta karakteristik lingkungan permukiman yang masih mencirikan tata dan lingkungan kehidupan rural. Interaksi pergerakan di lingkungan permukiman masih rendah dan sangat dipengaruhi oleh interaksi hubungan eksternal.

Secara fisiografis permukiman pedesaan di Kabupaten Tulungagung terletak di pegunungan dan dataran tinggi, dataran rendah, dan di pesisir. Setiap lokasi memiliki karakter tersendiri dan memerlukan penanganan sesuai karakter masing-masing. Kawasan permukiman pedesaan yang terletak pada wilayah pegunungan dan dataran tinggi kegiatan, pengembangan permukiman diarahkan pada pertanian tanaman keras, perkebunan dan sebagian hortikultura, dan pariwisata. Pada kawasan ini perkembangan permukiman harus diarahkan membentuk cluster dengan pembatasan pengembangan permukiman pada kawasan lindung.

Kawasan permukiman pedesaan yang terletak pada dataran rendah, umumnya memiliki kegiatan pertanian sawah, tegal, kebun campur, termasuk peternakan dan perikanan darat. Sebagian besar permukiman pedesaan yang terletak pada dataran rendah memiliki kondisi tanah yang subur. Lahan kosong yang terletak pada tengah permukiman dan sepanjang jalan utama merupakan kawasan yang rawan perubahan penggunaan lahan dari kawasan pertanian menjadi kawasan terbangun.

Pada kawasan ini diperlukan pembatasan pengembangan untuk kawasan terbangun.

Pada kawasan permukiman pedesaan yang memiliki potensi sebagai penghasil produk unggulan pertanian atau sebagai kawasan sentra produksi akan dilengkapi dengan lumbung desa modern, juga pasar komoditas unggulan. Selanjutnya beberapa komoditas yang memiliki prospek pengembangan melalui pengolahan akan dilakukan pengembangan industri kecil dengan membentuk sentra industri kecil. Kawasan permukiman perdesaan sebesar 15.033,3 Ha dikembangkan di Kecamatan Besuki, Kecamatan Pakel, Kecamatan Tanggunggunung, Kecamatan Kalidawir, Kecamatan Pucang Laban, Kecamatan Rejotangan, Kecamatan Karangrejo, Kecamatan Gondang, Kecamatan Pagerwojo dan Kecamatan Sendang.

2.1.7 Wilayah Rawan Bencana

Kondisi geografis dan topografi berpengaruh pada tingkat kerawanan bencana di Kabupaten Tulungagung. Secara umum potensi kawasan rawan bencana di Kabupaten Tulungagung dikategorikan sebagai berikut:

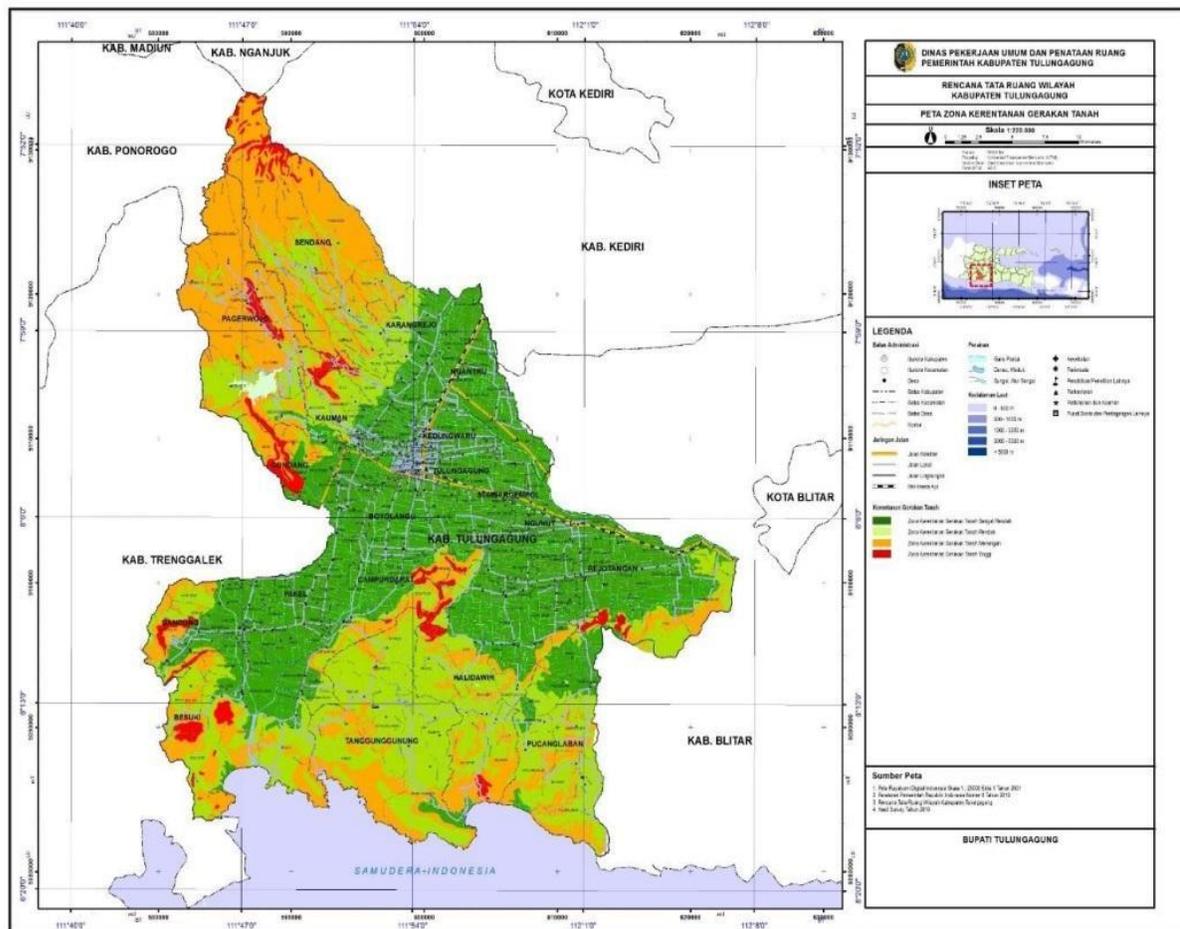
1. Kawasan Rawan Bencana Gerakan Tanah (Longsor)

Kawasan rawan gerakan tanah di Kabupaten Tulungagung adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 4 Kawasan Rawan Gerakan Tanah

No	Nama	Lokasi	Kemiringan	Keterangan
1	Zona Kerentanan gerakan tanah sangat rendah	Daerah Tulungagung, Kauman, sekitar Bandung, sebelah utara Besuki. Sebelah utara Kalidawir, Karangrejo, Ngantru, Sumbergempol, Gondang dan Kedungwaru	<5%	a. Lereng dibentuk oleh Aluvium (Qa) b. terjadi di daerah sekitar sungai
2	Zona Kerentanan gerakan tanah rendah	Daerah Besuki, Campurdarat, Tanggunggunung, Kalidawir, Pucanglaban, Rejotangan, Gondang, Kauman, Sendang, Pagerwojo	5-15%	a. umumnya dibentuk oleh tanah pelapukan batuan b. terjadi pada tebing lembah sungai (alur)
3	Zona Kerentanan gerakan tanah menengah	Daerah Besuki, Campurdarat, Tanggunggunung, Kalidawir, Pucanglaban, Rejotangan, Gondang, Kauman, Sendang, Pagerwojo, Bandung, Karangrejo, Boyolangu	(5-15%) - (50-70%)	a. vegetasi penutup kurang b. umumnya terjadi pada perbatasan lembah sungai, peralihan litologi, atau tebing jalan yang disebabkan oleh curah hujan tinggi c. Dibentuk oleh pelapukan batuan
4	Zona Kerentanan gerakan tanah tinggi	Daerah Besuki, Tanggunggunung, Kalidawir, Gondang, Sendang, Pagerwojo	Agak Terjal (30-50%) sampai sangat terjal (>70%)	a. Zona ini sering terjadi gerakan tanah akibat curah hujan intensitas tinggi b. Dibentuk oleh tanah pelapukan pada batuan dasar bersifat gembur c. Vegetasi umumnya relatif kurang

Sumber: RTRW Kabupaten Tulungagung, 2012-2032

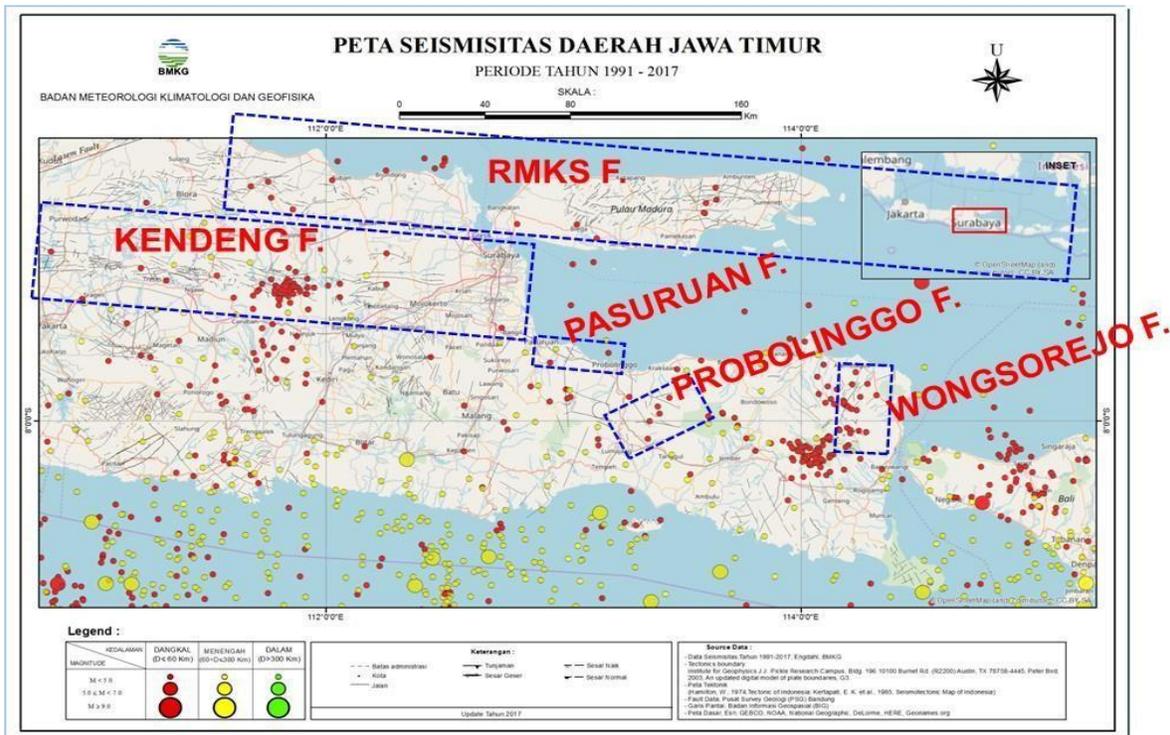


Gambar 2. 3 Peta Zona Gerakan Tanah Kabupaten Tulungagung

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, 2021

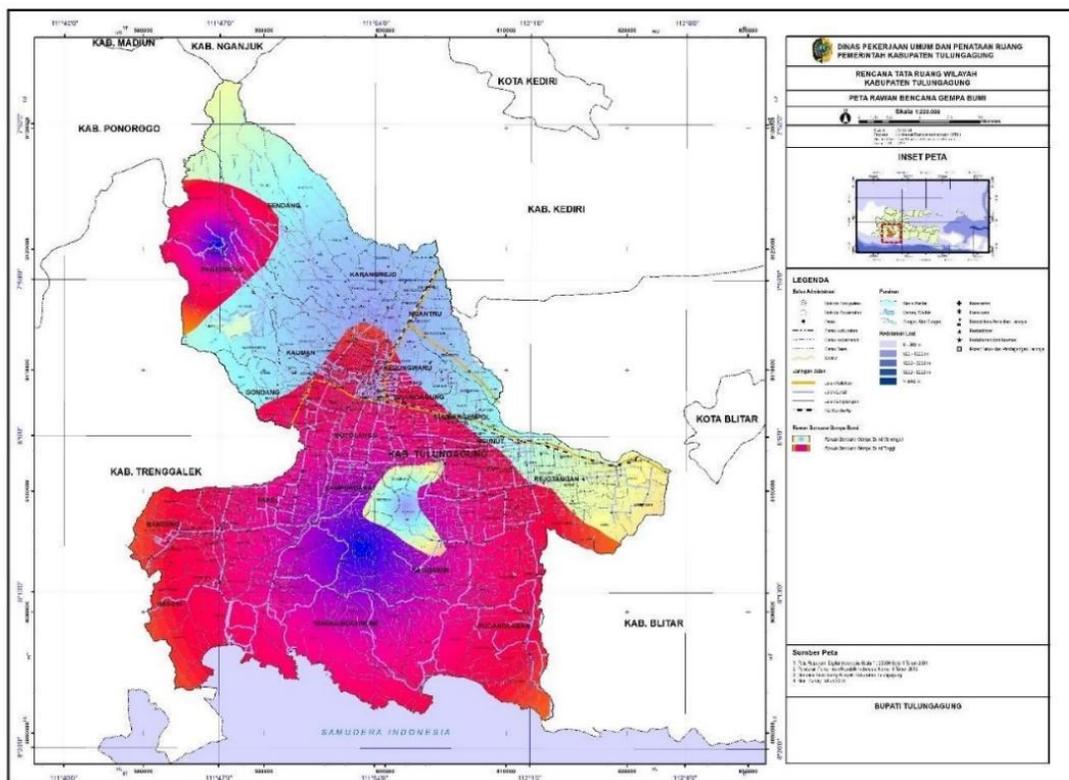
2. Sempadan Patahan Aktif (Active Fault)

Pada Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi tidak ada sempadan patahan aktif (*active fault*) pada kawasan rawan bencana gempa bumi di Kabupaten Tulungagung. Namun terkait dengan resiko gempa bumi di Kabupaten Tulungagung, maka Kabupaten Tulungagung termasuk pada resiko bencana menengah dan tinggi.



Gambar 2. 4 Pertimbangan dalam Penentuan Sempadan Patahan Aktif Kabupaten Tulungagung

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, 2021



Gambar 2. 5 Peta Kawasan Rawan Gempa Bumi Kab. Tulungagung

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, 2021

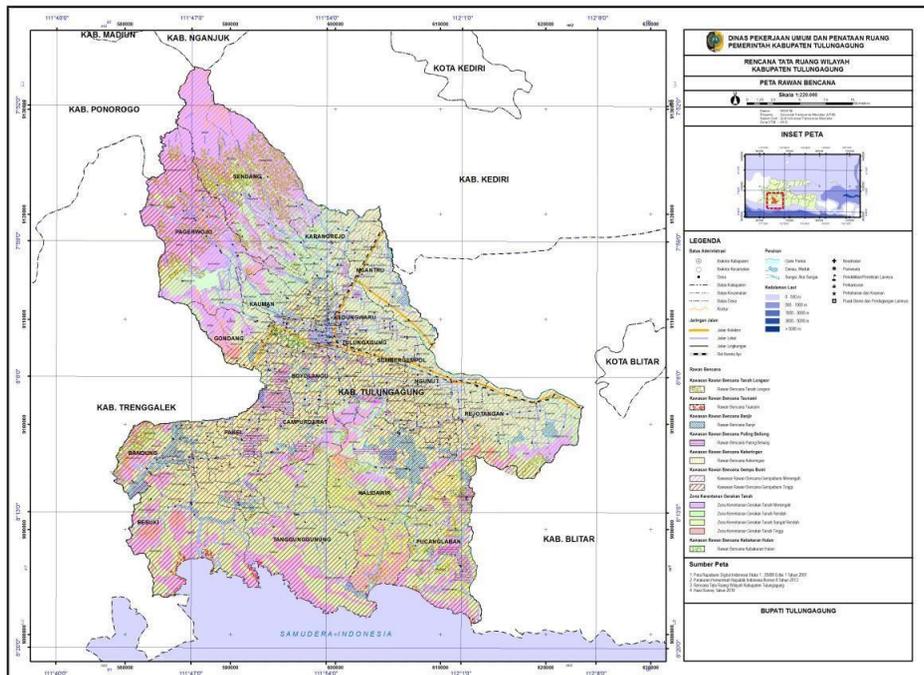
3. Kawasan Rawan Bencana Lainnya

Selain rawan bencana longsor dan gempa bumi, di Kabupaten Tulungagung juga rawan terjadi bencana alam lainnya. Berikut ini tabel daerah rawan bencana di Kabupaten Tulungagung.

Tabel 2. 5 Daerah/Desa Rawan Bencana di Kabupaten Tulungagung Tahun 2020

Jenis Bencana	Kecamatan	Desa
Tsunami	Tanggunggunung	Ngrejo, Jengglunharjo
	Besuki	Besole, Besuki, Keboireng
	Pucangbalan	Pucanglaban, Panggungkalak, Kalidawe
	Kalidawir	Kalibatur
Puting Beliung	Pagerwojo	Penjor
	Sendang	Picisan, Nglutung, Kedoyo
	Bandung	Talun Kulon
	Tulungagung	Kutoanyar
	Rejotangan	Buntaran, Sumberagung, Karang Sari, Tenggur
	Campurdarat	Tanggung
	Sumbergempol	Sambijajar, Podorejo, Bendiljati Kulon, Bendiljati Wetan, Trenceng, Mirigambar, Sambidoplang, Sambijajar, Bendilwungu, Tambak rejo, Wates
	Ngunut	Sumberejo Wetan, Kalangan, Gilang, Ngunut
	Pakel	Gebang, Gesikan, Gempolan, Ngebong
	Boyolangu	Serut
Banjir	Kedungwaru	Gendingan
	Pagerwojo	Sidomulyo
	Sendang	Picisan, Geger
	Kalidawir	Sukorejo Kulon, Joho
	Rejotangan	Tugu
Kekeringan	Boyolangu	Waung
	Kalidawir	Kalibatur, Karangtalun, Winong, Banyuurip, Rejosari
	Besuki	Besuki
	Tanggunggunung	Tenggarejo, Kresikan, Pakisrejo
	Pagerwojo	Kradinan, Mulyosari, Sidomulyo, Samar, Pagerwojo
	Pucanglaban	Demuk, Pucanglaban, Panggunguni
	Sendang	Picisan
	Gondang	Blendis
	Campurdarat	Campurdarat, Pelem
	Rejotangan	Sukerejo Wetan
Longsor	Bandung	Sukoharjo
	Pagerwojo	Kradinan, Samar, Penjor, Gondanggunung, Gambiran
	Sendang	Geger, Tugu

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, 2021

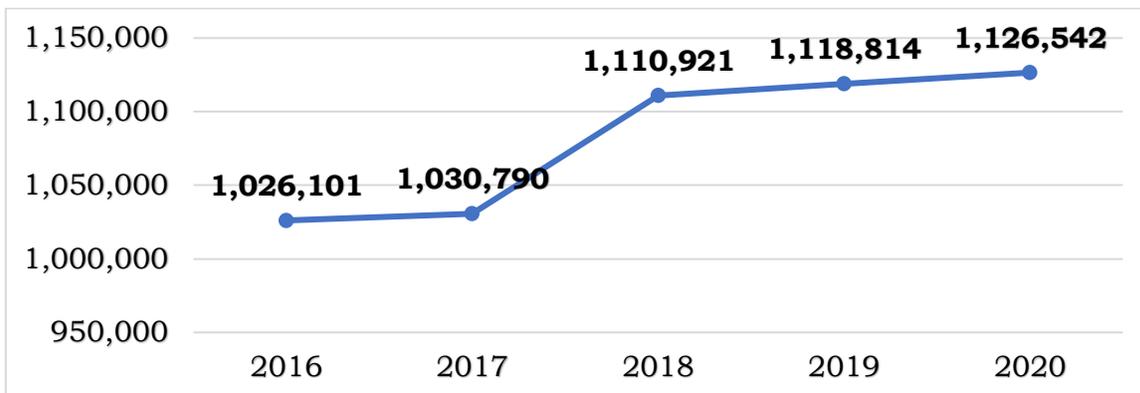


Gambar 2. 6 Peta Kawasan Rawan Bencana Kabupaten Tulungagung

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, 2021

2.1.8 Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Tulungagung tahun 2020 sebanyak 1.126.542 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki sejumlah 565.806 jiwa dan penduduk perempuan sejumlah 560.736 jiwa. Pada tahun 2020 Penduduk Kabupaten Tulungagung meningkat sebanyak 87.258 jiwa jika dibandingkan dengan tahun 2019. Berikut ini adalah grafik pertumbuhan penduduk Kabupaten Tulungagung dari tahun 2016–2020.



Grafik 2. 2 Pertumbuhan Penduduk Menurut Tahun di Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 - 2020

Sumber: Dispendukcapil, 2021

Setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Tulungagung mengalami pertumbuhan penduduk yang relatif terkendali dengan total laju pertumbuhan pada akhir 2020 adalah sebesar 0,69% dari tahun sebelumnya. Kecamatan Tulungagung menjadi kecamatan dengan tingkat laju pertumbuhan paling tinggi dengan jumlah penduduk pada tahun 2019 yaitu 67,513 jiwa menjadi 71,201 jiwa pada tahun 2020. Lebih rincinya disajikan pada tabel 2.6 sebagai berikut.

Tabel 2. 6 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Tulungagung Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk			Laju Pertumbuhan	
		2018	2019	2020	2018 - 2019	2019- 2020
		Jiwa	Jiwa	Jiwa	%	%
1	Tulungagung	67,602	67,513	71,201	-0.13%	5.18%
2	Boyolangu	84,637	85,500	88,224	1.01%	3.09%
3	Kedungwaru	93,131	93,984	96,317	0.91%	2.42%
4	Ngantru	57,933	58,384	58,596	0.77%	0.36%
5	Kauman	53,558	53,940	53,428	0.71%	-0.96%
6	Pagerwojo	31,734	32,173	32,504	1.36%	1.02%
7	Sendang	47,130	47,759	48,531	1.32%	1.59%
8	Karangrejo	44,864	44,981	44,896	0.26%	-0.19%
9	Gondang	61,026	61,443	60,127	0.68%	-2.19%
10	Sumbergempol	73,465	74,189	73,168	0.98%	-1.40%
11	Ngunut	84,488	84,438	84,170	-0.06%	-0.32%
12	Pucanglaban	25,578	25,919	26,811	1.32%	3.33%
13	Rejotangan	81,357	81,979	82,738	0.76%	0.92%
14	Kalidawir	76,071	76,665	76,871	0.77%	0.27%
15	Besuki	39,018	39,229	39,580	0.54%	0.89%
16	Campurdarat	59,035	59,437	59,204	0.68%	-0.39%
17	Bandung	48,964	49,147	49,070	0.37%	-0.16%
18	Pakel	55,226	55,774	54,796	0.98%	-1.78%
19	Tanggunggunung	26,104	26,360	26,310	0.97%	-0.19%
Kab. Tulungagung		1,110,921	1,118,814	1,126,542	0.71%	0.69%

Sumber: Dispendukcapil Kabupaten Tulungagung, 2021

Berbicara mengenai kepadatan penduduk, Kabupaten Tulungagung memiliki luas administratif 1.055,65 Km² yang terbagi menjadi 19 kecamatan. Kepadatan penduduk merupakan satuan yang menyatakan banyaknya jumlah penduduk yang menempati area tiap 1 Km². Kabupaten Tulungagung memiliki persebaran penduduk yang tidak merata di beberapa kecamatan. Konsentrasi peradaban terletak pada pusat tata pemerintahan Kabupaten Tulungagung. Lebih detail mengenai kepadatan penduduk dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 7 Kepadatan Penduduk di Kab. Tulungagung Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah	Kepadatan Penduduk
		Jiwa	Km ²	Jiwa/ Km ²
1	Besuki	39,580	82,16	463.70
2	Bandung	49,070	41,96	1,138.25
3	Pakel	54,796	36,06	147.45
4	Campurdarat	59,204	39,56	1,451.77
5	Tanggunggunung	26,310	117,73	219.08
6	Kalidawir	76,871	97,81	759.73
7	Pucanglaban	26,811	82,94	311.21
8	Rejotangan	82,738	66,49	120.98

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah	Kepadatan Penduduk
		Jiwa	Km ²	Jiwa/ Km ²
9	Ngunut	84,170	37,7	2,191.35
10	Sumbergempol	73,168	39,28	1,811.71
11	Boyolangu	88,224	38,44	2,166.52
12	Tulungagung	71,201	13,67	4,824.58
13	Kedungwaru	96,317	29,74	317.52
14	Ngantru	58,596	37,03	1,548.26
15	Karangrejo	44,896	35,54	1,222.26
16	Kauman	53,428	30,84	1,678.86
17	Gondang	60,127	44,02	1,332.83
18	Pagerwojo	32,504	88,22	351.60
19	Sendang	48,531	96,46	479.43

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, 2021

Berdasarkan tabel tersebut dapat kita lihat tingkat kepadatan penduduk paling tinggi terjadi di Kecamatan Tulungagung dengan angka sebesar 4,824.58 jiwa/Km². Sementara kepadatan penduduk terendah ada pada Kecamatan Rejotangan dengan angka kepadatan 120.98 jiwa/Km². Perbedaan kepadatan penduduk terpengaruh oleh persebaran penduduk yang tidak merata, dan masyarakat yang condong untuk berdiam disuatu wilayah karena alasan mudah mencari pekerjaan, atau alasan tertentu lainnya serta tingkat kelahiran dan kematian yang berbeda.

Tabel 2. 8 Jumlah Penduduk Per Usia di Kab. Tulungagung Tahun 2020

No	Keterangan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	0 - 4 tahun	30,688	28,891	59,579
2	5 - 9 tahun	38,956	36,253	75,209
3	10 - 14 tahun	42,178	39,776	81,954
4	15 - 19 tahun	43,345	40,946	84,291
5	20 - 24 tahun	42,277	40,339	82,616
6	25 - 29 tahun	38,502	36,595	75,097
7	30 - 34 tahun	37,021	36,934	73,955
8	35 - 39 tahun	45,657	46,298	91,955
9	40 - 44 tahun	44,563	45,120	89,683
10	45 - 49 tahun	45,118	45,429	90,547
11	50 - 54 tahun	41,373	41,036	82,409
12	55 - 59 tahun	35,652	36,679	72,331
13	60 - 64 tahun	28,495	28,750	57,245
14	65 - 69 tahun	21,630	21,241	42,871
15	70- 74 tahun	12,222	13,532	25,754
16	> 75+ tahun	18,129	22,917	41,046
Total		565,806	560,736	1,126,542

Sumber: Dispendukcapil Kabupaten Tulungagung, 2021

Sementara itu untuk jumlah penduduk dengan usia produktif yakni umur 15-64 tahun dapat dilihat pada tabel berikut:

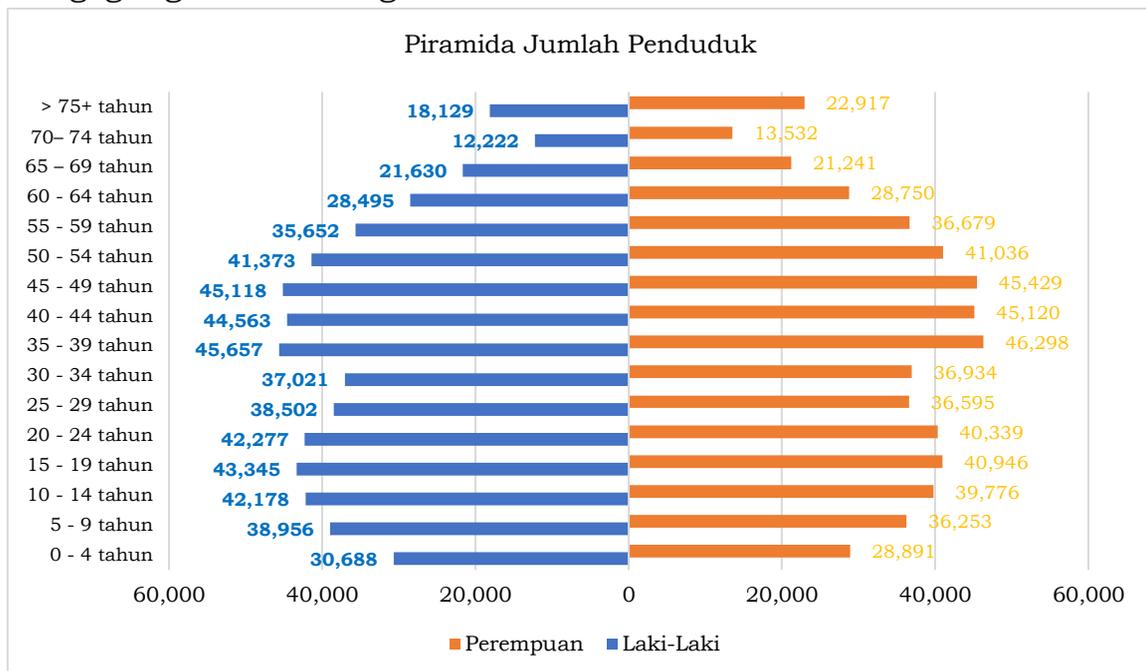
Tabel 2. 9 Jumlah Penduduk Kabupaten Tulungagung Tahun 2020

Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-14	111.822	104.920	216.742
15-64	402.003	398.126	800.129
65+	51.981	57.690	109.671
Jumlah	565,806	560,736	1,126,542

Sumber: Dispendukcapil Kabupaten Tulungagung, 2021

Pada tabel diatas dapat dilihat usia produktif dengan rentang usia 15 tahun sampai dengan 64 tahun sebesar 800.129 jiwa dengan pembagian jumlah laki-laki sebanyak 402.003 jiwa dan perempuan sebanyak 398.126 jiwa. Sedangkan usia tidak produktif rentang usia 0-14 tahun dan 65 keatas sebanyak 326.413 jiwa dengan pembagian laki-laki sebanyak 163.803 jiwa dan perempuan 162.610 jiwa.

Jika di gambarkan dalam piramida, jumlah penduduk di Kabupaten Tulungagung adalah sebagai berikut:



Grafik 2. 3 Piramida Jumlah Penduduk Kab. Tulungagung Tahun 2020

Sumber: Dispendukcapil Kabupaten Tulungagung, 2021

Dari gambar piramida penduduk Kabupaten Tulungagung tahun 2020 di atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk usia produktif lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah penduduk usia tidak produktif. Hal ini menjadi bonus demografi bagi pemerintah dan seharusnya menjadi keunggulan tersendiri, karena dengan tingginya jumlah penduduk usia produktif maka akan dapat membantu akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah.

Secara dinamika kependudukan yang ada di Kabupaten Tulungagung dipengaruhi oleh adanya kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk. Dinamika penduduk untuk kelahiran yang ada pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 mengalami trend kenaikan sedangkan pada kematian data pada tahun 2015 hingga 2019 mengalami trend yang fluktuatif. Lebih rinci data mengenai dinamika kependudukan Kabupaten Tulungagung pada tahun 2016 hingga 2020 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2. 10 Dinamika Kependudukan Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kelahiran	17.851	20.331	21.288	19.720	16.363
Kematian	2.507	6.463	4.483	3.150	3.728
Realisasi Pemberangkatan Transmigrasi	47	49	9	20	-
Jumlah Penerbitan Kartu Identitas Anak	57.430	63.600	71.580	67.791	70.724

Sumber: Dispendukcapil Kabupaten Tulungagung, 2021

Berdasarkan data dinamika penduduk, angka kelahiran cenderung menurun karena selama 3 tahun terakhir. Adapun pemberangkatan transmigrasi tidak dilakukan pada tahun 2020 mengingat adanya pandemic COVID 19. Jumlah penduduk Kabupaten Tulungagung sebagian besar atau mayoritas dari masyarakat di Kabupaten Tulungagung menganut agama Islam. Data pada tahun 2020 jumlah penduduk yang beragama islam sebanyak 1.109.055 penduduk. Selain menganut agama Islam penduduk di Kabupaten Tulungagung juga ada yang menganut agama Kristen Protestan, Kristen Katolik, Budha, Hindu, dan Kong Hu Cu. Berikut disajikan data secara rinci.

Tabel 2. 11 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Islam	1.078.240	1.083.658	1.093.983	1.101.971	1.109.055
2	Kristen Protestan	12.592	12.675	12.556	12.465	12.832
3	Kristen Katolik	3.189	3.224	3.168	3.161	3.388
4	Budha	985	984	953	936	975
5	Hindu	144	144	129	133	144
6	Kong Hu Cu	18	19	17	17	17
7	Lain-lain	103	113	115	131	131

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, 2021

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat menggambarkan tentang kondisi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kondisi kesejahteraan sosial, serta kondisi seni budaya dan olah raga di Kabupaten Tulungagung.

2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dilakukan terhadap indikator yang mempengaruhi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi. Berikut adalah indikator-indikator yang mempengaruhi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi di Kabupaten Tulungagung

Tabel 2. 12 Capaian Indikator Aspek Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020

N	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	PDRB Harga Berlaku	Milyar	31.126,13	33.640,18	36.496,03	39.215,49	38.225,99
2	PDRB Harga Konstan	Milyar	23.446,44	24.637,36	25.920,20	27.299,80	26.455,76
3	PDRB Per Kapita	Ribu	30.334,38	32.635,34	35.251,99	37.733,18	36.643,64
4	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,02%	5,08%	5,21%	5,32%	-3,09%
5	Inflasi	%	1,66	2,86	2,13	1,83	1,68
6	Indeks Gini	Indeks	0,37	0,35	0,373	0,304	0,336
7	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,6479	0,6548	0,6656	0,6781	0,7092
8	Survey Kepuasan Masyarakat	Indeks	75,23	77,82	80,19	80,21	82,12

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, 2021

PDRB Kabupaten Tulungagung atas dasar harga berlaku tahun 2020 mencapai 38,22 trilyun rupiah dan atas dasar harga konstan mencapai 26,45 trilyun rupiah dengan PDRB perkapita sebesar 36,64 juta rupiah. Pertumbuhan ekonomi Tulungagung mencapai -3,09 persen, terkontraksi 8,41 persen poin dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sedangkan Gini ratio sebesar 0,336 meningkat 0,032 poin.

2.2.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Salah satu indikator ekonomi yang digunakan untuk melihat hasil-hasil pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB mencerminkan kinerja perekonomian suatu daerah. Menurut definisi, PDRB adalah nilai produk barang dan jasa yang diproduksi di suatu wilayah (regional) tertentu dalam waktu tertentu tanpa melihat faktor kepemilikan. Dari data PDRB dapat dilihat tingkat pertumbuhan dan struktur ekonomi suatu wilayah. Struktur ekonomi suatu wilayah biasanya disajikan dari pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku. Sedangkan pertumbuhannya biasanya dihitung dari pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan.

Tabel 2. 13 Produk Domestik Regional Bruto Kab. Tulungagung Menurut Harga Berlaku 2016-2020 (dalam juta rupiah)

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6.804.614,00	6.996.825,00	7.191.604,00	7.466.611,00	7.455.994,00
2	Pertambangan dan Penggalian	1.168.351,00	1.259.295,00	1.376.564,00	1.419.141,00	1.338.817,00
3	Industri Pengolahan	6.488.387,00	7.124.808,00	7.924.875,00	8.665.695,00	8.537.427,00

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
4	Pengadaan Listrik dan Gas	10.348,00	12.143,00	13.208,00	14.077,00	14.084,00
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	26.031,00	28.377,00	30.361,00	32.122,00	33.707,00
6	Konstruksi	2.908.096,00	3.244.028,00	3.55.511,00	3.792.062,00	3.564.506,00
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.256.566,00	6.819.444,00	7.524.421,00	8.165.600,00	7.544.226,00
8	Transportasi dan Pergudangan	657.947,00	744435,00	820.094,00	902.254,00	856.810,00
10	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	612.928,00	681.211,00	748.248,00	818.582,00	747.395,00
11	Informasi dan Komunikasi	1.679.169,00	1 836 261	1.962.595,00	2.128.378,00	2.279.911,00
12	Jasa Keuangan dan Asuransi	728.909,00	787.139,00	841.904,00	883.229,00	884.079,00
13	Real Estate	610.675,00	669.609,00	748.538,00	818.612,00	845.441,00
14	Jasa Perusahaan	113.558,00	124.157,00	137.634,00	150.120,00	141.434,00
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.026.383,00	1 102 965	1.210.981,00	1.336.275,00	1.337.806,00
16	Jasa Pendidikan	1.323.463,00	1.438.985,00	1.566.322,00	1.709.638,00	1.759.362,00
17	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	313.752,00	344.701,00	378.218,00	418.151,00	456.012,00
18	Jasa lainnya	396.958,00	425.796,00	461.955,00	494.948,00	428.974,00
	PDRB	31.126.134,00	33.640.178,00	36.496.034,00	39.215.494,00	38.225.986,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, 2021

PDRB Kabupaten Tulungagung atas dasar harga berlaku tahun 2020 menunjukkan penurunan sekitar 989 miliar rupiah dibanding tahun sebelumnya. Perekonomian terganggu secara global akibat pandemi Covid19 yang juga menyebabkan perekonomian Kabupaten Tulungagung berkontraksi. Hal ini didukung oleh beberapa lapangan usaha yang mengalami kondisi serupa. Dari 17 kategori lapangan usaha, 10 kategori mengalami penurunan. Penurunan terbesar terjadi pada lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sekitar 621 miliar rupiah.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulungagung dilihat dari pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan sebagai berikut:

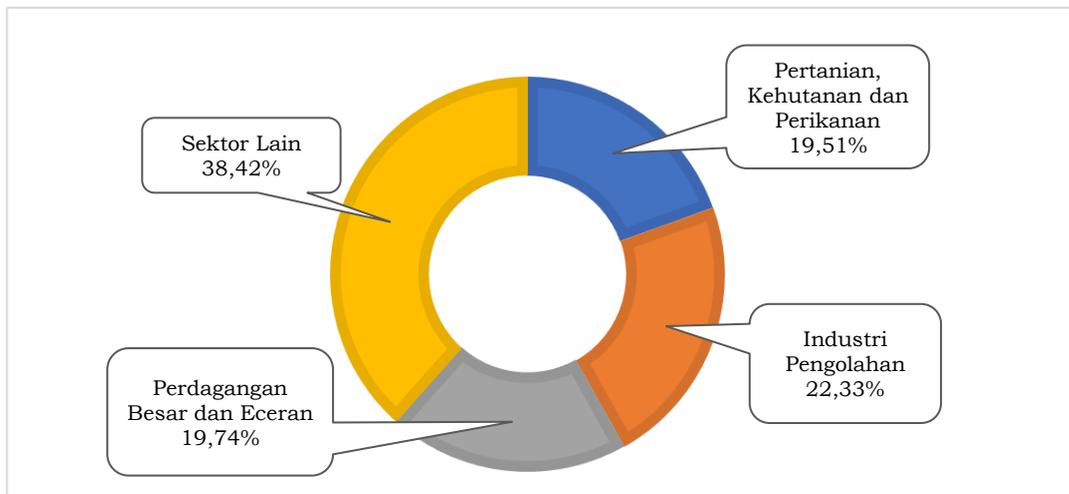
Tabel 2. 14 Produk Regional Bruto Kabupaten Tulungagung Menurut Harga Konstan 2016-2020 (dalam juta rupiah)

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.533.488,00	4.536.679,00	4.507.895,00	4.588.752,00	4.550.963,00
2	Pertambangan dan Penggalian	843.880,00	883.832,00	907.926,00	917.311,00	858.382,00
3	Industri Pengolahan	4.897.908,00	5.199.161,00	5.593.656,00	5.974.294,00	5.854.587,00
4	Pengadaan Listrik dan Gas	10.232,00	10.611,00	11.086,00	11.654,00	11.677,00
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	20.859,00	22.177,00	23.237,00	24.383,00	25.569,00
6	Konstruksi	2.069.714,00	2.225.564,00	2.386.917,00	2.535.622,00	2.382.108,00
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.061.713,00	5.387.855,00	5.717.587,00	6.049.067,00	5.534.998,00
8	Transportasi dan Pergudangan	511.336,00	553.963,00	597.664,00	645.898,00	614.315,00
10	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	454.190,00	490.486,00	527.344,00	565.149,00	512.555,00
11	Informasi dan Komunikasi	1.563.327,00	1.677.606,00	1.792.187,00	1.916.385,00	2.044.904,00
12	Jasa Keuangan dan Asuransi	537.232,00	558.171,00	583.219,00	605.927,00	605.769,00
13	Real Estate	504.259,00	533.859,00	569.787,00	605.342,00	623.208,00
14	Jasa Perusahaan	85.692,00	90.199,00	95.854,00	101.932,00	95.475,00
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	764.937,00	788.803,00	816.569,00	844.496,00	820.180,00
16	Jasa Pendidikan	1.016.760,00	1.075.936,00	1.149.314,00	1.229.996,00	1.262.402,00
17	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	257.588,00	273.322,00	293.931,00	316.946,00	342.745,00
18	Jasa lainnya	313.324,00	329.141,00	346.025,00	366.649,00	315.926,00
	PDRB	23.446.437,00	24.637.365,00	25.920.200,00	27.299.802,00	26.455.765,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, 2021

Seperti halnya PDRB atas dasar harga berlaku, PDRB Kabupaten Tulungagung atas dasar harga konstan juga menunjukkan penurunan akibat pandemi Covid19. Hal ini didukung oleh beberapa lapangan usaha yang mengalami kontraksi. Dari 17 kategori lapangan usaha, 11 kategori mengalami penurunan. Penurunan terbesar juga terjadi pada lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yaitu sekitar 514 miliar rupiah. Sementara itu, beberapa lapangan usaha mengalami peningkatan. Peningkatan terbesar terjadi pada lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, sekitar 25 miliar rupiah.

Perbandingan 3 besar sektor PDRB di Kabupaten Tulungagung dari struktur ekonomi adalah sebagai berikut:



Grafik 2. 4 Tiga Besar Pembentuk PDRB Kab. Tulungagung Tahun 2020

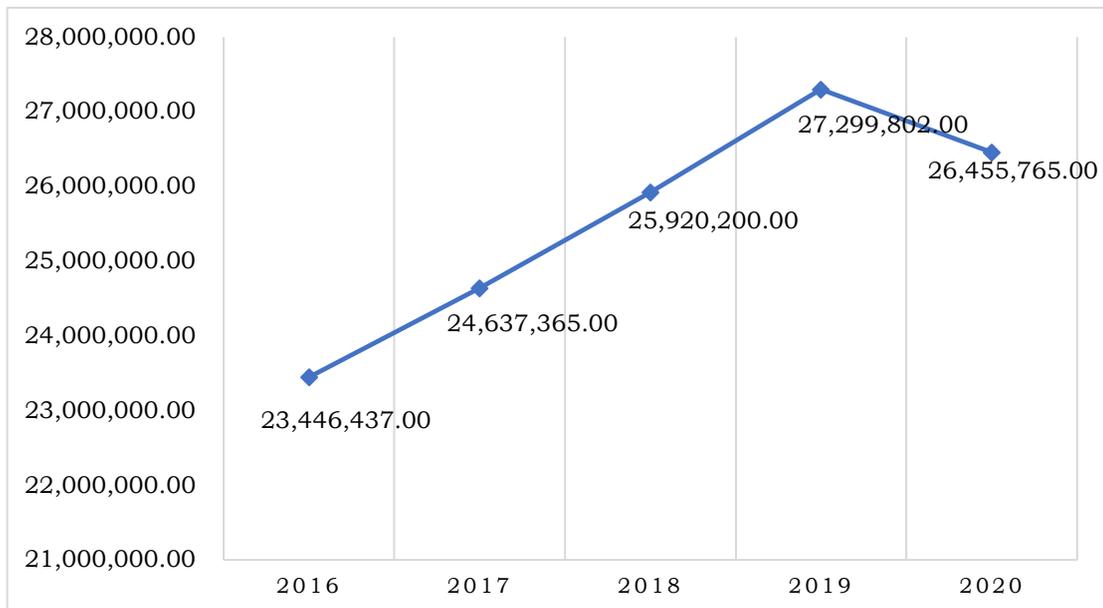
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, 2021

Penyumbang PDRB terbesar Kabupaten Tulungagung adalah sektor Industri Pengolahan dengan kontribusi 22,33% dari total PDRB. Sektor terbesar kedua yaitu Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor berkontribusi sebesar 19,74% terhadap PDRB dan sektor ketiga sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 19,51% dari PDRB.

2.2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi yang dihitung dari PDRB atas dasar harga konstan merupakan rata-rata tertimbang dari tingkat sektoralnya, artinya apabila sebuah sektor mempunyai peranan paling penting dan pertumbuhannya lambat, maka hal ini dapat mengakibatkan terhambatnya tingkat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Sebaliknya, apabila sebuah sektor mempunyai peranan penting dan pertumbuhannya tinggi, maka sektor tersebut dapat menjadi lokomotif yang menarik pertumbuhan ekonomi suatu daerah sehingga total pertumbuhan ekonomi menjadi besar. Dengan kata lain, gejolak sekecil apapun pada sektor yang memiliki kontribusi terbesar terhadap PDRB akan sangat berpengaruh terhadap pergerakan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

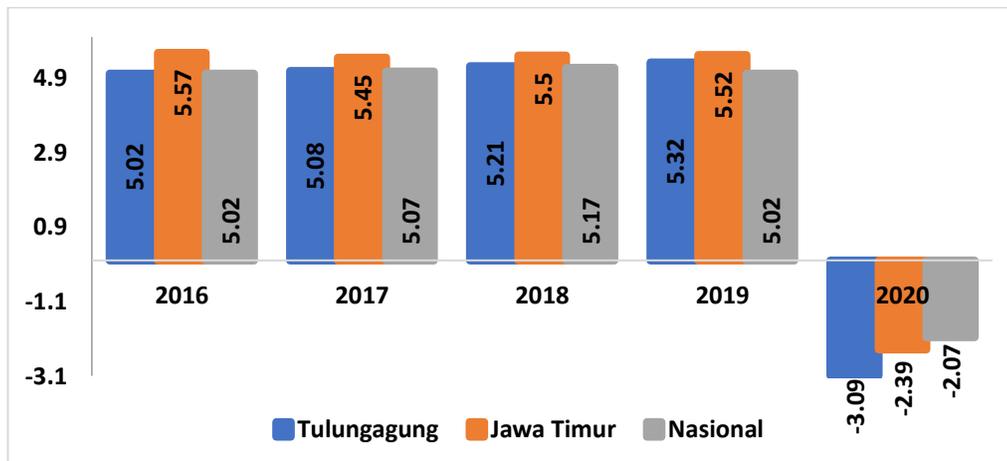
Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah yang diperoleh dari kenaikan PDRB atas dasar harga konstan mencerminkan kenaikan produksi barang dan jasa di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulungagung dihitung dari pertumbuhan PDRB Tulungagung yang didasarkan atas dasar harga konstan tahun 2010.



Grafik 2. 5 PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, 2021

Grafik diatas menunjukkan dari tahun ke tahun PDRB Kabupaten Tulungagung mengalami peningkatan yang cukup baik. Namun pada tahun 2020 PDRB Kabupaten Tulungagung mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2019, yakni dari 27.299.802,00 menjadi 26.455.765,00. Dari angka diatas dapat diperoleh perkembangan pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tulungagung tergambar dari grafik berikut:



Grafik 2. 6 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur dan Nasional 2016-2020

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, 2021

Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 pada tingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten Tulungagung terkontraksi relatif dalam dibanding tahun sebelumnya, yang dapat tumbuh positif diatas 5 persen. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulungagung terkontraksi sebesar 3,09 persen. Kondisi ini merupakan dampak dari pandemi covid 19 yang menyerang tidak hanya sektor kesehatan tetapi juga sektor ekonomi di berbagai wilayah. Pembatasan aktivitas masyarakat berpengaruh pada aktivitas bisnis yang berimbas pada perekonomian.

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tulungagung menurut lapangan usaha Industri Pengolahan mengalami penurunan pada tahun 2020, dimana pada tahun 2019 sebesar 6,80 dan menurun menjadi 2,00. Pada sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan pada tahun 2020 juga terjadi penurunan yakni sebesar 0,82. Cuaca yang tidak menentu menjadi salah satu alasan mengapa hal tersebut bisa terjadi sehingga menimbulkan dampak kurang baik bagi produktivitas pertanian karena banyak tanaman pertanian yang tidak bisa berproduksi secara maksimal.

Berikut data struktur pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulungagung menurut lapangan usaha.

Tabel 2. 15 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tulungagung Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020

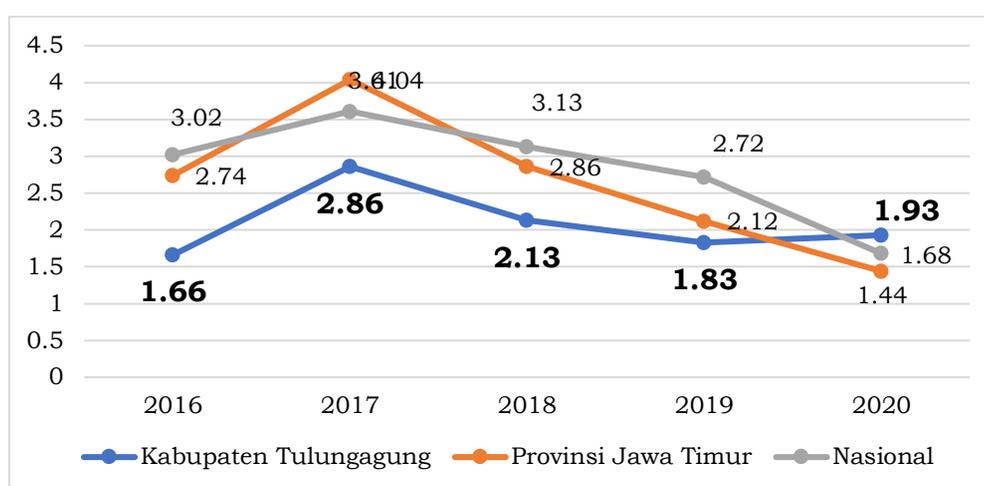
Kategori	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,56	0,07	-0,63	1,79	-0,82
B	Pertambangan dan Penggalian	1,39	4,73	2,73	1,03	-6,42
C	Industri Pengolahan	6,29	6,15	7,59	6,80	-2,00
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2,30	3,71	4,48	5,12	0,20
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,21	6,32	4,78	4,93	4,87
F	Konstruksi	4,03	7,53	7,25	6,23	-6,05
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,43	6,44	6,12	5,80	-8,50
H	Transportasi dan Pergudangan	7,45	8,34	7,89	8,07	-4,89
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,54	7,99	7,51	7,17	-9,31
J	Informasi dan Komunikasi	7,53	7,31	6,83	6,93	6,71
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,79	3,90	4,49	3,89	-0,03
L	Real Estate	5,43	5,87	6,73	6,24	2,95
M,N	Jasa Perusahaan	3,47	5,26	6,27	6,34	-6,33
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,32	3,12	3,52	3,42	-2,88
P	Jasa Pendidikan	7,13	5,82	6,82	7,02	2,63
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,15	6,11	7,54	7,83	8,14
R,S,T,U	Jasa lainnya	4,55	5,05	5,13	5,96	-13,83
	Kabupaten Tulungagung	5,02	5,08	5,21	5,32	-3,09

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung , 2021

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulungagung sebesar -3,09 persen mengalami kontraksi dibandingkan tahun sebelumnya akibat pandemi covid19. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah lapangan usaha Jasa Lainnya, sebesar 13,83 persen disusul lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 8,14 persen. Sedangkan lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan terendah yaitu lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar -9,31 persen disusul lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar -8,50 persen.

2.2.1.3 Inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang digunakan pemerintah untuk menilai keberhasilan pelaksanaan pembangunan terutama yang berkaitan dengan kemampuan pemerintah mengendalikan harga komoditi-komoditi yang beredar di masyarakat. Dengan melihat data inflasi dapat diketahui apakah perencanaan program pembangunan di bidang ekonomi yang telah dilaksanakan dapat berdaya guna dan berhasil guna dengan baik. Inflasi yang tinggi menunjukkan terjadinya kenaikan barang dan jasa kebutuhan masyarakat sehari-hari yang cukup tinggi atau dapat juga dikatakan menurunnya kemampuan daya beli masyarakat untuk memperoleh barang dan jasa tersebut (nilai riil uang menurun). Berikut adalah capaian indikator inflasi Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional 2016-2020.



Grafik 2. 7 Capaian Indikator Inflasi Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional 2016-2020

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, 2021

Terdapat 2 jenis inflasi, yaitu inflasi di tingkat konsumen yang dikenal dengan *Laju Inflasi* dan Inflasi di tingkat produsen produsen yang dikenal dengan *Laju Implisit*. Yang dihitung di Kabupaten Tulungagung saat ini adalah Laju Implisit, sedangkan Laju Inflasi tidak. Hal ini dikarenakan, Tulungagung bukan salah satu dari Kota/Kabupaten IHK yang merupakan kota/kabupaten yang menghitung laju inflasi (di Jawa Timur ada 8 kota/kab). Laju Inflasi Kabupaten Tulungagung mengacu pada Kota Kediri sebagai kota terdekat yang menghitung laju inflasi.

Laju Inflasi Kabupaten Tulungagung (yang mengacu pada laju inflasi Kota Kediri) adalah 1,93 persen, sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Angka ini lebih tinggi dari pada laju inflasi Jawa Timur yang sebesar 1,44 persen dan Nasional yang sebesar 1,68 persen.

2.2.1.4 Indeks Gini

Distribusi pendapatan yang merata antar daerah menjadi salah satu aspek yang menunjukkan tingkat keberhasilan pembangunan suatu daerah. Namun demikian, tidak mudah mengukur dengan tepat tingkat distribusi pendapatan di suatu daerah mengingat data pendapatan sulit untuk diperoleh. Untuk itu, analisis ukuran distribusi pendapatan digunakan

data pengeluaran sebagai proksi pendapatan, yakni data total pengeluaran rumah tangga.

Pengeluaran konsumsi dapat dibagi ke dalam dua kelompok yaitu pengeluaran konsumsi makanan dan pengeluaran konsumsi bukan makanan. Masyarakat yang memiliki pendapatan yang tinggi umumnya memiliki pengeluaran konsumsi non makanan yang tinggi. Dengan kata lain akan terjadi pergeseran pola konsumsi makanan menuju konsumsi bukan makanan apabila terjadi penambahan pendapatan pada suatu kelompok masyarakat. Hal tersebut diakibatkan oleh elastisitas permintaan makanan yang umumnya rendah. Ketika berada pada titik jenuh konsumsi makanan maka orang cenderung untuk membelanjakan pendapatannya terhadap konsumsi non makanan (yang umumnya memiliki elastisitas permintaan yang tinggi). Sehingga seringkali pola konsumsi juga digunakan sebagai salah satu alat ukur untuk menggambarkan kesejahteraan masyarakat.

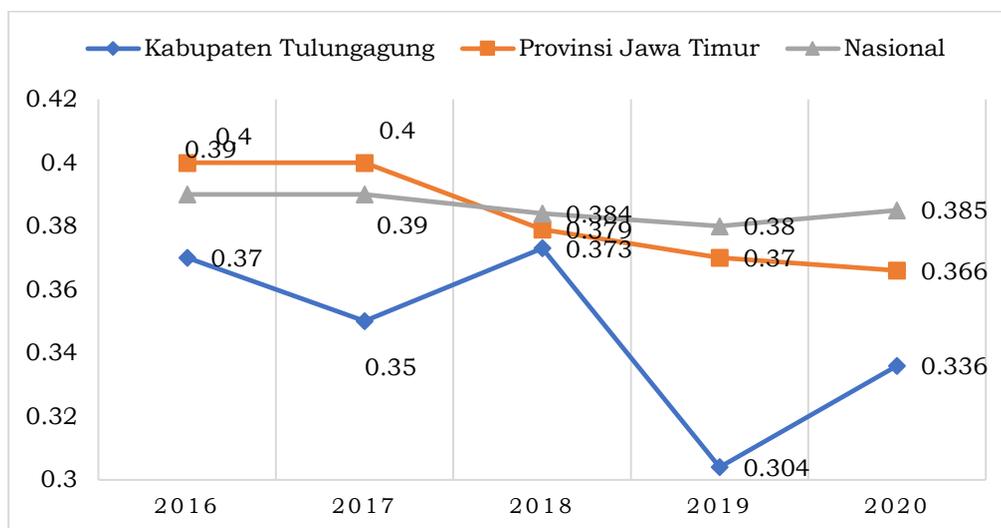
Indeks Gini atau koefisien Gini adalah salah satu ukuran umum untuk distribusi pendapatan atau kekayaan yang menunjukkan seberapa merata pendapatan dan kekayaan didistribusikan di antara populasi. Tingkat pemerataan pendapatan akan terjadi jika semua orang mendapatkan distribusi pendapatan yang sama rata, atau dengan kata lain Rasio Gini-nya sama dengan nol. Artinya distribusi pendapatan yang diterima hampir sama dengan banyak penduduk. Berikut arti nilai dari besaran gini rasio:

$G < 0.3$ ————— artinya ketimpangan rendah

$0.3 \leq G \leq 0.5$ ————— artinya ketimpangan sedang

$G > 0.5$ ————— artinya ketimpangan tinggi

Menurut kategori tersebut, maka Kabupaten Tulungagung dikategorikan memiliki ketimpangan sedang dan cenderung rendah, yang berarti distribusi pendapatan masyarakat Tulungagung cenderung semakin merata.



Grafik 2. 8 Indeks Gini Kabupaten Tulungagung 2016-2020

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, 2021

Gini Ratio merupakan alat untuk mengukur ketidak merataan distribusi pengeluaran penduduk. Gini Ratio bernilai antara 0 dan 1. Semakin mendekati 0 menandakan distribusi pengeluaran penduduk semakin merata. Gini Ratio Kabupaten Tulungagung tahun 2020 sebesar 0,336 sedikit lebih kecil dari Gini Ratio Jawa Timur yang sebesar 0,366 dan Gini Ratio Nasional

yang sebesar 0,385. Hal ini berarti, secara komulatif distribusi pengeluaran penduduk di Tulungagung lebih merata daripada Jawa Timur dan Nasional.

2.2.1.5 Indeks Desa Membangun

Indeks Desa Membangun mengklasifikasi Desa dalam lima (5) status, yakni: (1) Desa Sangat Tertinggal; (2) Desa Tertinggal; (3) Desa Berkembang; (4) Desa Maju; dan (5) Desa Mandiri. Klasifikasi Desa tersebut untuk menunjukkan keragaman karakter setiap Desa dalam rentang skor 0,27 – 0,92 Indeks Desa Membangun. Klasifikasi dalam 5 status Desa tersebut juga untuk menajamkan penetapan status perkembangan Desa dan sekaligus rekomendasi intervensi kebijakan yang diperlukan. Status Desa Tertinggal, misalnya, dijelaskan dalam dua status Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal di mana situasi dan kondisi setiap Desa yang ada di dalamnya membutuhkan pendekatan dan intervensi kebijakan yang berbeda. Menangani Desa Sangat Tertinggal akan berbeda tingkat afirmasi kebijakannya di banding dengan Desa Tertinggal. Dengan nilai rata-rata nasional Indeks Desa Membangun 0,566 klasifikasi status Desa ditetapkan dengan ambang batas sebagai berikut:

1. Desa Sangat Tertinggal: $\leq 0,491$
2. Desa Tertinggal: $> 0,491$ dan $\leq 0,599$
3. Desa Berkembang: $> 0,599$ dan $\leq 0,707$
4. Desa Maju: $> 0,707$ dan $\leq 0,815$
5. Desa Mandiri: $> 0,815$

Desa Berkembang terkait dengan situasi dan kondisi dalam status Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal dapat dijelaskan dengan faktor kerentanan. Apabila ada tekanan faktor kerentanan, seperti terjadinya guncangan ekonomi, bencana alam, ataupun konflik sosial maka akan membuat status Desa Berkembang jatuh turun menjadi Desa Tertinggal. Dan biasanya, jika faktor bencana alam tanpa penanganan yang cepat dan tepat, atau terjadinya konflik sosial terus terjadi berkepanjangan maka sangat potensial berdampak menjadikan Desa Tertinggal turun menjadi Desa Sangat Tertinggal. Sementara itu, kemampuan Desa Berkembang mengelola daya, terutama terkait dengan potensi, informasi/ nilai, inovasi/ prakarsa, dan kewirausahaan akan mendukung gerak kemajuan Desa Berkembang menjadi Desa Maju.

Tabel 2. 16 Status Desa di Kabupaten Tulungagung 2020

Status	Jumlah	Persentase
Desa Sangat Tertinggal	0	0%
Desa Tertinggal	0	0%
Desa Berkembang	178	69,26%
Desa Maju	75	29,18%
Desa Mandiri	4	1,56%

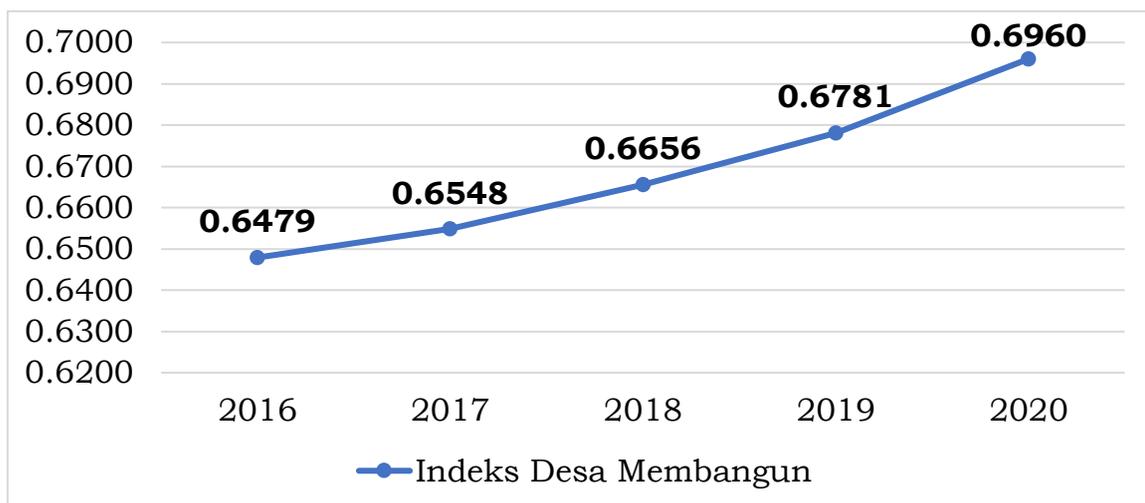
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, 2021

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2020 tidak ada desa yang berstatus Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal di Kabupaten Tulungagung dan angka tersebut juga sama pada tahun 2019 yakni

tidak ada yang berstatus desa tertinggal, namun pada 2018 jumlah desa tertinggal masih berjumlah 6 desa. Namun pada tahun 2020, enam desa tersebut telah berubah status menjadi desa berkembang. Beberapa diantaranya adalah Desa Rejosari Kecamatan Kalidawir, Desa Tulungrejo Kecamatan Besuki, Desa Wateskroyo Kecamatan Besuki, Desa Pakisrejo Kecamatan Tanggunggunung, Desa Sedayugunung Kecamatan Besuki, dan Desa Gondanggunung Kecamatan Pagerwojo. Perubahan status di Desa Rejosari dikarenakan terdapat program berupa penghijauan benih alpukat, tanggap bencana (kentongan) dan pengadaan perpustakaan (buku dan rak). Di Desa Tulungrejo Kecamatan Besuki terdapat program kios desa, tanggap bencana dan pengadaan perpustakaan desa. Di Desa Wateskroyo terdapat pengadaan perpustakaan desa dan tanggap bencana. Di Desa Pakisrejo Kecamatan Tanggunggunung terdapat pelaksanaan kegiatan berupa pengadaan, pelatihan, dan pembinaan yang dianggarkan oleh APBDes. Di Desa Sedayugunung Kecamatan Besuki terdapat kios desa, perpustakaan dan lapangan olahraga. Selanjutnya untuk di Desa- desa, perpustakaan dan lapangan olah raga. Pada Desa Gondanggunung Kecamatan Pagerwojo terdapat pengadaan MCK dan alat tanggap bencana. Program-program tersebut menjadikan keenam desa tertinggal berubah status menjadi desa berkembang.

Peningkatan juga terlihat pada status desa maju yang mana jumlah desa maju pada tahun 2020 juga mengalami peningkatan menjadi 75 desa dari tahun sebelumnya 2019 yang masih berjumlah 51 desa. Disisi lain, untuk desa mandiri tidak ada penurunan maupun kenaikan jumlah dari tahun 2019 ke 2020. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2020 status desa di Kabupaten Tulungagung telah mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2019.

Klasifikasi status Desa berdasar Indeks Desa Membangun ini juga diarahkan untuk memperkuat upaya memfasilitasi dukungan pemajuan Desa menuju Desa Mandiri. Desa Berkembang, dan terutama Desa Maju, kemampuan mengelola Daya dalam ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi secara berkelanjutan akan membawanya menjadi Desa Mandiri. Indeks Desa Membangun Kabupaten Tulungagung tahun 2020 berada pada angka 0,7092 tergambar pada grafik berikut:



Grafik 2. 9 Indeks Desa Membangun Kab. Tulungagung Tahun 2020

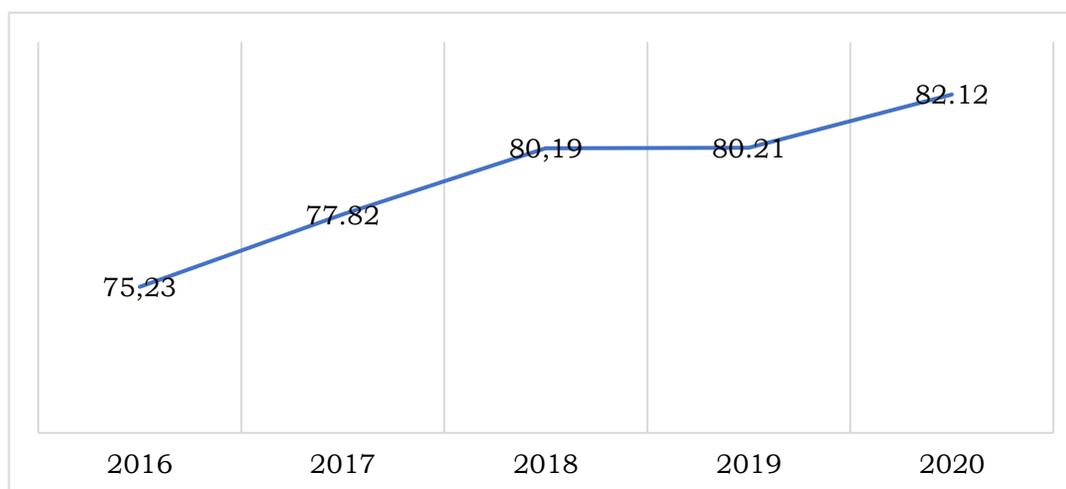
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, 2021

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa IDM (Indeks Desa Membangun) di Kabupaten Tulungagung mengalami peningkatan sebesar 0,0179. Kenaikan IDM tersebut diukur dari tiga indikator yaitu Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE), dan Indeks Ketahanan Sosial (IKS). Dilihat dari indikator Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) telah mengalami peningkatan sebesar 0,0171. Peningkatan IKL tersebut didukung oleh beberapa faktor antara lain pendayagunaan sumber daya alam dan Teknologi Tepat Guna (TTG) melalui desa wisata dan penguatan Pos Pelayanan Teknologi (POSYANTEK) di kecamatan. Untuk indikator Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) juga mengalami peningkatan, yaitu sebesar 0,0228. Kenaikan IKE tersebut didukung oleh pengembangan ekonomi kawasan perdesaan, BUMDes, unit usaha ekonomi masyarakat desa dan pengembangan kerja sama antar desa. Selanjutnya untuk indikator Indeks Ketahanan Sosial (IKS) juga telah mengalami peningkatan, sebesar 0,0137. Kenaikan tersebut didukung oleh partisipasi masyarakat dalam pengembangan lembaga masyarakat antara lain melalui PKK, konvergensi stunting, forum anak, program perlindungan anakan dan fasilitasi posyandu.

2.2.1.6 Survey Kepuasan Masyarakat

Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Survey Kepuasan Masyarakat bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.

Pengukuran kepuasan merupakan elemen penting dalam proses evaluasi kinerja dimana tujuan akhir yang hendak dicapai adalah menyediakan pelayanan yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih efektif berbasis dari kebutuhan masyarakat. Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna layanan. Kepuasan masyarakat dapat juga dijadikan acuan bagi berhasil atau tidaknya pelaksanaan program yang dilaksanakan pada suatu lembaga layanan publik. Data capaian Indikator Kinerja Daerah nilai rata-rata indeks kepuasan masyarakat pada unit pelayanan publik Kabupaten Tulungagung terhadap Pelayanan di lingkungan Kabupaten Tulungagung dari tahun 2016 s/d 2020 adalah sebagai berikut.



Grafik 2. 10 Survey Kepuasan Masyarakat Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, 2021

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan sosial dilakukan terhadap indikator yang mempengaruhi kesejahteraan sosial. Berikut ini indikator-indikator yang mempengaruhi kesejahteraan sosial di Kabupaten Tulungagung.

Tabel 2. 17 Capaian Indikator Fokus Kesejahteraan Sosial Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	70,82	71,24	71,99	72,62	73,00
2	Tingkat Kemiskinan	%	8,23	8,04	7,27	6,74	7,33
3	Jumlah Pengangguran	Jumlah	21.367	12.197	14.835	19.201	27.951
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,6	2,27	2,61	3,36	4,61
5	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	69,63	67,15	70,62	70,48	73,17
6	Tingkat Kesempatan Kerja	%	96,15	97,73	97,39	96,64	95,39

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, 2021

IPM Tulungagung sebesar 73,00, meningkat 0,38 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Pada sisi yang lain, Tingkat Kemiskinan, Jumlah Pengangguran dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga meningkat karena terimbas Covid-19. Kemiskinan meningkat 0,59 persen poin, jumlah pengangguran meningkat 8.750 orang dengan TPT 4,61 persen.

2.2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia

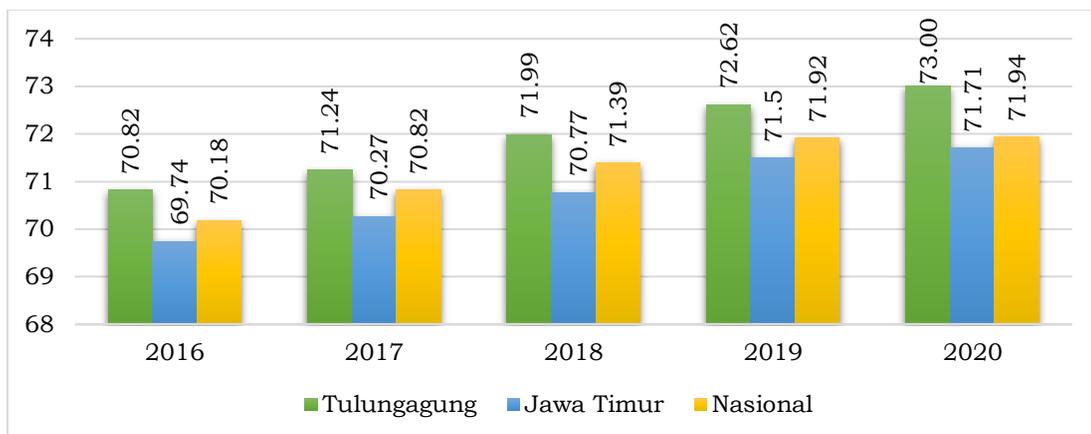
Pembangunan Manusia diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM dihitung secara komposit berdasarkan tiga indeks yang terdiri dari Indeks Pendidikan (Harapan lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah), Indeks Kesehatan (Usia Harapan Hidup) dan Indeks Daya Beli (Daya Beli). Berikut adalah tabel tentang indikator pembentuk IPM Kabupaten Tulungagung tahun 2016-2020:

Tabel 2. 18 Indikator Pembentuk IPM Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020
Usia Harapan Hidup	73,40	73,53	73,74	73,95	74,08
Rata-Rata Lama Sekolah	7,73	7,82	8,06	8,07	8,33
Harapan Lama Sekolah	13,03	13,04	13,05	13,15	13,31
Daya Beli (Juta)	9,881	10,114	10,455	10,891	10,705

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, 2021

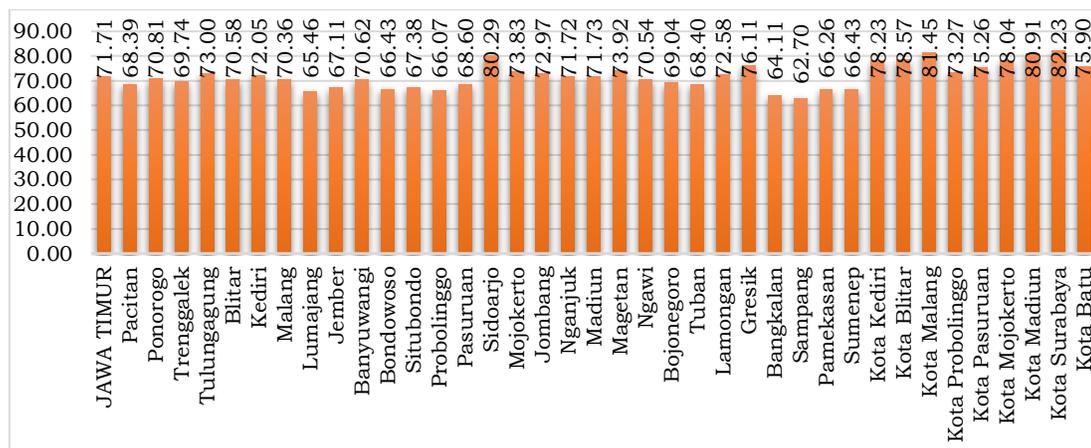
IPM Tulungagung yang sebesar 73,00, meningkat 0,38 poin dibandingkan tahun 2019. Hal ini didukung oleh beberapa komponen pembentuknya yaitu Usia Harapan Hidup (UHH) 74,08 tahun; Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang meningkat 0,25 tahun dan Harapan Lama Sekolah yang meningkat 0,16 tahun. Sedangkan daya beli menunjukkan penurunan karena terimbas Covid19 sekitar 186 ribu rupiah per bulan.



Grafik 2. 11 Indeks Pembangunan Manusia Nasional, Provinsi, dan Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020

Sumber: Data Statistik Provinsi Jawa Timur, 2021

Secara umum, IPM Kabupaten Tulungagung lebih baik dari pada IPM Jawa Timur dan IPM Nasional. Upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas manusia di Kabupaten Tulungagung berhasil dengan baik, bahkan lebih baik daripada Jawa Timur dan Nasional.



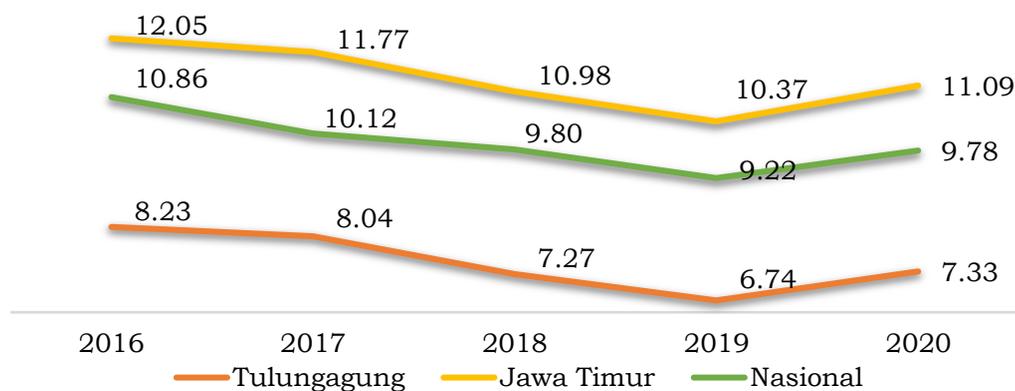
Grafik 2. 12 Indeks Pembangunan Manusia Kab/Kota di Jawa Timur Tahun 2020

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2021

IPM Tulungagung menempati urutan ke 14 di Jawa Timur. Peringkat pertama adalah Kota Surabaya dengan IPM 82,23 disusul Kota Malang sebesar 81,32. Sedangkan Kabupaten Sampang dan Bangkalan merupakan Kabupaten dengan IPM Terendah di Jawa Timur.

2.2.2.2 Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki pengeluaran per kapita perbulan lebih kecil dari Garis Kemiskinan. Garis kemiskinan adalah suatu garis yang menunjukkan nilai pengeluaran makanan per orang untuk memenuhi kebutuhan dasar 2100 kkal per hari ditambah dengan pengeluaran non makanan selama 1 bulan. Berikut adalah perkembangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, dan Nasional pada tahun 2016-2020.



Grafik 2. 13 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2016-2020

Sumber: Badan Statistik Kabupaten Tulungagung, 2021

Tabel 2. 19 Jumlah Penduduk Miskin, Garis Kemiskinan, dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 – 2020

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan)	Persentase Penduduk Miskin
2016	304.518	84,35	8,23
2017	314.532	82,80	8,04
2018	328.640	75,23	7,27
2019	341.651	70,01	6,74
2020	362.213	76,40	7,33

Sumber: Badan Statistik Kabupaten Tulungagung, 2021

Tingkat kemiskinan di Tulungagung sebesar 7,33 persen naik 0,59 persen poin dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Meskipun demikian, angka ini jauh lebih baik daripada tingkat kemiskinan di Jawa Timur yang sebesar 11,09 persen dan Nasional secara umum yang sebesar 9,78 persen.

Tabel 2. 20 Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2020

Kab/Kota	2019	2020
Jawa Timur	10,37	11,09
Kota Batu	3,81	3,89
Kota Malang	4,07	4,44
Kota Madiun	4,35	4,98
Kota Surabaya	4,51	5,02
Kota Mojokerto	5,15	6,24
Sidoarjo	5,32	5,59
Kota Pasuruan	6,46	6,66
Tulungagung	6,74	7,33
Kota Probolinggo	6,91	7,43
Kota Blitar	7,13	7,78
Kota Kediri	7,16	7,69
Banyuwangi	7,52	8,06
Pasuruan	8,68	9,26
Blitar	8,94	9,33
Jombang	9,22	9,94
Jember	9,25	10,09
Malang	9,47	10,15
Lumajang	9,49	9,83
Magetan	9,61	10,35
Ponorogo	9,64	9,95
Mojokerto	9,75	10,57
Jawa Timur	10,37	11,09
Kediri	10,42	11,4
Madiun	10,54	11,46
Trenggalek	10,98	11,62
Situbondo	11,20	12,22
Nganjuk	11,24	11,62
Gresik	11,35	12,4
Bojonegoro	12,38	12,87
Lamongan	13,21	13,85
Bondowoso	13,33	14,17
Pacitan	13,67	14,54
Pamekasan	13,95	14,6
Ngawi	14,39	15,44
Tuban	14,58	15,91
Probolinggo	17,76	18,61
Bangkalan	18,90	20,56
Sumenep	19,48	20,18

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2021

Tingkat kemiskinan di Tulungagung yang sebesar 7,33 persen menduduki peringkat ke 8 dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur yang terimbas Covid19. Apabila dibandingkan untuk tingkat kabupaten, Tulungagung menduduki peringkat kedua setelah Kabupaten Sidoarjo. Sementara itu, Sumenep dan Bangkalan merupakan kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Jawa Timur.

Selain menghadapi kemiskinan yang semakin meningkat, Kabupaten Tulungagung juga bertanggung jawab dalam penghapusan kemiskinan

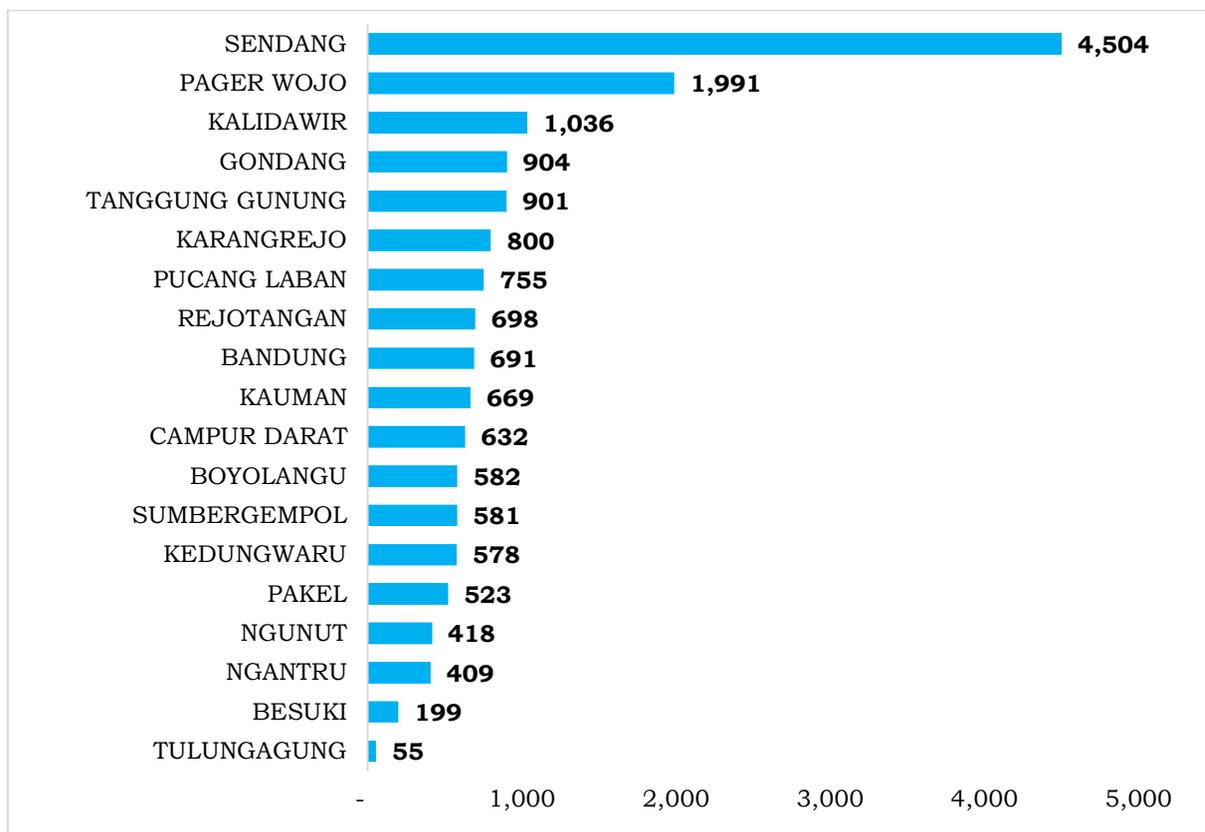
ekstrem. Penghapusan kemiskinan ekstrem telah menjadi salah satu target dalam Sustainable Development Goals. Selaras dengan target pemerintah pusat tersebut, Pemerintah Kabupaten Tulungagung juga memiliki komitmen yang sama, dimana pada akhir tahun 2024, target tingkat kemiskinan ekstrem adalah 0% atau tidak ada lagi penduduk miskin ekstrem di Kabupaten Tulungagung.

Penduduk miskin ekstrem adalah mereka yang paling miskin di antara orang miskin. Secara teknis, penduduk dinyatakan sebagai miskin ekstrem apabila memiliki pengeluaran perkapita per hari di bawah US \$ 1,9 PPP (Purchasing Power Parity) atau setara dengan 358.233 rupiah/kapita/bulan.

Berdasarkan data SUSENAS 2020, tingkat kemiskinan ekstrem di Kabupaten Tulungagung sebesar 1,43%. Tingkat kemiskinan ekstrem ini, terendah kedua dari seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur.

Dengan tingkat kemiskinan ekstrem yang relatif rendah, Kabupaten Tulungagung tidak termasuk sebagai lokasi prioritas penanganan kemiskinan ekstrem yang ditetapkan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), baik pada tahun 2021, maupun tahun 2022.

Oleh karena penanganan kemiskinan ekstrem ini sangat pelik, bersifat multidimensi dan membutuhkan multi intervensi, kita harus melakukan persiapan sejak sekarang, yaitu mulai tahun 2022 ini. Terlebih lagi jumlah penduduk miskin ekstrem di Kabupaten Tulungagung masih relatif besar. BPS mencatat pada tahun 2020 terdapat 14.880 penduduk miskin ekstrem di Kabupaten Tulungagung. Kalau mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) 2020, Kecamatan Sendang, Kecamatan Pagerwojo dan Kecamatan Kalidawir merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk miskin ekstrem paling besar di Kabupaten Tulungagung.



Grafik 2. 14 Jumlah Kemiskinan Ekstrem Per Kecamatan Tahun 2020

Sumber: Data DTKS, 2020

2.2.2.3 Ketenagakerjaan

Secara garis besar perkembangan pembangunan urusan ketenagakerjaan di Kabupaten Tulungagung tahun 2016 hingga 2020 mengalami ketidakstabilan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pengangguran pada tahun 2016 hingga 2017 mengalami penurunan yang signifikan. Selanjutnya pada tahun berikutnya yaitu 2018 dan 2020 mengalami kenaikan. Berikut merupakan grafik yang menyajikan jumlah pengangguran di Kabupaten Tulungagung selama tahun 2016 hingga 2020.



Grafik 2. 15 Jumlah Pengangguran Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, 2021

Jumlah pengangguran Kabupaten Tulungagung tahun 2020 sebesar 27.951 jiwa mengalami peningkatan sebesar 45,57 persen dibanding tahun 2019 yang berjumlah 19.201 jiwa. Peningkatan angka pengangguran yang cukup signifikan ini sebagai imbas dari pandemi Covid 19 yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan cukup dalam hingga -3,09 persen. Hal ini berimbas pada karyawan yang dirumahkan hingga pemutusan hubungan kerja (PHK). Sama halnya dengan tingkat pengangguran terbuka yang disajikan pada grafik berikut.



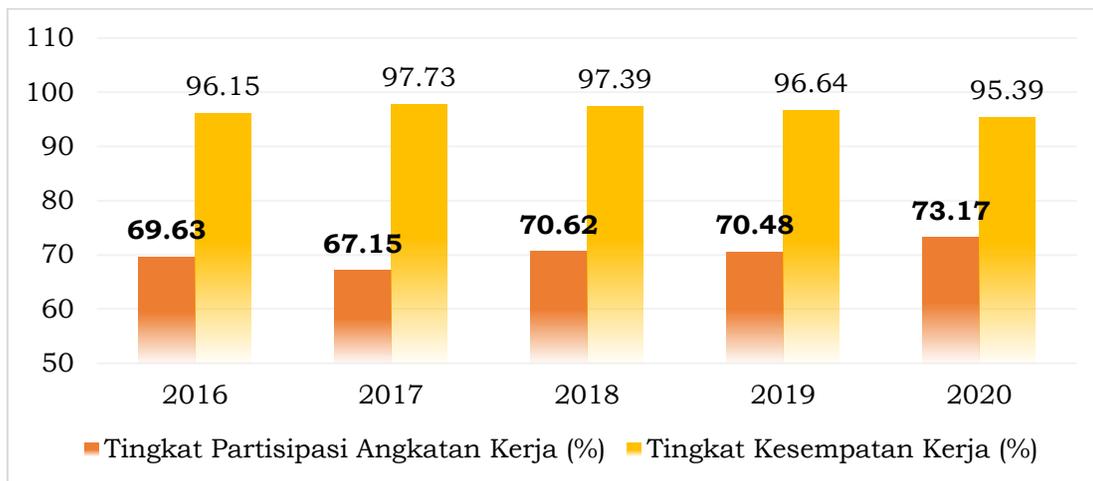
Grafik 2. 16 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, 2021

Angka pengangguran terbuka Kabupaten Tulungagung sepanjang empat tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Dari 2,27 di tahun 2017 menjadi 4,61 di tahun 2020. Pada tahun 2020 terjadi peningkatan yang cukup

signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Salah satu penyebabnya adalah adanya dampak pandemi pada sektor ekonomi yang menyebabkan lesunya aktivitas bisnis dan perekonomian sehingga menyebabkan terjadinya pengurangan jam kerja hingga pengurangan tenaga kerja.

Berikut merupakan grafik yang menyajikan tingkat partisipasi angkatan kerja dan kesempatan kerja di Kabupaten Tulungagung selama tahun 2016 hingga 2020.



Grafik 2. 17 Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Kesempatan Kerja Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, 2021

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Kesempatan Kerja Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2018 tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 70,62% dan turun menjadi sebesar 70,48% pada tahun 2019, hal ini menunjukkan adanya penurunan pasokan tenaga kerja untuk memproduksi barang dan jasa dalam perekonomian di Kabupaten Tulungagung. Sedangkan untuk tingkat kesempatan kerja di Kabupaten Tulungagung pada tahun 2018 sebesar 97,39% dan pada tahun 2019 turun menjadi sebesar 96,64% dan pada 2020 menjadi 95,39%.

2.2.3 Fokus Budaya dan Olahraga

Analisis kinerja atas fokus seni budaya dan olahraga dilakukan terhadap indikator-indikator yang berhubungan dengan seni budaya dan olahraga.

Tabel 2. 21 Capaian Indikator Fokus Budaya dan Olahraga Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Seni Budaya yang Mendapatkan Penghargaan	Jumlah	2	2	4	2	1
2	Seni budaya yang dilestarikan	Jumlah	100	100	100	100	110
3	Jumlah Atlet yang dibina	Jumlah	5.883	4.959	4.734	4.999	738

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
4	Jumlah Atlet yang berprestasi	Jumlah	96	110	102	81	48

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, 2021

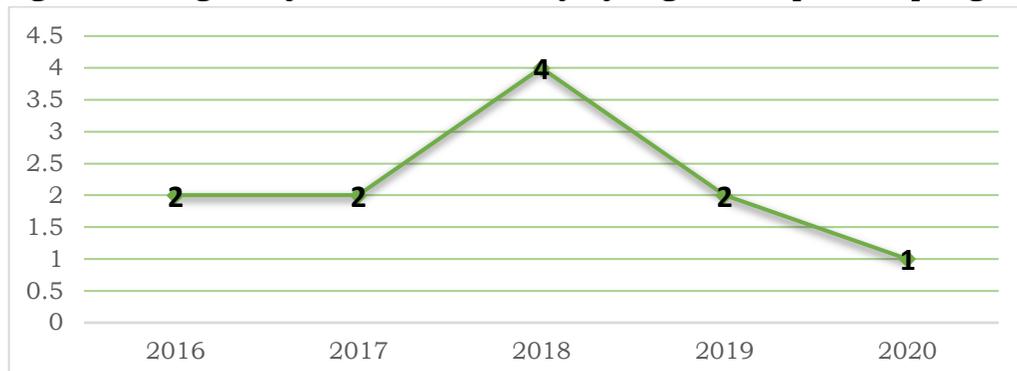
2.2.3.1 Budaya

Kehidupan sosial budaya masyarakat Kabupaten Tulungagung sebagian besar diwarnai oleh budaya dan bahasa Jawa. Melestarikan budaya masyarakat yaitu Upacara tradisional seperti Siraman Pusaka Kyai Upas, Temanten Kucing, Upacara Adat Ulur-Ulur, upacara adat labuh laut, Lingkungan Budaya seperti makanan dan minuman khas Tulungagung dan pakaian adat Tulungagung, kesenian seperti Jaran Kepang, Tiban, Teater Tradisional seperti ludruk, ketoprak, wayang, teater tutur seperti kentrung, jemblung, karawitan, dan lain-lain.

Peninggalan budaya di Kabupaten Tulungagung yang berupa Candi diantaranya adalah Candi Sanggrahan, Candi Penampihan (Asmara Bangun), Candi Gambar, Candi Gayatri, Candi Dadi, Candi Cungkup, Situs Mbah Bodho, Makam Ngadirogo, Musium Daerah, Makam Srigading, Makam Sunan Kuning, Makam Patih Tulungagung R.M. Ngabei Sastrodimedjo, Makam Surontanidan Hutan Wisata Kandung.

Kaitannya dengan hari jadi Kabupaten Tulungagung, erat hubungannya dengan Prasasti Lawadan. Pada tahun 1205 M, masyarakat Thani Lawadan di selatan Kabupaten Tulungagung, mendapatkan penghargaan dari Raja Daha terakhir, Kertajaya, atas kesetiaan mereka kepada Raja Kertajaya ketika terjadi serangan musuh dari timur Daha. Penghargaan tersebut tercatat dalam Prasasti Lawadan dengan candra sengkala "Sukra Suklapaksa Mangga Siramasa" yang menunjuk tanggal 18 November 1205 M. Tanggal keluarnya prasasti tersebut akhirnya dijadikan sebagai hari jadi Kabupaten Tulungagung sejak tahun 2003.

Berkenaan dengan hal diatas, diperlukan adanya pengamanan terhadap kawasan atau melindungi tempat serta ruang di sekitar bangunan bernilai sejarah, situs purbakala dan kawasan dengan bentukan geologi tertentu dengan membuat ketentuan-ketentuan yang perlu diperhatikan. Berikut adalah grafik mengenai jumlah seni budaya yang mendapatkan penghargaan.



Grafik 2. 18 Jumlah Seni Budaya yang Mendapatkan Penghargaan Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, 2021

Cagar budaya yang terdiri dari benda, struktur, situs dan kawasan merupakan warisan yang harus dipelihara sesuai amanat Undang-Undang No. 11 Tahun 2010. Selain berdasarkan gambaran data diatas terdapat hal yang lain yang perlu mendapatkan perhatian pada aspek kebudayaan adalah: Semakin lunturnya nilai-nilai budaya di masyarakat; semakin turunnya minat generasi muda terhadap budaya daerah; dan belum optimalnya pelestarian nilai-nilai budaya dalam penyelamatan aset budaya. Diperlukan adanya pengamanan terhadap kawasan atau melindungi tempat serta ruang di sekitar bangunan bernilai sejarah, situs purbakala dan kawasan dengan bentukan geologi tertentu dengan membuat ketentuan-ketentuan yang perlu diperhatikan.

Tabel 2. 22 Seni Budaya yang Dilestarikan Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase seni budaya yang dilestarikan	100	100	100	100	100

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, 2021

Pada tabel diatas indikator persentase seni budaya yang dilestarikan mencapai angka 100% dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Angka ini merupakan angka yang stabil, yang berarti Kabupaten Tulungagung terus berupaya untuk melestarikan seni budaya yang dimiliki.

2.2.3.2 Olahraga

Pembangunan kepemudaan dilaksanakan dalam bentuk pelayanan kepemudaan, yang berfungsi melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pelayanan kepemudaan diarahkan untuk pertama menumbuhkan patriotisme, dinamika, budaya prestasi, dan semangat profesionalitas; dan kedua meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Berikut merupakan data atlet yang ada di Kabupaten Tulungagung.

Tabel 2. 23 Jumlah Atlet di Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Atlet yang dibina	5.883	4.959	4.734	4.999	738
Jumlah Atlet yang berprestasi	96	110	102	81	48
Persentase Atlet berprestasi	1.63%	2.22%	2.15%	1.62%	6.50%

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, 2021

Data diambil dari hasil kegiatan tiga cabor yang dilaksanakan dari tanggal 16 s.d 25 November 2020 dari pada masa pandemi.

2.3 Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang

menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Untuk menganalisis gambaran umum kondisi daerah pada aspek pelayanan umum dapat dilihat dari indikator variabel aspek pelayanan umum terdiri dari:

2.3.1 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib

2.3.1.1 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

2.3.1.1.1 Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu indikator yang dapat mempengaruhi tingkat kesejahteraan suatu daerah. Pendidikan mempengaruhi kualitas sumber daya manusia yang menjadi salah satu unsur dalam pembangunan negara. Adapun capaian indikator urusan pendidikan Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020 dapat diketahui pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 24 Capaian Indikator Urusan Pendidikan Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020

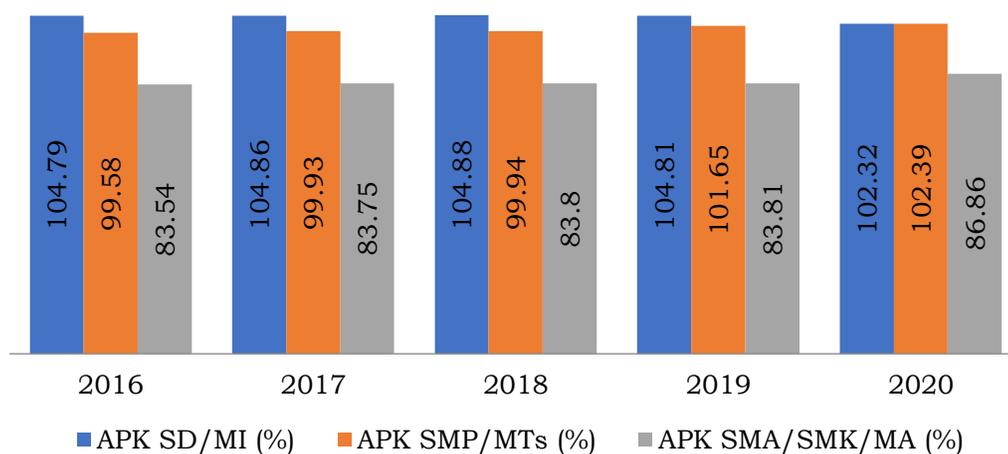
Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Angka Partisipasi Kasar SD/MI	%	104,79	104,86	104,88	104,81	102,32
Angka Partisipasi Kasar SMP/Mts	%	99,58	99,93	99,94	101,65	102,39
Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA	%	83,54	83,75	83,80	83,81	86,86
Angka Partisipasi Murni SD/MI	%	98,13	98,31	98,51	98,58	97,43
Angka Partisipasi Murni SMP/Mts	%	83,53	83,68	83,70	83,73	86,98
Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/MA	%	61,86	64,88	67,33	70,71	63,51
Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI/Paket A	%	0,03	0,01	0,2	0,2	0,01
Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTS/Paket B	%	0,26	0,004	0,21	0,21	0,03
Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA/Paket C	%	0,63	0,49	0,43	0,40	0,40
Angka Kelulusan (AL) SD/MI/Paket A	%	100	100	100	100	100
Angka Kelulusan (AL) SMP/MTS/Paket B	%	100	100	100	94,54	100
Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA/Paket C	%	100	100	100	100	100
Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTS	%	99,61	99,07	99,61	99,61	99,61
Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTS ke SMA/SMK/MA	%	88,4	91,05	90,99	90,99	90,99
Persentase (%) jumlah anak usia 5-6 tahun yang sdh tamat atau sedang belajar di satuan pendidikan PAUD	%	100	100	100	100	100
Persentase (%) jumlah anak usia 7-12 tahun yang sdh tamat atau sedang belajar di satuan pendidikan sekolah dasar	%	100	100	100	100	100
Persentase (%) jumlah anak usia	%	100	100	100	100	100

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
12-15 tahun yang sdh tamat atau sedang belajar di satuan pendidikan SMP						
Angka Harapan Lama Sekolah	tahun	13,03	13,04	13,05	13,15	13,31
Rata-Rata Lama sekolah	tahun	7,73	7,82	8,06	8,07	8,33
Rasio Guru dan Murid SD	Rasio	1:13	1:10	1:13	1:12	n/a
Rasio Guru dan Murid SMP	Rasio	1:16	1:14	1:15	1:14	n/a

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, 2021

Secara garis besar angka putus sekolah SD, SMP dan SMA tahun 2016 hingga 2020 mengalami penurunan. Perkembangan positif terkait urusan pendidikan sejalan dengan dengan peningkatan angka kelulusan SD, SMP, SMA dan angka melanjutkan sekolah ke jenjang SMP serta SMA. Untuk indikator melanjutkan sekolah ke jenjang berikutnya belum mencapai 100 %, hal ini disebabkan karena ada siswa yang melanjutkan ke Pondok pesantren atau terkena kasus orang tua, misalnya diajak orang tua pindah tanpa diketahui datanya

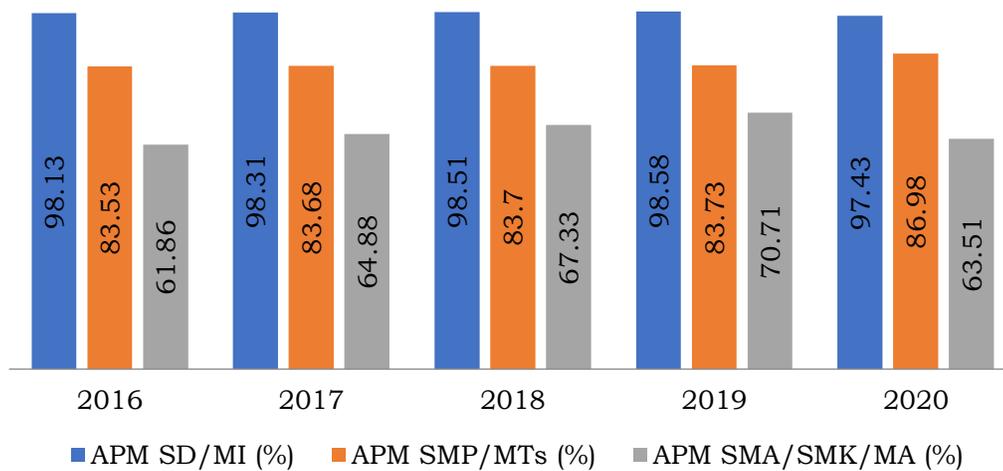
Berikut merupakan grafik yang menyajikan angka partisipasi kasar Kabupaten Tulungagung tahun 2016 hingga 2020.



Grafik 2. 19 Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, 2021

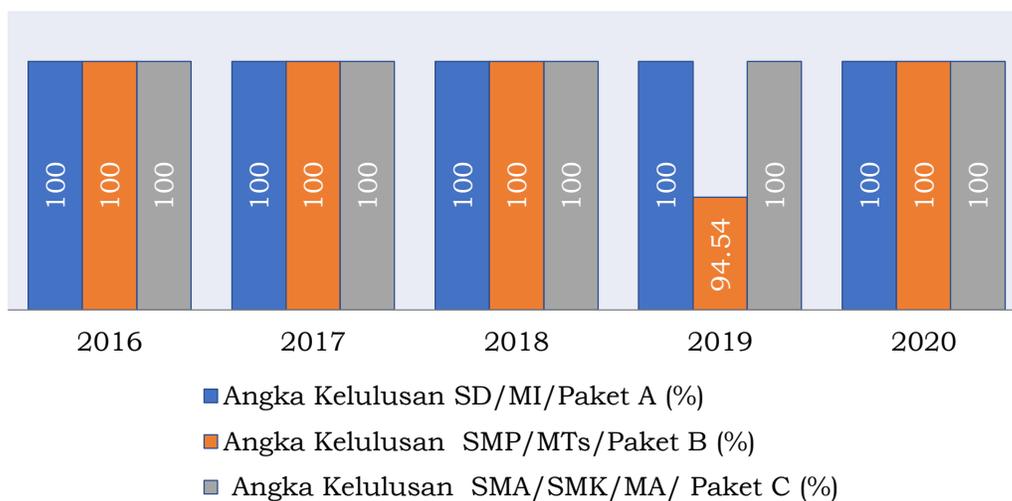
Untuk APK ini ada yang melebihi 100 % hal ini disebabkan karena banyak siswa yang berasal dari luar kota yang bersekolah di Kabupaten Tulungagung, sehingga ada jumlah penduduk dengan usia sekolah /tertentu.



Grafik 2. 20 Angka Partisipasi Murni Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, 2021

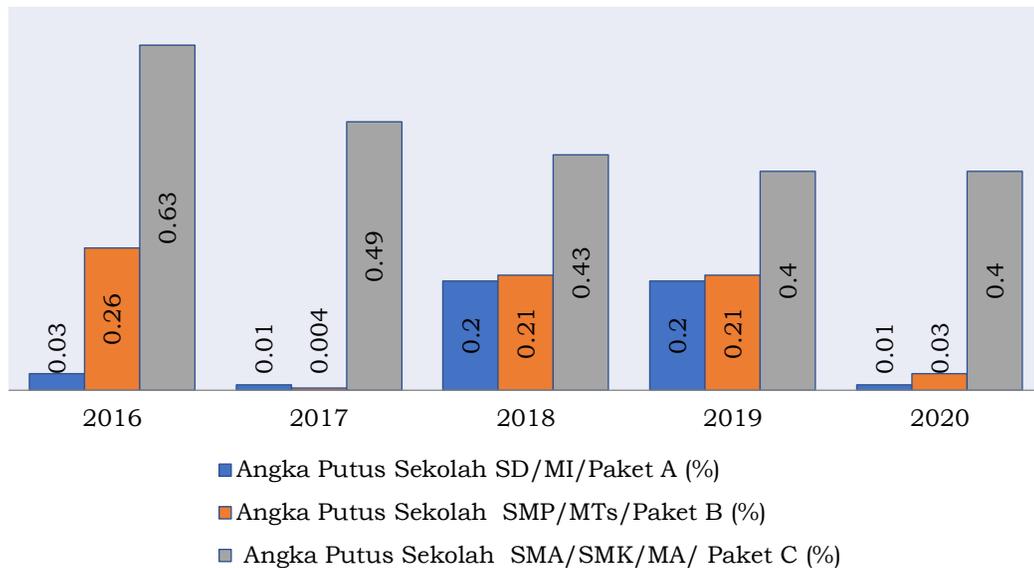
Sedangkan angka kelulusan untuk jenjang pendidikan SMA/SMK/MA dari tahun 2016-2020 sebesar 100%. Selanjutnya, berikut merupakan grafik yang menyajikan angka kelulusan Kabupaten Tulungagung tahun 2016 hingga 2020.



Grafik 2. 21 Angka Kelulusan Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, 2021

Pada grafik angka kelulusan Kabupaten Tulungagung menunjukkan bahwa pada 2019 khususnya pada angka kelulusan SMP/MTs/Paket B tidak mencapai angka 100, tetapi 94,54. Hal tersebut dikarenakan siswa ada yang sakit dan meninggal serta juga ada yang terkena imbas kasus dari orang tua.



Grafik 2. 22 Angka Putus Sekolah Kab. Tulungagung Tahun 2016-2020

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, 2021

Terkait angka putus sekolah sebenarnya bukan karena masalah biaya, tetapi dikarenakan salah satunya adalah pindah ke pondok pesantren.

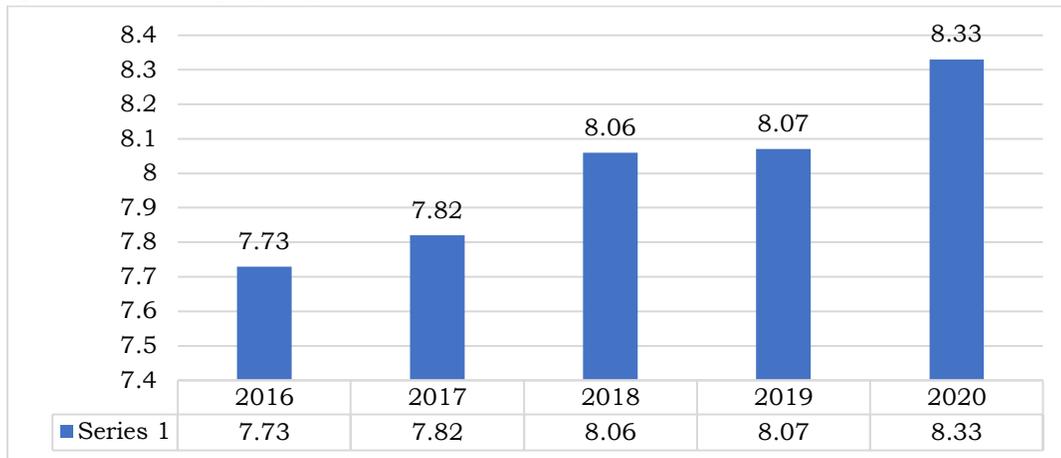
Selain empat aspek tersebut terdapat dua aspek lagi yang kemudian menjadi salah satu indikator penting dalam urusan pendidikan. Untuk mencermati salah satu keberhasilan pembangunan pendidikan dapat diukur melalui Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) atau *Expected Years of Schooling (EYS)* didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang dan dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) atau *Mean Years of Schooling (MYS)* didefinisikan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas untuk menempuh pendidikan formal. Indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) ini dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang dijalankan. Berikut grafik yang menggambarkan angka harapan lama sekolah di Kabupaten Tulungagung.



Grafik 2. 23 Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, 2021

Berikut grafik yang menggambarkan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Tulungagung.



Grafik 2. 24 Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, 2021

Tabel 2. 25 Capaian SPM Bidang Pendidikan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Realisasi 2019	Realisasi 2020
1	Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan dasar (SD/MI/SMP/MTs)	100%	80,61%
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan kesetaraan	100%	26,55%
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	100%	97,80%

Sumber: Dinas Pendidikan, 2021

2.3.1.1.1 Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goal's (SDG's) merupakan agenda internasional yang menjadi kelanjutan dari Tujuan Pembangunan Milenium atau Millennium Development Goal's (MDG's). SDG's disusun untuk menjawab tuntutan kepemimpinan dunia dalam mengatasi kemiskinan, kesenjangan, dan perubahan iklim dalam bentuk aksi nyata yang memiliki 17 (tujuh belas) tujuan global dengan 169 (seratus enam puluh sembilan) target yang akan dijadikan tuntunan kebijakan dan pendanaan untuk 15 tahun kedepan dan diharapkan dapat tercapai pada tahun 2030. Tujuan dan target tersebut meliputi 3 (tiga) dimensi pembangunan berkelanjutan, yaitu: lingkungan, sosial, dan ekonomi.

Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang terkait dengan urusan Pendidikan terdiri dari 15 indikator dengan capaian sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 26 Capaian Indikator TPB Urusan Pendidikan Kabupaten Tulungagung 2016-2020

Indikator TPB/SDG's	Target (Perpres 59/2017)	Capaian/Tahun					Keterangan
		2016	2017	2018	2019	2020	
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat	Meningkat menjadi 82,2%	86,70%	86,70%	87,9%	88,60%	87,00%	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional
Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran	Meningkat menjadi 77,4%.	79,85%	85,54%	90,16%	91,43%	93,94%	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional
Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	Meningkat	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Data Belum Tersedia
Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	Meningkat menjadi 84,2%	25,60%	55,10%	65,10%	66,01%	70,10%	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional
Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B	Meningkat menjadi 81%	25,30%	25,30%	36,10%	36,40%	83,58%	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	Meningkat menjadi 114,09%	100,00 %	103,20 %	103,00 %	100,57 %	104,00 %	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	Meningkat menjadi 106,94%	99,70%	104,90 %	106,60 %	107,83 %	99,93%	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional
Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	Meningkat menjadi 8,8 tahun	7,73	7,82	8,06	8,07	8,33	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional
Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	Meningkat menjadi 77,2%	83,50%	85,00%	99,80%	57,66%	65,52%	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional
Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi	Meningkat	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Data Belum Tersedia

Indikator TPB/SDG's	Target (Perpres 59/2017)	Capaian/Tahun					Keterangan
		2016	2017	2018	2019	2020	
informasi dan komunikasi (TIK).							
Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	Meningkat	1. 96,70%	1. 95,80%	1. 94,90%	1. 93,37%	1. 98,00%	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional
Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	Meningkat menjadi 96,1%	n/a	96,50%	96,54%	97,03%	97,01%	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional
Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun	Meningkat	0	0	0	0	0	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional
Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).	Meningkat	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional
Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	Meningkat	62,20%	64,31%	52,05%	56,15%	n/a	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional

Sumber: Dokumen KLHS Kabupaten Tulungagung 2018-2023

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat pada capaian dan targetnya masih terdapat gap (selisih kurang) yang beragam, dimana gap paling besar terdapat pada indikator Persentase SD/MI berakreditasi minimal B yang mencapai -14,10%, sedangkan gap paling kecil terdapat pada indikator Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun sebesar -0,47%. Adapun urutan

indikator berdasarkan besarnya gap dari yang terbesar hingga terkecil secara lebih lengkap adalah sebagai berikut:

1. Persentase SD/MI berakreditasi minimal B yang mencapai -14,10%, sedangkan gap paling kecil terdapat pada indikator Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun sebesar - 0,47%;
2. Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebesar -11,68%;
3. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat sebesar -10,09%;
4. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat sebesar -7,01%;
5. Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun sebesar -0,47%.

2.3.1.1.2 Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu pelayanan dasar yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan manusia di Indonesia. Selain indeks kesehatan, terdapat juga variabel-variabel kesehatan lainnya. Secara rinci capaian variabel kesehatan tersebut terdapat dalam tabel Perkembangan pembangunan urusan kesehatan Kabupaten Tulungagung tahun 2016-2020 berikut:

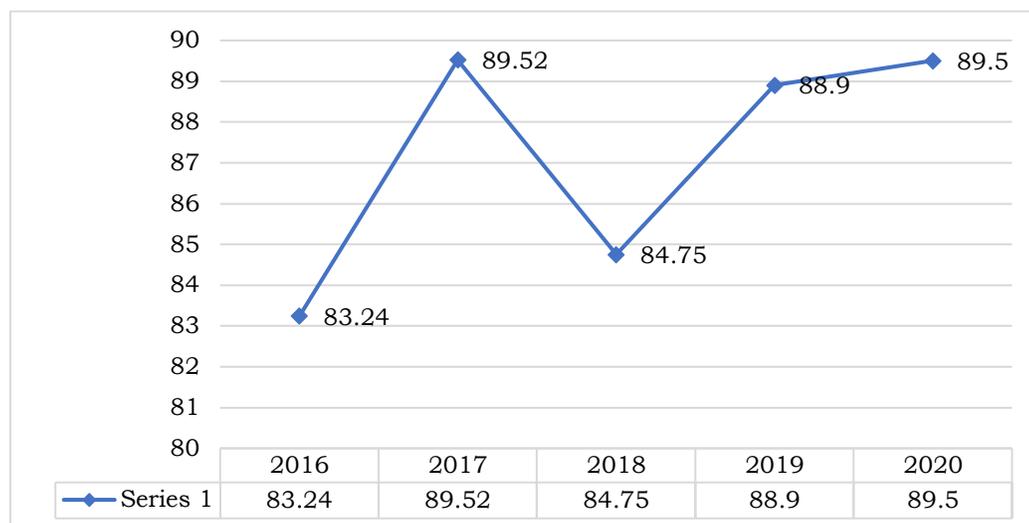
Tabel 2. 27 Capaian Indikator Urusan Kesehatan Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 – 2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Kematian Bayi	Jiwa	136	111	106	126	146
Angka Harapan Hidup	Tahun	73,40	73,53	73,74	73,95	73,95
Angka Kematian Bayi	/1000 KH	8,96	7,59	7,19	8,77	10,2
Jumlah kematian Ibu	Jiwa	20	17	18	11	15
Angka Kematian Ibu	/100.000 KH	131,73	116,31	122,04	76,58	104,75
Jumlah Posyandu Balita	Pos	1.240	1.240	1240	1240	1239
Jumlah Posyandu Purnama dan Mandiri (PURI)	Unit	1.110	1.115	1114	1162	1147
Jumlah Posyandu Lansia	Unit	350	404	408	429	408
Jumlah Kader Posyandu Aktif	Orang	6.200	6.200	6200	6200	6195
Jumlah Puskesmas	Unit	32	32	32	32	32
Balita Gizi Buruk	kasus	51	48	32	36	54
Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani	%	83,24	89,52	84,75	88,9	89,5
Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga kesehatan Yang memiliki Kompetensi Kebidanan	%	93,60	91,02	92,6	91,39	91,76
Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization	%	91,14	84,5	90,77	94,22	91,51
Cakupan Balita Gizi buruk yang mendapat Perawatan	%	100	100	100	100	100
Cakupan penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC	%	30,32	34	44	100	100
Cakupan penemuan dan penanganan Penderita Penyakit DBD	%	100	100	100	100	100
Cakupan Pelayanan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	%	16,16	n/a	74,64	n/a	n/a

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Cakupan kunjungan bayi	%	92,69	97,28	96,88	96,89	87,06

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, 2021

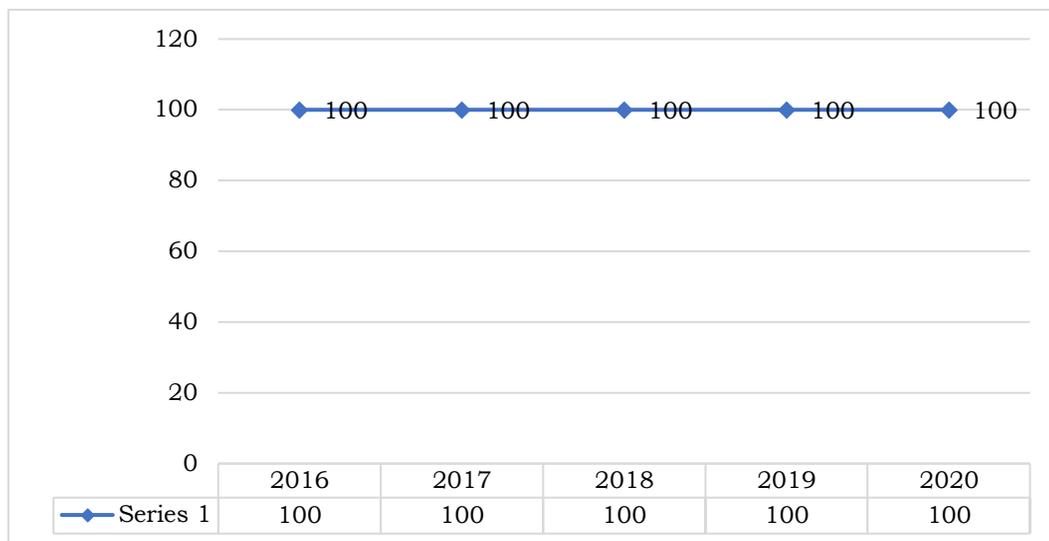
Kemajuan urusan kesehatan dapat diukur dari beberapa indikator diantaranya cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani dan cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan. Indikator diatas secara umum menunjukkan tren yang positif, dimana cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani tahun 2016 mencapai angka 83,24% kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2017 menjadi 89,52%. Pada tahun 2018 angkanya menurun kembali menjadi 84,75%. Kemudian kembali meningkat pada hingga tahun 2020 menjadi 89,5%. Komplikasi kehamilan yang paling umum adalah tekanan darah tinggi, pre-eklamsia, kelahiran prematur, keguguran, diabetes gestasional, anemia, dan infeksi saluran kemih. Berikut merupakan grafik pencapaiannya.



Grafik 2. 25 Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, 2021

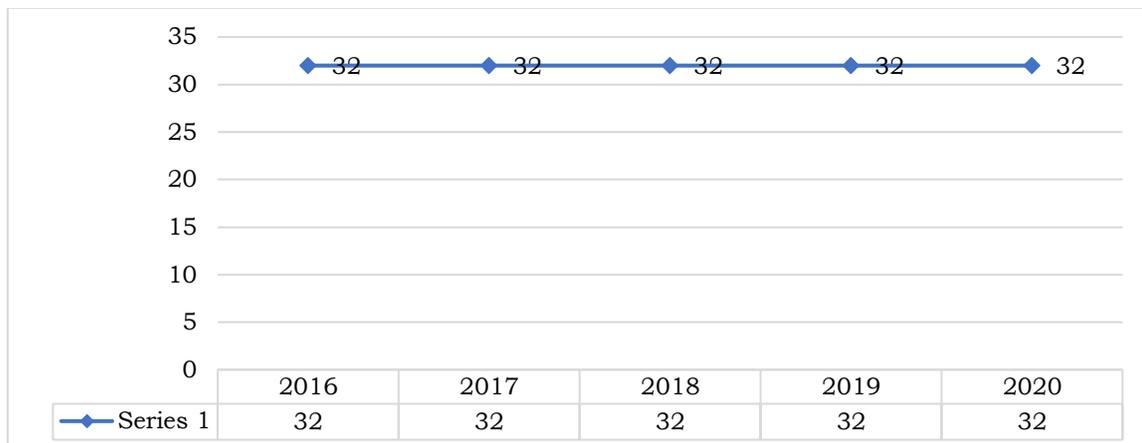
Balita gizi buruk atau malnutrisi adalah kondisi ketika anak tidak menerima nutrien, mineral, dan kalori yang cukup untuk membantu perkembangan organ vital. Dalam hal ini, kelebihan asupan nutrisi juga menyebabkan balita gizi buruk. cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan di kabupaten Tulungagung memiliki capaian yang sempurna setiap tahunnya. Sejak tahun 2016 hingga tahun 2020 capaiannya adalah 100%. Berikut merupakan grafik pencapaiannya.



Grafik 2. 26 Cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung, 2021

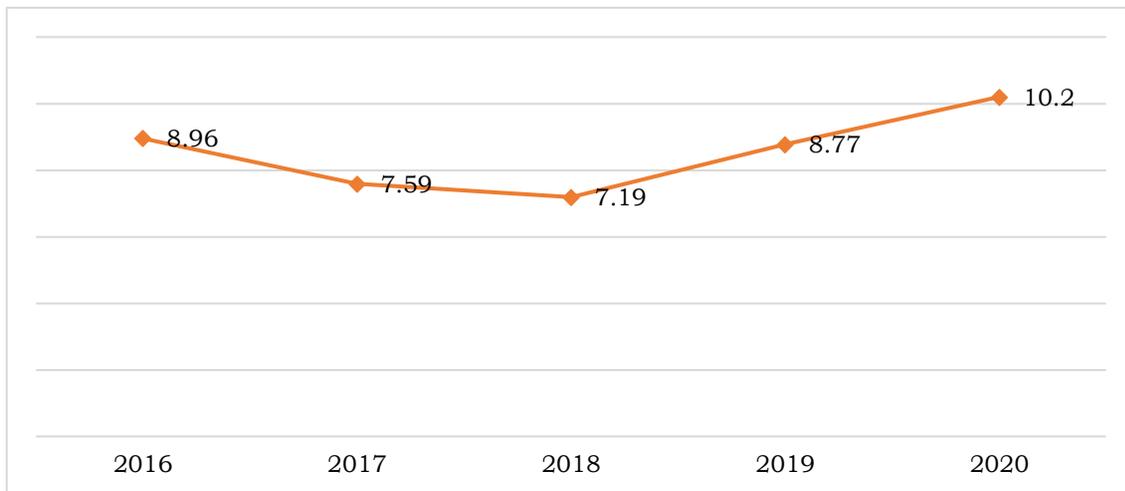
Dalam kurun waktu 2016-2020, jumlah puskesmas mengalami pertambahan yang tidak terlalu besar. Jika dibandingkan dengan pertambahan jumlah penduduk Kabupaten Tulungagung, maka pertambahan jumlah puskesmas belum dapat mengimbangnya. Jumlah puskesmas yang ada di kabupaten Tulungagung pada tahun 2016 ada 32 puskesmas. Jumlah tersebut terus bertahan hingga tahun 2020. Berikut merupakan grafik pencapaian jumlah puskesmas di Kabupaten Tulungagung.



Grafik 2. 27 Jumlah Puskesmas Kab. Tulungagung Tahun 2016-2020

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, 2021

Salah satu indikator keberhasilan program kesehatan di suatu wilayah dapat dilihat dari tinggi rendahnya besaran AKB pada periode tertentu. AKB didefinisikan sebagai banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun per 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Nilai normatif AKB kurang dari 40 sangat sulit diupayakan penurunannya (*hard rock*), antara 40-70 tergolong sedang namun sulit untuk diturunkan (*medium rock*), dan lebih besar dari 70 tergolong mudah untuk diturunkan (*soft rock*). Berikut series AKB periode 2016 – 2020.

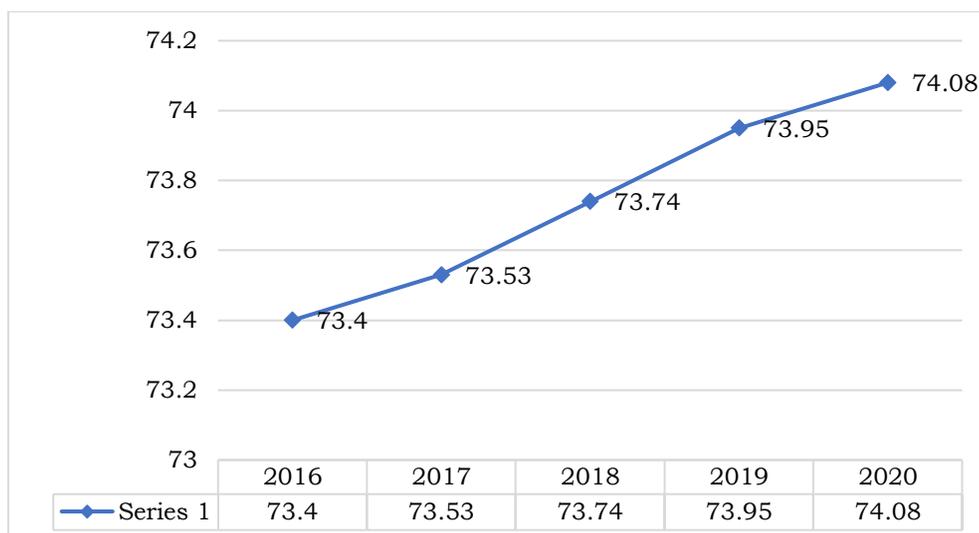


Grafik 2. 28 Angka Kematian Bayi Kab. Tulungagung Tahun 2016-2020

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, 2021

Berdasarkan grafik diatas terlihat bahwa capaian angka kematian bayi di Kabupaten Tulungagung tahun 2016-2020 cenderung fluktuatif. Kenaikan capaian hanya terjadi pada tahun 2019 dan 2020 sementara tahun 2016-2018 mengalami penurunan capaian. Penyebab terbanyak kematian bayi adalah *asfikia* (bayi lahir tidak bisa bernafas secara spontan) dan bayi berat lahir sangat rendah / BBLR (< 2.500 gr). Beberapa upaya yang dilakukan untuk menurunkan AKB adalah pemberian Fe pada remaja putri, pendewasaan usia pernikahan, intervensi spesifik pada ibu hamil KEK, rujukan dini terencana pada ibu hamil, persalinan di fasilitas kesehatan, jaminan persalinan persalinan, bimbingan teknis pada petugas kesehatan dan pemenuhan sarana prasarana.

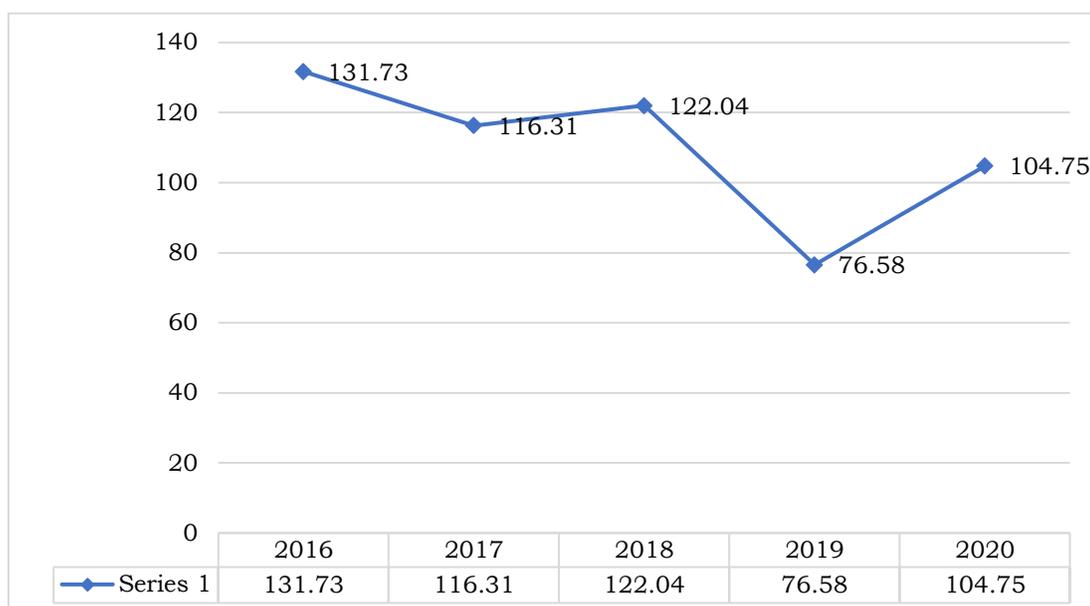
Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Tulungagung meningkat, pada tahun 2016 angkanya mencapai 73,40 tahun kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2017 menjadi 73.53 tahun dan kembali meningkat pada tahun 2018 menjadi 73,74 tahun. pada tahun 2019 sebesar 73,95 tahun dan pada tahun 2020 sebesar 74,08 tahun. Kenaikan AHH ini menunjukkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat baik melalui peningkatan kualitas pelayanan, maupun kualitas lingkungan yang diiringi peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat oleh masyarakat. Berikut merupakan grafik pencapaiannya.



Grafik 2. 29 Angka Harapan Hidup Kab. Tulungagung Tahun 2016-2020

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, 2021

Angka Kematian Ibu dari tahun 2016 sampai tahun 2020 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2016 angkanya mencapai 131,73 per 100.000 Kelahiran Hidup, dimana penurunan terjadi di tahun 2017 yaitu sebesar 116,31 per 100.000 Kelahiran Hidup dan pada tahun 2018 sebesar 122,04 per 100.000 Kelahiran hidup. Kemudian pada tahun 2019 menurun drastis menjadi 76,58 per 100.000 Kelahiran hidup dan pada 2020 meningkat menjadi 104,75 per 100.000 Kelahiran hidup. Penyebab kematian ibu antara lain eklamsia, perdarahan dan penyakit penyerta yang diderita ibu. Untuk menurunkan AKI upaya yang dilakukan antara lain pemeriksaan *triple* eliminasi pada semua ibu hamil, pemeriksaan ibu hamil yang berkualitas sesuai standar, persalinan di fasilitas kesehatan, rujukan dini terencana, jaminan persalinan, bimbingan teknis pada petugas kesehatan dan pemenuhan sarana prasarana. Berikut merupakan grafik pencapaiannya.



Grafik 2. 30 Angka Kematian Ibu Kab. Tulungagung Tahun 2016-2020

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, 2021

Kemajuan urusan kesehatan Kabupaten Tulungagung juga tidak bisa terlepas dari ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan Kabupaten Tulungagung. Secara rinci data mengenai sarana dan prasarana kesehatan Kabupaten Tulungagung tahun 2016-2020 terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 2. 28 Sarana dan Prasarana Kesehatan Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020

Unsur Kesehatan	2016	2017	2018	2019	2020
RSUD	1	1	1	1	1
Rumah Sakit TNI/Polisi	1	1	1	1	1
Rumah Sakit Umum Swasta	6	7	7	7	7
Rumah Sakit Khusus Swasta	4	4	3	3	3
Puskesmas	32	32	32	32	32
Puskesmas Pembantu	66	66	66	66	66

Puskesmas Keliling	36	31	43	37	37
Posyandu Balita	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240
Balai Pengobatan/Klinik	23	23	22	31	31
Polindes	178	178	167	167	167
Dokter	218	233	394	476	366
Perawat Kesehatan	1386	1526	1.656	1.697	1.140
Bidan	696	754	899	666	794

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, 2021

Sarana dan prasarana kesehatan Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020 ada beberapa yang menurun dan ada beberapa yang meningkat dan bahkan ada yang tetap. Beberapa unsur kesehatan yang terus mengalami peningkatan yaitu puskesmas, balai pengobatan/klinik, dokter, perawat kesehatan dan bidan. Hingga tahun 2020 jumlah puskesmas di Kabupaten Tulungagung ada 32, balai pengobatan/klinik ada 31, dokter ada 366, angka ini menurun jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai 476. Selanjutnya adalah perawat kesehatan ada 1.140 dimana angka tersebut menunjukkan bahwa ada penurunan dari tahun 2019 yang mencapai angka 1.697, serta bidan ada 794.

Dibalik adanya peningkatan sarana dan prasarana kesehatan di Kabupaten Tulungagung, terdapat juga beberapa jumlah kasus penderita penyakit menular dan tidak menular serta prevalensi stunting balita usia 0-59 bulan di Kabupaten Tulungagung. Secara rinci data terkait variabel penyakit menular dan tidak menular di Kabupaten Tulungagung dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel 2. 29 Variabel Penyakit Menular dan Tidak Menular Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020

Jenis Penyakit	2016	2017	2018	2019	2020
HIV dan AIDS	295	324	392	390	283
Kusta	7	26	39	34	10
TB	980	1043	1216	1253	818
Jantung	21.899	23.762	21.011	3.031	3.230
Diabetes	14.458	16.581	16.473	16.174	2.703
Hipertensi	7.195	7.949	8.030	8.395	1.547
Kanker	3.847	4.571	4.374	115	1.574
COVID-19	0	0	0	0	1354
Prevalensi stunting balita usia 0-59 bulan	25,7	22,1	10,4	5,32	5,51

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, 2021

Berdasarkan data tabel diatas secara keseluruhan jumlah kasus penderita penyakit menular dan tidak menular serta prevalensi stunting balita usia 0-59 bulan di Kabupaten Tulungagung pada tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi. Untuk penyakit menular TB jumlah penderitanya dari tahun ke tahun cenderung meningkat dan jumlah penderitanya adalah yang paling banyak dibanding dengan jenis penyakit menular lainnya. Namun pada tahun 2020 jumlah penderita TB menurun menjadi 818 jika dibanding dengan tahun 2019 yang mencapai 1253. Sementara untuk kategori penyakit

tidak menular secara umum jumlah penderitanya terus mengalami peningkatan terutama pada penyakit jantung, dan kanker. Pada kategori penyakit tidak menular, jantung adalah penyakit yang memiliki jumlah penderita paling banyak sementara kanker adalah penyakit yang memiliki jumlah penderita paling sedikit. Disamping itu, capaian prevalensi stunting balita usia 0-59 bulan menunjukkan naik turun (fluktuatif) dari tahun ke tahun.

Kabupaten Tulungagung menjadi lokasi fokus (lokus) penanganan stunting mulai tahun 2021 dengan Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas RI Nomor : Kep 42/M.PPN/HK/04/2020 tentang Penetapan Perluasan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2021 dan berlanjut di tahun 2022 berdasarkan Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas RI Nomor : Kep.10/M.PPN/HK/02/2021 tentang Penetapan Perluasan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2022. Menindaklanjuti hal tersebut Pemerintah Kabupaten Tulungagung telah menetapkan 10 desa lokus stunting pada tahun 2021 melalui Keputusan Bupati Tulungagung Nomor : 188.45/169/013/2020 tentang Penetapan Lokasi Fokus Penanganan Percepatan Pencegahan Stunting Kabupaten Tulungagung Tahun 2021 dan 10 desa lokus stunting pada tahun 2022 melalui Keputusan Bupati Tulungagung Nomor : 188.45/169/013/2021 tentang Penetapan Lokasi Fokus Penanganan Percepatan Pencegahan Stunting Kabupaten Tulungagung Tahun 2022. Berikut adalah 10 persebaran desa lokus stunting pada tahun 2021 dan 10 desa lokus pada tahun 2022 yang ditentukan berdasarkan prevalensi stunting tertinggi di Kabupaten Tulungagung.

Tabel 2. 30 Desa Lokus Penanganan Stunting Kabupaten Tulungagung Tahun 2021

No	Desa	Kecamatan	Prevalenssi
1	Desa Pakel	Kecamatan Ngantru	32,99%
2	Desa Sambijajar	Kecamatan Sumbergempol	24,19%
3	Desa Bangunmulyo	Kecamatan Pakel	21,86%
4	Desa Gondosuli	Kecamatan Gondang	20,55%
5	Desa Mirigambar	Kecamatan Sumbergempol	20,51%
6	Desa Gondang	Kecamatan Gondang	20,45%
7	Desa Tunggulsari	Kecamatan Kedungwaru	17,75%
8	Desa Tamban	Kecamatan Pakel	17,65%
9	Desa Pucung Lor	Kecamatan Ngantru	16,56%
10	Desa Macanbang	Kecamatan Gondang	13,93%

Sumber: Keputusan Bupati Tulungagung Nomor : 188.45/169/013/2020 tentang Penetapan Lokasi Fokus Penanganan Percepatan Pencegahan Stunting Kabupaten Tulungagung Tahun 2021

Tabel 2. 31 Desa Lokus Penanganan Stunting Tahun 2022

No	Desa	Kecamatan	Prevalensi
1	Desa Bendilwungu	Kecamatan Sumbergempol	56,76%
2	Desa Wates	Kecamatan Sumbergempol	26,28%
3	Desa Pojok	Kecamatan Ngantru	25,00%
4	Desa Jengglunharjo	Kecamatan Tanggunggunung.	24,33%
5	Desa Pakisrejo	Kecamatan Tanggunggunung	21,49 %
6	Desa Tenggarejo	Kecamatan Tanggunggunung,	19,08%
7	Desa Trenceng	Kecamatan Sumbergempol	18,58 %
8	Desa Tenggur	Kecamatan Rejotangan	15,60%
9	Desa Tambakrejo	Kecamatan Sumbergempol	15,20%
10	Kelurahan Kenayan	Kecamatan Tulungagung	14,98 %

Sumber: Keputusan Bupati Tulungagung Nomor : 188.45/169/013/2021 tentang Penetapan Lokasi Fokus Penanganan Percepatan Pencegahan Stunting Kabupaten Tulungagung Tahun 2022

Pemerintah Kabupaten Tulungagung pada tahun 2018 hingga tahun 2020 telah melaksanakan Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 sebagaimana terdapat pada tabel

Tabel 2. 32 Capaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2018-2020

Indikator	Satuan	Target	Capaian 2018	Capaian 2019	Capaian 2020
Pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar pelayanan antenatal (SPM)	%	100	91,10	91,44	89,93
Pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar pelayanan persalinan	%	100	92,60	91,37	91,76
Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100	95,77	94,03	95,68
Pelayanan kesehatan balita sesuai standar pelayanan kesehatan balita	%	100	85,98	90,75	75,23
Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar skrining kesehatan usia pendidikan dasar	%	100	99,43	95,51	62
Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar skrining kesehatan usia produktif	%	100	94,18	81,28	45,02
Pelayanan kesehatan pada usia lanjut sesuai standar skrining kesehatan usia lanjut	%	100	42,61	66,96	73,15
Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar pelayanan kesehatan penderita hipertensi	%	100	93,86	73,31	203
Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	%	100	85,62	76,74	380

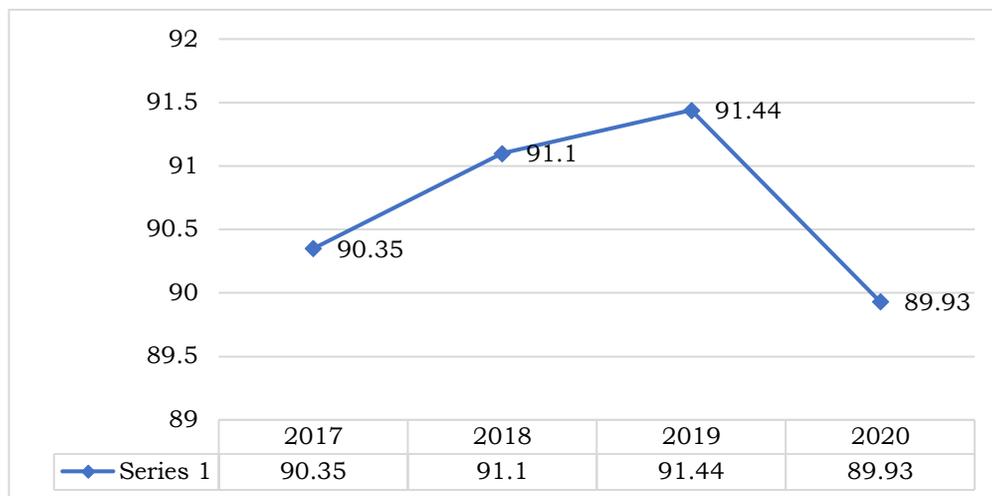
Indikator	Satuan	Target	Capaian 2018	Capaian 2019	Capaian 2020
elayanan kesehatan penderita diabetes melitus					
Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar pelayanan kesehatan jiwa	%	100	97,67	101,44	192
Pelayanan kesehatan orang dengan TB sesuai standar pelayanan kesehatan TB	%	100	100	89,62	56,4
Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV sesuai standar pemeriksaan HIV	%	100	64,18	85	78,25

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, 2021

Capaian SPM Kesehatan di Kabupaten Tulungagung memiliki angka yang fluktuatif dan beragam. Indikator pertama adalah berkaitan dengan Pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar pelayanan *antenatal* (SPM). *Antenatal care* (selanjutnya akan disingkat "ANC") adalah pemeriksaan kehamilan yang dilakukan oleh dokter atau bidan untuk mengoptimalkan kesehatan mental dan fisik dari ibu hamil. Pelayanan antenatal sesuai standar adalah pelayanan yang diberikan kepada ibu hamil minimal 4 kali selama kehamilan dengan jadwal satu kali pada trimester pertama, satu kali pada trimester kedua dan dua kali pada trimester ketiga yang dilakukan oleh Bidan dan atau Dokter dan atau Dokter Spesialis Kebidanan baik yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah maupun swasta yang memiliki Surat Tanda Register (STR).

Yang disebut dengan standar pelayanan *antenatal* adalah pelayanan yang dilakukan kepada ibu hamil dengan memenuhi kriteria 10 T yaitu : a) Timbang berat badan dan ukur tinggi badan; b) Ukur tekanan darah; c) Nilai status gizi (Ukur Lingkar Lengan Atas/LILA) d) Ukur tinggi puncak rahim (fundus uteri); e) Tentukan presentasi janin dan Denyut Jantung Janin (DJJ); f) Skrining status imunisasi tetanus dan berikan imunisasi Tetanus Toksoid (TT) bila diperlukan; g) Pemberian tabelt tambah darah minimal 90 tabelt selama kehamilan; h) Tes laboratorium: tes kehamilan, pemeriksaan hemoglobin darah (Hb), pemeriksaan golongan darah (bila belum pernah dilakukan sebelumnya), pemeriksaan protein urin (bila ada indikasi); yang pemberian pelayanannya disesuaikan dengan trimester kehamilan. i) Tatalaksana/penanganan kasus sesuai kewenangan; j) Temu wicara (konseling).

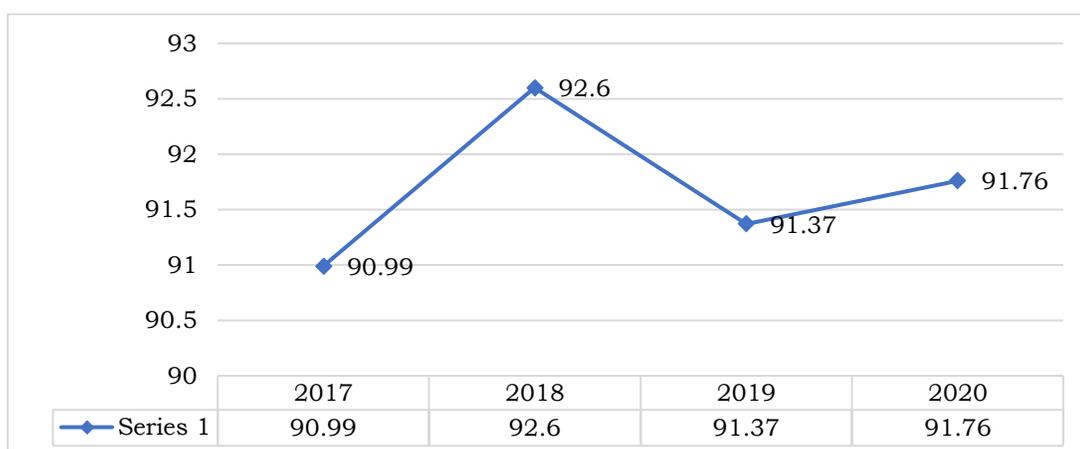
Tujuan dilakukan ANC adalah untuk mengoptimalkan kesehatan mental dan fisik ibu hamil. Capaiannya pada tahun 2018 adalah sebesar 91,10 dan meningkat menjadi 91,44 pada tahun 2019. Pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 89,93. Berikut merupakan grafik pencapaiannya.



Grafik 2. 31 Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar Pelayanan Antenatal (SPM) Kab. Tulungagung Tahun 2018-2020

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, 2021

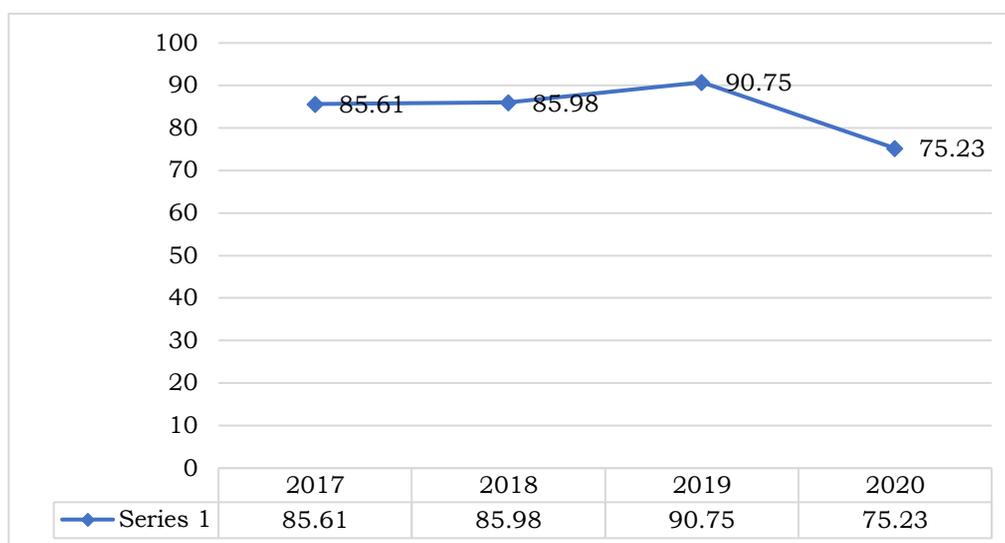
Indikator kedua adalah berkaitan dengan Pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar pelayanan persalinan. Pelayanan persalinan sesuai standar adalah persalinan yang dilakukan oleh Bidan dan atau Dokter dan atau Dokter Spesialis Kebidanan yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan Pemerintah maupun Swasta yang memiliki Surat Tanda Register (STR) baik persalinan normal dan atau persalinan dengan komplikasi. Standar pelayanan persalinan normal mengikuti acuan asuhan persalinan normal yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual. Adapun untuk persalinan dengan komplikasi mengikuti acuan dari Buku Saku Pelayanan Kesehatan Ibu di Fasilitas Kesehatan Rujukan. Capaian indikator ini juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2018 capaiannya adalah sebesar 92,60 dan menurun pada tahun 2019 menjadi 91,37. Pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 91,76. Berikut merupakan grafik pencapaiannya.



Grafik 2. 32 Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar Pelayanan Persalinan Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2020

Sumber: : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, 2021

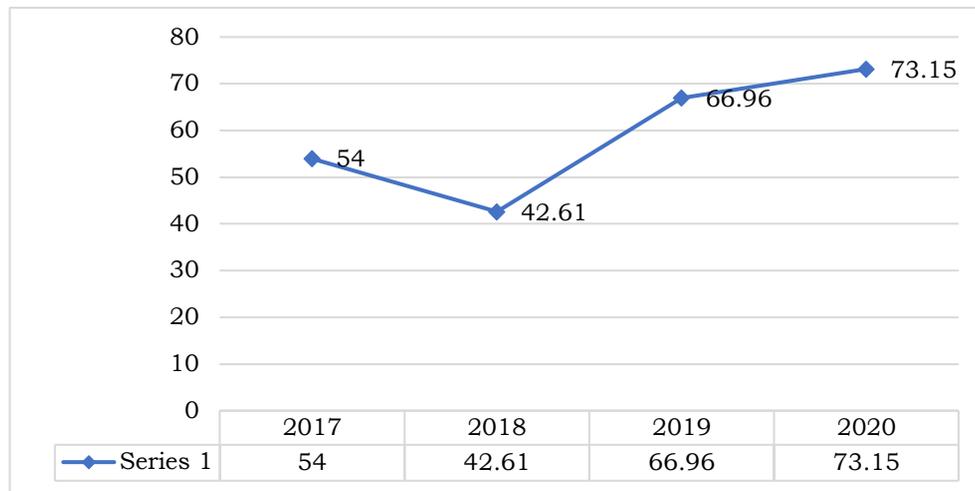
Dalam SPM ini terdapat salah satu indikator yang berbicara tentang pelayanan terhadap balita, yaitu indikator Pelayanan kesehatan balita sesuai standar pelayanan kesehatan balita. Pelayanan kesehatan balita sesuai standar adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada anak berusia 0-59 bulan dan dilakukan oleh Bidan dan atau Perawat dan atau Dokter/DLP dan atau Dokter Spesialis Anak yang memiliki Surat Tanda Register (STR) dan diberikan di fasilitas kesehatan pemerintah maupun swasta, dan UKBM. Pelayanan kesehatan, meliputi : a) Penimbangan minimal 8 kali setahun, pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali setahun b) Pemberian kapsul vitamin A 2 kali setahun. c) Pemberian imunisasi dasar lengkap. Capaian ini mengalami peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, pada tahun 2018 capaian indikator ini adalah 85,98 dan meningkat sekitar 5% menjadi 90,75% pada tahun 2019. Pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 75,23. Berikut merupakan grafik pencapaiannya:



Grafik 2. 33 Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar Pelayanan Kesehatan Balita Kab. Tulungagung Tahun 2018-2020

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, 2021

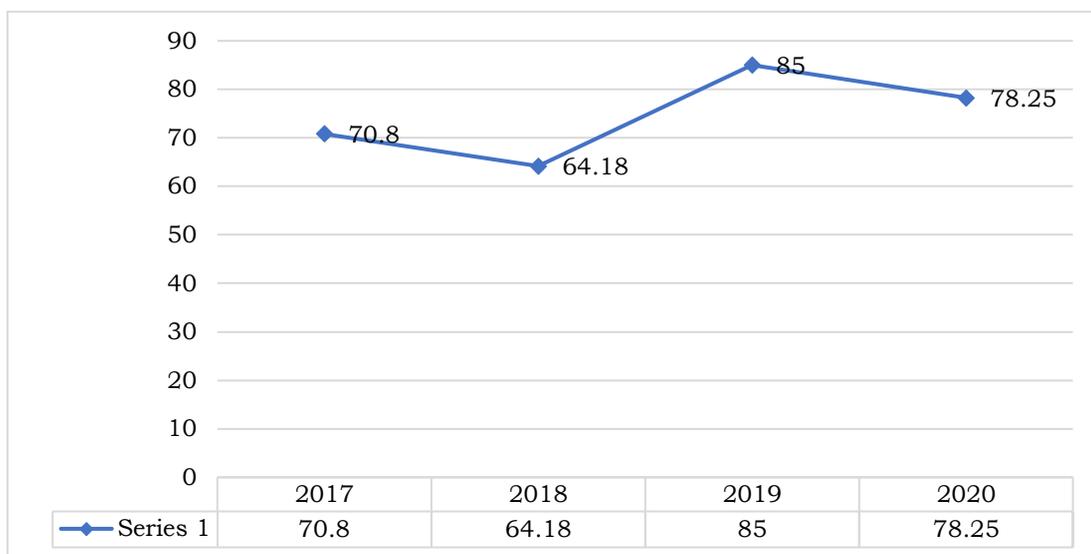
Terdapat beberapa indikator yang memiliki capaian yang fluktuatif setiap tahunnya, salah satunya adalah indikator yang berbicara terkait Pelayanan kesehatan pada usia lanjut sesuai standar *skrining* kesehatan usia lanjut. Setiap warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan skrining kesehatan sesuai standar pada warga negara usia 60 tahun ke atas di wilayah kerjanya minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun. Lingkup skrining adalah sebagai berikut: (1) Deteksi hipertensi dengan mengukur tekanan darah. (2) Deteksi diabetes melitus dengan pemeriksaan kadar gula darah. (3) Deteksi kadar kolesterol dalam darah (4) Deteksi gangguan mental emosional dan perilaku, termasuk kepikunan menggunakan *Mini Cog* atau *Mini Mental Status Examination (MMSE)*/Test Mental Mini atau *Abbreviated Mental Test (AMT)* dan *Geriatric Depression Scale (GDS)*. Pada tahun 2018 capaiannya sebesar 42,61% kemudian meningkat menjadi 66,96% pada tahun 2019 dan meningkat sangat pesat menjadi 73,15 % pada tahun 2020. Berikut merupakan grafik pencapaiannya.



Grafik 2. 34 Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut Sesuai Standar Skrining Kesehatan Usia Lanjut Kab. Tulungagung Tahun 2017-2020

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, 2021

Selain itu indikator selanjutnya adalah Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV sesuai standar pemeriksaan HIV. Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai standar adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada ibu hamil, pasien TB, pasien infeksi menular seksual (IMS), waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan, dilakukan oleh tenaga kesehatan sesuai kewenangannya dan diberikan di FKTP (Puskesmas dan Jaringannya) dan FKTL baik pemerintah maupun swasta serta di lapas/rutan narkotika. Capaian indikator ini juga mengalami fluktuasi yang cukup besar perbedaannya, pada tahun 2018 capaiannya sebesar 64,18% kemudian meningkat menjadi 85% pada tahun 2019 dan pada 2020 mengalami penurunan menjadi 78,25. Berikut merupakan grafik pencapaiannya.



Grafik 2. 35 Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV Sesuai Standar Pemeriksaan HIV Kab. Tulungagung Tahun 2017-2020

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, 2021

2.3.1.1.2.1 Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang terkait dengan urusan Kesehatan terdiri dari 35 indikator dengan capaian sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 33 Capaian Indikator TPB Urusan Kesehatan Kabupaten Tulungagung 2016-2020

Indikator TPB/SDG's	Target (Perpres 59/2017)	Capaian/Tahun					Keterangan
		2016	2017	2018	2019	2020	
Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	Meningkat menjadi 95%	46,16%	50,33%	83,49%	58,16%	58,16%	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional
Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	Meningkat menjadi 70%	93,60%	91,02%	92,60%	91,39%	91,76%	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional
Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap	Meningkat menjadi 63%.	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Data Belum Tersedia
Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin	Meningkat menjadi 65%	69,40%	72,10%	73,50%	73,70%	73,90%	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional
Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	Menurun menjadi 17%	3,40%	2,88%	4,67%	4,60%	2,85%	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional
Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	Menurun	n/a	n/a	10%	5,32%	5,51%	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional
Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	Menurun menjadi 28%	n/a	n/a	n/a	5,36%	4,89%	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional

Indikator TPB/SDG's	Target (Perpres 59/2017)	Capaian/Tahun					Keterangan
		2016	2017	2018	2019	2020	
Prevalensi malnutrisi (berat badan/ tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe	Menurun	n/a	n/a	n/a	3,60%	3,30%	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional
Prevalensi anemia pada ibu hamil	Menurun menjadi 28%	1,85%	1,85%	6,32%	6,75%	11,55%	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional
Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif	Meningkat menjadi 50%	67,13%	67,80%	66,80%	70,00%	74,80%	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional
Angka Kematian Ibu (AKI)	Menurun menjadi 306	131,73	116,31	122,04	76,58	104,75	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional
Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	Meningkat menjadi 95%	93,60%	91,02%	92,60%	91,39%	91,76%	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional
Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Meningkat menjadi 85%	93,60%	91,02%	92,60%	91,39%	91,76%	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional
Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup	Menurun	2,04	0,96	1,02	1,39	0,84	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional
Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	Menurun	5,07	5,88	5,02	6,68	7,68	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Sudah

Indikator TPB/SDG's	Target (Perpres 59/2017)	Capaian/Tahun					Keterangan
		2016	2017	2018	2019	2020	
							Mencapai Target Nasional
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	Menurun menjadi 24	8,96	7,59	7,19	8,77	10,20	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional
Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	Menurun menjadi < 0,5%	0,043%	4,900%	3,900%	4,300%	0,029%	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional
Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	Menurun menjadi 245	95,51	105,55	117,45	119,40	78,70	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional
Kejadian Malaria per 1000 orang.	Menurun	n/a	3,547	4,277	0,014	0,01	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional
Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	Menurun	85,71%	96,15%	88,46%	88,57%	90,00%	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional
Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	Menurun menjadi 5,4%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Data Belum Tersedia
Prevalensi tekanan darah tinggi.	Menurun menjadi 24,3%	n/a	n/a	n/a	n/a	9,56%	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional
Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	Menurun	n/a	n/a	n/a	n/a	1,57%	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional
Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir	Menurun	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Data Belum Tersedia

Indikator TPB/SDG's	Target (Perpres 59/2017)	Capaian/Tahun					Keterangan
		2016	2017	2018	2019	2020	
Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Meningkat menjadi 65%	69,40%	72,10%	73,50%	73,70%	73,90%	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional
Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern	Meningkat menjadi 23,5%	68,68%	50,00%	50,85%	49,41%	50,30%	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional
Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Menurun menjadi 38	30,98	11,82	5,11	15,69	n/a	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional
Unmet need pelayanan kesehatan	Menurun menjadi 9,91%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Data Belum Tersedia
Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk	Meningkat	461,64	503,35	834,87	624,79	654,67	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional
Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Meningkat menjadi minimal 95%	46,16%	50,33%	83,49%	58,16%	60,80%	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional
Proporsi kematian akibat keracunan	Menurun	0	0	0	0	0	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional
Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun		n/a	23,97%	n/a	24,06%	25,72%	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional
Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	Menurun menjadi angka 0,02%	0,31%	12,40%	18,40%	17,94%	12,87%	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional
Persentase ketersediaan obat dan		100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sudah Dilaksanakan

Indikator TPB/SDG's	Target (Perpres 59/2017)	Capaian/Tahun					Keterangan
		2016	2017	2018	2019	2020	
vaksin di Puskesmas.							dan Sudah Mencapai Target Nasional
Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.		232,34	272,12	235,20	281,54	310,01	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional

Sumber: Dokumen KLHS Kabupaten Tulungagung 2018-2023

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat pada capaian dan targetnya masih terdapat gap (selisih kurang) yang beragam, dimana gap paling besar terdapat pada indikator Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang mencapai -34,20%, sedangkan gap paling kecil terdapat pada indikator Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta) sebesar -1,44%. Adapun urutan indikator berdasarkan besarnya gap dari yang terbesar hingga secara lebih lengkap adalah sebagai berikut:

1. Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebesar -34,20%;
2. Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup sebesar -15,12% atau sebanyak -1,01;
3. Prevalensi penyalahgunaan narkoba sebesar -12,85%;
4. Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih sebesar -3,24%; dan
5. Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta) sebesar -1,44%.

2.3.1.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penataan ruang merupakan salah satu aspek yang penting untuk keseimbangan dalam daerah. Dengan adanya penataan yang baik dan seimbang daerah dapat memiliki potensi-potensi yang baik pula. Pemahaman dalam setiap proses perencanaan tata ruang bahwa seluruh wilayah yang termasuk dalam lingkup perencanaan mempunyai potensi yang memungkinkan untuk dikembangkan. Di wilayah Kabupaten Tulungagung, potensi yang memungkinkan untuk dikembangkan antara lain kegiatan perdagangan dan jasa, pertanian, peternakan, perikanan darat, kegiatan industri, serta pariwisata.

Saat ini jalan merupakan prasarana pengangkutan darat yang berguna untuk memperlancar kegiatan perekonomian. Meningkatnya pembangunan menuntut adanya peningkatan pembangunan prasarana jalan untuk memudahkan mobilitas penduduk dan memperlancar lalu lintas barang dari satu daerah ke daerah lain. Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik mempunyai andil besar terhadap tercapainya perkembangan antar daerah yang seimbang dalam pemerataan hasil-hasil pembangunan. Utamanya di bidang ekonomi, politik dan sosial budaya. Arah pengembangan prasarana

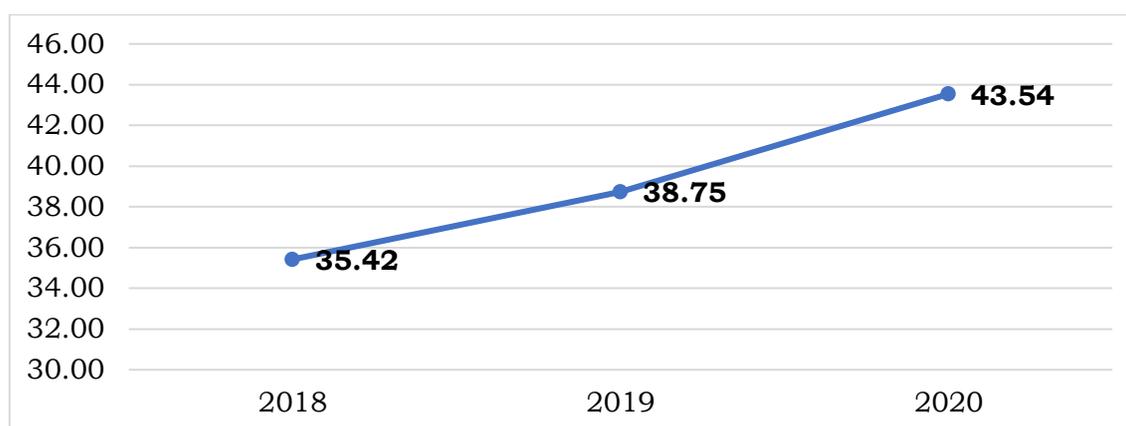
transportasi jalan di Tulungagung adalah untuk mewujudkan pembangunan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Oleh karena itu perlu adanya upaya penambahan dan perbaikan jalan agar percepatan arah pengembangan prasarana transportasi jalan di Tulungagung bisa terwujud sebagaimana yang diharapkan. Di bawah ini adalah data terkait indikator kinerja yang dapat menunjukkan hasil capaian pelaksanaan urusan pekerjaan umum.

Tabel 2. 34 Capaian Indikator Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase desa/kelurahan yang mendapatkan layanan infrastruktur dan lingkungan berkualitas	%	n/a	n/a	35.42	38.75	43.54
Rasio Daerah Irigasi Dalam Kondisi Baik	Rasio (Km/Ha)	n/a	n/a	1/83	1/81	1/79
Persentase Desa/Kelurahan Dengan Rumah Layak Huni > 90%	%	n/a	n/a	100	100	100
Persentase Desa/Kelurahan Terlayani Sistem Perpipaan Air Minum	%	n/a	n/a	52.03	52.77	59.41
Persentase Desa/Kelurahan Dengan Jumlah Rumah Tangga Terlayani Sanitasi >80%	%	n/a	n/a	87.82	90.41	92.99
Persentase Desa/Kelurahan Dengan Jalan Kondisi Baik >80%	%	n/a	n/a	77.49	78.23	78.23
Indeks Tingkat Pelayanan Jalan	Indeks	n/a	n/a	0.30	0.37	0.47

Sumber: Dinas PUPR Tahun 2021

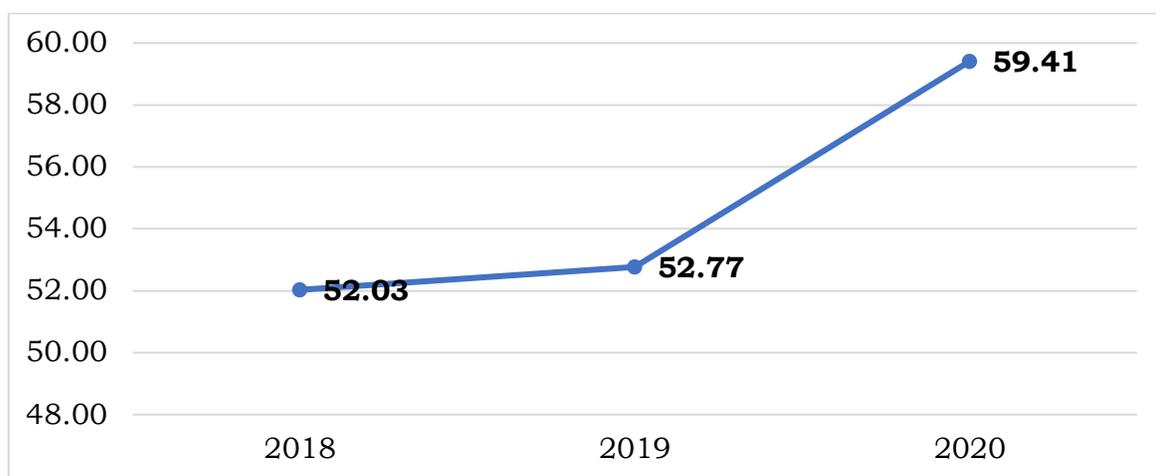
Pada tabel di atas menunjukkan bahwa pada lima tahun terakhir dari tahun 2016 sampai tahun 2020 persentase desa/kelurahan yang mendapatkan layanan infrastruktur dan lingkungan berkualitas mengalami peningkatan. Capaian pada tahun 2016 s/d 2017 tidak dapat diidentifikasi karena terkendala ketersediaan data. Pada tahun 2018 persentasenya mencapai angka 35,42%. Pada tahun 2019 meningkat menjadi 38,75%. Pada tahun 2020 kembali mengalami peningkatan sebesar 43,54%. Berikut merupakan grafik pencapaiannya.



Grafik 2. 36 Persentase desa/kelurahan yang Mendapatkan Layanan Infrastruktur dan Lingkungan Berkualitas Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2020

Sumber: Dinas PUPR, Dinas PKP, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Tahun 2021

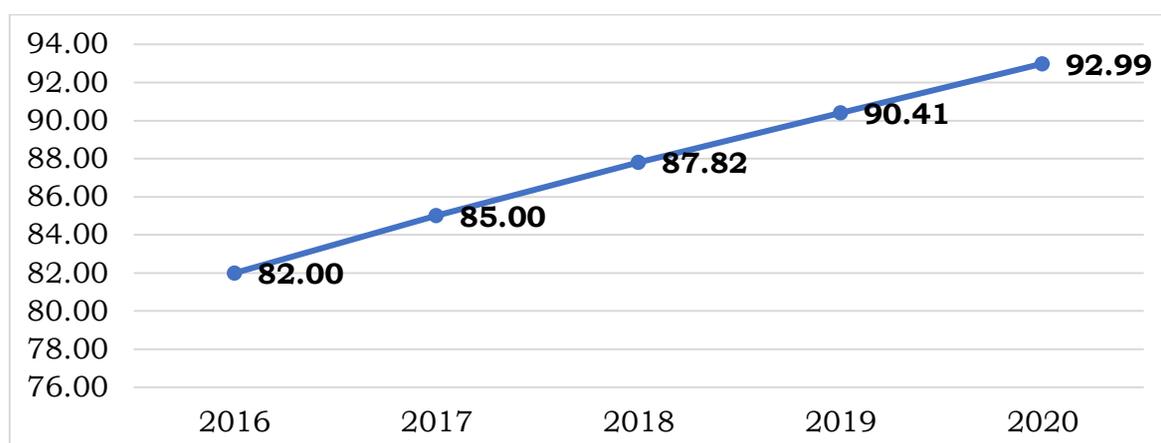
Selanjutnya, secara mendetail akan dijelaskan komponen-komponen penyusun indikator persentase desa/kelurahan yang mendapatkan layanan infrastruktur dan lingkungan berkualitas. Capaian indikator persentase desa/kelurahan terlayani sistem perpipaan air minum pada tahun 2016 s/d 2017 tidak dapat diidentifikasi karena terkendala ketersediaan data. Pada tahun 2018 persentasenya mencapai angka 52,03%. Pada tahun 2019 meningkat menjadi 52,77%. Pada tahun 2020 kembali mengalami peningkatan sebesar 59,41%. Berikut merupakan grafik pencapaiannya.



Grafik 2. 37 Persentase Desa/Kelurahan Terlayani Sistem Perpipaan Air Minum Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2020

Sumber: Dinas PUPR, Tahun 2021

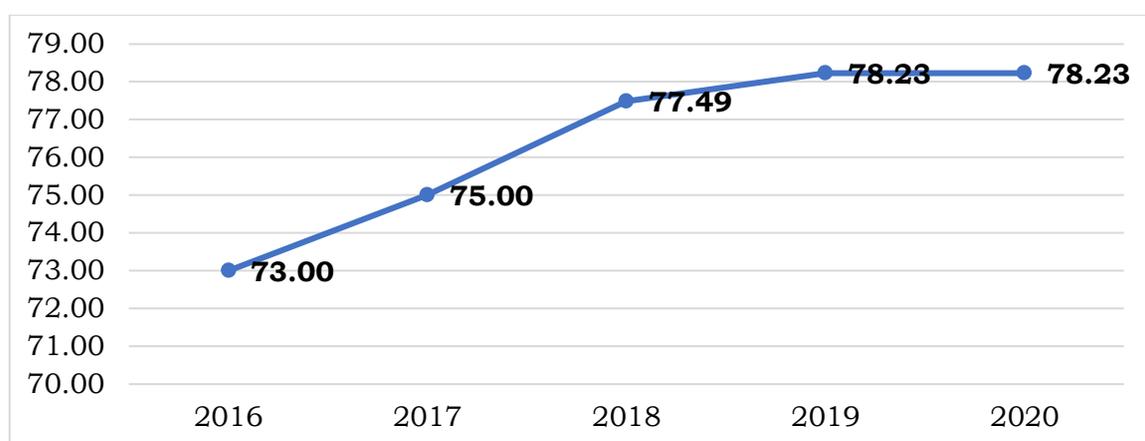
Indikator persentase desa/kelurahan dengan jumlah rumah tangga terlayani sanitasi >80%, pada tahun 2016 persentasenya mencapai 82,00%. Pada tahun 2017 terus mengalami peningkatan menjadi 85,00% dan pada tahun 2018 persentasenya mencapai angka 87,82%. Pada tahun 2019 meningkat menjadi 90,41%. Pada tahun 2020 kembali mengalami peningkatan sebesar 92,99%. Capaian indikator persentase desa/kelurahan dengan jumlah rumah tangga terlayani sanitasi >80% pada tahun 2016 s/d 2017 tidak dapat diidentifikasi karena terkendala ketersediaan data. Berikut merupakan grafik pencapaiannya.



Grafik 2. 38 Persentase Desa/Kelurahan Dengan Jumlah Rumah Tangga Terlayani Sanitasi >80% Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020

Sumber: Dinas PUPR, Tahun 2021

Indikator persentase desa/kelurahan dengan jalan kondisi baik >80% terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 persentasenya mencapai 73,00%. Pada tahun 2017 terus mengalami peningkatan menjadi 75,00% dan pada tahun 2018 mencapai angka 77,49% dan terus meningkat hingga pada tahun 2019 mencapai angka 78,23%. Pada tahun 2020 angka ini mengalami stagnasi, yaitu tetap 78,23%. Hal ini sebagai dampak wabah Pandemi Covid-19 yang mana kegiatan fisik mengalami refocusing anggaran. Indikator jalan dengan kondisi baik adalah lapisan jalan sudah menggunakan hotmix dan permukaan jalan yang rata serta mampu dilewati kendaraan dengan aman dan nyaman. Berikut merupakan grafik pencapaiannya.



Grafik 2. 39 Persentase Desa/Kelurahan Dengan Jalan Kondisi Baik > 80% Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020

Sumber: Dinas PUPR, Tahun 2021

2.3.1.1.2.1 Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang terkait dengan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri dari 13 indikator dengan capaian sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 35 Capaian Indikator TPB Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulungagung 2016-2020

Indikator TPB/SDG's	Target (Perpres 59/2017)	Capaian/Tahun					Keterangan
		2016	2017	2018	2019	2020	
Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	Meningkat menjadi 100%	n/a	85,30 %	85,09 %	85,42 %	87,93%	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional
Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Meningkat menjadi 100%	n/a	n/a	83,79 %	84,07 %	89,40%	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional

Indikator TPB/SDG's	Target (Perpres 59/2017)	Capaian/Tahun					Keterangan
		2016	2017	2018	2019	2020	
Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Meningkat menjadi 100%	n/a	85,30 %	85,09 %	85,42 %	87,93%	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional
Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan embaga, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	Meningkat menjadi 118,6 m3/detik	n/a	n/a	0,9	0,9	0,9	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional
Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	Meningkat menjadi 100%	n/a	85,30 %	85,09 %	85,42 %	87,93%	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional
Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	Meningkat	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Data Belum Tersedia
Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Meningkat menjadi 100%	n/a	n/a	83,79 %	84,07 %	89,40%	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional
Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Meningkat menjadi 45.000 (skala nasional)	n/a	n/a	271	271	271	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional
Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	Meningkat	n/a	n/a	127	188	207	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional
Proporsi rumah tangga yang terlayani embag pengelolaan air limbah terpusat.	Meningkat	n/a	n/a	0,30%	0,30	0,30	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional
Proporsi rumah tangga yang terlayani embag pengelolaan lumpur tinja.	Meningkat	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Data Belum Tersedia
Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	10 WS (skala nasional)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Data Belum Tersedia

Indikator TPB/SDG's	Target (Perpres 59/2017)	Capaian/Tahun					Keterangan
		2016	2017	2018	2019	2020	
Jumlah embaga pembiayaan infrastruktur.	Ada	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Data Belum Tersedia

Sumber: Dokumen KLHS Kabupaten Tulungagung 2018-2023

Berdasarkan tabel mengenai capaian indikator TPB untuk urusan PUPR di atas dapat diketahui bahwa terdapat indikator-indikator yang masih belum bisa mencapai target secara nasional, teruma pada indikator yang berbicara mengenai sanitasi dan air bersih. Selain itu terdapat indikator-indikator yang memiliki capaian yang sudah melampaui target nasional. Capaian-capaian ini harus menjadi perhatian bagi Kabupaten Tulungagung untuk meningkatkan pemenuhan sarana prasarana infrastruktur penunjang kehidupan masyarakat Kabupaten Tulungagung.

2.3.1.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan Perumahan, penyelenggaraan kawasan Permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat. Adapun kinerja Pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam melaksanakan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman diantaranya sebagai berikut:

Tabel 2. 36 Capaian Indikator Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020

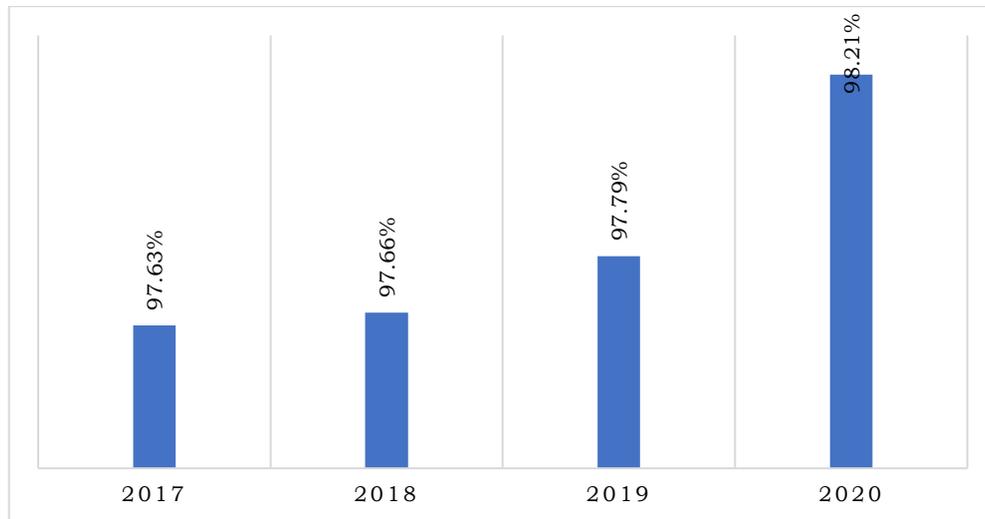
Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Rumah Layak Huni	%	n/a	97,6 3	97,6 6	97,7 9	98,21
Persentase Luasan Kawasan Kumuh	%	24,9 9	55,3 0	88,0 7	100, 00	90,50
Persentase PSU Yang Diserahkan	%	7,14	12,7	36,5 1	40,4 8	48,87
Luasan Kawasan Kumuh (ha)	Ha	70,5 2	49,5 2	30,0 1	0,00	239,4 9
Persentase pengurangan luasan kawasan kumuh	%	35,0 7	68,0 7	88,0 7	100, 00	22,60
Persentase Desa/Kelurahan Dengan Rumah Layak Huni >90%	%	n/a	n/a	100, 00	100, 00	100,0 0

Sumber: Dinas PKP, 2021

Persentase rumah tidak layak huni semakin meningkat dikarenakan usulan desa terkait alokasi anggaran RTLH dengan jumlah usulan sebanyak 6.020 RTLH belum tercapai. Pada tahun 2021 Kabupaten Tulungagung memiliki alokasi anggaran sebesar Rp 4.421.493.000 untuk perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) untuk sekitar 250 unit.

Persentase rumah layak huni di Kabupaten Tulungagung setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 persentase rumah layak

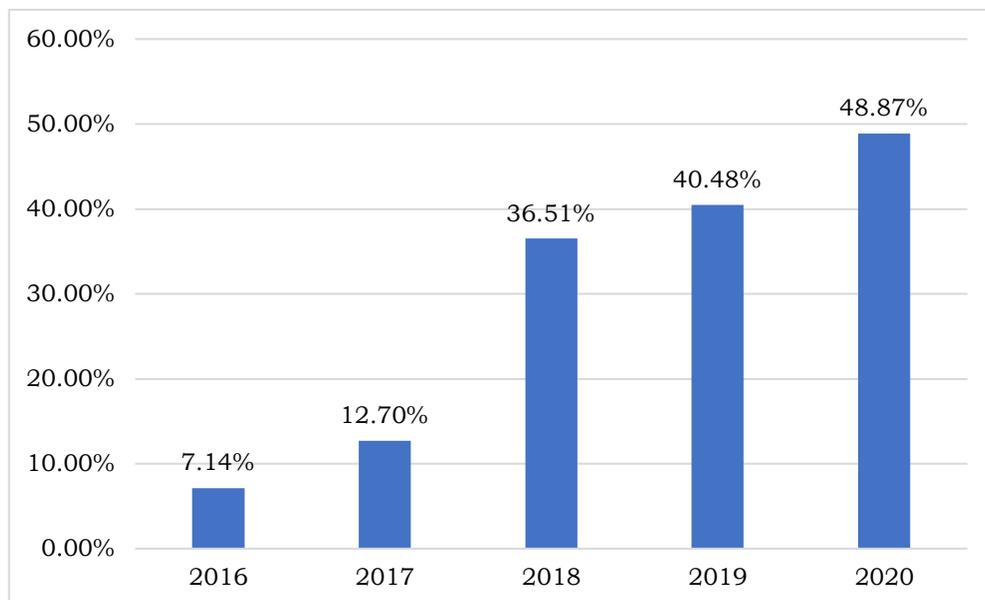
huni di Kabupaten Tulungagung mencapai 97,63%, dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2018 menjadi 97,73%. Pada tahun 2019 capaian ini kembali meningkat menjadi 97,79% hingga pada tahun 2020 meningkat menjadi 98,21%. Capaian ini didapatkan karena setiap tahunnya Pemerintah Kabupaten Tulungagung melaksanakan penanganan terhadap ribuan rumah tidak layak huni. Sejak tahun 2016 terdapat 8.000 unit rumah yang diusulkan agar mendapatkan penanganan secara khusus baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Berikut grafik capaian persentase rumah layak huni di Kabupaten Tulungagung. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat melalui grafik di bawah ini:



Grafik 2. 40 Persentase Rumah Layak Huni Kabupaten Tulungagung Tahun 2017-2020

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, 2021

Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) merupakan kelengkapan fisik untuk mendukung terwujudnya perumahan yang sehat, aman dan terjangkau. Dengan demikian ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum merupakan kelengkapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pengembangan perumahan dan kawasan permukiman, persentase PSU yang diserahkan mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya. Rumah layak huni merupakan harapan dan idaman setiap insan, pemerintah telah berupaya dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah dengan tujuan tidak ada lagi masyarakat yang menempati rumah yang tidak layak huni. Pada tahun 2016 capaiannya hanya 7,15% kemudian pada tahun 2017 menjadi 12,7%. Pada tahun 2018 capaian indikator ini kembali meningkat menjadi 36,51%. Upaya untuk meningkatkan penyerahan PSU telah dilakukan diantaranya melakukan sosialisasi atau pengarahan tata cara penyerahan PSU dari tahun 2019 sejumlah 40,48% dan mengalami peningkatan pada tahun 2020 sejumlah 7,99%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat melalui grafik di bawah ini.



Grafik 2. 41 Persentase PSU yang diserahkan Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, 2021

Kawasan permukiman kumuh merupakan kawasan yang memiliki ciri bangunan yang tidak teratur, kepadatan bangunan tinggi, kualitas bangunan serta prasarana sarana dan utilitas yang tidak sesuai standar. Berdasarkan SK Bupati Nomor 188.45/173/013/2015 luasan kawasan kumuh adalah 150,05 Ha dan sudah tertangani 100% pada tahun 2019. Sedangkan pada tahun 2019 muncul SK Kumuh terbaru dengan luasan kawasan kumuh adalah 239,49 Ha. Untuk presentase luasan kawasan kumuh dengan SK yang disahkan pada tahun 2019 seluas 239,49 Ha ditargetkan pada tahun 2020 penanganan kawasan kumuh dapat berkurang seluas 39,40Ha dan terealisasi 54,12Ha, sehingga pada tahun 2020 kegiatan pengurangan luasan kawasan kumuh terealisasi 22,60% dan terealisasi melebihi dari yang ditargetkan yaitu 16,45% sehingga capaiannya 137,37%.

Kebutuhan tempat tinggal (papan) merupakan salah satu kebutuhan primer dalam kehidupan selain pangan dan sandang. Kualitas tempat tinggal menggambarkan pembangunan yang berkaitan dengan perekonomian, tingkat pendidikan dan urusan tata ruang serta mempengaruhi kualitas kesehatan. Kebutuhan tempat tinggal yang sehat dan layak huni telah menjadi permasalahan klasik dibidang perumahan. Laju pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat, tidak seimbang dengan ketersediaan lahan yang semakin lama semakin sempit, menjadi salah satu penyebab munculnya permasalahan dibidang perumahan. Selain itu kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya rumah sehat dan rendahnya tingkat perekonomian masyarakat yang belum bisa mewujudkan rumah yang sesuai dengan standart kesehatan, juga menjadi akar permasalahan dibidang perumahan. Berikut merupakan tabel yang menyajikan jumlah perumahan rakyat di Kabupaten Tulungagung.

Tabel 2. 37 Jumlah Perumahan Rakyat di Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020

Kecamatan	2016	2017	2018	2019	2020
Besuki	13.859	13.859	10.817	10.817	11.077

Bandung	12.493	12.493	4.812	4.812	14.228
Pakel	11.370	11.370	3.001	3.001	15.307
Campurdarat	15.097	15.097	14.056	14.056	15.715
Tanggunggunung	7.349	7.349	8.011	8.011	7.930
Kalidawir	20.332	20.332	20.313	20.313	22.164
Pucanglaban	6.890	6.890	7.589	7.589	8.090
Rejotangan	17.653	17.653	21.270	21.270	22.219
Ngunut	20.017	20.017	20.732	20.732	22.216
Sumbergempol	17.064	17.064	17.389	17.389	18.645
Boyolangu	23.248	23.248	21.623	21.623	23.670
Tulungagung	18.649	18.649	14.214	14.214	22.164
Kedungwaru	20.964	20.964	22.273	22.273	25.678
Ngantru	13.858	13.858	15.660	15.660	16.858
Karangrejo	10.713	10.713	11.824	11.824	12.624
Kauman	12.657	12.657	13.276	13.276	14.116
Gondang	12.767	12.767	15.910	15.910	16.790
Pagerwojo	8.003	8.003	8.643	8.643	9.432
Sendang	13.458	13.458	13.860	13.860	14.029
Jumlah	276.441	276.441	265.273	265.273	312.961

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, 2021

Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya serta aset bagi pemilikinya. Berdasarkan jumlah rumah, kecamatan kedungwaru sejumlah 25.678 Unit, sedangkan yang terendah terdapat di kecamatan tanggunggunung sejumlah 7.930 Unit. Di kecamatan Kedungwaru terdapat nilai tertinggi karena lokasinya yang strategis dekat dengan sarana pendidikan, perkantoran dan pusat perbelanjaan. Jumlah rumah tahun 2020 lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya karena semakin meningkatnya pertumbuhan akan kebutuhan rumah didukung dengan jumlah penduduk yang terus bertambah.

2.3.1.1.4.1 Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang terkait dengan urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman terdiri dari 4 indikator dengan capaian sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 38 Capaian Indikator TPB Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tulungagung 2016-2020

Indikator TPB/SDG's	Target (Perpres 59/2017)	Capaian/Tahun					Keterangan
		2016	2017	2018	2019	2020	
Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN	Meningkat menjadi 100%	314%	196%	217%	236%	217%	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional
Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari	Meningkat	12,00 %	19,40 %	20,88 %	23,86 %	23,88 %	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional

total belanja pemerintah.								
Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	3,7 juta rumah tangga (sebesar 5,39% dengan Jumlah RT Total pada tahun 2019 = 68,7 Jt)	n/a	97,63 %	97,66 %	97,79 %	98,21 %	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional	
Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	ada	0	0	0	0	0	Indikator Belum Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional	

Sumber: Dokumen KLHS Kabupaten Tulungagung 2018-2023

Berdasarkan data capaian setiap indikator pada tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa indikator-indikator TPB untuk urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagian besar sudah melampaui target yang sudah ditentukan. Seperti halnya distribusi jaringan kelistrikan yang mencapai 200% ini memberikan sinyal bahwa proses pembangunan sarana prasarana penunjang Kawasan permukiman di Kabupaten Tulungagung sudah baik. Namun di sisi lain terdapat indikator yang masih belum dilaksanakan yaitu jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha.

2.3.1.1.5 Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat

Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum merupakan merupakan sebuah upaya untuk menciptakan keadaan masyarakat yang tentram dan kondusif. Adapun capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam melaksanakan urusan Kententraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat dapat disajikan dalam tabel berikut ini:

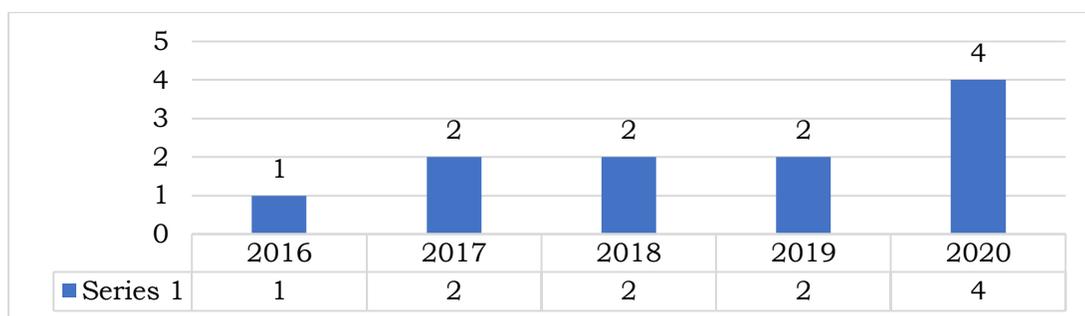
Tabel 2. 39 Capaian Indikator Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kab. Tulungagung Tahun 2016 - 2020

Indikator kinerja	satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase peningkatan penyelesaian pelanggaran Perda/Perbub	%	1	2	2	2	4
Persentase perlindungan/pemeliharaan terhadap potensi konflik	%	90,0 0	95,0 0	95,0 0	96,0 0	97,0 0
Persentase (%)Penduduk di Daerah rawan Bencana yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	100	100	100	100
Persentase (%)Penduduk yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	100	100	100	100

Indikator kinerja	satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase (%) penduduk yang memperoleh layanan penyelamatan dan evaluasi korban bencana	%	100	100	100	100	100
Persentase (%) jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	%	100	100	100	100	100
Persentase (%) penduduk yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	n/a	95	97	98	100

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, 2021

Berdasarkan data capaian indikator kinerja di atas, terlihat bahwa capaian yang diperoleh bidang urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat Kabupaten Tulungagung tahun 2016 dan 2019 memiliki tren yang positif. Dimana persentase peningkatan penyelesaian pelanggaran Perda/Perbup tahun 2019 sebesar 2 dan terus meningkat menjadi 4 pada tahun 2020. Penyelesaian pelanggaran perda/perbup merupakan salah satu wewenang dari satpol PP. Sementara pada persentase perlindungan/pemeliharaan terhadap potensi konflik tahun 2016–2017 terus meningkat dengan angka capaian 85,00–95,00. Sementara untuk persentase (%) penduduk yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran meningkat menjadi 100% karena dari 58 kejadian kebakaran semuanya dapat teratasi. Berikut merupakan grafik capaian persentase peningkatan penyelesaian pelanggaran Perda/Perbup di Kabupaten Tulungagung.



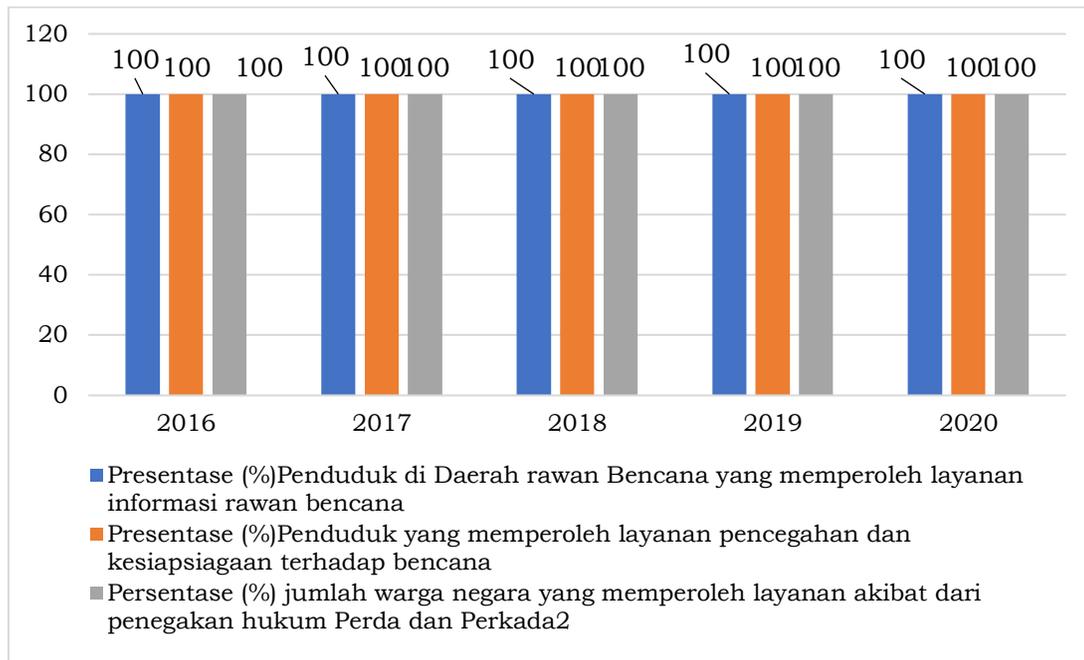
Grafik 2. 42 Persentase Peningkatan Penyelesaian Pelanggaran Perda/Perbup Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020

Sumber: Satpol PP Kabupaten Tulungagung, 2021

Capaian indikator Persentase Penduduk di Daerah Rawan Bencana yang memperoleh layanan informasi rawan bencana memiliki capaian yang sempurna yaitu 100%, capaian ini bertahan sejak tahun 2016 hingga tahun 2020. Kemudian indikator Persentase Penduduk yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana juga memiliki pencapaian yang sempurna sejak tahun 2016 hingga tahun 2020 yaitu 100%, kemudian indikator Persentase penduduk yang memperoleh layanan penyelamatan dan evaluasi korban bencana juga memiliki pencapaian yang sempurna sejak tahun 2016 hingga tahun 2020 yaitu 100%.

Indikator persentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada juga memiliki pencapaian

yang sempurna sejak tahun 2016 hingga tahun 2020 yaitu 100%. Berikut adalah grafik dan capaian dari beberapa indikator diatas.



Grafik 2. 43 Persentase Capaian Indikator urusan Ketertiban dan Keamanan Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, 2021

2.3.1.1.5.1 Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang terkait dengan Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari 18 indikator dengan capaian sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 40 Capaian Indikator TPB Urusan Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tulungagung 2016-2020

Indikator TPB/SDG's	Target (Perpres 59/2017)	Capaian/Tahun					Keterangan
		2016	2017	2018	2019	2020	
Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Menurun	n/a	0	0,004	0	0,004	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional
Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	Meningkat menjadi 39 daerah	4	5	6	6	6	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional
Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/	Meningkat menjadi 450 (Daerah yang memiliki indeks risiko	3	3	5	11	11	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional

Indikator TPB/SDG's	Target (Perpres 59/2017)	Capaian/Tahun					Keterangan
		2016	2017	2018	2019	2020	
Madrasah Aman (Bencana)	bencana tinggi dan sedang di Kab. Tulungagu ng sebanyak 271 desa)						
Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Menurun	n/a	n/a	Rp. 250 Juta	Rp. 200 Juta	Rp. 150 Juta	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional
Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	Jumlah	-	49	54	65	69	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional
Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	Meningkat	12,00 %	19,40 %	20,88 %	23,86 %	23,88 %	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional
Indeks Kebebasan Sipil	Meningkat menjadi 87	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Indikator Belum Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional
Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)	Menurun menjadi 30%	201,2	201,2	169,75	151,42	137,68	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional
Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	ada	n/a	n/a	483	481	481	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional
Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	ada	n/a	4	4	8	9	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional
Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir	Menurun	0	0	2	1	3	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional
Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	Menurun	0	0	0	0	0	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional

Indikator TPB/SDG's	Target (Perpres 59/2017)	Capaian/Tahun					Keterangan
		2016	2017	2018	2019	2020	
Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	Menurun	0,0128 %	0,0099 %	0,0071 %	0,0068 %	0,0074 %	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional
Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya	Meningkat	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Data Belum Tersedia

Sumber: Dokumen KLHS Kabupaten Tulungagung 2018-2023

Berdasarkan tabel mengenai capaian indikator TPB untuk urusan trantibum di Kabupaten Tulungagung di atas dapat diketahui bahwa mayoritas indikator memiliki capaian yang sudah melampaui target yang ada. Hal ini merupakan indikasi positif dalam hal menjaga ketentraman, ketertiban, perlindungan di tengah-tengah masyarakat guna menciptakan kondusifitas daerah. Namun disamping itu juga terdapat indikator yang secara data masih belum ada yang disebabkan karena belum adanya pengukuran atau penghitungan data seperti contohnya indikator proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendiri di area tempat tinggalnya. Hal-hal seperti ini yang juga harus menjadi perhatian penting bagi Kabupaten Tulungagung untuk meningkatkan dan pemerataan pelayanan atas menjaga kondusifitas daerah melalui ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat.

2.3.1.1.6 Sosial

Penyelenggaraan urusan sosial merupakan upaya terselenggaranya kesejahteraan sosial yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Pada implementasinya penyelenggaraan urusan sosial, diperlukan peran masyarakat yang seluas-luasnya, baik perseorangan, keluarga, organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, badan usaha, lembaga kesejahteraan sosial, maupun lembaga sosial asing. Penyelenggaraan urusan sosial Pemerintah Kabupaten Tulungagung pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dapat disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2. 41 Capaian Indikator Urusan Sosial Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020

Indikator	Sa- tuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Persentase (%) Penyandang Disabilitas Telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	65	70	75	85	85
Persentase (%) Anak Telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	60	65	75	85	85
Persentase (%) Lanjut Usia Telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	61	67	70	80	80
Persentase (%) Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	62	66	73	80	80

Indikator	Sa- tuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Persentase (%) korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	%	100	100	100	100	100

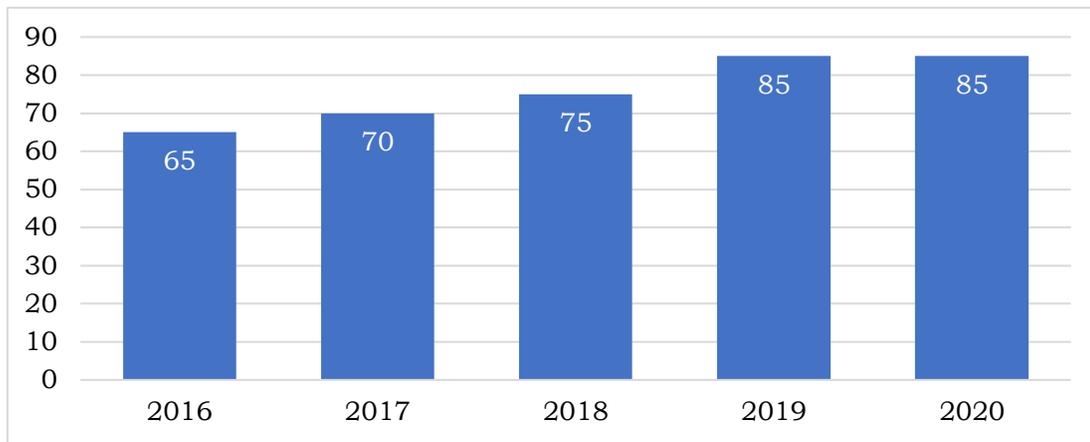
Sumber: Dinas Sosial, 2021

Secara garis besar prosentase capaian indikator urusan sosial Kabupaten Tulungagung sangat dipengaruhi oleh :

1. Ketersediaan penyedia layanan (*service provider*) penanganan permasalahan sosial.
2. Ketersediaan dukungan anggaran baik dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun dari APBN.
3. Dukungan dan persen serta masyarakat.

Pada capaian Persentase (%) korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat dapat dicapai angka absolut 100% disebabkan tersedianya ketiga faktor di atas, instansi pemerintah baik di Kabupaten maupun Kota, Provinsi maupun Nasional, dukungan anggaran yang sangat memadai dan peran serta masyarakat yang sangat besar serta sinergitas antara potensi masyarakat dan pemerintah yang terjalin sangat baik. Pada penanganan anak terlantar luar panti, lanjut usia terlantar luar panti, gelandangan pengemis masih banyak kendala dalam hal dukungan anggaran baik pada jumlah dan kontinuitasnya, peran serta yang minim dari masyarakat serta minimnya jumlah penyedia layanan dari unsur pemerintah sekalipun apalagi swasta.

Capaian indikator urusan sosial diatas menggambarkan kondisi di Kabupaten Tulungagung, Persentase Penyandang Disabilitas Telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti memiliki capaian yang meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2016 angkanya mencapai 65%, kemudian meningkat 5% pada tahun 2017 menjadi 70%. Pada tahun 2018 angkanya mencapai 75% dan meningkat 10% pada tahun 2019 menjadi 85% dan angka tersebut bertahan hingga 2020. Presentase Penyandang Disabilitas Telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti belum dapat dicapai 100%, Sesuai amanat dalam standart pelayanan minimal (SPM) baru dapat menjangkau 44 orang penerima asistensi sosial penyandang disabilitas (ASPD) dan Bantuan Sosial Tunai 298 dari APBN dan 70 orang dari APBD Provinsi pada tahun 2020 ini. Sedangkan dari masyarakat baru sebatas keluarga belum ada institusi swasta yang secara reguler ikut memberi pemenuhan kebutuhan dasar bagi penyandang disabilitas luar panti. Berikut grafik yang menggambarkan pencapaiannya.



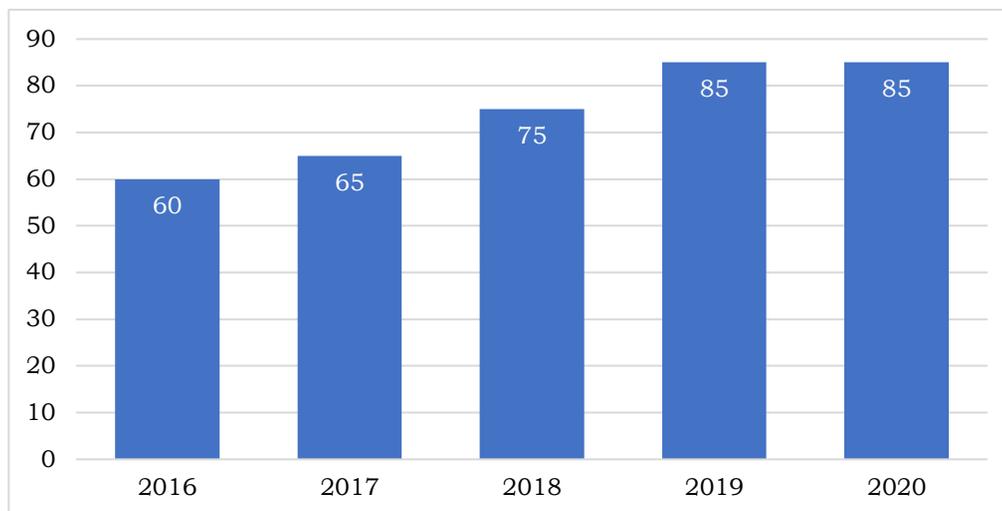
Grafik 2. 44 Persentase Penyandang Disabilitas Telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti Kab. Tulungagung Tahun 2016-2020

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, 2021

Capaian selanjutnya berkaitan dengan Persentase Anak Telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti. Permensos nomor 4 tahun 2020 tentang Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Anak Telantar adalah norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial dasar bagi Anak Telantar. Anak Telantar adalah anak berusia dibawah 18 tahun dengan kondisi tanpa terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus. Permensos nomor 4 tahun 2020 tentang Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Anak Telantar menyebutkan tentang Kriteria Anak Telantar, yaitu:

- tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya berupa sandang, pangan, dan papan;
- tidak ada lagi perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengurus;
- rentan mengalami tindak kekerasan dari lingkungannya; dan/atau;
- masih memiliki keluarga tetapi berpotensi mengalami tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran.

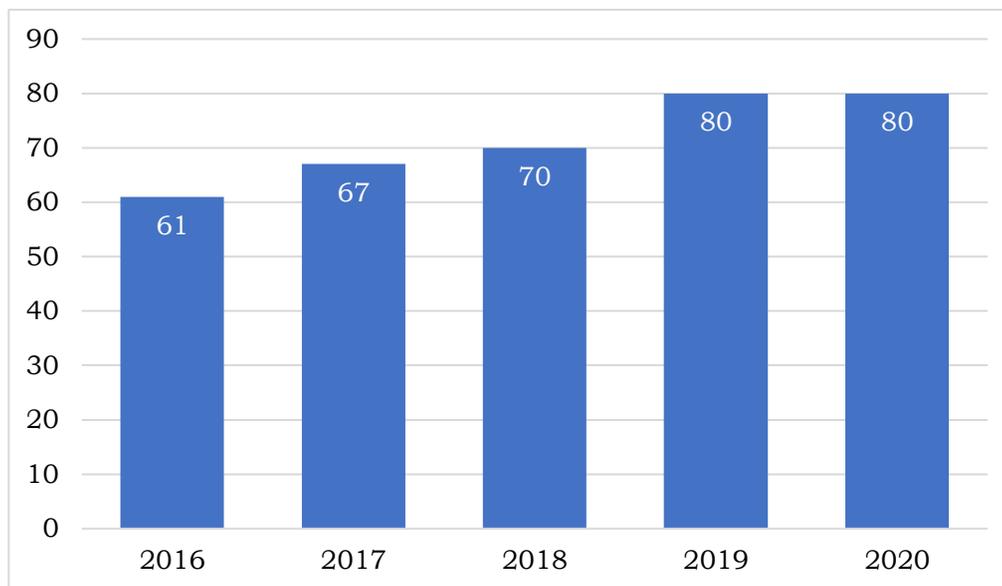
Capaian indikator ini di Kabupaten Tulungagung pada tahun 2016 sebesar 60%, kemudian meningkat menjadi 65% pada tahun 2017. Pada tahun 2018 angkanya mencapai 75% dan pada tahun 2019 meningkat 10% menjadi sebesar 85% dan angka tersebut bertahan hingga tahun 2020. Keberadaan ULT PSAI sangat membantu dalam rangka penjangkauan klien anak terlantar luar panti serta sinergitas dan pengkoordinasian penyedia layanan baik pemerintah maupun masyarakat. Berikut grafik yang menggambarkan pencapaiannya.



Grafik 2. 45 Persentase Anak Telantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Di Luar Panti Kab. Tulungagung Tahun 2016-2020

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, 2021

Indikator selanjutnya adalah Persentase Lanjut Usia Telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti. Lanjut Usia Telantar Kriteria ketelantaran lansia sesuai dengan kesepakatan Badan Pusat Statistik Republik Indonesia dan Kementerian Sosial Republik Indonesia adalah tidak pernah sekolah atau tidak tamat SD, makan makanan pokok kurang dari 14 kali dalam seminggu, makan lauk pauk berprotein tinggi (nabati atau hewani); nabati < 4 kali, hewani \leq 2 kali atau kombinasinya, memiliki pakaian kurang dari 4 stel, tidak mempunyai tempat tetap untuk tidur, bila sakit tidak diobati, dan bekerja > 35 jam seminggu. Derajat ketelantaran lansia ditentukan dengan syarat, jika memenuhi 1 (satu) kriteria maka dikategorikan lansia tidak telantar, jika memenuhi 2 (dua) kriteria maka dikategorikan lansia hampir telantar dan jika memenuhi lebih dari 2 (dua) kriteria maka dikategorikan lansia telantar. Penanganan lanjut usia terlantar merupakan kesulitan tersendiri yang belum mendapatkan solusi secara komprehensif. Secara institusi penyedia layanan baru ada milik provinsi dan swasta dengan kapasitas yang sangat minim sementara harus melayani wilayah administrasi beberapa Kabupaten/Kota. Sehingga sampai saat ini masih ada kendala untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan penanganan secara baik bagi lanjut usia terlantar. Capaian indikator Persentase Lanjut Usia Telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti di Kabupaten Tulungagung Pada tahun 2016 sebesar 61%, kemudian meningkat menjadi 67% pada tahun 2017. Pada tahun 2018 angkanya mencapai 70% dan pada tahun 2019 meningkat 10% menjadi sebesar 80% dan angka tersebut bertahan hingga tahun 2020. Berikut grafik yang menggambarkan pencapaiannya.



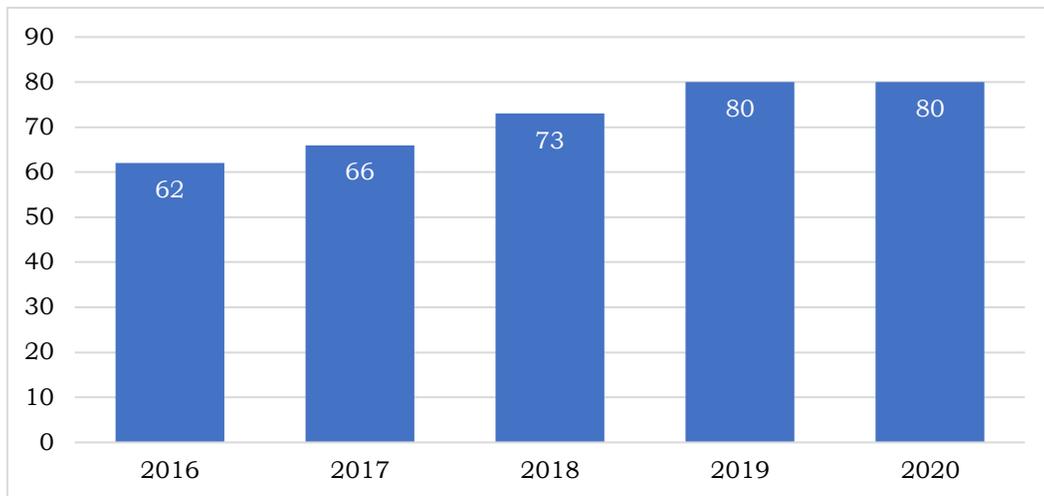
Grafik 2. 46 Persentase Lanjut Usia Telantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti Kabupaten Tulungagung 2016-2020

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, 2021

Indikator selanjutnya adalah Persentase Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti. Gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum. Pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.

Gelandangan di Kabupaten Tulungagung mempunyai mobilitas yang tinggi sehingga untuk identifikasi saja banyak mengalami kesulitan, karena juga mencakup wilayah lintas kabupaten. Sedangkan untuk pengemis bukan semata faktor kemiskinan namun juga terkait mentalitas, kendala dalam pemenuhan kebutuhan dasar bagi gelandangan dan pengemis terkait administrasi kependudukan.

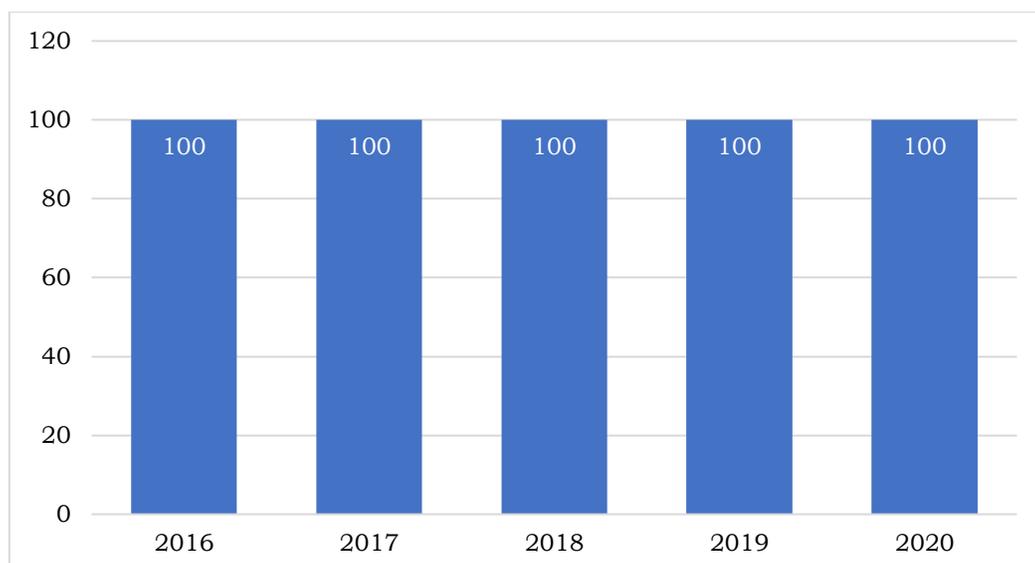
Capaian indikator Persentase Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti di Kabupaten Tulungagung pada tahun 2016 sebesar 62%, kemudian meningkat menjadi 66% pada tahun 2017. Pada tahun 2018 angkanya mencapai 73% dan pada tahun 2019 meningkat 7% menjadi sebesar 80% hingga tahun 2020. Berikut grafik yang menggambarkan pencapaiannya.



Grafik 2. 47 Persentase Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhannya di Luar Panti Kab. Tulungagung Tahun 2016-2020

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, 2021

Kemudian aspek yang berkaitan dengan Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhannya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana memiliki capaian yang paling maksimal pada tahun 2016 hingga tahun 2020 yaitu 100%. Terdapat sinergitas yang cukup baik antar PD terkait penanganan bencana alam maupun sosial, ketersediaan infrastruktur penanganan juga sangat lengkap serta dukungan penganggaran untuk penyediaan dan pemenuhan korban bencana khususnya pada saat dan setelah tanggap darurat juga sangat memadai, terlebih lagi dukungan organisasi organisasi relawan dari unsur masyarakat juga sangat tinggi sehingga dapat dicapai presentase pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana 100%. Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap korban bencana alam dan sosial yang ada pada saat dan setelah tanggap darurat bencana terpenuhi kebutuhannya. Berikut grafik yang menggambarkan pencapaiannya.



Grafik 2. 48 Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial Yang Terpenuhi Kebutuhannya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, 2021

Tabel 2. 42 Variabel Sosial Kabupaten Tulungagung Tahun 2020

No	Uraian	2020
1	PPKS	315.438
2	Penanganan PPKS	85.334

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, 2021

Jumlah PPKS tidak mengalami peningkatan yang signifikan karena penyebaran Pandemi Covid 19 yang diikuti dengan pembatasan sosial terutama aktivitas ekonomi telah berdampak pada penurunan transaksi, berkurangnya omzet usaha sampai pada pemutusan hubungan kerja dan tutupnya banyak unit usaha. Hal ini tentu saja mengakibatkan bertambahnya pengangguran terbuka, berkurangnya pendapatan dan muaranya pada bertambahnya kasus kemiskinan di masyarakat. Yang kemudian diantisipasi oleh pemerintah desa program program bantuan sosial untuk penanganan PPKS. Sedangkan capaian kinerja permasalahan sosial dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2. 43 Penanganan PPKS di Kab. Tulungagung Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase penurunan PPKS	0,97	1,6	1,60	1,65	0,3
2	Persentase kasus kekerasan anak yang ditangani	100	100	100	100	100

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, 2021

Laju penurunan PPKS sudah pasti akan terkoreksi mengingat kondisi yang sedemikian berat bagi masyarakat. Program program bantuan sosial dari pemerintah sifatnya hanya menopang agar masyarakat miskin dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan tidak semakin terperosok dalam kemiskinan. Sementara program program pengentasan kemiskinan dalam rangka pemberdayaan masyarakat hanya merupakan stimulus, sedangkan porsi terbesar tetap upaya dari masyarakat miskin itu untuk memberdayakan dirinya sendiri.

2.3.1.1.5.1 Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang terkait dengan Urusan Sosial terdiri dari 11 indikator dengan capaian sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 44 Capaian Indikator TPB Urusan Sosial Kabupaten Tulungagung 2016-2020

Indikator TPB/SDG's	Target (Perpres 59/2017)	Capaian/Tahun					Keterangan
		2016	2017	2018	2019	2020	
Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	Menurun menjadi 7-8%	8,23%	8,04%	7,27%	6,74%	7,33%	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai

Indikator TPB/SDG's	Target (Perpres 59/2017)	Capaian/Tahun					Keterangan
		2016	2017	2018	2019	2020	
							Target Nasional
Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	Meningkat menjadi 17,12%	n/a	4,21%	n/a	n/a	n/a	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional
Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/ Program Keluarga harapan	Menurun menjadi 2,8 juta (Rata-rata 5.447 per Kab./ Kota atau penurunan 1,67% per tahun)	7.956	21.794	37.411	34.183	35.331	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional
Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	Meningkat menjadi 151 ribu (Meningkat sebesar 251,16% atau di Kab. Tulungagung menjadi 913 tahun 2019, 2016: 260 orang)	260 orang	250 orang	n/a	n/a	n/a	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional
Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	Meningkat menjadi 81,5 ribu	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Data Belum Tersedia
Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	Meningkat	0,34%	1,28%	2,09%	3,31%	3,74%	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional
Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah	Meningkat	12,00 %	19,40 %	20,88 %	23,86 %	23,88 %	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional
Koefisien Gini	Menurun menjadi 0,36	0,37	0,35	0,373	0,304	0,336	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional

Indikator TPB/SDG's	Target (Perpres 59/2017)	Capaian/Tahun					Keterangan
		2016	2017	2018	2019	2020	
Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Menurun menjadi 7-8%	8,23%	8,04%	7,27%	6,74%	7,33%	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional
Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.	Menurun	n/a	n/a	n/a	n/a	28,95%	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional
Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Menurun	0,005%	0,008%	0,003%	0,005%	0,008%	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional

Sumber: Dokumen KLHS Kabupaten Tulungagung 2018-2023

Berdasarkan tabel mengenai capaian indikator TPB untuk urusan sosial di Kabupaten Tulungagung di atas dapat diketahui bahwa mayoritas indikator memiliki capaian yang sudah melampaui target yang ada. Hal ini merupakan indikasi positif dalam hal menciptakan masyarakat yang sejahtera. Namun disamping itu juga terdapat indikator yang secara data masih belum ada yang disebabkan karena belum adanya pelaksanaan kegiatan seperti contohnya indikator Pendampingan psikososial korban bencana sosial. Hal-hal seperti ini yang juga harus menjadi perhatian penting bagi Kabupaten Tulungagung untuk meningkatkan dan pemerataan pelayanan urusan sosial untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera.

2.3.1.2 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

2.3.1.2.1 Tenaga kerja

Urusan ketenagakerjaan merupakan salah satu indikator yang berperan dalam pembangunan. Ketenagakerjaan menggambarkan kualitas sumber daya manusia dan tingkat pengangguran serta berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan suatu daerah. Sebagai akibat dari krisis ekonomi global yang merambah dalam berbagai strata kehidupan masyarakat dan tingkat pengangguran terbuka masih cukup tinggi, ditambah beberapa perusahaan/industri mulai merampingkan atau meliburkan karyawannya tanpa batas waktu yang jelas, maka perekonomian masyarakat di Kabupaten Tulungagung sangat terpengaruh. Menghadapi kenyataan ini, Pemerintah Kabupaten Tulungagung melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah

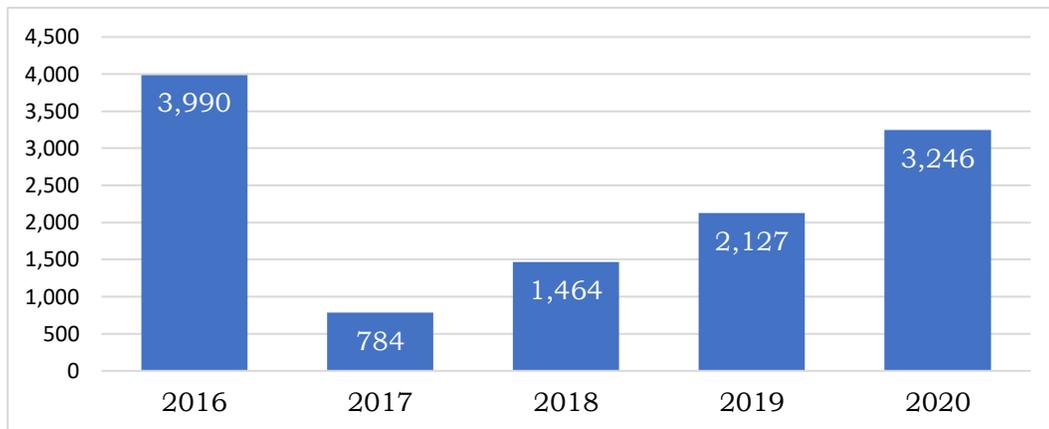
merancang dan melakukan berbagai kegiatan untuk mengatasi berbagai persoalan ketenagakerjaan utamanya tentang pengangguran, dan kemiskinan dengan arah untuk peningkatan, pembentukan dan pengembangan tenaga kerja yang berkualitas, menciptakan peluang usaha dan memperluas lapangan kerja. Hal ini diwujudkan melalui program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja, program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan. Adapun perkembangan pembangunan urusan ketenagakerjaan yang telah dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 45 Capaian Indikator Urusan Ketenagakerjaan Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah tenaga kerja yang memenuhi ketentuan standar kompetensi kerja (jumlah tenaga kerja yang dilatih)	Orang	3.990	784	1.464	2.127	3.246
2	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan	orang	3.611	5.574	4.154	4.148	945
3	Kasus ketenagakerjaan yang diselesaikan terhadap kasus yang ada (%)	%	100	90,91	100	100	100
4	Angka sengketa pengusaha-buruh	kasus	6	11	6	4	8
5	Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)	%	69,63	67,15	70,62	70,48	73,17
6	Tingkat kesempatan kerja (%)	%	96,15	97,73	97,39	96,64	95,39
7	Persentase peserta pelatihan yang memiliki kompetensi	%	50	58,33	72,92	61,72	77,5
8	Persentase penempatan tenaga kerja	%	22,18	31,35	23,05	24,09	6,64
9	Persentase penanganan perselisihan hubungan industrial	%	100	90,91	100	100	100
10	Persentase peserta pelatihan yang direkomendasikan bidang pelatihan	%	100	100	100	100	100
11	Persentase transmigran yang ditempatkan	%	100	100	100	67	0
12	Persentase lokasi transmigrasi yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	0

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung, 2021

Pada Tahun 2020 sektor ketenagakerjaan dan ketransmigrasian sangat terdampak Pandemi Covid 19. Di Kabupaten Tulungagung sebanyak 6 perusahaan telah merumahkan 588 karyawannya. Disamping itu sebagai dampak COVID 19 sebanyak 386 PMI (Pekerja Migran Indonesia) telah dipulangkan, sehingga menambah beban pengangguran di Kabupaten Tulungagung. Rencana pengiriman calon transmigran Tahun 2020 juga ditunda, sehingga anggaran yang sudah dialokasikan dipangkas untuk refocusing Covid 19. Berikut grafik yang menggambarkan pencapaiannya.



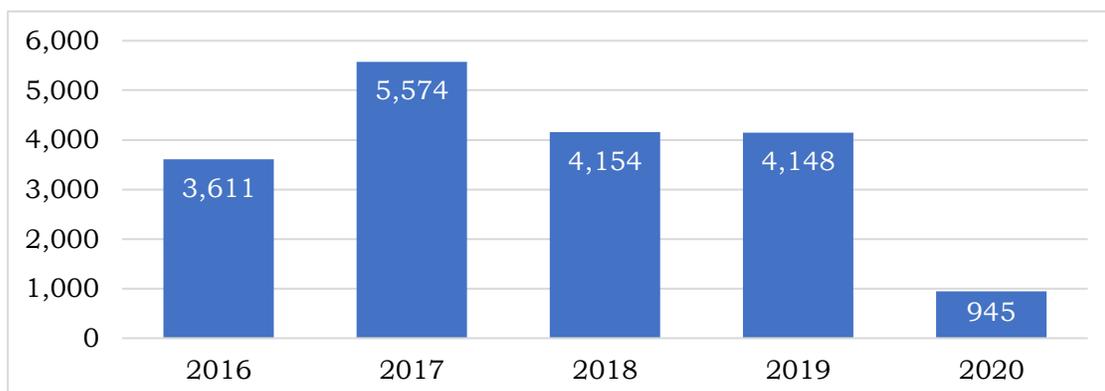
Grafik 2. 49 Jumlah Tenaga Kerja Yang Memenuhi Ketentuan Standar Kompetensi Kerja Kab. Tulungagung Tahun 2016-2020

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, 2021

Jumlah Tenaga Kerja yang memenuhi ketentuan standar kompetensi di Kabupaten Tulungagung sebanyak 3.246 orang, dengan rincian sebanyak 185 orang dari pelatihan di UPT BLK (Balai Latihan Kerja) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan sebanyak 3.061 orang dari pelatihan di LPKS (Lembaga Pelatihan Kerja Swasta) yang dibina oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung.

Sedangkan capaian indikator jumlah pencari kerja yang ditempatkan pada pada tahun 2016 menjadi 3.611 orang. Pada tahun 2018 menurun dibandingkan dengan tahun 2017, dari 5.574 di tahun sebelumnya menjadi 4.154 di tahun 2018 dan pada tahun 2019 menjadi 4.148 pencari kerja, dan pada 2020 menjadi 945.

Sebagai dampak pandemi Covid 19, tidak adanya pengiriman PMI (Pekerja Migran Indonesia) ke luar negeri, dan lesunya dunia usaha di tanah air, maka sangat sedikit perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan, sehingga sangat berdampak pada penempatan pencari kerja di Kabupaten Tulungagung. Pada Tahun 2020 dari sebanyak 1.308 pencari kerja, hanya 945 pencaker yang ditempatkan, baik secara AKAN (Angkatan Kerja Antar Negara), AKAD (Angkatan Kerja Antar Daerah), maupun AKL (Angkatan Kerja Lokal). Berikut grafik yang menggambarkan pencapaiannya.



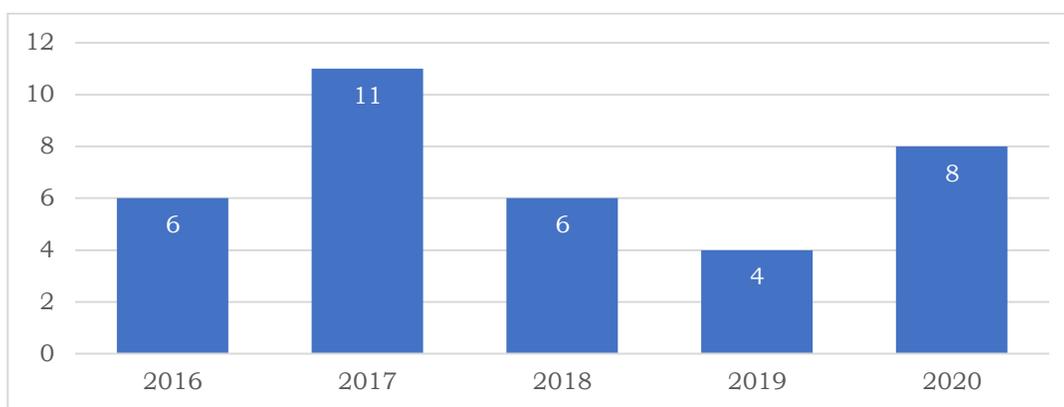
Grafik 2. 50 Jumlah Pencari Kerja yang Ditempatkan Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, 2021

Di sisi lain sengketa pengusaha dan buruh cenderung mengalami peningkatan tiap tahunnya. Tahun 2020 menjadi tahun yang sangat sulit bagi

dunia usaha dan dunia industri, sebagai akibat dari pandemic Covid 19, sehingga memaksa beberapa perusahaan merumahkan karyawannya. Meningkatnya kasus sengketa/ perselisihan hubungan industrial mayoritas disebabkan karena banyak karyawan yang selama dirumahkan belum digaji. Kondisi demikian terjadi karena perusahaan juga kesulitan selama pandemi ini. Kasus-kasus tersebut sekarang dalam proses penyelesaian, baik secara Bipartit, maupun PHI (Peradilan Hubungan Industrial).

Pada tahun tahun 2016 sempat turun menjadi 6 kasus, namun di tahun 2017 kembali meningkat hampir dua kali lipat menjadi 11 kasus. Pada tahun 2018 sengketa pengusaha dan buruh cenderung mengalami penurunan menjadi 6 kasus dan kembali menurun pada tahun 2019 menjadi 4 kasus. Pada tahun 2020 meningkat kembali menjadi 8 kasus. Berikut grafik yang menggambarkan pencapaiannya.

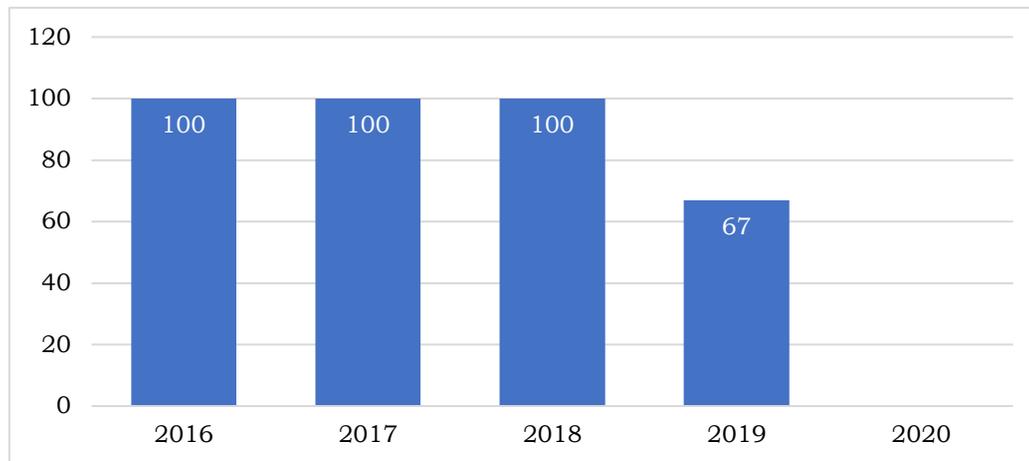


Grafik 2. 51 Sengketa Pengusaha dan Buruh Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, 2021

Transmigrasi merupakan langkah kongkrit dan nyata untuk meningkatkan kesejahteraan. Kesejahteraan transmigran didapat melalui tahap seleksi, lalu pembekalan dari berbagai pelatihan pembangunan desa yang dilakukan oleh pemerintah. Selain itu, kehidupan bertransmigrasi para transmigran didukung fasilitas sarana dan prasarana yang memadai. Transmigran adalah warga negara Republik Indonesia yang berpindah secara sukarela ke Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT) atau lokasi permukiman transmigrasi melalui pengaturan dan pelayanan Pemerintah.

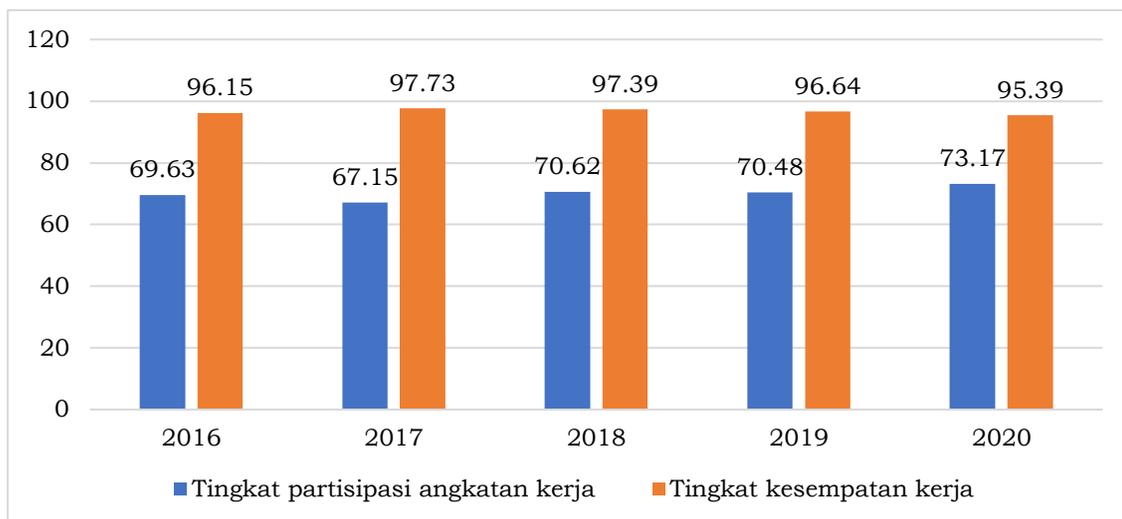
Pelayanan Calon Transmigran meliputi Persiapan (pendaftaran dan pelatihan), serta Pemberangkatan/ Penempatan Calon Transmigran. Untuk pendaftaran sudah ada 8 warga yang mendaftar sebagai calon transmigran, namun karena pandemi Covid 19 ini maka Program Perpindahan dan Penempatan Transmigran 2020 ditunda penempatannya ke Tahun 2021. Karenanya anggaran untuk pelatihan dan pemberangkatan dipangkas dalam refocusing Covid 2019. Berikut adalah grafik tentang presentase transmigran yang ditempatkan Kabupaten Tulungagung.



Grafik 2. 52 Persentase Transmigran Yang Ditempatkan Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, 2021

Indikator Persentase lokasi transmigrasi yang ditindaklanjuti memiliki capaian yang sempurna, sejak tahun 2016 hingga tahun 2018 capaiannya adalah 100%, sedangkan tahun 2019 turun menjadi 67%. Dalam aspek atau urusan tenaga kerja pasti berbicara tentang angkatan kerja, berikut merupakan grafik angka partisipasi angkatan kerja dan tingkat kesempatan kerja.



Grafik 2. 53 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Dan Tingkat Kesempatan Kerja Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, 2021

Tingkat partisipasi angkatan kerja, TPAK (atau tingkat kegiatan ekonomi, EAR), adalah rasio antara angkatan kerja dan ukuran keseluruhan kelompok mereka (penduduk nasional rentang usia yang sama). Istilah umumnya tidak termasuk pengusaha atau manajemen, dan dapat menyiratkan mereka yang terlibat dalam kerja manual. Tingkat Partisipasi Angkatan kerja mengalami peningkatan setiap tahunnya, pada tahun 2016 mencapai 69,63%, kemudian pada tahun 2017 meningkat menjadi 67,15% dan terus meningkat pada tahun 2018 menjadi 70,62%. Pada tahun 2019 Tingkat Partisipasi Angkatan kerja menjadi 70,48% dan meningkat kembali menjadi 73,17% pada tahun 2020. Indikator selanjutnya adalah Tingkat kesempatan kerja memiliki capaian yang fluktuatif setiap tahunnya. Pada tahun 2016 mencapai 96,15%.

Pada tahun 2017 angkanya mencapai 97,73%, kemudian pada tahun selanjutnya menjadi 97,39% dan pada tahun 2019 menjadi 96,64%. Kemudian mengalami penurunan menjadi 95,39% pada tahun 2020.

2.3.1.2.1.1 Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang terkait dengan Urusan Ketenagakerjaan terdiri dari 10 indikator dengan capaian sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 46 Capaian Indikator TPB Urusan Tenaga Kerja Kabupaten Tulungagung 2016-2020

Indikator TPB/SDG's	Target (Perpres 59/2017)	Capaian/Tahun					Keterangan
		2016	2017	2018	2019	2020	
Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	Meningkat menjadi 62,4 juta pekerja formal; 3,5 juta pekerja informal (Jml TK 2019 = 129.366.192, sehingga kepesertaan 50,94%)	n/a	1,04%	1,26%	2,19%	4,12%	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional
Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	Meningkat	n/a	n/a	- 7,69%	19,95 %	- 6,92%	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional
Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	Meningkat	n/a	n/a	n/a	n/a	52,38 %	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional
Persentase tenaga kerja formal.	51%	n/a	34,71 %	34,03 %	33,14 %	34,48 %	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional
Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	Meningkat	n/a	n/a	n/a	n/a	30,34 %	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional
Upah rata-rata per jam pekerja.	Meningkat	Rp 35.500	Rp. 38.429	Rp. 41.776	Rp. 45.130	Rp. 48.971	Indikator Sudah Dilaksanakan dan

Indikator TPB/SDG's	Target (Perpres 59/2017)	Capaian/Tahun					Keterangan
		2016	2017	2018	2019	2020	
							Sudah Mencapai Target Nasional
Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	Menurun	3,60%	2,27%	2,61%	3,36%	4,62%	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional
Tingkat setengah pengangguran	Menurun	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Data Belum Tersedia
Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	Meningkat	n/a	n/a	n/a	n/a	17,56 %	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional
Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur	Meningkat	n/a	8,39%	7,94%	7,53%	7,16%	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional

Sumber: Dokumen KLHS Kabupaten Tulungagung 2018-2023

Berdasarkan tabel mengenai capaian indikator TPB untuk urusan tenaga kerja di Kabupaten Tulungagung di atas dapat diketahui bahwa mayoritas indikator memiliki capaian yang sudah melampaui target yang ada. Hal ini merupakan indikasi positif dalam hal menciptakan tenaga kerja yang berkualitas. Namun disamping itu juga terdapat indikator yang secara data masih belum ada yang disebabkan karena belum adanya pelaksanaan penghitungan atau pendataan seperti contohnya indikator Tingkat setengah pengangguran. Hal-hal seperti ini yang juga harus menjadi perhatian penting bagi Kabupaten Tulungagung untuk meningkatkan dan pemerataan kualitas dari pada tenaga kerja.

2.3.1.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan salah bentuk upaya peningkatan peranan kelompok masyarakat dalam proses pembangunan desa. Melalui hal tersebut dapat meningkatkan keswadayaan masyarakat guna meningkatkan kehidupan ekonomi, sosial, budaya dan politik. Berikut merupakan tabel yang menyajikan variabel dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Tulungagung selama tahun 2016 hingga 2020.

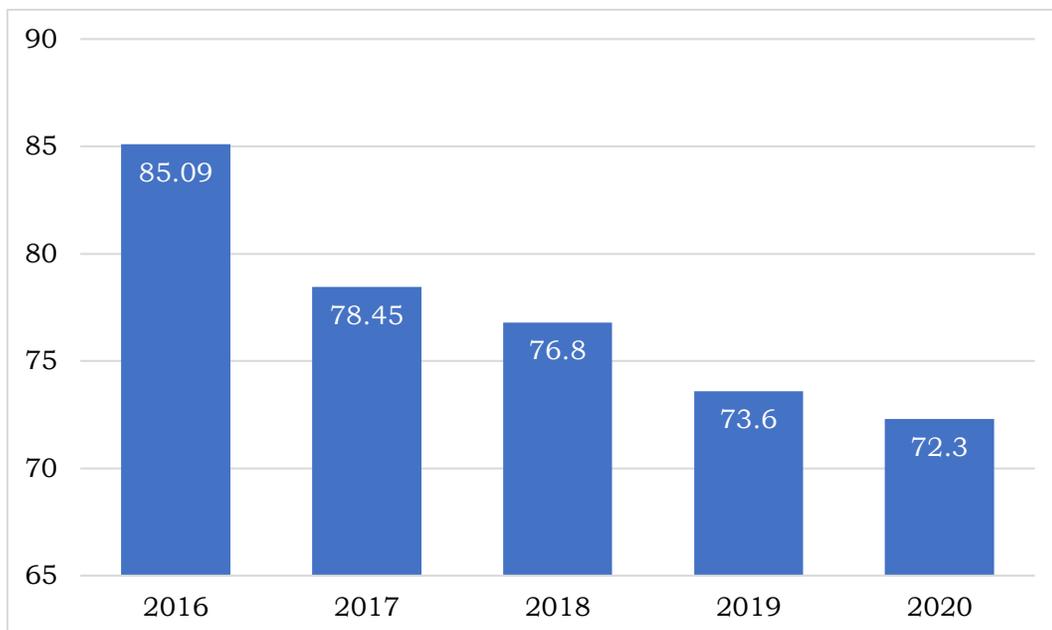
Tabel 2. 47 Capaian Indikator Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kab. Tulungagung Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Partisipasi Perempuan di Pemerintahan (manajerial)		33,76	33,93	34,05	34,11	N/A
Perempuan sebagai Tenaga Profesional	%	-	49,16	49,84	54,59	57,83
Sumbangan Pendapatan Perempuan	%	-	38,14	38,18	38,22	38,45
Keterlibatan Perempuan di Parlemen	%	-	10	10	12	12
Rasio Kekerasan dalam Rumah Tangga	%	85,09	78,45	76,8	73,6	72,3
Persentase Pelayanan Penyelesaian Tindak Kekerasan	%	100	100	100	100	100
Layanan Anak Berkebutuhan Khusus		26	26	n/a	n/a	26
Persentase pelaksanaan pengarusutamaan gender pada Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100
Persentase Kasus Perempuan yang terlayani	%	100	100	100	100	100
Persentase Pembinaan kepada Kelompok Industri Rumahan dan BKTKI	%	100	100	100	100	100
Persentase Pemenuhan Hak Anak	%	100	100	100	100	100
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	%	95,28	95,30	95,75	95,63	95,48
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	%	-	63,95	64,11	66,36	65,84

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, 2021

Semua kasus yang masuk ke Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak sudah mendapatkan pelayanan baik untuk kasus kekerasan terhadap perempuan maupun anak, serta pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pembinaan Kelompok BKTKI dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana walaupun ada kasus-kasus tertentu yang masih dalam proses penanganan/penyelesaian.

Berdasarkan data di atas secara garis besar rasio kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Tulungagung pada tahun 2016 rasio kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Tulungagung mencapai angka 85,09%. Rasio kekerasan dalam rumah tangga tahun 2017 menurun menjadi 78,45% atau mengalami penurunan sebesar 6,64% dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2017-2020 terus mengalami penurunan hingga menjadi 72,3%. Berikut grafik yang menggambarkan pencapaiannya.

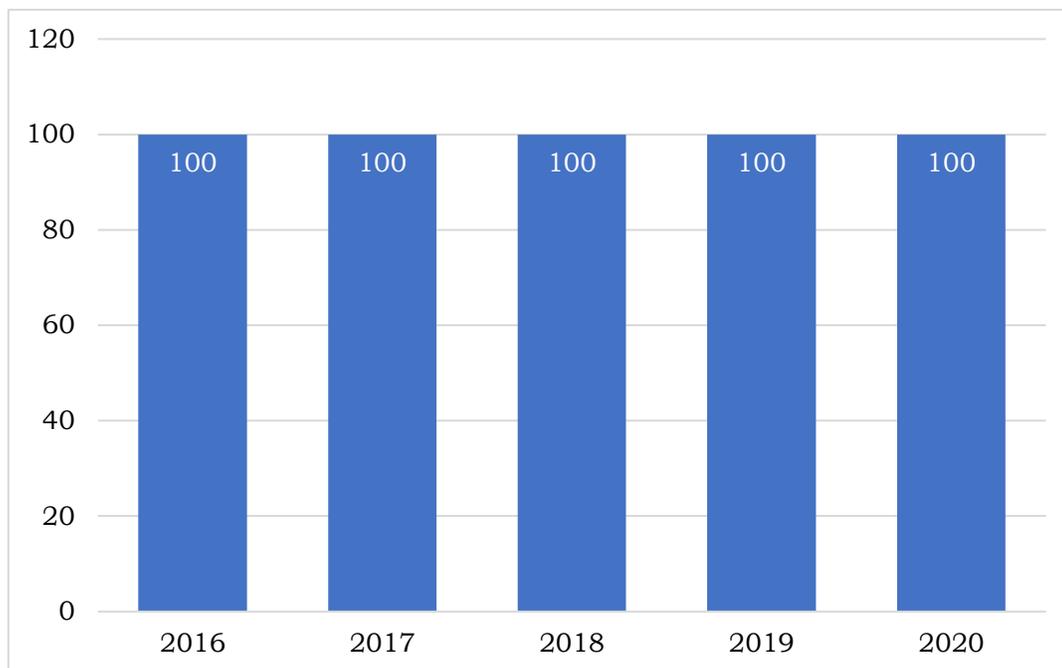


Grafik 2. 54 Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, 2021

Dari data yang ada di Unit Layanan bahwa rasio KDRT cenderung mengalami penurunan, hal ini terjadi karena semakin munculnya pemahaman masyarakat/keluarga terhadap dampak dan konsekuensinya (hukum). Hal ini muncul akibat sosialisasi yang dilakukan oleh banyak pihak termasuk termasuk Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak terkait upaya perlindungan perempuan dan anak serta upaya pencegahan KDRT

Hal yang positif juga terdapat pada persentase pelayanan penyelesaian tindak kekerasan di Kabupaten Tulungagung selama tahun 2016 hingga 2020 telah mencapai 100%. Pelayanan penyelesaian tindak kekerasan berupa pendampingan oleh psikolog klinis, pendampingan advokasi hukum dan pendampingan sosial untuk mengatasi trauma pada korban. Semua kasus yang ada/masuk berusaha untuk dilakukan upaya penyelesaian. Ada sebagian kasus yang bisa terminasi namun ada pula kasus yang masih sedang berproses. Berikut grafik yang menggambarkan pencapaiannya.

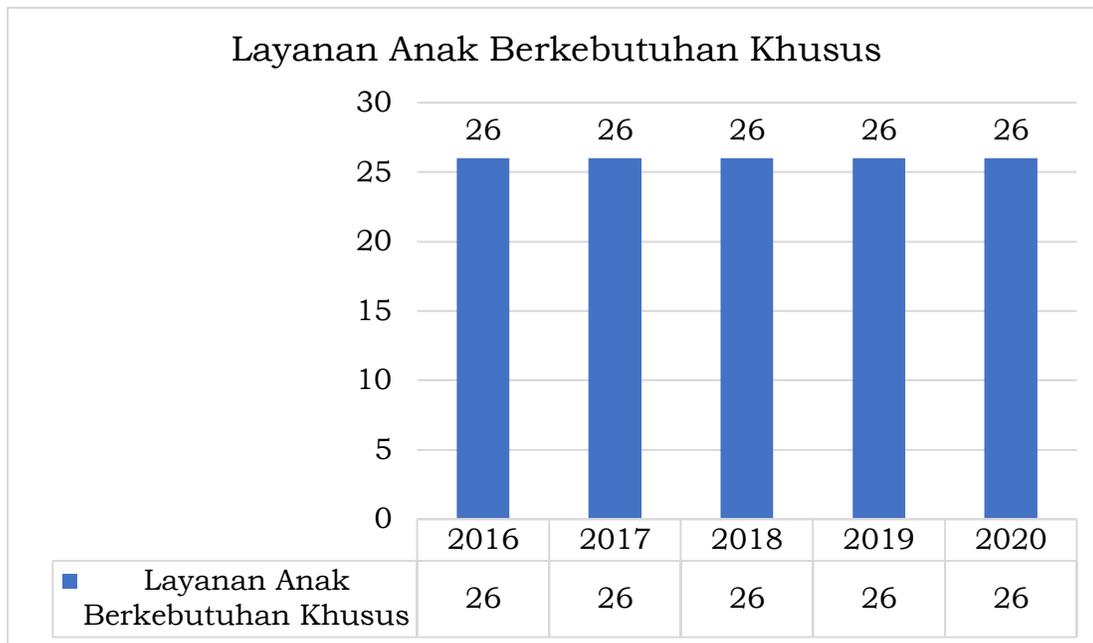


Grafik 2. 55 Persentase Pelayanan Penyelesaian Tindak Kekerasan Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, 2021

Anak berkebutuhan khusus adalah anak-anak yang mengalami keterbatasan atau hambatan dalam segi fisik, mental-intelektual, maupun sosial emosional. Kondisi yang demikian, baik secara langsung atau tidak berdampak pada berbagai aspek kehidupan mereka. Untuk itu layanan sangat diperlukan bagi mereka, untuk dapat menjalani kehidupannya secara wajar. Secara umum kondisi anak-anak berkebutuhan khusus memang berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Namun keadaan yang demikian, bukan berarti layanan yang diberikan selalu berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Mungkin saja anak-anak berkebutuhan khusus secara umum memerlukan layanan sebagaimana anak-anak pada umumnya dan hanya pada beberapa bidang yang memerlukan layanan atau pendampingan khusus. Artinya, untuk beberapa jenis anak berkebutuhan tersebut sebagian besar dapat mengikuti layanan pendidikan sebagaimana anak-anak normal pada umumnya.

Ada beberapa jenis layanan yang bisa diberikan kepada anak-anak berkebutuhan khusus, sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Namun secara umum akan mencakup: layanan medis dan fisiologis, layanan sosial-psikologi dan layanan pedagogis/pendidikan. Indikator layanan anak berkebutuhan khusus di Kabupaten Tulungagung memiliki capaian sebesar 26% pada tahun 2015 hingga tahun 2017. Capaian ini dipengaruhi oleh jumlah anak berkebutuhan khusus yang mendapatkan layanan dengan total keseluruhan anak berkebutuhan khusus yang ada di Kabupaten Tulungagung. Berikut grafik yang menggambarkan pencapaiannya.

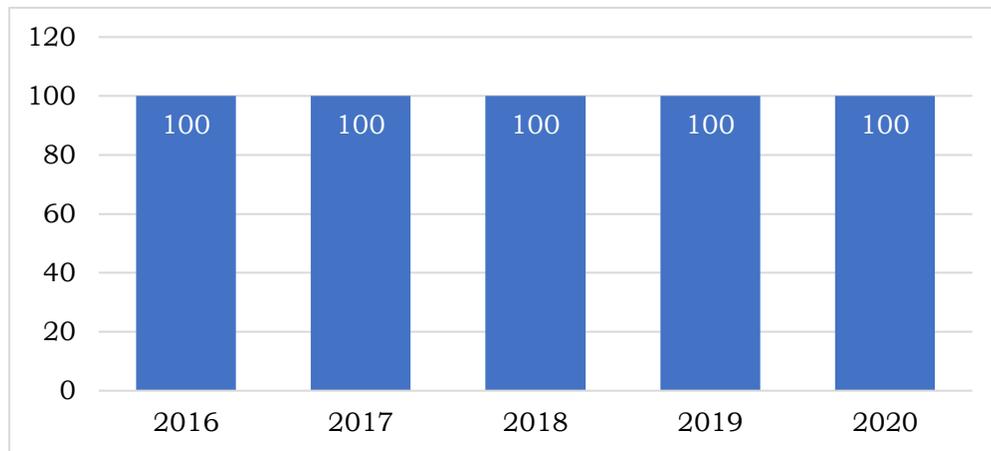


Grafik 2. 56 Layanan anak berkebutuhan khusus Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, 2021

Indikator Persentase pelaksanaan pengarusutamaan gender pada Perangkat Daerah di Kabupaten Tulungagung memiliki capaian yang sempurna yaitu 100%, capaian ini sudah didapatkan sejak tahun 2016 dan bertahan hingga tahun 2020. Di Kabupaten Tulungagung, upaya pemenuhan hak anak diusahakan untuk terus berkesinambungan dengan cara pemenuhan di lima kluster yaitu Hak sipil dan kebebasan, Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternative, Kesehatan dasar dan kesejahteraan, Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya, dan Perlindungan khusus.

Untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak dalam rangka memenuhi amanat Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana dalam pasal 4 disebutkan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. ada 24 indikator KLA yang didasarkan pada substansi hak-hak anak yang dikelompokkan ke dalam 5 (lima) klaster pemenuhan hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak (KHA) yaitu Hak Sipil dan Kebebasan, Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, Pendidikan Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya dan Perlindungan Khusus. Persentase pemenuhan hak anak di Kabupaten Tulungagung memiliki capaian yang sempurna yaitu 100%, capaian ini sudah didapatkan sejak tahun 2016 dan bertahan hingga tahun 2020. Dapat dikatakan bahwasanya pelaksanaan pemenuhan hak anak di Kabupaten Tulungagung berjalan dengan optimal. Berikut grafik yang menggambarkan pencapaiannya.

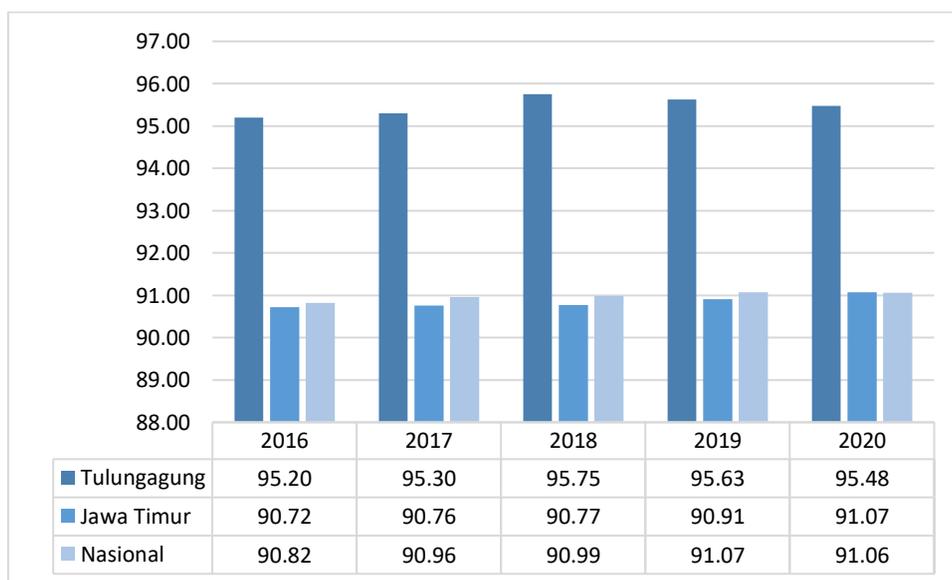


Grafik 2. 57 Persentase Pemenuhan Hak Anak Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, 2021

Capaian untuk pengarusutamaan gender dalam pembangunan dapat dilihat melalui Indeks Pembangunan Gender (IPG). IPG menggambarkan tingkat pembangunan masyarakat berdasarkan gender dimana salah satunya adalah perempuan. IPG merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan.

IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM sama dengan IPG. Nilai IPG berkisar antara 0-100 persen. Bila nilai IPG semakin tinggi maka semakin rendah kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Berikut merupakan grafik yang menyajikan perkembangan indikator kinerja daerah Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Tulungagung, selama tahun 2016 hingga 2020.



Grafik 2. 58 Perkembangan Indikator Kinerja Daerah Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2016-2020

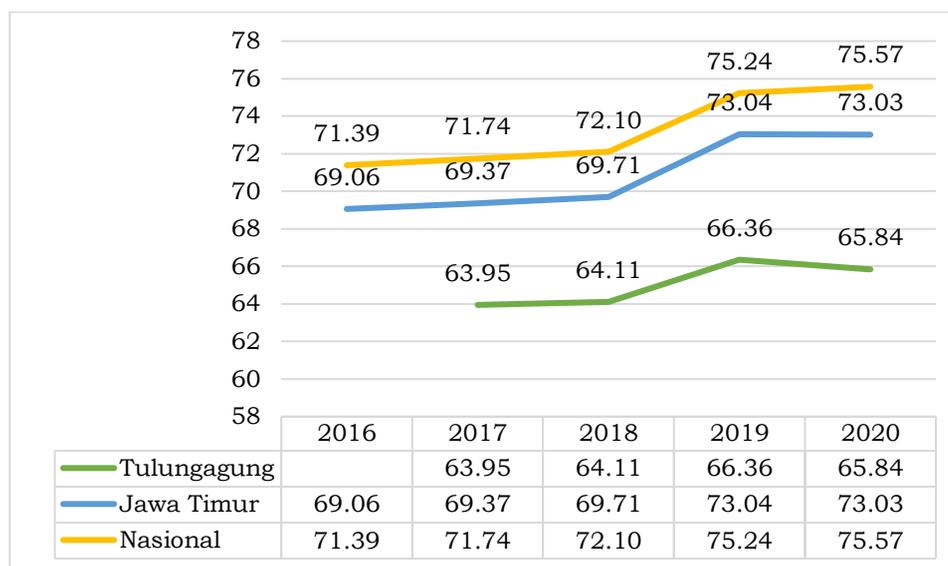
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, 2021

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa IPG Kabupaten Tulungagung selama tahun 2016 hingga 2018 terus mengalami peningkatan. Hal positif lainnya adalah IPG Kabupaten Tulungagung lebih besar dibandingkan IPG Jawa Timur dan Nasional selama tahun 2016 hingga 2018, namun memang mengalami penurunan pada tahun 2019 dan 2020. Indeks Pembangunan Gender mengalami penurunan dikarenakan kurangnya pemahaman perempuan terhadap isu-isu kesetaraan gender dan hak-hak perempuan. Adapun upaya yang telah dilaksanakan dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Gender antara lain:

1. Pembinaan kepada kaum perempuan antara lain dengan pembinaan industri rumah yang pelaku usahanya adalah kaum perempuan.
2. Pembinaan kelompok bina keluarga TKI yang bertujuan untuk memotivasikeluarga TKI agar memiliki usaha produktif sehingga tidak ada keinginan untuk bekerja diluar negeri lagi.
3. Membuat provil gender sebagai bahan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan gender.

Indikator lainnya untuk mengukur terlaksananya keadilan dan kesetaraan gender adalah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IDG merupakan indeks yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan politik dan ekonomi yang diukur berdasarkan partisipasi politik dan pengambilan keputusan yang dilihat dari proporsi perempuan dalam parlemen, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan yang dilihat dari 2 (dua) indikator yaitu proporsi laki-laki dan perempuan sebagai legislator, pejabat senior dan manager serta presentase laki-laki dalam posisi profesional dan teknis dan sumber ekonomi yang diukur dengan perkiraan pendapatan laki-laki dan perempuan.

Nilai IDG berkisar antara 0-100 persen. Bila nilai IDG semakin tinggi maka semakin tinggi peran aktif perempuan dalam kehidupan politik dan ekonomi. Berikut merupakan grafik yang menyajikan perkembangan indikator kinerja daerah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Tulungagung, selama tahun 2016 hingga 2020.



Grafik 2. 59 Perkembangan Indikator Kinerja Daerah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2016 - 2020

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, 2021

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa IDG Kabupaten Tulungagung selama tahun 2017 hingga 2019 terus mengalami peningkatan kemudian mengalami penurunan pada tahun 2020. IDG Kabupaten Tulungagung pada tahun 2016 tidak tersedia dikarenakan pada tahun 2016 tidak dilakukan survei hingga level Kabupaten/Kota. Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Tulungagung apabila dibandingkan dengan IDG Jawa Timur dan Nasional selama tahun 2016 hingga 2020 berada di bawah IDG Nasional dan Jawa Timur. Hal ini dikarenakan masih rendahnya peran aktif perempuan dalam pengambilan keputusan politik maupun ekonomi di Kabupaten Tulungagung.

Indikator berikutnya dalam mengukur kinerja urusan pemberdayaan perempuan yakni dapat dilihat dari Jumlah Perempuan di DPRD. Indikator ini merupakan salah satu indikator yang menggambarkan keberdayaan perempuan yakni keterwakilan rakyat pada posisi legislatif pada gender perempuan. Hal tersebut dikarenakan jumlah perempuan di DPRD menunjukkan perempuan telah mampu menjadi perwakilan rakyat diantara mayoritasnya yang bergender laki-laki. Jumlah perempuan di DPRD Kabupaten Tulungagung tahun 2016 hingga tahun 2018 sebanyak 5 orang. pada kontestasi perpolitikan tahun 2020 jumlah perempuan di DPRD Kabupaten Tulungagung berjumlah 6 orang. Berikut merupakan tabel yang menyajikan jumlah perempuan di DPRD Kabupaten Tulungagung tahun 2016 hingga 2020.

Tabel 2. 48 Jumlah Perempuan di DPRD Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Perempuan di DPRD
2016	5 orang
2017	5 orang
2018	5 orang
2019	6 orang
2020	6 orang

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, 2021

Indikator ini menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik.

Salah satu indikator yang dapat memberikan gambaran terkait perlindungan anak adalah perkembangan kasus kekerasan pada anak. Berikut merupakan tabel capaian Persentase Menurunnya Kasus Kekerasan Anak di Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020.

Tabel 2. 49 Persentase Menurunnya Kasus Kekerasan Anak di Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020

Tahun	Persentase Menurunnya Kasus Kekerasan Anak
2016	10
2017	20
2018	0.8
2019	1.1
2020	1

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, 2021

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa persentase menurunnya kasus kekerasan anak di Kabupaten Tulungagung selama tahun 2016 hingga 2020 mengalami fluktuasi. Persentase tahun 2016 sebesar 10%, sedangkan tahun 2017 sebesar 20%. Persentase tahun 2018 turun dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 0,8% dan naik menjadi sebesar 1,1% ditahun 2019. Pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 1%. Penurunan persentase kasus kekerasan anak tersebut menunjukkan bahwa tingkat perlindungan anak telah mengalami perkembangan yang positif. Salah satu strategi untuk penyuluhan pelayanan perlindungan anak di Tulungagung adalah melakukan sosialisasi terhadap masyarakat. Setelah dilakukan sosialisasi tersebut maka kecenderungan kasus-kasus kekerasan mengalami penurunan.

2.3.1.2.2.1 Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang terkait dengan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari 14 indikator dengan capaian sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 50 Capaian Indikator TPB Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tulungagung 2016-2020

Indikator TPB/SDG's	Target (Perpres 59/2017)	Capaian/Tahun					Keterangan
		2016	2017	2018	2019	2020	
Jumlah kebijakan yang responsive gender mendukung pemberdayaan perempuan.	Bertambah sebanyak 16	8	15	16	17	17	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional
Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Menurun	0,005%	0,008%	0,003%	0,005%	0,008%	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional
Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	Menurun menjadi kurang dari 20,48%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Data Belum Tersedia
Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Menurun	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Data Belum Tersedia
Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang	Meningkat menjadi 70%	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	Indikator Sudah Dilaksanakan dan

Indikator TPB/SDG's	Target (Perpres 59/2017)	Capaian/Tahun					Keterangan
		2016	2017	2018	2019	2020	
mendapat layanan komprehensif.							Sudah Mencapai Target Nasional
Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	Menurun	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Data Belum Tersedia
Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	Meningkat menjadi 21 tahun	> 21	> 21	> 21	> 21	> 21	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional
Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ ASFR).	Menurun menjadi 38	30,98	11,82	5,11	15,69	n/a	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional
Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.	Meningkat	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Data Belum Tersedia
Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/ KB yang tidak terpenuhi)	Menurun menjadi 9,9%	9,19%	10,87%	10,68%	10,15%	10,47%	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional
Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tenta	Meningkat menjadi 85%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Data Belum Tersedia
Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	Menurun	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Data Belum Tersedia
Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	Menurun	62,86%	77,08%	92,00%	73,68%	75,00%	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional
Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun	Menurun	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Data Belum Tersedia

Indikator TPB/SDG's	Target (Perpres 59/2017)	Capaian/Tahun					Keterangan
		2016	2017	2018	2019	2020	
yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.							

Sumber: Dokumen KLHS Kabupaten Tulungagung 2018-2023

Berdasarkan tabel di atas mengenai capaian indikator TPB untuk urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Tulungagung di atas dapat diketahui bahwa mayoritas indikator memiliki capaian yang belum melampaui target yang ada dan mayoritas data TPB sesuai target Perpres 59/2017 belum tersedia. Sehingga masih perlu adanya perhatian besar pemerintah Tulungagung dalam memberdayakan perempuan, dan menciptakan perlindungan dan iklim yang kondusif bagi kehidupan anak. Namun disamping itu juga terdapat indikator yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional, seperti Persentase Korban Kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif, dari data tersebut bisa tercermin bahwa pemerintah Tulungagung terus berkembang dan berusaha memperbaiki pemenuhan jaminan pelayanan perlindungan perempuan dan anak.

2.3.1.2.3 Pangan

Dalam upaya mendukung terwujudnya Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN-PG), Pemerintah Kabupaten Tulungagung telah melaksanakan langkah strategis di beberapa kegiatan diantaranya percepatan penganekaragaman konsumsi pangan ditingkat rumah tangga/keluarga. Pada dasarnya setiap individu pasti membutuhkan pangan yang berkualitas untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif. Konsumsi pangan yang berkualitas dapat diwujudkan apabila makanan yang dikonsumsi sehari-hari mengandung zat gizi lengkap dengan jumlah yang berimbang antar kelompok pangan, serta memperhatikan cita rasa, daya cerna, daya terima dan daya beli masyarakat. Pola konsumsi pangan sehat tersebut dikenal dengan istilah Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA).

Implementasi konsumsi pangan yang memenuhi prinsip B2SA dalam keluarga dilakukan melalui pemilihan bahan pangan dan penyusunan menu. Kualitas konsumsi dipengaruhi oleh keragaman jenis pangan yang dikonsumsi. Pengetahuan akan pentingnya konsumsi pangan B2SA tersebut perlu disosialisasikan sampai pada tingkat terkecil dalam kelompok masyarakat, yaitu keluarga. Didalam suatu keluarga, ibu yang berperan sebagai penentu dan penyedia menu keluarga dan memegang peranan penting terhadap kualitas konsumsi pangan setiap individu dalam keluarganya. Oleh karenanya Pemerintah Kabupaten Tulungagung mengambil langkah strategis dengan melaksanakan kegiatan sosialisasi kelas Ibu pintar B2SA ditingkat Kabupaten dan Kecamatan dengan menghadirkan Ibu-ibu Tim penggerak PKK di 19 Kecamatan dan juga Ibu-ibu Kader B2SA di tingkat Desa.

Konsep penerapan B2SA dalam mendukung RAD-PG ini, juga ditunjang penerapan kegiatan pemanfaatan pekarangan yang dilakukan oleh Kelompok Wanita Tani melalui kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L). Program

Pekarangan Pangan Lestari (P2L) adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat yang utamanya Kelompok Wanita Tani yang secara bersama-sama mengusahakan lahan pekarangan atau lahan kosong yang tidak produktif untuk dimanfaatkan sebagai tempat bertanam sehingga program ini dapat secara berkelanjutan menyediakan sumber pangan bagi masyarakat sekaligus menjadikan ketersediaan, aksesibilitas, dan pemanfaatan, serta pendapatan anggota kelompok masyarakat. Dengan adanya program P2L ini diharapkan masyarakat mampu menyediakan pangan di skala rumah tangga yang beragam jenisnya, mempunyai nilai/mutu gizi yang lebih baik dan sayur yang dikonsumsi bebas dari pestisida berbahaya serta meningkatkan perekonomian keluarga.

**Tabel 2. 51 Data Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA)
Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 - 2020**

Tahun	Desa	Kecamatan
2016	Nglurup	Sendang
	Wonorejo	Pagerwojo
	Dukuh	Gondang
	Gondosuli	Gondang
	Tenggarejo	Tanggunggunung
	Kaligentong	Pucanglaban
2017	Panggungkalak	Pucanglaban
	Bungur	Karangrejo
	Sidem	Gondang
	Wonorejo	Pagerwojo
	Kradinan	Pagerwojo
	Kedoyo	Sendang
	Talang	Sendang
	Nyawangan	Sendang
	Nglurup	Sendang
2018	Tenggarejo	Tanggunggunung
	Kaligentong	Pucanglaban
	Wonorejo	Pagerwojo
	Gondanggunung	Pagerwojo
	Dukuh	Gondang
2019	Ngrejo	Tanggunggunung
	Jengglunharjo	Tanggunggunung
	Kalidawe	Pucanglaban
	Wonorejo	Pagerwojo
	Gondanggunung	Pagerwojo
	Kradinan	Pagerwojo
	Nglurup	Sendang
	Geger	Sendang
	Nyawangan	Sendang
2020	Wonorejo	Pagerwojo
	Kradinan	Pagerwojo
	Nyawangan	Sendang
	Nglurup	Sendang

Tahun	Desa	Kecamatan
	Jengglunharjo	Tanggunggunung

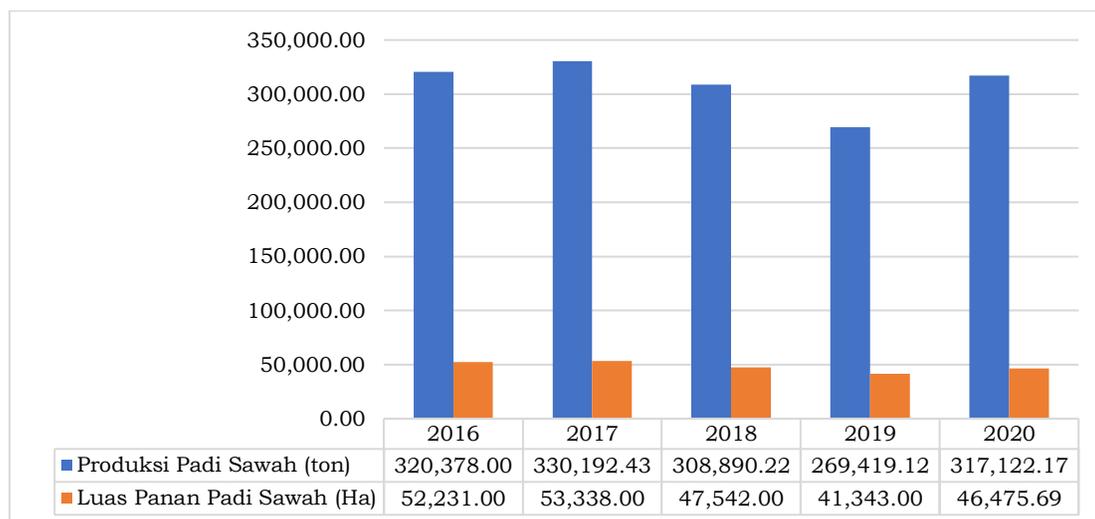
Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, 2021

Tabel 2. 52 Capaian indikator Urusan Pangan Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Skor PPH	Skor	89,1	89,3	92,24	93,11	90,3
AKE (Kkal/Kap/Hari)		1861,3	1902,7	1940	1997	2066
Produksi Padi Sawah (ton)	ton	320.378,28	330.192,43	308.890,22	269.419,12	317.122,17
Luas panen Padi Sawah (Ha)	Ha	52.231,00	53.338,00	47.542,00	41.343,00	46.475,69
Persentase pemanfaatan infrastruktur dan sarpras pendukung kemandirian pangan	%	100	100	100	100	100
Jumlah kelembagaan distribusi pangan, usaha pangan dan lumbung pangan masyarakat untuk menjaga stabilitas harga dan cadangan pangan	Lemba ga	36	43	49	55	55
Persentase Intervensi Wilayah Rawan Pangan	%	100	100	100	100	100
Persentase kelembagaan distribusi pangan, usaha pangan dan lumbung pangan masyarakat dalam peningkatan ekonomi	%	13,3	17,7	18,1	20,3	20,3

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, 2021

Sekitar kurang lebih 60% wilayah Kabupaten Tulungagung merupakan daerah yang subur untuk kegiatan pertanian, terutama daerah yang lewati oleh Sungai Brantas. Keberadaan sungai tersebut menjadikan sumber irigasi yang baik bagi lahan pertanian di sekitarnya. Produksi Padi Tahun 2020 mengalami kenaikan 17,7% dibandingkan Tahun 2019 dari luas tanam yang naik 12%. Berikut grafik yang menggambarkan pencapaiannya.



Grafik 2. 60 Luas Panen dan Produksi Padi Sawah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, 2021

Berikut data Produksi padi di Kabupaten Tulungagung. Luas Lahan Pertanian Per Kecamatan di Kabupaten Tulungagung Tahun 2020.

Tabel 2. 53 Produksi Padi Sawah di Kabupaten Tulungagung Tahun 2020

No	Kecamatan	Padi Sawah		
		Luas panen (Ha)	Hasil (Kwh / Ha)	Produksi (Ton)
1	Besuki	1,993	70.35	14,020.76
2	Bandung	2,976	73.81	21,965.86
3	Pakel	3,871	73.76	28,552.50
4	Campurdarat	1,765	70.22	12,393.83
5	Tanggunggunung	-	-	-
6	Kalidawir	3,103	69.15	21,457.25
7	Pucanglaban	230	69.32	1,594.36
8	Rejotangan	4,239	69.87	29,617.89
9	Ngunut	3,010	73.12	22,009.12
10	Sumbergempol	2,392	74.68	17,863.46
11	Boyolangu	2,934	68.26	20,027.48
12	Tulungagung	785	61.04	4,791.64
13	Kedungwaru	141	71.15	1,003.22
14	Ngantru	1,058	72.73	7,694.83
15	Karangrejo	2,739	61.12	16,740.77
16	Kauman	2,704	67.02	18,122.21
17	Gondang	2,535	72.18	18,297.63
18	Pagerwojo	2,935	67.14	19,705.59
19	Sendang	3,625	72.85	26,408.13
Total		43,035	70.24	302,266.51

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Tulungagung, 2021

Tabel 2. 54 Produksi Padi Gogoh di Kabupaten Tulungagung Tahun 2020

No.	Kecamatan	Padi Gogoh		
		Luas panen (Ha)	Hasil (Kwh/Ha)	Produksi (Ton)
1	Besuki	6	65.47	39,28
2	Bandung	-	-	-
3	Pakel	413	69,89	2.886,46
4	Campurdarat	267	66,03	1.763,00
5	Tanggunggunung	15	56,01	84,02
6	Kalidawir	43	64,25	276,28
7	Pucanglaban	102	62,01	632,50
8	Rejotangan	-	-	-
9	Ngunut	-	-	-
10	Sumbergempol	367	69,05	2.534,14
11	Boyolangu	-	-	-
12	Tulungagung	-	-	-
13	Kedungwaru	-	-	-
14	Ngantru	-	-	-
15	Karangrejo	-	-	-
16	Kauman	-	-	-
17	Gondang	-	-	-
18	Pagerwojo	1.150	58,35	6.710,25

No.	Kecamatan	Padi Gogoh		
		Luas panen (Ha)	Hasil (Kwh/Ha)	Produksi (Ton)
19	Sendang	508	67,96	3.452,37
Total		2.871	64,01	18.378,30

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Tulungagung, 2021

Berdasarkan tabel di atas, kecamatan dengan Produksi Padi sawah terbesar adalah Kecamatan Sendang dengan luas panen 4.925 Hektar dapat memproduksi 33.948,03 Ton. Kecamatan Sendang berada di daerah dataran tinggi di lereng Gunung Wilis, sehingga sebagian besar wilayahnya merupakan lahan pertanian. Sedangkan Kecamatan Tulungagung terletak di pusat kabupaten yang pada dasarnya merupakan pusat pemerintahan dan perdagangan, sehingga produktivitas pertanian cukup rendah di daerah tersebut. Mayoritas penduduk bermata pencaharian petani, sehingga konsumsi beras rumah tangga dapat terjamin bahkan bisa dijual oleh petani itu sendiri. Berikut merupakan data surplus beras di Kabupaten Tulungagung.

Tabel 2. 55 Data Produksi, Konsumsi dan Surplus Beras di Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020

Tahun	Luas Panen (Ha)	Produksi Padi (Ton)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Konsumsi Beras (Ton)	Surplus Beras
2016	59,560.00	352,907.00	1,026,101	97,171.76	107,833.41
2017	49,633.00	357,235.00	1,030,790	97,616.00	110,269.00
2018	49,633.00	357,235.00	1,035,290	98,042.00	109,843.00
2019	44,207.17	301,603.12	1,035,290	98,041.96	77,503.17
2020	28,759.00	119,218.00	1,035,290	57,191.00	11,484.00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, 2021

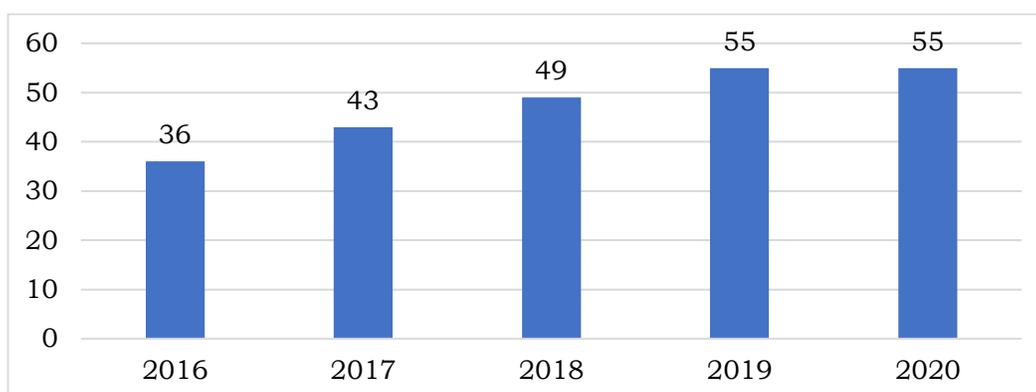
Surplus beras tersebut digunakan oleh pemerintah sebagai cadangan pangan masyarakat sehingga dapat meningkatkan ketahanan pangan Kabupaten Tulungagung. Melihat hal tersebut, Kabupaten Tulungagung dapat dikatakan memiliki potensi pertanian yang sangat baik dalam mewujudkan ketahanan pangan lokal dan swasembada beras nasional. Terlebih jika pemerintah mampu meningkatkan produktivitas padi yang lebih baik, termasuk melindungi petani dan hasil pertaniannya dari gagal panen.

Capaian Persentase pemanfaatan infrastruktur dan sarpras pendukung kemandirian pangan di kabupaten Tulungagung memiliki capaian yang sangat optimal yaitu 100%. Capaian ini didapatkan sejak tahun 2016 hingga tahun 2020. Kemudian indikator selanjutnya adalah Jumlah kelembagaan distribusi pangan, usaha pangan dan lumbung pangan masyarakat untuk menjaga stabilitas harga dan cadangan pangan, jumlah lembaga yang mengatur hal tersebut selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2016 jumlahnya sebanyak 36 lembaga, kemudian tahun 2017 menjadi 43 lembaga dan meningkat kembali menjadi 49 lembaga pada tahun 2018. Kemudian jumlah lembaga tersebut meningkat menjadi 55 lembaga pada tahun 2019 hingga 2020.

Kelembagaan Distribusi Pangan, Usaha Pangan dan Lumbung Pangan Masyarakat menjadi salah satu elemen dalam menjaga stabilitas harga dan

cadangan pangan. Dengan kelembagaan tersebut yang mayoritas merupakan Poktan/Gapoktan diharapkan stok cadangan pangan yang ada di masyarakat tetap terjaga. Selain itu kelembagaan tersebut juga bertujuan untuk dapat memotong rantai distribusi pangan yang cukup panjang (dari 7 – 8 tahap menjadi 3 – 4 tahap), dimana hasil produk pangan petani dapat dijual langsung kepada konsumen sehingga diharapkan stabilitas harga dapat selalu terkendali.

Untuk tahun 2020 ini, dari evaluasi dan capaian kinerja indikator sasaran jumlah kelembagaan distribusi pangan, usaha pangan dan lumbung pangan masyarakat untuk menjaga stabilitas harga dan cadangan pangan, dari target sebanyak 55 lembaga dapat terealisasi sebanyak 55 lembaga sehingga capaiannya 100%. Jika dilihat dari capaian tahun-tahun sebelumnya secara umum selalu mengalami peningkatan, kecuali pada tahun 2020 ini yang tidak mengalami perubahan (peningkatan). Hal ini disebabkan karena terjadinya pandemi Covid 19 yang berpengaruh pada ketersediaan anggaran untuk penumbuhan lembaga baru. Berikut merupakan grafik yang menggambarkan pencapaiannya.



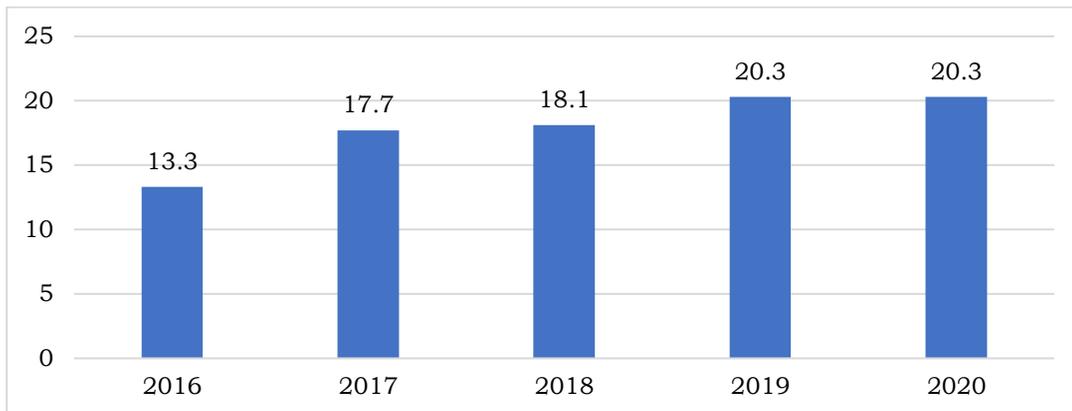
Grafik 2. 61 Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, 2021

Capaian indikator selanjutnya adalah berkaitan dengan Persentase kelembagaan distribusi pangan, usaha pangan dan lumbung pangan masyarakat dalam peningkatan ekonomi. Kelembagaan Distribusi Pangan, Usaha Pangan dan Lumbung Pangan Masyarakat yang mayoritas merupakan Poktan/Gapoktan diharapkan dapat menggerakkan kegiatan agribisnisnya secara profesional sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi produknya yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan bagi semua anggota kelompoknya. Untuk tahun 2020 ini, dari hasil evaluasi dan capaian kinerja indikator sasaran persentase kelembagaan distribusi pangan, usaha pangan dan lumbung pangan masyarakat untuk menjaga stabilitas harga dan cadangan pangan, apabila kita bandingkan dengan jumlah desa yang ada di Kabupaten Tulungagung capainnya 20,3%. Hal ini masih jauh dari target yang diteatpkan yaitu 1 (satu) desa 1 (satu) lumbung pangan.

Jika dilihat dari capaian tahun – tahun sebelumnya secara umum persentasenya selalu mengalami peningkatan, kecuali pada tahun 2020 ini yang tidak mengalami perubahan (peningkatan). Hal ini disebabkan karena terjadinya pandemi Covid 19 yang berpengaruh pada ketersediaan anggaran

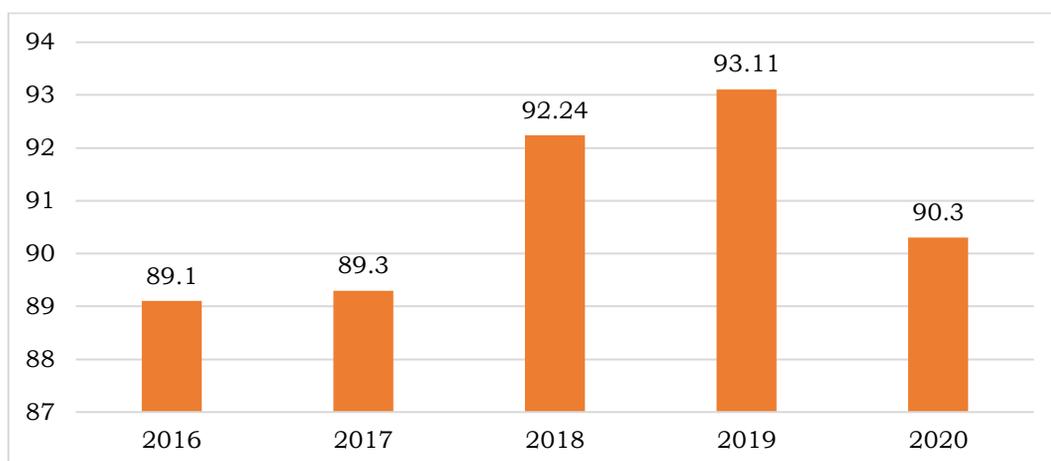
untuk penumbuhan lembaga baru. Berikut merupakan grafik yang menggambarkan pencapaiannya.



Grafik 2. 62 Persentase Kelembagaan Distribusi Pangan, Usaha Pangan Dan Lumbung Pangan Masyarakat Dalam Peningkatan Ekonomi Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, 2021

Indikator selanjutnya adalah berkaitan dengan skor PPH, Skor PPH merupakan indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan sehingga dapat digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan pada tahun-tahun mendatang. capaian indikator ini selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya Skor PPH dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 mengalami peningkatan yang lebih baik, dan melebihi target yang sudah ditetapkan. Tetapi untuk tahun 2020 ini Skor PPH menurun dari tahun sebelumnya bahkan tidak bisa memenuhi target dari yang ditetapkan Skor 92,4. Hal tersebut dikarenakan adanya pandemi Covid 19 yang mempengaruhi penurunan perekonomian masyarakat yang berpengaruh pada daya beli pangan sehingga mempengaruhi pola pangannya dan mengakibatkan Pola Pangan Harapan (PPH) di masyarakat mengalami penurunan. Berikut merupakan grafik yang menggambarkan pencapaiannya.



Grafik 2. 63 Skor PPH Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, 2021

2.3.1.2.3.1 Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang terkait dengan Urusan Pangan terdiri dari 4 indikator dengan capaian sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 56 Capaian Indikator TPB Urusan Pangan Kabupaten Tulungagung 2016-2020

Indikator TPB/SDG's	Target (Perpres 59/2017)	Capaian/Tahun					Keterangan
		2016	2017	2018	2019	2020	
Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	Menurun	n/a	6 Kecamatan	5 Kecamatan	5 Kecamatan	4 Kecamatan	Indikator Sudah Dilaksanakan
Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	Menurun	n/a	n/a	n/a	11% (9 Desa)	10,17% (5 Desa)	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional
Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari	Menurun menjadi 8,5 %	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Data Belum Tersedia
Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan	Meningkat menjadi: skor PPH 92,5; tingkat konsumsi ikan 54,5 kg/kapita/tahun	PPH : 89,11	PPH : 89,30	PPH : 92,24	PPH : 93,11	PPH : 90,30	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional

Keterangan :

* *Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari*

Menurut Widya Karya Nasional Pangan Gizi

Acuan AKE :

Tahun 2012 : 2150 kkal/kapita/hari

Tahun 2018 : 2000 kkal/kapita/hari

Tahun 2021 : 2150 kkal/kapita/hari

* *Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)*

Tahun 2017 : 6 Kecamatan (Kecamatan Tulungagung, Kecamatan Kedungwaru, Kecamatan Ngantru, Kecamatan Karangrejo, Kecamatan Pagerwojo dan Kecamatan Sendang)

Tahun 2018 : 5 Kecamatan (Kecamatan Kedungwaru, Kecamatan Ngantru, Kecamatan Karangrejo, Kecamatan Pagerwojo dan Kecamatan Sendang)

Tahun 2019 : 5 Kecamatan (Kecamatan Kedungwaru, Kecamatan Ngantru, Kecamatan Karangrejo, Kecamatan Pagerwojo dan Kecamatan Sendang)

Tahun 2020 : 4 Kecamatan (Kecamatan Sendang, Kecamatan Pagerwojo, Kecamatan Kedungwaru, dan Kecamatan Tulungagung)

Sumber: Dokumen KLHS Kabupaten Tulungagung 2018-2023

Berdasarkan tabel mengenai capaian indikator TPB untuk urusan Pangan di Kabupaten Tulungagung di atas dapat diketahui bahwa mayoritas indikator memiliki capaian yang belum memenuhi target yang ada. Disamping itu juga terdapat indikator yang secara data masih belum ada yang disebabkan karena belum adanya pelaksanaan penghitungan atau pendataan seperti contohnya indikator prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan dan proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari. Hal-hal seperti ini yang juga harus menjadi perhatian penting bagi Kabupaten Tulungagung untuk meningkatkan kualitas ketahanan pangan.

2.3.1.2.4 Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup merupakan salah indikator yang mempengaruhi tingkat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan Urusan Lingkungan Hidup bertujuan untuk mengendalikan pengelolaan dan pendayagunaan SDA dan pelestarian fungsi lingkungan hidup dalam rangka mendukung pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat dan pembangunan daerah secara serasi, seimbang dan lestari. Hasil pembangunan tersebut terlihat dari capaian indikator sasaran antara lain meningkatnya jumlah mata air yang terlindungi, perusahaan yang memiliki Dokumen UKL, UPL dan AMDAL serta menurunnya kasus pencemaran lingkungan. Berikut merupakan tabel yang menyajikan perkembangan pembangunan urusan lingkungan hidup di Kabupaten Tulungagung pada tahun 2016-2020.

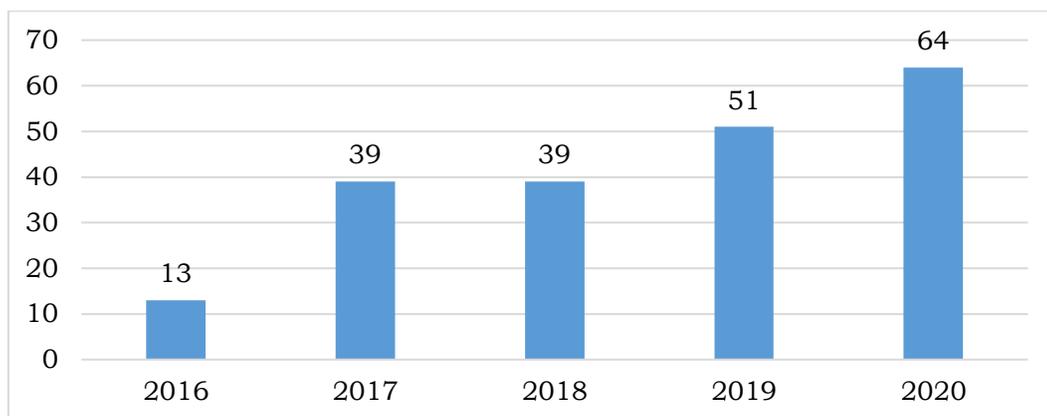
Tabel 2. 57 Capaian Indikator Urusan Lingkungan Hidup di Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	71,33	73,33	70,57	71,23	63,68
2	Nilai Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	48,1	50	60	60	56,67
3	Nilai Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	87,74	92,48	84,20	86,09	83,51
4	Nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Indeks	76,45	76,45	76,45	68,5	39,08
5	Mata air yang mendapatkan perlindungan dengan penanaman pohon (sumber mata air)	Sumber mata air	13	39	39	45	50
6	Jumlah perusahaan yang menyusun Dokumen Lingkungan (UKL, UPL, AMDAL)	Perusahaan	127	60	57	55	82
7	Luas RTH yang dikelola	Ha	100	120	120	160	160
8	Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan dan jumlah pelatihan	lembaga	88	88	134	57	20
9	Persentase kasus lingkungan yang tertangani	%	100	100	100	100	100
10	Jumlah Bank Sampah	Unit	n/a	5	23	29	15
11	Jumlah RTH yang dikelola	Unit	8	10	10	12	12

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
12	Volume timbunan sampah (ton)	Ton	187.2 63,43	188.1 19,17	189.0 65,44	189.6 21,88	198.8 83,94
13	Jumlah sampah yang terangkut (ton)	Ton	14.60 0	14.60 0	32.85 0	57.30 5	71.90 5
14	Jumlah kasus lingkungan yang ditangani	Kasus	6	8	7	8	8

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian indikator Urusan Lingkungan Hidup tahun 2016 hingga tahun 2020, trennya mengalami peningkatan kecuali pada indikator nomor 5 yaitu jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan dan jumlah pelatihan. Hal itu dikarenakan pada tahun 2019, pembinaan dan pelatihan lembaga diprioritaskan untuk lembaga yang belum pernah mendapatkan pembinaan sebelumnya. Sedangkan pada tahun 2020, penurunan target dan capaian disebabkan adanya refocusing anggaran untuk penanganan Covid 19. Berikut merupakan grafik yang menggambarkan pencapaiannya.



Grafik 2. 64 Mata Air Yang Mendapatkan Perlindungan Dengan Penanaman Pohon Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020

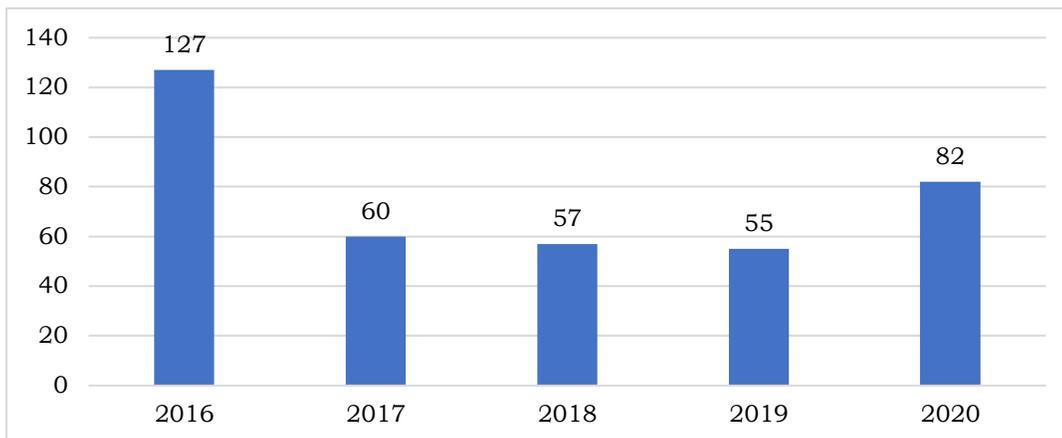
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, 2021

Dari grafik tersebut menunjukkan bahwa mata air yang mendapatkan perlindungan terus meningkat hingga tahun 2020. Perlindungan 64 sumber mata air dilaksanakan dengan melakukan penanaman di *catchment area* (daerah tangkapan mata air) dan pemasangan papan himbauan untuk turut berpartisipasi dalam pemeliharaan sumber mata air.

Dokumen lingkungan berisi informasi dan data mengenai suatu usaha dan/atau kegiatan serta kajian dampak usaha dan/atau kegiatan terhadap lingkungan serta memuat langkah-langkah rencana pengelolaan dan pemantauan untuk mencegah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Meningkatnya jumlah perusahaan yang menyusun dokumen menunjukkan meningkatnya kesadaran dan komitmen pengusaha akan pengelolaan lingkungan hidup.

Jumlah perusahaan di Kabupaten Tulungagung yang menyusun dokumen lingkungan juga mengalami fluktuasi pada tahun 2017 mencapai 60 dari semula 127 di tahun 2016. Pada tahun 2018 jumlah perusahaan yang menyusun dokumen lingkungan sebanyak 57 perusahaan, kemudian pada tahun 2019 menurun menjadi 55 perusahaan dan meningkat menjadi 82

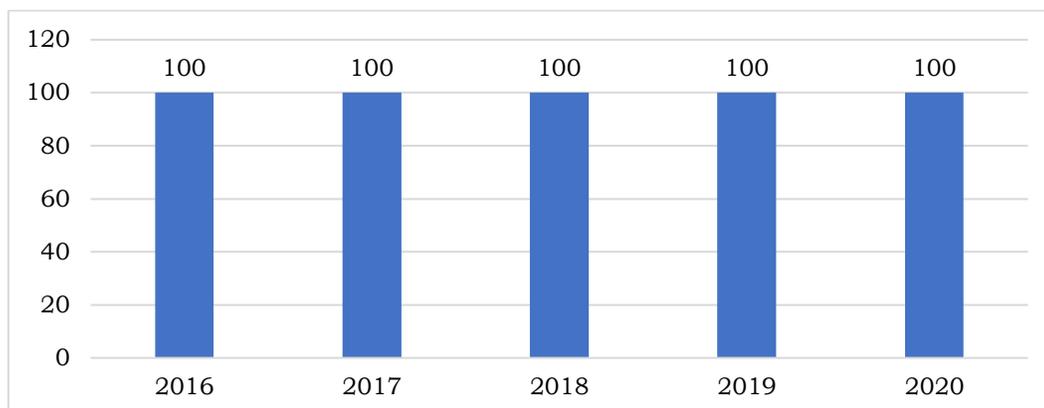
pada tahun 2020. Berikut merupakan grafik yang menggambarkan pencapaiannya.



Grafik 2. 65 Jumlah Perusahaan Yang Menyusun Dokumen Lingkungan Kabupaten Tulungagung 2016-2020

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, 2021

Persentase penanganan kasus pencemaran lingkungan terhadap jumlah kasus yang ada mengalami konsistensi pada pencapaian di angka 100 dari tahun 2016 hingga 2020. Dapat disimpulkan bahwsanya Pemerintah Kabupaten Tulungagung sangat memberikan perhatian terhadap kasus pencemaran lingkungan. Berikut merupakan grafik yang menggambarkan pencapaiannya.



Grafik 2. 66 Persentase Penanganan Kasus Pencemaran Lingkungan Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung, 2021

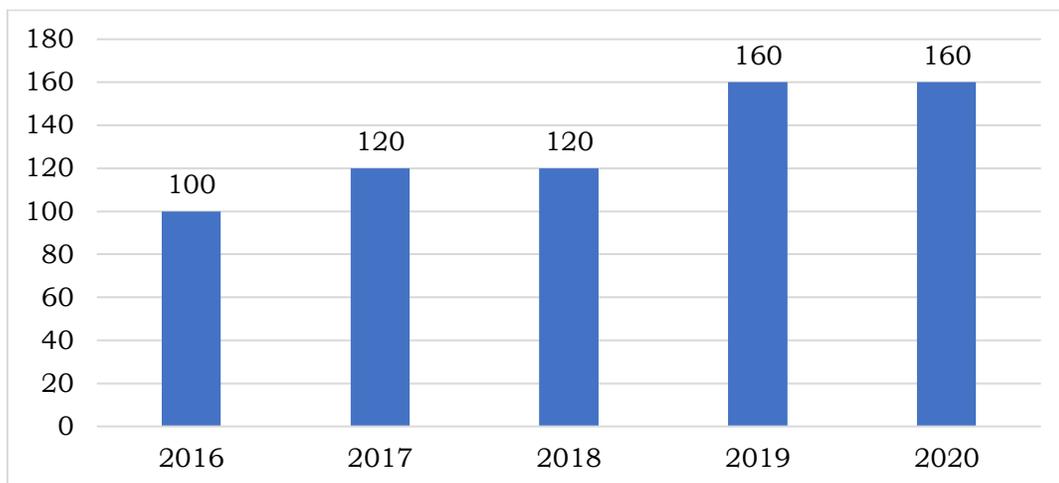
Berdasarkan grafik di atas maka dapat diketahui bahwa Kasus pengaduan yang masuk dan ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung merupakan kasus lingkungan secara umum. Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa persentase penanganan kasus lingkungan pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 tercapai sebesar 100%. Hal tersebut dikarenakan seluruh kasus lingkungan yang masuk, telah ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup. Adapun rincian jumlah kasus

lingkungan yang masuk dan telah ditangani Dinas Lingkungan Hidup setiap tahunnya sebagai berikut:

- a. Pada tahun 2016, terdapat 6 kasus lingkungan;
- b. Pada tahun 2017, terdapat 8 kasus lingkungan;
- c. Pada tahun 2018, terdapat 7 kasus lingkungan;
- d. Pada tahun 2019, terdapat 8 kasus lingkungan;
- e. Pada tahun 2020, terdapat 8 kasus lingkungan.

Banyaknya kasus lingkungan yang dilaporkan merupakan gambaran masyarakat yang semakin peka terhadap dugaan pencemaran/kerusakan lingkungan di sekelilingnya.

Luas ruang terbuka hijau yang terkelola di kabupaten Tulungagung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2016 jumlahnya seluas 100. Kemudian pada tahun 2017 angkanya mencapai 120 dan terus mengalami peningkatan pada tahun 2019 mencapai 160, angka tersebut bertahan hingga tahun 2020. Berikut merupakan grafik yang menggambarkan pencapaiannya.



Grafik 2. 67 Luas Ruang Terbuka Hijau yang terkelola Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, 2021

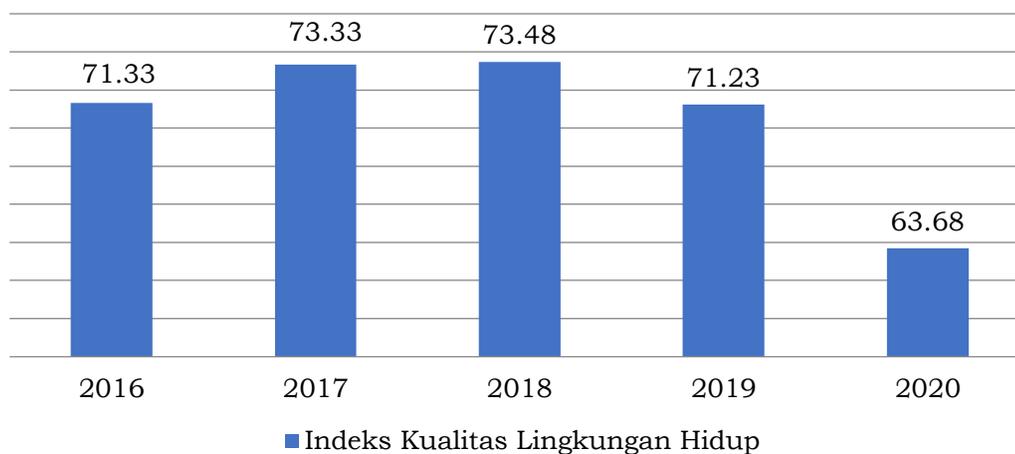
Dari grafik di atas maka untuk tahun 2020 luasan ruang terbuka hijau yang terkelola seluas ± 160 Ha, dengan melakukan penanaman bibit tanaman sebanyak 96.000 batang dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di 12 lokasi meliputi Taman Aloon-aloon, Taman Pendopo, Taman Pemkab, Taman Bantaran Sungai Ngrowo, Taman Ketandan, Taman Batas Kota, Taman Batas Kabupaten, Taman Kemuning dan Antasari, Taman Ayem Tentrem, Taman Tepi Jalan dan Pulau Jalan, RTH GOR Lembupeteng dan Hutan Kota. Apabila dilihat dari tren data capaian yang cenderung stabil dan meningkat setiap tahunnya, maka semakin besar luasan pengelolaan keanekaragaman hayati diharapkan akan meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Tulungagung.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Tulungagung masih belum optimal, sejak dicangkan program satu desa satu bank sampah di tahun 2018, jumlah peningkatan bank sampah yang beroperasi secara aktif relatif kecil. Hal tersebut dapat dilihat dari perkembangan jumlah bank sampah yang ada di Kabupaten Tulungagung

pada tahun 2017 sejumlah 5 unit, tahun 2018 sejumlah 23 unit, tahun 2019 sejumlah 29 unit dan tahun 2020 sejumlah 15 unit.

Perhitungan IKLH tahun ini ada beberapa perbaikan yang terdiri dari perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA) (30%), dimana perhitungan tersebut berdasarkan SK MENLH No.115/ 2003 Tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air dengan parameter yang diukur yaitu TSS, DO, BOD, COD, Total Phosphat, E. Coli dan Total Coliform dengan Baku Mutu yang digunakan adalah Air Kelas I PPRI 82/2001, dengan Nilai IKA maksimum 100 dan nilai IKA Minimum 20, dimana sebelumnya menggunakan baku mutu Kelas I PPRI 82/2001, kemudian perhitungan Indeks Kualitas Udara (IKU) (30%) dengan parameter yang diukur SO₂ dan NO₂ dengan pengukuran 2 (dua) kali per tahun pada kawasan-kawasan permukiman, industri, transportasi, dan perkantoran dengan metode yang digunakan yaitu Passive Sampler dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) (40%) dengan perbaikan perhitungan, adanya pertimbangan aspek konservasi dan aspek rehabilitasi berdasarkan perubahan tutupan hutan/lahan, serta karakteristik wilayah secara spasial. Indikator/parameter yang dipergunakan dalam IKTL yaitu: (a) luas tutupan hutan (forest cover index) dan perubahan tutupan hutan (forest performance index), (b) kondisi tutupan tanah (soil condition index), indeks ini terkait dengan parameter C (tutupan lahan) dalam perhitungan erosi dan air limpasan, (c) konservasi sepadan sungai/danau/pantai (water health index). kondisi tutupan lahan di areal sekitar ekosistem riparian, (d) kondisi habitat (land habitat index) meliputi fragmentasi tutupan lahan dan fragmentasi hutan. Sehingga didapat formulasi IKLH Provinsi = (30% x IKA) + (30% x IKU) + (40% x IKTL).

Berikut merupakan grafik yang menyajikan indeks kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Tulungagung pada tahun 2016 hingga 2020.



Grafik 2. 68 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, 2021

Dari tahun 2016 hingga tahun 2018, nilai IKLH Kabupaten Tulungagung mengalami peningkatan. Namun, pada tahun 2019, nilai IKLH Kabupaten Tulungagung menurun dari tahun sebelumnya. Penurunan nilai IKLH tersebut disebabkan oleh penurunan target nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Adapun penurunan target IKTL disebabkan adanya perubahan rumus yang digunakan dan data didapatkan dari hasil perhitungan KLHK. Sedangkan untuk IKU, penurunan

target disebabkan oleh perubahan lokasi sampling. Nilai IKLH pada tahun 2020 mengalami penurunan dari capaian nilai pada tahun-tahun sebelumnya. Hal itu disebabkan karena menurunnya nilai indeks pada keseluruhan indikator, yaitu IKA, IKU dan IKTL. Adanya penurunan nilai pada indikator tersebut berpengaruh signifikan dalam penurunan nilai total IKLH tahun 2020. Lebih lanjut, perubahan rumus perhitungan menghasilkan penurunan penetapan target IKLH tahun 2021-2023.

2.3.1.2.4.1 Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang terkait dengan Urusan Lingkungan Hidup terdiri dari 15 indikator dengan capaian sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 58 Capaian Indikator TPB Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung 2016-2020

Indikator TPB/SDG's	Target (Perpres 59/2017)	Capaian/Tahun					Keterangan
		2016	2017	2018	2019	2020	
Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	Meningkat	n/a	n/a	51 (Indeks Pence- m aran Air)	53 (Indeks Pence- m aran Air)	n/a	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional
Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.	ada	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Indikator Belum Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional
Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	ada	n/a	n/a	n/a	1	1	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional
Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	8 WS	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Indikator Belum Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional
Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	ada	n/a	n/a	n/a	ada	ada	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional
Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	Meningkat menjadi 80%	n/a	78,59%	95,04%	96,19%	94,15%	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional

Indikator TPB/SDG's	Target (Perpres 59/2017)	Capaian/Tahun					Keterangan
		2016	2017	2018	2019	2020	
Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	Meningkat menjadi 150 juta ton (skala nasional) (Rata-rata per daerah : 291.828,79 atau peningkatan 12,5% per tahun)	246.122	258.427,4	266.759,7	289.775,4	304.263	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional
Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	20 ton per hari (skala nasional) (Rata-rata per daerah : 38,91 Kg per Hari)	n/a	3.741,25	4.197,5	4.956,38	4.715,67	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional
Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	Meningkat	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Data Belum Tersedia
Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.	Meningkat	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Data Belum Tersedia
Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.	Meningkat	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Indikator Belum Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional
Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	Meningkat	82,19%	n/a	82,78%	76,70%	n/a	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional
Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan	5,5 juta ha (skala nasional) (Per Kab./ Kota rata-rata 10.700 Ha)	n/a	7.120 Ha	8.080 Ha	9.050 Ha	9.400 Ha	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional
Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata	ada	0	0	0	0	0	Indikator Belum Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional
Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati	Meningkat	0	0	0	0	0	Indikator Belum Dilaksanakan dan

Indikator TPB/SDG's	Target (Perpres 59/2017)	Capaian/Tahun					Keterangan
		2016	2017	2018	2019	2020	
							Belum Mencapai Target Nasional

Sumber: Dokumen KLHS Kabupaten Tulungagung 2018-2023

Sesuai informasi pada tabel di atas, beberapa indikator TPB urusan lingkungan hidup Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020 yang sudah dilaksanakan dan telah mencapai target nasional antara lain kualitas air sungai sebagai sumber air baku, jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air, persentase sampah perkotaan yang tertangani, jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri) dan jumlah timbunan sampah yang didaur ulang. Sementara indikator TPB urusan lingkungan hidup Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020 yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional meliputi Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001, Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister, Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister, Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan, Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata dan dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati. Secara umum, hal tersebut dikarenakan permasalahan ketersediaan data.

2.3.1.2.5 Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Kebijakan di bidang kependudukan tidak semata-mata merupakan persoalan *fertility control*, namun memiliki makna cakupan yang lebih luas. Kebijakan kependudukan ditujukan untuk mempengaruhi 3 (tiga) variabel utama demografi yaitu:

- a) Kelahiran atau fertilitas, yang berdampak terhadap bertambahnya jumlah penduduk pada usia muda.
- b) Kematian atau mortalitas, yang mengurangi jumlah penduduk pada usia berapapun. Dalam kebijakan kependudukan, faktor mortalitas yang mendapat perhatian khusus adalah kematian ibu dan anak.
- c) Mobilitas atau migrasi yang menambah atau mengurangi jumlah penduduk.

Mengacu pada ketiga variabel tersebut diatas, maka program kependudukan di arahkan untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk serta mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan. Dokumen kependudukan merupakan dokumen resmi yang diterbitkan instansi pemerintah dan mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi untuk pelayanan publik. Dasar hukum dalam penataan administrasi kependudukan tersebut, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, PP Nomor 37 Tahun 2007

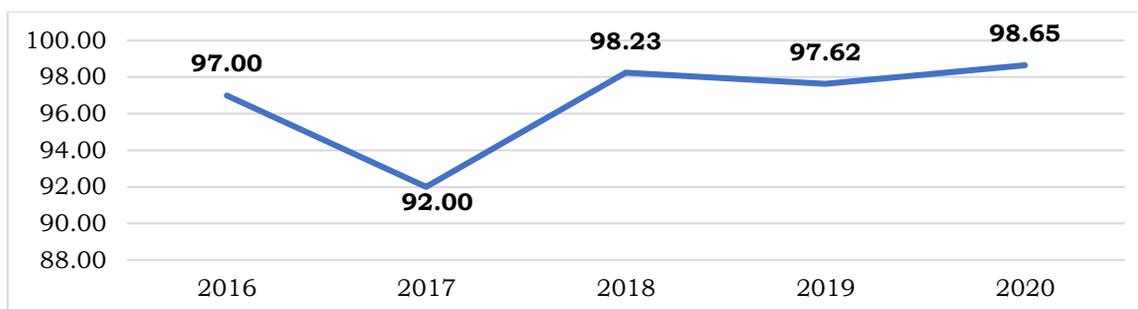
tentang pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2006. Selain itu, Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Sesuai ketentuan tersebut, secara bertahap telah diterapkan strategi nasional administrasi kependudukan meliputi pemutakhiran data, penerbitan NIK dan penerapan KTP elektronik. Berikut perkembangan pembangunan Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Tulungagung selama ini.

Tabel 2. 59 Indikator Capaian Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk wajib KTP (%)	97	92	98,23	97,62	98,65
2	Jumlah bayi berakta kelahiran	17.536	20.272	21.288	19.720	16.301
3	Jumlah pasangan berakta nikah non muslim	74	94	69	69	79
4	Jumlah Pemohon Kartu Keluarga	57.430	63.600	71.580	67.791	70.724
5	Rasio Pasangan Berakte Nikah	7.711	8.467	n/a	n/a	n/a
6	Jumlah Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	57.430	63.600	71.580	67.791	70.724

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, 2021

Berdasarkan data capaian diatas terlihat bahwa perkembangan pembangunan urusan kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Tulungagung tahun 2015-2019 memiliki capaian yang bervariasi. Secara general kelima indikator diatas memiliki capaian yang cenderung fluktuatif. Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk wajib KTP memiliki capaian yang fluktuatif, pada tahun 2016 rasionya mencapai angka 97,00 kemudian turun pada tahun 2017 menjadi 92,00. Pada tahun 2018 capaiannya meningkat menjadi 98,23, sedangkan pada tahun 2019 turun menjadi sebanyak 97,62 dan pada tahun 2020 meningkat lagi menjadi 98,65. Berikut merupakan grafik yang menggambarkan pencapaiannya.

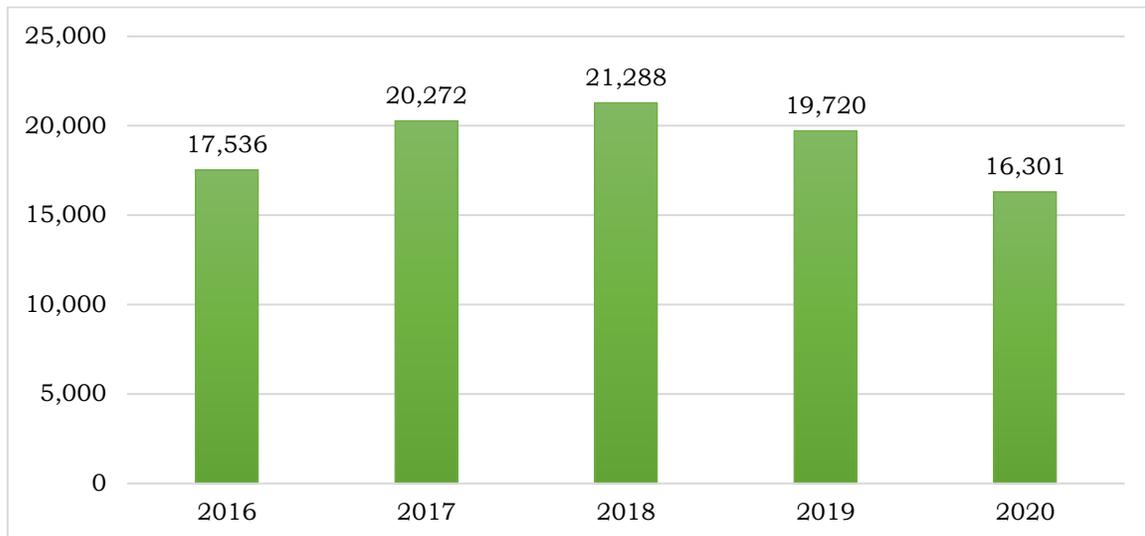


Grafik 2. 69 Rasio Penduduk Ber-KTP Per Satuan Penduduk Wajib KTP Kabupaten Tulungagung Tahun 2015-2020

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, 2021

Jumlah bayi berakta kelahiran di Kabupaten Tulungagung memiliki capaian yang cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2016-2018, dimana pada tahun 2016 sebanyak 17.536 akta dan meningkat setiap tahun sehingga menjadi sebanyak 21.288 pada tahun 2018. Sedangkan pada tahun 2019 dan 2020 cenderung menurun, dimana pada tahun 2019 sebanyak

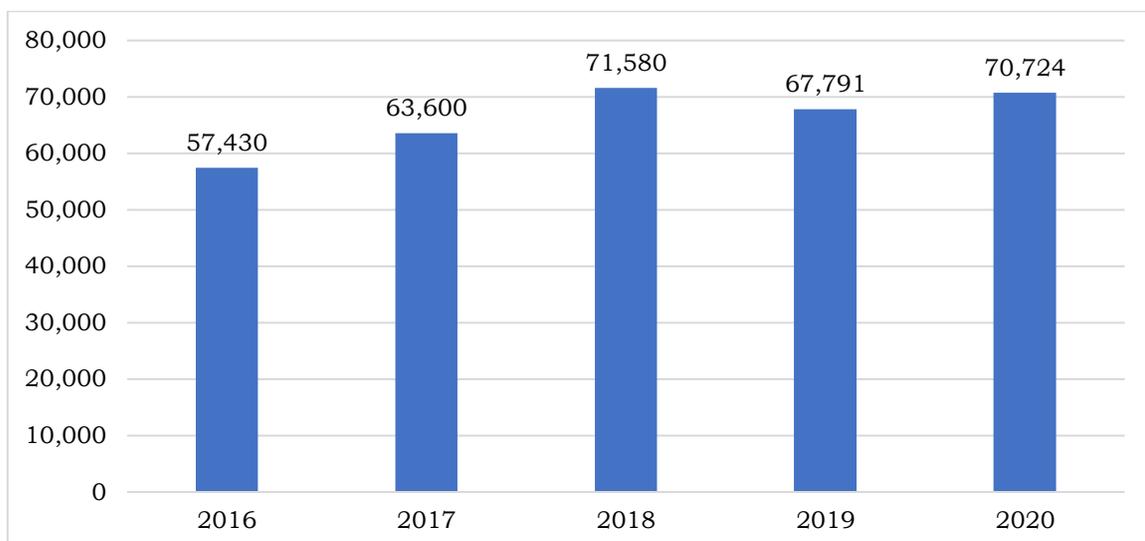
19.720 dan tahun 2020 sebanyak 16.301 bayi yang mempunyai akta kelahiran. Berikut merupakan grafik yang menggambarkan pencapaiannya.



Grafik 2. 70 Jumlah bayi berakta kelahiran Kabupaten Tulungagung Tahun 2015-2020

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, 2021

Jumlah Pemohon Kartu Keluarga di Kabupaten Tulungagung memiliki capaian yang cenderung mengalami peningkatan pada tahun 2016-2018, dimana pada tahun 2018 mencapai jumlah tertinggi yaitu sebanyak 71.580 pemohon. Namun demikian pada tahun 2019, jumlah pemohon KK turun menjadi sebanyak 67.791 dan kemudian meningkat lagi pada tahun 2020 menjadi sebanyak 70.724 pemohon. Berikut merupakan grafik yang menggambarkan pencapaiannya.

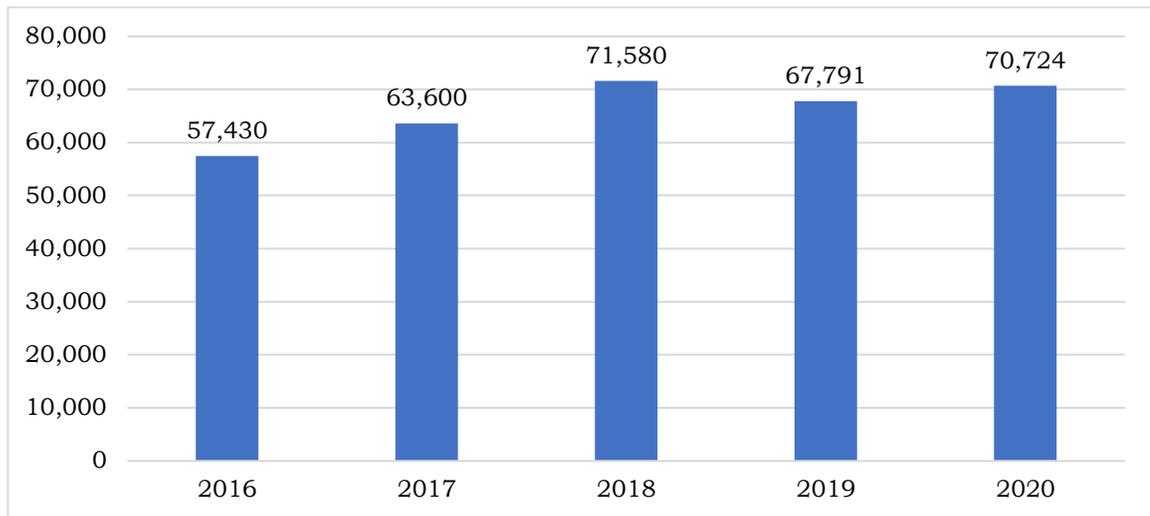


Grafik 2. 71 Jumlah Pemohon Kartu Keluarga Kabupaten Tulungagung Tahun 2015-2020

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, 2021

Jumlah Penerbitan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Tulungagung memiliki capaian yang cenderung mengalami peningkatan pada tahun 2016-2018, dimana pada tahun 2018 mencapai jumlah tertinggi yaitu sebanyak 71.580 pemohon. Namun demikian pada tahun 2019, jumlah pemohon KK turun menjadi sebanyak 67.791 dan kemudian meningkat lagi pada tahun

2020 menjadi sebanyak 70.724 pemohon. Berikut merupakan grafik yang menggambarkan pencapaiannya.



Grafik 2. 72 Jumlah Penerbitan Kartu Identitas Anak Kabupaten Tulungagung Tahun 2015-2020

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, 2021

2.3.1.2.5.1 Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang terkait dengan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari 5 indikator dengan capaian sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 60 Capaian Indikator TPB Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung 2016-2020

Indikator TPB/SDG's	Target (Perpres 59/2017)	Capaian/Tahun					Keterangan
		2016	2017	2018	2019	2020	
Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	Meningkat menjadi 77,4%	79,85 %	85,54 %	90,16 %	91,43 %	93,94 %	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional
Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	Meningkat	93,53 %	94,98 %	95,58 %	95,35 %	95,46 %	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional
Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.	Meningkat menjadi 77,4%	n/a	95,16 %	91,05 %	n/a	96,44 %	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional
Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	Meningkat menjadi 85%	79,85 %	85,54 %	90,16 %	91,43 %	93,94 %	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional
Tersedianya data registrasi terkait	ada	ada	ada	ada	ada	ada	Indikator Sudah Dilaksanakan dan

Indikator TPB/SDG's	Target (Perpres 59/2017)	Capaian/Tahun					Keterangan
		2016	2017	2018	2019	2020	
kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)							Sudah Mencapai Target Nasional

Sumber: Dokumen KLHS Kabupaten Tulungagung 2018-2023

Berdasarkan tabel mengenai capaian indikator TPB untuk urusan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Tulungagung di atas dapat diketahui bahwa semua indikator memiliki capaian yang sudah memenuhi target yang ada. Hal-hal seperti ini yang penting bagi Kabupaten Tulungagung untuk terus mempertahankan capaian tersebut dan terus berusaha meningkatkan capaian yang ada secara inklusif dan komprehensif sesuai SDG's.

2.3.1.2.6 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

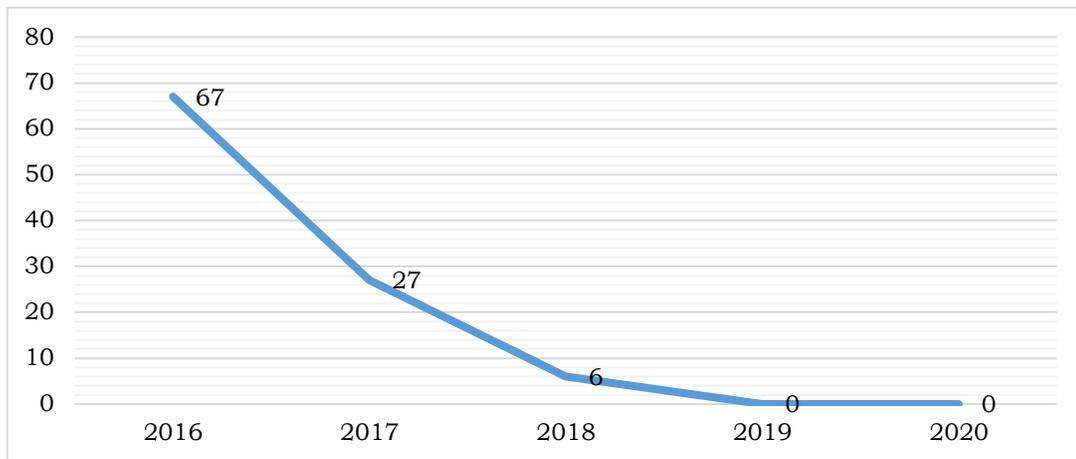
Salah satu aspek yang berperan penting dan strategis dalam menunjang pembangunan adalah Desa. Desa merupakan wilayah pemerintahan yang menyelenggarakan fungsi pelayanan publik kepada masyarakat secara langsung. Pemberdayaan masyarakat dan desa berfungsi dalam pembangunan melalui peningkatan peran kelompok dalam masyarakat. Tingkat pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari kategori desa tersebut. Berikut merupakan tabel yang menyajikan data jumlah desa mandiri dan desa tertinggal di Kabupaten Tulungagung selama tahun 2015 hingga 2019.

Tabel 2. 61 Capaian Indikator Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Tulungagung Tahun 2017-2020

Indikator	JUMLAH			
	2017	2018	2019	2020
Desa Mandiri	1	1	4	4
Desa Maju	31	31	51	75
Desa Berkembang	149	198	196	178
Desa Tertinggal	76	27	6	0
Desa Sangat Tertinggal	0	0	0	0
Total	257	257	257	257

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tulungagung, 2021

Desa tertinggal merupakan desa yang masyarakat serta wilayahnya relatif kurang berkembang dibandingkan dengan wilayah yang lain. Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa secara besar jumlah desa tertinggal di Kabupaten Tulungagung selama tahun 2015 hingga 2019 mengalami penurunan. Capaian jumlah desa tertinggal tahun 2017 sebesar 27 desa, tahun 2018 turun menjadi 6 dan pada tahun 2019 menjadi 0. Capaian tersebut mengalami penurunan sebesar 40 desa dibandingkan tahun 2015. Berikut merupakan grafik yang menggambarkan pencapaiannya.



Grafik 2. 73 Jumlah Desa Tertinggal Kab. Tulungagung 2016-2020

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, 2021

Jumlah desa mandiri tahun 2016 hingga 2017 sebesar 1 desa. Tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 3 desa dan pada tahun 2019 bertambah menjadi 4 desa. Capaian tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2015 dimana tidak ada desa mandiri. Hal tersebut menunjukkan hal yang positif dari perkembangan pemberdayaan masyarakat dan desa.

Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Kabupaten Tulungagung sebanyak 271 lembaga, artinya seluruh desa/kelurahan telah membentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

2.3.1.2.6.1 Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang terkait dengan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri dari 2 indikator dengan capaian sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 62 Capaian Indikator TPB Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tulungagung 2016-2020

Indikator TPB/SDG's	Target (Perpres 59/2017)	Capaian/Tahun					Keterangan
		2016	2017	2018	2019	2020	
Jumlah desa tertinggal	Berkurang sebanyak 5.000 desa (skala nasional) (12 per kabupaten)	n/a	27	6	0	0	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional
Jumlah Desa Mandiri.	Meningkat paling sedikit 2.000 desa (5 desa/kabupaten)	n/a	1	4	4	6	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional

Sumber: Dokumen KLHS Kabupaten Tulungagung 2018-2023

Berdasarkan tabel mengenai capaian indikator TPB untuk urusan Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Tulungagung di atas dapat diketahui bahwa semua indikator memiliki capaian yang sudah memenuhi target yang ada. Hal-hal seperti ini yang penting bagi Kabupaten Tulungagung untuk terus mempertahankan capaian tersebut dan berusaha meningkatkan

status desa mandiri dan maju agar terus berkelanjutan menyumbang pengurangan kesenjangan yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Tulungagung.

2.3.1.2.7 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Keluarga berencana adalah gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran. Itu bermakna adalah perencanaan jumlah keluarga dengan pembatasan yang bisa dilakukan dengan penggunaan alat-alat kontrasepsi atau penanggulangan kelahiran seperti kondom, spiral, IUD, dan sebagainya. Gerakan keluarga berencana diartikan sebagai upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui upaya pendewasaan usia perkawinan, pengendalian kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, dan peningkatan kesejahteraan keluarga dalam rangka melembagakan dan membudidayakan norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera.

Tabel 2. 63 Capaian Indikator Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Angka Kelahiran Total (TFR)		1,87	2,06	2,07	2,02	2,15
Persentase pemakaian kontrasepsi modern (modern contraceptive prevalence rate/mCPR)	%	75,2 9	73,6 5	73,68	74,54	75,76
Persentase Usia Kawin Pertama (UKP) dibawah 20 Tahun	%	15,7 8	15,3 0	13,88	12,21	11,87
Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/ KB yang tidak terpenuhi)	%	9,19 %	10,8 7%	10,68 %	10,15 %	10,47 %

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, 2021

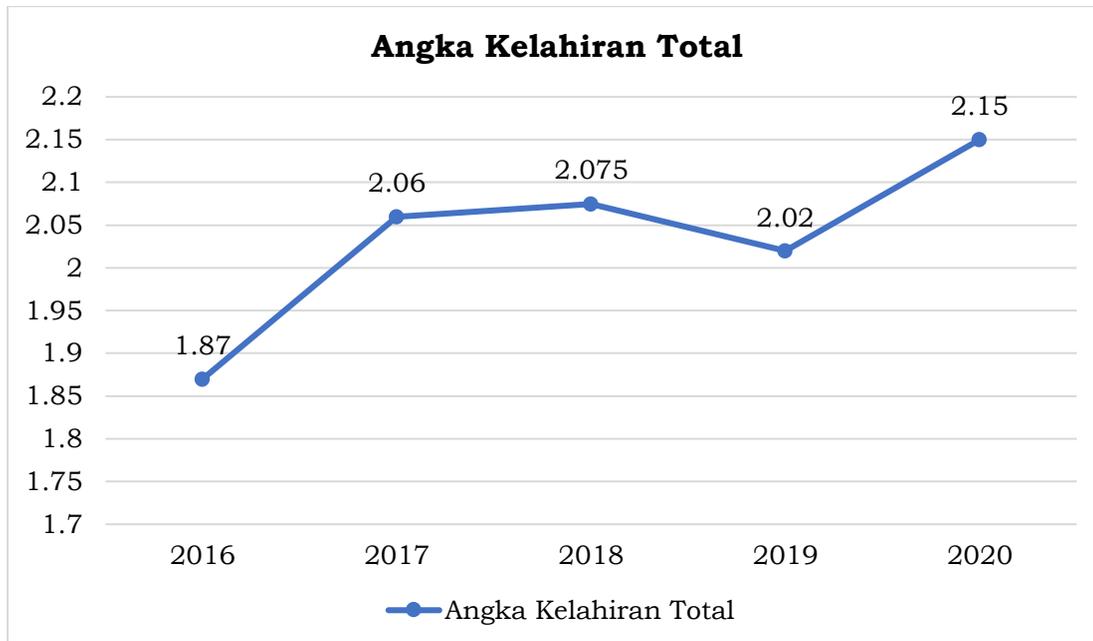
Capaian indikator dari urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana memiliki capaian yang fluktuatif. Angka Total Fertility Rate mengalami peningkatan sebesar 0.13 dikarenakan adanya pandemi Covid 19 yang menyebabkan banyak akseptor KB enggan mendatangi Fasilitas Kesehatan baik untuk pelayanan KB maupun mencari informasi tentang alat kontrasepsi karena ada ketakutan untuk menjalani Swab maupun Rapid Test yang dipersyaratkan sebelum menjalani pemasangan Alat Kontrasepsi. Selain itu adanya pembatasan kegiatan yang menyebabkan Penyuluh KB maupun Dinas KBPPPA mengalami kesulitan dalam melakukan penyuluhan dan sosialisasi Program kepada masyarakat.

Berdasarkan analisa data Unmet Need, di Kabupaten Tulungagung, Unmet Need mengalami kenaikan sebesar 0.32 dikarenakan pada tahun 2020 terjadi pandemi Covid 19 di Indonesia yang mengakibatkan pelayanan KB dimana dilakukan di faskes harus melalui protokol kesehatan yang sangat ketat sehingga akseptor KB yang dilayani sangat terbatas dan tidak sebanyak tahun tahun sebelumnya sehingga angka Unmet Need meningkat.

Berdasarkan analisa data TFR, Angka Total Fertility Rate mengalami peningkatan sebesar 0.13 dikarenakan adanya pandemi Covid 19 yang menyebabkan banyak akseptor KB enggan mendatangi Fasilitas Kesehatan

baik untuk pelayanan KB maupun mencari informasi tentang alat kontrasepsi karena ada ketakutan untuk menjalani Swab maupun Rapid Test yang dipersyaratkan sebelum menjalani pemasangan Alat Kontrasepsi. Selain itu adanya pembatasan kegiatan yang menyebabkan Penyuluh KB maupun Dinas KBPPPA mengalami kesulitan dalam melakukan penyuluhan dan sosialisasi Program kepada masyarakat.

Sedangkan untuk Prosentase Usia Kawin Pertama (UKP) dibawah 20 Tahun juga terus mengalami penurunan karena banyaknya sosialisasi yang dilakukan terutama dalam kegiatan Genre Tulungagung. Berikut merupakan grafik yang menggambarkan pencapaiannya.

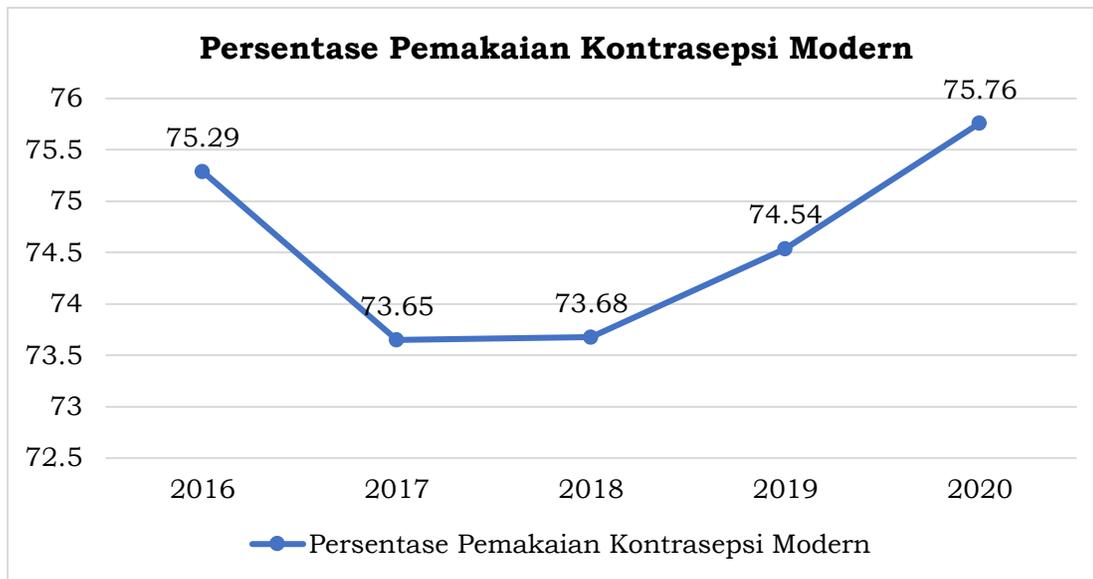


Grafik 2. 74 Angka Kelahiran Total Kabupaten Tulungagung 2016-2020

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, 2021

Angka pemakaian kontrasepsi yang lazim disebut *Contraceptive Prevalence Rate* (CPR) adalah persentase perempuan usia reproduktif yang menggunakan (atau yang pasangannya menggunakan) suatu metode kontrasepsi pada suatu waktu tertentu. CPR hampir selalu dilaporkan untuk wanita kawin atau wanita yang memiliki pasangan seksual. CPR dapat digunakan untuk mengukur pemakaian semua metode kontrasepsi, baik yang tradisional maupun modern, atau untuk mengukur pemakaian metode kontrasepsi modern saja.

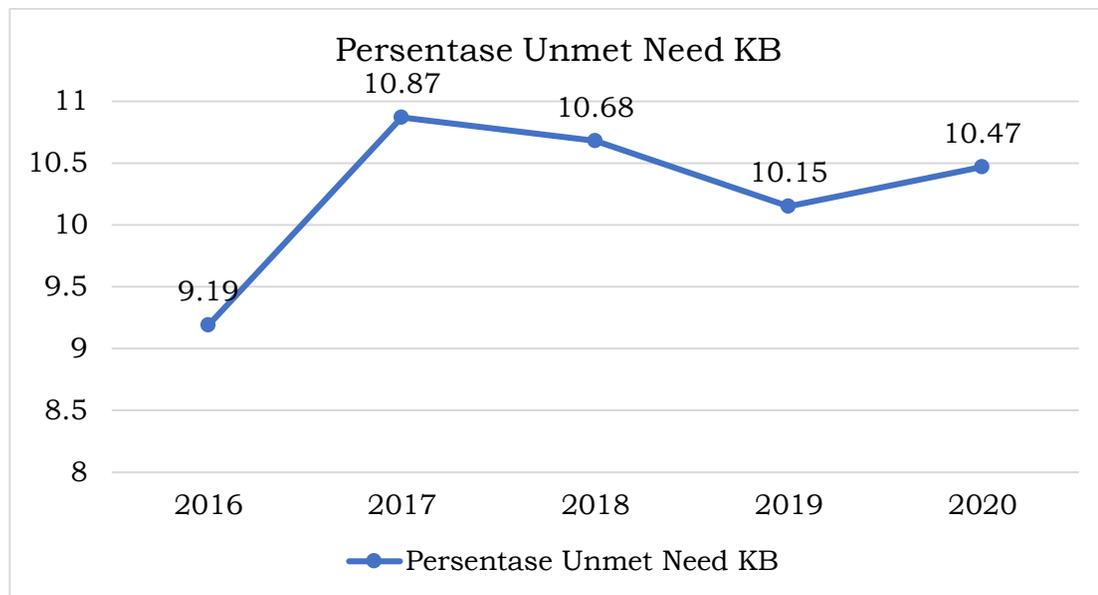
Persentase pemakaian kontrasepsi modern (*modern contraceptive prevalence rate*/MCPR) di Kabupaten Tulungagung mengalami capaian yang fluktuatif pada tahun 2016 angkanya mencapai 75,29% kemudian mengalami penurunan pada tahun 2017 menjadi 73,65% dan pada tahun 2018 menjadi 73,68%. Pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 74,54%. Sedangkan pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 75,76%. Pemakaian alat kontrasepsi modern mengalami peningkatan dikarenakan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam penggunaan alat kontrasepsi. Berikut merupakan grafik yang menggambarkan pencapaiannya.



Grafik 2. 75 Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, 2021

Di Kabupaten Tulungagung, Unmet Need mengalami kenaikan sebesar 0.32 dikarenakan pada tahun 2020 terjadi pandemi Covid 19 di Indonesia yang mengakibatkan pelayanan KB dimana dilakukan di faskes harus melalui protokol kesehatan yang sangat ketat sehingga akseptor KB yang dilayani sangat terbatas dan tidak sebanyak tahun-tahun sebelumnya sehingga angka Unmet Need meningkat. Berikut merupakan grafik yang menggambarkan pencapaiannya.

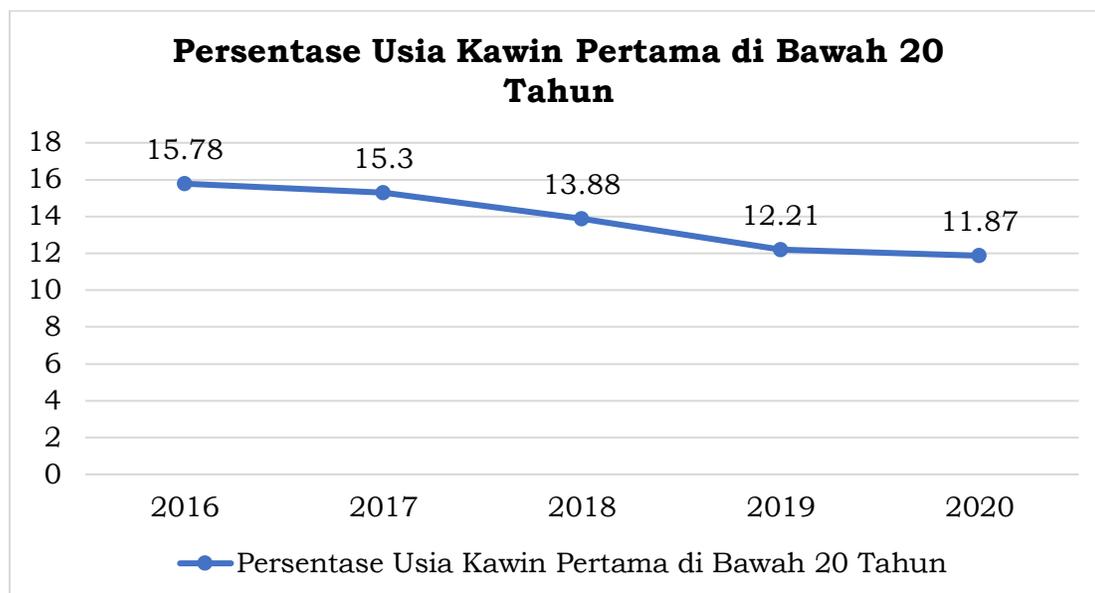


Grafik 2. 76 Persentase Unmet Need KB

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, 2021

Umur pertama menikah yang berarti juga saat dimulainya masa reproduksinya pembuahan. Hubungan antara UKP dengan fertilitas adalah negatif. Semakin muda UKP maka akan semakin panjang masa reproduksinya atau semakin banyak anak yang dilahirkan. Capaian dalam Persentase Usia Kawin Pertama (UKP) dibawah 20 Tahun mengalami penurunan setiap tahunnya, pada tahun 2016 angkanya mencapai 15,78% kemudian pada

tahun 2017 menurun menjadi 15,30%. Pada tahun 2018 capaiannya menurun menjadi 13,88% dan kembali menurun pada tahun 2019 menjadi 12,21%. Hal serupa juga terjadi pada tahun 2020 yang mengalami penurunan menjadi 11,87%. Penurunan Usia Kawin Pertama di bawah 20 tahun dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan tingkah laku. Disamping itu juga terus dilakukan sosialisasi agar tidak terjadi perkawinan dini pada remaja. Berikut merupakan grafik yang menggambarkan pencapaiannya.



Grafik 2. 77 Persentase Usia Kawin Pertama (UKP) dibawah 20 Tahun Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, 2021

2.3.1.2.3.7.1 Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang terkait dengan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri dari 7 indikator dengan capaian sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 64 Capaian Indikator TPB Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tulungagung 2016-2020

Indikator TPB/SDG's	Target (Perpres 59/2017)	Capaian/Tahun					Keterangan
		2016	2017	2018	2019	2020	
Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	Meningkat menjadi 66%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Data Belum Tersedia
Total Fertility Rate (TFR).	Menurun menjadi 2,28	1,87	2,06	2,07	2,02	2,15	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional

Indikator TPB/SDG's	Target (Perpres 59/2017)	Capaian/Tahun					Keterangan
		2016	2017	2018	2019	2020	
Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	Menurun	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Data Belum Tersedia
Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun	Meningkat menjadi 21 tahun	> 21	> 21	> 21	> 21	> 21	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional
Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ ASFR).	Menurun menjadi 38	30,98	11,82	5,11	15,69	n/a	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional
Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/ KB yang tidak terpenuhi).	Menurun menjadi 9,9%	9,19%	10,87%	10,68%	10,15%	10,47%	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional
Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	Meningkat menjadi 85%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Data Belum Tersedia

Sumber: Dokumen KLHS Kabupaten Tulungagung 2018-2023

Berdasarkan tabel mengenai capaian indikator TPB untuk urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Tulungagung di atas dapat diketahui bahwa mayoritas indikator belum mencapai target nasional dan secara data masih belum ada yang disebabkan karena belum adanya pelaksanaan penghitungan atau pendataan. Hal-hal seperti ini yang juga harus menjadi perhatian penting bagi Kabupaten Tulungagung untuk meningkatkan pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Namun, terdapat 3 indikator yang sudah mencapai target nasional, maka hal tersebut dapat dipertahankan dan ditingkatkan untuk tetap menjaga kualitas capaian TPB.

2.3.1.2.8 Perhubungan

Persoalan wilayah perkotaan pada bidang perhubungan biasanya lebih mengarah pada persoalan perlintasan. Selain itu terdapat beberapa persoalan lain selain persoalan terkait lalu lintas dalam bidang perhubungan. Pemerintah daerah berusaha untuk memilah persoalan perhubungan dengan beberapa indikator lainnya. Beberapa indikator tersebut dapat dilihat pada

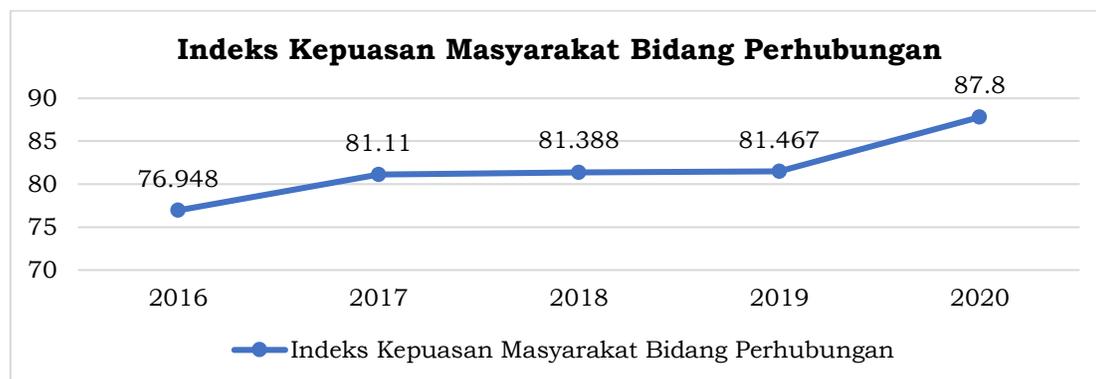
tabel berikut beserta kondisi capaian kinerja dalam pelaksanaan urusan perhubungan berdasarkan indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 2. 65 Capaian Indikator Urusan Perhubungan Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 - 2020

Indikator Kinerja	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perhubungan	Nilai	76,948	81,11	81,388	81,467	87,8
Persentase pengendalian lalu lintas	%	n/a	n/a	100	100	100
Nilai survey kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perparkiran	Nilai	80,6	77,76	80	81,987	84,47
Persentase prasarana perhubungan yang terkelola	%	n/a	n/a	100	100	100
Persentase angkutan yang melayani masyarakat	%	n/a	n/a	20	17,1	16,46
Persentase fasilitas perlengkapan jalan	%	n/a	n/a	100	100	100
Indeks Tingkat Pelayanan Jalan	Nilai	n/a	n/a	0,30	0,37	0,47

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, 2021

Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa capaian kinerja urusan bidang perhubungan Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 – 2020 memiliki tren yang positif. Dimana indikator dalam Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perhubungan memiliki tren yang meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2016 angkanya mencapai 76,948 kemudian pada tahun 2017 angkanya meningkat menjadi 81,11 dan pada tahun 2018 kembali mendapatkan peningkatan menjadi 81,388. Pada tahun 2019 capaian IKM terhadap pelayanan perhubungan kembali meningkat menjadi 81,467. Pada tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 87,8%. Hal ini menunjukkan bahwa urusan Perhubungan Kabupaten Tulungagung terus semakin baik dan maju. Berikut merupakan grafik yang menggambarkan pencapaiannya.

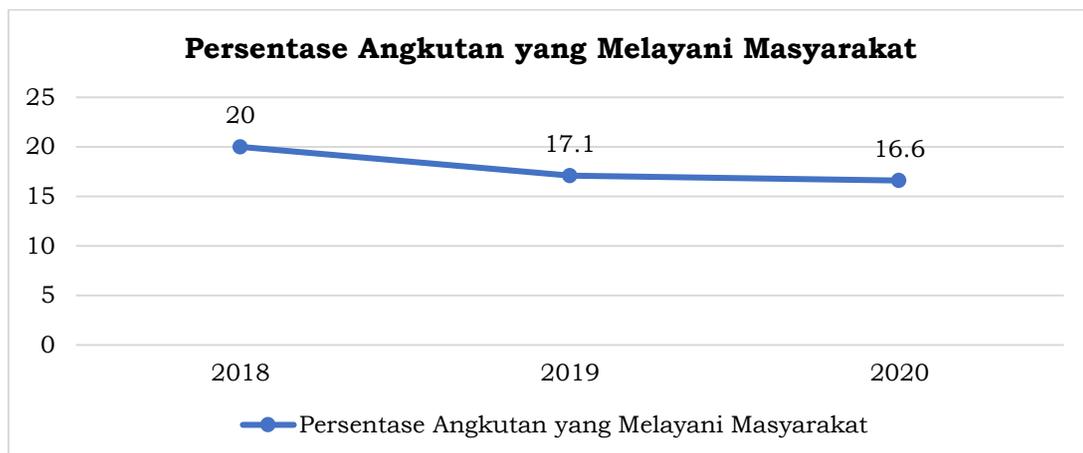


Grafik 2. 78 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perhubungan Kab. Tulungagung Tahun 2016-2020

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, 2021

Manajemen lalu lintas adalah upaya pemanfaatan semaksimal mungkin sistem jaringan jalan dan bisa menampung lalu lintas sebanyak mungkin dan memperhatikan keterbatasan dan kapasitas lingkungan, memberikan prioritas untuk kelompok pengguna jalan tertentu dan penyesuaian kebutuhan kelompok pemakai jalan lainnya serta menjaga kecelakaan lalu lintas sekecil mungkin. Persentase pengendalian lalu lintas yang ada di kabupaten Tulungagung pada tahun 2020 mendapatkan capaian sempurna yaitu 100%.

Indikator selanjutnya adalah Persentase prasarana perhubungan yang terkelola, indikator ini juga mencapai nilai yang optimal yaitu 100% pada tahun 2018 dan 2019. Berkaitan dengan IKM terhadap pelayanan perparkiran, Kabupaten Tulungagung juga mengalami peningkatan dari nilai 80 pada tahun 2018 menjadi 81,987 pada tahun 2019 dan 84,47% pada tahun 2020. Terdapat salah satu indikator yang mengalami penurunan capaian, indikator tersebut adalah persentase angkutan yang melayani masyarakat, capaiannya pada tahun 2019 adalah 17,1% dan menjadi 16,6% pada tahun 2020. Hal ini terjadi secara nasional bahkan global dampak terjadinya pandemi Covid-19 sejak bulan maret 2020, pandemi Covid-19 memaksa kita semua untuk membatasi mobilitas orang dan barang sehingga terjadi penurunan persentase angkutan. Berikut merupakan grafik yang menggambarkan pencapaiannya.



Grafik 2. 79 Persentase Angkutan Yang Melayani Masyarakat Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2020

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, 2021

Kabupaten Tulungagung memiliki 1 terminal bus yaitu Terminal Gayatri dan 5 stasiun kereta api sebagai salah satu bentuk usahanya dalam memperlancar urusan dibidang perhubungan. Keberadaan terminal dan stasiun ini sangat membantu aktifitas masyarakat Tulungagung baik itu warga pendatang maupun warga lokal. Hal ini dibuktikan dari banyaknya jumlah penumpang yang memanfaatkan sarana dan prasarana ini dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. 66 Jumlah Penumpang Bus dan Keberadaan di Terminal Kabupaten Tulungagung Tahun 2015-2020

No	Tahun	Berangkat	Datang
----	-------	-----------	--------

		Bus	Penumpang	Bus	Penumpang
1	2015	25.420	368.870	26.245	379.179
2	2016	98.622	1.159.876	104.584	1.162.035
3	2017	107.322	1.361.902	112.231	1.284.363
4	2018	100.316	1.639.602	108.414	1.408.560
5	2019	95.169	1.503.200	102.585	1.201.361
6	2020	62.905	607.804	74.620	456.905

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, 2021

Berdasarkan data tabel diatas terlihat bahwa jumlah bus dan juga penumpang yang berlalu lalang di Terminal Gayatri Kabupaten Tulungagung baik yang berangkat maupun yang datang dari tahun ke tahun selalu meningkat. Jumlah armada bus yang berangkat dan yang datang pada tahun 2015 di Kabupaten Tulungagung sebanyak 25.420 dan 26.245 dengan jumlah penumpang berangkat sebanyak 368.870 dan penumpang datang sebanyak 379.179 orang. Angka tersebut terus meningkat hingga pada tahun 2017 jumlah armada bus di Terminal Gayatri Kabupaten Tulungagung yang berangkat dan datang sebanyak 107.322 dan 112.231 bus dengan jumlah penumpang berangkat sebanyak 1.361.902 dan penumpang datang sebanyak 1.284.363 orang. Pada tahun 2019-2020, terjadi penurunan jumlah bus dan penumpang baik yang berangkat maupun datang ke Terminal Gayatri. Jumlah keberangkatan bus dan penumpang pada tahun 2019 masing-masing 95.169 bus dan 1.503.200 penumpang, sementara kedatangan bus dan penumpang pada tahun 2019 masing-masing 102.585 bus dan 1.201.361 orang. Jumlah keberangkatan bus dan penumpang pada tahun 2020 masing-masing 62.905 bus dan 607.804 penumpang, sementara kedatangan bus dan penumpang pada tahun 2020 masing-masing 74.620 bus dan 456.905 orang. Hal ini disebabkan terjadinya wabah Pandemi Covid-19 sehingga diberlakukan Program Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang berdampak pada pembatasan pergerakan penumpang. Disamping itu, dengan adanya kebijakan Low Cost Green Car (LCGC) atau lebih dikenal dengan kendaraan terjangkau (murah) berdampak pada preferensi penumpang yang dulunya menggunakan angkutan umum, beralih menggunakan kendaraan pribadi. Penurunan jumlah bus dan penumpang juga dipicu oleh maraknya kendaraan berbasis angkutan online sehingga untuk jarak yang relatif dekat, penumpang lebih memilih angkutan online daripada bus. Kelebihan angkutan online adalah penumpang dapat berangkat dan diantar tepat pada lokasi yang dituju.

Indeks tingkat pelayanan jalan merupakan Tingkat pelayanan jalan adalah suatu ukuran yang digunakan untuk mengetahui kualitas suatu ruas jalan tertentu dalam melayani arus lalu lintas yang melewatinya. Tingkat Pelayanan Jalan (Level of Service / LOS) adalah gambaran kondisi operasional arus lalu lintas dan persepsi pengendara dalam terminologi kecepatan, waktu tempuh, kenyamanan, kebebasan bergerak, keamanan dan keselamatan. Hubungan antara kecepatan dan volume jalan perlu diketahui karena kecepatan dan volume merupakan aspek penting dalam menentukan tingkat pelayanan jalan. Tingkat pelayanan jalan (Level of Service / LOS) dalam perencanaan jalan dinyatakan dengan huruf-huruf A sampai dengan F yang berturut-turut menyatakan tingkat pelayanan yang terbaik sampai yang

terburuk. Tingkat pelayanan jalan (Level Of Service / LOS) level A berkisar 0,00-0,020, level B 0,20-0,44, level C 0,45-0,74, level D 0,75-0,84, level E 0,85-1,00 dan level F > 1,00. Adapun capaian tingkat pelayanan jalan (Level Of Service / LOS) tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 secara berurutan yaitu 0,30, 0,37 dan 0,47.

2.3.1.2.3.8.1`Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang terkait dengan Urusan Perhubungan terdiri dari 1 indikator dengan capaian sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 67 Capaian Indikator TPB Urusan Perhubungan Kabupaten Tulungagung 2016-2020

Indikator TPB/SDG's	Target (Perpres 59/2017)	Capaian/Tahun					Keterangan
		2016	2017	2018	2019	2020	
Jumlah dermaga penyeberangan.	Meningkat	24	24	24	24	21	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional

Sumber: Dokumen KLHS Kabupaten Tulungagung 2018-2023

Berdasarkan tabel mengenai capaian indikator TPB untuk urusan Perhubungan di Kabupaten Tulungagung di atas dapat diketahui bahwa pada indikator jumlah dermaga penyeberangan tersebut memiliki capaian yang belum memenuhi target yang ada. Hal-hal seperti ini yang penting bagi Kabupaten Tulungagung menjadi perhatian dalam meningkatkan indikator TPB pada perhubungan.

2.3.1.2.9 Komunikasi dan Informatika

Pembangunan di bidang komunikasi dan informatika merupakan salah satu aspek penting yang mendorong pembangunan nasional. Selain menjadi faktor produksi dan ekonomi, bidang komunikasi dan informatika juga berperan sebagai *enabler* dalam perubahan sosial budaya kemasyarakatan di berbagai aspek. Aspek-aspek yang dimaksud seperti pengembangan kehidupan politik yang lebih demokratis, pengembangan budaya dan pendidikan, dan peningkatan kapasitas *governance* di berbagai sektor pembangunan. Adapun manfaat pembangunan bidang komunikasi dan informatika adalah:

1. mendukung perbaikan keamanan dan mempercepat perkembangan kesejahteraan sosial dan ekonomi;
2. mengatasi berbagai kesenjangan antara pusat dan daerah dalam mendukung suatu sistem yang lebih adil dan makmur;
3. meningkatkan akses informasi dan pengetahuan;
4. meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (*human capacity building*);
5. mendukung proses demokrasi dan transparansi birokrasi;
6. membentuk masyarakat informasi (*knowledge-based society*).

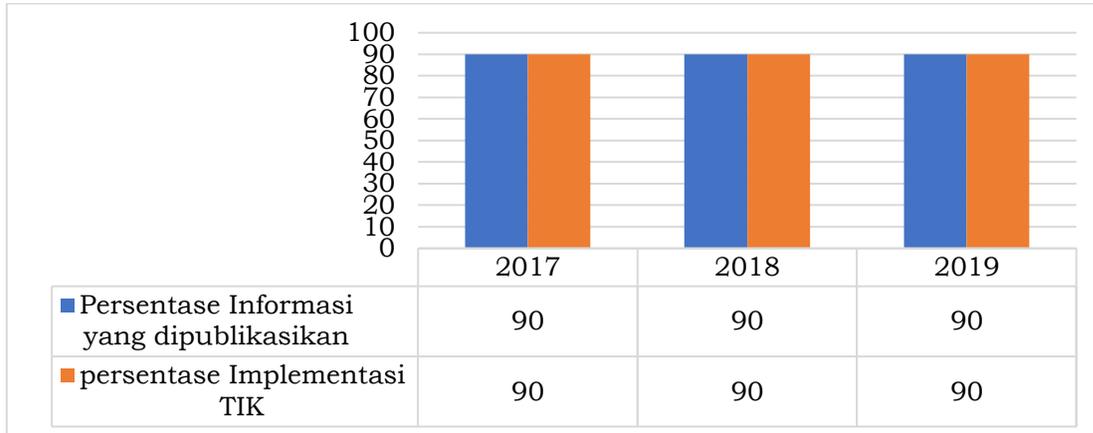
Begitu juga dalam urusan komunikasi dan informatika di Kabupaten Tulungagung memiliki manfaat dalam mendukung pembangunan daerah melalui penyebaran informasi serta pemanfaatan sistem aplikasi elektronik. Adapun capaian indikator urusan komunikasi dan informatika Kabupaten Tulungagung Tahun 2015-2019 dapat ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 2. 68 Capaian Indikator Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 – 2019

Indikator	Satuan	Tahun		
		2017	2018	2019
Persentase Informasi yang dipublikasikan	%	90	90	90
Persentase Implementasi TIK	%	90	90	90
Jumlah Dokumen Metadata Statistik Sektoral	Dokumen	3	3	4
Persentase Informasi /Berita yang disandakan/diamankan	%	100	100	100

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, 2021

Persentase Informasi yang dipublikasikan mendapatkan capaian yang memuaskan yaitu 90%. Capaian ini bertahan sejak tahun 2017 hingga tahun 2019. Capaian ini juga diperoleh oleh indikator persentase Implementasi TIK yang mendapatkan capaian 90%, capaian ini juga didapatkan sejak tahun 2017 hingga 2019. Berikut merupakan grafik yang menggambarkan pencapaiannya.



Grafik 2. 80 Persentase Informasi Yang Dipublikasikan Dan Persentase Implementasi TIK Kabupaten Tulungagung Tahun 2017-2019

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, 2021

Kemudian peningkatan yang cukup baik juga diperoleh oleh Jumlah Dokumen Metadata Statistik Sektoral pada tahun 2017 dan 2018 jumlahnya sebanyak 3 dokumen dan mengalami peningkatan menjadi 4 buah pada tahun 2019. Pembangunan bidang komunikasi dan informatika di Kabupaten Tulungagung ditandai dengan penerapan sistem IT dalam berbagai aspek pemerintahan seperti:

1. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah SIPKD adalah aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan meningkatkan efektifitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada

asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel. Aplikasi ini juga merupakan salah satu manifestasi aksi nyata fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri kepada pemerintah daerah dalam bidang pengelolaan keuangan, dalam rangka penguatan persamaan persepsi sistem dan prosedur pengelolaan keuangan serta dalam penginterpretasian dan pengimplementasian berbagai peraturan perundang-undangan.

Pemerintah bertugas menyelenggarakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) guna menjawab kebutuhan informasi keuangan oleh masyarakat publik, disamping pemerintah daerah wajib menyampaikan data/informasi yang berkaitan dengan keuangan daerah kepada Pemerintah. SIPKD yang dikembangkan dengan basis teknologi informasi, didesain sedemikian rupa agar bisa menjadi sarana untuk pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan referensi, serta proses komunikasi data/informasi keuangan daerah antara Departemen Keuangan dengan pemerintah daerah dan para pemilik atau pengguna informasi keuangan daerah lainnya.

Pelaksanaan SIPKD berdasarkan pada UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; PP No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah; dan Peraturan Menteri Keuangan No. 46 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah. Pemerintah Kabupaten Tulungagung menyelenggarakan SIPKD dengan tujuan merumuskan kebijakan dan pengendalian fiskal daerah, menyajikan informasi keuangan daerah, merumuskan kebijakan keuangan daerah, seperti dana perimbangan, pinjaman daerah, pengendalian defisit anggaran, melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi pendanaan desentralisasi, dekonsentrasi, tugas pembantuan, serta pinjaman daerah.

Prinsip Dasar pelaksanaan SIPKD adalah kejelasan peranan dan pertanggungjawaban kebijakan fiskal, ketersediaan informasi keuangan bagi masyarakat, keterbukaan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran, dan adanya jaminan independensi atas kebijakan fiskal yang baik. Ruang Lingkup pelaksanaan SIPKD adalah informasi keuangan dan non keuangan dari setiap PD. Data keuangan yang utama terdiri dari APBD, dana perimbangan, neraca daerah, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan daerah, laporan keuangan perusahaan daerah, dan data yang berkaitan dengan kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal daerah. Rumusan informasi yang akan ditampilkan dalam SIPKD secara umum meliputi dua hal yaitu informasi umum dan informasi khusus. Informasi umum merupakan informasi yang dapat diakses secara penuh oleh seluruh lapisan masyarakat. Sedangkan informasi khusus adalah informasi yang disediakan untuk pengambil kebijakan khusus. SIPKD dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat umum sesuai dengan kebutuhannya.

2. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

Dalam upaya mendukung Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, khususnya Pasal 74 (ayat 1 dan 2) dan Pasal 82 (ayat 1 dan 2) tentang

Penerimaan Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Dasar/Menengah yang objektif, transparan, dan akuntabel, maka Pemerintah Kabupaten Tulungagung menyediakan aplikasi Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) *online* dengan modul pendaftaran jenjang SMP, SMA dan SMK, dan juga dilengkapi modul pendaftaran jenjang SD. Ketentuan PPDB *online* Kabupaten Tulungagung meliputi ketentuan umum dan ketentuan khusus yang bisa diakses melalui alamat website yang tersedia.

3. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

LPSE adalah unit kerja yang dibentuk di seluruh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi Lainnya (K/L/D/I) untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik serta memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik. ULP/Pejabat Pengadaan pada Kementerian/Lembaga/Perguruan Tinggi/BUMN yang tidak membentuk LPSE dapat menggunakan fasilitas LPSE yang terdekat dengan tempat kedudukannya untuk melaksanakan pengadaan secara elektronik. Selain memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik LPSE juga melayani registrasi penyedia barang dan jasa yang berdomisili di wilayah kerja LPSE yang bersangkutan.

Pengadaan barang/jasa secara elektronik akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, mendukung proses *monitoring* dan audit dan memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time guna mewujudkan *clean and good government* dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

4. Pelayanan Perijinan Secara *Online* di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung.

Guna mendukung pelayanan perijinan secara cepat dan nyata, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung melaksanakan pelayanan perijinan secara online. Pelaksanaan perijinan tersebut dapat diakses di portal: perijinan.tulungagung.go.id. Jenis perijinan yang diakomodir oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung adalah ijin budidaya ikan air payau, ijin budidaya ikan air tawar, Ijin Gangguan (HO), ijin kolam memancing, ijin kursus kecantikan, ijin kursus mengemudi, ijin kursus menjahit, ijin kursus montir, ijin lokasi, Ijin Mendirikan Bangunan (IMB dan IMB Penertiban), ijin menempati rumah dinas, ijin pemakaian tanah milik pemda, ijin penangkapan ikan, ijin penempatan material di jalan, ijin penggunaan lapangan olahraga, ijin pengolahan ikan, ijin reklame, ijin tempat penitipan kendaraan bermotor, ijin terop, ijin tontonan, ijin trayek, ijin usaha bilyard, ijin usaha bioskop, ijin usaha fasilitas wisata tirta dan rekreasi air, ijin usaha gedung squash, ijin usaha gedung tenis meja, ijin usaha gelanggang bowling, ijin usaha gelanggang olahraga terbuka, ijin usaha gelanggang olahraga tertutup, ijin usaha gelanggang permainan, ijin usaha gelanggang renang, ijin usaha hotel, ijin usaha industri, ijin usaha jasa konstruksi, ijin usaha kafe/café, ijin usaha karaoke, ijin usaha

klub malam, ijin usaha kolam renang, ijin usaha lapangan bulutangkis, ijin usaha lapangan tenis, ijin usaha padang golf, ijin usaha panggung tertutup, ijin usaha panti mandi uap, ijin usaha pemandian alam, ijin Usaha Pemutaran/ Penayangan Film dan Usaha Rental Media Elektronik (SIUPDR), ijin usaha penggilingan padi (huller) dan penyosohan beras, ijin usaha pentas pertunjukan satwa, ijin usaha penyelenggaraan fasilitas kesenian, budaya, tontonan/pertunjukan, Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), ijin usaha peternakan, ijin usaha pusat kesegaran jasmani/kebugaran, ijin usaha pusat pasar seni, ijin Usaha salon kecantikan/*barber shop*, ijin usaha sarana dan fasilitas olahraga, ijin usaha taman satwa, ijin usaha taman/tempat rekreasi, ijin usaha wisata laut, ijin usaha wisata pantai, Surat Ijin Pemakaian Gudang (SIPG), Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

2.3.1.2.3.9.1 Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang terkait dengan Urusan Komunikasi dan Informatika terdiri dari 4 indikator dengan capaian sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 69 Capaian Indikator TPB Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung 2016-2020

Indikator TPB/SDG's	Target (Perpres 59/2017)	Capaian/Tahun					Keterangan
		2016	2017	2018	2019	2020	
Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	Meningkat	13,17 %	60,14 %	88,81 %	90,76 %	88,52 %	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional
Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.	Meningkat menjadi: Perkotaan 100% populasi; Perdesaan 52% populasi.	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Data Belum Tersedia
Proporsi individu yang menggunakan internet	Meningkat	23,61 %	34,54 %	72,63 %	79,41 %	80,27 %	Indikator Sudah Dilaksanakan dan sudah Mencapai Target Nasional
Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Data Belum Tersedia

Sumber: Dokumen KLHS Kabupaten Tulungagung 2018-2023

Berdasarkan tabel mengenai capaian indikator TPB untuk urusan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Tulungagung di atas dapat diketahui bahwa indikator memiliki capaian yang mayoritas belum memenuhi target yang ada. Hal tersebut ditunjukkan dengan terdapatnya indikator yang belum tercapai dan secara data masih belum ada yang disebabkan karena belum adanya pelaksanaan penghitungan atau pendataan. Namun terdapat 1

indikator yang tercapai yaitu Proporsi Individu yang menggunakan internet, hal tersebut bisa dimaknai bahwa masyarakat Kabupaten Tulungagung sudah melek digital, atas kemajuan tersebut tentu memerlukan pencapaian TPB yang sudah ditetapkan, seperti akses tingkat wilayah yang memiliki infrastruktur pendukung internet, Hal-hal seperti ini yang juga harus menjadi perhatian penting bagi Kabupaten Tulungagung untuk meningkatkan TPB urusan komunikasi dan informatika.

2.3.1.2.10 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Koperasi adalah salah satu penggerak perekonomian nasional. Untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, Pemerintah Kabupaten Tulungagung memandang gerakan koperasi sangat diperlukan keberadaannya. Pembinaan dan perhatian gerakan koperasi perlu ditingkatkan agar bisa berkembang dan berfungsi dengan baik. Hingga akhir tahun 2016 tercatat 961 badan hukum koperasi. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Tulungagung juga membina masyarakat agar mempunyai jiwa wirausaha yang tangguh dan mandiri. Prioritas program tersebut adalah meningkatkan dan mengembangkan KUMKM di bidang kelembagaan, mendorong terwujudnya KUMKM yang mampu mengembangkan usaha dan menguasai teknologi informasi pasar, serta mendorong KUMKM yang mempunyai permodalan sehat dan mandiri. Secara umum perkembangan pembangunan koperasi di Kabupaten Tulungagung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 70 Perkembangan Pembangunan Koperasi dan UMKM Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 – 2021

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
A. Koperasi							
1.	Jumlah Koperasi (Badan Hukum)	koperasi	1.339	1.340	1.371	1.389	1.408
2.	Anggota	orang	35.090	88.554	98.198	86.395	84.969
3.	Jumlah Koperasi Aktif	Jumlah	672	673	704	722	741
4.	Persentase Koperasi Aktif	%	50,19	50,22	51,35	51,97	52,63
5.	Modal Sendiri	(Rp.)	155.869.736.086	172.605.660.758	327.704.089.643	258.983.465.764	276.473.341.787
6.	Modal Luar	(Rp.)	205.763.052.776	252.826.656.689	394.766.081.764	285.325.893.784	296.680.482.223
7.	Volume Usaha	(Rp.)	430.339.930.034	476.159.794.579	738.096.332.980	576.570.245.907	542.591.688.970
8.	SHU	(Rp.)	14.163.194.660	15.965.249.297	22.026.526.108	20.907.969.947	19.155.077.262
9.	Asset/Harta	(Rp.)	361.632.788.862	425.432.317.447	722.470.171.407	544.309.359.548	573.153.824.010
10.	Persentase Pertumbuhan Omset Koperasi	%	25,71	10,65	55,01	-21,88	-5,89
11.	Persentase Koperasi Berkualitas	%	27,48	29,83	32,25	22,60	23,22
B. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah							
1.	Jumlah Usaha	unit	53.488	57.897	62.818	64.144	66.375

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
2.	UMKM Naik Kelas	Unit	30	32	34	36	38
3.	Modal Usaha	(Rp.)	1.274.016.330	1.375.949.718	1.492.905.444	1.516.825.700	1.606.945.035
4.	Volume Usaha	(Rp.)	1.679.275.119	1.817.105.969	1.971.559.976	2.004.477.563	2.113.181.020
5.	Jumlah Karyawan	Orang	261.055	280.065	303.871	304.386	306.671
6.	Persentase Pertumbuhan Omset Usaha Mikro	%	7,8	8,2	8,5	10,17	15,59
7.	Persentase Usaha Mikro Berdaya Saing	%	n/a	n/a	n/a	2,16	2,20

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM, 2021

Volume usaha pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 55,01% dikarenakan adanya Peningkatan jumlah anggota, Adanya peningkatan tabungan anggota sehingga koperasi dapat meningkatkan pemberian pinjaman dan Adanya peningkatan permintaan pinjaman anggota. Untuk data volume usaha tahun 2017 yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dikarenakan Kebutuhan anggota yang berbeda setiap tahunnya, Adanya pinjaman kurang lancar, dan Adanya penarikan simpanan sehingga kas koperasi berkurang dan berpengaruh pada menurunnya kemampuan koperasi dalam memberikan pinjaman. Untuk data volume usaha mengalami penurunan mulai tahun 2019 ke tahun 2020 dikarenakan masa pandemi COVID-19, hal ini dikarenakan: (a) Dari sisi Anggota Sebagian anggota merasa khawatir tidak bisa membayar pinjaman, Menurunnya nilai pinjaman dikarenakan melemahnya perekonomian; dan (b) Dari sisi koperasi Kas Koperasi kurang memadai karena banyaknya pinjaman kurang lancar, Koperasi lebih berhati-hati dalam memberikan pinjaman.

Pertumbuhan omset Koperasi Pada Tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 76,89% hal ini disebabkan antara lain karena masa pandemi covid-19 terdapat factor menurunnya nilai pinjaman anggota karena melemahnya perekonomian selain itu terdapat beberapa koperasi yang belum melaporkan kondisi keuangannya (belum RAT). Pada tahun 2020 pertumbuhan omset naik 15,99% dari tahun sebelumnya dikarenakan kasus covid-19 sudah mulai menurun dan terdapat peningkatan tabungan anggota sehingga modal koperasi bisa meningkat dan koperasi dapat memberikan pinjaman yang lebih besar kepada anggotanya. Pada tahun 2021 pertumbuhan omzet koperasi sudah mulai meningkat sebesar 28,7%.

Tabel 2. 71 Persentase Pertumbuhan Omset Koperasi Dan Persentase Pertumbuhan Omset Usaha Mikro Kab. Tulungagung Tahun 2017-2021

Tahun	Pertumbuhan Omset Koperasi	Pertumbuhan Omset Usaha Mikro
2017	10.65	7.8
2018	55.01	8.2
2019	-21.88	8.5
2020	-5.89	10.17

2021	22.81	15.59
------	-------	-------

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM, 2021

Persentase pertumbuhan omset Usaha Mikro di Tahun 2021 adalah sebesar 5.42%. Angka ini naik 3.75% dari tahun 2020. Kenaikan omset usaha mikro dikarenakan beberapa faktor, yaitu (1) Mulai bangkitnya para pelaku usaha mikro setelah pandemi Covid-19 yang berangsur membaik, (2) Mempunyai kategori usaha kecil menjadi usaha mikro disebabkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021.

2.3.1.2.3.10.1 Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang terkait dengan Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah terdiri dari 5 indikator dengan capaian sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 72 Capaian Indikator TPB Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kabupaten Tulungagung 2016-2020

Indikator TPB/SDG's	Target (Perpres 59/2017)	Capaian/Tahun					Keterangan
		2016	2017	2018	2019	2020	
Laju pertumbuhan PDB per kapita.	Meningkat	9,02%	7,59%	8,02%	7,04%	- 3,19%	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional
PDB per kapita	Meningkat menjadi lebih dari Rp 50 juta	Rp. 30,33 Juta	Rp. 32,64 Juta	Rp. 35,25 Juta	Rp. 37,73 Juta	Rp. 36,54 Juta	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional
Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	Meningkat	n/a	n/a	- 7,69%	19,95%	- 6,92%	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional
Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	25%	n/a	n/a	0,07%	0,08%	0,02%	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional
Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	Meningkat	62,61 %	63,27%	64,78 %	68,04%	67,91 %	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional

Sumber: Dokumen KLHS Kabupaten Tulungagung 2018-2023

Berdasarkan tabel mengenai capaian indikator TPB untuk urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Tulungagung di atas dapat diketahui bahwa semua indikator memiliki capaian yang belum memenuhi target yang ada. Hal-hal seperti ini yang juga harus menjadi perhatian penting bagi Kabupaten Tulungagung untuk meningkatkan kualitas koperasi, usaha kecil dan menengah.

2.3.1.2.11 Penanaman Modal

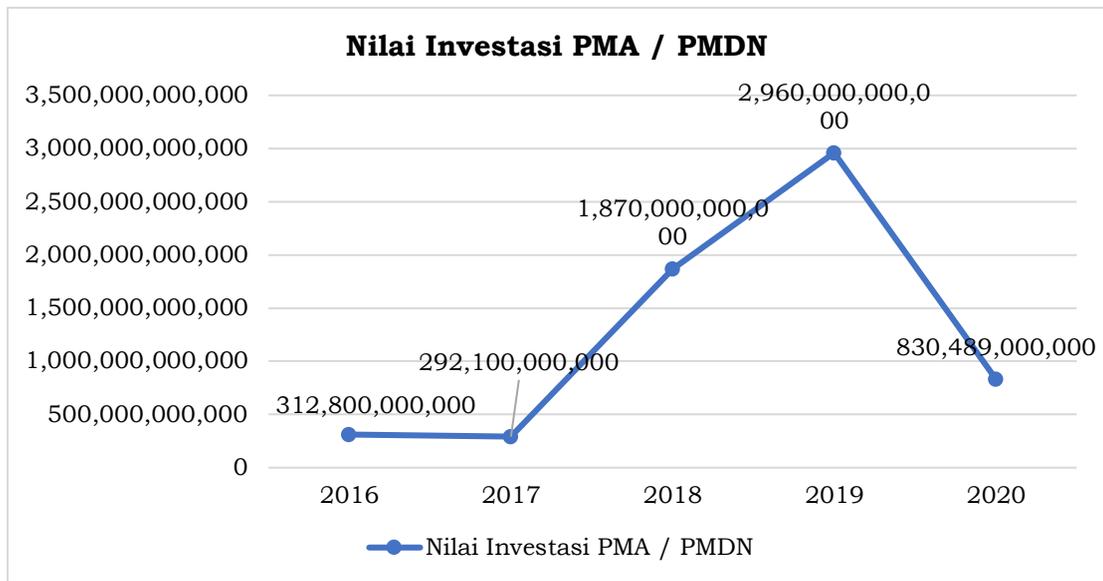
Iklim usaha yang kondusif suatu daerah tercermin dari dinamika penanaman modal di daerah yang terus berkembang dengan signifikan. Pengembangan penanaman modal bagi Pemerintah Kabupaten Tulungagung selain dalam rangka menggali potensi unggulan daerah sekaligus memperkenalkan dan menawarkan kepada calon investor baik dalam maupun luar negeri, juga mempunyai arti strategis bagi pertumbuhan ekonomi daerah, pengurangan pengangguran dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sesuai Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal. Berikut adalah data tentang kinerja urusan penanaman modal yang berhasil dihimpun melalui Badan Pelayanan Perijinan Terpadu.

Tabel 2. 73 Capaian Indikator Urusan Penanaman Modal Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Nilai Investasi PMA dan PMDN	Rp	312,8 M	292,1M	1,87 T	2,96 T	830,489 M
Ijin usaha yang diterbitkan (ijin)	Izin	610	768	947	1.761	2.844
Unit Usaha	Unit	5,334	6,184	3,353	3,154	3,925
Nomor Induk Berusaha yang Terbit	Jumlah	n/a	n/a	n/a	n/a	3,520
Nilai investasi Non UMKM/ Non IUMK	Rp.	306.128.786.406	265.067.387.900	1.822.090.185.080	2.862.642.616.219	662.743.038.121
Nilai investasi IUMK/ UMKM	Rp.	6.671.213.594	27.067.387.900	49.160.385.280	96.783.582.400	167.746.421.680
Jumlah Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Tepat Waktu	Pemohon Perijinan	768	768	947	1761	1.926

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Tulungagung, 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa Nilai Investasi PMA dan PMDN tahun 2018 dan tahun 2019 meningkat dikarenakan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS). Di dalam peraturan tersebut mengharuskan setiap pelaku usaha memutakhirkan data perizinan secara elektronik. Peraturan Pemerintah tersebut mulai disosialisasikan dan dilaksanakan pada bulan Agustus 2018, sehingga ada migrasi data perizinan termasuk data nilai investasi dari *offline* ke perizinan *online* tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 berdasarkan data LKPM ada penurunan nilai investasi yang disebabkan beberapa hal antara lain situasi dan kondisi iklim investasi yang kurang kondusif dan penurunan migrasi data dari *offline* ke *online*. Berikut grafik mengenai Nilai Investasi PMA dan PMDN Kabupaten Tulungagung dari tahun 2016-2020.



Grafik 2. 81 Nilai Investasi PMA/PMDN Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, 2021

Selanjutnya mengenai Indikator izin usaha yang diterbitkan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Jumlah Izin yang telah diterbitkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung dari tahun 2016 sampai dengan 2020 mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 peningkatan izin usaha yang diterbitkan dikarenakan adanya migrasi data dari offline ke online terimbas adanya Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2018 tentang Peizinan yang terintegrasi secara elektronik. Tahun 2020 peningkatan jumlah Izin usaha yang diterbitkan berbanding terbalik dengan jumlah nilai investasi karena sebagian besar investasi berasal dari pelaku IUMK (Izin Usaha Mikro Kecil)/ UMKM. Investasi yang berasal dari Non IUMK/UMKM jumlahnya berkurang dari tahun sebelumnya dikarenakan iklim investasi yang kurang kondusif. Berikut merupakan grafik yang menggambarkan pencapaiannya.



Grafik 2. 82 Izin Usaha Yang Diterbitkan Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, 2021

2.3.1.2.3.11.1 Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang terkait dengan Urusan Penanaman Modal terdiri dari 3 indikator dengan capaian sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 74 Capaian Indikator TPB Urusan Penanaman Modal Kabupaten Tulungagung 2016-2020

Indikator TPB/SDG's	Target (Perpres 59/2017)	Capaian/Tahun					Keterangan
		2016	2017	2018	2019	2020	
Laju pertumbuhan PDB per kapita.	Meningkat	9,02%	7,59%	8,02%	7,04%	- 3,19%	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional
PDB per kapita	Meningkat menjadi lebih dari Rp 50 juta	Rp. 30,33 Juta	Rp. 32,64 Juta	Rp. 35,25 Juta	Rp. 37,73 Juta	Rp. 36,54 Juta	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional
Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	Meningkat	n/a	n/a	- 7,69%	19,95%	- 6,92%	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional

Sumber: Dokumen KLHS Kabupaten Tulungagung 2018-2023

Berdasarkan tabel mengenai capaian indikator TPB untuk urusan Menanaman Modal di Kabupaten Tulungagung di atas dapat diketahui bahwa semua indikator memiliki capaian yang belum memenuhi target yang ada. Hal-hal seperti ini yang juga harus menjadi perhatian penting bagi Kabupaten Tulungagung untuk meningkatkan indikator TPB penanaman modal.

2.3.1.2.12 Kepemudaan dan Olahraga

Pembangunan pemuda dan olahraga mempunyai peran strategis dalam mendukung peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Pemuda memiliki peran aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan. Sementara itu, olahraga memiliki peran untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh, menanamkan nilai moral, akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat persatuan dan kesatuan. Pembangunan keolahragaan untuk menciptakan pemuda-pemuda yang berprestasi dan berdayasaing, maka harus menjadi keutamaan adalah penyediaan sarpras keolahragaan dan event-event rutin olahraga untuk mengasah kemampuan atlet. Berikut adalah capaian urusan kepemudaan dan olahraga Kabupaten Tulungagung.

Tabel 2. 75 Capaian Indikator urusan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tulungagung tahun 2016-2020

Uraian	satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Kegiatan/Event Olahraga	kegiata n	12	12	14	14	8

Uraian	satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah sarana dan prasarana olahraga	unit	786	876	877	877	877
Jumlah kelompok/organisasi kepemudaan yang dibina	kelompok	-	6	5	5	5

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, 2021

Tabel di atas merupakan kondisi sarana olahraga di Kabupaten Tulungagung, dimana jumlah even olahraga sebanding sebanyak 12 even di tahun 2017. Apabila melihat dari tahun sebelumnya, ini mengalami kondisi yang tetap dan tidak ada peningkatan. Berbanding terbalik dengan indikator sebelumnya, Jumlah sarana dan prasarana olahraga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2016 sebanyak 786 sarana olahraga yang ada di Kabupaten Tulungagung dan pada tahun 2017 menjadi 876 sarana. Jumlah ini kemudian mengalami peningkatan kembali menjadi 877 sarana prasarana olahraga pada tahun 2018. Kemudian kembali meningkat pada tahun 2019 menjadi 877 dan jumlah tersebut bertahan hingga tahun 2020. Berikut merupakan grafik yang menggambarkan pencapaiannya.

Pemuda dan Olahraga merupakan salah satu bentuk upaya peningkatan peranan kelompok masyarakat dalam proses pembangunan desa terutama peranan pemuda dalam masyarakat. Melalui hal tersebut dapat meningkatkan keswadayaan masyarakat dalam penggunaan hak masyarakat sehingga dapat meningkatkan kehidupan ekonomi, sosial, budaya dan politik. Perkembangan karang taruna menggambarkan keberdayaan masyarakat terutama pemuda yang ada di kabupaten Tulungagung. Berikut merupakan tabel yang menyajikan perkembangan karang taruna di Kabupaten Tulungagung tahun 2017.

Tabel 2. 76 Perkembangan Karang Taruna Kabupaten Tulungagung Tahun 2017

No	Kecamatan	Jumlah	Pasif	Aktif	Kreatif	Berprestasi
1	Besuki	10	0	8	2	0
2	Bandung	18	0	17	1	0
3	Pakel	19	0	19	0	0
4	Campurdarat	9	0	7	1	0
5	Tunggunggunung	7	0	7	0	0
6	Kalidawir	17	0	15	0	2
7	Pucanglaban	9	0	8	1	0
8	Rejotangan	16	0	13	1	2
9	Ngunut	18	0	16	1	1
10	Sumbergempol	17	0	16	1	1
11	Boyolangu	17	0	16	0	1
12	Tulungagung	14	0	9	4	1
13	Kedungwaru	19	0	18	1	0
14	Ngantru	13	0	10	1	2
15	Karangrejo	13	0	11	2	0
16	Kauman	14	0	13	1	0
17	Gondang	20	0	18	1	1
18	Pagerwojo	10	0	9	1	0
19	Sendang	11	0	10	1	0
	Tulungagung	271	0	240	20	11

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, 2021

Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa jumlah karang taruna yang pasif pada seluruh Kecamatan di Kabupaten Tulungagung tahun 2017 tidak ada. Jumlah karang taruna di Kabupaten Tulungagung tahun 2017 sejumlah 271. Keseluruhan Kecamatan memiliki karang taruna yang masih berperan aktif. Meskipun belum keseluruhan setiap Kecamatan memiliki karang taruna yang berprestasi setidaknya dari 19 Kecamatan hanya terdapat 4 Kecamatan yang belum kreatif yakni Kecamatan Pakel, Tunggunggunung, Kalidawir dan Boyolangu.

2.3.1.2.13 Statistik

Urusan statistik di Kabupaten Tulungagung memiliki peranan penting dalam mendukung pemerintahan yang akuntabilitas dan transparan. Berikut tabel capaian urusan statistik di Kabupaten Tulungagung.

Tabel 2. 77 Capaian Indikator Urusan Statistik Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Dokumen Metadata Statistik Sektoral	Buku	n/a	3	3	4	4

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, 2021

Metadata statistik sektoral adalah suatu informasi mengenai kegiatan statistik yang dilakukan oleh instansi yang didalamnya dipaparkan tentang informasi kegiatan, penanggungjawab, variabel yang dikumpulkan dan periode atau waktu pengumpulannya. Jumlah dokumen metadata statistic yang ada di Kabupaten Tulungagung mengalami peningkatan sejak tahun 2017, dari 3 dokumen berupa buku menjadi 4 buku metadata statistic pada tahun 2019. Kemudian berkaitan dengan persentase Data/informasi/Statistik yang dijadikan dasar penentuan kebijakan capaiannya 100% pada tahun 2019, dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung didasarkan dengan data serta informasi yang akurat.

Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang terkait dengan Urusan Statistik terdiri dari 3 indikator dengan capaian sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 78 Capaian Indikator TPB Urusan Satatistik Kabupaten Tulungagung 2016-2020

Indikator TPB/SDG's	Target (Perpres 59/2017)	Capaian/Tahun					Keterangan
		2016	2017	2018	2019	2020	
Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	Meningkat	n/a	n/a	97,8 9%	100 %	94,6 4%	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional

Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.	Meningkat	n/a	n/a	81,1 6%	85,9 6%	75,7 6%	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional
Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).	Meningkat	n/a	n/a	97,8 9%	100 %	94,6 4%	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional

Sumber: Dokumen KLHS Kabupaten Tulungagung Tahun 2021

Berdasarkan tabel mengenai capaian indikator TPB untuk urusan Statistik di Kabupaten Tulungagung di atas dapat diketahui bahwa semua indikator memiliki capaian yang belum memenuhi target yang ada. Hal-hal seperti ini yang juga harus menjadi perhatian penting bagi Kabupaten Tulungagung untuk meningkatkan indikator TPB statistik.

2.3.1.2.14 Persandian

Pengelolaan persandian di pemerintah daerah dapat dikategorikan bersifat spesifik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Meskipun bersifat spesifik, bukan berarti publik dilarang untuk mengawasi pengelolaannya agar tidak terjadi penyalahgunaan. Dengan dimensi pengaturan yang dianut dalam kebebasan Informasi publik, informasi dan transaksi elektronik, serta substansi pengecualian kerahasiaan negara, maka pemerintah daerah bukan tidak mungkin berada dalam dilema untuk mengelolanya lebih lanjut di tingkat kewenangan yang ada. Persandian sebagai upaya untuk mengamankan, melindungi dan menjamin orisinalitas sebuah berita atau dokumen pemerintah merupakan hal yang amat penting dalam era serba teknologi informasi saat ini. Modernisasi pemerintahan akan sangat bergantung dan didukung oleh penggunaan teknologi informasi di segala aspek mulai dari administrasi perkantoran (*e-office*), perencanaan (*e-planning*), keuangan (*e-budgetting*) dan fungsi pemerintahan lainnya.

Urusan persandian bagi pemerintah daerah memegang peranan yang cukup penting, terutama dikaitkan dengan bagaimana keamanan atau kerahasiaan data dan informasi pemerintah daerah dapat terlindungi. Namun disisi yang lain, urusan persandian juga berhadapan dengan era keterbukaan informasi yang sudah meliputi semua aspek kehidupan bermasyarakat. Penataan pengaturannya harus baik dan lengkap, karena persandian harus berhadapan dengan bagaimana menjaga kepercayaan masyarakat terhadap jalannya pemerintah daerah yang bersih dan terbuka. Berikut merupakan tabel berkaitan capaian Kabupaten Tulungagung dalam urusan persandian.

Tabel 2. 79 Capaian Indikator Urusan Persandian Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020

Indikator	Sa- tuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Informasi/berita yang disandakan/diamankan	%	n/a	100 %	100%	100%	100%

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, 2021

Capaian indikator urusan persandian di Kabupaten Tulungagung memiliki pencapaian yang sangat memuaskan. Berkaitan dengan Persentase Informasi/berita yang disandikan/diamankan capaiannya menyentuh angka 100%, capaian ini sudah didapatkan sejak tahun 2017 hingga tahun 2019. Hal ini tentu membuktikan bahwasanya segala informasi yang terbatas sangat dijaga kerahasiaannya. Kemudian berdasarkan indikator kedua yaitu Persentase Berita yang diterima dan didistribusikan ke OPD, capaiannya juga sangat memuaskan yaitu 100% pada tahun 2019. Apabila melihat hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwasanya setiap berita dan informasi yang ada di pemerintahan daerah kabupaten Tulungagung terdistribusi secara maksimal.

2.3.1.2.15 Kebudayaan

Istilah kebudayaan berasal dari kata dasar budaya sehingga memiliki keterkaitan makna. Kebudayaan merupakan hasil dari budaya yaitu hasil kegiatan dan penciptaan batin (akal budi) manusia seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat. Kebudayaan menunjuk kepada berbagai aspek kehidupan meliputi cara-cara berlaku, kepercayaan-kepercayaan dan sikap-sikap, dan juga hasil dari kegiatan manusia khas untuk suatu masyarakat atau kelompok penduduk tertentu. Kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks, yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat seseorang sebagai anggota masyarakat.

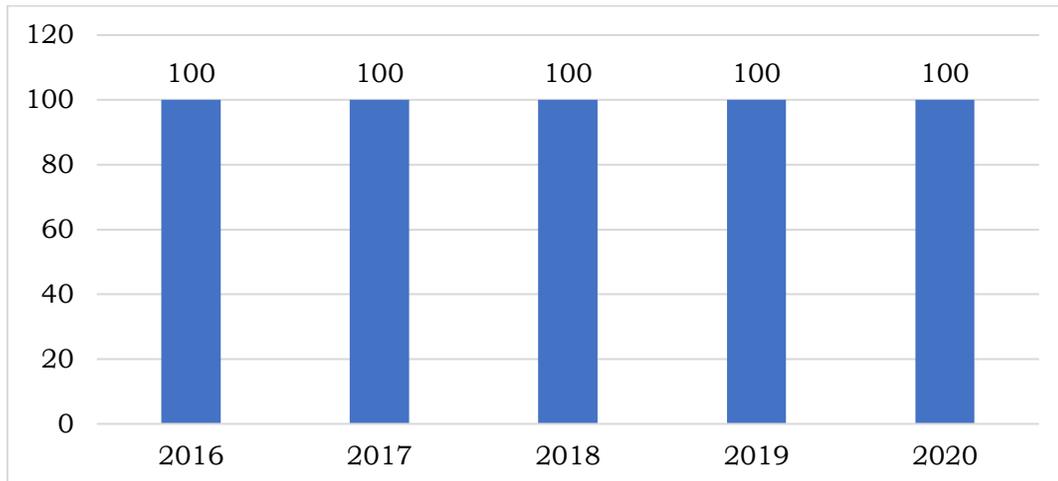
Tabel 2. 80 Capaian Indikator Pembangunan Urusan Kebudayaan Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020

Indikator	satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah kegiatan Pembinaan Sejarah Daerah	kegiatan	1	1	1	1	1
Jumlah Situs dan Cagar Budaya	Jumlah	411	411	411	430	443
Penetapan Objek Diduga Cagar Budaya Menjadi Cagar Budaya	Jumlah	n/a	n/a	n/a	9	9
Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan dan dikelola	%	100	100	100	100	100
Persentase Peningkatan Kunjungan Museum	%	1	1	1,1	1,2	0,6
Jumlah kegiatan Pembinaan Sejarah Daerah	kegiatan	1	1	1	1	1
Jumlah Seni Budaya yang Mendapatkan Penghargaan	Jumlah	2	2	4	2	1
Persentase seni budaya yang dilestarikan	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Tulungagung, 2021

Nilai-nilai kebudayaan yang ada di Kabupaten Tulungagung mengalami capaian dan angka yang fluktuatif setiap tahunnya. Jumlah kegiatan Pembinaan Sejarah Daerah di Kabupaten Tulungagung

dilaksanakan sebanyak satu kali setiap tahunnya, hal ini berlangsung sejak tahun 2016 hingga tahun 2019. Berkaitan dengan Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan dan dikelola di Kabupaten Tulungagung memiliki capaian yang sangat maksimal yaitu 100%, capaian ini sudah didapatkan sejak 2016 dan bertahan hingga 2019, hal ini dapat disimpulkan bahwasanya cagar budaya yang ada di Kabupaten Tulungagung terjaga dan terkelola dengan baik. Berikut merupakan grafik yang menggambarkan pencapaiannya.

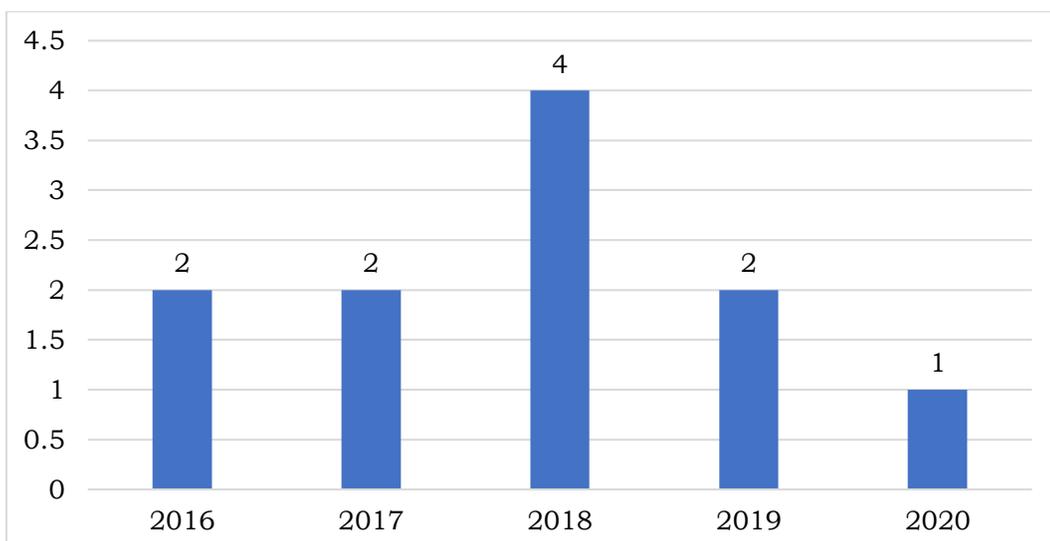


Grafik 2. 83 Persentase Cagar Budaya Yang Dilestarikan Dan Dikelola Kabupaten Tulungagung 2016-2020

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, 2021

Jumlah budaya yang mendapatkan penghargaan di Kabupaten Tulungagung mengalami kondisi yang fluktuatif, pada tahun 2016 Jumlah budaya yang mendapatkan penghargaan sebanyak 2 budaya, angka dan capaian ini bertahan di tahun 2017.

Pada tahun 2018 Jumlah budaya yang mendapatkan penghargaan di Kabupaten Tulungagung mengalami peningkatan menjadi 4 budaya, kemudian pada tahun 2019 menjadi 2 budaya. Dalam aspek Persentase seni budaya yang dilestarikan Kabupaten Tulungagung mengalami kondisi capaian yang sangat memuaskan yaitu 100% sejak tahun 2016 hingga tahun 2019. Berikut merupakan grafik yang menggambarkan pencapaian Jumlah budaya yang mendapatkan penghargaan.



Grafik 2. 84 Jumlah seni budaya yang mendapatkan penghargaan Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, 2021

Persentase Peningkatan Kunjungan Museum di Kabupaten Tulungagung juga tetap setiap tahunnya kecuali pada tahun 2020 hanya sebanyak 45 pengunjung karena ada penutupan tempat wisata akibat pandemic covid – 19.

Tabel 2. 81 Jumlah Kunjungan Museum dan Cagar Budaya Tahun 2016 – 2020

Tahun	Kunjungan Museum	Kunjungan Cagar Budaya
2016	2.197	
2017	2.669	42.127
2018	2.769	48.437
2019	4.026	59.676
2020	45	11.570

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Tulungagung, 2021

2.3.1.2.16 Perpustakaan

Perpustakaan merupakan sarana belajar yang terdapat berbagai macam koleksi buku dan majalah, saat ini perpustakaan tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan buku dan majalah saja akan tetapi juga sebagai tempat penyimpanan map, hasil seni, CD, dan lain sebagainya. Perpustakaan saat ini merupakan tempat yang disediakan pada setiap instansi pembelajaran hal ini didukung agar sistem pembelajaran lebih mudah terkait fokus-fokus pembelajaran. Adapun jumlah fasilitas perpustakaan di Kabupaten Tulungagung sebagai berikut:

Tabel 2. 82 Capaian Indikator Pembangunan Urusan Perpustakaan Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2019

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Mobil Perpustakaan Keliling	1 unit	1 unit	2 unit	2 unit	2 unit
Motor Perpustakaan Keliling	3 unit				
Perpusda	1	1	1	1	1
Perpustakaan Kecamatan	19	19	19	19	19
Perpustakaan Desa	32	81	84	84	84
Taman Bacaan	21	21	21	21	21
Perpustakaan Sekolah	165	175	301	301	301
Tenaga Pengelola Perpustakaan	60	60	60	60	60
Jumlah Pengunjung Perpustakaan	67.895	98.577	69.468	71.487	17.113
Jumlah Buku	41.477	42.180	44.108	50.770	51.311

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, 2021

Fasilitas perpustakaan di Kabupaten Tulungagung cenderung mengalami peningkatan tiap tahunnya. Terutama perpustakaan sekolah dari tahun 2016 sebanyak 165 menjadi 301 pada tahun 2018. Selain itu jumlah

perpustakaan desa cukup memadai, yaitu sebanyak 84 perpustakaan secara total, peningkatan ini dapat dikatakan sangat pesat jika dibandingkan pada tahun 2016 yang hanya sebanyak 32 perpustakaan desa. Mobil dan motor untuk perpustakaan keliling juga bertambah sebanyak 1 buah menjadi 2 unit mobil dan 3 unit motor untuk perpustakaan keliling pada tahun 2018.

2.3.1.2.17 Kearsipan

Kearsipan adalah pengelolaan catatan rekaman kegiatan atau sumber informasi yang memiliki nilai kegunaan dengan teratur dan terencana baik itu arsip yang dibuat maupun diterima, agar mudah ditemukan kembali jika diperlukan. Sistem kearsipan yang diselenggarakan secara optimal akan memperlancar kegiatan dan tujuan lembaga, organisasi, badan maupun perseorangan. Kearsipan mempunyai peranan yang penting sebagai pusat ingatan serta sebagai alat pengawasan yang sangat diperlukan dalam setiap organisasi termasuk pemerintah daerah dalam rangka kegiatan perencanaan, menganalisa, pengembangan, perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, pembuatan laporan, pertanggungjawaban, penilaian, dan pengendalian. Berikut ini merupakan capaian indikator urusan kearsipan di Kabupaten Tulungagung

Tabel 2. 83 Capaian Indikator Urusan Kearsipan Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2019

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Tertib Arsip di OPD	%	30	32	33	35	37
Persentase OPD/Satker yang menerapkan arsip secara baku	%	7	8	9	10	12
Jumlah sdm pengelola arsip	Jumlah	11	11	11	11	13
Jumlah arsip yang diselamatkan	Jumlah	910	1,749	703	2,708	3.643

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, 2021

Pada level nasional terdapat Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip yang selanjutnya disingkat GNSTA adalah upaya untuk peningkatan kesadaran lembaga negara dan penyelenggara pemerintahan daerah dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan kearsipan melalui aspek kebijakan, organisasi, sumber daya kearsipan, prasarana dan sarana, pengelolaan arsipserta. Persentase Tertib Arsip di OPD Pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung sendiri memiliki capaian yang tidak terlalu tinggi yaitu 35%, dibutuhkan kesadaran yang lebih dari setiap perangkat daerah untuk mulai menata dan menertibkan kearsipan di masing-masing dinas. Persentase OPD/Satker yang menerapkan arsip secara baku juga memiliki capaian yang tidak terlalu tinggi, hanya 10% pada tahun 2019.

2.3.2 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan

2.3.2.1 Pariwisata

Pembangunan bidang kepariwisataan bertujuan untuk meningkatkan minat pengunjung baik dari dalam maupun luar daerah Kabupaten Tulungagung dengan meningkatkan pengelolaan obyek daya tarik wisata,

sarana dan prasarana pariwisata serta penyedia jasa dan pelaku pariwisata. Salah satu upaya peningkatan pariwisata adalah pengembangan kawasan Geopark yang ada di Kabupaten Tulungagung, dimana saat ini telah disusun beberapa dokumen rencana pengembangan dan penataan kawasan. Pemerintah Kabupaten Tulungagung juga telah melakukan tahapan pembangunan di beberapa kawasan Geopark, misalnya di Kawasan Gunung Budeg, Pantai Kedung Tumpang dan Pantai Sanggar. Selain itu juga telah dilaksanakan pendampingan untuk pengembangan SDM pengelola kawasan Geopark, salah satunya dengan pemberian pelatihan untuk pemandu wisata di kawasan Geopark. Dalam upaya penetapan Kawasan Geopark di Kabupaten Tulungagung, telah dilaksanakan pengusulan penetapan Geoheritage Tulungagung di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), untuk selanjutnya menjadi dasar dalam pengusulan kawasan Geopark Tulungagung.

Hasil pembangunan pariwisata dapat terlihat pada capaian indikator sasaran meningkatnya jumlah wisatawan, meningkatnya pengelolaan destinasi wisata dan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pariwisata. Tahun 2019 Kabupaten Tulungagung memiliki 141 destinasi wisata, yang terdiri dari 16 wisata alam, 23 wisata buatan, 45 wisata purbakala, 23 wisata bahari, 3 wisata edukasi, 7 wisata kuliner, 6 wisata minat khusus, 13 wisata budaya, dan 5 wisata belanja.

Tabel 2. 84 Perkembangan Pembangunan Urusan Pariwisata Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah wisatawan nusantara (Jiwa)	275.104	731.252	1.250.771	1.503.225	1.233.478
2	Jumlah wisatawan mancanegara (Jiwa)	0	2.192	187	217	3
3	Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisata	26,05	165,81	71,05	20,18	(-17,94)
4	Jumlah pengelolaan obyek daya tarik wisata (obyek)	7	8	8	8	8
5	Penerimaan Asli Daerah Sektor Pariwisata	2,997,080,053	3,689,369,230	6,064,412,637	6,236,020,873	3,378,236,493
6	Persentase Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD Kabupaten Tulungagung	0.87	0.73	1.34	1.28	0.66
7	Jumlah Desa Wisata	0	0	0	2	2

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung, 2021

Jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung di Kabupaten Tulungagung pada tahun 2017 meningkat sangat signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yaitu mencapai 2.192 orang dikarenakan adanya event Rainbow Gathering yang dilaksanakan di Pantai Ngalur Kabupaten Tulungagung. Sedangkan pada tahun 2018-2020 jumlah wisatawan mancanegara mengalami penurunan secara signifikan, namun demikian jumlah wisatawan mancanegara pada tahun-tahun tersebut sudah menggambarkan kondisi normal yang ada di Kabupaten Tulungagung.

Pada tahun 2019 Kabupaten Tulungagung memiliki berbagai destinasi wisata mulai dari wisata alam sampai wisata buatan, yang

diantaranya yaitu wisata alam berjumlah 16 tempat, wisata buatan berjumlah 23 tempat, wisata purbakala sebanyak 45 tempat, wisata bahari berjumlah 23 tempat, wisata edukasi berjumlah 3 tempat, wisata kuliner berjumlah 7 tempat, wisata minat khusus berjumlah 6 tempat, wisata budaya berjumlah 13 tempat, dan yang terakhir adalah wisata belanja yang berjumlah 5 tempat yang mana semua destinasi wisata tersebut tersebar di berbagai daerah di Kabupaten Tulungagung. Lebih rincinya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 85 Tempat Wisata Kabupaten Tulungagung Tahun 2020

No	Nama	Alamat
WISATA ALAM		
1	Bumi Kandung	Ds. Tanen Kec. Rejotangan
2	Coban Kromo	Dsn. Jambu Ds. Pelem Kec. Campurdarat
3	Telaga Buret	Ds. Sawo Kec. Campurdarat
4	Telaga Baran	Ds. Banyu Urip Kec. Kalidawir
5	Telaga Ngambal	Ds. Winong Kec. Kalidawir
6	Air Terjun Lawean	Desa Geger Kec. Sendang
7	Bumi Perkemahan Jurang Senggani	Desa Nglurup Kec. Sendang
8	Air Terjun Jurang Senggani	Desa Nglurup Kec. Sendang
9	Kedung Minten	Desa Nglurup Kec. Sendang
10	Air Terjun Parang Kikis	Desa Nggambiran Kec. Pagerwojo
11	Air Terjun Sarang Awan	Desa Kradinan Kec. Pagerwojo
12	Wisata Air Kalimas	Desa Sebalor, Kec. Bandung
13	Ranu Gumbolo	Desa Mulyosari Desa Pagerwojo
14	Gunung Budeg	Desa Tanggung Kec. Campurdarat
15	Nyawangan Park	Desa Nyawangan Kec. Sendang
16	Bukit Lumpang	Desa Picisan Kec. Sendang
WISATA BUATAN		
1	Waduk Wonorejo	Ds. Mulyosari Kec. Pagerwojo
2	Pesanggahan Argo Wilis	Ds. Sendang Kec. Sendang
3	Taman Aloon-Aloon	Jl. RA Katini 1 Kel. Kampungdalem Kec. Tulungagung
4	Kawasan Pinka Lembu Peteng	Kel. Tertek & Kutoanyar
5	Cowindo	Desa/Kec. Sendang
6	Koptan "Ori green"	Desa/Kec. Sendang
7	Kolam Renang Vidia Tirta	Kelurahan Kutoanyar Kec. Tulungagung
8	Taman Huko Ketanon	Desa Tanon Kec. Kedungwaru
9	Taman Huko Moyoketen	Desa Moyoketen Kec. Boyolangu
10	Retjo Sewu	Desa Besole Kec. Besuki
11	Wisata Taman Anggrek Kahyangan	Desa Mulyosari Kec. Pagerwojo
12	Tugu Park	Desa Tugu Kec. Sendang
13	Taman Ketandan	Desa Bolo Kec. Kauman
14	Kawasan Wisata Agro Blimbing	Desa Moyoketen Kec. Boyolangu
15	Splash Water Park	Desa Bendilwungu Kec. Sumbergempol
16	Brond Water Park	Desa Sobontoro Kec. Boyolangu
17	Gubuk Sawah	Desa Sumberjo Wetan Kee. Ngunut
18	Kampung Pelangi	Desa Mulyosari Kec. Pagerwojo
19	Rumah Hobit	Desa Karangnom Kec. Kauman
20	Jambo Land	Desa Karangnom Kec. Kauman
21	Kampung Susu Dinasty	Desa Sidem Kec. Gondang
22	Kampung Tani	Desa Karangnom Kec. Kauman
23	Gubuk Asmoro	Desa Pulosari Kec. Ngunut

No	Nama	Alamat
WISATA PURBAKALA (SEJARAH/RELIGI)		
1	Candi Gayatri	Desa Boyolangu Kec. Boyolangu
2	Candi Dadi	Desa Sumberagung Kec. Rejotangan
3	Candi Cungkup/Sanggrahan	Desa Sanggrahan Kec. Boyolangu
4	Candi Gambar	Desa Wajak Kidul Kec. Boyolangu
5	Candi Ampel	Desa Mirigambar Kec. Sumbergempol
6	Candi Tuban	Desa Ngampel kec. Sumbergempol
7	Candi Nilosuwarna	Desa Domasan Kec. Kalidawir
8	Candi Asmoro Bangun/Penampihan	Desa Aryojeding Kec. Rejotangan
9	Makam Mbah Mlinjo	Desa Geger Kec. Sendang
10	Makam Srigading	Desa Bolo Kec. Kauman
11	Makam Setono Gedong	Desa Ngepoh Kec. Tanggunggunung
12	Makam Sunan Kuning	Desa Macanbang Kec Pakel
13	Makam Patih	Desa Tiudan Kec. Gondang
14	Makam Ngadirogo	Desa Podorejo Kec. Sumbergempol
15	Makam Petung Ulung	Desa Bangunmulyo Kec. Pakel
16	Makam Astonopraloyo	Desa Demuk Kec. Kalidawir
17	Makam Sengguruh	Desa Rejotangan Kec. Rejotangan
19	Makam Soka	Desa Karangsari Kec. Rejotangan
20	Kuburan Wangi	Desa Mulyosari Kec. Pagerwojo
21	Makam Bedalem	Desa Besole Kec. Besuki
22	Makam Surontani I	Desa Tanggung Kec. Campurdarat
23	Makam Surontani II	Desa Wajak Kidul Kec. Boyolangu
24	Goa Selomangleng	Desa Sanggrahan Kec. Boyolangu
25	Goa Tan Tik Syu	Desa Sendang Kec. Sendang
26	Goa Banyu	Desa Banyu Urip Kec. Kalidawir
27	Goa Pasir	Desa Junjung Kec. Sumbergempol
28	Goa Pasetran Gondomayit	Desa Kalibatur Kec. Kalidawir
29	Goa Tritis	Desa Tanggung Kec. Campurdarat
30	Situs Mbah Bodho	Desa Junjung Kec. Sumbergempol
31	Situs Mbah Bodho	Desa Kalidawir Kec. Klidawir
32	Situs Gembrong	Desa Sendang Kec. Sendang
33	Situs Kanigoro	Desa Domasan Kec. Kalidawir
34	Situs Lemah Duwur	Desa Podorejo Kec. Sumbergempol
35	Situs Alas Kebutan	Desa Bantengan Kec. Bandung
36	Situs Watu Garit	Desa Keboireng Kec. Besuki
37	Situs Song Gentong I	Desa Wateskroya Kec. Besuki
38	Situs Song Gentong II	Desa Besole Kec. Besuki
39	Situs Omben Jago	Desa Besole Kec. Besuki
40	Situs Punden Gedong	Desa Nyawangan Kec. Sendang
41	Situs Kukur Sanga	Desa Nyawangan Kec. Sendang
42	Penemuan Fosil	Desa Nyawangan Kec. Sendang
43	Balai Penyelamat (Museum Daerah)	Desa Gamping Kec. Campudarat Jalan Raya Popoh Kec. Boyolangu
44	Dwarapala (Reco Pentung)	Desa Kedungwaru, Jepun, Tamanan, Kutoanyar.
45	Makam Majan	Desa Majan Kec. Kedungwaru
WISATA BAHARI		
1	Pantai Nglarap	Ds. Keboireng Kec. Besuki
2	Pantai Klatak	Ds. Keboireng Kec. Besuki
3	Pantai Gemah	Ds. Keboireng Kec. Besuki
4	Pantai Bayem	Ds. Keboireng Kec. Besuki
5	Pantai Popoh	Ds. Besuki Kec. Besuki
6	Pantai Sidem	Ds. Besuki Kec. Besuki

No	Nama	Alamat
7	Pantai Neyama	Ds. Besuki Kec. Besuki
8	Pantai Coro	Ds. Besuki Kec. Besuki
9	Pantai Banyu Mulok	Ds. Besole Kec. Besuki
10	Pantai Gerangan	Ds. Ngrejo Kec. Tanggunggunung
11	Pantai Brumbun	Ds. Ngrejo Kec. Tanggunggunung
12	Pantai Sioro	Ds. Ngrejo Kec. Tanggunggunung
13	Pantai Patok Gebang	Ds. Jengglungharjo Kec. Tanggunggunung
14	Pantai Sanggar	Ds. Jengglungharjo Kec. Tanggunggunung
15	Pantai Ngalur	Ds. Jengglungharjo Kec. Tanggunggunung
16	Pantai Sine	Ds. Kalibatur Kec. Kalidawir
17	Pantai Dlodod	Ds. Rejosari Kec. Kalidawir dan Desa Panggungkalak Kec. Pucanglaban
18	Pantai Kelinci	Ds. Pucanglaban Kec. Pucanglaban
19	Pantai Kedung Tumpang	Ds. Pucanglaban Kec. Pucanglaban
20	Pantai Pacar	Ds. Pucanglaban Kec. Pucanglaban
21	Pantai Lumbung	Ds. Pucanglaban Kec. Pucanglaban
22	Pantai Pucang Sawit	Ds. Pucanglaban Kec. Pucanglaban
23	Pantai Molang	Ds. Pucanglaban Kec. Pucanglaban
WISATA EDUKASI		
1	Kampung Susu Dinasty	Desa Sidem Kec. Gondang
2	Kampung Tani	Desa Karanganom Kec. Kauman
3	Kampung Etnomatika	Desa Bangoan Kec. Kedungwaru
WISATA KULINER		
1	Pinka Lembu Peteng	Kel. Tertek Kec. Tulungagung
2	Pujasera Stasiun Tulungagung	Jln. P. Antasari Tulungagung
3	Pujasera Pasar Ngemplak	Jln. KH. Abdul Fattah Tulungagung
4	Pujasera Pasar Senggol	Desa Bangoan, Kec. Kedungwaru
5	D'green Foodcut	Jl. Soekarno Hatta, Tulungagung
6	Teras Kota	Jl. Ig. Ngurah Rai
7	Food Truck	Komplek GOR lembu peteng
WISATA MINAT KHUSUS		
1	Marmer & Onix	Desa Gamping Campurdarat
2	Batik	Desa Bangoan, Desa Mojoarum, Desa Majan
3	Border	Mangunsari, Botoran
4	Bamboo Art	Boro
5	Kerajinan Wayang Kulit	Sendang, Pagerwojo
6	Kerajinan Logam & Aluminium	Kec. Karangrejo
WISATA BUDAYA		
1	Kirab Panji Lambang Daerah (Bersih Nagari)	Kec. Tulungagung
2	Jamasan Pusaka Kyai Upas	Ds. Kepatihan Kec. Tulungagung
3	Labuh Laut / Larung Sesaji (Sembonyo) Pantai Popoh	Ds. Besole Kec. Besuki
4	Sedekah Bumi Pantai Gemah	Ds. Kebo Ireng Kec. Besuki
5	Upacara Adat Ulur-Ulur Telaga Buret	Ds. Sawo Kec. Campurdarat
6	Upacara Adat Manten Kucing, Coban Kromo	Ds. Pelem Kec. Campurdarat
7	Jaranan	Se Kab. Tulungagung
8	Reog Kendang Tulungagung	Kab. Tulungagung
9	Wayang Kulit	
10	Kentrung	
11	Jedor	
12	Grebeg Wilis Candi Penampihan	Desa Geger Kecamatan Sendang
13	Labuh Laut Pantai Sine	Desa Kalibatur Kec. Kalidawir

No	Nama	Alamat
WISATA BELANJA		
1	Apollo Supermall	Jl. Diponegoro, Tulungagung
2	Pasar Wage	Jl. Wr. Supratman
3	Bravo Mall	Jl. Mayor Sujadi
4	Golden Swalayan	Jln. A. Yani Tulungagung
5	Belga Swalayan	Jln. KH Agus Salim Tulungagung
6	Pusat Oleh – Oleh dan Kuliner Stasiun Tulungagung	Jl. Antasari Tulungagung

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, 2021

2.3.2.1.1 Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang terkait dengan Urusan Pariwisata terdiri dari 8 indikator dengan capaian sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 86 Capaian Indikator TPB Urusan Pariwisata Kabupaten Tulungagung 2016-2020

Indikator TPB/SDG'S	Target (Perpres 59/2017)	Capaian/Tahun					Keterangan
		2016	2017	2018	2019	2020	
Laju Pertumbuhan PDB Per Kapita	Meningkat	9,02%	7,59%	8,02%	7,04%	-3,19%	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional
PDB Per Kapita	Meningkat menjadi lebih dari Rp 50 juta	Rp. 30,33 Juta	Rp. 32,64 Juta	Rp. 35,25 Juta	Rp. 37,73 Juta	Rp. 36,54 Juta	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional
Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun	Meningkat	n/a	n/a	-7,69%	19,95%	-6,92%	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional
Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.	Meningkat menjadi 8%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Data Belum Tersedia
Jumlah wisatawan mancanegara.	Meningkat menjadi 20 juta (skala nasional)	-	2.192	187	217	7	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional
Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	Meningkat	275.104	731.252	1.250.771	1.503.225	1.233.482	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional

Indikator TPB/SDG'S	Target (Perpres 59/2017)	Capaian/Tahun					Keterangan
		2016	2017	2018	2019	2020	
Jumlah devisa sektor pariwisata	Meningkat	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Data Belum Tersedia
Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.	Meningkat	n/a	n/a	0,30%	0,30%	0,22%	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional

Sumber: Dokumen KLHS Kabupaten Tulungagung 2018-2023

Pada indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang telah dilaksanakan dan belum mencapai target yang telah ditentukan, bila melihat pada capaian dan targetnya masih terdapat gap (selisih kurang) yang beragam, dimana gap paling besar terdapat pada indikator Jumlah wisatawan mancanegara yang mencapai -96,77%, sedangkan gap paling kecil terdapat pada indikator Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja yang mencapai sebesar -0,09%.

2.3.2.2 Pertanian

Pertanian merupakan sektor utama dalam pembangunan ekonomi di Kabupaten Tulungagung hal ini didukung dengan wilayah Kabupaten Tulungagung merupakan daerah agraris sehingga sangat cocok untuk tetap mempertahankan pertanian sebagai sektor unggulan. Kemudian berdasarkan kontribusinya dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), peranan sektor pertanian dalam pengembangan ekonomi sangat luas, yaitu sebagai sektor penyerap tenaga kerja terbesar, sebagai penghasil makanan atau kebutuhan pangan penduduk dan sebagai penentu stabilitas harga.

Berdasarkan peran sektor pertanian yang memiliki pengaruh besar bagi perkembangan wilayah Kabupaten Tulungagung, maka sasaran Pembangunan pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tulungagung adalah tercapainya sasaran produksi pangan padi, jagung, dan kedelai guna mendukung ketahanan dan ketersediaan pangan nasional, dan meningkatnya produksi pangan selain padi, jagung, dan kedelai untuk keamanan pangan dan cukupnya gizi masyarakat, meningkatnya produksi yang berdaya guna tinggi untuk tercapainya pasar domestik dan ekspor, meluasnya lapangan kerja dengan produktivitas tinggi dan kesempatan berusaha produktif, meningkatnya kemandirian petani melalui pemberdayaan kelembagaan tanaman dan hortikultura, meningkatnya pendapatan masyarakat petani melalui peningkatan produksi, produktivitas, mutu dan hasil nilai tambah, tersedianya bahan baku tanaman pangan dan hortikultura untuk mendukung industri pengolahan, dan berkembangnya usaha-usaha ramah lingkungan.

Potensi pertanian di Kabupaten Tulungagung cukup besar yang terdiri dari lahan sawah dan tegalan dengan luas total sekitar 447.490 Ha atau sekitar 42,93% dari luas lahan di Kabupaten Tulungagung. Lahan sawah dan tegalan tersebar merata di seluruh kecamatan di Kabupaten Tulungagung. Hasil produksi pertanian di Kabupaten Tulungagung menunjukkan trend

meningkat seperti produksi padi, sayuran, ubi kayu, dan jagung. Berikut ini adalah tabel potensi sektor pertanian Kabupaten Tulungagung Tahun 2019.

Tabel 2. 87 Potensi Sektor Pertanian Tanaman Pangan dan Tanaman Sayuran Kabupaten Tulungagung Tahun 2020

No	Komoditi	Luas Tanan (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)
I	Tanaman Pangan			
1	Padi	45.850	45.121	297.582,4
2	Jagung	53.835	50.981	347.120,73
3	Kedelai	562	427	778.176
4	Ketela Pohon	5.413	2.902	70.785,45
5	Ubi Jalar	14	14	311.458
6	Kacang Tanah	438	361	779.988
7	Kacang Hijau	53	43	38.796
II	Tanaman Sayuran			
1	Bawang Merah/Onion	239	229	1.443,9
2	Bawang Putih/Garic	2	12	4,2
3	Bawang daun/Onion Leave	32	35	29,3
4	Bayam/Spinach	83	85	409,7
5	Buncis/Bean	9	8	520,8
6	Cabe Rawit/Chili	120	203	871,1
7	Kacang Panjang/Loan Bean	56	87	2.029,1
8	Kangkung/Leavy Vegetabel	45	55	1.008,1
9	Ketimun/Cucumber	23	30	171,9
10	Kubis/Cabbage	65	34	327,9
11	Labu siam/Squash	5	8	47,2
12	Sawi/petsai/Lettuce	118	139	1.533
13	Terung/Eggplant	54	58	269,8
14	Tomat/Tomato	55	59	155,8
15	Wortel/Carrot	12	16	23,3
16	Kentang/Potato	6	6	7,6
17	Semangka/ water melon	190	195	3.666,9

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, 2021

Tabel 2. 88 Potensi Sektor Pertanian Tanaman Buah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020

No	Tanaman Buah	Jumlah Panen (Pohon)	Produksi (Kw) Production	Harga Produsen (Rp per Kilo) Price of Production
1	Alpoket/Avocado	96.044	32.436	7.265
2	Mangga/Mango	184.864	116.524	6.080
3	Rambutan	74.283	35.325	4.200
4	Duku/langsat	8.178	1.638	8.570
5	Jeruk Siam	476.262	87.716	8.210
6	Durian/Durian	11.814	7.137	12.220
7	Jambu air	5.567	2.320	6.455
8	Jambu/Jamboo	19.284	3.815	4.085
9	Sawo	10.130	3.357	5.750
10	Pepaya/Papaya	156.617	53.265	3.640

11	Pisang/Banana	1.158.454	173.257	4.130
12	Nenas/Pineapple	-	-	-
13	Salak/Salaca	54.819	5.723	4.770
14	Belimbing/Star Fruit	211.677	53.922	5.340
15	Nangka/Jackfruit	106.606	64.895	4.720
16	Manggis/Mangostoe n	2.215	1.078	7.770
17	Sirsak	5.421	788	3.240
18	Sukun/Bread Fruit	14.336	7.538	3.265

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, 2021

2.3.2.2.1 Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang terkait dengan Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari 18 indikator dengan capaian sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 89 Capaian Indikator TPB Urusan Partanian Kabupaten Tulungagung 2016-2020

Indikator TPB/SDG'S	Target (Perpres 59/2017)	Capaian/Tahun					Keterangan
		2016	2017	2018	2019	2020	
Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	Meningkat	n/a	3,93 %	3,62 %	4,17%	3,92 %	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional
Laju pertumbuhan PDB per kapita.	Meningkat	9,02 %	7,59 %	8,02 %	7,04%	3,19 % (min)	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional
PDB per kapita	Meningkat menjadi lebih dari Rp 50 juta	Rp. 30,33 Juta	Rp. 32,64 Juta	Rp. 35,25 Juta	Rp. 37,73 Juta	Rp. 36,54 Juta	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional
Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	Meningkat	n/a	n/a	7,69 % (min)	19,95 %	6,92 % (min)	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional

Sumber: Dokumen KLHS Kabupaten Tulungagung 2018-2023

Pada indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang telah dilaksanakan dan belum mencapai target yang telah ditentukan, bila melihat pada capaian dan targetnya masih terdapat gap (selisih kurang) yang beragam, dimana gap paling besar terdapat pada indikator Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun, sebesar -26,88%. Sedangkan gap paling kecil terdapat pada indikator Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja), sebesar -0,26%.

2.3.2.3 Perdagangan

Urusan perdagangan dikembangkan dengan harapan SDM Perdagangan menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, pelayanan informasi perdagangan menjadi lebih transparan dan mudah di akses, program yang disusun menjadi lebih antisipatif terhadap perkembangan masa depan, masyarakat dan komunitas profesional semakin berpartisipasi dalam pengelolaan dan penyusunan kebijakan serta penegakan hukum dilaksanakan secara sistematis dan terprogram. Dengan demikian masyarakat dunia industri dapat mengembangkan usahanya dan masyarakat selaku konsumen dapat merasa aman dalam mengkonsumsi barang maupun jasa yang ada di pasaran.

Nilai perdagangan di Kabupaten Tulungagung sesuai data kontribusi sektoral pada PDRB menempati urutan tertinggi. Nilai perdagangan tersebut terdiri dari perdagangan dalam negeri dan perdagangan luar negeri. Perdagangan dalam negeri terdiri atas perdagangan lokal dan antar daerah. Komoditas perdagangan meliputi hasil industri yang berbasis logam, tekstil (garmen, tenun, konveksi), dan kimia agro. Perdagangan luar negeri mampu memberikan nilai jual produk yang lebih tinggi karena perbedaan nilai tukar rupiah. Peluang ini juga dimanfaatkan oleh sebagian pelaku usaha yang memiliki produk potensial untuk tujuan ekspor.

Pada tahun 2020 mengalami peningkatan nilai ekspor dan pelaku IKM ekspor dibandingkan pada tahun sebelumnya biarpun di masa pandemi COVID 19 di Kabupaten Tulungagung. Hal ini karena ada permintaan banyak dari buyer (pembeli) dari luar negeri. Berikut merupakan data perkembangan ekspor di Kabupaten Tulungagung tahun 2016-2020 sebagai berikut.

Tabel 2. 90 Perkembangan Ekspor Kab. Tulungagung Tahun 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Nilai ekspor	41,04M	22,5M	23,5M	21,3 M	46,8 M
2	IKM eskportir	11 IKM	11 IKM	11 IKM	8 IKM	13 IKM

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, 2021

Kabupaten Tulungagung memiliki beberapa komoditas perdagangan yang tidak hanya mampu memberikan kontribusi pada peningkatan daya saing daerah, namun secara nyata juga mampu memberikan peningkatan pendapatan masyarakat. Komoditas yang dihasilkan bervariasi dan memiliki karakteristik unik dan spesifik sebagai wujud dari berkembangnya tingkat kreatifitas dan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Tulungagung.

Komoditas dibidang garmen menghasilkan barang-barang konveksi mulai dari pakaian dalam berbagai jenis, ukuran dan kegunaan hingga barang-barang untuk keperluan khusus termasuk didalamnya barang kerajinan pengolahan limbah hasil konveksi yang secara keseluruhan tersebar di wilayah Kecamatan Tulungagung, Boyolangu, Kedungwaru dan Sumbergempol. Selain hal tersebut juga terdapat produk tenun webbing set yang memproduksi peralatan perbekalan militer telah mampu bekerjasama dengan Kementerian Pertahanan RI, bahkan beberapa item produknya telah dipakai oleh beberapa negara di kawasan Asia Tenggara dan Organisasi Pertahanan (NATO).

Selain itu masih banyak komoditas perdagangan antar daerah yang berbasis industri logam, kimia, agro dan hasil hutan sebagaimana terdapat dalam tabel di bawah, yang dapat memberikan ilustrasi tentang beberapa komoditi potensial perdagangan antar daerah.

Tabel 2. 91 Komoditas Perdagangan Antar Daerah di Kabupaten Tulungagung Tahun 2020

No	Komoditas	Bidang Usaha	Lokasi
1.	Marmer/onyx, batu fosil, mozaik	Pertambangan	Ds.Gamping, Ds.Campurdarat, Ds.Besole Kec.Besuki
2.	Belimbing	Pertanian	Ds.Moyoketen, Ds.Bono Kec.Boyolangu
3.	Busana muslim, Mukena	Industri tekstil	Ds.Moyoketen Kec.Boyolangu, Kel.Botoran,Kel.Sembung Kec.Tulungagung, Ds.Majan, Ds.Mangunsari Kec.Kedungwaru
4.	Pakaian dalam	Industri tekstil	Ds.Moyoketen, Ds.Sobontoro, Ds.Beji, Ds.Waung Kec.Boyolangu
5.	Cangkul, sabit, pisau	Industri Logam pande besi	Ds.Kendal, Ds.Kiping, Ds.Gondang Kec. Gondang, Ds.Bolorejo, Ds.Pucangan Kec.Kauman
6.	Tas kurir, tas ransel, tas jinjing, tas sekolah dan aneka tas	Industri aneka	Ds.Ngunut Kec.Ngunut
7.	Logam alat dapur (sendoijk, sotil/spatula, serok, tatakan kompor)	Industri logam	Ds.Kaliwungu, Ds.Gilang, Ds.Ngunut Kec.Ngunut
8.	Hanger	Industri logam	Ds.Kalangan Kec.Ngunut
9.	Genteng, bata bata	Industri kimia	Ds.Podorejo Kec.Sumbergempol, Ds.Pandansari, Ds.Sumberingin kulon Kec.Ngunut, Ds.Ngranti Kec.Boyolangu, Ds.Notorejo, Ds.Sidomulyo, Ds.Tiudan Kec.Gondang

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, 2021

2.3.2.3.1 Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang terkait dengan Urusan Perdagangan terdiri dari 7 indikator dengan capaian sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 92 Capaian Indikator TPB Urusan Perdagangan Kabupaten Tulungagung 2016-2020

Indikator TPB/SDG'S	Target (Perpres 59/2017)	Capaian/Tahun					Keterangan
		2016	2017	2018	2019	2020	
Laju pertumbuhan PDB per kapita.	Meningkat	9,02 %	7,59 %	8,02 %	7,04%	3,19 % (min)	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional
PDB per kapita	Meningkat menjadi lebih dari Rp 50 juta	Rp. 30,33 Juta	Rp. 32,64 Juta	Rp. 35,25 Juta	Rp. 37,73 Juta	Rp. 36,5 4 Juta	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional
Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun	Meningkat	n/a	n/a	7,69 % (min)	19,95 %	6,92 % (min)	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional
Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.	Meningkat	20,85 %	21,18 %	21,71 %	22,10 %	22,3 3%	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional
Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	Lebih tinggi dari pertumbuhan PDB	6,29 %	6,15 %	7,59 %	6,80%	2,04 % (min)	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional
Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.	Meningkat	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Data Belum Tersedia
Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit	Meningkat	865,7 1%	923,6 1%	996,4 5%	1100, 27%	1105 ,87%	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional

Sumber: Dokumen KLHS Kabupaten Tulungagung 2018-2023

Pada indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang telah dilaksanakan dan belum mencapai target yang telah ditentukan, bila melihat pada capaian dan targetnya masih terdapat gap (selisih kurang) yang beragam, dimana gap paling besar terdapat pada indikator Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun yang mencapai - 26,88%, sedangkan gap paling kecil terdapat pada indikator Laju pertumbuhan PDRB per kapita yang mencapai sebesar - 10,24%.

2.3.2.4 Perindustrian

Secara karakteristik industri di Kabupaten Tulungagung tumbuh dan berkembang dalam lingkup sentra industri. Hal ini dipahami sebagai dampak dari perkembangan kultural dan dinamika sosial masyarakat dalam suatu wilayah tertentu. Misalnya sentra industri logam yang terdapat di Desa Kiping Kecamatan Gondang. Sentra tersebut berkembang secara tradisional dan

kultural sebagai bentuk interaksi sosial warga masyarakat dalam rangka pengembangan perekonomian keluarga melalui usaha industri logam. Informasi yang berkembang dalam suatu daerah tertentu, yang dipandang memiliki nilai kebenaran dan peluang perbaiki masa yang akan datang itulah yang digunakan oleh masyarakat untuk memulai suatu usaha dibidang industri.

Sentra-sentra industri yang berkembang di Kabupaten Tulungagung terintegrasi secara fungsi dengan wilayah pemukiman masyarakat. Sentra tersebut tidak berkembang dalam sebuah kawasan industri, namun berkembang dalam lingkup kawasan pemukiman dengan output barang industri. Sentra industri ini mampu memberikan kontribusi besar bagi peningkatan ekonomi masyarakat dalam suatu kawasan pengembangan industri tertentu. Keberadaan sentra produk industri ini juga memudahkan Pemerintah Daerah melalui dinas yang terkait untuk melakukan pembinaan secara berkesinambungan, termasuk didalamnya adalah mengukur seberapa jauh kontribusinya bagi peningkatan ekonomi masyarakat, pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran. Berikut ini adalah tabel laju pertumbuhan ekonomi dan distribusi persentase ekonomi lapangan usaha industri pengolahan di Kabupaten Tulungagung.

Tabel 2. 93 Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi Persentase Ekonomi Lapangan Usaha Industri Pengolahan Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Laju pertumbuhan ekonomi lapangan usaha Industri Pengolahan (%)	6,29%	6,15%	7,59%	6,81%	-2,00%
2.	Distribusi persentase ekonomi lapangan usaha industri pengolahan (%)	20,85%	21,18%	21,71%	22,10%	22,33%

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, 2021

Berdasarkan tabel laju pertumbuhan ekonomi dan diatribusi persentase ekonomi lapangan usaha industri pengolahan di Kabupaten Tulungagung tahun 2016-2020 di atas dapat diketahui bahwa laju pertumbuhan ekonomi lapangan usaha industri pengolahan dari tahun 2016 hingga tahun 2020 mengalami fluktuatif. Sedangkan untuk indikator distribusi persentase ekonomi lapangan usaha industri pengolahan pada tahun 2016 hingga 2020 terus mengalami kenaikan.

Laju pertumbuhan ekonomi lapangan usaha industri mengalami penurunan dari 6,81% menjadi -2,0% atau mengalami penurunan (8,81) hal ini dikarenakan industri pengolahan mengalami kelesuan, sedangkan untuk distribusi persentase ekonomi lapangan usaha industri pengolahan mengalami kenaikan dari 22,10% menjadi 22,33% atau naik 0,23 hal ini dikarenakan sektor industri masih mampu memberikan kontribusi lebih besar pada PDRB atau ada sektor lain yang menurun.

Tabel 2. 94 Sentra Produk Industri di Kab. Tulungagung Tahun 2020

No	Nama Produk/ Komoditi	Wilayah Sentra Pengembangan
1	Anyaman Bambu	Kec. Bandung, Kec. Gondang, Kec. Pagerwojo, Kec. Pakel, Kec. Sendang dan Kec. Sumbergempol
2	Genteng	Kec. Ngunut, Kec. Gondang, Kec. Pucanglaban
3	Batu Bata Merah	Kec. Gondang, Kec. Sumbergempol, Kec. Campurdarat
4	Batu Kapur	Kec. Besuki dan Kec. Campurdarat
5	Grabah Tanah Liat	Kec. Rejotangan
6	Kerajinan Marmer/ Onyx	Kec. Campurdarat, Kec. Besuki, Kec. Pakel
7	Batik	Kec. Kauman. Kec. Kedungwaru, Kec. Ngantru, Kec. Sendang
8	Konveksi	Kec. Tulungaung, Kec. Kedungwaru, Kec. Boyolangu
9	Bordir	Kec. Tulungagung
10	Kesed	Kec. Kalidawir dan Kec. Sumbergempol
11	Peralatan Dapur dari logam	Kec. Ngunut, Kec. Gondang, Kec. Rejotangan
12	Barang dari Logam	Kec. Ngunut, Kec. Karangrejo, Kec. Kedungwaru
13	Peralatan Pertanian	Kec. Ngunut dan Kec. Gondang
14	Emping Mlinjo	Kec. Ngantru
15	Makanan Kecil/ Ringan	Kec. Tulungagung dan Kec. Sumbergempol
16	Gula Merah	Kec. Bandung dan Kec. Sumbergempol
17	Krupuk Gadung	Kec. Campurdarat
18	Krupuk Ketela	Kec. Bandung
19	Krupuk Rambak	Kec. Tulungagung
20	Mebel	Kec. Pucanglaban, Kec. Sendang dan Kec. Kedungwaru
21	Tahu	Kec. Ngunut, Kec. Kalidawir, Kec. Rejotangan dan Kec. Ngantru
22	Tempe	Kec. Gondang, Kec. Bandung, Kec. Rejotangan dan Kec. Kalidawir
23	Sangkar Burung	Kec. Boyolangu
24	Kerajinan Tali Temali	Kec. Sumbergempol
25	Keripik Gadung	Kec. Campurdarat dan Kec. Kalidawir

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, 2021

2.3.2.4.1 Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang terkait dengan Urusan Perindustrian terdiri dari 7 indikator dengan capaian sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 95 Capaian Indikator TPB Urusan Perindustrian Kabupaten Tulungagung 2016-2020

Indikator TPB/SDG'S	Target (Perpres 59/2017)	Capaian/Tahun					Keterangan
		2016	2017	2018	2019	2020	
Laju pertumbuhan PDB per kapita.	Meningkat	9,02%	7,59%	8,02%	7,04%	3,19% (min)	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional
PDB per kapita	Meningkat menjadi lebih dari Rp 50 juta	Rp. 30,33 Juta	Rp. 32,64 Juta	Rp. 35,25 Juta	Rp. 37,73 Juta	Rp. 36,54 Juta	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional
Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun	Meningkat	n/a	n/a	7,69% (min)	19,95%	6,92% (min)	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional
Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.	Meningkat	20,85 %	21,18 %	21,71 %	22,10%	22,33%	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional
Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	Lebih tinggi dari pertumbuhan PDB	6,29%	6,15%	7,59%	6,80%	2,04% (min)	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional
Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.	Meningkat	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Data Belum Tersedia
Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit	Meningkat	865,71 %	923,61 %	996,45 %	1100,2 7%	1105,8 7%	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional

Sumber: Dokumen KLHS Kabupaten Tulungagung 2018-2023

Pada indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang telah dilaksanakan dan belum mencapai target yang telah ditentukan, bila melihat pada capaian dan targetnya masih terdapat gap (selisih kurang) yang beragam, pengukuran Indikator di urusan Perindustrian sama dengan Perdagangan karena masih berada pada 1 dinas yang sama yaitu Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Tulungagung, dimana gap paling besar terdapat pada indikator Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun yang mencapai -26,88%, sedangkan gap paling kecil terdapat pada indikator Laju pertumbuhan PDRB per kapita yang mencapai sebesar - 10,24%.

2.3.3 Fokus Layanan Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan

2.3.3.1 Pemerintahan Umum

Bidang Urusan Pemerintahan Umum dalam sub bab ini dijelaskan indikator-indikator yang menjadi Indikator Kinerja Daerah (IKD) di Kabupaten Tulungagung pada tahun 2020. Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren bidang

komunikasi dan informatika, untuk indikator Indeks Pembangunan Masyarakat dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung mulai tahun 2019, sedangkan untuk tahun 2016-2018 belum dilaksanakan penghitungan untuk indikator tersebut. Adapun berdasarkan hasil penghitungan, realisasi indikator Indeks Pembangunan Masyarakat tahun 2020 adalah sebesar 0,717 yang dapat dikategorikan meningkat apabila dibandingkan dengan realisasi pada tahun sebelumnya.

Tabel 2. 96 Indikator Bidang Pemerintahan Umum Tahun 2016-2020

IKD Bidang Urusan Pemerintahan Umum	2016	2017	2018	2019	2020
Indeks Reformasi Birokrasi	n/a	62,42	63,57	65,00	66,09
Indeks Pembangunan Masyarakat	n/a	n/a	n/a	0,673	0,717
Nilai SAKIP Kabupaten	70,03	70,95	72,83	75,83	76,80
Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	n/a	n/a	29	51,59	55,40
Indeks Pelayanan Publik	n/a	n/a	2,56	3,93	3,92

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Tulungagung pada tahun 2019 mengalami kenaikan yaitu 65.00 dari tahun sebelumnya yaitu 63.57. Hal ini memberikan tanda bahwa Kabupaten Tulungagung secara kualitas reformasi birokrasi semakin baik.

Selanjutnya pada indikator nilai SAKIP, Kabupaten Tulungagung pada tahun 2016 hingga 2019 mengalami kenaikan. Hal ini sama artinya bahwa kualitas akuntabilitas kinerja pemerintah Kabupaten Tulungagung semakin tahun semakin berkualitas. Indikator Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Tulungagung mulai dihitung capaiannya pada tahun 2018, dan pada tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 55,40 jika dibandingkan tahun 2019 yang hanya sebesar 51,59. Sedangkan pada indikator yang terakhir yaitu Indeks Pelayanan Publik di Kabupaten Tulungagung mulai dihitung capaiannya pada tahun 2018, dan pada tahun 2020 capaiannya sebesar 3,92.

2.3.3.1.1 Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang terkait dengan Urusan Bidang Pemerintahan Umum terdiri dari 8 indikator dengan capaian sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 97 Capaian Indikator TPB Urusan Bidang Pemerintah Umum Kabupaten Tulungagung 2016-2020

Indikator TPB/SDG's	Target (Perpres 59/2017)	Capaian/Tahun					Keterangan
		2016	2017	2018	2019	2020	
Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)	Meningkat menjadi: Kementerian/Lembaga: 85%, Provinsi: 75%, Kabupaten/Kota : 50%	70,03 3 (BB)	70,95 5 (BB)	72,83 3 (BB)	75,83 3 (BB)	76,80 0 (BB)	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional

Indikator TPB/SDG's	Target (Perpres 59/2017)	Capaian/Tahun					Keterangan
		2016	2017	2018	2019	2020	
Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	Menjadi menjadi 80%	63,9 6%	39,9 4%	39,0 0%	55,1 4%	46,1 7%	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional
Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	Meningkat menjadi 4,0	n/a	3,71	3,66	3,7	3,84	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional
Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Meningkatk menjadi: Kementerian/Le mbaga 75%, Provinsi: 60%, Kabupaten/Kota : 45%	n/a	62,4 2 (B)	63,5 7 (B)	65,0 6 (B)	66,0 9 (B)	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional
Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Meningkat menjadi: Kementerian: 100%, Lembaga: 100%, Provinsi: 100%, Kabupaten/Kota : 80%	n/a	41,9 2%	97,1 1%	n/a	n/a	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional
Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Tidak ada	0	0	0	0	0	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional
Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	0	0	0	0	0	0	Indikator Belum Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional
Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	0	0	0	0	0	0	Indikator Belum Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional

Sumber: Dokumen KLHS Kabupaten Tulungagung 2018-2023

Berdasarkan tabel mengenai capaian indikator TPB untuk urusan Bidang Pemerintahan Umum di Kabupaten Tulungagung di atas dapat diketahui bahwa mayoritas indikator memiliki capaian yang belum memenuhi target yang ada. Disamping itu juga terdapat indikator yang sudah tercapai. Hal-hal seperti ini yang juga harus menjadi perhatian penting bagi Kabupaten Tulungagung untuk meningkatkan indikator TPB Bidang Pemerintahan Umum.

2.3.3.2 Penunjang Keuangan

Dalam sub bab ini dijelaskan indikator-indikator yang menjadi Indikator Kinerja Daerah (IKD) dalam bidang penunjang keuangan, sebagaimana terdapat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2. 98 Indikator Bidang Penunjang Keuangan Tahun 2016-2020

IKD Bidang Penunjang Keuangan	2016	2017	2018	2019	2020
Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WDP	WTP
Rasio PAD terhadap total pendapatan	13,33	19,36	15,94	18,34	19,65

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator rasio PAD terhadap total pendapatan di tahun 2020 mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan tahun 2019. Meskipun di tahun 2020 terjadi Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan penurunan realisasi di sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Akan tetapi, Pemerintah Kabupaten Tulungagung berhasil mengoptimalkan penerimaan dari sektor hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, sehingga terjadi kenaikan sebagaimana tercantum di atas. Kenaikan ini secara spesifik berasal dari bagian laba atas penyertaan modal dan perusahaan milik daerah (BUMD) dan swasta. Hasil pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Dr. ISKAK Tulungagung serta Dana Kapitasi JKN pada FKTP.

Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang terkait dengan Urusan Penunjang Keuangan terdiri dari 2 indikator dengan capaian sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 99 Capaian Indikator TPB Urusan Penunjang Keuangan Kabupaten Tulungagung 2016-2020

Indikator TPB/SDG's	Target (Perpres 59/2017)	Capaian/Tahun					Keterangan
		2016	2017	2018	2019	2020	
Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	Di atas 12%	0,22 %	0,26 %	0,26 %	0,26 %	0,24 %	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional
Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	Meningkat	2,59 %	3,33 %	3,72 %	3,93 %	3,53 %	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional

Sumber: KLHS Kabupaten Tulungagung, 2021

Berdasarkan tabel mengenai capaian indikator TPB untuk urusan Penunjang Keuangan di Kabupaten Tulungagung di atas dapat diketahui bahwa semua indikator memiliki capaian yang belum memenuhi target yang ada. Hal-hal seperti ini yang juga harus menjadi perhatian penting bagi Kabupaten Tulungagung untuk meningkatkan indikator TPB penunjang keuangan.

2.3.3.3 Perencanaan

Indikator yang menggambarkan kinerja urusan perencanaan yaitu persentase keselarasan RKPD dan RPJMD dan indikator persentase laporan pelaksanaan program pembangunan yang selesai tepat waktu selalu konsisten tercapai di setiap tahunnya. Namun demikian untuk Indikator dalam urusan Perencanaan yaitu indikator Persentase keselarasan Rencana Kerja PD dengan RPJMD di lingkup Bidang

Pembangunan Manusia dan Masyarakat, Persentase aspirasi masyarakat yang tertampung dalam dokumen perencanaan di lingkup Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat, Persentase keselarasan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan RPJMD di lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Persentase aspirasi masyarakat yang tertampung dalam dokumen perencanaan di lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Persentase keselarasan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan RPJMD di lingkup Bidang Ekonomi dan Persentase aspirasi masyarakat yang tertampung dalam dokumen perencanaan di lingkup Bidang Ekonomi merupakan indikator kinerja yang baru dilaksanakan pada tahun 2018 dan tahun 2019 sehingga di tahun-tahun sebelumnya belum terdapat realisasi kinerjanya

Tabel 2. 100 Indikator Urusan Perencanaan Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase keselarasan RKPD dengan RPJMD	100	100	100	100	100
Persentase laporan pelaksanaan program pembangunan yang selesai tepat waktu	75	75	75	75	100
Persentase keselarasan Rencana Kerja PD dengan RPJMD di lingkup Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	n/a	n/a	n/a	100	100
Persentase aspirasi masyarakat yang tertampung dalam dokumen perencanaan di lingkup Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	n/a	n/a	n/a	94,66	82,90
Persentase keselarasan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan RPJMD di lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	n/a	n/a	n/a	100	100
Persentase aspirasi masyarakat yang tertampung dalam dokumen perencanaan di lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	n/a	n/a	n/a	100	100
Persentase keselarasan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan RPJMD di lingkup Bidang Ekonomi	n/a	n/a	n/a	100	100
Persentase aspirasi masyarakat yang tertampung dalam dokumen perencanaan di lingkup Bidang Ekonomi	n/a	n/a	n/a	90	84,9

Sumber: LKPJ Kabupaten Tulungagung, 2021

2.3.3.4 Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan pengembangan (Research and Development) berperan penting dalam mendorong perkembangan dan kemajuan suatu daerah. Hasil kelitbangan yang akurat dalam bentuk konsep, model, skenario, maupun pilihan kebijakan yang tepat dapat direkomendasikan untuk mengatasi berbagai masalah yang timbul di suatu daerah hingga solusi dalam rangka meningkatkan produktivitas di berbagai sektor pembangunan. Sehingga memang sangat diperlukan para pengambil kebijakan di lingkup pemerintahan baik pusat dan daerah terlebih dulu melakukan kegiatan kajian/penelitian sebelum merumuskan, membuat, dan menetapkan suatu tindakan (policy).

Urusan penelitian dan pengembangan yang ada di Kabupaten Tulungagung terdiri dari beberapa indikator yang diantaranya yaitu

persentase hasil penelitian yang dapat dijadikan bahan perumusan kebijakan dan Indeks Inovasi Daerah. Lebih rincinya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 101 Indikator Urusan Kelitbangan Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Hasil Penelitian yang dapat dijadikan Bahan Perumusan Kebijakan	100%	100%	100%	100%	100%
Indeks Inovasi Daerah	n/a	n/a	n/a	580 (inovatif)	1012 (sangat inovatif)

Sumber: Bappeda Kabupaten Tulungagung, 2021

Berdasarkan tabel diatas, indikator persentase hasil penelitian yang dapat dijadikan bahan perumusan kebijakan pada tahun 2020 telah 100% ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam pengambilan kebijakan sebagai bahan dalam perencanaan pembangunan daerah dan hal ini telah sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah dimana kelitbangan harus berdasarkan pada visi, misi, arah kebijakan, strategi, kebutuhan daerah dan sektor unggulan daerah serta penggalian sumber daya alam lokal Kabupaten Tulungagung.

Berdasarkan jumlah kajian yang telah dilakukan pada tahun 2020 yaitu terdapat 3 (tiga) kajian diantaranya Penyusunan Dokumen Naskah Akademik Usulan Geopark Tulungagung yang telah diterima oleh Kementerian ESDM dan siap untuk ditetapkan sebagai Geopark Nasional, selanjutnya Studi Kelayakan Rencana Pelayanan Air Minum IKK Besuki dan Sekitarnya serta Kajian Rencana Pengembangan Wisata Pantai di Desa Besuki yang telah dieksekusi oleh Perangkat Daerah terkait dan investor untuk pengembangan kawasan wisata untuk meningkatkan perkembangan Kabupaten Tulungagung dan sekitarnya.

Sedangkan untuk indicator Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 juga mengalami peningkatan dari Tahun 2019 yaitu naik sebesar 423 atau 74,5% menjadi 1012 dengan kategori “sangat inovatif” yang sebelumnya pada tahun 2019 hanya mendapatkan skor 580 dengan kategori “inovatif”.

2.3.3.5 Kesatuan Bangsa dan Politik

Indikator yang menggambarkan kinerja urusan Kesatuan Bangsa dan Politik terbagi menjadi 2 pembahasan antara lain indikator politik yang terdiri dari jumlah partai politik, jumlah anggota DPRD, dan tingkat partisipasi pemilih. Sedangkan untuk indicator kesatuan bangsa terdiri dari Jumlah Organisasi Masyarakat, Jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat, Jumlah Suku Bangsa, Jumlah Kejadian Potensi Konflik, Jumlah Kelompok Penghayatan / Alur Kepercayaan.

Nilai tingkat partisipasi pemilih mengalami peningkatan, partisipasi pemilih dinilai tidak hanya saat pemilihan umum serentak kepala daerah

melainkan juga pemilihan kepala desa yang masing – masing desa memiliki waktu dan periode masing-masing hal ini terlihat pada tahun 2018 tingkat partisipasi pemilih sebesar 70,56 naik pada tahun 2019 dan 2020 menjadi 72,11. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat untuk berperan aktif dalam menyampaikan hak politiknya meningkat.

Tabel 2. 102 Indikator Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Partai Politik	11	11	11	11	11
Jumlah Anggota DPRD	50	50	50	50	50
Tingkat Partisipasi Pemilih	70,56	70,56	70,56	72,11	72,11
Jumlah Organisasi Masyarakat	65	65	67	68	68
Jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat	79	79	79	79	79
Jumlah Suku Bangsa	7	7	7	7	7
Jumlah Kejadian Potensi Konflik	1	1	1	2	2
Jumlah Kelompok Penghayatan / Alur Kepercayaan	7	7	7	7	7

Sumber: Bakesbangpol Kabupaten Tulungagung, 2021

2.4 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan dan unggulan daerah. Suatu daya saing merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Aspek Daya Saing Daerah dibagi menjadi 4 fokus, yakni fokus kemampuan ekonomi daerah, fokus fasilitas wilayah/infrastruktur, fokus iklim berinvestasi, serta fokus sumberdaya manusia.

2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Pada fokus kemampuan ekonomi daerah di Kabupaten Tulungagung, disajikan data mengenai persentase pengeluaran rata-rata perkapita sebulan menurut golongan pengeluaran dan Pengeluaran Rata-rata Perkapita Sebulan Menurut Kelompok Bukan Makanan, adapun penyajian data tersebut sebagai berikut:

2.4.1.1 Rata-Rata Pengeluaran Per kapita Per bulan Menurut Kelompok Komoditas

Rata-rata pengeluaran perkapita menurut kelompok komoditi digunakan untuk melihat pola pengeluaran penduduk yang dapat digunakan untuk menilai tingkat kesejahteraan sebagai dasar pengambilan kebijakan oleh pemerintah. Rata-rata pengeluaran perkapita menurut kelompok komoditi menunjukkan proporsi pengeluaran menurut kelompok komoditi terhadap total pengeluaran.

Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan menurut kelompok komoditas yang dibagi menjadi 2 kelompok yaitu konsumsi makanan dan konsumsi bukan makanan. Kelompok konsumsi makanan adalah pengeluaran untuk makanan. Sedangkan kelompok konsumsi bukan makanan adalah persentase dari rupiah pengeluaran rata-rata perkapita dalam sebulan pada masyarakat di Kabupaten Tulungagung yang digolongkan berdasarkan kelompok bukan makanan seperti pengeluaran rumah tangga dan fasilitas rumah tangga, hingga pengeluaran keperluan upacara dan pesta.

Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan menurut komoditas di Kabupaten Tulungagung sebagaimana terdapat dalam tabel di 2.75 ini.

Tabel 2. 103 Rata-rata Pengeluaran perkapita Sebulan menurut Kelompok Komoditas di Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020 (Rupiah)

Kelompok Komoditas	2016	2017	2018	2019	2020
Makanan	399.428	498.109	442.533,57	447.334,60	504.173,00
Bukan Makanan	428.845	399.672	468.361,72	449.239,63	528.687,00
Total	828.273	897.781	910.895,29	896.574,23	1.032.860,00

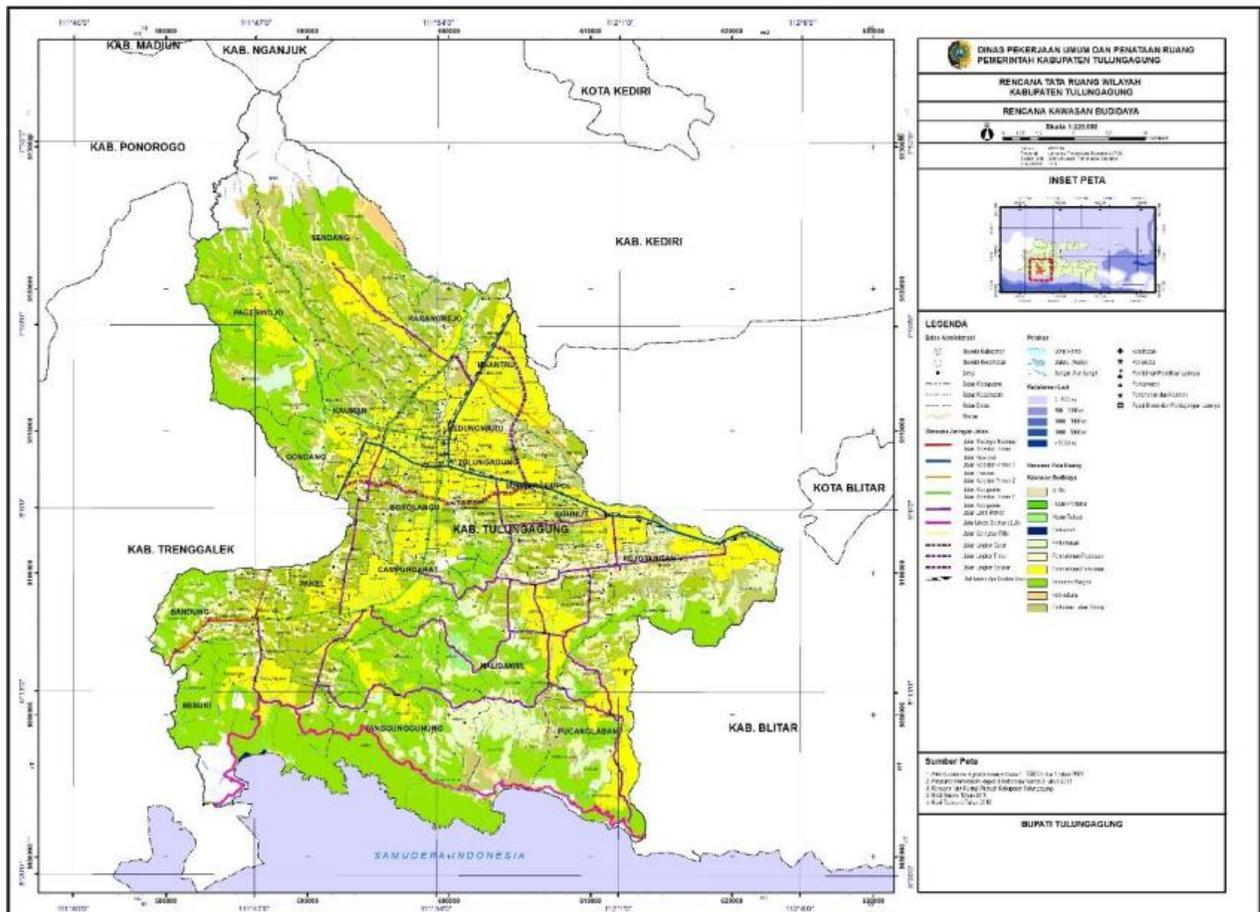
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, 2021

2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Pada fokus fasilitas wilayah/infrastruktur di Kabupaten Tulungagung, disajikan data mengenai, luas Kawasan produktif, Wilayah perkotaan dan Kawasan rawan bencana, jumlah perumahan rakyat dan kawasan kumuh, persentase jalan dalam kondisi baik hingga jumlah kantor bank menurut jenis untuk menggambarkan kondisi fasilitas wilayah maupun infrastruktur di Kabupaten Tulungagung, adapun penyajian data tersebut sebagai berikut:

2.4.2.1 Luas Kawasan Produktif

Luas kawasan produktif merujuk pada rencana pola ruang khususnya rencana kawasan peruntukan budidaya yang terdapat pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulungagung. Sesuai dengan dokumen Revisi RTRW Tahun 2018-2032, luas kawasan produktif terdiri dari Kawasan Hutan Produksi (tetap) seluas 31.553,87 Ha, Kawasan Hutan Rakyat seluas 430,50 Ha, Kawasan Pertanian Tanaman Pangan (Lahan Basah) seluas 16.503,06 Ha, Kawasan Pertanian Tanaman Pangan (Lahan Kering) seluas 6.097,17 Ha, Kawasan Hortikultura seluas 1.273,97 Ha, Kawasan Perkebunan seluas 4.274,73 Ha, Kawasan Perikanan Budidaya seluas 36,06 Ha, Kawasan Pertambangan dan Energi (Mineral Logam) seluas 52.080,94 Ha dan Kawasan Pertambangan dan Energi (Mineral Bukan Logam/Batuan) seluas 53.797,47 Ha. Secara lebih detail, luas kawasan produktif tersebut tergambar dalam Peta Rencana Pola Ruang.



Gambar 2. 7 Kawasan Produktif Kabupaten Tulungagung

Sumber: Revisi RTRW Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 - 2023

2.4.2.2 Luas Wilayah Perkotaan

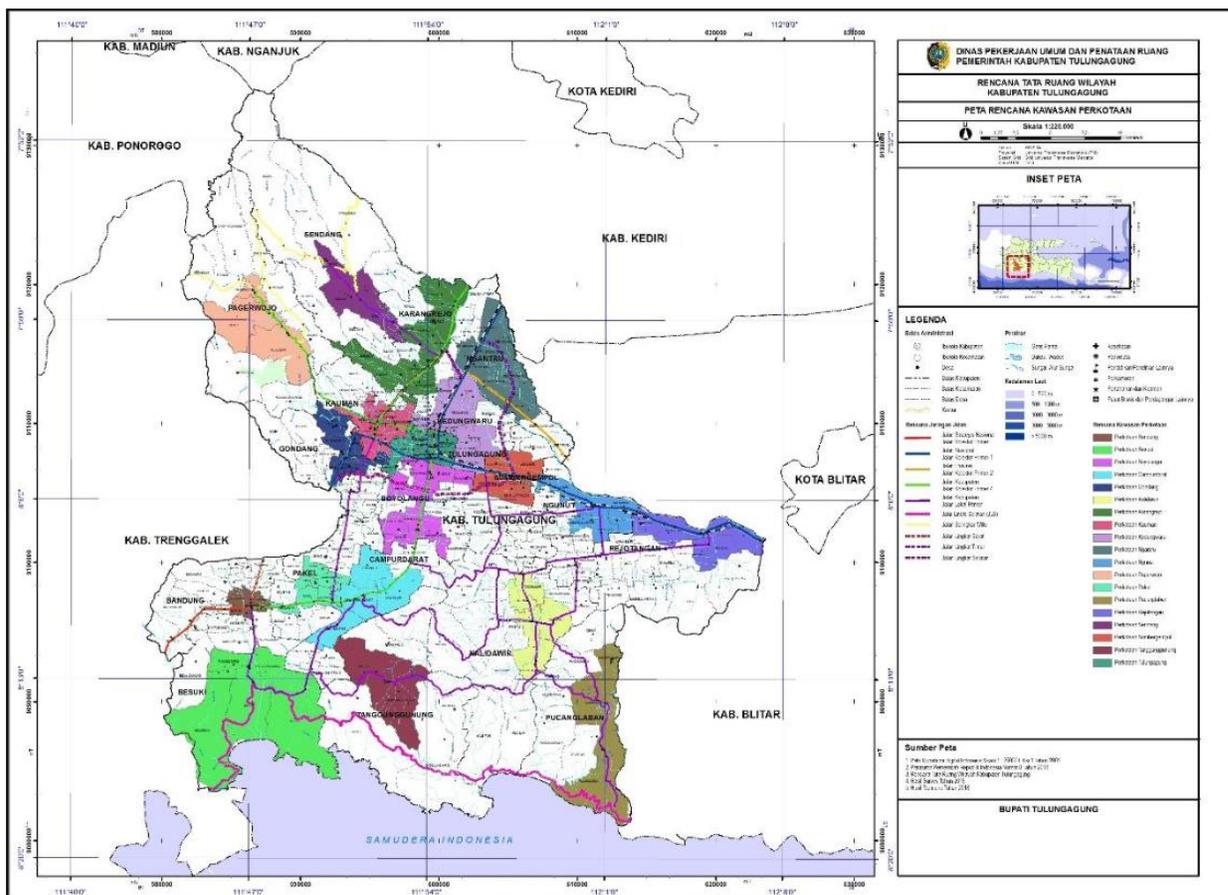
Kota yang baik harus disokong infrastruktur dan saling terhubung dengan kota-kota lainnya (linked cities). Hal ini untuk mendorong kota menjadi lebih produktif dan berdaya saing dengan tata kelola yang baik dengan menciptakan sistem jejaring kota (network cities) khususnya di banyak wilayah-wilayah pertumbuhannya. Hal ini terkait dengan mayoritas perekonomian yang terjadi di perkotaan.

Pusat kegiatan perkotaan di Kabupaten Tulugagung ditentukan oleh analisis kebijakan dan struktur ruang sehingga dapat ditentukan pusat kegiatan dan wilayah pelayanan dalam skala kabupaten. Untuk membentuk pusat kegiatan yang terintegrasi di Tulungagung dengan:

- Pengembangan dan pemantapan Perkotaan Tulungagung sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) sekaligus berfungsi sebagai ibukota kabupaten;
- Pengembangan perkotaan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dengan fungsi pusat distribusi di Kecamatan Bandung dan Kecamatan Ngunut;
- Pengembangan perkotaan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) lainnya di Kecamatan Pucanglaban, Kalidawir, Tanggunggunung, Besuki, Karangrejo, Campurdarat, Boyolangu, Rejotangan, Sumbergempol, Gondang, Kauman, Ngantru, Pagerwojo dan Sendang.
- Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) yang merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala

antardesa pada desa-desa pusat pertumbuhan di masing-masing kecamatan.

Wilayah perkotaan di Kabupaten Tulungagung diidentifikasi dari Kawasan permukiman yang terdapat di perkotaan dan perdesaan. Kawasan permukiman perkotaan seluas 25.395,94 Ha. Sementara Kawasan permukiman perdesaan seluas 10.308,48 Ha. Sarana dan prasarana yang menjadi fasilitas penunjang perkotaan seperti fasilitas kesehatan, fasilitas peribadatan, fasilitas pendidikan, dan perniagaan berdasarkan tingkatan pelayanan (skala pelayanan). Skala pelayanan yang dimaksud dibagi dalam tingkatan kabupaten/kota, kecamatan, lingkungan, dan Rukun Warga (RW). Skala pelayanannya tergantung pada kebutuhan fasilitas yang didukung oleh jumlah penduduk pendukung fasilitas tersebut. Pengembangan fasilitas di Kawasan Kabupaten Tulungagung ditentukan berdasarkan fungsi kawasan, Fungsi kawasan ditentukan berdasarkan sistem perkotaan, masing-masing sistem kota memiliki fungsi yang berbeda-beda sehingga kebutuhan akan fasilitas juga akan berbeda-beda.



Gambar 2. 8 Kawasan Perkotaan Kabupaten Tulungagung

Sumber: Revisi RTRW Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 - 2023

2.4.2.3 Kawasan Rawan Bencana

Posisi geografis Kabupaten Tulungagung yang membentang dari utara ke selatan merupakan wilayah dengan karakteristik pegunungan hingga pesisir pantai. Kondisi tersebut menjadikan Kabupaten Tulungagung berpotensi beberapa jenis bencana. Bencana alam yang sering terjadi meliputi fenomena bencana geologi (gempabumi, tsunami, dan gerakan

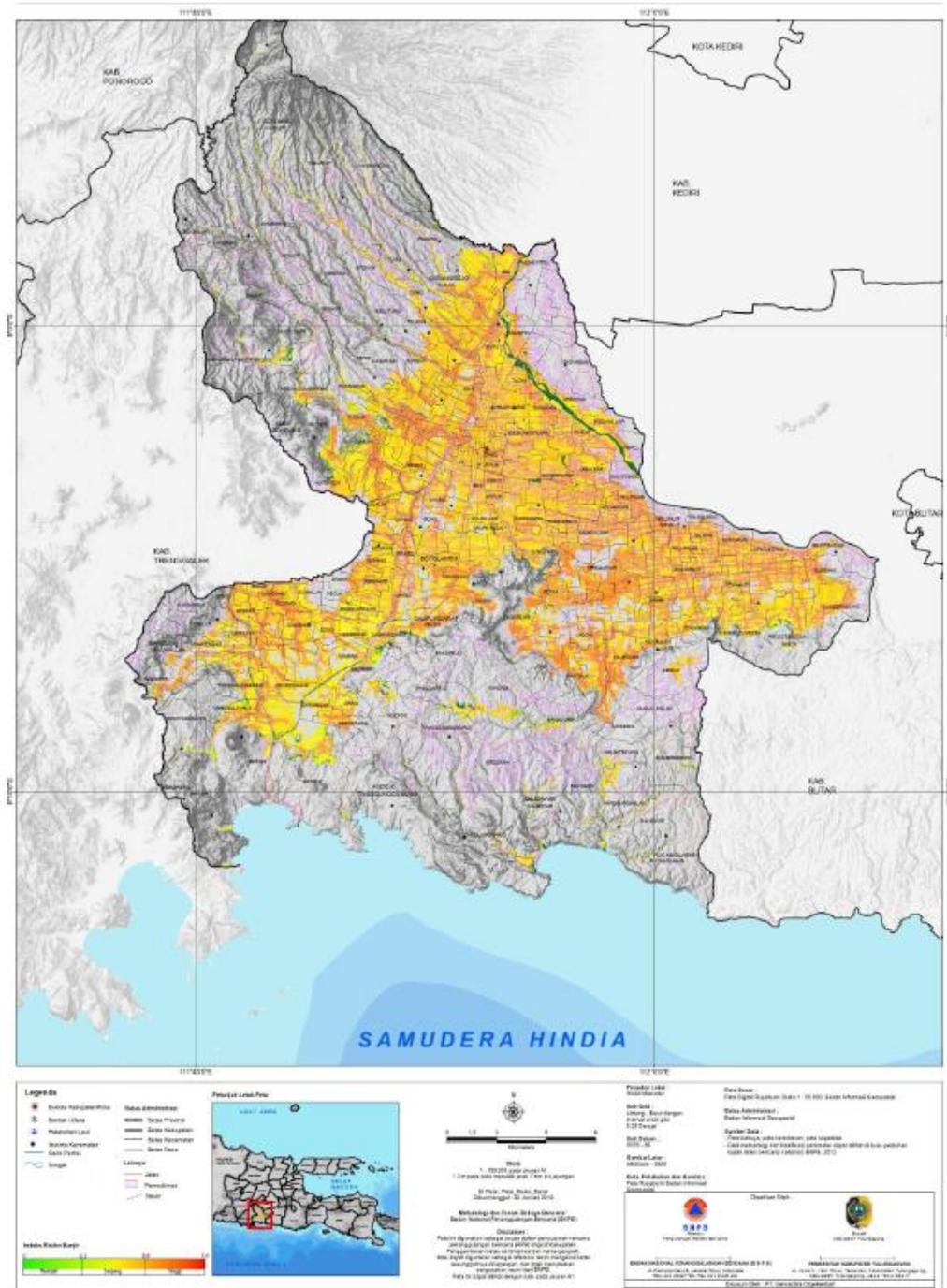
tanah) maupun bencana akibat hidrometeorologi (banjir, banjir bandang, tanah longsor, kekeringan, cuaca ekstrim/angin puting beliung dan kebakaran hutan dan lahan), sehingga memerlukan adanya upaya penanggulangan bencana.

Potensi bencana di atas kemudian disajikan dalam peta resiko bencana. Peta risiko bencana merupakan peta petunjuk zonasi tingkat risiko satu jenis ancaman bencana pada suatu daerah pada waktu tertentu yang merupakan hasil perpaduan antara peta bahaya dan peta kerentanan. Dalam penyusunan peta risiko bencana dapat dilakukan dengan melakukan overlay peta bahaya, peta kerentanan dan peta kapasitas.

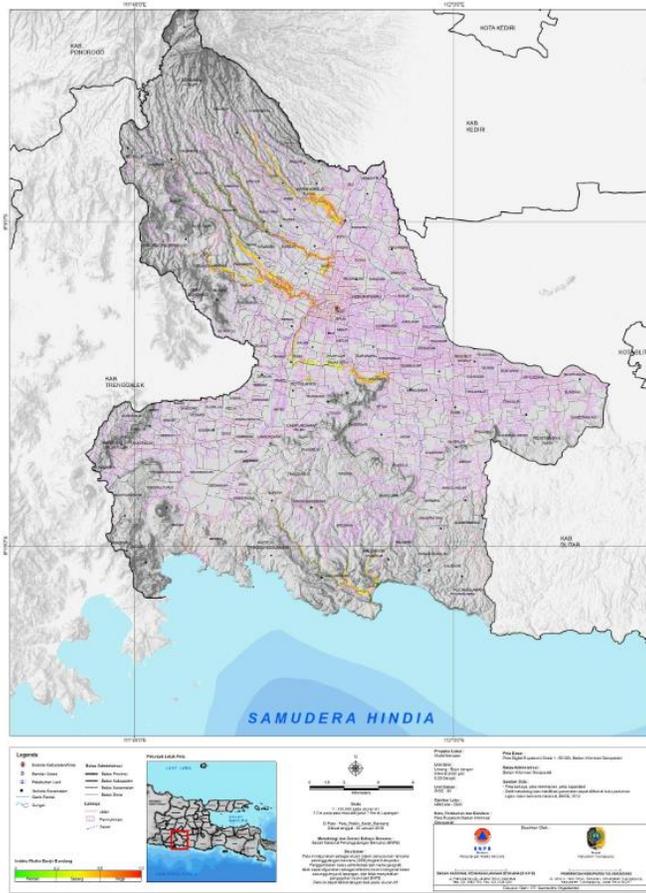
Untuk mendapatkan peta risiko bencana di Kabupaten Tulungagung maka dapat disesuaikan dan disusun berdasarkan penggabungan dan pengolahan peta ancaman, peta kerentanan dan peta kapasitas. Namun dalam penyusunan peta risiko bencana untuk tiap jenis ancaman bencana yang mengancam daerah Kabupaten Tulungagung dapat dilakukan setelah peta ancaman selesai. Peta risiko telah dipersiapkan berdasarkan grid indeks atas peta ancaman, peta kerentanan dan peta kapasitas.

Beberapa hal yang menjadi perhatian dalam penyusunan peta resiko bencana antara lain:

- Memenuhi aturan tingkat kedetailan analisis, kedalaman analisis di tingkat kabupaten/kota minimal hingga tingkat kelurahan/desa/kampung/nagari (skala peta minimal adalah 1:50.000 untuk Kabupaten Tulungagung
- Dapat digunakan untuk menghitung jumlah penduduk terpapar bencana (dalam jiwa).
- Dapat digunakan untuk menghitung kerugian harta benda, (dalam rupiah) dan kerusakan lingkungan.
- Menggunakan 3 kelas interval tingkat risiko, yaitu tingkat risiko tinggi, sedang dan rendah.
- Menggunakan GIS dalam pemetaan risiko bencana.

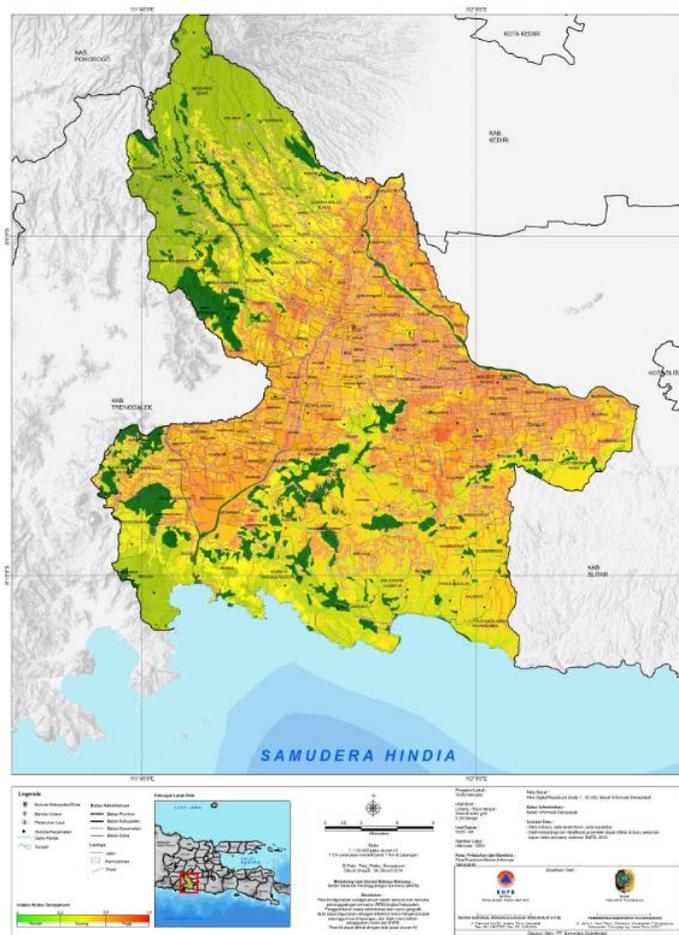


Gambar 2. 9 Kawasan Resiko Banjir Kabupaten Tulungagung
Sumber: KRB Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 – 2023



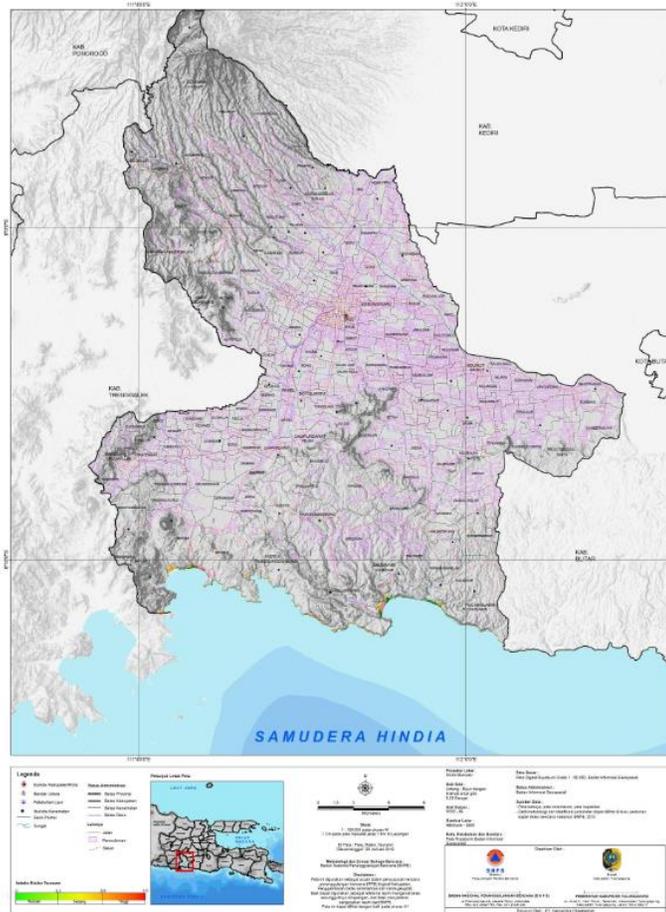
Gambar 2. 10 Kawasan Resiko Banjir Bandang

Sumber: KRB Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 – 2023



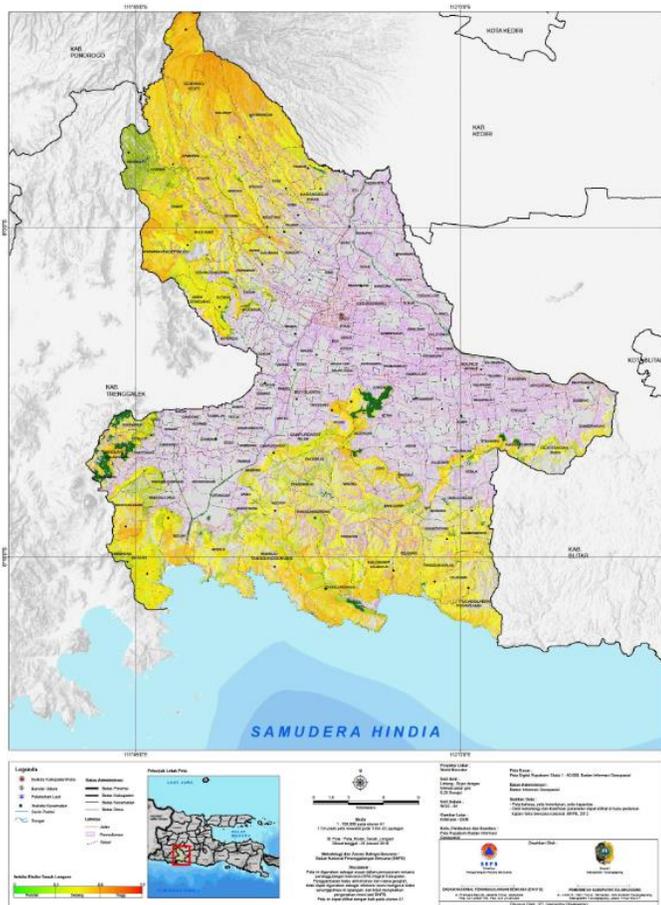
Gambar 2. 11 Kawasan Resiko Gempa Bumi

Sumber: KRB Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 – 2023



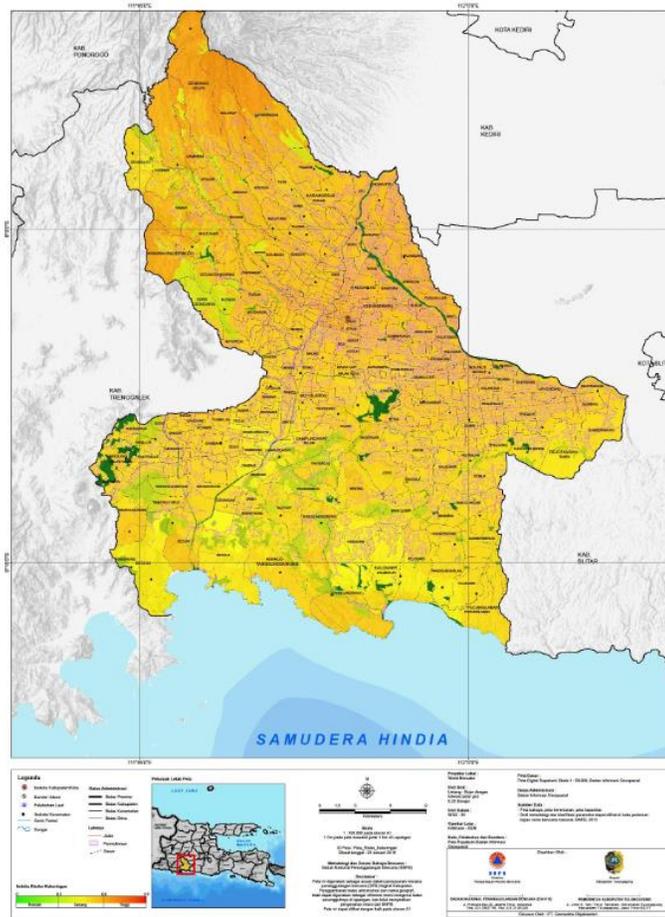
Gambar 2. 12 Kawasan Resiko Tsunami

Sumber: KRB Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 – 2023



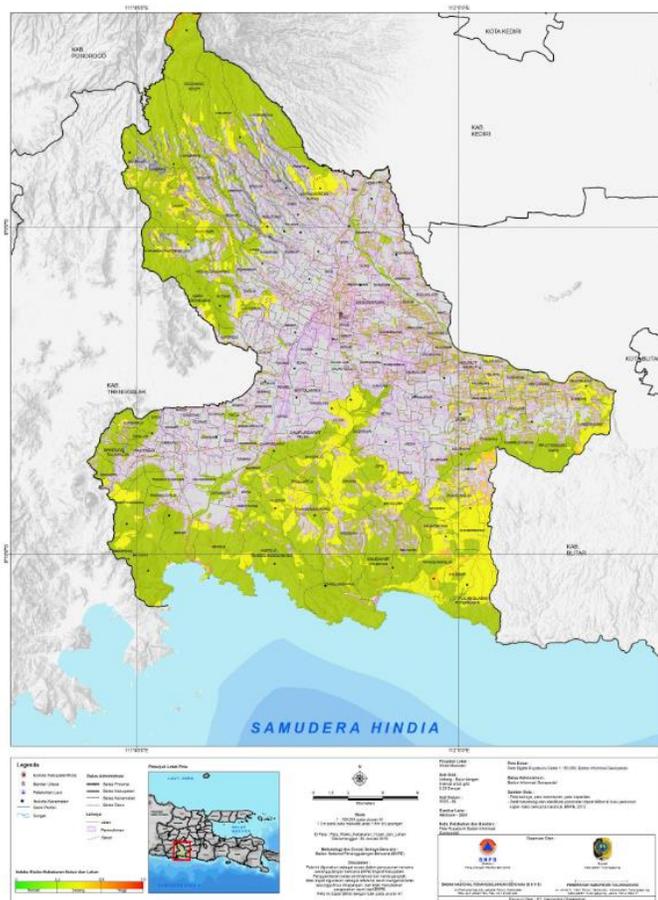
Gambar 2. 13 Kawasan Resiko Tanah Longsor

Sumber: KRB Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 – 2023



Gambar 2. 14 Kawasan Resiko Tanah Kekeringan

Sumber: KRB Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 – 2023



Gambar 2. 15 Kawasan Resiko Kebakaran Hutan dan Lahan

Sumber: KRB Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 – 2023

2.4.2.4 Jumlah Perumahan Rakyat dan Kawasan Kumuh

Perumahan rakyat merupakan indikator di dalam fokus infrastruktur daerah yang mana indikator ini menggambarkan mengenai seberapa besar jumlah perumahan rakyat yang ada di Kabupaten Tulungagung. Ketika kondisi jumlah perumahan rakyat meningkat dari tahun ke tahun maka dapat dikatakan bahwa Kabupaten Tulungagung mengalami peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan. Berikut merupakan kondisi jumlah perumahan rakyat dan kawasan kumuh di Kabupaten Tulungagung.

Tabel 2. 104 Jumlah Perumahan Rakyat di Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2019

Kecamatan	2016	2017	2018	2019
Besuki	13.859	13.859	10.817	10.817
Bandung	12.493	12.493	4.812	4.812
Pakel	11.370	11.370	3.001	3.001
Campurdarat	15.097	15.097	14.056	14.056
Tanggunggunung	7.349	7.349	8.011	8.011
Kalidawir	20.332	20.332	20.313	20.313
Pucanglaban	6.890	6.890	7.589	7.589
Rejotangan	17.653	17.653	21.270	21.270
Ngunut	20.017	20.017	20.732	20.732
Sumbergempol	17.064	17.064	17.389	17.389
Boyolangu	23.248	23.248	21.623	21.623
Tulungagung	18.649	18.649	14.214	14.214
Kedungwaru	20.964	20.964	22.273	22.273
Ngantru	13.858	13.858	15.660	15.660
Karangrejo	10.713	10.713	11.824	11.824
Kauman	12.657	12.657	13.276	13.276
Gondang	12.767	12.767	15.910	15.910
Pagerwojo	8.003	8.003	8.643	8.643
Sendang	13.458	13.458	13.860	13.860
Jumlah	276.441	276.441	265.273	265.273

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah perumahan rakyat per kecamatan di Kabupaten Tulungagung pada tahun 2016 sampai dengan 2017 berjumlah sama yang artinya tidak terjadi penambahan. Sedangkan pada tahun 2018 mengalami penurunan. Sedangkan pada tahun 2019 mengalami kesamaan pada tahun 2019.

2.4.2.5 Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik

Panjang jalan dalam kondisi baik menunjukkan panjang jalan yang merupakan kewenangan kabupaten yang telah diaspal dalam kondisi baik. Semakin tinggi persentase maka dapat menunjang aktivitas daerah dalam segala aspek, berikut merupakan data yang dimaksud.

Tabel 2. 105 Panjang Jalan dalam Kondisi Baik di Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020

Tahun	Panjang Jalan Kabupaten	Panjang Jalan dalam Kondisi Baik	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik (%)
2016	1.701,59 Km	1.242,16 Km	73,00%
2017	2.063,45 Km	1.547,59 Km	75,00%
2018	1.831,48 Km	1.419,21 Km	77,49%
2019	1.775,21 Km	1.388,74 Km	78,23%
2020	1.775,21 Km	1.388,74 Km	78,23%

Sumber: Dinas PUPR, 2021

2.4.2.6 Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan merupakan perbandingan antara panjang jalan yang ada di Kabupaten Tulungagung dengan jumlah kendaraan yang ada. Perbandingan ini melihat bagaimana kondisi jalan dan kendaraan yang ada sebagai acuan dalam mengendalikan keramaian pengguna kendaraan di setiap daerah di Kabupaten Tulungagung. Data rasio panjang jalan per jumlah kendaraan adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 106 Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 - 2020

Tahun	Panjang Jalan Beraspal (Km)	Jumlah Kendaraan (Unit)	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan
2016	1.545,27	669.383	0,0023
2017	1.651,97	708.536	0,0023
2018	1.391,26	793.563	0,0017
2019	1.341,58	720.188	0,0018
2020	1.319,91	691.988	0,0019

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, 2021

2.4.2.7 Jumlah Listrik Kilowatt (KWH) Pemakaian Menurut Penggunaan

Jumlah listrik Kilowatt (KWA) pemakaian menurut penggunaan di Kabupaten Tulungagung merupakan jumlah KWH yang terdata dan diklasifikasikan berdasarkan jenis pelanggan. Berikut merupakan data yang dimaksud.

Tabel 2. 107 Jumlah Listrik Kilowatt (KWH) Pemakaian Menurut Pengguna di Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 - 2020

Pelanggan	2016	2017	2018	2019	2020
Rumah Tangga	332.121.6 92	562.399.1 46	334.024.6 59	353.024.2 98	384.664.5 60
Kantor	4.978.510	5.443.146	5.062.668	5.387.622	5.504.354
Sosial	16.892.05 4	26.066.05 8	20.369.32 9	22.610.72 7	22.140.94 3
Usaha	54.435.53 8	120.377.6 22	66.340.88 8	70.084.53 6	71.802.97 7
Industri	61.335.97 6	69.118.44 0	69.474.69 4	74.125.21 1	71.236.15 5

Pelanggan	2016	2017	2018	2019	2020
Penerangan Jalan	14.394.77	15.566.22	16.221.75	16.460.20	16.658.11
	2	1	8	9	5
PJ Liar	0	0	0	0	0

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, 2021

Berdasarkan data pada tabel diatas dapat diketahui bahwa mayoritas Listrik teralirkan di Kabupaten Tulungagung terpasang pada pelanggan rumah tangga. Listrik yang dialirkan ke sektor-sektor yang ada mempunyai nilai yang fluktuatif, sedangkan jumlah KWH pada PJ liar dapat diberantas menjadi 0 KWH sejak tahun 2016.

2.4.2.8 Jumlah Hotel

Jumlah Hotel di Kabupaten Tulungagung merupakan bagian penting dalam hal. Semakin besar suatu daerah akan membutuhkan berbagai macam seiring dengan tingginya lalu-lintas barang dan manusia. Jumlah Hotel di Kabupaten Tulungagung terakhir pada tahun 2019 adalah sebanyak 31 hotel. Data yang menunjukkan jumlah hotel di Kabupaten Tulungagung dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2. 108 Jumlah Hotel di Kabupaten Tulungagung
Tahun 2016-2020**

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Hotel	24	28	29	31	31

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, 2021

2.4.2.9 Kantor Bank

Kantor Bank menurut jenis di Kabupaten Tulungagung dipisahkan berdasarkan jenis kantor antara lain Kantor Pusat, Kantor Cabang, hingga payment point dan ATM yang tersebar di Kabupaten Tulungagung. Berikut merupakan data yang dimaksud.

**Tabel 2. 109 Kantor Bank Menurut Jenis di Kabupaten Tulungagung
Tahun 2016-2020**

Jenis Kantor	2016	2017	2018	2019	2020
Kantor Pusat	10	10	10	10	10
Kantor Cabang	13	13	13	13	7
Kantor Cabang Pembantu	39	40	40	54	54
Kantor Kas	5	54	54	74	74
Kantor Unit	-	-	-	3	3
Kantor Mobil	3	3	3	2	2
Payment Point	4	1	1	6	6
ATM	156	165	165	213	213

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, 2021

Berdasarkan data pada tabel diatas, diketahui terdapat 10 kantor pusat yakni Bank Perkreditan Rakyat. Beberapa jenis kantor bank mengalami

peningkatan yang signifikan pada tahun 2019, diantaranya adalah kantor cabang pembantu, kantor kas, payment point dan ATM. Jumlah seluruh unit kantor bank pada data diatas terdiri dari seluruh bank yang beredar dalam dunia perbankan sesuai dengan Bank Indonesia.

2.4.3 Fokus Iklim Investasi

Pada Fokus Iklim Investasi di Kabupaten Tulungagung, disajikan data mengenai angka kriminalitas dan penerimaan pajak pusat di Kabupaten Tulungagung, adapun penyajian data tersebut sebagai berikut.

2.4.3.1 Investasi Daerah

Perizinan dan nilai investasi merupakan dua faktor yang tidak dapat dilepaskan. Perizinan merupakan salah satu hal dalam meningkatkan dan memastikan kondisi nilai investasi daerah. Iklim investasi suatu daerah dapat kondusif ketika proses pelayanan perizinan dapat dipastikan efisien dan responsif. Capaian indikator kinerja untuk perizinan dan nilai investasi di Kabupaten Tulungagung adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 110 Perizinan dan Nilai Investasi Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020

Tahun	Izin Usaha yang Diterbitkan	Nilai Investasi Daerah PMA/PMDN
2016	610	n/a
2017	768	27.067.387.900
2018	947	49.160.385.280
2019	1761	96.783.582.400
2020	2844	167.746.421.680

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Tulungagung, 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa indikator izin usaha yang diterbitkan dan nilai investasi daerah PMA/PMDN pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 selalu mengalami peningkatan yang signifikan. Lonjakan kenaikan nilai investai daerah di Kabupaten Tulungaung ini terjadi sejak diberlakukannya PP 24 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang dilaksanakan melalui aplikasi online single sub mission (OSS) maka mengakumulasi seluruh investasi yang masuk baik investasi dengan pemenuhan izin baru maupun yang pembaharuan dan penghitungan investasi tidak lagi dibatasi nominal 500 juta ke atas tetapi seluruh nilai investasi yang masuk.

2.4.3.2 Angka Kriminalitas

Angka kriminalitas menunjukkan jumlah kejadian kriminalitas serta persentase penyelesaian atas kasus kriminalitas tersebut. Persentase penyelesaian kasus kriminal cenderung fluktuatif, namun pada tahun 2019 persentase penyelesaian meningkat menjadi 79,41%. Berikut data angka kriminalitas di Kabupaten Tulungagung.

Tabel 2. 111 Angka Kriminalitas di Kabupaten Tulungagung Tahun 2015-2019

Tahun	Jenis Kriminal	Jumlah Kejadian	Penyelesaian	Persentase Penyelesaian
2015		867	607	70,01 %
2016		1 060	789	74,43 %
2017		796	541	67,96 %
2018	Krimum	468	287	61,32 %
	Krimsus	59	32	54,24 %
2019	Krimum	448	329	73,44 %
	Krimsus	34	27	79,41 %

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, 2021

2.4.3.3 Penerimaan Pajak

Penerimaan Pajak Pusat Menurut Jenis Pajak merupakan penerimaan Pajak Pusat yang dipungut pada wilayah pemungutan Kabupaten Tulungagung melalui Kantor Pelayanan Pajak. Jenis Pajak Pusat yang dipungut meliputi Pajak Penghasilan, PPN dan PPnBM, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pusat diluar P2 (Perdesaan dan Perkotaan), serta Pajak lainnya dan PIB. Data penerimaan pajak lebih rincinya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 112 Penerimaan Pajak Pusat Menurut Jenis Pajak (Rupiah) di Kabupaten Tulungagung Tahun 2015-2019

Jenis Pajak	2015	2016	2017	2018	2019
Pajak Penghasilan	270.077.0 41.105	230.840.128 .727	187.455.710 .913	290.239.177 .182	314.933.758 .742
PPN dan PPnBM	227.244.8 75.251	159.284.945 .904	165.569.975 .269	281.568.515 .170	339.952.812 .785
PBB pusat	7.738.110. 826	202.092.996	347.775.532	11.533.175. 069	367.163.871
Pajak lainnya dan PIB	13.345.97 8.412	13.812.523. 835	14.631.507. 024	16.340.532. 668	16.793.985. 450
Jumlah	518.406.0 05.594	404.139.691 .462	368.004.968 .738	599.681.400 .089	672.047.720 .848

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, 2021

Berdasarkan data pada tabel diatas diketahui hampir seluruh pajak pusat yang dipungut di Kabupaten Tulungagung mengalami peningkatan kecuali PBB pusat, namun Kabupaten Tulungagung secara keseluruhan memperoleh peningkatan dalam penerimaan pajak.

2.4.4 Fokus Sumberdaya Manusia

Keunggulan sumberdaya manusia merupakan kunci terciptanya daya saing tinggi daerah dan perhatian pada peningkatan kualitas SDM menjadi suatu hal yang tidak dapat terelakan lagi.

Rasio ketergantungan (dependency ratio) adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk

65 tahun keatas. Dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun. Semakin tingginya persentase dependency ratio menunjukkan semakin tingginya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Rasio ketergantungan Kabupaten Tulungagung tahun 2020 sebesar 40,80%, artinya setiap 100 penduduk produktif menanggung 40-41 orang penduduk tidak produktif.

Tabel 2. 113 Rasio ketergantungan Kab. Tulungagung tahun 2018-2020

Uraian	2018	2019	2020
Penduduk Usia 0-14	224.018	216.232	216.742
Penduduk Usia 65 Keatas	121.831	131.080	109.671
Penduduk Usia 15-64 (Produktif)	764.830	771.502	800.129
Rasio Ketergantungan	45,25%	45,02%	40,80%

Sumber: Dispendukcapil Kabupaten Tulungagung, 2021

2.4.4.1 Pencari Kerja yang telah Disalurkan menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Pencari kerja yang telah disalurkan menurut tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan di Kabupaten Tulungagung Tahun 2015-2019 dipisahkan berdasarkan tingkat pendidikan mulai Sekolah Dasar hingga tingkat Pendidikan Universitas, sebagaimana terdapat dalam tabel berikut ini.

Tabel 2. 114 Pencari Kerja yang telah Disalurkan menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Tulungagung Tahun 2015-2019

Tingkat Pendidikan	2015	2016	2017	2018	2019
Tidak/Belum Pernah Sekolah	8.055	n/a	n/a	n/a	n/a
Tidak/Belum Tamat SD	43.731	n/a	n/a	n/a	n/a
Sekolah Dasar	180.416	n/a	597	668	682
Sekolah Menengah Pertama	122.721	n/a	1.734	1.973	1.898
Sekolah Menengah Atas	87.167	n/a	3.014	1.459	1.521
Sekolah Menengah Kejuruan	49.605	n/a	n/a	n/a	n/a
Diploma I/II/III/ Akademi	3.791	n/a	66	29	14
Universitas	30.381	n/a	163	25	33

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, 2021

Berdasarkan tabel diatas, pencari kerja yang telah disalurkan menurut tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan di Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 mayoritas merupakan tamatan SMP yaitu sebanyak 1.898 orang, sedangkan jumlah yang paling sedikit adalah pencari kerja dari lulusan Diploma I/II/III/Akademi yaitu sebanyak 14 orang.

Tabel 2. 115 Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 - 2020

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020		
1	Aspek Kesejahteraan Masyarakat							
1.1	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi							
1.1.1	PDRB Menurut Harga Berlaku	31.126,13	33.640,18	36.496,03	39.215,49	38.225,99		
1.1.2	PDRB Atas Dasar Harga Konstan	23.446,44	24.637,36	25.920,20	27.299,80	26.455,76		
1.1.3	Laju Pertumbuhan PDRB	5,02%	5,08%	5,21%	5,32%	-3,09%		
1.1.4	PDRB Per Kapita	30.334,38	32.635,34	35.251,99	37.733,18	36.643,64		
1.1.5	Pertumbuhan Ekonomi	5,02%	5,08%	5,21%	5,32%	-3,09%		
1.1.6	Inflasi	1,66	2,86	2,13	1,83	1,93		
1.1.7	Indeks Gini	0,37	0,35	0,373	0,304	0,336		
1.1.8	Indeks Desa Membangun	0.6479	0.6548	0.6656	0.6781	0.7092		
1.1.9	Survey Kepuasan Masyarakat	75.23	77.82	80.19	80.21	82.12		
1.2	Fokus Kesejahteraan Sosial							
1.2.1	Indeks Pembangunan Manusia	70,82	71,24	71,99	72,62	73,00		
1.2.2	Tingkat Kemiskinan	8,23	8,04	7,27	6,74	7,33		
1.2.3	Jumlah Pengangguran	21.367	12.197	14.835	19.201	27.951		
1.2.4	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,60	2,27	2,61	3,36	4,61		
1.2.5	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	69,63	67,15	70,62	70,48	73,17		
1.2.6	Tingkat Kesempatan Kerja	96,15	97,73	97,39	96,64	95,39		
1.2.7	Daya Beli (Juta)	9.881	10.114	10.455	10.891	10.705		
1.3	Fokus Budaya dan Olahraga							
1.3.1	Seni Budaya yang Mendapatkan Penghargaan	2	2	4	2	1		
1.3.2	Seni budaya yang dilestarikan	100	100	100	100	110		
1.3.3	Jumlah Atlet yang dibina	5.883	4.959	4.734	4.999	738		

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020		
1.3.4	Jumlah Atlet yang berprestasi	96	110	102	81	48		
2	Aspek Pelayanan Umum							
2.1	Pelayanan Urusan Wajib Dasar							
2.1.1	Pendidikan							
2.1.1.1	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI/Paket A	0,03	0,01	0,2	0,2	0,01	0,01	=
2.1.1.2	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTS/Paket B	0,26	0,004	0,21	0,21	0,03	0,2	>
2.1.1.3	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA/Paket C	0,63	0,49	0,43	0,40	0,40		
2.1.1.4	Angka Kelulusan (AL) SD/MI/Paket A	100	100	100	100	100		
2.1.1.5	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTS/Paket B	100	100	100	94,54	100		
2.1.1.6	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA/Paket C	100	100	100	100	100		
2.1.1.7	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTS	99,61	99,07	99,61	99,61	99,61	100	<
2.1.1.8	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTS ke SMA/SMK/MA	88,4	91,05	90,99	90,99	90,99	99,2	<
2.1.1.9	Persentase (%) jumlah anak usia 5-6 tahun yang sdh tamat atau sedang belajar di satuan pendidikan PAUD	100	100	100	100	100		
2.1.1.10	Persentase (%) jumlah anak usia 7-12 tahun yang sdh tamat atau sedang belajar di satuan pendidikan sekolah dasar	100	100	100	100	100		
2.1.1.11	Persentase (%) jumlah anak usia 12-15 tahun yang sdh tamat atau sedang belajar di satuan pendidikan SMP	100	100	100	100	100		
2.1.1.12	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.	98,13	98,31	98,51	98,58	97,43	98	<
2.1.1.13	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.	83,53	83,68	83,70	83,73	86,98	84	>

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020		
2.1.1.14	Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/MA	61,86	64,88	67,33	70,71	63,51		
2.1.1.18	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat	104,79	104,86	104,88	104,81	102,32	104	<
2.1.1.19	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat	99,58	99,93	99,94	101,65	102,39	97	>
2.1.1.20	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA	83,54	83,75	83,80	83,81	86,86		
2.1.1.21	Angka Harapan Lama Sekolah	13,03	13,04	13,05	13,15	13,31		
2.1.1.22	Rata-Rata Lama sekolah	7,73	7,82	8,06	8,07	8,33		
2.1.1.23	Rasio Guru dan Murid SD	1:13	1:10	1:13	1:12	n/a		
2.1.1.24	Rasio Guru dan Murid SMP	1:16	1:14	1:15	1:14	n/a		
2.1.2	Kesehatan							
2.1.2.1	Jumlah Kematian Bayi	136	111	106	126	146		
2.1.2.2	Angka Kematian Bayi (AKB)	8,96	7,59	7,19	8,77	10,2		
2.1.2.3	Jumlah kematian Ibu	20	17	18	11	15		
2.1.2.4	Angka Kematian Ibu (AKI)	131,73	116,31	122,04	76,58	104,75		
2.1.2.5	Jumlah Posyandu Balita	1.240	1.240	1240	1240	1239		
2.1.2.6	Jumlah Posyandu Purnama dan Mandiri (PURI)	1.110	1.115	1114	1162	1.147		
2.1.2.7	Jumlah Posyandu Lansia	350	404	408	429	408		
2.1.2.8	Jumlah Kader Posyandu Aktif	6.200	6.200	6200	6200	6195		
2.1.2.9	Jumlah Puskesmas	32	32	32	32	32		
2.1.2.10	Balita Gizi Buruk	51	48	32	36	54		
2.1.2.11	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani	83,24	89,52	84,75	88,90	89,50		
2.1.2.12	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga kesehatan Yang memiliki Kompetensi Kebidanan	93,60	91,02	92,60	91,39	91,76		

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020		
2.1.2.13	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization	91,14	84,50	90,77	94,22	91,51		
2.1.2.14	Cakupan Balita Gizi buruk yang mendapat Perawatan	100	100	100	100	100		
2.1.2.15	Cakupan penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC	30,32	34	44	100	100		
2.1.2.16	Cakupan penemuan dan penanganan Penderita Penyakit DBD	100	100	100	100	100		
2.1.2.17	Cakupan Pelayanan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	16,16	n/a	74,64	n/a	n/a		
2.1.2.18	Cakupan kunjungan bayi	92,69	97,28	96,88	96,89	87,06		
2.1.2.20	a. HIV dan AIDS	295	324	392	390	283		
2.1.2.21	b. Kusta	7	26	39	34	10		
2.1.2.22	c. TB	980	1043	1216	1253	818		
2.1.2.24	a. Jantung	21899	23762	21011	3031	3230		
2.1.2.25	b. Diabetes	14458	16581	16473	16174	2703		
2.1.2.26	c. Hipertensi	7195	7949	8030	8395	1547		
2.1.2.27	d. Kanker	3847	4571	4374	115	1574		
2.1.2.28	Prevalensi stunting balita usia 0-59 bulan	25,7	22,1	10,4	5,32	5,51		
2.1.2.29	Pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar pelayanan antenatal (SPM)	n/a	90,35	91,1	91,44	89,93		
2.1.2.30	Pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar pelayanan persalinan	n/a	90,99	92,60	91,37	91,76		
2.1.2.31	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar pelayanan kesehatan bayi baru lahir	n/a	92,79	95,77	94,03	95,68		
2.1.2.32	Pelayanan kesehatan balita sesuai standar pelayanan kesehatan balita	n/a	85,61	85,98	90,75	75,23		
2.1.2.33	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar skrining kesehatan usia pendidikan dasar	n/a	99,97	99,43	95,51	62		

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020		
2.1.2.34	Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar skrining kesehatan usia produktif	n/a	94,71	94.18	81,28	45,02		
2.1.2.35	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut sesuai standar skrining kesehatan usia lanjut	n/a	54	42,61	66,96	73,15		
2.1.2.36	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar pelayanan kesehatan penderita hipertensi	n/a	95,02	93.86	73,31	203		
2.1.2.37	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	n/a	94,11	85,62	76,74	380		
2.1.2.38	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar pelayanan kesehatan jiwa	n/a	100	97,67	101,44	192		
2.1.2.39	Pelayanan kesehatan orang dengan TB sesuai standar pelayanan kesehatan TB	n/a	100	100	89,62	56,4		
2.1.2.40	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV sesuai standar pemeriksaan HIV	n/a	70,8	64,18	85	78,25		
2.1.2.41	Angka Harapan Hidup	73,4	73,53	73,74	73,95	74,08		
2.1.3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
2.1.3.1	Persentase Desa/Kelurahan Terlayani Sistem Perpipaan Air Minum	n/a	n/a	52.03	52.77	59.41		
2.1.3.2	Persentase Desa/Kelurahan Dengan Jumlah Rumah Tangga Terlayani Sanitasi >80%	n/a	n/a	87.82	90.41	92.99		
2.1.3.3	Persentase Desa/Kelurahan Dengan Jalan Kondisi Baik >80%	n/a	n/a	77.49	78.23	78.23		
2.1.3.4	Rasio Irigasi Kondisi Baik	n/a	n/a	1/83	1/79	1/78		
2.1.4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman							

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020		
2.1.4.1	Persentase Desa/Kelurahan Dengan Rumah Layak Huni > 90%	n/a	n/a	100	100	100		
2.1.4.2	Persentase Luasan Kawasan Kumuh	24,99	55,30	88,07	100,00	90,50		
2.1.4.3	Persentase PSU Yang Diserahkan	7,14	12,70	36,51	40,48	48,87		
2.1.4.4	Luasan Kawasan Kumuh (ha)	70,52	49,52	30,01	0,00	239,49		
2.1.4.5	Persentase (%) Pengurangan Luasan Kawasan Kumuh	35,07	68,07	88,07	100,00	22,60		
2.1.5	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat							
2.1.5.1	Persentase peningkatan penyelesaian pelanggaran Perda/Perbub	1	2	2	2	4		
2.1.5.2	Persentase perlindungan/ pemeliharaan terhadap potensi konflik	90,00	95,00	95,00	96,00	97,00		
2.1.5.3	Persentase (%)Penduduk di Daerah rawan Bencana yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	100	100	100	100		
2.1.5.4	Persentase (%)Penduduk yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	100	100	100	100		
2.1.5.5	Persentase (%) penduduk yang memperoleh layanan penyelamatan dan evaluasi korban bencana	100	100	100	100	100		
2.1.5.6	Persentase (%) jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100	100	100	100	100		
2.1.5.7	Persentase (%) penduduk yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	n/a	95	97	98	100	75	>
2.1.6	Sosial							
2.1.6.1	Persentase (%) Penyandang Disabilitas Telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	65	70	75	85	85		

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020		
2.1.6.2	Persentase (%) Anak Telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	60	65	75	85	85		
2.1.6.3	Persentase (%) Lanjut Usia Telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	61	67	70	80	80		
2.1.6.4	Persentase (%) Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	62	66	73	80	80		
2.1.6.5	Persentase (%) korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	100	100	100	100	100		
2.2	Urusan Pemerintahan Wajib Non Dasar							
2.2.1	Tenagakerja							
2.2.1.1	Jumlah tenaga kerja yang memenuhi ketentuan standar kompetensi kerja (jumlah tenaga kerja yang dilatih)	3.990	784	1.464	2.127	3.246		
2.2.1.2	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan	3.611	5.574	4.154	4.148	945		
2.2.1.3	Kasus ketenagakerjaan yang diselesaikan terhadap kasus yang ada (%)	100	90,91	100	100	100		
2.2.1.4	Angka sengketa pengusaha-buruh	6 kasus	11 kasus	6 kasus	4 kasus	8 kasus		
2.2.1.5	Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)	69,63	67,15	70,62	70,48	73,17		
2.2.1.6	Tingkat kesempatan kerja (%)	96,15	97,73	97,39	96,64	95,39		
2.2.1.7	Persentase peserta pelatihan yang memiliki kompetensi	50	58,33	72,92	61,72	77,5		
2.2.1.8	Persentase penempatan tenaga kerja	22,18	31,35	23,05	24,29	6,64		
2.2.1.9	Persentase penanganan perselisihan hubungan industrial	100	90,91	100	100	100		
2.2.1.10	Persentase peserta pelatihan yang direkomendasikan bidang pelatihan	100	100	100	100	100		

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020		
2.2.1.11	Persentase transmigran yang ditempatkan	100	100	100	67	0		
2.2.1.12	Persentase lokasi transmigrasi yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	0		
2.2.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
2.2.2.1	Partisipasi Perempuan di Pemerintahan (manajerial)	33,76	33,93	34,05	34,11	n/a		
2.2.2.2	Rasio Kekerasan dalam Rumah Tangga	85,09	78,45	76,8	73,6	72,3		
2.2.2.3	Persentase Pelayanan Penyelesaian Tindak Kekerasan	100	100	100	100	100		
2.2.2.4	Persentase pelaksanaan pengarusutamaan gender pada Perangkat Daerah	100	100	100	100	100		
2.2.2.5	Persentase Kasus Perempuan yang terlayani	100	100	100	100	100		
2.2.2.6	Persentase Pembinaan kepada Kelompok Industri Rumah dan BKTKI	100	100	100	100	100		
2.2.2.7	Persentase dokumen Gender dan anak yang dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan	100	100	100	100	100		
2.2.2.8	Persentase Pemenuhan Hak Anak	100	100	100	100	100		
2.2.2.9	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	95,28	95,3	95,75	95,63	95,48		
2.2.2.10	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	-	63,95	64,11	66,36	65,84		
2.2.3	Pangan							
2.2.3.1	Skor PPH	89,1	89,3	92,24	93,11	90,3		
2.2.3.2	AKE (Kkal/Kap/Hari)	1861,3	1902,7	1940	1997	2066		
2.2.3.3	Produksi Padi Sawah (ton)	320.378,28	330.192,43	308.890,22	269.419,12	317.122,17		
2.2.3.4	Luas panen Padi Sawah (Ha)	52.231,00	53.338,00	47.542,00	41.343,00	46.475,69		
2.2.3.5	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan	89,1	89,3	92,24	93,11	90,3		

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020		
	Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan							
2.2.3.6	Jumlah kelembagaan distribusi pangan, usaha pangan dan lumbung pangan masyarakat untuk menjaga stabilitas harga dan cadangan pangan	36	43	49	55	55		
2.2.3.7	Persentase Intervensi Wilayah Rawan Pangan	100	100	100	100	100		
2.2.3.8	Persentase kelembagaan distribusi pangan, usaha pangan dan lumbung pangan masyarakat dalam peningkatan ekonomi	13,3	17,7	18,1	20,3	20,3		
2.2.3.9	Persentase pemanfaatan infrastruktur dan sarpras pendukung kemandirian pangan	100	100	100	100	100		
2.2.4	Lingkungan Hidup							
2.2.4.1	Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	71,33	73,33	70,57	71,23	63,68		
2.2.4.2	Nilai Indeks Kualitas Air (IKA)	48,1	50	60	60	56,67		
2.2.4.3	Nilai Indeks Kualitas Udara (IKU)	87,74	92,48	84,20	86,09	83,51		
2.2.4.4	Nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	76,45	76,45	76,45	68,5	39,08		
2.2.4.5	Mata air yang mendapatkan perlindungan dengan penanaman pohon (sumber mata air)	13	39	39	45	50		
2.2.4.6	Jumlah Mata Air yang masih aktif	120	125	125	130	130		
2.2.4.7	Jumlah perusahaan yang menyusun Dokumen Lingkungan (UKL, UPL, AMDAL)	127	60	57	55	82		
2.2.4.8	Jumlah RTH yang dikelola	8	10	10	12	12		
2.2.4.9	Volume timbunan sampah (ton)	187.263,43	188.119,17	189.065,44	189.621,88	198.883,94		
2.2.4.10	Jumlah sampah yang terangkut (ton)	14.600	14.600	32.850	57.305	71.905		
2.2.4.11	Jumlah bank sampah	18	19	40	59	59		

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020		
2.2.4.12	Jumlah kasus lingkungan yang ditangani	6	8	7	8	8		
2.2.5	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil							
2.2.5.1	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk wajib KTP (%)	97	92	98,23	97,62	98,65		
2.2.5.2	Jumlah bayi berakta kelahiran	17.536	20.272	21.288	19.720	16.301		
2.2.5.3	Jumlah pasangan berakta nikah non muslim	74	94	69	69	79		
2.2.5.4	Jumlah Pemohon Kartu Keluarga	57.430	63.600	71.580	67.791	70.724		
2.2.5.5	Rasio Pasangan Berakte Nikah	7.711	8.467	n/a	n/a	n/a		
2.2.5.6	Jumlah Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	57.430	63.600	71.580	67.791	70.724		
2.2.6	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
2.2.6.1	Jumlah Desa Tertinggal	67	27	6	0	0		
2.2.6.2	Jumlah Desa Mandiri	1	1	4	4	6		
2.2.7	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							
2.2.7.1	Angka Kelahiran Total (TFR)	1,87	2,06	2,075	2,02	2,15		
2.2.7.2	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (modern contraceptive prevalence rate/mCPR)	75,29	73,65	73,68	74,54	75,76		
2.2.7.3	Persentase Usia Kawin Pertama (UKP) dibawah 20 Tahun	15,78	15,30	13,88	12,21	11,87		
2.2.7.4	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/ KB yang tidak terpenuhi)	9,19%	10,87%	10,68%	10,15%	10,47%		
2.2.8	Perhubungan							
2.2.8.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perhubungan	76,948	81,11	81,388	81,467	87,8		
2.2.8.2	Persentase pengendalian lalu lintas	n/a	n/a	100	100	100		

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020		
2.2.8.3	Nilai survey kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perparkiran	80,6	77.76	80	81,987	84,47		
2.2.8.4	Persentase prasarana perhubungan yang terkelola	n/a	n/a	100	100	100		
2.2.8.5	Persentase angkutan yang melayani masyarakat	n/a	n/a	20	17,1	16,46		
2.2.8.6	Persentase fasilitas perlengkapan jalan	n/a	n/a	100	100	100		
2.2.8.7	Indeks Tingkat Pelayanan Jalan	n/a	n/a	0.30	0.37	0.47		
2.2.9	Komunikasi dan Informatika							
2.2.9.1	Persentase Informasi yang dipublikasikan	n/a	90	90	90	90		
2.2.9.2	Prosentase Implementasi TIK	n/a	90	90	90	90		
2.2.9.3	Jumlah Dokumen Metadata Statistik Sektoral	n/a	3	3	4	4		
2.2.9.4	Persentase Informasi / Berita yang disandakan / diamankan	n/a	100	100	100	100		
2.2.10	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah							
2.2.10.1	Jumlah Koperasi (Badan Hukum)	1.339	1.340	1.371	1.389	1.408		
2.2.10.2	Anggota (Orang)	35.090	88.554	98.198	86.395	84.969		
2.2.10.3	Jumlah Koperasi Aktif	672	673	704	722	741		
2.2.10.4	Prosentase Koperasi Aktif	50,19%	50,22%	51,35%	51,97%	52,63%		
2.2.10.5	Modal Sendiri (Rp.)	155.869.736.086	172.605.660.758	327.704.089.643	258.983.465.764	276.473.341.787		
2.2.10.6	Modal Luar (Rp.)	205.763.052.776	252.826.656.689	394.766.081.764	285.325.893.784	296.680.482.223		
2.2.10.7	Volume Usaha (Rp.)	430.339.930.034	476.159.794.579	738.096.332.980	576.570.245.907	542.591.688.970		
2.2.10.8	SHU (Rp.)	14.163.194.660	15.965.249.297	22.026.526.108	20.907.969.947	19.155.077.262		
2.2.10.9	Asset/Harta (Rp.)	361.632.788.862	425.432.317.447	722.470.171.407	544.309.359.548	573.153.824.010		

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020		
2.2.10.10	Persentase Pertumbuhan Omset Koperasi	25,71%	10,65%	55,01%	-21,88%	-5.89%		
2.2.10.11	Jumlah Usaha	53.488	57.897	62.818	64.144	66.375		
2.2.10.12	UMKM Naik Kelas	30	32	34	36	38		
2.2.10.13	Modal Usaha	1.274.016.330	1.375.949.718	1.492.905.444	1.516.825.700	1.606.945.035		
2.2.10.14	Volume Usaha	1.679.275.119	1.817.105.969	1.971.559.976	2.004.477.563	2.113.181.020		
2.2.10.15	Jumlah Karyawan	261.055	280.065	303.871	304.386	306.671		
2.2.10.16	Persentase Pertumbuhan Omset Usaha Mikro	7.8%	8.2%	8.5%	10.17%	15.59%		
2.2.10.17	Persentase Koperasi Berkualitas	27,48%	29,83%	32,25%	22,60%	23,22%		
2.2.10.18	Persentase Usaha Mikro Berdaya Saing	n/a	n/a	n/a	2,16%	2,20%		
2.2.11	Penanaman Modal							
2.2.11.1	Nilai Investasi PMA dan PMDN	312,8 M	292,1 M	1,87 T	2,96 T	830,489 M		
2.2.11.1	Ijin usaha yang diterbitkan (ijin)	610	768	947	1.761	2.844		
2.2.11.2	Nilai investasi Non UMKM/ Non IUMK	306.128.786.406	265,067,387,900	1,822,090,185,080	2,862,642,616,219	830.489.459.801		
2.2.11.3	Nilai investasi IUMK/ UMKM	6.671.213.594	27,067,387,900	49,160,385,280	96,783,582,400	167.746.421.680		
2.2.11.4	Jumlah Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Tepat Waktu	768	768	947	1761	1.926		
2.2.12	Kepemudaan dan Olahraga							
2.2.12.1	Jumlah Kegiatan/Event Olahraga	12	12	14	14	8		
2.2.12.2	Jumlah sarana dan prasarana olahraga	786	876	877	877	877		
2.2.12.3	Jumlah kelompok/organisasi kepemudaan yang dibina	-	6	5	5	5		
2.2.13	Statistik							
2.2.13.1	Jumlah Dokumen Metadata Statistik Sektoral	n/a	3	3	4	4		
2.2.14	Persandian							
2.2.14.1	Persentase Informasi/berita yang disandikan/ diamankan	n/a	100	100	100	100		

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020		
2.2.14	Kebudayaan							
2.2.14.1	Jumlah kegiatan Pembinaan Sejarah Daerah	1	1	1	1	1		
2.2.14.2	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan dan dikelola	100	100	100	100	100		
2.2.14.3	Persentase Peningkatan Kunjungan Museum	1	1	1,1	1,2	0,6		
2.2.14.4	Jumlah Seni Budaya yang Mendapatkan Penghargaan	2	2	4	2	1		
2.2.14.5	Persentase seni budaya yang dilestarikan	100	100	100	100	100		
2.2.15	Perpustakaan							
2.2.15.1	Mobil Perpustakaan Keliling	1 unit	1 unit	2 unit	2 unit	2 unit		
2.2.15.2	Motor Perpustakaan Keliling	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit		
2.2.15.3	Perpusda	1	1	1	1	1		
2.2.15.4	Perpustakaan Kecamatan	19	19	19	19	19		
2.2.15.5	Perpustakaan Desa	32	81	84	84	84		
2.2.15.6	Taman Bacaan	21	21	21	21	21		
2.2.15.7	Perpustakaan Sekolah	165	175	301	301	301		
2.2.15.8	Tenaga Pengelola Perpustakaan	60	60	60	60	60		
2.2.16	Kearsipan							
2.2.16.1	Persentase Tertib Arsip di OPD	30	32	33	35	37		
2.2.16.2	Persentase OPD/Satker yang menerapkan arsip secara baku	7	8	9	10	12		
2.3	Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan							
2.3.1	Pariwisata							
2.3.1.1	Jumlah wisatawan nusantara (Jiwa)	275.104	731.252	1.250.771	1.503.225	1.233.478		
2.3.1.2	Jumlah wisatawan mancanegara (Jiwa)	0	2.192	187	217	3		

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020		
2.3.1.3	Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisata	26,05	165,81	71,05	20,18	(-17,94)		
2.3.1.4	Jumlah pengelolaan obyek daya tarik wisata (obyek)	7	8	8	8	8		
2.3.1.5	Tempat Wisata							
2.3.1.6	Wisata Alam	24	24	20	16	20		
2.3.1.7	Wisata Buatan	22	22	27	23	25		
2.3.1.8	Wisata Purbakala	61	61	44	45	44		
2.3.1.9	Wisata Pantai	20	20	22	23	22		
2.3.1.10	Wisata Edukasi	n/a	n/a	n/a	3			
2.3.1.11	Wisata Kuliner	n/a	n/a	n/a	7			
2.3.1.12	Wisata Minat Khusus	n/a	n/a	n/a	6			
2.3.1.13	Wisata Budaya	n/a	n/a	n/a	13			
2.3.1.14	Wisata Belanja	n/a	n/a	n/a	5			
2.3.2	Pertanian							
2.3.2.1	Produksi Padi Sawah	320.378,28	330.192,43	308.890,22	269.419,12	317.122,17		
2.3.2.2	Produksi Padi Bukan Sawah	25.183,75	20.750,53	13.688,10	11.583,89	11.394,84		
2.3.2.3	Produksi Tanaman Pangan	808.080,38	749.028,89	779.563,09	824.110,24	38.681.582,00		
2.3.2.4	Produksi Tanaman Sayuran	60.557	80.839	81.375	124.703	38.365		
2.3.2.5	Produksi Tanaman Buah	83.474	101.036	106.048	99.400			
2.3.2.6	Produksi Daging (kg)	19.909.922	28.604.574	37.833.374	38.126.081	32.934.068		
2.3.2.7	Produksi Telur (kg)	48.815.885	49.817.617	60.391.266	61.870.311	60.561.642		
2.3.2.8	Produksi Susu (kg)	52.627.535	53.075.011	48.416.362	48.985.081	32.934.068		
2.3.3	Perdagangan							
2.3.3.1	Pertumbuhan nilai ekspor	41,04	22,5	23,5	21,3	46,8		
2.3.3.2	IKM eskportir	11	11	11	8	13		
2.3.4	Perindustrian							

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020		
2.3.4.1	Pesentase pertumbuhan ekonomi lapangan usaha sektor Industri Pengolahan	6,29%	6,15%	7,59%	6,81%	-2,00%		
2.3.4.2	Distribusi persentase ekonomi lapangan usaha industri pengolahan	20,85%	21,18%	21,71%	22,10%	22,33%		
2.4	Fokus Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan							
2.4.1	Pemerintahan Umum							
2.4.1.1	Indeks Reformasi Birokrasi	n/a	62,42	63,57	65,00	66,09		
2.4.1.2	Indeks Pembangunan Masyarakat	n/a	n/a	n/a	0,673	0,717		
2.4.1.3	Nilai SAKIP Kabupaten	70,03	70,95	72,83	75,83	76,80		
2.4.1.4	Indeks Profesionalisme Aparatur Sipil Negara	n/a	n/a	29	51,59	55,40		
2.4.1.5	Indeks Pelayanan Publik	n/a	n/a	2,56	3,93	3,92		
2.4.2	Keuangan							
2.4.2.1	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WDP	WTP		
2.4.2.2	Rasio PAD terhadap total pendapatan	13,33	19,36	15,94	18,34	19,65		
2.4.3	Perencanaan							
2.4.3.1	Persentase keselarasan RKPD dengan RPJMD	100	100	100	100	100		
2.4.3.2	Persentase laporan pelaksanaan program pembangunan yang selesai tepat waktu	75	75	75	75	100		
2.4.3.3	Persentase keselarasan Rencana Kerja PD dengan RPJMD di lingkup Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	n/a	n/a	n/a	100	100		
2.4.3.4	Persentase aspirasi masyarakat yang tertampung dalam dokumen perencanaan di lingkup Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	n/a	n/a	n/a	94,66	82,90		
2.4.3.5	Persentase keselarasan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan RPJMD di	n/a	n/a	n/a	100	100		

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020		
	lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah							
2.4.3.6	Persentase aspirasi masyarakat yang tertampung dalam dokumen perencanaan di lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	n/a	n/a	n/a	100	100		
2.4.3.7	Persentase keselarasan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan RPJMD di lingkup Bidang Ekonomi	n/a	n/a	n/a	100	100		
2.4.3.8	Persentase aspirasi masyarakat yang tertampung dalam dokumen perencanaan di lingkup Bidang Ekonomi	n/a	n/a	n/a	90	84,9		
2.4.4	Kelitbangan							
2.4.4.1	Persentase hasil penelitian yang dijadikan bahan perumusan kebijakan	100%	100%	100%	100%	100%		
2.4.4.2	Indeks Inovasi Daerah	n/a	n/a	n/a	580 (Inovatif)	1020 (sangat inovatif)		
2.4.5	Kesatuan Bangsa dan Politik							
2.4.5.1	Jumlah Partai Politik	11	11	11	11	11		
2.4.5.2	Jumlah Anggota DPRD	50	50	50	50	50		
2.4.5.3	Tingkat Partisipasi Pemilih	70,56	70,56	70,56	72,11	72,11		
2.4.5.4	Jumlah Organisasi Masyarakat	65	65	67	68	68		
2.4.5.5	Jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat	79	79	79	79	79		
2.4.5.6	Jumlah Suku Bangsa	7	7	7	7	7		
2.4.5.7	Jumlah Kejadian Potensi Konflik	1	1	1	2	2		
2.4.5.8	Jumlah Kelompok Penghayatan/Alur Kepercayaan	7	7	7	7	7		
3	Aspek Daya Saing							
3.1	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah							
3.1.1	Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Pangan	399.428	498.109	442.533,57	447.334,60	505.173,00		

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020		
3.1.2	Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Non Pangan	428.845	399.672	468.361,72	449.239,63	528.687,00		
3.1.3	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah	12,00%	19,40%	20,88%	23,86%	23,88%		
3.1.4	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB	0,22%	0,26%	0,26%	0,26%	0,24%		
3.1.5	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik	2,59%	3,33%	3,72%	3,93%	3,53%		
3.2	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur							
3.2.1	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	73%	75%	77,49%	60%	63%		
3.2.2	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	0,0023	0,0023	0,0017	0,0018	0,0019		
3.2.3	Jumlah Listrik Kilovolt Ampere (KVA) Terpasang Menurut Penggunaan:	374.629	1620.083	343.366	362.213	379.114		
3.2.4	Lalu-lintas Penumpang Bus di Terminal (Berangkat)	1.159.876	1.361.902	1.639.602	1.503.200	607.804		
3.2.5	Lalu-lintas Penumpang Bus di Terminal (Datang)	1.162.035	1.284.363	1.408.560	1.201.361	456.905		
3.2.6	Jumlah Hotel	24	28	29	31	31		
3.2.6	Kantor Bank menurut jenis	230	286	286	375	377		
3.3	Fokus Iklim Berinvestasi							
3.3.1	Angka kriminalitas	1.060	796	527	482	504		
3.3.2	Penerimaan Pajak Pusat (juta)	404.139	368.004	599.681	672.047	566.877		
3.4	Fokus Sumber Daya Manusia							
3.4.1	Jumlah Penduduk Bekerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan yang ditamatkan	n/a	5.574	4.154	4.148	1.833		

Sumber: Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung, 2021

BAB III



Gambaran Keuangan Daerah



BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Keuangan daerah merupakan komposisi penting dalam perencanaan pembangunan daerah, sehingga analisis untuk mengetahui keadaan keuangan daerah perlu dilakukan, yang dalam penyelenggaraannya menyatu dalam APBD yang direncanakan. APBD sebagai bentuk penjabaran kuantitatif dari tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah serta tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang disusun dalam struktur yang menggambarkan besarnya pendanaan atas berbagai sasaran yang hendak dicapai untuk suatu tahun tertentu. Analisis keuangan daerah ini dilakukan melalui analisis kinerja keuangan masa lalu dan proyeksi keuangan di masa depan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan Daerah. Gambaran pengelolaan keuangan daerah diperlukan untuk bisa merencanakan program dan kebijakan yang akan di lakukan di suatu daerah.

Gambaran pengelolaan keuangan daerah yang dijadikan pondasi untuk perencanaan pembangunan daerah harus tercantum di Perubahan RPJMD Kabupaten Tulungagung. Pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu aspek yang penting dalam penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Tulungagung. Hal ini dikarenakan gambaran pengelolaan keuangan yang tersusun dalam bentuk Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Tulungagung dapat mendeskripsikan keuangan yang digunakan dalam suatu pelaksanaan program dan kebijakan di daerah. Dengan demikian APBD yang tercantum di Perubahan RPJMD Kabupaten Tulungagung akan menggambarkan program prioritas pembangunan daerah yang dibiayai oleh pemerintah daerah, sehingga tujuan maupun sasaran pembangunan dapat dianalisis melalui keuangan yang digunakan.

Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Tulungagung mengacu pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan perundang-undangan tersebut merupakan payung hukum bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah dalam mencapai upaya prioritas pembangunan pada rencana pembangunan lima tahunan melalui Perubahan RPJMD Kabupaten Tulungagung.

Adapun arah gambaran pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan meliputi kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, kerangka pendanaan.

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Tabel 3. 1 Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2016-2020 Kabupaten Tulungagung

No	Uraian	Realisasi					Rata-rata Pertum- buhan
		2016	2017	2018	2019	2020	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1.	<u>PENDAPATAN - LRA</u>	2,570,279,524,127.71	2,598,104,487,656.52	2,701,548,608,847.46	2,762,645,223,248.10	2,598,314,875,347.51	0.20%
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	342,570,756,798.97	503,103,394,882.52	453,153,465,280.26	486,358,101,284.37	510,548,152,061.88	8.11%
1.1.1.	Pajak Daerah	67,457,168,815.02	85,826,143,046.20	95,755,873,390.28	102,597,232,045.00	93,357,599,038.00	7.14%
1.1.2.	Retribusi Daerah	22,674,086,533.00	23,258,789,789.00	25,242,170,763.00	28,267,220,049.00	22,413,998,868.13	-1.26%
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4,553,186,053.00	5,165,807,050.10	5,301,851,819.50	6,459,328,149.20	6,745,450,182.80	9.15%
1.1.4.	Lain-lain PAD Yang Sah	247,886,315,397.95	388,852,654,997.22	326,853,569,307.48	349,034,321,041.17	388,031,103,972.95	8.42%
1.2.	PENDAPATAN TRANSFER - LRA	2,211,025,337,461.00	2,084,001,092,774.00	2,156,284,471,202.00	2,176,111,195,871.00	1,993,289,537,476.00	-2.75%
1.2.1.	Transfer Pemerintah Pusat	1,930,509,824,875.00	1,847,419,157,063.00	1,907,630,827,757.00	1,975,860,870,010.00	1,557,961,745,035.00	-6.18%
1.2.2.	Transfer antar - daerah	280,515,512,586.00	236,581,935,711.00	248,653,643,445.00	200,250,325,861.00	435,327,792,441.00	4.03%
1.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA	16,683,429,867.74	11,000,000,000.00	92,110,672,365.20	100,175,926,092.73	94,477,185,809.63	9.60%
1.3.1.	Pendapatan Hibah	16,683,429,867.74	11,000,000,000.00	92,110,672,365.20	100,175,926,092.73	94,477,185,809.63	9.60%
1.3.2.	Dana Darurat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
1.3.3.	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2.	<u>BELANJA</u>	2,606,293,854,903.45	2,576,151,524,386.60	2,576,191,955,190.08	2,609,242,216,162.64	2,643,650,273,202.12	0.35%
2.1.	BELANJA OPERASI	1,735,023,750,376.47	1,844,552,189,875.31	1,860,370,263,551.99	1,960,227,863,473.07	1,881,525,437,967.32	1.92%
2.1.1.	Belanja Pegawai	1,168,271,210,636.77	1,032,662,015,614.90	1,009,561,141,629.33	1,119,726,914,953.33	1,087,178,725,221.42	-2.14%
2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	497,301,411,579.70	716,437,198,809.41	705,929,658,162.66	733,305,577,351.80	704,286,791,456.84	7.18%
2.1.3.	Belanja Bunga	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2.1.4.	Belanja Subsidi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

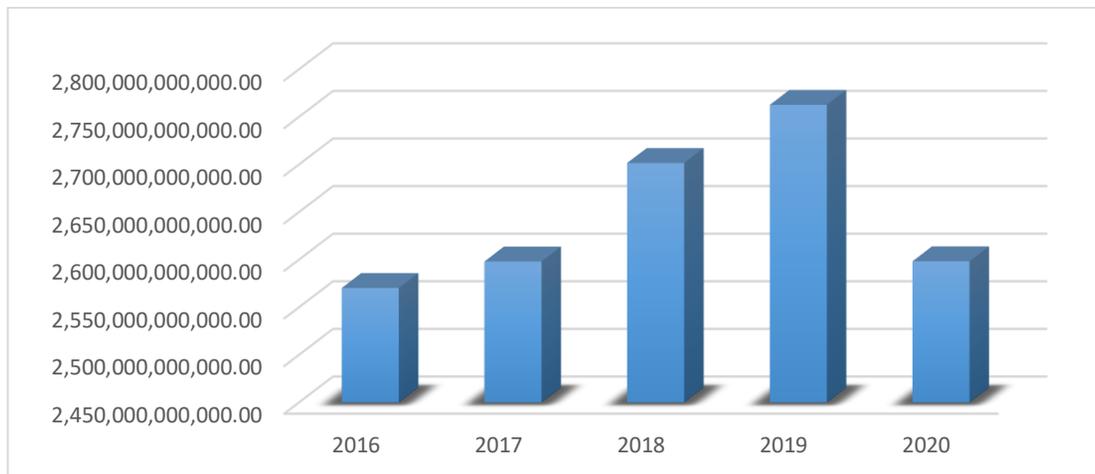
No	Uraian	Realisasi					Rata-rata Pertumbuhan
		2016	2017	2018	2019	2020	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
2.1.5.	Belanja Hibah	55,278,056,240.00	85,723,778,301.00	134,159,680,060.00	97,545,501,653.00	82,570,119,592.00	3.99%
2.1.6.	Belanja Bantuan Sosial	14,173,071,920.00	9,729,197,150.00	10,719,783,700.00	9,649,869,514.94	7,489,801,697.06	- 19.09%
2.2.	BELANJA MODAL	574,341,318,490.72	395,842,837,980.29	370,661,902,571.09	247,730,648,459.57	246,377,748,498.80	- 25.51%
2.2.1.	Belanja Modal Tanah	1,105,393,600.00	2,593,284,648.00	970,254,317.00	1,657,114,969.00	665,827,177.95	- 54.33%
2.2.2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	44,799,698,311.48	47,247,296,450.12	40,741,474,893.24	71,740,863,108.96	44,018,209,581.54	-7.64%
2.2.3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	52,748,149,716.24	54,487,585,585.00	38,586,746,744.00	63,008,353,554.76	74,381,754,716.43	4.01%
2.2.4.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	459,111,049,430.00	239,904,713,300.00	259,526,264,765.85	82,347,836,281.14	56,942,578,981.05	- 85.90%
2.2.5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	15,753,557,433.00	50,719,378,497.17	29,755,616,851.00	28,165,270,545.71	69,663,077,841.83	13.10%
2.2.6.	Aset Lainnya	823,470,000.00	890,579,500.00	1,081,545,000.00	811,210,000.00	706,300,200.00	-5.75%
2.3.	BELANJA TAK TERDUGA	1,046,576,150.26	7,881,000.00	0.00	2,466,147,300.00	131,911,563,936.00	
2.3.1.	Belanja Tak Terduga	1,046,576,150.26	7,881,000.00	0.00	2,466,147,300.00	131,911,563,936.00	
2.4.	BELANJA TRANSFER	295,882,209,886.00	335,748,615,531.00	345,159,789,067.00	398,817,556,930.00	383,835,522,800.00	6.04%
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	6,776,270,151.00	6,681,054,330.00	7,796,562,147.00	8,398,666,505.00	7,125,517,801.00	0.55%
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	289,105,939,735.00	329,067,561,201.00	337,363,226,920.00	390,418,890,425.00	376,710,004,999.00	6.14%
	SURPLUS/(DEFISIT)	(36,014,330,775.74)	21,952,963,269.92	125,356,653,657.38	153,403,007,085.46	(45,335,397,854.61)	200.80 %
3.	PEMBIAYAAN	245,111,173,186.82	185,779,741,007.04	214,337,518,827.20	352,383,248,989.39	492,607,249,424.85	12.26%
3.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	284,804,899,767.00	209,096,842,411.08	232,749,197,215.53	357,383,248,989.39	505,544,089,424.85	9.53%
3.1.1.	SiLPA	284,804,899,767.00	209,096,842,411.08	207,749,197,215.53	339,694,172,484.53	505,544,089,424.85	8.70%
3.1.2.	Pencairan Dana Cadangan	0.00	0.00	25,000,000,000.00	17,689,076,504.86	-	
3.1.3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00%

No	Uraian	Realisasi					Rata-rata Pertum- buhan
		2016	2017	2018	2019	2020	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
3.1.4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00%
3.1.5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00%
3.1.6.	Penerimaan Piutang Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00%
3.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	39,693,726,580.18	23,317,101,404.04	18,411,678,388.33	5,000,000,000.00	12,936,840,000.00	- 75.94%
3.2.1.	Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00%
3.2.2.	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	18,683,429,867.74	8,000,000,000.00	6,361,678,388.33	5,000,000,000.00	12,936,840,000.00	- 31.29%
3.2.3.	Pembentukan Dana Cadangan	21,010,296,712.44	15,317,101,404.04	12,050,000,000.00	0.00	0.00	
3.2.4.	Pemberian Pinjaman Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
3.2.5.	Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	SILPA	209,096,842,411.08	207,732,704,276.96	339,694,172,484.58	505,786,256,074.85	447,271,851,570.24	14.49%

Sumber : LRA Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020

A. Pendapatan

Berdasarkan data mulai tahun 2016-2020 mengenai rata-rata pertumbuhan anggaran pendapatan belanja daerah di Kabupaten Tulungagung tertera sangat baik dan selalu mengalami peningkatan tiap tahun. Dapat dilihat pada tahun 2016 dengan total pendapatan daerah mencapai sebesar Rp.2.570.279.524.127,71 dengan angka tersebut semakin tahun pendapatan daerah semakin naik sampai di tahun 2019 mencapai pendapatan daerah sebesar Rp.2.762.645.223.248,10, namun mengalami penurunan di tahun 2020 menjadi sebesar Rp.2.598.314.875.347,51, dikarenakan adanya dampak dari Covid-19 sehingga cukup menekan sektor perekonomian di daerah Tulungagung. Adapun dengan peningkatan rata-rata pertahun sebesar 0.20%. Ini menunjukkan bahwa masih perlunya peningkatan pendapatan daerah dengan membuat suatu inovasi yang dapat mendukung tingkat kemandirian dan peningkatan ekonomi di Kabupaten Tulungagung utamanya strategi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tulungagung. Berikut grafik realisasi pendapatan daerah Kabupaten Tulungagung, sebagai berikut:



Grafik 3. 1 Realisasi Pendapatan Kab. Tulungagung Tahun 2016-2020

Sumber : LRA Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020

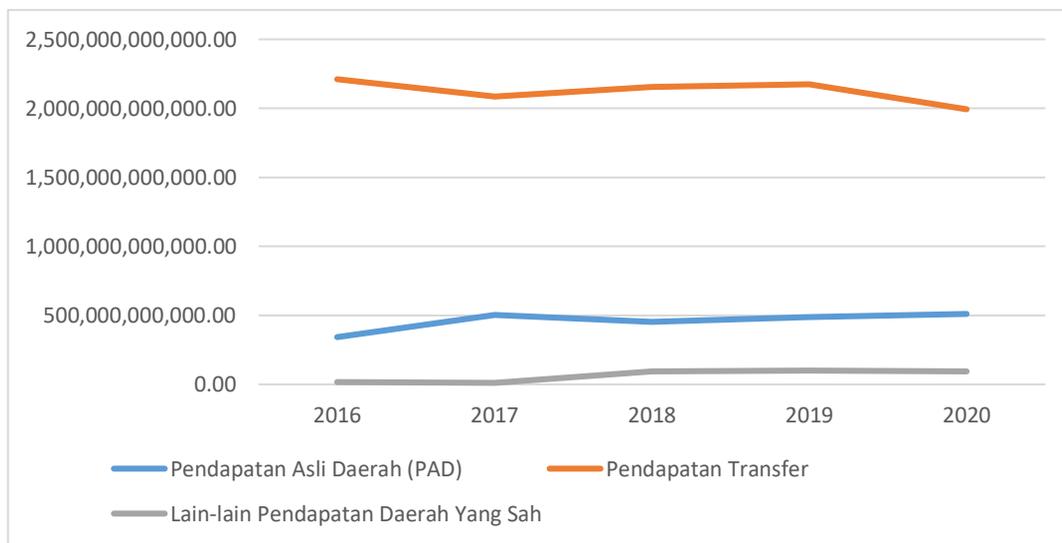
Secara terperinci, komposisi pendapatan daerah selama periode Tahun Anggaran 2016-2020 dapat diuraikan sebagai berikut :



Grafik 3. 2 Persentase Komponen Pendapatan Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020

Sumber : LRA Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020

Berdasarkan grafik 3.2 Persentase Komponen Pendapatan Kabupaten Tulungagung tahun 2016-2020 diketahui penyumbang terbanyak berasal dari pendapatan transfer sebesar 86.02% pada tahun 2015 dan menurun menjadi sebesar 76.71% pada tahun 2020, penyumbang pendapatan terbesar kedua diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah sebesar 13.33% pada tahun 2016 dan mengalami peningkatan menjadi sebesar 19.65% pada tahun 2020. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah menjadi sumber penyumbang terakhir dengan sebesar 0.65% pada tahun 2016 dan meningkat menjadi sebesar 3.64% pada tahun 2020. Meskipun adanya penurunan Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2018 yang awalnya pada tahun 2017 proporsi PAD sebesar 19.36%, mengalami penurunan di tahun 2018 sebesar 16.77%, akan tetapi mengalami peningkatan kembali hingga di tahun 2020 dengan proporsi PAD sebesar 19.65%. Dengan meningkatnya persentase komponen Pendapatan Asli Daerah dari tahun ke tahun menunjukkan adanya kemandirian fiskal daerah yang dilakukan oleh Kabupaten Tulungagung.



Grafik 3. 3 Persentase Komponen Pendapatan Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020

Sumber : LRA Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020

Berdasarkan grafik 3.3 dapat dilihat bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami peningkatan yang signifikan. Tahun 2016 nilai PAD Kabupaten Tulungagung sebesar Rp.342.570.756.798,97 dan meningkat menjadi sebesar Rp.510.548.152.061,88 pada tahun 2020 dengan kenaikan rata-rata pertahun sebesar 8,11% per tahun. Dengan nilai PAD yang terus mengalami pertumbuhan yang bagus maka mengindikasikan bahwa adanya perekonomian daerah Kabupaten Tulungagung mengalami perkembangan dengan cukup baik.

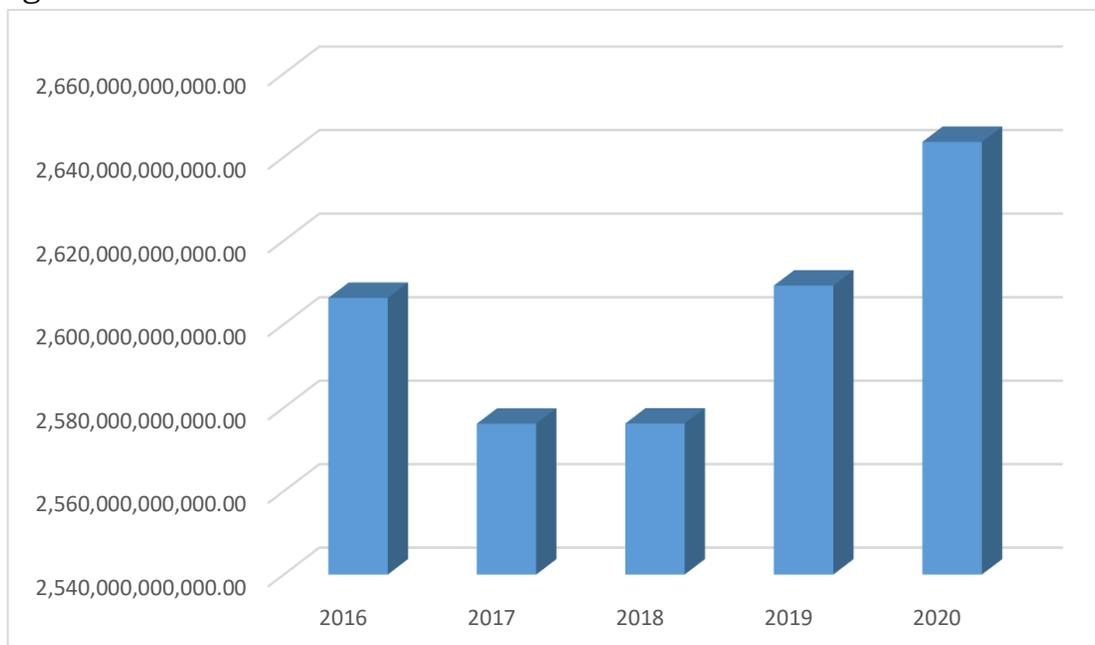
Pada pendapatan transfer berdasarkan grafik 3.3 nilainya mengalami peningkatan dengan tahun 2016 sebesar Rp.2.211.025.337.461,00 menjadi sebesar Rp.1.993.289.537.476,00 pada tahun 2020, dengan peningkatan rata-rata pertahun sebesar -2,75%. Dengan adanya penurunan pendapatan transfer tiap tahun tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah pusat sudah cukup yakin dengan adanya tingkat perekonomian Kabupaten Tulungagung

yang mulai bersfat mandiri tanpa bantuan pemerintah pusat, hal ini bisa dilihat dari kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tulungagung yang semakin naik menandakan kemandirian yang semakin bagus.

Sedangkan untuk Pendapatan lain daerah yang sah berdasarkan grafik 3.3 nilainya mengalami perkembangan yang fluktuatif dengan tahun 2016 dengan nilai sebesar Rp.16.683.429.867,74 menjadi sebesar Rp.94.477.185.809,63 pada tahun 2020 dengan rata-rata pertumbuhan pertahun sebesar 9,60%.

B. Belanja Daerah

Belanja Daerah didefinisikan sebagai kewajiban pemerintah daerah yang memiliki sifat mengurangi nilai kekayaan bersih daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa belanja daerah dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Berikut Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung tahun 2016-2020, sebagai berikut :



Grafik 3. 4 Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020

Sumber : LRA Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020

Berdasarkan grafik 3.4 menunjukkan adanya kenaikan yang fluktuatif dalam realisasi belanja daerah Kabupaten Tulungagung tiap tahunnya. Pada tahun 2016 sebesar Rp.2.606.293.854.903,45 dan tahun 2020 meningkat sebesar Rp.2.643.650.273.202,12 dengan peningkatan rata-rata pertahun sebesar 0,35%. Dalam belanja daerah terdapat pengelompokan yaitu belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.

C. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Adapun berdasarkan tabel diketahui bahwa penerimaan pembiayaan selalu lebih besar dari pengeluaran pembiayaan. Penerimaan masih didominasi oleh SiLPA tahun lalu, dan besarnya SiLPA selama lima tahun perkembangannya terjadi fluktuatif dalam pertumbuhannya dengan rata-rata pertahun sebesar 8.70%. Berikut tabel pembiayaan daerah Kabupaten Tulungagung tahun anggaran 2016-2020, sebagai berikut :

Tabel 3. 2 Perkembangan Pembiayaan Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020

No	Uraian	Realisasi					Rata-rata Pertumbuhan
		2016	2017	2018	2019	2020	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
3	PEMBIAYAAN	245,111,173,186.82	185,779,741,007.04	214,337,518,827.20	352,383,248,989.39	492,607,249,424.85	12.26%
3.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	284,804,899,767.00	209,096,842,411.08	232,749,197,215.53	357,383,248,989.39	505,544,089,424.85	9.53%
3.1.1	SiLPA	284,804,899,767.00	209,096,842,411.08	207,749,197,215.53	339,694,172,484.53	505,544,089,424.85	8.70%
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0	0	25,000,000,000.00	17,689,076,504.86	-	
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0	0	0	0	-	0.00%
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0	-	0.00%
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	-	0.00%
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0	0	-	0.00%
3.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	39,693,726,580.18	23,317,101,404.04	18,411,678,388.33	5,000,000,000.00	12,936,840,000.00	-75.94%
3.2.1	Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo	0	0	0	0	-	0.00%
3.2.2	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	18,683,429,867.74	8,000,000,000.00	6,361,678,388.33	5,000,000,000.00	12,936,840,000.00	-31.29%
3.2.3	Pembentukan Dana Cadangan	21,010,296,712.44	15,317,101,404.04	12,050,000,000.00	0	0	
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0	0.00%
3.2.5	Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	0	0	0	0	0	0.00%
	SILPA	209,096,842,411.08	207,732,704,276.96	339,694,172,484.58	505,786,256,074.85	447,271,851,570.24	14.49%

Sumber : LRA Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020

Berdasarkan tabel 3.2 diketahui bahwa selama tahun 2016-2020 Kabupaten Tulungagung sebagian besar penutup defisit anggaran dibiayai oleh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA). Pembiayaan Daerah di Kabupaten Tulungagung mempunyai surplus penerimaan pembiayaan yang cukup besar dikarenakan pengeluaran pembiayaan yang lebih kecil, sehingga surplus penerimaan riil mencapai Rp.209.096.842.411,08 pada tahun 2016 dan meningkat menjadi sebesar Rp.447.271.851.570,24 pada tahun 2020. Berdasarkan kondisi demikian maka dapat digambarkan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Tulungagung cukup kuat untuk mengatasi pembiayaan belanja daerah.

3.1.2 Neraca Daerah

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Neraca Daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah. Laporan Neraca Daerah ini sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku saja, tetapi sebagai dasar pengambilan keputusan yang terarah dalam mengelola sumber daya secara efisien dan efektif dengan adanya beberapa jenis laporan yang berhubungan antara lain, seperti: Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan atas Laporan Keuangan. Keberadaan Neraca Daerah sebagai salah satu komponen LKPD diharapkan mampu memberikan peranan penting dalam mendukung kegiatan manajemen keuangan pemerintahan daerah, untuk keperluan perencanaan, pengendalian, serta pengambilan kebijakan desentralisasi fiskal.

Neraca Daerah adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari: Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Sedangkan kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Untuk ekuitas dapat didefinisikan sebagai kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Keberadaan neraca daerah dalam dokumen perencanaan dinilai sangat penting. Neraca daerah dianalisis dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, rasio solvabilitas dan rasio aktivitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah.

Pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam menjalankan aktivitas urusan pemerintahan daerah setiap tahunnya memiliki dampak terhadap perubahan kondisi keuangan, baik pada posisi aset, kewajiban, maupun ekuitas. Untuk mengetahui posisi keuangan daerah Kabupaten Tulungagung,

berikut disajikan data pertumbuhan neraca daerah Kabupaten Tulungagung dalam beberapa tahun terakhir (2016-2020).

Tabel 3. 3 Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1.	ASET						
1.1.	ASET LANCAR	269,653,441,756.53	281,272,208,753.53	439,086,898,325.02	600,953,279,430.80	511,266,193,723.27	12.37%
1.1.1	Kas	209,869,469,526.09	207,989,928,107.80	340,351,921,115.71	505,911,399,228.67	447,285,034,449.35	14.40%
1.1.2	Piutang	41,783,605,366.40	47,338,098,073.67	76,140,680,326.18	53,514,224,249.26	14,791,818,151.19	-63.63%
1.1.6	Persediaan	17,688,684,620.21	25,546,141,534.56	22,251,220,419.66	35,238,858,146.18	49,006,553,615.31	20.22%
1.1.7	Beban Dibayar Dimuka	311,682,243.83	398,041,037.50	343,076,463.47	6,288,797,806.69	182,787,507.42	-810.07%
1.2.	INVESTASI JANGKA PANJANG	107,060,225,460.84	114,258,397,534.15	120,572,794,402.59	126,316,040,512.48	139,659,530,428.71	6.41%
1.2.1	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
1.2.2	Investasi Jangka Panjang Permanen	107,060,225,460.84	114,258,397,534.15	120,572,794,402.59	126,316,040,512.48	139,659,530,428.71	6.41%
1.3.	ASET TETAP	2,758,703,849,540.62	2,856,515,554,760.23	3,198,851,574,024.93	3,243,547,821,167.32	3,214,000,179,066.40	3.65%
1.3.1	Tanah	958,547,321,488.00	882,777,816,307.00	1,019,866,859,164.00	1,026,152,675,936.00	985,167,197,825.00	0.33%
1.3.2	Peralatan dan Mesin	454,402,979,484.21	499,781,054,312.84	569,344,168,148.08	698,080,271,051.80	770,838,286,972.03	12.29%
1.3.3	Gedung dan Bangunan	699,541,790,968.63	726,180,841,312.54	775,268,849,039.12	836,799,160,437.80	920,746,766,823.66	6.62%
1.3.4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1,559,978,723,949.14	1,804,226,313,880.80	2,105,307,405,114.81	2,183,754,570,125.64	2,245,711,326,641.97	8.55%
1.3.5	Aset tetap Lainnya	59,831,084,433.31	76,656,116,253.38	90,386,991,423.38	104,781,051,146.81	113,143,655,156.81	14.57%
1.3.6	Konstruksi dalam pengerjaan	9,436,047,000.00	10,127,863,633.34	13,197,559,500.00	18,098,488,275.59	30,614,104,053.00	24.51%
1.3.7	Akumulasi Penyusutan	(983,034,097,782.67)	(1,143,234,450,940)	(1,374,520,258,364.46)	(1,624,118,395,806.32)	(1,852,221,158,406.07)	14.63%
1.3.	ASET LAINNYA	66,684,210,750.18	96,710,458,017.19	97,619,796,109.88	99,313,637,205.65	98,584,982,133.05	8.24%
1.3.1	Tagihan penjualan angsuran	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
1.3.2	Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
1.3.3	Kemitraan dengan pihak ketiga	4,022,250,000.00	72,786,037,316.00	72,725,037,316.00	72,717,990,984.00	72,717,490,984.00	23.59%
1.3.4	Aset tak berwujud	1,134,306,192.00	1,212,820,625.00	1,469,816,000.00	1,454,799,250.00	1,306,087,500.00	2.89%
1.3.5	Kas Yang Dibatasi Penggunaannya	0.00	0.00	3,523,500.00	385,496,063.48	319,866,216.40	192.25%

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1.3.6	Aset Lain-lain	61,527,654,558.18	22,711,600,076.19	23,421,419,293.88	24,755,350,908.17	24,241,537,432.65	-41.15%
1.4.	DANA CADANGAN	21,010,296,712.44	36,327,398,116.48	17,689,076,504.86	0.00	0.00	-21.07%
1.4.1	Dana Cadangan	21,010,296,712.44	36,327,398,116.48	17,689,076,504.86	0.00	0.00	-21.07%
	JUMLAH ASET DAERAH	3,223,112,024,220.61	3,385,084,017,181.58	3,873,820,139,367.28	4,070,130,778,316.25	3,963,510,885,351.43	4.88%
2.2.	KEWAJIBAN						
2.1.	Kewajiban Jangka Pendek	44,029,189,739.85	21,650,323,744.70	24,223,696,508.87	52,755,447,325.68	46,763,882,554.71	-12.87%
2.1.1	Utang perhitungan pihak ketiga	98,213,257.00	255,871,114.00	657,335,374.54	510,401,255.82	330,752,250.11	9.90%
2.1.2	Uang muka dari kas daerah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2.1.3	Pendapatan diterima dimuka	174,797,113.85	124,657,318.26	141,925,468.92	184,494,760.15	224,499,061.67	3.21%
2.1.4	Utang belanja	24,760,029,937.00	21,268,442,595.00	23,102,283,921.41	52,060,551,309.71	46,206,484,492.93	8.62%
2.1.5	Utang jangka pendek lainnya	18,995,149,432.00	-	300,551,744.00	0.00	2,146,750.00	-10060.20%
2.1.6	Utang Pihak ketiga lainnya	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00%
2.1.7	Pendapatan yang Ditangguhkan	1,000,000.00	1,352,717.44	21,600,000.00	0.00	0.00	39.94%
3.	EKUITAS	3,179,082,834,480.76	3,363,433,693,436.88	3,849,596,442,858.41	4,017,375,330,990.57	3,916,747,002,796.72	4.93%
3.1.	Ekuitas	3,179,082,834,480.76	3,363,433,693,436.88	3,849,596,442,858.41	4,017,375,330,990.57	3,916,747,002,796.72	4.93%
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	3,223,112,024,220.61	3,385,084,017,181.58	3,873,820,139,367.28	4,070,130,778,316.25	3,963,510,885,351.43	4.88%

Sumber: Laporan Keuangan Kabupaten Tulungagung Tahun 2016- 2020

Melihat pada data dalam neraca daerah Pemerintah Kabupaten Tulungagung di atas dapat diketahui bahwa total aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam setiap tahun selama tahun 2016 hingga 2020 mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4.88%. Pada tahun 2016 jumlah aset tercatat sebesar Rp.3.223.112.024.220,61 hal ini terus terjadi peningkatan aset daerah yang dimiliki sampai tahun 2020 menjadi sebesar Rp.3.963.510.885.351,43 meskipun mengalami penurunan dibanding tahun 2019 yaitu sebesar Rp.4.070.130.778.316,25, namun penurunan tersebut juga disebabkan bertetapan dengan adanya pandemi Covid-19 sehingga semua pemerintah Daerah perlu menjaga stabilitas di daerahnya salah satunya penggunaan aset daerah yang dimiliki. Jumlah Aset lancar pada tahun 2016 sebesar Rp.269.653.441.756,53 dan mengalami peningkatan di tahun 2020 sebesar Rp.511.266.193.723,27 dengan rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 12.37%.

Komposisi aset lancar Pemerintah Kabupaten Tulungagung setiap tahun lebih banyak berwujud kas yang rata-rata pertumbuhan pada tahun 2016 hingga 2020 tercatat sebesar 14,40%. Aset tetap sebagian besar berbentuk jalan, irigasi, dan jaringan, disamping berupa tanah, gedung dan bangunan. Adapun pertumbuhan nilai aset tetap selama 5 tahun terakhir rata-rata sebesar 3,65%. Sedangkan untuk Aset lainnya di Kabupaten Tulungagung selama 5 tahun terakhir mencatatkan pertumbuhan positif yaitu rata-rata pertumbuhan sebesar 8,24%.

Posisi dana cadangan selama 5 tahun terakhir (tahun 2016- 2020) mengalami penurunan sejak tahun 2019 dengan pertumbuhan rata-rata sebesar -21.07%. Terjadinya penurunan tingkat pertumbuhan disebabkan oleh menurunnya posisi dana cadangan dari Rp.21.010.296.712,44 pada tahun 2016 menjadi Rp.0.00 pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020. Keberadaan dana cadangan memang tidak setiap tahun dialokasikan oleh Pemerintah Daerah, hal tersebut tergantung pada tingkat kebutuhan untuk membiayai pengeluaran yang memerlukan dana relatif besar dan tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran, seperti halnya untuk penyelenggaraan Pilkada.

Kewajiban jangka pendek daerah dalam 5 tahun terakhir (tahun 2016-2020) berdasarkan data pada tabel di atas tercatat mengalami kondisi yang fluktuatif, namun pada tahun 2019 mengalami kenaikan yang drastis yaitu sebesar Rp.52.755.447.325,68 apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2018, yaitu Rp.24.223.696.508,87 namun di tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp.46.763.882.554,71 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar -12.87%.

Ekuitas dana Pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam 5 tahun terakhir mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4.93%. Pada tahun 2016 nilai ekuitas yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung tercatat sebanyak Rp .3.179.082.834.480,76 hingga tahun 2020 ekuitas dana mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp.3.963.510.885.351,43.

Berdasarkan data dan perhitungan rata-rata dari neraca tersebut, kemudian selanjutnya menganalisis mengenai kemampuan keuangan daerah dengan dapat melalui perhitungan yang disebut rasio solvabilitas. Rasio

Solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjang. Untuk neraca daerah, perhitungan rasio solvabilitas dibagi menjadi 2 yaitu aset dan rasio kewajiban terhadap ekuitas. Rasio kewajiban aset adalah kewajiban dibagi dengan aset, sedangkan rasio kewajiban terhadap ekuitas adalah kewajiban dibagi dengan ekuitas. Dan Berikutnya tentang Rasio lancar yang merupakan kemampuan Pemerintah Tulungagung dalam membayar kewajiban jangka pendeknya.

3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada sumber-sumber pendapatan yang selama ini telah menjadi sumber penghasilan Kas Daerah dengan tetap mengupayakan sumber-sumber pendapatan yang baru. Pengelolaan belanja daerah dilaksanakan berlandaskan pada anggaran kinerja (*performance budget*) yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja tersebut mencerminkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, yang berarti belanja daerah harus berorientasi pada kepentingan publik. Oleh karena itu arah pengelolaan belanja daerah digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik terutama pada masyarakat miskin dan kurang beruntung, pertumbuhan ekonomi dan perluasan lapangan kerja. Pada bagian ini menjelaskan mengenai gambaran kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu terkait proporsi penggunaan anggaran dan hasil analisis pembiayaan Kabupaten Tulungagung yang mencakup Proporsi Penggunaan Anggaran dan Analisis Pembiayaan.

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Gambaran tentang belanja daerah yang menginformasikan mengenai proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dan proporsi realisasi belanja Kabupaten Tulungagung sebagaimana disajikan dalam tabel, sebagai berikut :

Tabel 3. 4 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Tulungagung

No	Uraian	Total Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp)	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan pengeluaran) (Rp)	Persentase
		(a)	(b)	(a) / (b) x 100%
1	Tahun 2017	1,029,252,613,514.90	2,599,468,625,790.64	39.59
2	Tahun 2018	1,006,081,324,629.33	2,594,603,633,578.46	38.78
3	Tahun 2019	1,119,726,914,953.33	2,614,242,216,162.64	42.83
4	Tahun 2020	1,087,178,725,221.42	2,656,587,113,202.12	40.92

Sumber : LRA Kabupaten Tulungagung Tahun 2017-2020

Berdasarkan tabel di atas, proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran yang meliputi Belanja dan Pembiayaan Pengeluaran di Kabupaten Tulungagung pada tahun 2017-2020 cenderung mengalami kenaikan, namun di tahun 2020 mengalami penurunan dengan

Rata-rata proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur terhadap Total Pengeluaran di Kabupaten Tulungagung adalah sebesar 40,92%. Hal ini menunjukkan bahwa APBD Kabupaten Tulungagung relatif baik dari sisi Belanja, karena proporsi penggunaan anggaran untuk Belanja Aparatur tidak mendominasi total pengeluaran dalam APBD.

3.2.2 Analisis Pembiayaan

Tabel 3. 5 Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Tulungagung

No	Uraian	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)
1	Realisasi Pendapatan Daerah	2,598,104,487,656.52	2,701,548,608,847.46	2,762,645,223,248.10	2,598,314,875,347.51
	Dikurangi realisasi:				
2	Belanja Daerah	2,576,151,524,386.60	2,576,191,955,190.08	2,609,242,216,162.64	2,643,650,273,202.12
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	23,317,101,404.04	18,411,678,388.33	5,000,000,000.00	12,936,840,000.00
A	Defisit Riil	(1,364,138,134.12)	106,944,975,269.05	148,403,007,085.46	(58,272,237,854.61)
4	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	209,096,842,411.08	207,749,197,215.53	339,694,172,484.53	505,544,089,424.85
5	Pencairan dana cadangan	-	25,000,000,000.00	17,689,076,504.86	-
6	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	-	-	-	-
7	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-
8	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-	-
9	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-
B	Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah	209,096,842,411.08	232,749,197,215.53	357,383,248,989.39	505,544,089,424.85
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Berkenaan	207,732,704,276.96	339,694,172,484.58	505,786,256,074.85	447,271,851,570.24

Sumber : LRA Kabupaten Tulungagung Tahun 2017-2020

Pada bagian ini menjelaskan mengenai analisis pembiayaan, yang menyajikan data mengenai Defisit Riil Anggaran Daerah, Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran, Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran. Adapun pembiayaan tersebut bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah. Analisis Pembiayaan juga tidak hanya mencerminkan oleh selisih antara Sisi Pendapatan dengan Sisi Belanja saja, namun disajikan perbandingan antara kemampuan fiskal Sisi Pendapatan dengan Sisi Belanja yang ditambahkan dengan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel, sebagai berikut :

Tabel 3. 6 Defisit Riil Anggaran Kabupaten Tulungagung

No	Uraian	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)
1	Realisasi Pendapatan Daerah	2,598,104,48 7,656.52	2,701,548,608 ,847.46	2,762,645,223 ,248.10	2,598,314,875, 347.51
	Dikurangi realisasi :				
2	Belanja Daerah	2,576,151,52 4,386.60	2,576,191,955 ,190.08	2,609,242,216 ,162.64	2,643,650,273, 202.12
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	23,317,101,4 04.04	18,411,678,38 8.33	5,000,000,000 .00	12,936,840,00 0.00
	Defisit Riil	(1,364,138,1 34.12)	106,944,975, 269.05	148,403,007, 085.46	(58,272,237,8 54.61)

Sumber : LRA Kabupaten Tulungagung Tahun 2017-2020

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui besaran total defisit riil anggaran Kabupaten Tulungagung berdasarkan Jumlah Realisasi Pendapatan Daerah dikurangi Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah setiap tahun mulai tahun 2017-2020. Dengan di tahun 2017 Realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp.2.598.104.487.656,52, dan terus meningkat sampai tahun 2019, namun di tahun 2020 realisasi pendapatan daerah Kabupaten Tulungagung mengalami penurunan sebesar Rp.2.598.314.875.347,51. Sedangkan untuk Belanja daerah di tahun 2017 sebesar Rp.2.576.151.524.386,60 dan terus meningkat sampai tahun 2020 dengan nilai sebesar Rp.2,643,650,273,202.12. Dengan hasil pengeluaran daerah yang lebih besar daripada pendapatan daerah, maka Kabupaten Tulungagung pada tahun 2020 mengalami defisit anggaran sebesar Rp -58,272,237,854.61, penyebab adanya defisit anggaran yang terjadi tidak lain adanya penyesuaian anggaran (recofusing) besar-besaran untuk menanggulangi dampak Covid-19 di Kabupaten Tulungagung.

Tabel 3. 7 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Tulungagung

No	Uraian	Proporsi dari Total Defisit Riil			
		2017	2018	2019	2020
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran sebelumnya	209,096,842,411.08	207,749,197,215.53	339,694,172,484.53	505,544,089,424.85
2	Pencairan dana cadangan	0.00	25,000,000,000.00	17,689,076,504.86	0.00
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang di Pisahkan	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Penerimaan Piutang Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00

Sumber : LRA Kabupaten Tulungagung Tahun 2017-2020

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui komposisi penutup defisit riil anggaran di Kabupaten Tulungagung pada tahun 2017 bersumber dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya. Sedangkan untuk tahun 2018 dan 2019, komposisi penutup defisit riil anggaran terdiri dai SiLPA tahun sebelumnya dan pencairan dana cadangan, dan di tahun 2020 kembali bersumber dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya.

Tabel 3. 8 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Tulungagung

No	Uraian	2017		2018		2019		2020	
		Rp	% dari SILPA						
1	Jumlah SILPA	207,732,704,276.36		339,694,172,484.53		505,786,256,074.85		447,271,851,570.24	
2	Pelampauan Penerimaan PAD	70,864,070,619.52	34.11%	41,197,710,588.49	12.13%	39,665,803,299.49	7.84%	78,093,112,633.54	15.44%
3	Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan dan Transfer	26,999,759,561.17	13.00%	71,782,144,158.00	21.13%	50,065,971,697.00	9.90%	40,840,239,125.60	8.07%
4	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	3,000,000,000.00	1.44%	3,653,072,365.20	1.08%	3,731,726,092.73	0.74%	2,294,885,809.63	0.45%
5	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	106,613,002,981.67	51.32%	222,403,909,998.30	65.47%	411,812,353,729.81	81.42%	325,712,861,751.36	64.40%

No	Uraian	2017		2018		2019		2020	
		Rp	% dari SILPA						
6	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	255,871,114.00	0.12%	657,335,374.54	0.19%	510,401,255.82	0.10%	330,752,250.11	0.07%

Sumber : LRA Kabupaten Tulungagung Tahun 2017-2020

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dari tahun 2017-2020. Besaran realisasi SiLPA dari 2017 sampai dengan tahun 2019 terus meningkat, yaitu pada tahun 2017 sebesar Rp.207.732.704.276,36 dan mengalami kenaikan sampai pada tahun 2019 sebesar Rp.505.786.256.074,85. Namun di tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp.447,271,851,570.24.

3.3 Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas total keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk belanja/pengeluaran periodik wajib dan mengikat, prioritas utama dan program Perubahan RPJMD. Pada sub bab kerangka pendanaan dibahas secara lebih jelas mengenai proyeksi pendapatan, proyeksi belanja, dan proyeksi pembiayaan daerah Kabupaten Tulungagung pada tahun 2019 hingga 2023, beserta perhitungan mengenai kerangka pendanaan berdasarkan pada realisasi yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya.

3.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Tabel 3. 9 Proyeksi Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tulungagung

No.	URAIAN	PERTUMBUHAN (%)	PROYEKSI			
			2020	2021	2022	2023
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	PENDAPATAN	(1,08)	2.583.354.920.105,88	2.394.343.231.477,55	2.440.826.487.568,82	2.492.708.067.816,13
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	3,44	446.577.024.905,88	436.122.199.827,55	464.048.902.639,75	493.113.380.639,75

No.	URAIAN	PERTUMBUHAN (%)	PROYEKSI			
			2020	2021	2022	2023
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1.1.1	Pajak daerah	4,92	96.461.150.000,00	87.966.750.000,00	98.423.000.000,00	109.932.440.000,00
1.1.2	Retribusi daerah	(1,72)	23.606.649.410,00	21.141.759.200,00	21.691.489.500,00	22.271.740.000,00
1.1.3	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	4,30	6.100.232.295,88	6.574.587.427,55	6.740.955.639,75	6.915.545.639,75
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	3,41	320.408.993.200,00	320.439.103.200,00	337.193.457.500,00	353.993.655.000,00
1.2.	Pendapatan Transfer	(0,80)	2.050.676.695.200,00	1.958.221.031.650,00	1.976.777.584.929,07	1.999.594.687.176,38
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	(0,61)	1.936.134.559.200,00	1.849.527.932.650,00	1.872.004.220.079,04	1.898.599.701.450,58
1.2.2	Transfer antar daerah	(4,11)	114.542.136.000,00	108.693.099.000,00	104.773.364.850,03	100.994.985.725,80
1.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	86.101.200.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	Hibah	0,00	86.101.200.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Dana darurat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja	(1,69)	2.763.354.920.105,88	2.506.260.047.478,00	2.530.739.707.028,46	2.612.943.464.632,03
2.1	Belanja Operasi	(1,93)	2.052.695.858.841,84	1.897.383.460.975,00	1.905.146.477.519,82	1.931.215.023.489,89
2.1.1	Belanja Pegawai	(1,59)	1.301.968.395.070,69	1.232.380.159.439,00	1.234.043.093.924,19	1.239.627.299.989,22
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	(4,48)	683.358.187.771,15	589.151.733.236,00	589.613.961.076,44	591.166.142.195,41
2.1.3	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5	Belanja Hibah	13,66	66.369.276.000,00	72.449.853.300,00	78.049.208.631,03	96.852.086.482,31
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	81,69	1.000.000.000,00	3.401.715.000,00	3.440.213.888,16	3.569.494.822,94
2.2.	BELANJA MODAL	(5,01)	321.371.280.264,04	220.373.989.503,00	228.911.925.271,15	257.582.683.574,51
2.2.1	Belanja Tanah	492,83	1.386.000.000,00	125.000.000,00	1.697.975.766,77	6.980.096.556,93
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	56,91	45.620.635.070,04	102.128.537.400,00	114.074.199.716,21	154.188.251.442,77
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	8,63	73.922.294.228,00	61.215.355.700,00	67.753.375.844,15	89.708.330.815,19
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	(55,87)	113.498.144.163,00	53.194.361.373,00	41.675.638.914,03	2.995.269.729,62
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	(31,91)	86.944.206.803,00	3.710.735.030,00	3.710.735.030,00	3.710.735.030,00
2.2.6	Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Belanja Tidak Terduga	16,67	10.000.000.000,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00

No.	URAIAN	PERTUMBUHAN (%)	PROYEKSI			
			2020	2021	2022	2023
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
2.4.	Belanja Transfer	2,62	379.287.781.000,00	373.502.597.000,00	381.681.304.237,49	409.145.757.567,62
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	55,07	9.127.415.000,00	9.100.410.000,00	13.781.287.613,74	29.499.877.487,85
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	0,87	370.160.366.000,00	364.402.187.000,00	367.900.016.623,75	379.645.880.079,77
	SURPUS/DEFISIT	(7,92)	(180.000.000.000,00)	(111.916.816.000,45)	(89.913.219.459,64)	(120.235.396.815,90)
3	Pembiayaan	(20,17)	180.000.000.000,00	112.000.000.000,00	61.125.430.312,00	75.000.000.000,00
3.1	Penerimaan Pembiayaan	(16,69)	180.000.000.000,00	120.500.000.000,00	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00
3.1.1	SilPA	(16,69)	180.000.000.000,00	120.500.000.000,00	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	108,95	10,447,710,277.20	8.500.000.000,00	38.874.569.688,00	25.000.000.000,00
3.2.1	Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	0,00	0,00	8.500.000.000,00	13.874.569.688,00	0,00
3.2.3	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.5	Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SILPA	0,00	0,00	83.183.999,55	(28.787.789.147,64)	(45.235.396.815,90)

Sumber : BPKAD Kabupaten Tulungagung dan Bapenda Kabupaten Tulungagung, 2021

Proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Tulungagung memberikan informasi mengenai pendapatan daerah yang diperkirakan dapat dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung pada tahun 2020 hingga 2023. Pertimbangan utama yang dijadikan sebagai dasar dalam melakukan proyeksi adalah dengan mempertimbangkan kecenderungan pencapaian dan pertumbuhan pendapatan di Kabupaten Tulungagung, kebijakan terkait dengan pendapatan daerah, serta kondisi ekonomi makro yang terjadi di Kabupaten Tulungagung, sehingga diharapkan hasil dari proyeksi tersebut lebih realistis.

Hasil proyeksi pendapatan Kabupaten Tulungagung pada tahun 2020 hingga 2023 menunjukkan bahwa rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah diperkirakan minus sebesar 1.08%, dimana pada tahun 2020 jumlah pendapatan daerah Kabupaten Tulungagung diperkirakan mencapai Rp.2.583.354.920.105,88, sedangkan pada tahun 2023 diproyeksi sebesar Rp.2.492.708.067.816,13. Melihat pada jenis pendapatan daerah yang dihasilkan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tulungagung pada tahun 2020 hingga 2023 diproyeksikan memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 3.44%, pendapatan transfer diperkirakan memiliki rata-rata pertumbuhan minus sebesar 0.08%, sedangkan untuk lain-lain pendapatan asli daerah yang sah tidak dilakukan proyeksi.

Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada dasarnya ditopang oleh pertumbuhan yang terjadi pada pajak daerah sebesar 4.92%, retribusi daerah yang diperkirakan minus sebesar 1.72%, hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan yang diperkirakan sebesar 4.30%, dan pendapatan dari lain-lain PAD yang sah yang diperkirakan memiliki pertumbuhan sebesar 3.41%.

Melihat pada komposisi pendapatan daerah Kabupaten Tulungagung pada tahun 2020 hingga 2023 dapat diketahui bahwa kontribusi terbesar masih diberikan oleh pendapatan asli daerah dengan rata-rata proporsi sebesar 3.41%, sedangkan besar proporsi pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan diproyeksikan mengalami kenaikan setiap tahunnya meskipun hanya sedikit. Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki kontribusi rata-rata sebesar 18,57% terhadap total pendapatan.

Berdasarkan hasil proyeksi di atas, untuk mencapai realisasi pendapatan daerah Kabupaten Tulungagung di masa mendatang (tahun 2021-2023), maka dapat dirumuskan kebijakan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tulungagung melalui:
 - a. Optimalisasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Upaya tersebut dapat ditempuh dengan cara:
 - 1) Memperkuat basis data dan potensi pajak daerah yang akurat berdasarkan pada data wajib pajak yang belum terdaftar dan sudah terdaftar, melalui pendataan.
 - 2) Pemanfaatan Teknologi Informasi (IT) dan Sarpras dalam pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah.
 - 3) Intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, melalui: penyuluhan/sosialisasi, peningkatan pelayanan, perbaikan sistem pemeriksaan dan penagihan, pemberian sanksi

- dan penegakan hukum, serta penyesuaian tarif dengan melakukan revisi terhadap Peraturan Daerah (Perda) yang perlu disesuaikan.
- 4) Melakukan penempatan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pengelola pajak dan retribusi daerah yang mencukupi secara kuantitas dan kualitas, dan disertai dengan sistem pengendalian yang baik.
 - 5) Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pengelola pajak dan retribusi daerah melalui berbagai pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis.
 - 6) Memberikan stimulus berupa penghargaan kepada wajib pajak daerah dan retribusi daerah, serta Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur yang berprestasi.
 - 7) Peningkatan intensifikasi pajak melalui peningkatan pengawasan dan pengendalian yuridis, teknis, dan penatausahaan.
 - 8) Kebijakan ekstensifikasi sumber penerimaan pajak dan retribusi daerah melalui kebijakan promosi serta perbaikan iklim investasi yang kondusif.
 - 9) Penciptaan sumber-sumber penerimaan baru melalui inventaris berbagai objek yang berpotensi untuk dipungut pajak atau retribusinya.
 - 10) Membangun jaringan kerjasama dengan berbagai instansi dan lembaga terkait
- b. Optimalisasi kinerja bisnis BUMD yang berkontribusi terhadap kesehatan BUMD dan bagi hasil laba BUMD ke Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tulungagung.
 - c. Peningkatan kinerja dan tata kelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Kabupaten Tulungagung sesuai dengan regulasi yang berlaku.
 - d. Optimalisasi pemanfaatan aset daerah sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tulungagung.
 - e. Peningkatan sinergitas dan koordinasi antar instansi terkait, untuk mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Tulungagung yang efektif dan efisien.
 - f. Memperbaiki penetapan target terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Tulungagung.
2. Memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi vertikal sebagai upaya peningkatan kesadaran wajib pajak dalam pembayaran pajak, peningkatan penerimaan pajak, serta peningkatan penerimaan bukan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat.
 3. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan dan Kementerian Teknis terkait dalam rangka mendukung peningkatan penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Desa.
 4. Memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi PD Kabupaten sebagai upaya peningkatan kesadaran wajib pajak dalam pembayaran pajak kabupaten dan peningkatan penerimaan pajak yang dipungut oleh Pemerintah kabupaten Tulungagung.

5. Peningkatan sinergitas dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten Tulungagung serta pihak-pihak lain terkait dengan peningkatan Pendapatan Daerah, khususnya yang berasal dari sumber Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
6. Mendorong kebijakan penurunan tarif PPh Badan dengan prinsip *assymetric fiscal incentive* terhadap sektor-sektor yang mendukung pemulihan ekonomi dari efek Covid-19.
7. Peningkatan investasi pada sektor industri pengolahan, untuk mendorong pemulihan ekonomi akibat efek Covid-19.

3.3.2 Penghitungan Kerangka Pendanaan

Penghitungan kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 lima tahun kedepan. Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah dan ke pos-pos mana sumber penerimaan tersebut akan dialokasikan sebagaimana yang dihitung dan disajikan pada bagian awal sub bab ini. Kapasitas riil keuangan daerah merupakan total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.

Berdasarkan hasil proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana yang disajikan pada pembahasan sebelumnya, maka selanjutnya dapat diketahui nilai kapasitas riil kemampuan keuangan Kabupaten Tulungagung pada tahun 2021 hingga 2023. Nilai kapasitas riil kemampuan keuangan Kabupaten Tulungagung pada tahun 2021 diproyeksikan mencapai Rp.1.273.963.072.038,55 dan diproyeksikan pada tahun 2022 meningkat menjadi Rp.1.267.908.823.956,63. Pada tahun 2023 nilai kapasitas riil kemampuan keuangan Kabupaten Tulungagung diproyeksikan menjadi Rp.1.328.080.767.826,91. Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah tahun 2021 hingga 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 10 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kab. Tulungagung Tahun 2021 – 2023

No	Uraian	PROYEKSI		
		2021 Rp.	2022 Rp.	2023 Rp.
1	Pendapatan	2.394.343.231.477,55	2.440.826.487.568,82	2.492.708.067.816,13
2	Pencairan dana cadangan (Sesuai dengan Perda)	0	0	0
3	Sisa lebih riil Perhitungan Anggaran	120.500.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000
	Total Penerimaan	2.514.843.231.477,55	2.540.826.487.568,82	2.592.708.067.816,13
	Dikurangi:			
4	Belanja	1.232.380.159.439,00	1.234.043.093.924,19	1.239.627.299.989,22
5		8.500.000.000,00	38.874.569.688,00	25.000.000.000,00

No	Uraian	PROYEKSI		
		2021 Rp.	2022 Rp.	2023 Rp.
	Pengeluaran Pembiayaan			
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	1.273.963.072.038,55	1.267.908.823.956,63	1.328.080.767.826,91

Sumber : Data Proyeksi Diolah, 2021

Melihat pada hasil proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Tulungagung pada tahun 2021 hingga 2023 selanjutnya dapat dilakukan alokasi dalam bentuk rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah. Pengalokasian dilakukan untuk memenuhi kebutuhan anggaran belanja yang belum dialokasikan. Berikut disajikan data terkait dengan rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Tulungagung pada tahun 2021 hingga 2023.

Tabel 3. 11 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2021-2023

No	Uraian	Proyeksi		
		2021	2022	2023
		Rp.	Rp.	Rp.
	Kapasitas Riil kemampuan keuangan	1.273.963.072.038,55	1.267.908.823.956,63	1.328.080.767.826,91
	Prioritas I	764.377.843.223	760.745.294.374	796.848.460.696
	Prioritas II	509.585.228.815	507.163.529.583	531.232.307.131

Sumber : Data Proyeksi Diolah, 2021

Berdasarkan tabel 3.11 di atas, rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2021-2023 adalah berfungsi untuk memenuhi kebutuhan anggaran belanja dalam rangka pendanaan 3 (tiga) tahun kemudian. Kapasitas riil keuangan Daerah dialokasikan kedalam prioritas pertama dan prioritas kedua, sebagaimana penjelasan alokasi prioritas sebagai berikut:

- Prioritas pertama (I) berhubungan dengan kepentingan publik secara langsung, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, dan memberikan dampak luas kepada masyarakat dengan daya ungkit dari capaian visi/misi daerah. Di Prioritas pertama (I) juga dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar;
- Prioritas kedua (II) berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi Perangkat Daerah (PD) termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan masing-masing di Perangkat Daerah. Prioritas kedua (II) juga dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah.

BAB IV



Permasalahan dan Isu-isu Strategis Daerah



BAB IV

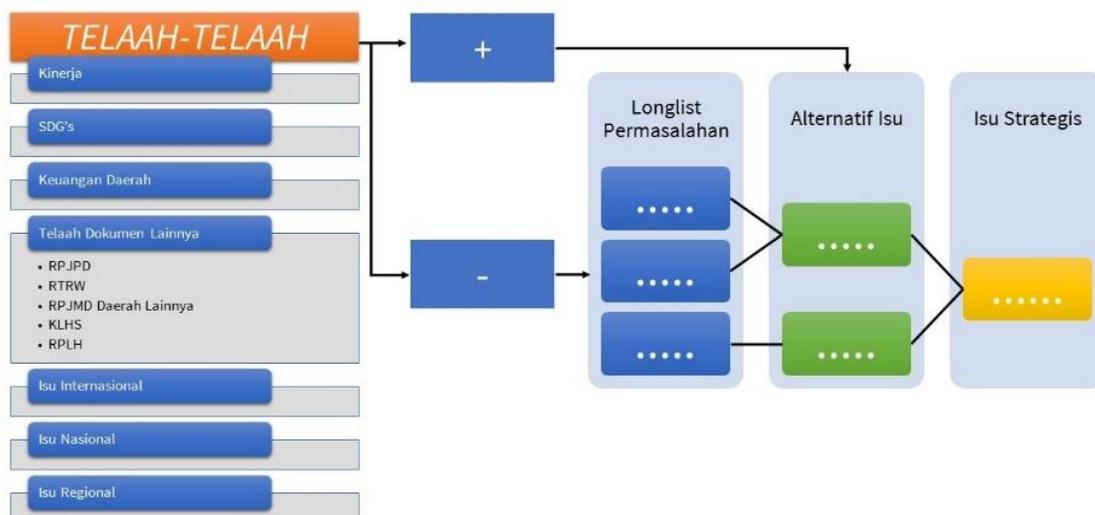
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Pada bab ini, menguraikan isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Tulungagung untuk periode tahun 2018-2023 yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan pokok yang dihadapi dalam pembangunan Kabupaten Tulungagung. Pembentukan isu-isu strategis di Kabupaten Tulungagung ini dilakukan berdasarkan komponen terhadap analisis hasil pembangunan periode sebelumnya.

Permasalahan dan isu-isu strategis daerah Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu bagian terpenting dalam dokumen Perubahan RPJMD. Hal ini dikerenakan permasalahan dan isu-isu strategis Kabupaten Tulungagung akan menjadi dasar utama visi dan misi pembangunan jangka menengah. Oleh karena itu, dalam bab ini diuraikan tentang isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023 yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan daerah yang dihadapi dalam pembangunan Kabupaten Tulungagung.

Permasalahan pembangunan daerah merupakan sebuah “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan apa yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan tersebut dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum diperdagaygunakan secara optimal, kelemahan yang belum teratasi, peluang yang belum dimanfaatkan secara optimal, serta ancaman yang belum diantisipasi. Sedangkan Isu Stategis mengarah kepada aspek-aspek penting yang memerlukan perhatian dalam upaya mencapai tujuan Pembangunan Daerah. Isu Strategis dapat dikatakan sebuah perkembangan kedepan baik yang terjadi didalam organisasi maupun diluar organisasi, yang cenderung memiliki dampak penting terhadap Pembangunan Daerah untuk memenuhi tujuannya. Isu Strategis, itu tidak selalu identik dengan masalah atau bermuatan/bernuansa negatif. Isu Strategis baru akan menjadi masalah apabila tidak mendapat respon yang tepat dari organisasi.

Adapun hubungan antara Permasalahan dengan Isu Strategis dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 4. 1 Proses Telaah Isu Strategis

Berdasarkan gambar 4.1 dapat dijelaskan bahwa dalam menguraikan isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023 yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan pokok yang dihadapi pada pembangunan Kabupaten Tulungagung. Pembentukan isu-isu strategis di Kabupaten Tulungagung dilakukan berdasarkan komponen terhadap analisis hasil kinerja pembangunan periode sebelumnya, analisis terhadap SDG's, analisis terhadap keuangan daerah, telaah terhadap dokumen RPJPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2005-2025, telaah terhadap RPJMN Tahun 2020-2024, telaah terhadap RPJM Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024, telaah terhadap isu internasional, telaah terhadap *platform* kepala daerah terpilih, telaah terhadap RPJMD Kabupaten sekitar, telaah terhadap dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD, analisis teknokratis, usaha/bisnis, sosial budaya, dan lain sebagainya yang dapat dipertanggungjawabkan.

4.1 Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan daerah merupakan sebuah “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan apa yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan tersebut dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Perbedaan tersebut diperoleh berdasarkan perbandingan capaian setiap indikator kinerja pembangunan dengan beberapa standar, seperti misalnya Standar Pelayanan Minimal (SPM)/Standar Nasional/Target Tahunan di dalam RPJMD/capaian tahun sebelumnya, atau tren, sebagaimana telah dibahas pada bagian Analisis Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Bab II). Dalam pembahasan ini, permasalahan pembangunan yang dijabarkan melalui indikator kinerja di setiap bidang/urusan yang belum mencapai hasil yang diinginkan berdasarkan perbandingan dengan standar (SPM/SDG's/Standar Nasional/dengan target tahunan di dalam RPJMD/capaian tahun sebelumnya, atau tren). Berdasarkan hasil analisis, maka, identifikasi permasalahan berdasarkan urusan pembangunan daerah adalah:

Tabel 4.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Urusan Pembangunan Daerah

Urusan Pembangunan Daerah	Permasalahan
Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	a) Belum optimalnya peningkatan angka partisipasi sekolah; b) Belum optimalnya pengembangan kurikulum pendidikan; c) Belum optimalnya kualitas tenaga pendidik dan kependidikan; d) Belum optimalnya pengembangan sastra dan bahasa; e) Belum optimalnya pelayanan perijinan penyelenggaraan pendidikan; f) Belum optimalnya fungsi organisasi kepemudaan; g) Belum optimalnya prestasi olahraga.

Urusan Pembangunan Daerah	Permasalahan
Perpustakaan & Kearsipan	<ul style="list-style-type: none"> a) Jumlah pemustaka di Kabupaten Tulungagung masih sedikit; b) Masih banyaknya arsip daerah yang belum dikelola.
Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> a) Jumlah fasilitas kesehatan dengan nilai UKP dan UKM dalam kategori baik persentase masih rendah; b) Belum memadainya SDM Kesehatan; c) Kurangnya pengawasan/pengendalian sediaan farmasi alat kesehatan, makanan minuman; d) Rendahnya cakupan rumah tangga sehat; e) Kurang optimalnya pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar pelayanan antenatal (SPA); f) Kurang optimalnya Pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar pelayanan persalinan; g) Kurang optimalnya Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar pelayanan kesehatan bayi baru lahir; h) Kurang optimalnya pelayanan kesehatan balita sesuai standar pelayanan kesehatan balita; i) Kurang optimalnya pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar skrining kesehatan usia pendidikan dasar; j) Kurang optimalnya pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar skrining kesehatan usia produktif; k) Kurang optimalnya pelayanan kesehatan pada usia lanjut sesuai standar skrining kesehatan usia lanjut; l) Kurang optimalnya pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar pelayanan kesehatan penderita hipertensi; m) Kurang optimalnya Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus; n) Kurang optimalnya pelayanan kesehatan orang dengan TB sesuai standar pelayanan kesehatan TB; o) Kurang optimalnya pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV sesuai standar pemeriksaan HIV.
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<ul style="list-style-type: none"> a) Cuaca ekstrem yang membuat kerusakan jalan lebih cepat terjadi b) Sistem penyediaan air minum belum merata dan optimal; c) Sistem pengelolaan air limbah belum optimal; d) Belum optimalnya sistem drainase jalan; e) Belum optimalnya pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Bagian Gedung (SIMBG); f) Kondisi bangunan Pemerintah yang mengalami kerusakan g) Kebijakan penataan ruang belum optimal mendukung pengembangan wilayah h) Keterbatasan sarana dan prasarana laboratorium dan perbengkelan i) Kondisi jaringan irigasi yang kurang memenuhi standart teknis mengakibatkan kehilangan air yang tinggi > 50%. j) Alokasi pembagian air untuk irigasi tidak optimal/tidak sesuai dengan kebutuhan lapangan. k) Menurunnya kuantitas air pada sumber air.
Perumahan dan Permukiman	<ul style="list-style-type: none"> a) Kondisi sarana prasarana permukiman rusak dan belum sesuai standar teknis. b) Masih adanya rumah tidak layak huni (RTLH) c) Kurang minatnya pengembang perumahan untuk membangun perumahan untuk MBR di Tulungagung;

Urusan Pembangunan Daerah	Permasalahan
	d) Memerlukan pembiayaan yang tinggi untuk pembangunan Rusunawa MBR
Pertanahan	a) Keterbatasan lahan pemerintah untuk kebutuhan pembangunan b) Masih banyaknya tanah stren dan tanah eks sungai/saluran pembuang yang belum teridentifikasi dan terinventarisasi serta tersertifikasi; c) Perlu adanya verifikasi data inventarisasi aset tanah dengan kondisi eksisting di lapangan. d) Masih banyaknya aset pemerintah daerah yang belum didukung oleh bukti kepemilikan lahan yang dikuasai oleh pemda.
Perhubungan	a) Sarana prasarana lalu lintas yang belum optimal; b) Tingkat kedisiplinan berlalu lintas yang rendah; c) Belum adanya angkutan umum massal d) Penggunaan kendaraan pribadi masih tinggi e) Belum tersedia fasilitas bongkar muat kendaraan barang f) Banyaknya pusat perdagangan dan jasa yang tidak menyediakan lahan parkir offstreet
Komunikasi dan Informatika	a) Rendahnya implementasi TIK di lingkup pemerintah Kabupaten Tulungagung; b) Tata kelola informasi publik di Lingkup Pemerintahan belum maksimal; c) Belum terpenuhinya kebutuhan data statistik sectoral; d) Kurang Optimalnya Keamanan Data/Berita.
Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	a) Masih banyaknya pelanggaran Perda dan Perbup; b) Belum optimalnya penanganan bencana kebakaran dan penyelamatan; c) Persentase penduduk yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.
Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	a) Belum optimalnya kualitas layanan administrasi; b) Masyarakat kurang sadar akan fungsi Akta sebagai persyaratan mendapatkan pelayanan publik, apabila tidak dipenuhi oleh masyarakat mengakibatkan tidak terlindunginya hak sipil anak; c) Belum maksimalnya pemanfaatan Akta Kematian sebagai persyaratan Pengalihan Hak Waris; d) Upaya kearah terintegrasinya peraturan antar sektor dalam pemanfaatan data dan dokumen kependudukan yang masih perlu ditingkatkan; e) Berkas / arsip dokumen Kependudukan belum semuanya tertata dengan baik yang sesuai dengan standar Kearsipan Nasional; f) Kemampuan Sumber daya Manusia dan pelaksanaan teknis yang tidak merata.
Sosial	a) Belum optimalnya pemenuhan jaminan kebutuhan dasar; b) Belum optimalnya pelayanan rehabilitasi social; c) Belum optimalnya fasilitasi pemberdayaan social; d) Belum optimalnya penanganan korban bencana alam dan bencana social; e) Belum optimalnya pengelolaan taman makam pahlawan; f) Belum optimalnya penanganan migran korban tindak kekerasan; g) Persentase penyandang Disabilitas Telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti;

Urusan Pembangunan Daerah	Permasalahan
	<ul style="list-style-type: none"> h) Persentase Anak Telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti ; i) Persentase lanjut Usia Telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti; j) Persentase Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti.
Pendidikan dan Pelatihan Kepegawaian	<ul style="list-style-type: none"> a) Belum optimalnya pengelolaan data dan informasi kepegawaian; b) Masih adanya penempatan pejabat yang belum sesuai kualifikasi dan kompetensi; c) Masih adanya kesenjangan kompetensi ASN; d) Evaluasi kinerja aparatur belum berjalan obyektif; e) Pelaksanaan pengembangan kompetensi teknis, manajerial dan fungsional belum optimal.
Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> a) Pengelolaan keuangan daerah yang belum akuntabel; b) Pengelolaan aset daerah yang belum akuntabel; c) Masih rendahnya tingkat desentralisasi fiskal.
Sekretariat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> a) Fasilitasi pengelolaan bina mental dan spritual di masyarakat belum optimal; b) Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi penyusunan kebijakan bidang kesejahteraan masyarakat; c) Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi penyusunan kebijakan bidang kesejahteraan social; d) Dinamika perubahan di masyarakat dan pemerintahan yang berlangsung sangat cepat; e) Masih adanya kasus hukum pemerintah daerah yang belum tertangani; f) Percepatan kemajuan teknologi dalam pengelolaan informasi hukum; g) Belum Optimalnya Bagian Administrasi Pembangunan dalam fungsinya selaku koordinator penyusunan kebijakan; h) Masih banyaknya Peraturan perundang-undangan di daerah yang pengaturannya tumpang tindih dan berdiri sendiri-sendiri serta banyak kebijakan yang dibuat; i) Kurangnya kapasitas sumber daya aparatur dan sarana prasarana penunjang dalam penyelenggaraan keprotokolan, pelayanan pimpinan dan tamu; j) Kurang optimalnya penyebarluasan informasi pembangunan dan kegiatan pimpinan; k) Kurangnya kualitas tatakelola dokumentasi pimpinan; l) Masih rendahnya tata kelola pemerintahan; m) Masih rendahnya capaian pelayanan administrasi umum; n) Opini BPK.
Sekretariat DPRD	<ul style="list-style-type: none"> a) Belum optimalnya fungsi kelembagaan Sekretariat DPRD.
Penanaman Modal	<ul style="list-style-type: none"> a) Belum Optimalnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di bidang penanaman modal; b) Belum optimalnya kemudahan berinvestasi di Kabupaten Tulungagung.
KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	<ul style="list-style-type: none"> a) Belum optimalnya kinerja pengendalian penduduk; b) Belum optimalnya pelayanan keluarga berencana; c) Belum optimalnya pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga; d) Belum optimalnya kinerja pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan; e) Belum optimalnya pelayanan perlindungan perempuan; f) Belum optimalnya upaya peningkatan kualitas keluarga;

Urusan Pembangunan Daerah	Permasalahan
	g) Belum optimalnya pelayanan perlindungan anak.
Ketahanan Pangan	<ul style="list-style-type: none"> a) Terjadinya Gejolak Harga Pangan; b) Masih tingginya ketergantungan pada beras dan terigu; c) Masih banyaknya produk pangan segar yang mengandung residu pestisida; d) Masih ditemukannya Desa Rawan Pangan di Kabupaten Tulungagung; e) Masih rendahnya sumber daya ekonomi pendukung kemandirian pangan.
Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> a) Kerusakan ekosistem mengakibatkan kerusakan sumber air b) Belum optimalnya penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) baik secara kualitas dan kuantitas c) Kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan masih rendah d) Penurunan kualitas lingkungan hidup e) Pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah masih rendah f) Keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaan sampah g) Pelayanan penanganan persampahan belum mampu melayani seluruh wilayah h) Kondisi TPA Segawe mendekati penuh i) Penurunan Kualitas Udara dan Kualitas Air j) Pencemaran dan kerusakan tanah/lahan k) Keterlibatan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup belum optimal l) Timbulnya konflik di masyarakat akibat masih banyaknya pelaku usaha yang belum melakukan pengelolaan lingkungan yang baik m) Masih adanya usaha/ kegiatan yang menimbulkan pencemaran lingkungan
Penanggulangan Bencana Daerah	<ul style="list-style-type: none"> a) Belum optimalnya kesiapsiagaan tanggap bencana b) Belum optimalnya pelayanan informasi rawan bencana kepada masyarakat c) Data data terkait kebencanaan belum terdokumentasi dengan baik d) Kurang optimalnya pemanfaatan database kebencanaan untuk evaluasi tanggap bencana e) Belum optimalnya pemanfaatan sarana prasarana kesiapsiagaan bencana f) Belum optimalnya penataan system dasar terkait kebencanaan
Koperasi dan Usaha Mikro	<ul style="list-style-type: none"> a) Rendahnya Kualitas SDM pengelola koperasi; b) Kurang optimalnya kelembagaan dan pengawasan bagi Koperasi; c) Lemahnya akses pembiayaan, akses produksi, dan akses pemasaran; d) Rendahnya Kualitas SDM pelaku usaha mikro; e) Rendahnya Produktifitas dan daya saing produk Usaha Mikro.
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	<ul style="list-style-type: none"> a) Rendahnya Partisipasi Masyarakat dan Pembangunan; b) Rendahnya tingkat kemandirian desa; c) Persentase Usia Kawin Pertama (UKP) dibawah 20 Tahun.
Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> a) Rendahnya produktivitas; b) Rendahnya IP; c) Penerapan teknik budidaya kurang sesuai standar; d) Harga sangat fluktuatif;

Urusan Pembangunan Daerah	Permasalahan
	<ul style="list-style-type: none"> e) Kurang pemberdayaan kelompok tani; f) Debit air irigasi kurang; g) Alsintan kurang optimal; h) Ketersediaan pupuk subsidi yang terbatas; i) Kurangnya penggunaan benih unggul; j) Rendahnya kualitas jalan produksi; k) Kurangnya perlindungan petani; l) Kurangnya modal usaha petani; a) Belum optimalnya produksi hasil ternak besar, kecil dan unggas; b) Belum optimalnya kualitas produk hasil peternakan; c) Belum optimalnya perkembangan populasi ternak besar, kecil dan unggas; d) Menurunnya konsumsi hasil ternak pada masa pandemi covid-19; e) Masih rendahnya kesejahteraan peternak; f) Masih rendahnya kapasitas SDM peternak; g) Kurangnya pengetahuan peternak dalam usaha agribisnis.
Tenaga Kerja dan Transmigrasi	<ul style="list-style-type: none"> a) Fluktuatifnya angka pengangguran; b) Masih Cukup rendahnya keterampilan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja; c) Kurangnya jumlah instruktur pelatihan; d) Masih cukup tingginya angka perselisihan hubungan industrial.
Perindustrian dan Perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> a) Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang dibina masih sedikit; b) Kurangnya pelaku usaha yang siap untuk bersaing dan berpromosi di tingkat nasional.
Kelitbangan	<ul style="list-style-type: none"> a) Kurang cepatnya respon hasil kelitbangan untuk ditindak lanjuti dalam perencanaan pembangunan b) Belum optimalnya perangkat daerah dalam melaksanakan inovasi c) Kelembagaan kelitbangan daerah masih di level eselon 4

Sumber: Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung, 2021

Permasalahan pembangunan adalah merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan serta antara yang ingin di capai di masa datang dengan konsisi riil saat perencanaan dibuat. Dari rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (*gap*) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan, kemudian berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Tulungagung dapat petakan sebagai berikut:

Tabel 4.2 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Kualitas lingkungan hidup belum optimal	Rendahnya Konservasi sumber daya alam dan lingkungan	Belum optimalnya upaya pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati
		Rehabilitasi lahan kritis belum optimal

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	
Belum optimalnya upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	Angka Partisipasi Sekolah belum menunjukkan peningkatan yang signifikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat relatif rendah	
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/Mts/ sederajat relatif rendah	
		Rata-rata lama sekolah penduduk ≥ 15 masih relatif rendah	
		Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) relatif rendah	
	Kurangnya kualitas tenaga pendidik dan kelembagaan PAUD	Akreditasi SD/MI minimal B belum terpenuhi	
		Akreditasi SMP/Mts minimal B belum terpenuhi	
	Angka kesakitan yang masih cenderung fluktuatif	Angka kesakitan yang masih cenderung fluktuatif	Angka Kematian Balita fluktuatif
			Terbatasnya akses pelayanan Kesehatan masyarakat
			Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) belum merata
			Kejadian Stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/ balita meningkat
		Pelayanan KB belum memenuhi kebutuhan masyarakat	
	Rendahnya kualitas konsumsi pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) masih belum optimal	
Penguatan pengurangan risiko bencana daerah belum maksimal	kondisi wilayah yang masih sering terkena bencana longsor	Kultur tanah yang tidak stabil menyebabkan jalan rawan kerusakan	
		Kebutuhan dasar korban bencana sosial belum terpenuhi	
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Sistem Air Limbah Domestik belum optimal	Wilayah pelayanan air minum belum merata	SPAM eksisting masih banyak yang rusak	
		Cakupan pelayanan air bersih belum merata	
		Masih ditemukan desa yang belum terlayani SPAM	
	Penyediaan SPALD belum merata	Penyediaan SPALD belum merata	Masih terdapat desa yang belum ODF
			Kesadaran masyarakat untuk menerapkan PHBS masih rendah
			IPLT belum berperan secara maksimal
			Masih kurangnya sarana prasarana pendukung SPALD
Perolehan indeks kepuasan masyarakat masih dibawah target	Kepemilikan akta kelahiran belum merata	Pencatatan kelahiran belum dilakukan secara menyeluruh	
		Penerapan SPM pada fasilitas publik belum optimal	
Belum optimalnya PAD dan Kontribusi sektor unggulan terhadap PDRB	Banyaknya jumlah koperasi yang tidak aktif dan sedikitnya jumlah koperasi dalam kategori sehat	Kurangnya kapasitas pengurus dan pengelola koperasi dalam pengembangan usaha dan pemasaran	
		Kurangnya kualitas produk koperasi	

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah		
	Kurangnya akses dan kualitas UMKM	Legalitas, standardisasi dan sertifikasi produk UMKM masih rendah		
	Pertumbuhan 3 sektor unggulan masih kalah dibandingkan dengan pertumbuhan sektor lain	Kurangnya kualitas Tenaga Kerja Sektor Industri Manufaktur	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit masih sedikit.	
		Kontribusi pariwisata terhadap PDRB masih rendah	Pertumbuhan sektor pertanian masih 2,64%, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan sektor lain	
		Kualitas tenaga kerja belum kompetitif	Tenaga kerja yang sesuai dengan kompetensi masih rendah dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja	Persentase tenaga kerja formal belum ideal
			Upah rata-rata perjam pekerja masih belum layak dan rendahnya pemerataan kesejahteraan masyarakat	Jumlah tingkat setengah pengangguran masih cukup tinggi
	Persentase usia muda tidak sekolah, tidak bekerja, dan tidak mengikuti pelatihan masih cukup tinggi		Belum optimalnya Pemerataan Ekonomi	
	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50% dari median pendapatan masih meningkat			
	Pendapatan di dalam masyarakat mengalami penurunan			
	Jumlah desa tertinggal dan desa mandiri masih belum mencapai target			
	Program pengentasan kemiskinan (PKH) belum berjalan secara efektif	Indeks Resiko bencana		
	Masih lemahnya manajemen bencana		Masih adanya korban dampak Bencana	
	Masih lemahnya manajemen bencana		Kurangnya kesiapsiagaan dalam hal mitigasi bencana	
		Pendidikan layanan khusus yang diberikan pada daerah dengan risiko bencana tinggi dan sedang belum merata	Standar pelayanan di kawasan perkotaan masih rendah (Menurunnya tingkat kelayakan huni kota (MLCI))	
		Rasa aman menjadi kebutuhan penduduk		Masih marak terjadi kekerasan pada anak dan perempuan terjadi di masyarakat
Menurunnya modal sosial di masyarakat	Kasus kejahatan dan pembunuhan meningkat	Tingkat permisif masyarakat terhadap perilaku korupsi masih cukup tinggi		
	Masih dilakukannya hukuman fisik/agresi psikologis oleh pengasuh			

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Prevalensi kekerasan terhadap anak meningkat
		Kebijakan pelarangan diskriminatif belum teridentifikasi secara jelas
		Sanksi belum tegas terhadap pelanggar perda
		Kesadaran masyarakat dalam penegakan hukum masih kurang
	Ketersediaan jaringan telekomunikasi	Kemampuan akses terhadap pelayanan komunikasi <i>mobile</i> masih rendah
		Ketersediaan/cakupan Jaringan <i>Mobile Broadband</i> masih belum optimal
	Setiap tahunnya terjadi peningkatan permasalahan terkait PMKS	Keterbatasan cakupan wilayah dalam penanganan PMKS yang masih belum mencakup seluruh wilayah di kecamatan.
Jaminan kesehatan belum merata		
Jaminan sosial ketenagakerjaan belum merata		
Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial, termasuk bagi anak penyandang difabilitas miskin dan rentan belum merata		
Pengarusutamaan Gender belum berjalan optimal	Masih adanya kesenjangan disemua aspek	Persentase keterwakilan perempuan di DPRD masih belum meningkat
		Kebijakan responsif gender masih belum memadai jumlahnya
	Perlindungan perempuan dan anak masih kurang optimal	Perempuan dewasa dan anak perempuan umur 15-64 tahun masih rentan mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional)
		Layanan korban kekerasan terhadap perempuan masih perlu dioptimalkan
	Upaya pengendalian penduduk belum optimal	Usia menikah masih belum ideal
		Tingkat perempuan melahirkan dini masih tinggi
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi masih belum optimal	Rendahnya kemandirian dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Penerapan e-procurement belum optimal
		Penerimaan dari pajak yang diterima oleh Pemerintah Daerah terhadap PDRB masih rendah
		Kontribusi dari pajak daerah terhadap belanja daerah kurang optimal
		Perencanaan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) belum dilaksanakan
		Belum optimalnya pemanfaat TI dalam pelayanan

Sumber: Hasil Analisis, 2021

4.2 Isu Strategis

Isu strategis merupakan kondisi, atau permasalahan daerah bersifat mendesak yang harus diperhatikan, atau diutamakan dalam merancang pembangunan daerah, karena dampaknya yang signifikan bagi entitas dimasa mendatang. Isu strategis ini, disusun melalui identifikasi permasalahan

pembangunan yang ada di Kabupaten Tulungagung. Secara konseptual, isu strategis, memiliki kemungkinan bahwa belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat nanti. Selain itu, isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

4.2.1 Isu Internasional

4.2.1.1 Capaian Sustainable Development Goals (SDGs)

Mulai tahun 2016, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) tahun 2015-2030 secara resmi menggantikan, dan merupakan tahun transisi dari berakhirnya *Millennium Development Goals* (MDGs). SDGs, atau tujuan pembangunan berkelanjutan adalah kelanjutan dari program MDGs. Berbeda dengan MDGs yang hanya memiliki 8 tujuan, SDGs memiliki 17 tujuan pembangunan berkelanjutan dengan 169 target. Oleh karena itu, SDGs memiliki cakupan yang lebih luas dan diharapkan mampu lebih tanggap akan kebutuhan universal. Adapun tujuan SDGs mencakup 3 (tiga) dimensi dari pembangunan berkelanjutan, yaitu pertumbuhan ekonomi, inklusi sosial, serta perlindungan terhadap lingkungan.

SDGs dibuat berdasarkan momentum keberhasilan MDGs. Tujuan SDGs mencakup lebih banyak aspek kehidupan, dengan 5 (lima) poin yang menjadi pondasi dalam pelaksanaannya yaitu manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian, dan kemitraan yang ingin mencapai tujuan tersebut di tahun 2030, maka disusunlah 17 tujuan global sebagai berikut:

- 1) Tanpa Kemiskinan (*No Poverty*)** – pemerintah daerah seperti halnya Pemerintah Kabupaten Tulungagung berada pada posisi yang ideal untuk dapat mengidentifikasi masyarakat yang hidup dalam kemiskinan dengan lebih dekat, dan memberikan sumber daya dan pelayanan untuk membantu membebaskan mereka dari kemiskinan secara tepat sasaran. Tanggung jawab Pemerintah Daerah terkait pelayanan dasar yang bersifat lokal, seperti air dan sanitasi, menjadikan berbagai pihak yang terkait sebagai mitra utama untuk mencapai tujuan tersebut. Pemerintah Daerah juga dapat memainkan peran penting untuk mengentaskan kemiskinan dengan mengembangkan strategi pengembangan ekonomi lokal, meningkatkan pendapatan dan membangun ketahanan masyarakat terhadap potensi-potensi bencana. Pada indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang telah dilaksanakan dan belum mencapai target yang telah ditentukan, bila melihat pada capaian dan targetnya masih terdapat gap (selisih kurang) yang beragam, dimana gap paling besar terdapat pada indikator Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/ Program Keluarga Harapan, sedangkan gap paling kecil terdapat pada indikator Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.
- 2) Tanpa Kelaparan (*Zero Hunger*)** – Sejalan dengan prioritas pembangunan Indonesia yang termaktub ke dalam prioritas ketahanan pangan dan penciptaan lapangan kerja, dimana diharapkan pada tahun 2030, kondisi

kelaparan di Kabupaten Tulungagung sudah tidak ada dan dipastikan akses oleh semua orang, terutama orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan, termasuk bayi, makanan yang aman, bergizi dan cukup sepanjang tahun. Pada indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang telah dilaksanakan dan belum mencapai target yang telah ditentukan, bila melihat pada capaian dan targetnya masih terdapat gap (selisih kurang) yang beragam, dimana gap paling besar terdapat pada indikator Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi, sedangkan gap paling kecil terdapat pada indikator Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/ balita.

- 3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera (*Good Health and Well-being*)** – Jumlah total indikator untuk tujuan 3 yaitu 34 indikator dan dari jumlah tersebut indikator yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung. Terdapat beberapa target SDG's di sektor kesehatan yang perlu diwujudkan. Fokus dari seluruh target tersebut antara lain gizi masyarakat, sistem kesehatan nasional, akses kesehatan dan reproduksi, Keluarga Berencana (KB), serta sanitasi dan air bersih. Program yang diusung untuk mewujudkan SDG's dalam bidang kesehatan adalah Program Indonesia Sehat dengan 3 pilar yakni paradigma sehat, pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan nasional. Pada indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang telah dilaksanakan dan belum mencapai target yang telah ditentukan, bila melihat pada capaian dan targetnya masih terdapat gap (selisih kurang) yang beragam, dimana gap paling besar terdapat pada indikator Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), sedangkan gap paling kecil terdapat pada indikator Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).
- 4) Pendidikan Berkualitas (*Quality Education*)** – Implementasi dan pengembangan kajian pendidikan juga harus disesuaikan dengan kondisi serta situasi sosial yang ada di masyarakat. Pada indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang telah dilaksanakan dan belum mencapai target yang telah ditentukan, bila melihat pada capaian dan targetnya masih terdapat gap (selisih kurang) yang beragam dimana gap paling besar terdapat pada indikator Persentase SD/MI berakreditasi minimal B, sedangkan gap paling kecil terdapat pada indikator Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun.
- 5) Kesetaraan Gender (*Gender Equality*)** – Pada indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang telah dilaksanakan dan belum mencapai target yang telah ditentukan, bila melihat pada capaian dan targetnya masih terdapat gap (selisih kurang) yang beragam, dimana gap paling besar terdapat pada indikator. Pada indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang telah dilaksanakan dan belum mencapai target yang telah ditentukan, bila melihat pada capaian dan targetnya masih terdapat gap (selisih kurang) yang beragam, dimana gap paling besar terdapat pada indikator Proporsi individu yang menguasai/ memiliki telepon genggam, sedangkan gap paling kecil terdapat pada indikator Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64

tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.

- 6) Akses Air Bersih dan Sanitasi Layak (*Clean Water Access and Decent Sanitation*)** – Tujuan ini berupaya sebisa mungkin memastikan semua orang memiliki akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak. Tujuan 6 (Akses Air Bersih dan Sanitasi Layak) memiliki jumlah indikator sebanyak 18 indikator. Dari indikator yang belum dilaksanakan, terdapat sebanyak 2 indikator yang dalam perhitungan capaiannya bukan menjadi kewenangan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung, dan sebanyak 1 indikator diperuntukkan khusus untuk daerah yang memiliki danau, sedangkan di Kabupaten Tulungagung tidak terdapat danau. Berdasarkan data capaian indikator yang telah dihimpun dari Perangkat Daerah/ Instansi terkait di Kabupaten Tulungagung selanjutnya dapat diketahui bahwa sebanyak 10 indikator. Pada indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang telah dilaksanakan dan belum mencapai target yang telah ditentukan, bila melihat pada capaian dan targetnya masih terdapat gap (selisih kurang) yang beragam, dimana gap paling besar terdapat pada indikator Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.
- 7) Energi Bersih dan Terjangkau (*Affordable and Clean Energy*)** – Pemerintah daerah memiliki posisi terbaik untuk dapat mengidentifikasi kesenjangan terkait akses terhadap energi yang terjangkau bagi kelompok rentan di dalam masyarakat. Pemerintah daerah dapat berkontribusi secara langsung untuk meningkatkan efisiensi energi dengan berinvestasi dalam gedung-gedung hemat energi dan sumber energi terbarukan untuk fasilitas publik. Tujuan 7 (Energi Bersih dan Terjangkau) memiliki 2 indikator, yaitu Indikator Bauran Energi terbarukan dan Intensitas energi primer, dimana kedua indikator tersebut belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional karena menjadi kewenangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur. Namun perlu dijadikan sebagai informasi bahwa Bauran energi terbarukan berdasarkan data yang diperoleh dari PT.
- 8) Pekerjaan yang Layak dan Pertumbuhan Ekonomi (*Decent Work and Economic Growth*)** – Pentingnya kerja layak dalam mencapai pembangunan berkelanjutan disoroti oleh Tujuan 8 yang bertujuan untuk “mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja produktif serta kerja layak untuk semua”. Pada indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang telah dilaksanakan dan belum mencapai target yang telah ditentukan, bila melihat pada capaian dan targetnya masih terdapat gap (selisih kurang) yang beragam, dimana gap paling besar terdapat pada indikator Jumlah wisatawan mancanegara sedangkan gap paling kecil terdapat pada indikator Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.
- 9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur (*Industry, Innovation and Infrastructure*)** – Pada indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang telah dilaksanakan dan belum mencapai target yang telah ditentukan, bila melihat pada capaian dan targetnya masih terdapat gap

(selisih kurang) yang beragam, dimana gap paling besar terdapat pada indikator Jumlah dermaga penyeberangan, sedangkan gap paling kecil terdapat pada indikator Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.

- 10) Berkurangnya Kesenjangan (*Reduced Inequalities*)** – Kesenjangan pendapatan adalah masalah global yang membutuhkan solusi global. Pada indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang telah dilaksanakan dan belum mencapai target yang telah ditentukan, bila melihat pada capaian dan targetnya masih terdapat gap (selisih kurang) yang beragam, dimana gap paling besar terdapat pada indikator Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan, sedangkan gap paling kecil terdapat pada indikator Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.
- 11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan (*Cities and Sustainable Settlements*)** – Pembangunan berkelanjutan tidak akan tercapai tanpa perubahan signifikan dalam cara kita membangun dan mengatur wilayah perkotaan. Kemiskinan ekstrem seringkali terpusat di wilayah perkotaan, dan pemerintahan nasional serta kota berjuang keras mengakomodasi pertumbuhan populasi di wilayah-wilayah ini. Pada indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang telah dilaksanakan dan belum mencapai target yang telah ditentukan, bila melihat pada capaian dan targetnya masih terdapat gap (selisih kurang), yaitu terdapat pada indikator Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.
- 12) Konsumsi dan Produksi Bertanggungjawab (*Responsible Consumption and Production*)** – Permasalahan lingkungan yang terus muncul hingga saat ini, tidak terlepas dari pola produksi dan konsumsi yang tidak bertanggung jawab. Keberadaan Tujuan 12, yaitu menjamin keberlangsungan konsumsi dan pola produksi memiliki 5 indikator yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten, termasuk Kabupaten Tulungagung. Pelaksanaan TPB pada tujuan 12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab) dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung. Tujuan 12 pada TPB lebih spesifik pada pengendalian dan pencemaran terhadap lingkungan yang ditimbulkan akibat aktivitas produksi dan industri.
- 13) Penanganan Perubahan Iklim (*Climate Change*)** – Penting bagi pemerintah untuk mengintegrasikan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim ke dalam perencanaan wilayah dan kota untuk mengurangi emisi dan meningkatkan ketahanan mereka terhadap gangguan lingkungan. Berdasarkan hasil analisis pencapaian TPB Kabupaten Tulungagung, pelaksanaan TPB Tujuan 13 (Penanganan Perubahan iklim) memiliki 2 indikator, dimana dari 2 indikator tersebut satu indikator sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target, yakni indikator Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah. Dan satu indikator sisanya sudah dilaksanakan namun belum mencapai target, yaitu indikator Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. Sementara untuk OPD yang melaksanakan indikator tersebut yakni BPBD (Badan Penanggulangan

Bencana Daerah) Kabupaten Tulungagung. Sehingga gap indikator yang belum tercapai dan menjadi permasalahan dalam pelaksanaan TPB adalah indikator berkaitan dengan Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang dimana terjadi peningkatan jumlah korban meninggal sebanyak 4 orang yang sebelumnya tidak terjadi di tahun 2019. Dari kedua indikator tersebut hanya 1 indikator yang memiliki gap dengan target nasional.

14) Ekosistem Laut (*Marine Ecosystems*) – Pemerintah Kabupaten Tulungagung terkait dengan kondisi yang terjadi berdasarkan indikator-indikator pada tujuan tersebut, mengingat Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu daerah di Jawa Timur yang berbatasan langsung dengan laut. Bila melihat pada indikator-indikator yang terdapat pada tujuan 14, beberapa data yang dimiliki dan dapat disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung melalui Dinas Perikanan adalah terkait dengan indikator Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman, dan indikator Jumlah nelayan yang terlindungi. Dari data yang tersedia menunjukkan bahwa tangkapan jenis ikan yang berada di Kabupaten Tulungagung pada tahun 2020 menunjukkan adanya penurunan dibandingkan dengan tahun 2019. Membandingkan antara data yang tersedia dengan target secara nasional yang telah ditetapkan, maka dapat terlihat bahwa untuk indikator Jumlah nelayan yang terlindungi di Kabupaten Tulungagung telah memenuhi target yang ditetapkan, dimana jumlahnya pada tahun 2017 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2016, sedangkan untuk indikator tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman bila melihat pada target yang ditetapkan (skala nasional), maka di Kabupaten Tulungagung berdasarkan data pada tahun 2020 menunjukkan adanya hasil yang masih sangat kecil, sehingga dengan demikian pada tahun-tahun mendatang perlu ditingkatkan.

15) Ekosistem Daratan (*Land Ecosystem*) – Peran pemerintah daerah sebagai penyedia layanan ditambah dengan kemampuan untuk merubah perilaku dalam kehidupan masyarakat, menempatkan pemerintah daerah didalam posisi yang strategis untuk melindungi sumber daya alam dan habitat. Keberadaan Tujuan 15 yaitu melindungi, mengembalikan, dan meningkatkan keberlangsungan pemakaian ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, mengurangi tanah tandus serta tukar guling tanah memiliki 4 indikator yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten, termasuk Kabupaten Tulungagung. Keberadaan indikator pada tujuan 15 di Kabupaten Tulungagung secara keseluruhan sebanyak 4 indikator menjadi kewenangan Dinas Lingkungan Hidup yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup di Kabupaten Tulungagung. Hasil analisis capaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) untuk tujuan melindungi, mengembalikan, dan meningkatkan keberlangsungan pemakaian ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, mengurangi tanah tandus serta tukar guling tanah (ekosistem daratan) di Kabupaten Tulungagung. Berdasarkan hasil analisis 4 indikator tersebut pada tujuan 15 dapat ditentukan pemeringkatan berdasarkan pencapaian indikator yakni sebagai berikut : 1. Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi

terhadap luas lahan keseluruhan; 2. Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan; 3. Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata; 4. Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.

16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh (*Peace, Justice and Strong Institutions*) – Tujuan ini mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan usaha-usaha dalam melibatkan masyarakat dan menjadi lebih responsif terhadap keinginan dan kebutuhannya. Hasil analisis capaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) untuk Tujuan 16 menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan (perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh) di Kabupaten Tulungagung.

17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan (*Partnership for the Goals*) – Pemerintah daerah memiliki posisi yang ideal untuk memfasilitas kerjasama antara badan publik, sektor swasta dan masyarakat madani, membangun kesiapan pemerintah pada level global. Selanjutnya untuk mengkategorikan pencapaian indikator TPB pada Tujuan 17 akan dipisahkan berdasarkan pencapaian indikator yang memiliki status sudah dilaksanakan dan belum mencapai target. Dari keterangan tersebut lalu diranking berdasarkan gap tertinggi dengan maksud memberikan penjelasan indikator mana dari Tujuan 17 yang memiliki effort paling besar dalam pencapaian TPB, yaitu : 1. Rasio penerimaan pajak terhadap PDB; 2. Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama; 3. Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik ; 4. Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS); 5. Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.

Berdasarkan tujuan tersebut, Kabupaten Tulungagung memiliki keinginan kuat untuk turut berperan aktif dalam pelaksanaan SDGs. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 terkait tujuan pembangunan berkelanjutan, dimana pemerintah daerah yang dipimpin oleh kepala daerah memiliki unsur sebagai penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Rencana aksi SDGs Daerah merupakan prioritas daerah dalam melaksanakan SDGs sesuai dengan kebutuhan, dan keadaan daerah. Kemudian, harus menjadi rencana kerja pemerintah setiap tahun. Prioritas tersebut dapat dibagi ke dalam dua rencana besar, yaitu bagaimana fokus, dan sasaran khusus SDGs di daerah, dan bagaimana SDGs diarusutamakan ke dalam seluruh kebijakan, dan program pemerintah daerah. Konsistensi dalam perwujudan tujuan dari SDGs adalah menerapkan seluruh prinsip dari tujuan pembangunan berkelanjutan dalam setiap strategi pembangunan dokumen perencanaan di Kabupaten Tulungagung.

Berikut merupakan konektivitas antara pilar dan tujuan pembangunan berkelanjutan menurut Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia:



Gambar 4. 2 Pilar dan tujuan pembangunan berkelanjutan menurut Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

Sumber: Kementerian Republik Indonesia, 2021

Sebagai upaya dalam mencapai 17 tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut, maka selayaknya prinsip SDGs harus diintegrasikan terhadap setiap arah pembangunan baik Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Nasional. Untuk itu diamanatkan dalam Permendagri 86 Tahun 2017, bahwa sebagai upaya untuk memastikan SDGs telah menjadi dasar dan isu yang harus diperhatikan dalam pembangunan, maka penelaahan KLHS RPJMD sebagai bagian penting dalam tahapan penyusunan isu-isu strategis. Adapun maksud dari disusunnya KLHS RPJMD adalah untuk memastikan pembangunan daerah mengedepankan asa keberlanjutan.

Analisis capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Kabupaten Tulungagung disajikan dengan menggunakan pendekatan sistematika pilar dan tujuan dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang telah ditetapkan, yaitu: Pilar Pembangunan Sosial, Pilar Pembangunan Ekonomi, Pilar Pembangunan Lingkungan, dan Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola. Berdasarkan keempat pilar tersebut, selanjutnya dijabarkan kedalam 17 tujuan yang masing-masing tujuan didalamnya terdapat indikator yang menjadi bahasan utama dalam analisis tersebut. Selain itu dalam pembahasan profiling pencapaian ini diuraikan indikator-indikator sesuai dengan kategori pencapaian. Kategori capaian TPB Kabupaten Tulungagung berdasarkan hasil analisis data terbagi atas 4 (empat) kategori yaitu :

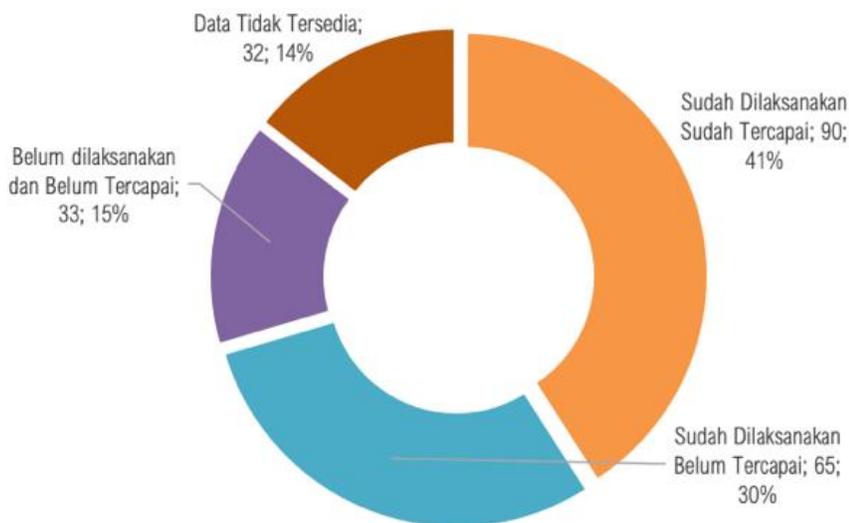
1. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional (Sudah-Sudah);
2. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional (Sudah- Belum);
3. Indikator TPB yang telah memiliki data tetapi belum mencapai target nasional (Belum- Belum);
4. Indikator TPB yang tidak/ belum memiliki Data (Data tidak Tersedia).

Tabel 4.3 Capaian KLHS Kabupaten Tulungagung

Tujuan	Nama Tujuan	Total Indikator	Sudah-Sudah	Sudah-Belum	Belum-Belum	Tidak ada Data
1	Tanpa Kemiskinan	24	11	10	1	2
2	Tanpa Kelaparan	11	6	3	0	2
3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	34	18	6	6	4
4	Pendidikan Berkualitas	13	6	5	0	2
5	Kesetaraan Gender	14	6	3	0	5
6	Akses Air Bersih dan Sanitasi Layak	18	5	5	5	3
7	Energi Bersih dan Terjangkau	2	0	0	2	0
8	Pekerjaan layak dan Pertumbuhan Ekonomi	19	2	14	0	3
9	Industri, Inovasi dan Infrastruktur	13	5	3	3	2
10	Berkurangnya Kesenjangan	11	5	2	4	0
11	Kota dan Pemukiman yang berkelanjutan	13	6	1	5	1
12	Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab	5	2	0	1	2
13	Penanganan Perubahan Iklim	2	1	1	0	0
14	Ekosistem Laut	0	0	0	0	0
15	Ekosistem daratan	4	0	2	2	0
16	Perdamaian Keadilan Kelembagaan yang tangguh	21	12	5	0	4
17	Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan	16	5	5	4	2
Total		220	90	65	32	33

Sumber: Dokumen KLHS, 2021

Analisis capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Kabupaten Tulungagung dilakukan dengan melihat pada capaian pada masing-masing indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Kabupaten Tulungagung. rekapitulasi pencapaian TPB Kabupaten Tulungagung secara total/ keseluruhan yakni memisahkan pencapaian indikator yang sudah dilaksanakan dan sudah tercapai, indikator yang sudah dilaksanakan dan belum tercapai, indikator yang belum dilaksanakan dan belum tercapai serta indikator yang belum memiliki data. Secara umum berdasarkan 220 indikator TPB dengan membandingkan terhadap target sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan TPB, Kabupaten Tulungagung memiliki 155 indikator atau sebesar 70,45% dari total indikator yang memiliki data (telah tersedia data), 32 indikator atau sebesar 14,55% tidak memiliki data, serta 33 indikator atau sebesar 15,0% merupakan indikator yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017. Untuk mengetahui secara lebih jelas dan rinci terkait dengan kondisi pencapaian indikator TPB di Kabupaten Tulungagung dapat dilihat pada grafik berikut.

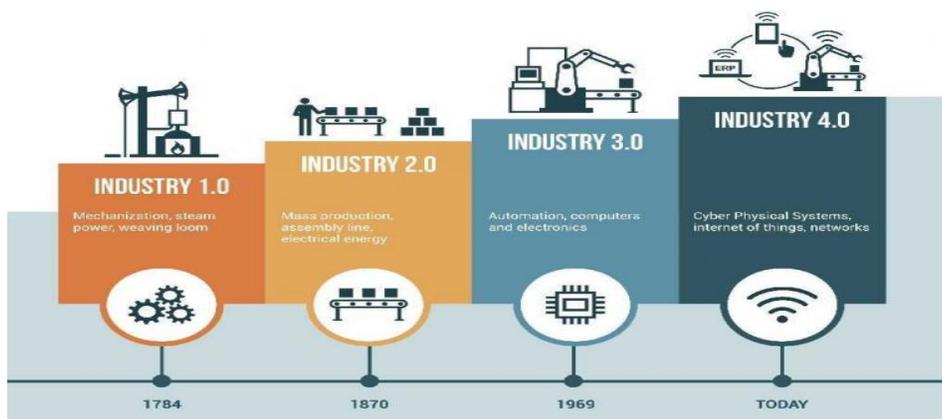


Grafik 4. 1 Rekapitulasi Pencapaian Indikator TPB Kabupaten Tulungagung

Sumber: KLHS Kabupaten Tulungagung, 2021

4.2.1.2 Peluang dan Tantangan Revolusi Industri 4.0

Revolusi industri merupakan titik tolak perubahan industri secara fundamental dikenal dengan revolusi industri 1.0, 2.0, 3.0, dan 4.0.



Gambar 4. 3 Titik Tolak Perubahan Industri

Sumber: Audi Rahmanto, 2020

Revolusi 1.0 atau revolusi pertama dimulai pada akhir abad ke 18 dengan ditandai ditemukannya alat tenun mekanis pertama pada tahun 1784. Kala itu, industri diperkenalkan dengan fasilitas produksi mekanis menggunakan tenaga air dan uap. Pada revolusi industri pertama, proses industri yang awalnya membutuhkan tenaga manusia dan hewan, digantikan dengan mesin uap tersebut.

Revolusi industri 2.0 terjadi pada awal abad 20 dimana pada tahap ini listrik menggantikan peran tenaga uap dan air menjadi sumber utama industri. Pada tahap ini berkembangnya jumlah program manajemen yang memungkinkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Selain itu dikembangkan juga produksi massal berdasarkan pembagian kerja. Lini produksi pertama melibatkan rumah potong hewan di Cincinnati pada 1870.

Revolusi industri 3.0 ditengarai muncul perdana pada awal tahun 1970. Dimulai dengan penggunaan elektronik dan teknologi informasi guna

otomatisasi produksi. Revolusi industri generasi ketiga ini ditandai dengan kemunculan pengontrol logika terprogram pertama (PLC), yakni model 084-969. Sistem otomatisasi berbasis komputer ini membuat mesin industri tidak lagi dikendalikan manusia. Dampaknya adalah biaya produksi menjadi lebih murah, namun isu tenaga kerja tentunya masih menjadi masalah pada tahap ini.

Sedangkan revolusi industri 4.0 yang terakhir dan sekaligus yang kita alami saat ini diprakarsai oleh Prof. Klaus Schwab, ekonom terkenal dari Jerman yang mengenalkan konsep Revolusi Industri 4.0 dalam bukunya "*The Fourth Industrial Revolution*". Beliau menegaskan bahwa revolusi industri 4.0 telah mengubah kerja manusia secara fundamental. Pada saat ini industri telaah menyentuh virtual, konektivitas manusia, mesin, dan data. Sebagai contoh berikut merupakan bidang-bidang yang memperoleh terobosan berkat kemajuan teknologi 1) Robot Kecerdasan Buatan; 2) Teknologi Nano, 3) Bioteknologi; 4) Teknologi Kuantum, 5) Blockchain; 6) Teknologi Berbasis Internet; dan 7) Printer 3D.

Sebagai contoh telah berjalannya revolusi industri 4.0 di Indonesia adalah transportasi online. Bahkan yang terjadi adalah sempat terjadinya perseteruan antara transportasi umum konvensional, dengan transportasi online pada tahun 2017. Hal tersebut ditengarai disebabkan belum siapnya masyarakat dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Angkutan online dengan inovasinya dengan memanfaatkan internet dan smartphone merupakan terobosan yang tentunya sedikit banyak menyelesaikan problem di masyarakat. Selain itu, berkembangnya industri 4.0 di Indonesia lainnya adalah berkembangnya sistem belanja online, startup, dan industri kreatif di Indonesia.

Semenjak diresmikannya roadmap revolusi industri 4.0 oleh Presiden Joko Widodo pertanyaan terbesar adalah bagaimana perkembangan industri 4.0 di Indonesia, dapatkan menjadikan tantangan menjadi peluang, atau industri 4.0 menjadi sebuah bumerang untuk Indonesia. Salah satu yang menjadi peluang terbesar Indonesia saat ini adalah jumlah penduduk yang mencapai 260 juta, dengan proporsi 160 juta penduduk berusia produktif 14-64 tahun. Seperti yang kita tahu, konsep yang berkembang dari Industri 4.0 yang telah dijelaskan diatas adalah berkembangnya industri dengan internet melalui konektivitas tanpa batas, dan hal tersebut menjadi tantangan untuk manusia dimana perannya semakin tergantikan dengan teknologi. Jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 260 juta jiwa bila kita lihat bertentangan dengan konsep yang dikembangkan oleh Industri 4.0. Tentunya hal yang menjadi tantangan besar pertama adalah, bagaimana Indonesia menyiapkan 260 juta penduduknya siap terhadap revolusi industri ini. Dengan kesiapan Sumber daya manusia, tentunya dapat menjadikan tantangan sebagai peluang. Sedangkan isu selanjutnya adalah, bagaimana mendekatkan teknologi dan konektivitas khususnya di 5 sektor PDB terbesar di Indonesia yang meliputi 1) Industri makanan dan minuman; 2) tekstil dan pakaian; 3) otomotif; 4) Kimia; dan 5) elektronik.

Bila mengerucut Kabupaten Tulungagung tentunya ada beberapa sektor yang masih menjadi unggulan yang meliputi pertanian, industri tekstil dan industri makanan. Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung tentunya harus dapat mengintegrasikan sektor tersebut dengan berkembangnya

industri 4.0. Selain itu meskipun kita tahu bahwa kewenangan daerah kabupaten/kota hanya hingga pendidikan 9 tahun atau SMP sederajat. Namun melihat perkembangan sekarang, tidak cukup berhenti disitu. Pendidikan vokasi khususnya, harus disesuaikan dan didekatkan dengan potensi unggulan dan perkembangan industri 4.0.

4.2.2 Isu Nasional

4.2.2.1 Isu RPJPN 2005-2025

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 menetapkan bahwa visi pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan “INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR”. RPJPN 2005-2025 dilaksanakan dalam 4 (empat) tahap Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dengan rumusan arahan prioritas kebijakan. Sesuai dengan tahapan tersebut, pembangunan dalam RPJMN ke-3 (2015-2019) diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pada pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia berkualitas serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat. Kebijakan RPJPN 2005-2025 tersebut memberikan tantangan bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk meningkatkan daya saing daerah berbasis potensi lokal melalui keunggulan kompetitif perekonomian, SDA, SDM dan kemampuan IPTEK yang tinggi.

4.2.2.2 Isu RPJMN 2020-2024

Adapun isu penting dalam RPJMN 2020-2024 sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas

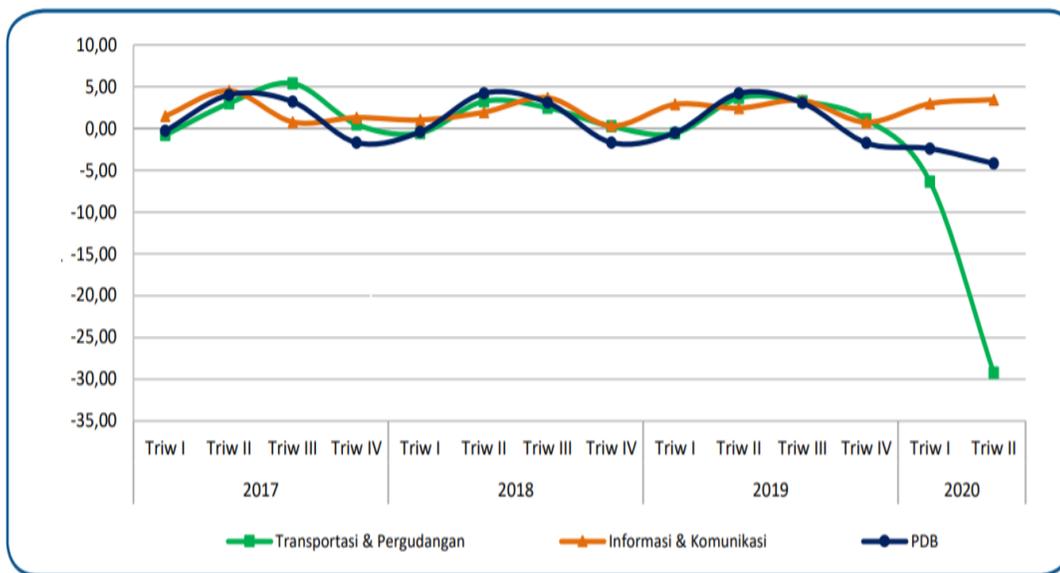
Salah satu isu strategis pembangunan nasional 5 (lima) tahun mendatang, adalah berkaitan dengan ekonomi. Mengingat isu ekonomi adalah isu yang penting karena memiliki dampak yang luas terhadap tingkat kesejahteraan, dan berdampak pula terhadap segala aspek/urusan dalam upaya menjalankan roda pemerintahan. Salah satu cara agar kita dapat mengetahui kondisi ekonomi yaitu melalui pemetaan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi sendiri menjadi tujuan dari pembangunan berkelanjutan (SDG's) yang mana menjadi fokus internasional untuk dilakukan upaya pencapaiannya. Hal itu tertera dalam SDG's yang terletak pada fokus kedelapan yang berbunyi pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak (*decent work and economic growth*).

Tujuan dari upaya pembangunan berkelanjutan pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus, inklusif, dan berkelanjutan. Berkaitan dengan upaya tersebut, Pemerintah Pusat berusaha untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi dengan maksimal. Salah satu cara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah dengan melalui pembangunan ekonomi.

Pembangunan ekonomi dalam lima tahun ke depan diarahkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi yang ditunjukkan oleh kemampuan dalam pengelolaan sumber daya ekonomi, dan dalam menggunakan sumber daya

tersebut untuk memproduksi barang dan jasa bernilai tambah tinggi untuk memenuhi pasar dalam negeri dan ekspor. Melalui peningkatan pengelolaan sumber daya ekonomi untuk memproduksi barang dan jasa yang bernilai tambah tinggi harapannya dapat mendorong pertumbuhan yang berkualitas dengan adanya keberlanjutan daya dukung sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan secara adil dan merata.

Pembangunan ekonomi akan dilaksanakan melalui dua pendekatan, yaitu: (1) pengelolaan sumber daya ekonomi, dan (2) peningkatan nilai tambah ekonomi. Kedua pendekatan ini dilakukan dengan dasar agar membentuk sinergi dan keterpaduan kebijakan lintas sektor yang mencakup sektor pangan dan pertanian, kemaritiman dan perikanan, industri, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital. Adapun implementasi dari kedua pendekatan tersebut akan didukung dengan perbaikan data sehingga mampu menjadi rujukan pemantauan dan evaluasi capaian pembangunan, serta perbaikan dalam upaya mencapai kualitas kebijakan. Adapun pertumbuhan PDB Nasional berdasarkan beberapa lapangan usaha adalah sebagai berikut.



Grafik 4. 2 Pertumbuhan PDB Beberapa Lapangan Usaha (%)

Sumber: BPS, 2020

Pada gambar diatas, menggambarkan bahwa kondisi ekonomi Indonesia pada triwulan II-2020 terhadap triwulan I-2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 4,19 persen. Adapun lapangan usaha yang mengalami kontraksi pertumbuhan tersebut diantaranya yaitu Transportasi dan Pergudangan sebesar 29,22 persen; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 22,31 persen; dan Jasa Lainnya sebesar 15,12 persen. Sementara pada sisi lain, beberapa lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif, antara lain Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang tumbuh sebesar sebesar 16,24 persen; kemudian Informasi dan Komunikasi sebesar 3,44 persen; dan Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 1,28 persen. Melalui peningkatan yang positif tersebut, harapannya pengelolaan sumber daya ekonomi, mulai dari pertanian, pangan, kehutanan, kelautan dan perairan maupun energi dan informasi komunikasi, mampu untuk memasok bahan baku yang berkualitas sehingga menjadi sebuah produk yang bernilai dan berkualitas tinggi. Adapun hal strategis yang

dapat dilakukan dalam upaya memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas, yaitu:

- 1) Keberlanjutan Sumber Daya Alam;
- 2) Efektivitas Tata Kelola Sumber Daya Ekonomi;
- 3) Transformasi Struktural; dan
- 4) Revolusi Industri 4.0 dan Ekonomi Digital.

Adapun Arah kebijakan dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas adalah sebagai berikut:

A. Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi

1. Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan energi baru terbarukan (EBT);
2. Peningkatan kuantitas/ketersediaan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
3. Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan;
4. Peningkatan pengelolaan kemaritiman dan kelautan.

B. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi

1. Penguatan kewirausahaan dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM);
2. Peningkatan nilai tambah dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi;
3. Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja;
4. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN); dan
5. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.

2. Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan & Menjamin Pemerataan

Isu mengenai pengembangan wilayah guna mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan adalah salah satu bentuk integrasi antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah nasional (RPJMN) 2020-2024 dengan Rencana Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Hal ini karena, selain syarat akan berlangsungnya pembangunan berkelanjutan juga sebagai upaya pembangunan untuk membentuk perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah dengan didukung sumberdaya manusia berkualitas dan berdaya saing.

Sebagai upaya untuk mewujudkan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah dengan didukung sumberdaya manusia berkualitas dan berdaya saing, maka dibutuhkan pendekatan dan strategi melalui optimalisasi pengembangan wilayah. Adapun pengembangan wilayah nanti diharapkan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Oleh karena itu, terdapat 2 (dua) strategi utama, yaitu pertumbuhan dan strategi pemerataan berbasis wilayah pulau.

Strategi pertumbuhan adalah transformasi dan akselerasi pembangunan pulau dan kepulauan, sementara strategi pemerataan disesuaikan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu tidak meninggalkan satu-pun kelompok masyarakat (*leave no one behind*). Sebagai upaya untuk mewujudkan implementasi dari strategi pertumbuhan dan pemerataan yang berkualitas maka dibutuhkan sarana pendidikan dasar, menengah dan tinggi yang terdistribusi secara merata, pusat penelitian dan inovasi lokal yang sangat spesifik untuk mendorong peningkatan pertumbuhan daerah. Tidak hanya itu, juga dibutuhkan suatu keterkaitan

antar wilayah serta penguatan rantai antara penghasil sumberdaya. Harapannya melalui 2 (dua) strategi tersebut dapat mencapai sasaran peningkatan mutu sumberdaya manusia, peningkatan produktivitas dan nilai tambah, penurunan angka kemiskinan di seluruh wilayah, serta pemerataan pembangunan antar wilayah. Adapun arah kebijakan dan strategi dalam upaya pembangunan berbasis kewilayahan untuk kurun waktu 2020-2024 sebagai berikut.

Tabel 4.4 Arah Kebijakan Pembangunan Berbasis Kewilayahan

No.	Arah Kebijakan Pembangunan Berbasis Kewilayahan
1	Pembangunan desa dan pengembangan kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, kawasan perbatasan, dan daerah tertinggal yang difokuskan pada pemenuhan pelayanan dasar, peningkatan aksesibilitas, dan pengembangan ekonomi yang mendukung pusat pertumbuhan wilayah
2	Optimalisasi pengembangan pusat-pusat pertumbuhan wilayah (KEK, KI, KPBPB, Destinasi Wisata, dan kawasan lainnya yang telah ditetapkan) yang didukung dengan konektivitas antar-wilayah yang tinggi untuk meningkatkan nilai tambah dari sumber daya alam dan daya saing wilayah
3	Peningkatan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah dan pemerintah desa (kelembagaan, keuangan dan SDM Aparatur) untuk meningkatkan kemudahan perizinan dan agar tercapainya pemenuhan standar pelayanan minimum
4	Penataan pola hubungan pusat-daerah, pengembangan kerjasama antar-daerah, pola-pola kolaborasi multipihak, dan menghasilkan inovasi daerah
5	Optimalisasi Wilayah Metropolitan (WM) dan kota besar di luar Jawa, termasuk perencanaan ruang, perencanaan investasi dan pembiayaan pembangunan dengan tetap mempertahankan pertumbuhan dan meningkatkan daya dukung lingkungan untuk WM dan kota besar di Jawa
6	Pengembangan rencana pemindahan Ibukota keluar pulau Jawa ke posisi yang lebih seimbang secara spasial dan ekonomi
7	Peningkatan peran dan efisiensi pelayanan kota kecil-menengah untuk meningkatkan sinergi pembangunan perkotaan dan pedesaan
8	Penegakan rencana tata ruang yang berbasis mitigasi bencana melalui peningkatan efektivitas instrumen pengendalian pemanfaatan ruang, terutama kelengkapan RDTR serta mempercepat penyediaan peta dasar skala besar (1:5.000) secara nasional
9	Peningkatan kepastian hukum hak atas tanah melalui sertifikasi hak atas tanah terutama di wilayah yang diarahkan sebagai koridor pertumbuhan ekonomi dan pemerataan termasuk wilayah sekitarnya; publikasi batas kawasan hutan dan non hutan dalam skala kadastral; dan deliniasi batas wilayah adat
10	Penyediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum melalui pembentukan bank tanah

Sumber: RPJMN 2020-2024

Tidak hanya arah kebijakan dalam upaya pembangunan berbasis kewilayahan, tetapi juga terdapat strategi untuk mendukung arah kebijakan yang sudah dirumuskan sebagai berikut:

Tabel 4.5 Strategi Pembangunan Berbasis Kewilayahan

No	Fokus Strategi	Strategi
1	Pertumbuhan Ekonomi	Operasionalisasi dan peningkatan investasi pada pusat-pusat pertumbuhan wilayah/kawasan strategis yang telah ditetapkan diantaranya: KEK, KI, KSPN/DPP dan sebagainya

No	Fokus Strategi	Strategi
		pengembangan sektor unggulan: pertanian, industri pengolahan, pariwisata dan jasa lainnya
2	Pemerataan Ekonomi	<p>pengembangan ekonomi wilayah/lokal melalui penyediaan sarana prasarana perekonomian, termasuk pemanfaatan teknologi komunikasi digital, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, baik di daerah tertinggal, desa dan kawasan perdesaan sebagai kawasan strategis kabupaten, kawasan transmigrasi, maupun kawasan perbatasan secara terintegrasi dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi/kawasan strategis di sekitarnya</p> <p>memenuhi pelayanan dasar di seluruh wilayah, terutama di daerah tertinggal, desa dan kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, maupun kawasan perbatasan</p>

Sumber: RPJMN 2020-2024

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas dan Berdaya Saing

Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing menjadi fokus dari pembangunan Indonesia kedepan, yaitu dalam jangka waktu 2020 hingga 2024. Sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil dan berkarakter merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah dengan melalui pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Guna mencapai tujuan tersebut, maka kebijakan pembangunan manusia diarahkan pada:

- 1) Pengendalian Penduduk Dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan;
- 2) Perlindungan Sosial Bagi Seluruh Penduduk;
- 3) Pemenuhan Layanan Dasar;
- 4) Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda; dan
- 5) Pengentasan Kemiskinan; dan
- 6) Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing.

Oleh karena itu, kedepan pula pemerintah harus memperhatikan dan mempersiapkan arah pembangunan serta strategi pembangunan, sehingga mampu mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Adapun arah kebijakan dan strategi yang diterapkan oleh pemerintah untuk mencapai kebijakan pembangunan manusia sebagai berikut:

Tabel 4.6 Arah Kebijakan dan Strategi dalam Pembangunan Manusia

No	Arah Kebijakan	Strategi
1	Mengendalikan pertumbuhan penduduk dan memperkuat tata kelola kependudukan	Percepatan cakupan administrasi kependudukan
		Integrasi sistem administrasi kependudukan
		Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk
2	Memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial	Penguatan pelaksanaan jaminan sosial
		Penguatan pelaksanaan penyaluran bantuan sosial dan subsidi yang tepat sasaran
		Perlindungan sosial adaptif
		Peningkatan kesejahteraan sosial
3	Meningkatkan akses dan mutu pelayanan	Peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana (KB) dan kesehatan reproduksi

No	Arah Kebijakan	Strategi
	kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta	Percepatan perbaikan gizi masyarakat Peningkatan pengendalian penyakit Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) Penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan
4	Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas	Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran Peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang dan percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun Peningkatan profesionalisme, kualitas, pengelolaan, dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan yang merata Penguatan penjaminan mutu pendidikan untuk meningkatkan pemerataan kualitas layanan antarsatuan pendidikan dan antarwilayah Peningkatan tata kelola pembangunan pendidikan, strategi pembiayaan, dan peningkatan efektivitas pemanfaatan Anggaran Pendidikan
5	Meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda	Perwujudan Indonesia Layak Anak melalui penguatan Sistem Perlindungan Anak untuk memastikan anak menikmati haknya Peningkatan pemberdayaan dan perlindungan perempuan, termasuk pekerja migran, dari kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) Peningkatan kualitas pemuda
6	Pengentasan kemiskinan	Akselerasi penguatan ekonomi keluarga Keperantaraan usaha dan dampak sosial Reformasi agraria Perhutanan sosial
7	Meningkatkan produktivitas dan daya saing	Pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerjasama industri Penguatan pendidikan tinggi berkualitas Peningkatan kapabilitas iptek dan penciptaan inovasi Pengembangan budaya dan meningkatkan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional

Sumber: RPJMN 2020-2024

4. Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa

Membangun kebudayaan dan karakter bangsa menjadi fokus bagi pemerintah mengingat kuatnya budaya dan karakter bangsa akan memberikan kemajuan bagi suatu bangsa. Prof. Dr. Koentjaraningrat menyatakan bahwa kebudayaan adalah keseluruhan manusia dari kelakuan dan hasil kelakuan yang teratur oleh tata kelakuan yang harus didapatnya dengan belajar dan yang semuanya tersusun dalam kehidupan masyarakat, yang pada intinya kebudayaan merupakan jati diri atau identitas dari suatu bangsa yang terbentuk melalui nilai-nilai perilaku yang terbangun dalam proses sosial.

Modernitas merupakan salah satu yang ingin diwujudkan oleh pemerintah yang salah satu caranya melalui pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa. Selain bertujuan untuk mencapai modernitas, pemerintah berharap pula melalui pembangunan budaya dan karakter bangsa akan

terwujud mental bangsa yang disiplin, etos kemajuan, etika kerja, jujur, taat hukum dan aturan, tekun, dan gigih yang nantinya akan membentuk nilai-nilai budaya di dalam masyarakat.

Tidak hanya pendidikan yang menjadi fokus dalam upaya pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa melainkan pula pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa dilaksanakan secara lebih holistik dan integratif melalui:

- 1) Pemajuan kebudayaan, pendidikan karakter dan budi pekerti;
- 2) Pendidikan agama dan etika;
- 3) Pendidikan kewargaan dan bela negara;
- 4) Peningkatan pemahaman, pengamalan, dan penghayatan nilai agama;
- 5) Peningkatan peran keluarga dan masyarakat;
- 6) Perlindungan perempuan dan anak; dan
- 7) Peningkatan budaya literasi dengan melibatkan segenap komponen bangsa.

Perlu diketahui dan diperhatikan oleh pemerintah, bahwa dalam upaya melaksanakan pembangunan budaya dan karakter bangsa terdapat permasalahan yang akan dihadapi kedepannya, yaitu:

- 1) Melemahnya ketahanan budaya bangsa
- 2) Belum optimalnya pemajuan kebudayaan bangsa
- 3) Belum mantapnya pendidikan karakter dan budi pekerti
- 4) Masih lemahnya pemahaman dan pengamalan nilai agama
- 5) Belum kukuhnya kerukunan umat beragama
- 6) Rendahnya budaya literasi; dan
- 7) Belum optimalnya peran keluarga.

Adapun arah kebijakan dan strategi pemerintah dalam upaya membangun budaya bangsa, dan karakter bangsa adalah sebagai berikut:

Tabel 4.7 Arah Kebijakan dan Strategi Pemerintah dalam Upaya Membangun Budaya dan Karakter Bangsa

No.	Arah Kebijakan	Strategi
1	Memperkuat ketahanan budaya bangsa untuk membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern, dan berkarakter	Pemantapan pendidikan agama, karakter dan budi pekerti
		Penguatan pendidikan kewargaan, wawasan kebangsaan, dan bela negara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme di era globalisasi
		Pengembangan, pembinaan, dan perlindungan Bahasa Indonesia dan bahasa daerah
		Penguatan ketahanan dan kualitas keluarga
2	Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter dan memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia	Pengembangan revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal
		Pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya untuk memperkuat karakter bangsa dan kesejahteraan rakyat
		Pelindungan hak kebudayaan dan kebebasan ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif
		Pengembangan budaya bahari dan sumber daya maritim
		Pengembangan diplomasi budaya untuk memperkuat pengaruh Indonesia dalam perkembangan peradaban dunia
3		Penguatan harmoni dan kerukunan umat beragama

No.	Arah Kebijakan	Strategi
	Meningkatkan pemahaman dan pengamalan nilai agama	Peningkatan kualitas pelayanan keagamaan
		Penguatan penyelenggaraan jaminan produk halal
		Peningkatan kualitas penyelenggaraan haji dan umrah
		Pengembangan ekonomi umat dan sumber daya keagamaan
4	Meningkatkan literasi, inovasi, dan kreativitas bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan, dan berkarakter	Peningkatan budaya literasi
		Pengembangan budaya Iptek dan inovasi
		Peningkatan kreativitas dan daya cipta
		Penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi

Sumber: RPJMN 2020-2024

5. Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Infrastruktur merupakan salah satu fokus pembangunan yang sangat gencar dilakukan oleh pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Terpilihnya kembali presiden Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2020-2024 tidak begitu saja menghilangkan pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan dalam periode sebelumnya. Fokus pada infrastruktur pada periode 2020-2024 adalah memperkuat infrastruktur yang telah dibangun sebelumnya untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Mengingat Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu pilihan strategis dalam rangka mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Indonesia. Namun demikian, daya saing infrastruktur Indonesia masih perlu terus ditingkatkan.

The Global Competitiveness Report tahun 2018 menempatkan posisi daya saing infrastruktur di posisi 71, masih tertinggal jika dibandingkan negara ASEAN lainnya, seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand. Oleh karena itu, dibutuhkan arah kebijakan dan strategi dalam upaya memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.

Tabel 4.8 Arah Kebijakan dan Strategi dalam Penhembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

No	Arah Kebijakan dan Strategi	Proses
1	Infrastruktur Pelayanan Dasar	Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau
		Pengelolaan Air Tanah, Air Baku Berkelanjutan
		Penyediaan Akses Air Minum Layak dan Aman
		Penyediaan Akses Sanitasi (Pengelolaan Air Limbah Domestik dan Sampah) yang Layak dan Aman
		Keselamatan dan Keamanan Transportasi
		Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur
		Waduk <i>Multipurpose</i> dan Modernisasi Irigasi
2	Infrastruktur Ekonomi	Konektivitas Transportasi Jalan
		Konektivitas Transportasi Kereta Api
		Konektivitas Transportasi Laut
		Konektivitas Transportasi Udara

No	Arah Kebijakan dan Strategi	Proses
		Konektivitas Transportasi Darat dan Antarmoda
3	Infrastruktur Perkotaan	Sistem Angkutan Umum Masal Perkotaan
		Infrastruktur Jalan Perkotaan
		Energi dan Listrik Berkelanjutan untuk Perkotaan
		Infrastruktur dan Ekosistem ICT Perkotaan
		Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi (Air Limbah dan Sampah) yang Layak dan Aman di Perkotaan
		Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau di Perkotaan
4	Energi dan Ketenagalistrikan	Diversifikasi energi dan ketenagalistrikan untuk pemenuhan kebutuhan, melalui (a) pemanfaatan EBT seperti panas bumi, air, surya, dan biomasa; (b) pemanfaatan pengembangan mini/ <i>micro grid</i> berbasis energi bersih; (c) pembangunan Pembangkit Listrik PLTA <i>Pumped Storage</i> ; dan (d) pemanfaatan teknologi yang <i>high efficiency and low emission</i> (HELE)
		Peningkatan efisiensi pemanfaatan energi dan tenaga listrik, melalui (a) pengembangan <i>Energy Service Company</i> (ESCO); (b) memperluas, merehabilitasi dan uprating sistem transmisi dan distribusi; (c) mengembangkan sistem informasi manajemen dan data control; (d) mengembangkan dan memafaatkan teknologi <i>smart grid</i> .
		Penguatan dan perluasan pelayanan pasokan energi dan tenaga listrik, melalui (a) penambahan kapasitas pembangkit, transmisi, dan distribusi tenaga listrik; (b) pemenuhan tenaga listrik di kawasan-kawasan prioritas; (c) penyediaan bantuan pasang baru listrik untuk rumah tangga tidak mampu; (d) dukungan penyediaan energi primer (gas dan batubara) untuk listrik; (e) peningkatan kapasitas kilang minyak dalam negeri; (f) peningkatan infrastruktur gas bumi; (g) pengembangan cadangan penyangga/ operasional BBM dan LPG; serta (h) pemanfaatan <i>economically least cost fuels</i> untuk memasak (jaringan gas perkotaan, LPG, dan <i>electric and clean cook stove</i>)
		Peningkatan tata kelola energi dan ketenagalistrikan, melalui (a) peningkatan tugas dan fungsi badan regulator; (b) penguatan independensi operator sistem transmisi; (c) penerapan <i>power wheeling</i> untuk mendorong proyek EBT dapat langsung menjual ke pelanggan; (d) mereviu kebijakan harga EBT berbasis batas biaya pokok penyediaan (BPP) pembangkitan; dan (f) implementasi metode penentuan <i>revenue requirement</i> yang optimal.
		Pengembangan kebijakan pendanaan dan pembiayaan, melalui (a) pengembangan subsidi tepat sasaran melalui subsidi langsung dan realokasi belanja; (b) penerapan penyesuaian tarif dan/atau dukungan pemerintah untuk peningkatan finansial PT PLN; (c) penerapan kembali <i>automatic tariff adjustment</i> ; dan (d) memanfaatkan pembiayaan murah, alternatif instrumen dan <i>leverage asset</i> .
5	Transformasi Digital	Penuntasan Infrastruktur TIK
		Pemanfaatan Infrastruktur TIK
		Fasilitas Pendukung Transformasi Digital

Sumber: RPJMN 2020-2024

6. Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, Dan Perubahan Iklim

Tidak hanya pembangunan manusia, dan infrastruktur, serta penguatan ekonomi saja yang menjadi fokus pemerintah dalam pembangunan jangka panjang, melainkan juga lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim juga menjadi fokus pemerintah dalam pembangunan lima tahun kedepan. Pembangunan lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim menjadi fokus pemerintah lima tahun kedepan, hal ini karena apabila terjadi penurunan kualitas lingkungan hidup serta depleksi sumber daya alam maka akan berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih bertumpu pada sektor komoditas dan sumber daya alam. Selain itu juga perubahan iklim yang mulai tidak menentu harus menjadi perhatian tersendiri bagi pemerintah mengingat perubahan iklim yang tidak tentu tersebut akan dapat menyebabkan terjadinya resiko bencana yang tinggi, oleh karena itu dibutuhkan arah kebijakan dan strategi yang tepat, sehingga tidak menimbulkan kehilangan, kerugian, dan kerusakan yang lebih besar di masa mendatang. Hal tersebut dilaksanakan melalui pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Sebagai contoh, pemberdayaan masyarakat melalui bank sampah dalam rangka pengurangan sampah.

Tabel 4.9 Arah Kebijakan dan Strategi Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

No	Arah Kebijakan dan Strategi	Proses
1	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
		Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
		Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
		Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
		Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup
2	Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim	Penanggulangan Bencana,
		Peningkatan Ketahanan Iklim
3	Pembangunan Rendah Karbon	Pembangunan Energi Berkelanjutan
		Pemulihan Lahan Berkelanjutan
		Penanganan Limbah
		Pengembangan industri hijau
		Pemulihan ekosistem pesisir dan kelautan

Sumber: RPJMN 2020-2024

7. Memperkuat Stabilitas POLHUKHANKAM dan Transformasi Pelayanan Publik

Terwujudnya stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (POLHUKHANKAM) akan memberikan dampak positif terhadap sistem pemerintahan dan kestabilan ekonomi bangsa, dan hal itu perlu pula penguatan dalam memebrikan pelayanan publik, sehingga diperlukan transformasi pelayanan publik. Oleh karena itu, pembangunan jangka

menengah nasional 2020-2024 memiliki fokus untuk memperkuat stabilitas POLHUKAM dan Transformasi Pelayanan Publik, mengingat akan pentingnya manfaat dan fungsi dari hal tersebut.

Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (POLHUKHANKAM) Indonesia 2020-2024 diarahkan menuju kelembagaan politik dan hukum yang mapan. Hal tersebut dilakukan melalui upaya terwujudnya konsolidasi demokrasi; terwujudnya supremasi hukum, penegakan hak asasi manusia dan birokrasi profesional; terciptanya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat; dan terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Maka dari itu dibutuhkan arah kebijakan dan strategi yang tepat sehingga akan berdampak kepada stabilitas POLHUKHANKAM dan transformasi pelayanan publik.

Tabel 4.10 Fokus Kebijakan Memperkuat Stabilitas POLHUKHANKAM dan Transformasi Pelayanan Publik

No	Fokus Kebijakan	Proses
1	Konsolidasi Demokrasi	Terbentuknya lembaga demokrasi yang efektif
		Menguatnya Wawasan Kebangsaan
		Terpenuhinya hak-hak politik dan terjaminnya kebebasan sipil
		Terwujudnya komunikasi publik yang efektif, integratif dan partisipatif
		Terwujudnya demokrasi yang terkonsolidasi, terpeliharanya kebebasan sipil yang tinggi, diimbangi menguatnya kinerja lembaga-lembaga demokrasi dan terjaganya hak-hak politik warga secara optimal
2	Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri	Terjaganya integritas wilayah NKRI dan Perlindungan WNI di luar negeri
		Menguatnya kerjasama pembangunan internasional
		Meningkatnya citra positif Indonesia di dunia internasional
		Meningkatnya peran Indonesia di Tingkat Regional dan Global
3	Sistem Hukum Nasional yang Mantap	Terwujudnya regulasi yang berkualitas
		Terwujudnya sistem anti korupsi yang optimal
		Terwujudnya sistem peradilan yang efektif, transparan dan akuntabel
		Terwujudnya Pemenuhan akses terhadap keadilan
4	Reformasi Kelembagaan Birokrasi	Terwujudnya ASN yang profesional, berintegritas dan netral
		Terwujudnya manajemen institusi pemerintah yang berstandar internasional
		Terwujudnya akuntabilitas keuangan dan kinerja
		Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas dan inovatif
5	Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	Penguatan Keamanan Dalam Negeri
		Penguatan Kemampuan Pertahanan
		Penguatan Keamanan Laut
		Peningkatan Keamanan Personal dan Ketertiban Masyarakat
		Penguatan Keamanan dan Ketahanan Siber

Sumber: RPJMN 2020-2024

Tabel 4.11 Arah Kebijakan dan Strategi untuk Memperkuat Stabilitas POLHUKHANKAM dan Transformasi Pelayanan Publik

No	Arah Kebijakan	Strategi
1	Konsolidasi Demokrasi	Penataan Lembaga Demokrasi
		Penguatan Hak-Hak Politik dan Kebebasan Sipil
		Peningkatan Kualitas Informasi Publik
		Penguatan Wawasan Kebangsaan
2	Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri	Memperkuat integritas wilayah NKRI dan perlindungan WNI di luar negeri
		Memperkuat Kerjasama Pembangunan Internasional
		Meningkatkan Citra Positif Indonesia Di Dunia Internasional
		Meningkatkan Peran Indonesia di Tingkat Regional dan Global
3	Sistem Hukum Nasional yang Mantap	Optimalisasi Upaya Anti Korupsi
		Penataan Regulasi
		Peningkatan Akses Terhadap Keadilan
		Perbaiki Sistem Peradilan
4	Reformasi Kelembagaan Birokrasi	Terwujudnya ASN yang profesional, berintegritas dan netral, melalui arah kebijakan memperkuat implementasi manajemen ASN berbasis merit
		Terwujudnya manajemen institusi pemerintah yang berstandar internasional, melalui arah kebijakan penataan lembaga dan proses bisnis
		Terwujudnya akuntabilitas keuangan dan kinerja melalui arah kebijakan penguatan akuntabilitas kinerja dan pengawasan
		Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas dan inovatif, dengan arah kebijakan memperluas penerapan inovasi dalam pelayanan publik
5	Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	Penguatan Keamanan Dalam Negeri yang ditandai dengan menurunnya pelanggaran di wilayah perbatasan dan penurunan jumlah kejadian terorisme
		Penguatan Kemampuan Pertahanan yang ditandai dengan terpenuhinya kekuatan pokok minimum atau <i>Minimum Essential Force</i> (MEF) dan meningkatnya kontribusi industri pertahanan dalam penyediaan alpalhankam
		Penguatan Keamanan Laut yang ditandai dengan meingkatnya kecepatan <i>relay time</i> dari sistem peringatan dini keamanan laut yang terpadu kepada pemangku kepentingan keamanan laut, <i>response time</i> dari kehadiran aparat di lokasi yang dilaporkan, dan penurunan angka kejahatan di laut
		Peningkatan Keamanan Personal dan Ketertiban Masyarakat yang ditandai dengan menurunnya Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkotika, membaiknya Indeks WHO QoL (Indeks Kualitas Hidup), meningkatnya <i>clearance rate</i> , meningkatnya <i>respons time</i> , membaiknya indeks kepuasan layanan kepolisian dan membaiknya indeks kepuasan layanan rehabilitasi
		Penguatan Keamanan dan Ketahanan Siber yang ditandai dengan meningkatnya skor Indonesia dalam <i>Global Cybersecurity Index</i> .

Sumber: RPJMN 2020-2024

4.2.2.3 Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi menurut Sedarmayanti (2009:72), merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kinerja melalui berbagai cara dengan tujuan efektifitas, efisien, dan akuntabilitas, sementara menurut KemenPAN

RB pada hakikatnya reformasi birokrasi merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business proses*) dan sumber daya manusia aparatur. Melalui penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa reformasi birokrasi adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah guna memperbaiki dan meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, sehingga birokrasi dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dapat profesional, berintegritas, bersih dan bebas KKN serta memberikan pelayanan prima dan berkeadilan. Adapun beberapa factor yang mendorong dilakukannya reformasi birokrasi menurut Miftah Thoa (2008:106-108) adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya kebutuhan melakukan pembaharuan;
- 2) Memahami perubahan yang terjadi dilingkungan strategis nasional;
- 3) Memahami strategis yang terjadi di lingkungan global; dan
- 4) Memahami perubahan yang terjadi dalam paradigma manajemen pemerintahan.

Pelaksanaan reformasi birokrasi di atur didalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 adalah rancangan induk arah kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nasional dalam kurun waktu 2010-2025. Pada peraturan tersebut dijelaskan bahwa tujuan dari *Grand Design* Reformasi Birokrasi adalah untuk memberikan arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional selama kurun waktu 2010-2025. Hal ini dilakukan agar reformasi birokrasi di baik tingkat K/L dan Pemerintah Daerah dapat berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga, dan berkelanjutan. Adapun isu reformasi birokrasi dalam paparan Oscar (2019) adalah sebagai berikut:

- 1) *Leadership*;
- 2) Politisasi dan Kooptasi Birokrasi;
- 3) Administrasi dan Kelembagaan;
- 4) Budaya Birokrasi;
- 5) Transformasi digital;
- 6) Globalisasi dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- 7) SDM Aparatur; dan
- 8) *Closed System Bureaucracy dan Silo Mentality*.

Oleh karena itu, reformasi harus dilakukan dan diimplementasikan oleh pemerintah, mengingat akan pentingnya fungsi dari reformasi brokrasi dalam menjalankan dan melaksanakan penyelenggaran pemerintahan.

4.2.2.4 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Pelayanan publik harus diberikan oleh pemerintah secara maksimal dan optimal kepada masyarakat. Hal ini bertujuan agar pelayanan yang diberikan dapat terukur, dan terarah, sehingga tingkat kepuasan masyarakat akan pelayanan pemerintah akan meningkat. Namun, tidak hanya pelayanan pubik saja yang menjadi fokus utama bagi birokrasi dalam upaya menyelenggarakan urusan kepemerintahan, melainkan seluruh unsur dalam

melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan sangatlah penting untuk menjadi fokus, sehingga akan berdampak positif terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan.

Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di era sekarang harusnya tidak lagi hanya mengandalkan sistem *Front Office*, melainkan pula harus menerapkan dan membuat sistem yang hemat energi, dan biaya, serta tidak lamban. Salah satu cara yang paling tepat agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik yaitu dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Mengingat, era sekarang telah beranjak dari sederhana menuju serba teknologi, oleh karena itu penting bagi pemerintah untuk mengadopsi unsur teknologi kedalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pengadopsian teknologi dalam upaya melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan mulai diterapkan yang mana diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Pada peraturan tersebut, dijelaskan bahwa Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Tujuan dari SPBE yaitu agar pemerintah mampu melaksanakan dan menjalankan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta membentuk layanan berbasis elektronik yang berkualitas. Adapun ruang lingkup pelaksanaan SPBE berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yaitu:

- a. Tata Kelola SPBE;
- b. Manajemen SPBE;
- c. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- d. Penyelenggara SPBE;
- e. Percepatan SPBE; dan
- f. Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

Ruang lingkup dalam upaya implementasi SPBE yang begitu kompleks tersebut memperlihatkan bahwa penerapan SPBE dalam penyelenggaraan pemerintahan bukanlah hal yang mudah. Oleh karena itu dibutuhkan prinsip-prinsip yang harus kuat guna diterapkan dalam mengimplementasikan SPBE. Adapun prinsip-prinsip dalam pelaksanaan SPBE yaitu Efektivitas; Keterpaduan; Kesinambungan; Efisiensi; Akuntabilitas; Interoperabilitas; dan Keamanan.

Seperti yang disampaikan sebelumnya, bahwa penerapan SPBE dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan bukanlah hal yang mudah. Hal ini karena penerapan SPBE yang berlatar belakang teknologi tersebut harus diimbangi oleh kualitas sumber daya yang mumpuni, baik sumber daya manusianya maupun sumber daya lainnya yang bersifat materil. Oleh karena itu, pengimplementasian SPBE dalam penyelenggaraan pemerintahan harus dilakukan secara sistematis, dan terstruktur, sehingga prinsip-prinsip SPBE dapat terwujud.

4.2.2.5 Arahan Presiden Bendung Covid-19

Arahan Presiden Bendung Covid-19 adalah arahan Presiden yang dilakukan dengan tujuan untuk pemulihan kehidupan masyarakat dan

pemulihan perekonomian. Adapun enam (6) arahan presiden dalam membendung Covid-19 adalah sebagai berikut:

1. Pengujian sampel secara masif harus ditingkatkan sehingga tingkat pengujian sampel yang masif harus dilakukan dengan pelacakan yang agresif serta dengan diikuti isolasi yang ketat;
2. Dukungan sarana dan prasarana medis yang memadai, termasuk dalam penggunaan teknologi, baik yang menyangkut sensor tubuh, big data, IOB (*Immigration on Board*), maupun AI (*Artificial Intelligence*);
3. Komunikasi yang efektif, yang memberikan penjelasan-penjelasan secara transparan pada media harus dilakukan dengan detail dan baik;
4. Penegakan hukum dengan dukungan aparat negara;
5. Menjaga kelancaran distribusi logistik yang dibutuhkan masyarakat dalam kebijakan tanggap darurat, baik kelancaran logistik dari pusat ke daerah maupun dari gudang-gudang logistik ke daerah;
6. Melaksanakan stimulus ekonomi secara tepat sasaran dalam rangka pemutusan rantai penyebaran covid-19.

4.2.3 Isu Regional Provinsi Jawa Timur

4.2.3.1 Isu RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024

Adapun isu regional Provinsi Jawa Timur yang dijadikan acuan dalam penyesunan RPJMD Perubahan Kabupaten Tulungagung diantaranya sebagai berikut:

1) Kualitas Sumber Daya Manusia Berbasis Keagamaan dan Kebudayaan

Pendidikan merupakan salah satu pilar terpenting dalam meningkatkan kualitas manusia, yang juga merupakan komponen variabel dalam menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Oleh karena itu pembangunan pendidikan di Provinsi Jawa Timur harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan di masa depan.

Penetapan sistem pendidikan yang baku bisa memberikan kepastian bagi setiap pengajar dan sekolah. Kelengkapan fasilitas serta pemerataan kualitas pendidikan bagi setiap warga negara, khususnya daerah-daerah yang jauh dari pusat kota menjadi fokus Pemerintah Provinsi Jawa Timur dimana banyak sekali masyarakat yang tidak memperoleh hak mereka dalam memperoleh pendidikan. Jika dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa, Rata-rata Lama Sekolah di Jawa Timur berada di posisi ke 2 (dua) terendah. Tentunya hal tersebut membutuhkan peningkatan upaya yang intensif.

Perbaikan kualitas pendidikan di Provinsi Jawa Timur dimulai dari peningkatan kualitas tenaga pendidiknya, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan bekal bagi para guru dan kepala sekolah, sehingga mereka mampu menjadi tenaga pendidik yang berkualitas dalam menciptakan suasana pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan bagi para siswanya peran guru sangat dibutuhkan untuk mempersiapkan SDM yang

handal tidak hanya sisi akademik namun juga memiliki karakter religius, memegang nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.

Selanjutnya pelayanan kesehatan masyarakat di Provinsi Jawa Timur adalah pelayanan yang bersifat publik dengan tujuan utama memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit tanpa mengabaikan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. Pelayanan kesehatan masyarakat tersebut antara lain promosi kesehatan, pemberantasan penyakit, penyehatan lingkungan, perbaikan gizi, peningkatan kesehatan keluarga, keluarga berencana, kesehatan jiwa serta berbagai program kesehatan masyarakat lainnya.

Di Jawa Timur, Perkembangan Angka Kematian Bayi (AKB) tahun 2014 sebesar 24,50 dan terus menurun hingga tahun 2018 menjadi 23,00. Hal ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan untuk menekan AKB sudah menunjukkan kemajuan. Demikian juga pada periode yang sama, Angka Kematian Ibu (AKI) terus menunjukkan penurunan, pada tahun 2014 capaiannya sebesar 93,53 kemudian pada tahun 2018 menjadi 91,45. Disamping itu kasus jumlah balita status gizi buruk meskipun telah mengalami penurunan tetap menjadi isu penting dikarenakan tingkat prevalensi *stunting* di Jawa Timur (32,7%) secara nasional berada diposisi ke 11 (sebelas) dan diatas angka nasional.

2) Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Serta Kesejahteraan Masyarakat

Perekonomian Jawa Timur pada tahun 2018, tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Pada tahun 2018, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur mencapai 5,50%, lebih tinggi 0,05% dibandingkan dengan pertumbuhan pada tahun 2017 yang hanya mencapai 5,45%. Dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa, kinerja perekonomian Jawa Timur pada tahun 2018 lebih tinggi dibandingkan Jawa Barat dan Jawa Tengah. Bahkan, pada tahun 2018 pertumbuhan ekonomi Jawa Timur lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi Nasional yang mencapai 5,17%. Sementara itu, dilihat dari perkembangan pertumbuhan Jawa Timur, dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi. Selama periode 2011 sampai dengan 2018, perekonomian Jawa Timur melambat sebesar 0,13% per tahun. Hal ini sejalan dengan perlambatan perekonomian nasional yang pada periode yang sama melambat sebesar 0,14% per tahun.

Meskipun perekonomian Jawa Timur cenderung melambat selama beberapa tahun terakhir, namun berdasarkan hasil studi yang dilakukan oleh Asia Competitiveness Institute – Singapore pada tahun 2017 menunjukkan bahwa dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain, kinerja daya saing provinsi Jawa Timur secara keseluruhan pada tahun 2017 menempati peringkat kedua, dibawah Provinsi DKI Jakarta. Berikut adalah gambaran capaian daya saing masing-masing provinsi di Indonesia pada tahun 2018. Kinerja daya saing tersebut diukur dengan 103 Indikator yang dikelompokkan dalam 4 aspek yaitu (1) stabilitas ekonomi makro, (2) perencanaan pemerintah dan institusi, (3) kondisi finansial, bisnis dan tenaga kerja, dan (4) kualitas hidup dan pembangunan infrastruktur.

Pada tahun 2018, secara nominal besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku Jawa Timur mencapai Rp.2.189,78 triliun dan Atas Dasar Harga Berlaku 2010 mencapai Rp.1.563,76 triliun. Dilihat dari sisi produksi (sektoral), pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 7,63%, diikuti Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 7,6%. Sementara dari sisi pengeluaran, akselerasi pertumbuhan ekonomi Jawa Timur didorong oleh Pengeluaran Konsumsi LNPRT yang tumbuh 6,57% dan Pembentukan Modal Tetap Bruto yang tumbuh sebesar 6,08%.

Terkait kesejahteraan masyarakat, isu kemiskinan masih menjadi isu penting yang belum dapat terselesaikan sampai dengan saat ini. Kemiskinan seringkali dipahami sebagai rendahnya tingkat kesejahteraan, padahal kemiskinan merupakan masalah pembangunan yang bersifat multidimensi dan sangat penting untuk ditangani melalui dukungan seluruh pemangku kepentingan. Berdasarkan perkembangan persentase penduduk miskin di Jawa Timur, selama tahun 2014 hingga tahun 2018 mengalami kecenderungan menurun dari 12,28 persen pada tahun 2014 dengan jumlah penduduk miskin 4.748,42 ribu jiwa, terus menurun hingga tahun 2018 menjadi 10,85 persen dengan jumlah penduduk miskin sebesar 4,292,15 ribu jiwa atau masih tercatat angka tertinggi secara nasional dan *progress* penurunannya cenderung lambat.

Selain isu kemiskinan, Jawa Timur juga masih menghadapi isu disparitas, dimana dari 7.721 Desa di Jawa Timur pada Tahun 2018, masih terdapat 88 Desa Sangat Tertinggal, 1.569 Desa Tertinggal, 5.006 Desa Berkembang berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dirjen PPMD) Nomor 52 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Keputusan Dirjen PPMD Nomor 30 Tahun 2016 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa.

Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilakukan oleh BPS Provinsi Jawa Timur, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2014 sebesar 4,19 persen, kemudian meningkat pada tahun 2015 menjadi 4,47 persen. Selanjutnya pada tahun 2016-2018 kondisi ketenagakerjaan menunjukkan keadaan yang lebih baik sehingga terus mengalami penurunan yaitu 4,21 (2016); 4,00 (2017); dan 3,99 (2018). Meskipun angka TPT Jawa Timur lebih baik daripada TPT Nasional (5,34) tetapi angka penurunan TPT Jawa Timur dirasa melambat. Perkembangan global antara lain bonus demografi dan revolusi industri 4.0, dimungkinkan terjadinya perubahan jenis pekerjaan yang berbasis pada teknologi, pengurangan tenaga kerja manusia diganti peralatan atau mesin elektronika. Hal ini tentunya membutuhkan peningkatan upaya penyiapan tenaga kerja yang kompetitif agar tantangan tersebut dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Jawa Timur.

3) Tata kelola Pemerintah dan Reformasi Birokrasi

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 memberikan tantangan kepada pembangunan daerah Provinsi Jawa Timur untuk:

- a. Pengelolaan dan penataan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang efektif dan efisien;

- b. Pembinaan ASN yang melayani, disiplin dan bersih; dan
- c. Pengelolaan keuangan daerah dengan prioritas pemenuhan pelayanan dasar secara efektif, efisien dan akuntabel.

Sistem pengendalian pemerintah dapat dibagi menjadi pengendalian intern dan ekstern. Pengendalian intern meliputi Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri/Pimpinan Lembaga; Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota. Sedangkan pengawas ekstern pemerintah seperti BPK (Badan Pengawas Tertinggi Keuangan), DPR dan DPRD (pengawasan politis), pengawasan masyarakat (wasmas) dan Lembaga peradilan (pengawasan yudikatif).

Sistem Pengendalian Intern menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sedangkan Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Salah satu indikator Kinerja RPJMN Tahun 2015-2019 dalam bidang reformasi birokrasi adalah Tingkat Kematangan Implementasi SPIP, dengan target tingkat maturitas SPIP K/L/P pada tahun 2019 sebesar 3 dari skor 1-5. Sebagai salah satu upaya meningkatkan level kematangan penyelenggaraan SPIP diperlukan strategi dan program Peningkatan Maturitas SPIP di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Sesuai arahan Presiden RI melalui Kementerian PAN-RB menegaskan bahwa keseriusan dan komitmen Bupati/Walikota dan Sekretaris Daerah sangat diperlukan untuk mendorong percepatan implementasi reformasi birokrasi. Kepala Daerah diharapkan memberikan perhatian untuk terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan sekaligus berorientasi hasil. Adapun arahan Presiden RI terkait permasalahan efisiensi birokrasi:

- a. *E-Government*, dalam sistem pemerintahan elektronik, rakyat dapat mengakses dokumen-dokumen pemerintah, dan semua hal dapat dilihat secara transparan, termasuk soal anggaran publik
- b. *Money Follow Program*, alokasi anggaran harus digunakan untuk program pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat, misalnya: infrastruktur, pengentasan kemiskinan, pendidikan, dan Kesehatan (pemerintahan berorientasi hasil);
- c. Stop Pemborosan Anggaran, seberapa pun anggaran yang diberikan kepada K/L/Pemda pasti habis, tetapi tujuan (hasil) tidak tercapai; dan

- d. Fokus Kinerja bukan SPJ, ASN jangan terlalu menghabiskan waktu dan tenaga hanya untuk mengurus SPJ.

Evaluasi tiap tahun perlu dilakukan untuk mengukur perkembangan efektivitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di instansi pemerintah (pusat dan daerah) guna efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran pada instansi pemerintah. Keberhasilan dalam implementasi SAKIP sangat berdampak pada efisiensi dalam penggunaan anggaran. SAKIP yang selama ini dianggap sebagai kumpulan dokumen semata ternyata mempengaruhi efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran negara yang pada hakikatnya adalah dana yang terkumpul dari rakyat.

4) Demokrasi Kewarganegaraan

Demokrasi kewarganegaraan berhubungan hak demokrasi dan kewajiban warga Negara dalam menjalankan aktifitasnya dengan mendapatkan perlakuan yang adil di depan hukum dan pemerintahan. Demokrasi meliputi komponen yaitu Kebebasan sipil, hak-hak politik dan partisipasipolitik. Kebebasan sipil meliputi: kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, dan diskriminasi. Hak-hak politik terdiri dari hak memilih dan dipilih. Partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan pemerintah meliputi: lembaga demokrasi, pemilu yang bebas adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi pemda dan peradilan yang independen. Pemerintah bersama aparaturnya memberikan jaminan hak warga berdasarkan prinsip kebhinekaan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Demokrasi kewarganegaraan juga mengutamakan hak-hak bagi perempuan dan anak, orang terlantar dan kelompok marginal lainnya.

Isu strategis lainnya antara lain: berkaitan dengan Pengarusutamaan Gender dan Pengarusutamaan Hak Anak belum menjadi dasar/prioritas pertimbangan dalam pelaksanaan pembangunan Provinsi Jawa Timur; masih belum terpenuhinya Jaminan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Dasar Perempuan dan Anak; Rendahnya Komitmen dan Pemahaman dari lintas sektor dan masyarakat umum tentang tindak kekerasan dan perdagangan orang; Masih tingginya laju pertumbuhan penduduk di Jawa Timur Tahun 2017 Data Statistik sebesar 0,56%; Masih rendahnya kesadaran penduduk akan pentingnya dokumen kependudukan (eKTP, Akte Kelahiran dan Akte Kematian); Kartu Identitas Anak (KIA) Tahun 2019 sudah harus serentak diberlakukan; serta Peningkatan Pelayanan dengan *Go-Digital* – Tanda Tangan Elektronik (TTE).

5) Pembangunan Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan

Salah satu prioritas pembangunan infrastruktur yang harus diselesaikan di Provinsi Jawa Timur adalah penuntasan pembangunan Jalan Lintas Selatan (JLS). Pada dasarnya pembangunan JLS wilayah Provinsi Jawa Timur merupakan inisiasi pemerintah pusat melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VIII (wilayah Jawa Timur dan Bali) untuk menyambungkan jalan nasional wilayah pantai selatan mulai dari ujung barat hingga ujung timur Pulau Jawa. Pembangunan JLS yang pada awalnya ditargetkan selesai pada tahun 2019, nyatanya hingga kini khusus di Provinsi Jawa Timur total

akses yang telah dibangun mencapai 390,92 Km atau 57,8%. Total terdapat 8 kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang dilewati yang meliputi, Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Malang, Lumajang, Jember, dan Banyuwangi.

Khusus di Kabupaten Tulungagung, total dilewati JLS sepanjang 55,68 Km. Sejauh ini dari total panjang jalan tersebut, masih menyisakan 6,75 Km lahan belum terbebaskan. Sedangkan dari 48,93 Km lahan yang telah dibebaskan progress pengaspalan baru mencapai 13,43 Km, terbangunnya 4 jembatan. Sedangkan beberapa terget yang belum tercapai yakni pembangunan 19 jembatan dengan panjang total 645 Meter. Menindaklanjuti isu tersebut, pemerintah Kabupaten Tulungagung minimal bisa berkoordinasi dengan pemerintah untuk menyelesaikan progress pembangunan yang masih tertunda. Karena dengan tuntasnya pembangunan JLS nantinya, hal tersebut secara langsung akan memberikan dampak positif yang cukup luas untuk Kabupaten Tulungagung khususnya di wilayah selatan. Karena sejauh ini dari progress pembangunan JLS yang telah terbangun, membuka akses terhadap pariwisata yang cukup banyak. Khususnya akses pantai di wilayah selatan Kabupaten Tulungagung.

Selain isu JLS, isu yang dapat dijadikan peluang oleh Kabupaten Tulungagung adalah isu pembangunan bandara di Kabupaten Kediri. Seperti yang kita tahu, pertengahan tahun 2017 muncul isu pembangunan bandara di Kabupaten Tulungagung. Namun Pak Karwo Gubernur Jawa Timur 2014-2019 memutuskan untuk menggesernya di Kabupaten Kediri dengan beberapa pertimbangan. Salah satunya adalah adanya pihak swasta yang mau mendanai pembangunan mulai dari pembebasan lahan hingga infrastruktur dan suprastrukturnya. Meskipun pembangunan tidak jadi di Kabupaten Tulungagung, namun letak pembangunan di Kabupaten Kediri yang notabene berbatasan secara administratif dengan Kabupaten Tulungagung dapat memberikan peluang yang sangat besar.

Sedangkan Isu pengarusutamaan pembangunan berwawasan lingkungan adalah pembangunan yang mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan (*environmental carrying capacity*) yang dapat tetap menjamin kelestarian lingkungan hidup secara berkelanjutan sebagai ruang ekologi. Namun tekanan terhadap lingkungan hidup secara global juga terjadi akibat adanya perubahan iklim yang terjadi secara alamiah dan dipercepat oleh aktifitas manusia sehingga berdampak pada kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya, termasuk terjadinya berbagai kejadian bencana seperti tanah longsor, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Kejadian bencana sering menimbulkan dampak yang begitu besar bagi masyarakat dikarenakan masih rendahnya kesadaran terhadap resiko dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.

4.2.4 Telaah Keterkaitan Dokumen Pembangunan Daerah

4.2.4.1 Telaah RPJPD Kab. Tulungagung Tahun 2005-2025

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 telaah RPJPD Kabupaten Tulungagung tahun 2005-2025 merupakan langkah utama dalam perumusan RPJMD. Hal tersebut mengingat bahwa

pada nyatanya RPJMD Kabupaten Tulungagung tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari tahapan pembangunan periode ke 4 dari RPJMD Kabupaten Tulungagung tahun 2018-2023.

Berikut merupakan arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Tulungagung tahun 2005-2025 beserta kesesuaian terhadap *platform* politik Bupati terpilih.

**Tabel 4.12 Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok RPJPD
Kabupaten Tulungagung**

No	Arah Kebijakan RPJPD	Sasaran Pokok	Indikator
1	Meningkatkan Kualitas SDM Masyarakat Kabupaten Tulungagung	Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat Kabupaten Tulungagung sehingga mampu dan berdaya untuk membangun partisipasi aktif dalam pembangunan	Meningkatnya kualitas SDM yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Daya Saing SDM masyarakat Kabupaten Tulungagung
			Meningkatnya keterlibatan masyarakat secara langsung dalam proses perumusan kebijakan publik, pelaksanaan kebijakan publik serta pengawasan dan pengendalian kebijakan publik
			Meningkatnya kualitas peran masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan dan semakin berdayanya masyarakat untuk berperan sebagai pelaku pembangunan
2	Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Tulungagung Secara Merata Dan Berkeadilan	Terwujudnya masyarakat Kabupaten Tulungagung yang sejahtera secara merata dan berkeadilan, dengan dukungan pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis agribisnis dan agroindustri yang berwawasan lingkungan	Terwujudnya peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Tulungagung
			Terwujudnya pemerataan keberhasilan pelaksanaan pembangunan kesejahteraan rakyat di seluruh wilayah Kabupaten Tulungagung sesuai dengan potensi unggulan masing-masing satuan wilayah pengembangan yang ada
			Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif dimana sektor pertanian dalam arti luas menjadi basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien untuk menghasilkan komoditi berkualitas dan berdaya saing global
			Semakin kuatnya tingkat kemandirian pangan Kabupaten Tulungagung yang didukung peningkatan kualitas gizi masyarakat dan tersedianya instrumen jaminan pangan untuk tingkat rumah tangga
3	Mewujudkan Kemandirian Kabupaten Tulungagung Dalam Membangun	Terwujudnya kemandirian Kabupaten Tulungagung dalam membangun	Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan sehingga memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan per kapita penduduk dan penurunan angka pengangguran secara signifikan

No	Arah Kebijakan RPJPD	Sasaran Pokok	Indikator
	Perekonomian Daerah Berbasis Pengembangan Daya Saing.	perekonomian daerah dengan berbasis pengembangan daya saing daerah	<p>Meningkatnya daya saing daerah sehingga Kabupaten Tulungagung dapat memberikan kontribusi yang sangat berarti bagi pembangunan di Jawa Timur dan Indonesia</p> <p>Terbangunnya jaringan infrastruktur perhubungan yang handal dan terintegrasi antar wilayah di seluruh wilayah Kabupaten Tulungagung sehingga mendukung peningkatan kelancaran arus distribusi barang dan jasa serta mobilitas penduduk</p> <p>Terkendalinya pengelolaan dan pendayagunaan SDA dan pelestarian fungsi lingkungan hidup guna mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang dan lestari</p>
4	Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintah daerah di Kabupaten Tulungagung Yang Bersih dan Berwibawa Berlandaskan Azaz-azas Tata Pemerintahan Yang Baik	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah daerah di Kabupaten Tulungagung yang bersih dan berwibawa berlandaskan penerapan azas-azas tata pemerintahan yang baik	<p>Tegaknya supremasi hukum dan HAM dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagai wujud terselenggaranya tata pemerintahan yang baik</p> <p>Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan hukum, birokrasi yang netral dan profesional serta adanya kemandirian masyarakat sipil, masyarakat politik dan masyarakat ekonomi sebagai domain dari tata pemerintahan yang baik</p> <p>Terbentuknya kedewasaan masyarakat, berfungsinya pranata-pranata kemasyarakatan, lembaga hukum dan lembaga politik sehingga mampu menunjang perwujudan tata pemerintahan yang baik</p> <p>Meningkatnya profesionalisme birokrasi penyelenggara pemerintah daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, sehingga mampu mendorong tingginya partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah</p> <p>Terwujudnya pelayanan publik birokrasi pemerintah secara prima sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada pemerintah dalam tata pemerintahan yang baik</p>

Sumber: RPJPD 2005-2025

Berdasarkan telaah RPJPD Kabupaten Tulungagung tahun 2005-2025 terhadap misi bupati terpilih diatas, terdapat kendala yang cukup substantial terhadap penerjemahan fokus RPJPD terhadap RPJMD tahun berjalan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tulungagung tahun

2018-2023 merupakan tahapan ke 4 dari tahapan RPJPD Kabupaten Tulungagung tahun 2005-2025. Namun dalam dokumen RPJPD tersebut, tidak dijelaskan secara eksplisit apa fokus Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung pada tahapan RPJPD ke 4. Sehingga asumsinya dari 4 arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Tulungagung memiliki pola pembangunan yang sama mulai dari tahapan pertama hingga tahapan terakhir. Temuan tersebut merupakan kendala terbesar dalam tahapan telaah RPJPD Kabupaten Tulungagung.

Selain permasalahan tersebut menindak lanjuti indikator yang ditetapkan dalam sasaran pokok RPJPD Kabupaten Tulungagung yang tidak *measurable* (terukur), berikut merupakan fokus indikator yang harus diperhatikan dalam RPJMD Kabupaten Tulungagung 2018-2023:

- a. Arah kebijakan RPJPD Kabupaten Tulungagung pertama yakni **Meningkatkan Kualitas SDM Masyarakat Kabupaten Tulungagung**, dapat direpresentasikan melalui beberapa indikator pembangunan yang lebih terukur yang meliputi **Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan, Indeks Purchasing Power Parity, Angka Harapan Hidup, Rata-Rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah, dan Daya Beli Masyarakat**.
- b. Arah kebijakan RPJPD Kabupaten Tulungagung kedua yakni **Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Tulungagung Secara Merata dan Berkeadilan**, dapat direpresentasikan melalui beberapa indikator pembangunan yang lebih terukur yang meliputi **Angka Kemiskinan, PDRB Sektor Unggulan, Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB, Balita Gizi Buruk, dan Pola Pangan Harapan**.
- c. Arah kebijakan RPJPD Kabupaten Tulungagung ketiga yakni **Mewujudkan Kemandirian Kabupaten Tulungagung Dalam Membangun Perekonomian Daerah Berbasis Pengembangan Daya Saing**, dapat direpresentasikan melalui beberapa indikator pembangunan yang lebih terukur yang meliputi **Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Perkapita, Tingkat Pengangguran Terbuka, Persentase PDRB ADHB Kabupaten Tulungagung terhadap PDRB ADHB Provinsi Jawa Timur, Persentase Panjang Jalan Kondisi Baik, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, dan Indeks Tutupan Lahan**.
- d. Arah kebijakan RPJPD Kabupaten Tulungagung terakhir yakni **Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintah daerah di Kabupaten Tulungagung Yang Bersih dan Berwibawa Berlandaskan Azaz-Azas Tata Pemerintahan Yang Baik** dapat direpresentasikan melalui beberapa indikator pembangunan yang lebih terukur yang meliputi, **Persentase Perlindungan/ Pemeliharaan Terhadap Potensi Konflik SARA, Indeks Reformasi Birokrasi, Indeks Good Governance, Nilai SAKIP, Indeks Kepuasan Masyarakat**.

Berdasarkan 4 arah kebijakan RPJPD Kabupaten Tulungagung, berikut merupakan isu strategis yang dapat dijadikan acuan dalam pembangunan RPJMD tahun 2018-2023:

- a. Isu Strategis **Arah Kebijakan Pertama** RPJPD Kabupaten Tulungagung meliputi:

- 1) Hingga sejauh ini Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) masyarakat Kabupaten Tulungagung hanya mencapai 7,73 Tahun, atau setara jenjang Kelas 8 SMP / MTs Sederajat.
 - 2) Sedangkan Harapan Lama Sekolah (HLS) yang merepresentasikan ekspektasi masyarakat dan kuat hubungannya dengan sistem pendidikan di daerah mencapai 13,03 atau pada jenjang Perguruan Tinggi.
- b. Isu Strategis **Arah Kebijakan Kedua** RPJPD Kabupaten Tulungagung meliputi:
- 1) Mengamati data PDRB, dapat direpresentasikan bahwa sejak tahun 2012 hingga 2016 sektor unggulan Kabupaten Tulungagung adalah pada sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Namun masuk pada tahun 2017 sektor Industri Pengolahan mengungguli sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan.
 - 2) Sektor pertanian yang menjadi fokus pada sasaran pokok ke 2, secara *political will* KDH terpilih tahun 2018-2023 tidak disuratkan dalam misinya.
- c. Isu Strategis **Arah Kebijakan Ketiga** RPJPD Kabupaten Tulungagung meliputi:
- 1) Pemerintah berhasil menurunkan angka kemiskinan lebih dari 9.000 pengangguran pada interval tahun 2016-2017.
 - 2) Konektivitas antar wilayah menjadi perhatian yang masih diangka 77,86% di tahun 2016.
 - 3) Indeks kualitas udara tahun 2017 mencapai 92,48 dan mengalami kenaikan sebesar 4,74 dibandingkan tahun 2016. Indeks kualitas air tahun 2017 mencapai 50 dan indeks kualitas tutupan lahan sebesar 76,46.
- d. Isu Strategis **Arah Kebijakan Ketiga** RPJPD Kabupaten Tulungagung meliputi:
- 1) Masih lemahnya sistem perencanaan Kabupaten Tulungagung beberapa diantaranya adalah RPJPD Belum menggambarkan prioritas setiap interval 5 tahun sekali, minimnya data sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan, dan terdapat beberapa indikator penting yang seharusnya merepresentasikan tujuan atau sasaran yang belum terukur.

4.2.4.2 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulungagung

Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012-2032, sebagai acuan maupun pedoman dalam mengarahkan peruntukan lokasi kegiatan serta sebagai bahan pertimbangan penyusunan program pembangunan yang berkaitan pemanfaatan ruang wilayah. Penelaahan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Tulungagung ini bertujuan untuk melihat kerangka pemanfaatan ruang Kabupaten Tulungagung dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, yakni pada tahun 2019-2023.

Mengacu pada Rumusan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 bahwa rencana tata ruang wilayah Kabupaten Tulungagung dan prioritas

pembangunan dituangkan kedalam tahapan pembangunan wilayah dan masa berlaku RTRW Kabupaten Tulungagung adalah selama 20 tahun, maka tahapan pembangunan yang direkomendasikan untuk Kabupaten Tulungagung adalah untuk rentang waktu tahun 2012-2032. Rentang waktu tersebut kemudian dibagi atas empat periode. Program/proyek yang diusulkan untuk dilaksanakan pada setiap sektor, periodisasi pelaksanaannya dialokasikan pada keempat periode waktu tersebut. Adapun Prioritas pembangunan yang seyogyanya menjadi komitmen seluruh jajaran pemerintahan daerah Kabupaten Tulungagung dan masyarakat tahun 2012-2032, yaitu:

- a. Pengembangan Perkotaan Tulungagung sebagai pusat pemerintahan kabupaten sekaligus pusat pengembangan utama kabupaten;
- b. Membuka dan mengembangkan potensi kawasan strategis Kabupaten yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah seperti pengembangan agropolitan, minapolitan, pengembangan kawasan industri, pariwisata, dan pertanian tanaman pangan;
- c. Membuka dan mengembangkan kawasan perbatasan dan tertinggal dengan pengembangan sistem jaringan jalan yang menghubungkan antar pusat kegiatan, perkotaan, dan perdesaan;
- d. Pengembangan dan peningkatan sistem transportasi yang terintegrasi dengan wilayah pusat pertumbuhan regional-nasional;
- e. Membangun prasarana dan sarana pusat pemerintahan, perdagangan, jasa, pendidikan, dan kesehatan di pusat pertumbuhan wilayah dimana pembangunan sesuai fungsi dan peranannya;
- f. Dukungan pembangunan sarana dasar wilayah seperti jaringan listrik, telepon, air bersih, agribisnis hulu dan hilir, promosi yang dapat menunjang perkembangan pusat-pusat pelayanan wilayah, industri, pertanian, dan pariwisata;
- g. Penanganan dan pengelolaan kawasan DAS, anak sungai, sumber mata air, pembangunan, dan pengembangan sumber daya alam berlandaskan kelestarian lingkungan;
- h. Peningkatan sumber daya manusia dengan penguasaan ilmu dan teknologi, ketrampilan, dan kewirausahaan dalam mempersiapkan penduduk pada semua lini sektor, menghadapi tantangan globalisasi, dan pasar bebas.

Apabila mengacu pada rentang waktu tahapan pembangunan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012-2032, maka RPJMD Kabupaten Tulungagung 2018-2023 berada pada periode ke-2 RTRW Kabupaten Tulungagung. Adapun isu dan prioritas pembangunan Kabupaten Tulungagung yang berfokus pada tahapan pembangunan periode ke-2 RTRW Kabupaten Tulungagung, yaitu sebagai berikut:

a. Fokus Pembangunan Berdasar Rencana Struktur Ruang

- 1) Memfokuskan Pengembangan Pusat kegiatan lokal dan pusat pelayanan melalui penyusunan dokumen RDTRK, pengembangan kawasan dan pembangunan terminal tipe C.

- 2) Berfokus kepada pengembangan jalan nasional dan jalur perkereta-apian serta penambahan rute angkutan khusus untuk kawasan agropolitan.
- 3) Tuntutan untuk segera menyelesaikan proses pengembangan PLTA/PLTM di beberapa kecamatan yang telah di inisiasi pada proses pembangunan perencanaan RTRW tahun sebelumnya.
- 4) Berfokus kepada penyediaan sarana/infrastruktur dalam meningkatkan pelayanan telekomunikasi di wilayah terpencil.
- 5) Tuntutan untuk segera menyelesaikan pengembangan sarana air bersih bagi masyarakat berpenghasilan rendah, serta pengoptimalan sumber air dalam menunjang sarana irigasi pada kawasan potensial.
- 6) Berfokus kepada penyusunan rencana sanitasi dan limbah perkotaan, serta tuntutan dalam menyelesaikan masalah persampahan yang telah di inisiasi pada pembangunan tahun sebelumnya.
- 7) Berfokus kepada proses penyusunan Rencana induk Drainase dan Rencana Induk Mitigasi bencana kabupaten.

b. Fokus Pembangunan Berdasar Rencana Pola Ruang

- 1) Pemantapan Kawasan lindung bernilai strategis dalam penyediaan air dan perlindungan kawasan resapan air.
- 2) Pengendalian kegiatan di sekitar sempadan pantai, serta sungai guna mengurangi dampak kerusakan akibat kegiatan manusia. Serta tuntutan untuk menyelesaikan pada fokus permasalahan perlindungan kawasan waduk dan mata air.
- 3) Berfokus kepada rehabilitasi serta perlindungan kawasan hutan bakau melalui Program reboisasi hutan bakau. Serta melakukan pelestarian maupun perlindungan terhadap kawasan taman wisata alam dan kawasan cagar budaya.
- 4) Pengembangan Perlindungan Plasma Nutfah.
- 5) Berfokus pada penyelesaian Pengembangan Kawasan Agropolitan/Agroindustri serta Intensifikasi dan Pengembangan tanaman perkebunan maupun berbagai komoditi peternakan.
- 6) Pengembangan industri pengolahan ikan dalam mendukung berkembangnya perikanan budidaya maupun perikanan tangkap.
- 7) Pengembangan sentra-sentra industri berbagai macam komoditas baik makanan, maupun berbagai jenis kerajinan.
- 8) Berfokus kepada Rencana Pengembangan Jalur/Koridor Pariwisata serta Pembangunan Prasarana dan sarana wisata.
- 9) Pengembangan Kawasan Agropolitan
- 10) Berfokus pada Perlindungan kawasan sumberdaya air serta perlindungan kawasan terumbu karang.

Berdasarkan prioritas pembangunan periode Ke-2 RTRW Kabupaten Tulungagung yang telah dihasilkan, terdapat 7 prioritas berkaitan dengan Rencana Struktur Ruang dan 10 prioritas pembangunan yang berkaitan dengan Rencana Pola Ruang. Seluruh prioritas pembangunan tersebut diharapkan mampu menjadi acuan dan pertimbangan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Tulungagung, sehingga akan terwujud proses pembangunan yang saling terintegrasi.

4.2.4.3 Telaahan KLHS

Penyusunan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan suatu upaya pengkajian dan/atau evaluasi terhadap pengaruh lingkungan, dan penjaminan integrasi prinsip-prinsip keberlanjutan dalam pengambilan keputusan strategis pembangunan daerah. Tujuannya adalah untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan yang menjadi dasar, dan mengintegrasikannya dalam pembangunan. Kaitannya dengan penyusunan RPJMD, dokumen KLHS memberikan penilaian kelayakan program strategis pembangunan daerah dalam kerangka prinsip keberlanjutan, hal ini disesuaikan dengan rumusan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 7 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan KLHS untuk rencana pembangunan daerah. KLHS bermanfaat untuk menjamin bahwa setiap kebijakan, rencana dan/atau program dapat “lebih hijau” dalam arti dapat menghindarkan, atau mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

KLHS disusun melalui pendekatan pengambilan keputusan berdasarkan masukan dari berbagai kepentingan. Pendekatan yang digunakan yaitu penyelenggaraan KLHS tidak ditujukan untuk menolak, atau mengkritisi kebijakan suatu perencanaan saja, namun untuk meningkatkan kualitas proses, dan produk kebijakan. Terdapat 3 (tiga) nilai penting dalam penyelenggaraan KLHS yang dapat mencerminkan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan yaitu keterkaitan (*interdependency*), keseimbangan (*equilibrium*), dan keadilan (*justice*).

Perkembangan dan pembangunan sebuah daerah membawa dampak positif dan dampak yang negatif, hal tersebut seperti dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Perkembangan dan pembangunan daerah yang mengubah pola pembangunan dari agraris ke industri maka akan berdampak pada perubahan lingkungan dan daya dukung daerah tersebut. Kabupaten Tulungagung sebagai salah satu daerah agraris yang mempunyai luas sawah mencakup 18% dari total wilayahnya. Sebagai daerah agraris, pengoptimalan sumber air untuk irigasi dan kualitas sumber daya air merupakan sebuah upaya penting yang harus dilaksanakan.

Isu strategis KLHS perubahan RPJMD Kabupaten Tulungagung dirumuskan dengan mendasarkan pada permasalahan/ isu utama yang telah diperoleh, dimana dalam penyusunannya seluruh permasalahan/isu utama yang telah diperoleh dari hasil analisis capaian indikator TPB, analisis muatan KLHS, dan hasil uji publik selanjutnya dikelompokkan berdasarkan 4 aspek, yaitu sosial, ekonomi, lingkungan, hukum dan tata kelola. Pada masing-masing aspek selanjutnya permasalahan/isu utama dilakukan pengclustering untuk memperoleh permasalahan/isu utama yang seumpun. Adapun yang menjadi pertimbangan dalam melakukan *clustering* adalah urusan/ sub urusan Perangkat Daerah/ Bidang yang secara umum bisa menjadi identitas dari kelompok permasalahan/isu utama tersebut. Berdasarkan permasalahan/isu utama yang telah disusun, maka selanjutnya dilakukan perumusan isu strategis. Dimana isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan

menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah Daerah dimasa yang akan datang. Untuk mengetahui secara lebih jelas terkait dengan alur proses perumusan isu strategis KLHS Kabupaten Tulungagung adalah sebagai berikut:

Tabel 4.13 Isu Strategis Prioritas KLHS Kabupaten Tulungagung

Aspek	Asal Permasalahan/ Isu Utama	Permasalahan	Isu Utama	Isu Strategis
Sosial	Analisis CapaianIndikator TPB	Masih terdapat 34,20% penduduk yang belum menjadi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	Keikutsertaan masyarakat dalam jaminan kesehatan melalui SJSNBidang Kesehatan masih belum optimal	Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Masyarakat
	Analisis CapaianIndikator TPB	Masih terdapat 34,20% penduduk yang belum menjadi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	Keikutsertaan masyarakat dalam jaminan kesehatan melalui SJSNBidang Kesehatan masih belum optimal	
	Analisis CapaianIndikator TPB	Perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih masih kurang sebesar 3,24% dari target nasional sebesar 95%	Masih terdapat persalinan yangtidak ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih	
	Analisis CapaianIndikator TPB	Jumlah orang yang memerlukanintervensi terhadap penyakit kusta meningkat sebanyak 1,43% dari tahun 2019	Intervensi terhadap penderitaFilariasis dan Kusta berjalan kurang efektif	
	Analisis CapaianIndikator TPB	Penurunan kasus penyalahgunaan narkoba masihterdapat kekurangan sebesar 12,85% dari target nasional sebesar 0,02%	Penanganan penyalahgunaan narkoba masih belum optimal	
	Analisis CapaianIndikator TPB	Penduduk umur ≥15 tahun yangmerokok meningkat sebesar 1,66% dari tahun sebelumnya	Penduduk umur ≥15 tahun yangmerokok meningkat	
	Analisis CapaianIndikator TPB	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/ KB yangtidak terpenuhi) masih kurangsebesar 0,57% dari target nasional yang ditetapkan sebesar 9,9%	Pelayanan KB belum memenuhi kebutuhan masyarakat	
	Analisis CapaianIndikator TPB	Kejadian stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/ balita mengalami peningkatan sebesar 0,19% dari tahun sebelumnya (2019)	Kejadian Stunting (pendek dansangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/ balita meningkat	Pemenuhan Gizi danKebutuhan Pangan yang Berkualitas
	Analisis CapaianIndikator TPB	Angka Kematian Neonatal (AKN)masih meningkat sebanyak 1 per 1000 kelahiran hidup	Angka Kematian Neonatal (AKN)belum mengalami penurunan	
	Analisis CapaianIndikator TPB	Kualitas konsumsi pangan (skorPola Pangan Harapan) masih kurang sebesar 2,20% dari target nasional	Kualitas konsumsi pangan (skorPola Pangan Harapan) masih belum optimal	
	Analisis MuatanKLHS	Terdapat satu kecamatan yang memiliki daya dukung ketersediaan pangan defisit, yaitu Kecamatan Kedungwaru. Sedangkan hasil proyeksi daya dukung ketersediaan	Wilayah dengan kekurangan daya dukung ketersediaan pangan	

Aspek	Asal Permasalahan/ Isu Utama	Permasalahan	Isu Utama	Isu Strategis
		pangan seluruh Kecamatan di Kabupaten Tulungagung pada tahun 2039 terdapat satu kecamatan yang mengalami defisit, yaitu Kecamatan Kedungwaru		
	Analisis Muatan KLHS	Pada jasa ekosistem penyedia bahan pangan terdapat wilayah yang termasuk kelas sangat rendah dan rendah. Persentase terbesar untuk kelas sangat rendah berada pada Kecamatan Tanggunggunung sebesar 11,4%, sedangkan untuk kelas rendah berada pada Kecamatan Tulungagung sebesar 70,3% yang dipengaruhi oleh kondisi wilayah yang didominasi oleh permukiman dan lahan terbangun.	Wilayah dengan penyediaan pangan dalam kategori sangat rendah dan rendah	
	Analisis Capaian Indikator TPB	Presentase SD/MI berakreditasi minimal B memiliki kekurangan sebesar 14,10% dari target nasional sebesar 84,2%	SD/MI dengan akreditasi B belum optimal	Perluasan Akses dan Pemerataan Mutu Pendidikan
	Analisis Capaian Indikator TPB	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI memiliki selisih -10,09% dari target nasional sebesar 114,09%	Partisipasi sekolah (kasar) pada tingkat SD/MI belum optimal	
	Analisis Capaian Indikator TPB	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat memiliki selisih -7,01% dari target nasional sebesar 106,94%	Partisipasi sekolah (kasar) pada tingkat SMP/ MTs belum optimal	
	Analisis Capaian Indikator TPB	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun masih kurang sebesar 0,47 tahun dari target nasional sebesar 8,8 tahun	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun masih rendah	
	Analisis Capaian Indikator TPB	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) masih sebesar 65,52% (memiliki kekurangan sebanyak 11,68% dari target nasional yang ditetapkan sebesar 77,2%)	Partisipasi sekolah (kasar) tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) belum optimal	
	Analisis Capaian Indikator TPB	Masih terdapat 46,82% penduduk yang bekerja belum menjadi peserta jaminan sosial Bidang Ketenagakerjaan	Keikutsertaan penduduk yang bekerja dalam jaminan sosial Bidang Ketenagakerjaan masih belum optimal	Optimalisasi Perlindungan Sosial untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat

Aspek	Asal Permasalahan/ Isu Utama	Permasalahan	Isu Utama	Isu Strategis
	Analisis Capaian Indikator TPB	Masih terdapat 46,82% penduduk yang bekerja belum menjadi peserta jaminan sosial Bidang Ketenagakerjaan	Keikutsertaan penduduk yang bekerja dalam jaminan sosial Bidang Ketenagakerjaan masih belum optimal	
	Analisis Capaian Indikator TPB	Masih terdapat 12,91% penyandang disabilitas miskin dan rentan yang belum terpenuhi hak dasarnya	Pemenuhan hak dasar pada penyandang disabilitas yang miskin dan rentan belum merata	
	Analisis Capaian Indikator TPB	Masih terdapat sekitar 29.884 Keluarga Miskin yang mendapatkan bantuan Program PKH	Program pengentasan kemiskinan (PKH) belum berjalan secara efektif	
	Analisis Capaian Indikator TPB	Masih terdapat kekurangan sebanyak 663 korban bencana sosial, termasuk bagi anak, penyandang disabilitas dan lanjut usia yang harus dipenuhi kebutuhan dasarnya	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial, termasuk bagi anak, penyandang disabilitas dan lanjut usia belum maksimal	
	Analisis Capaian Indikator TPB	Masih terdapat 260 desa dengan risiko bencana tinggi dan sedang yang belum mendapatkan pendidikan layanan khusus	Pendidikan layanan khusus yang diberikan pada daerah dengan risiko bencana tinggi dan sedang belum merata	
	Analisis Capaian Indikator TPB	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan mengalami peningkatan menjadi 28,95%	Penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan meningkat	
	Analisis Capaian Indikator TPB	Belum tersedianya Indeks Kebebasan Sipil	Indeks Kebebasan Sipil belum tersedia	
Ekonomi	Analisis Capaian Indikator TPB	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) terhadap layanan keuangan masih mengalami kekurangan sebesar 24,98% dari target sebesar 25%	Akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) terhadap layanan keuangan masih rendah	Perluasan Akses Permodalan bagi UMKM
	Analisis Capaian Indikator TPB	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit menurun sebesar 0,14%	Keterjangkauan UMKM terhadap akses pembiayaan berkurang	
	Analisis Capaian Indikator TPB	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum) tidak mengalami penurunan (mendekat), masih sejauh 2 Km	Aksesibilitas penduduk terhadap layanan keuangan formal belum mengalami peningkatan	
	Analisis Capaian Indikator TPB	Jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 96,77% dari tahun 2019	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara menurun	Pengembangan dan Penguatan Sektor Unggulan/ Potensial yang Menunjang Pertumbuhan Ekonomi dan Perluasan Lapangan Kerja
	Analisis Capaian Indikator TPB	Jumlah wisatawan nusantara yang berkunjung pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 17,94% dari tahun 2020	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara menurun	

Aspek	Asal Permasalahan/ Isu Utama	Permasalahan	Isu Utama	Isu Strategis
	Analisis Capaian Indikator TPB	Proporsi pekerja pada industri pariwisata terhadap total pekerja pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 0,08% dari tahun 2019	Pekerja pada industri pariwisata menurun	
	Analisis Capaian Indikator TPB	Laju pertumbuhan PDRB per kapita pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi -3,19%	Pendapatan di dalam masyarakat mengalami penurunan	
	Analisis Capaian Indikator TPB	PDRB per kapita pada tahun 2020 mengalami penurunan dan masih berada dibawah target sebesar Rp. 50 Juta	Nilai tambah yang dihasilkan oleh satu orang penduduk selama satu tahun mengalami penurunan	
	Analisis Capaian Indikator TPB	Jumlah dermaga penyeberangan pada tahun 2020 mengalami penurunan sebanyak 3 dermaga dari tahun 2019	Aksesibilitas penyeberangan mengalami penurunan	
	Analisis Capaian Indikator TPB	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja) pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 0,25% dari tahun 2019	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja) menurun	
	Analisis Capaian Indikator TPB	Laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi -6,92%	Tingkat produktivitas tenaga kerja dalam menghasilkan nilai tambah ekonomi mengalami penurunan	
	Analisis Capaian Indikator TPB	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 0,37% dari tahun 2019	Persentase tenaga kerja pada sektor industri manufaktur menurun	
	Analisis Capaian Indikator TPB	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian mengalami penurunan	Pekerja informal di sektor non-pertanian menurun	
	Analisis Capaian Indikator TPB	Persentase tenaga kerja formal mengalami kekurangan sebesar 16,52% dari target yang ditetapkan sebesar 51%	Komposisi penduduk yang bekerja di sektor formal masih rendah	
	Analisis Capaian Indikator TPB	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian mengalami penurunan	Tenaga kerja informal di sektor pertanian menurun	
	Analisis Capaian Indikator TPB	Tingkat pengangguran terbuka tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 1,26% dari tahun 2019	Tingkat pengangguran terbuka meningkat	
	Analisis Capaian Indikator TPB	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET) meningkat	Masih terdapat keterbatasan akses dalam memperoleh pendidikan, pelatihan serta pekerjaan pada usia muda	
	Hasil Uji Publik	-	Hilangnya pekerjaan akibat dampak Covid-19	
Lingkungan	Analisis Capaian Indikator TPB	Korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per	Korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana meningkat	Penguatan Mitigasi/Pengurangan Risiko Bencana

Aspek	Asal Permasalahan/ Isu Utama	Permasalahan	Isu Utama	Isu Strategis
		100.000 orang mengalami peningkatan sebesar 0,004		
	Analisis Capaian Indikator TPB	Masih terdapat 33 desa/ kelurahan yang belum dilakukan penguatan pengurangan risiko bencana daerah	Mitigasi terhadap risiko bencana belum merata	
	Analisis Capaian Indikator TPB	Korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang mengalami peningkatan sebesar 0,004	Korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana meningkat	
	Analisis Capaian Indikator TPB	Korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang mengalami peningkatan sebesar 0,004	Korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana meningkat	
	Analisis Muatan KLHS	Pada jasa ekosistem pengatur tata air dan banjir semua Kecamatan terdapat wilayah yang termasuk dalam kelas sangat rendah dengan distribusi luas yang berbeda-beda. Persentase terbesar untuk kelas sangat rendah berada pada Kecamatan Tulungagung sebesar 69,7%.	Wilayah dengan pengaturan tata air dan banjir dalam kategori sangat rendah	
	Analisis Muatan KLHS	Pada jasa ekosistem pengaturan perlindungan dan pencegahan bencana semua Kecamatan terdapat wilayah yang termasuk dalam kelas sangat rendah dengan distribusi luas yang berbeda-beda. Persentase terbesar untuk kelas sangat rendah berada pada Kecamatan Tulungagung sebesar 69,7%.	Wilayah dengan pengaturan perlindungan dan pencegahan bencana dalam kategori sangat rendah	
	Analisis Muatan KLHS	Kabupaten Tulungagung memiliki tingkat risiko bencana dengan kategori tinggi terhadap semua jenis bencana alam, dan memiliki tingkat bahaya dalam kategori tinggi terhadap bencana banjir, banjir bandang, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, dan cuaca ekstrem.	Tingkat risiko bencana dengan kategori tinggi	
	Analisis Capaian Indikator TPB	Belum terdapat pemberian insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.	Pemberian insentif penghematan air pertanian/ perkebunan dan industri belum dilaksanakan	Peningkatan Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan

Aspek	Asal Permasalahan/ Isu Utama	Permasalahan	Isu Utama	Isu Strategis
	Analisis Capaian Indikator TPB	Belum terdapat jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk	Jaringan informasi sumber daya air belum terbentuk	
	Hasil Uji Publik	-	Hilangnya sumber mata air disebabkan oleh berkurangnya tutupan hutan	
	Hasil Uji Publik	-	Berkurangnya sumber daya air di daerah	
	Analisis Muatan KLHS	Terjadinya tren penurunan kualitas udara dan kualitas air (IKU dan IKA) yang disebabkan oleh adanya pembangunan	Penurunan kualitas udara dan air	
	Analisis Capaian Indikator TPB	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 6,08% dari tahun 2018	Penurunan proporsi tutupan lahan	
	Hasil Uji Publik	-	Pentingnya perhutanan sosial untuk mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat	
	Analisis Capaian Indikator TPB	Luas lahan kritis yang direhabilitasi masih kurang seluas 1.300 Ha dari target (rata-rata per daerah seluas 10.700 Ha)	Rehabilitasi lahan kritis belum optimal	
	Analisis Muatan KLHS	Luas lahan kritis mengalami peningkatan dari 17.612,00 Ha pada tahun 2017 menjadi 31.334,17 Ha pada tahun 2018 atau meningkat sebesar 77,91%	Peningkatan luas lahan kritis	
	Analisis Muatan KLHS	Pada jasa ekosistem pembentukan lapisan tanah dan pemeliharaan kesuburan semua Kecamatan terdapat wilayah yang termasuk dalam kelas sangat rendah dengan distribusi luas yang berbeda-beda. Persentase terbesar untuk kelas sangat rendah berada pada Kecamatan Tulungagung sebesar 69,8%.	Wilayah dengan pembentukan lapisan tanah dan pemeliharaan kesuburan dalam kategori sangat rendah	
	Analisis Muatan KLHS	Pada jasa ekosistem pendukung produksi primer terdapat wilayah yang termasuk kelas sangat rendah dan rendah. Persentase terbesar untuk kelas sangat rendah berada pada Kecamatan Tanggunggunung sebesar 11,4%, sedangkan untuk kelas rendah juga berada pada Kecamatan Tanggunggunung sebesar 39,1%.	Wilayah dengan pendukung produksi primer dalam kategori sangat rendah dan rendah	

Aspek	Asal Permasalahan/ Isu Utama	Permasalahan	Isu Utama	Isu Strategis
	Hasil Uji Publik	-	Peruntukan ruang/ lahan yang memperhatikan aspek konservasi lingkungan	
	Analisis MuatanKLHS	Pada tahun 2040 diperkirakan terdapat tiga kecamatan di Kabupaten Tulungagung yang akan melewati kapasitas ambangbatas daya tampung lahan untukpemukiman, yaitu Kecamatan Ngunut, Kecamatan Boyolangu, dan Kecamatan Kedungwaru.	Wilayah dengan kelebihan kapasitas ambang batas dayatampung lahan untuk pemukiman	
	Analisis CapaianIndikator TPB	Belum terdapat kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan mengenai pembagiankeuntungan yang adil dan merata	Kerangka legislasi, administrasi, dan kebijakan mengenai pembagian keuntungan yang adil dan merata penting belum disusun	
	Analisis MuatanKLHS	Pengusahaan dan pendayagunaan potensi tambang masih sebagian kecil yang telah dikelola dan memilikiperijinan sesuai yang berlaku	Penguatan tata kelola danperijinan tambang	
	Analisis CapaianIndikator TPB	Belum tersedia Dokumenrencana pemanfaatan keanekaragaman hayati	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati belum disusun	
	Analisis MuatanKLHS	Pada jasa ekosistem pendukung biodiversitas terdapat wilayah yang termasuk kelas sangat rendah dan rendah. Persentase terbesar untuk kelas sangat rendah berada pada Kecamatan Tanggungnung sebesar 11,6%, sedangkan untuk kelas rendah juga berada pada Kecamatan Tulungagung sebesar 71,6%.	Wilayah dengan pendukung pendukung biodiversitas dalamkategori sangat rendah dan rendah	
	Analisis MuatanKLHS	Berkembangnya pembangunankawasan yang berpotensi menurunkan keanekaragaman hayati	Potensi penurunan keanekaragaman hayati	
	Hasil Uji Publik	-	Dampak ekosistem pembangunan tol Tulungagung -Kediri	
	Analisis MuatanKLHS	Pada jasa ekosistem pengaturaniklim terdapat wilayah yang termasuk kelas sangat rendah dan rendah. Persentase terbesar untuk kelas sangat rendah berada pada Kecamatan Tanggungnung sebesar 14,7%, sedangkan untuk kelas rendah berada pada Kecamatan Tulungagung sebesar 69,7%.	Wilayah dengan pengaturan iklim dalam kategori sangat rendah dan rendah	

Aspek	Asal Permasalahan/ Isu Utama	Permasalahan	Isu Utama	Isu Strategis
	Analisis Muatan KLHS	Berdasarkan perhitungan Indeks Kerentanan (berdasarkan keterpaparan dan sensitivitas, serta kemampuan adaptasi) masih terdapat 3 desa berstatus rentan, 2 desa terdapat di Kecamatan Boyolangu dan 1 desa terdapat di Kecamatan Ngunut	Kerentanan terhadap perubahan iklim	
	Hasil Uji Publik	Emisi GRK terbesar berasal dari sektor energi sebesar 63% yang didominasi oleh pembakaran bahan bakar dari kegiatan transportasi sebesar 52,35%, dan sisanya diakibatkan dari pembakaran bahan bakar oleh industri penghasil energi (pembangkit) sebesar 44,7%, dan pembakaran bahan bakar dari kegiatan rumah tangga sebesar 2,95%		
	Analisis Capaian Indikator TPB	-	Pelaksanaan pengelolaan sampah belum optimal	Optimalisasi Pengelolaan Persampahan
	Analisis Muatan KLHS	Belum terdapat fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister	Penerapan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) pada fasilitas publik belum dilaksanakan	
	Analisis Muatan KLHS	Jumlah timbulan sampah dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 mengalami peningkatan cukup signifikan, dan Rata-rata hanya 61,62% dari total timbulan sampah yang dapat diangkut ke TPA	Pengelolaan persampahan belum optimal dan merata.	
	Analisis Muatan KLHS	Jumlah sampah yang tertangani masih sangat rendah, yaitu pada tahun 2020 hanya mencapai 29,01% dan masih terdapat kecamatan yang penanganannya masih rendah		
	Analisis Capaian Indikator TPB	Masih terdapat 12,07% rumah tangga yang belum memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan	Akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan belum merata	Pemerataan Akses terhadap Layanan Sumber Air Minum dan Sanitasi Layak dan Berkelanjutan
	Analisis Capaian Indikator TPB	Masih terdapat 12,07% rumah tangga yang belum memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak	Akses terhadap layanan sumber air minum layak belum merata	
	Analisis Capaian Indikator TPB	Masih terdapat 12,07% rumah tangga yang belum memiliki akses terhadap layanan	Akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan belum merata	

Aspek	Asal Permasalahan/ Isu Utama	Permasalahan	Isu Utama	Isu Strategis
		sumberair minum layak dan berkelanjutan		
	Analisis CapaianIndikator TPB	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri masihkurang sebanyak 117,7 m3/ detik dari target nasional sebesar 118,6 m3/ detik	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri masihrendah	
	Analisis MuatanKLHS	Pada jasa ekosistem penyedia air bersih terdapat wilayah yang termasuk kelas sangat rendah dan rendah. Persentase terbesar untuk kelas sangat rendah berada pada Kecamatan Tanggunggunung sebesar 11,2%, sedangkan untuk kelas rendah berada pada Kecamatan Tulungagung sebesar 69,7%.	Wilayah dengan penyediaan airbersih dalam kategori sangat rendah dan rendah	
	Analisis CapaianIndikator TPB	Masih terdapat 10,61% rumah tangga yang belum memiliki akses terhadap layanan sanitasilayak dan berkelanjutan	Akses terhadap layanan sanitasilayak dan berkelanjutan belummerata	
	Analisis CapaianIndikator TPB	Masih terdapat 10,61% rumah tangga yang belum memiliki akses terhadap layanan sanitasilayak dan berkelanjutan	Akses terhadap layanan sanitasilayak dan berkelanjutan belummerata	
	Analisis CapaianIndikator TPB	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat tidak mengalami peningkatan	Rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat stagnan	
Hukum dan Tata Kelola	Analisis CapaianIndikator TPB	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) masih kurang sebanyak 0,16 dari target yang ditetapkan sebesar 4,0	Tingkat permisif masyarakat terhadap perilaku korupsi masih cukup tinggi	Peningkatan Kemandirian dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah
	Analisis CapaianIndikator TPB	Persentase penggunaan E- procurement terhadap belanja pengadaan masih kurang sebanyak 33,83% dari target nasional sebesar 80%	Penerapan e-procurement yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah belum optimal	
	Analisis CapaianIndikator TPB	Rasio penerimaan pajak terhadap PDRB masih kurang sebesar 11,76% dari target nasional sebesar 12%	Penerimaan dari pajak yang diterima oleh Pemerintah Daerah terhadap PDRB masih rendah	
	Analisis CapaianIndikator TPB	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak pada tahun 2020 menurun sebesar -0,40% dari tahun 2019	Kontribusi dari pajak daerah terhadap belanja daerah kurang optimal	
	Analisis CapaianIndikator TPB	Belum terdapat proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema	Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) belum dilaksanakan	

Aspek	Asal Permasalahan/ Isu Utama	Permasalahan	Isu Utama	Isu Strategis
		Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)		
	Analisis Capaian Indikator TPB	Belum terdapat anggaran alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)	Perencanaan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) belum dilaksanakan	
	Analisis Capaian Indikator TPB	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik mengalami penurunan sebesar 5,36%	Tingkat kepuasan konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) menurun	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis IT
	Analisis Capaian Indikator TPB	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama menurun sebanyak 10,20%	Penggunaan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama menurun	
	Analisis Capaian Indikator TPB	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 5,36% dari tahun 2019	Tingkat kepuasan konsumen terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS) menurun	
	Analisis Capaian Indikator TPB	Proporsi individu yang menguasai/ memiliki telepon genggam pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 2,24% dari tahun 2019	Akses masyarakat terhadap komunikasi dan informasi melalui telepon genggam menurun	
	Analisis Capaian Indikator TPB	Proporsi individu yang menguasai/ memiliki telepon genggam pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 2,24% dari tahun 2019	Akses masyarakat terhadap komunikasi dan informasi melalui telepon genggam menurun	
	Analisis Capaian Indikator TPB	Masih adanya tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan yang mengalami kekerasan fisik, seksual dan emosional oleh pasangan atau mantan pasangan dengan peningkatan proporsi sebesar 0,003%	Terjadi peningkatan kekerasan terhadap perempuan dewasa dan anak perempuan	Keberpihakan Terhadap Perempuan dan Anak, serta Peningkatan Perlindungan Keamanan Masyarakat
	Analisis Capaian Indikator TPB	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan mengalami peningkatan sebesar 1,32%	Prevalensi kekerasan terhadap anak meningkat	
	Analisis Capaian Indikator TPB	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan meningkat sebanyak 2 kasus	Kasus kejahatan pembunuhan meningkat	

Aspek	Asal Permasalahan/ Isu Utama	Permasalahan	Isu Utama	Isu Strategis
	Analisis Capaian Indikator TPB	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan meningkat sebesar 0,0007%	Penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan meningkat	

Sumber: Dokumen KLHS, 2021

Berdasarkan mapping perumusan isu strategis KLHS perubahan RPJMD Kabupaten Tulungagung sebagaimana yang telah disajikan pada tabel di atas, maka dapat dikemukakan bahwa isu strategis KLHS perubahan RPJMD Kabupaten Tulungagung adalah sebagai berikut.



Gambar 4. 4 Isu Strategis KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Tulungagung

Sumber: Dokumen KLHS Kabupaten Tulungagung Tahun 2021

4.2.4.4 Telaah Dokumen RPJMD Daerah Sekitar Kabupaten Tulungagung

Telaah dokumen RPJMD daerah sekitar Kabupaten Tulungagung bertujuan sebagai pertimbangan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Tulungagung terkait dengan sinergitas antar daerah dalam pembangunan dan sebagai upaya dalam meningkatkan daya saing daerah terhadap daerah sekitarnya. Adapun telaah RPJMD daerah sekitar Kabupaten Tulungagung antara lain Kabupaten Blitar dan Kabupaten Trenggalek. Berikut adalah tabel telaah RPJMD daerah sekitar:

Tabel 4.14 Telaah RPJMD Daerah Sekitar

No	Kabupaten / Kota	Periode RPJMD	Kebijakan Terkait Yang Bersinggungan dengan Kabupaten Tulungagung
1	Kabupaten Blitar	2016-2021	Peningkatan investasi dan fasilitasi kesempatan berusaha

No	Kabupaten / Kota	Periode RPJMD	Kebijakan Terkait Yang Bersinggungan dengan Kabupaten Tulungagung
			Bantuan permodalan dan pelatihan usaha bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah
			Pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi keahlian tenaga kerja
			Peningkatan perlindungan tenaga kerja
			Peningkatan pelatihan kewirausahaan
			Penyediaan jaringan jalan, jembatan dan irigasi serta sarana dan prasarana perhubungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat.
			Peningkatan kewaspadaan masyarakat pada daerah rawan bencana
			Peningkatan kualitas produk koperasi dan UMKM
			Peningkatan peran koperasi dan UMKM dalam perekonomian masyarakat
			Peningkatan jumlah industri kecil dan menengah, serta industri potensial
			Peningkatan penggunaan iptek dalam industri kecil dan menengah
			Pengembangan destinasi Kawasan wisata Penataran, wisata agro dan edukasi, serta wisata alam
			Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana destinasi wisata
			Pengembangan industri penunjang kepariwisataan dan desa wisata
			Penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan perijinan
			Pemetaan, Pembentukan dan pengembangan kawasan perdesaan berbasis potensi lokal
2	Kabupaten Trenggalek	2016-2021	Pengembangan Pertanian Terpadu
			Kakao Land dan Rumah Coklat
			International Durio Forestry
			Revitalisasi Kebun Kopi Dilem Wilis
			Konservasi Mangrove dan Penyu
			Pengembangan Destinasi Pariwisata
			Trenggalek GEMILANG (Gerakan Mutu Industri Cemerlang)
			Pasar Rakyat Mandiri (Sekolah Pasar)
			Trenggalek "MY DARLING" yaitu Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH)
			Penanggulangan Bencana (Kekeringan)
			P4GN (Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba)

Sumber: Dokumen RPJMD Kab. Blitar dan Kab. Trenggalek, 2021

Berdasarkan tabel telaah RPJMD daerah sekitar Kabupaten Tulungagung di atas maka dapat diketahui dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Tulungagung maka hal yang perlu dipertimbangkan sehingga terciptanya sinergitas antar daerah dan meningkatkan daya saing Kabupaten Tulungagung terhadap daerah sekitarnya antara lain:

- a) Perlunya Peningkatan dan Pengembangan UMKM dan Koperasi daerah guna mampu bersaing dengan daerah sekitar (Blitar dan Trenggalek) yang telah mencanangkan meningkatkan keunggulan UMKM dan Koperasi.

- b) Penguatan UMKM dan IKM Unggulan seperti kerajinan, kuliner, tekstil, dan peralatan rumah tangga yang dapat di jual di luar daerah karena mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dan di daerah sekitar masih terbatas UMKM maupun IKM yang mengembangkannya.
- c) Mendukung Infrastruktur dan sarana-prasarana perhubungan antar daerah sekitar khususnya Jalan Lingkar Selatan yang menghubungkan Kabupaten Blitar dan Kabupaten Trenggalek guna meningkatkan perdagangan antar daerah dalam menunjang UMKM maupun IKM serta perdagangan sektor lainnya seperti pertanian, perikanan dan peternakan di Kabupaten Tulungagung.
- d) Meningkatkan pertanian khususnya pada pertanian Kabupaten Tulungagung lebih unggul daripada Kabupaten Blitar dan Kabupaten Trenggalek sehingga dapat mensuplai kebutuhan pangan maupun olahan bagi daerah sekitar.
- e) Pengembangan Perikanan Laut Tangkap maupun Budidaya yang merupakan sektor potensial di Kabupaten Tulungagung dimana di Kabupaten Blitar maupun Kabupaten Trenggalek masih belum menjadi prioritas pembangunan.
- f) Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan sehingga mampu bersaing dengan daerah sekitar dalam menarik Investasi PMA maupun PMDN.
- g) Pengembangan Pariwisata Lokal dan infrastruktur pendukungnya sehingga mampu bersaing dengan daerah sekitar dalam menarik wisatawan nasional maupun mancanegara.

4.2.4.5 Perumusan Isu Strategis Kabupaten Tulungagung

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Perumusan isu strategis didapatkan berdasarkan rumusan permasalahan pembangunan yang didapatkan berdasarkan telaah pada kondisi daerah pada Bab 2, telaah aspek keuangan daerah pada Bab 3, telaah isu internasional, isu nasional, Telaah SDGs, isu regional Provinsi Jawa Timur, dan Telaah Dokumen Perencanaan Terkait (RPJPD, RTRW, KLHS). Hasil perumusan isu strategis akan menghasilkan alternatif isu strategis dalam pembangunan Kabupaten Tulungagung. Adapun alternatif isu strategis Kabupaten Tulungagung antara lain:

- 1) Belum maksimalnya pengelolaan sistem transportasi berbasis teknologi dan informasi
- 2) Ancaman Kultur tanah terhadap kondisi jalan
- 3) Jaminan kesehatan dan sosial ketenagakerjaan belum merata
- 4) Kurangnya fasilitas, sarana dan prasarana kesehatan
- 5) Akses sanitasi layak masih belum merata
- 6) Penguatan pengurangan risiko bencana daerah belum maksimal

- 7) Belum meratanya ketersediaan infrastruktur penunjang konektivitas antar wilayah
- 8) Tingkat kematian balita masih tinggi
- 9) Nilai tambah pertanian masih rendah
- 10) Rendahnya upaya pencegahan dan penanggulangan dini pada wabah penyakit
- 11) Rendahnya Pemahaman Penggunaan Kontrasepsi Pada Masyarakat
- 12) Akreditasi minimal seluruh sekolah tingkat dasar dan menengah pertama belum terpenuhi
- 13) Partisipasi sekolah (kasar) tingkat PAUD, dasar dan menengah pertaman relatif rendah
- 14) Kualitas tenaga pendidik dan kelembagaan PAUD yang masih kurang
- 15) Rata-rata lama sekolah dan Harapan Lama Sekolah penduduk masih relatif rendah
- 16) Masih Rendahnya Keterwakilan/Peran serta Perempuan Pada Pemerintahan dan keterwakilan publik
- 17) Masih Tingginya Angka Kekerasan/kejahatan Pada Perempuan dan anak
- 18) Tingginya angka pernikahan dini
- 19) Rendahnya Kualitas Air Sungai dan Danau
- 20) Belum optimalnya pengelolaan sumber daya air
- 21) Akses sumber air minum, air bersih, dan air irigasi masih belum merata
- 22) Belum optimalnya sektor-sektor PDRB dalam berkontribusi meningkatkan nilai total PDRB
- 23) legalitas, Standardisasi dan sertifikasi produk yang masih rendah
- 24) masih kurangnya pengetahuan masyarakat terkait HAKI
- 25) belum optimalnya peningkatan kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB
- 26) Masih Rendahnya Kualitas Angkatan Tenaga Kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja
- 27) Akses Layanan Keuangan bagi UMKM dan Industri Kecil Masih Rendah
- 28) Rendahnya nilai PDRB sektor Pariwisata
- 29) Kunjungan wisatawan mancanegara masih rendah
- 30) belum optimalnya pengembangan destinasi pariwisata
- 31) akses pelayanan perbankan bagi masyarakat masih belum merata
- 32) Nilai Tambah Industri Kecil terhadap nilai tambah industri masih rendah
- 33) Jumlah desa mandiri masih sedikit
- 34) Indeks Kebebasan sipil masih rendah
- 35) Kualitas Pelayanan Publik Masih Belum Maksimal
- 36) Pengelolaan dan penanganan sampah belum maksimal
- 37) Rendahnya Kapasitas Industri Dalam Pengelolaan Limbah Industri
- 38) manajemen pengawasan, pengendalian, dan pemanfaatan lingkungan yang masih lemah
- 39) Rehabilitasi terhadap lahan kritis masih kurang
- 40) Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu
- 41) rendahnya rasa aman pada masyarakat
- 42) Rendahnya Kesadaran Hukum Masyarakat
- 43) Penegakkan pelanggaran perda masih belum tegas
- 44) Belum adanya pengukuran tentang perilaku anti korupsi

- 45) Lemahnya Koordinasi Antar provinsi dengan daerah dalam perencanaan dan kerjasama antar instansi
- 46) Sumber daya aparatur masih lemah dalam perencanaan dan realisasi anggaran
- 47) Masih belum meratanya pencatatan dan penerbitan akta kelahiran maupun kematian
- 48) Penerapan pelaksanaan pemerintahan berbasis sistem informasi dan manajemen (*Electronic Government*) belum maksimal
- 49) Rasio belanja tidak langsung lebih tinggi daripada belanja langsung.
- 50) Rasio penerimaan pajak relatif kecil
- 51) Pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama Kabupaten Tulungagung mengalami penurunan.
- 52) Belanja modal dan infrastruktur Kabupaten tulungagung menurun.
- 53) Nilai penyisihan piutang tidak tertagih dalam 2 tahun terakhir semakin meningkat
- 54) Ketergantungan terhadap dana perimbangan tinggi.
- 55) Pengurangan luasan Kawasan kumuh masih rendah
- 56) Masih Rendahnya sumberdaya dan manajemen koperasi
- 57) Pengelolaan dan Pengembangan Potensi Budaya dan Kesenian Daerah belum maksimal
- 58) Rendahnya produktifitas sektor pertanian
- 59) angka kematian masih tergolong tinggi
- 60) Cakupan Penangan PMKS masih belum merata
- 61) Belum Optimalnya ketersediaan infrastruktur dan sarana prasana penunjang yang menghubungkan Jalur Lingkar Selatan
- 62) Produktifitas dan Daya Saing UMKM masih belum optimal
- 63) Skor Pola Pangan harapan masyarakat masih dibawah target SDGs
- 64) Meningkatnya kesejahteraan pada keluarga miskin
- 65) Terpenuhinya fasilitas kesehatan bagi keluarga miskin
- 66) Meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang pendidikan dasar dan sekolah menengah pertama
- 67) Meningkatnya Angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 tahun
- 68) Sudah Meratanya Penerangan utama (listrik)
- 69) Kinerja mitigasi bencana pada daerah rawan bencana sudah baik
- 70) Sumber daya untuk pemberantasan kemiskinan mendukung
- 71) Peningkatan Pengeluaran APBD untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial)
- 72) Peningkatan kesehatan pada bayi dan balita
- 73) Kelahiran di fasilitas kesehatan menjadi pilihan masyarakat
- 74) Peningkatan Imunisasi dasar lengkap pada bayi
- 75) Peningkatan Upaya Pencegahan HIV oleh masyarakat
- 76) Terpenuhinya Ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas
- 77) laju pertumbuhan PDRB yang positif
- 78) Kunjungan wisatawan nusantara meningkat
- 79) Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka
- 80) Meningkatnya infrastruktur penunjang mobilitas Perairan maupun maritim
- 81) Tingkat Kesenjangan Antar kelas ekonomi Masyarakat termasuk rendah
- 82) Telah Adanya lembaga pembiayaan infrastruktur

- 83) Arah Pengembangan Menuju Kota Pusaka
- 84) Kualitas Fasilitas Publik Sudah Sesuai SPM
- 85) Luasan Tutupan hutan sudah terpenuhi
- 86) Peningkatan Kualitas Perencanaan dan pelaporan anggaran pemerintahan
- 87) Peningkatan Akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah (SAKIP)
- 88) Peningkatan Pemanfaatan electronic Government
- 89) Peningkatan Reformasi birokrasi pada Pemerintahan
- 90) Potensi hasil pertanian dan peternakan Kawasan Agropolitan Sendang (KAS) sangat besar
- 91) Potensi komoditas pertambangan sangat besar
- 92) Merupakan wilayah potensial untuk pengembangan pariwisata (Wisata Alam, Buatan dan Religi)
- 93) Kawasan yang termasuk dalam wilayah pengendalian ketat (*High Control Zone*)
- 94) Kecenderungan Peningkatan pada PAD Kabupaten Tulungagung setiap tahunnya
- 95) Tantangan RPJP terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh, kesejahteraan masyarakat yang inklusif, tingkat pengangguran terbuka dan kemiskinan yang berkurang, dan pembangunan berkelanjutan
- 96) Peluang Pada Pembangunan Infrastuktur Jatim (JLS)
- 97) Skor IDM Kabupaten Tulungagung masuk 10 tertinggi dari Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Timur
- 98) Tantangan Peningkatan Produktifitas Sektor Pertanian

Berdasarkan alternatif isu strategis di atas selanjutnya akan dilakukan pembobotan atas setiap alternatif isu strategis tersebut. Dalam menentukan pembobotan dilakukan FGD untuk memahami usulan dan masukan tentang berbagai isu strategis. Pembobotan dilakukan untuk menentukan mana isu strategis yang paling prioritas dan akan dijadikan dasar bagi penyusunan visi dan misi. Adapun dalam pembobotan alternatif isu strategis dilakukan dengan dengan mempertimbangkan 5 klasifikasi antara lain:

Tabel 4.15 Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis

No	Klasifikasi Penilaian	Skor
1	Berhubungan dengan Visi – Misi	(Nilai 0 - 25)
2	Prioritas Daya Dukung dan Daya Tampung (DDDT)	(Nilai 0 - 15)
3	Tingkat Kepentingan untuk Diselesaikan	(Nilai 0 - 25)
4	Termasuk dalam SPM	(Nilai 0 - 15)
5	Merupakan Prioritas Nasional dan Provinsi	(Nilai 0 - 20)

Sumber: Hasil Analisis, 2021

Skoring atas alternatif isu strategis dilakukan oleh stakeholder terkait terutama oleh Perangkat Daerah dan lembaga kemasyarakatan. Adapun hasil skoring alternatif isu strategis di Kabupaten Tulungagung antara lain sebagai berikut:

Tabel 4.16 Nilai Skor Kriteria Alternatif Isu Strategis

No	Alternatif Isu Strategis	Score
1	Jaminan kesehatan dan sosial ketenagakerjaan belum merata	84.00
2	Kurangnya fasilitas, sarana dan prasarana Kesehatan	80.00
3	Tingkat kematian balita masih tinggi	80.00
4	Akses sanitasi layak masih belum merata	79.00
5	Pengelolaan dan penanganan sampah belum maksimal	79.00
6	Akses sumber air minum, air bersih, dan air irigasi masih belum merata	79.00
7	Penerapan pelaksanaan pemerintahan berbasis sistem informasi dan manajemen (Electronic Government) belum maksimal	78.00
8	Peningkatan Akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah (SAKIP)	78.00
9	Kualitas Pelayanan Publik Masih Belum Maksimal	77.00
10	Rata-rata lama sekolah dan Harapan Lama Sekolah penduduk masih relatif rendah	75.00
11	Jumlah desa mandiri masih sedikit	73.00
12	Akreditasi minimal seluruh sekolah tingkat dasar dan menengah pertama belum terpenuhi	72.00
13	Skor Pola Pangan harapan masyarakat masih dibawah target SDGs	72.00
14	laju pertumbuhan PDRB yang positif	72.00
15	Akses Layanan Keuangan bagi UMKM dan Industri Kecil Masih Rendah	72.00
16	Rasio penerimaan pajak relatif kecil	70.00
17	Masih Rendahnya Kualitas Angkatan Tenaga Kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja	70.00
18	Masih Tingginya Angka Kekerasan/kejahatan Pada Perempuan dan anak	69.60
19	Belum meratanya ketersediaan infrastruktur penunjang konektivitas antar wilayah	69.40
20	Rendahnya Kapasitas Industri Dalam Pengelolaan Limbah Industri	69.20
21	sumber daya aparatur masih lemah dalam perencanaan dan realisasi anggaran	69.00
22	Belum maksimalnya pengelolaan sistem transportasi berbasis teknologi dan informasi	65.36
23	Ancaman Kultur tanah terhadap kondisi jalan	65.28
24	Penguatan pengurangan risiko bencana daerah belum maksimal	65.14
25	Nilai Tambah Pertanian Masih Rendah	65.14
26	Rendahnya upaya pencegahan dan penanggulangan dini pada wabah penyakit	65.00
27	Rendahnya Pemahaman Penggunaan Kontrasepsi Pada Masyarakat	64.92
28	Partisipasi sekolah (kasar) tingkat PAUD, dasar dan menengah pertaman relatif rendah	64.84
29	Kualitas tenaga pendidik dan kelembagaan PAUD yang masih kurang	64.84
30	Masih Rendahnya Keterwakilan/Peran serta Perempuan Pada Pemerintahan dan keterwakilan publik	64.74
31	Tingginya angka pernikahan dini	64.72
32	Rendahnya Kualitas Air Sungai dan Danau	64.56
33	Belum optimalnya pengelolaan sumber daya air	64.50
34	Belum optimalnya sektor-sektor PDRB dalam berkontribusi meningkatkan nilai total PDRB	64.42
35	legalitas, Standardisasi dan sertifikasi produk yang masih rendah	64.38
36	masih kurangnya pengetahuan masyarakat terkait HAKI	64.32
37	Peningkatan Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	64.08
38	Rendahnya nilai PDRB sektor Pariwisata	63.98
39	Kunjungan wisatawan mancanegara masih rendah	63.94
40	belum optimalnya pengembangan destinasi pariwisata	63.90

No	Alternatif Isu Strategis	Score
41	akses pelayanan perbankan bagi masyarakat masih belum merata	63.84
42	Nilai Tambah Industri Kecil terhadap nilai tambah industri masih rendah	63.78
43	Indeks Kebebasan sipil masih rendah	63.68
44	manajemen pengawasan, pengendalian, dan pemanfaatan lingkungan yang masih lemah	63.48
45	Rehabilitasi terhadap lahan kritis masih kurang	63.48
46	Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu	63.36
47	Rendahnya rasa aman pada masyarakat	63.08
48	Rendahnya Kesadaran Hukum Masyarakat	63.00
49	Penegakkan pelanggaran perda masih belum tegas	62.98
50	Belum adanya pengukuran tentang perilaku anti korupsi	62.84
51	Lemahnya Koordinasi Antar provinsi dengan daerah dalam perencanaan dan kerjasama antar instansi	62.72
52	Masih belum meratanya pencatatan dan penerbitan akta kelahiran maupun kematian	62.68
53	Rasio belanja tidak langsung lebih tinggi daripada belanja langsung.	62.60
54	Pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama Kabupaten Tulungagung mengalami penurunan.	62.54
55	Belanja modal dan infrastruktur Kabupaten tulungagung menurun.	62.42
56	Nilai penyisihan piutang tidak tertagih dalam 2 tahun terakhir semakin meningkat	62.38
57	Ketergantungan terhadap dana perimbangan tinggi.	62.36
58	Pengurangan luasan Kawasan kumuh masih rendah	62.26
59	Masih Rendahnya sumberdaya dan manajemen koperasi	62.22
60	Pengelolaan dan Pengembangan Potensi Budaya dan Kesenian Daerah belum maksimal	62.02
61	Rendahnya produktifitas sektor pertanian	61.98
62	angka kematian masih tergolong tinggi	61.86
63	Cakupan Penangan PMKS masih belum merata	61.34
64	Belum Optimalnya ketersediaan infrastruktur dan sarana prasana penunjang yang menghubungkan Jalur Lingkar Selatan	61.02
65	Produktifitas dan Daya Saing UMKM masih belum optimal	60.86
66	Meningkatnya kesejahteraan pada keluarga miskin	60.40
67	Terpenuhinya fasilitas kesehatan bagi keluarga miskin	60.30
68	Meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang pendidikan dasar dan sekolah menengah pertama	60.24
69	Meningkatnya Angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun	59.90
70	Sudah Meratanya Penerangan utama (listrik)	59.62
71	Kinerja mitigasi bencana pada daerah rawan bencana sudah baik	58.98
72	Sumber daya untuk pemberantasan kemiskinan mendukung	58.90
73	Peningkatan Pengeluaran APBD untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial)	58.64
74	Peningkatan kesehatan pada bayi dan balita	58.60
75	Kelahiran di fasilitas kesehatan menjadi pilihan masyarakat	58.56
76	Peningkatan Imunisasi dasar lengkap pada bayi	58.24
77	Peningkatan Upaya Pencegahan HIV oleh masyarakat	57.50
78	Terpenuhinya Ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas	57.46
79	Kunjungan wisatawan nusantara meningkat	56.18
80	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	56.10
81	Meningkatnya infrastruktur penunjang mobilitas Perairan maupun maritime	55.92
82	Tingkat Kesenjangan Antar kelas ekonomi Masyarakat termasuk rendah	54.26
83	Telah Adanya lembaga pembiayaan infrastruktur	54.26
84	Arah Pengembangan Menuju Kota Pusaka	54.26
85	Kualitas Fasilitas Publik Sudah Sesuai SPM	54.26

No	Alternatif Isu Strategis	Score
86	Luasan Tutupan hutan sudah terpenuhi	54.26
87	Peningkatan Kualitas Perencanaan dan pelaporan anggaran pemerintahan	63.36
88	Peningkatan Pemanfaatan <i>Electronic Government</i>	63.08
89	Peningkatan Reformasi birokrasi pada Pemerintahan	63.00
90	Potensi hasil pertanian dan peternakan Kawasan Agropolitan Sendang (KAS) sangat besar	62.98
91	Potensi komoditas pertambangan sangat besar	62.84
92	Merupakan wilayah potensial untuk pengembangan pariwisata (Wisata Alam, Buatan dan Religi)	62.72
93	Kawasan yang termasuk dalam wilayah pengendalian ketat (<i>High Control Zone</i>)	62.68
94	Kecenderungan Peningkatan pada PAD Kabupaten Tulungagung setiap tahunnya	62.60
95	Tantangan RPJP terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh, kesejahteraan masyarakat yang inklusif, tingkat pengangguran terbuka dan kemiskinan yang berkurang, dan pembangunan berkelanjutan	63.78
96	Peluang Pada Pembangunan Infrastuktur Jatim (JLS)	63.78
97	Skor IDM Kabupaten Tulungagung masuk 10 tertinggi dari Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Timur	63.68
98	Tantangan Peningkatan Produktifitas Sektor Pertanian	63.64

Sumber: Hasil Analisis, 2021

Tabel 4.17 Kriteria Penilaian/Pembobotan Isu Strategis

I	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional.
II	Merupakan tugas, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah
III	Luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah, dan masyarakat
IV	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah
V	Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola
VI	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan

Sumber: Hasil Analisis, 2021

Adapun dari daftar panjang tersebut, langkah selanjutnya adalah mengintegrasikan daftar panjang tersebut dengan Metode SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, and Threat*). Adapun analisis SWOT adalah sebagai berikut:

Tabel 4.18 Analisis SWOT

Strength	Opportunity
a. Komitmen Kepala Daerah dalam pembangunan kabupaten Tulungagung yang lebih baik dan terintegrasi b. Sumberdaya alam yang melimpah dan memiliki berbagai potensi c. Meningkatkan nilai investasi	a. Kuatnya dorongan dari pemerintah pusat untuk melakukan reformasi birokrasi b. Semakin besarnya perhatian pemerintah pusat dan provinsi dalam meningkatkan kualifikasi akademik pendidik agar sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP) c. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan lingkungan hidup, konektivitas, keamanan dan kenyamanan lingkungan di Kabupaten Tulungagung
Weakness	Threat
a. Sumberdaya manusia yang belum memiliki daya saing yang optimal b. Infrastruktur yang kurang memadai	a. Perubahan kebijakan pada level nasional dan regional yang dapat mempengaruhi proses perbaikan kualitas dan akuntabilitas kinerja

<p>c. Ketersediaan, keterjangkauan, kualitas dan layanan pendidikan dan kesehatan menengah masih belum memadai</p> <p>d. Belum optimalnya pelayanan publik berbasis teknologi informasi</p>	<p>b. Rendahnya antisipasi terhadap revolusi 4.0</p> <p>c. Adanya ancaman dari tenaga kerja luar negeri dan luar daerah yang dapat menyerap kesempatan kerja masyarakat Kabupaten Tulungagung</p> <p>d. Bencana alam dari perubahan lingkungan, alih fungsi lahan, dan aktivitas perindustrian</p>
---	--

Sumber: Hasil Analisis, 2021

Adapun setelah dilakukan pembobotan setiap poin daftar Panjang Isu PB, terpilihlah 5 (lima) Isu Strategis Pilihan Prioritas yang memiliki nilai pembobotan tertinggi dilihat dari enam kriteria yang sudah ada. Berikut uraian (lima) Isu Strategis Pilihan Prioritas.

1. Peningkatan Akses Pembangunan Sumberdaya Manusia Yang Berkualitas, Inklusif, dan Berdaya Saing

Pembangunan dilakukan untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat melalui pendidikan, kesehatan dan perbaikan gizi, mental dan karakter yang tangguh, perilaku yang positif dan konstruktif, kreatif, inovatif, punya etos bisnis dan berani mengambil risiko, berdedikasi, disiplin, kerja keras, taat aturan dan terbuka sebagai modal sosial yang positif bagi pembangunan, serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi sesama. Dengan demikian fokus utama dari isu strategi ini diantaranya:

- a. Peningkatan akses pelayanan Kesehatan masyarakat
- b. Pemenuhan gizi dan kebutuhan pangan yang berkualitas sebagai upaya melaksanakan Gerakan Nasional Pencegahan Stunting
- c. Perluasan akses dan pemerataan mutu Pendidikan dan pemberdayaan kepemudaan yang berdaya saing

2. Penguatan Ekonomi Kerakyatan Yang Berbasis Kearifan Lokal dan Potensi Daerah

Pada dasarnya otonomi daerah dapat menjadi pendorong dan pemicu pertumbuhan perekonomian rakyat, hal ini disebabkan otonomi daerah dapat menjadi guide line dalam pembangunan perekonomian rakyat terutama usaha mikro dan kecil. Sebagai panduan penguatan ekonomi lokal di era otonomi melalui peningkatan koperasi berkualitas, peningkatan usaha mikro yang mempunyai daya saing, pengembangan pariwisata, pengembangan dan penguatan sektor unggulan/potensial yang menunjang pertumbuhan ekonomi dan peningkatan realisasi investasi. Penguatan ekonomi lokal harusnya dapat diimplementasikan oleh pemerintah daerah dalam memacu pembangunan ekonomi rakyat terutama usaha kecil dan menengah sebagai modal dasar untuk meningkatkan perekonomian rakyat.

3. Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat dan keadilan sosial dalam Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Tenram, Aman, serta Tertib

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) menyatakan bahwa bahwa tugas dari pemerintah Negara Indonesia adalah memajukan

kesejahteraan umum. Istilah “kesejahteraan umum” yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 mempunyai arti yang sama dengan istilah “kesejahteraan sosial” yang tercantum dalam Bab XIV UUD 1945 (Fahrudin, 2012). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Pengertian kesejahteraan yang dimaksud dalam UUD 1945, baik dalam bagian pembukaan dan Bab XIV serta dalam UU Nomor 11/2009 mempunyai padanan secara internasional dengan konsep kesejahteraan menurut Jones (1990), yaitu “*the achievement of social welfare means, first and foremost, the alleviation of poverty in its manifestations*”. *Social walfare* yang dimaksud dapat diartikan sebagai kesejahteraan, kesejahteraan umum ataupun kesejahteraan sosial. Ismail dkk. (2015) mengatakan bahwa kesejahteraan merupakan konsep yang abstrak karena keberadaannya terkait langsung dengan nilai-nilai hidup dan ideologi yang dianut oleh seseorang. Kesejahteraan tidak hanya diartikan sebagai ukuran ketersediaan material, tetapi perlu dikaitkan dengan pandangan hidup bangsa yang dianut. Kesejahteraan bukan hanya menjadi cita-cita individu secara perorangan, namun juga menjadi tujuan sekumpulan individu yang terhimpun dalam suatu negara sehingga muncul dua macam kesejahteraan, yaitu kesejahteraan individu dan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan individu merupakan kesejahteraan yang dirasakan oleh setiap orang sebagai individu, sedangkan kesejahteraan masyarakat merupakan kesejahteraan yang dirasakan oleh semua orang dalam satu kesatuan.

Dengan demikian dalam aspek sosial ini fokus utamanya adalah optimalisasi perlindungan sosial untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat; perluasan kesempatan kerja; peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan dan peningkatan perlindungan masyarakat untuk memberikan rasa aman dan kehidupan yang lebih bertoleransi.

4. Peningkatan Infrastruktur Wilayah Yang Merata, Berkualitas Dan Berkelanjutan

Pembangunan menurut Sondang P. Siagian adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan atau perubahan yang berencana yang dilakukan dengan sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*). Proses pembangunan memiliki 3 (tiga) tujuan, yaitu: (a) Peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai macam barang kebutuhan hidup yang pokok; (b) Peningkatan standar hidup; dan (c) Perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial bagi setiap individu serta bangsa secara keseluruhan (Todaro dan Smith, 2006) dalam Warsilan dan Noor (2015:1).

Salah satu upaya untuk mewujudkan ketiga tujuan pembangunan tersebut ialah dengan melalui penguatan mitigasi/pengurangan risiko bencana, peningkatan konservasi sumber daya alam dan lingkungan,

optimalisasi pengelolaan persampahan, serta pemerataan akses terhadap layanan sumber air minum dan sanitasi layak dan berkelanjutan. Dengan demikian fokus utama dari isu strategi ini diantaranya:

- a. Pemerataan akses sanitasi layak
- b. Peningkatan pengelolaan dan penanganan sampah
- c. Pemerataan akses sumber air minum, air bersih, dan air irigasi
- d. Peningkatan kualitas air sungai dan danau
- e. Optimalisasi pengelolaan sumber daya air
- f. Peningkatan pengurangan luasan kawasan kumuh

5. Optimalisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan berorientasi pada kepuasan masyarakat

Dalam konsep negara kesejahteraan (welfare state), tugas utama pemerintah adalah memberikan pelayanan umum atau mengusahakan kesejahteraan bagi warga negaranya, disamping memberikan perlindungan bagi warga negaranya. Tugas pemerintah tersebut juga tertuang secara tegas dalam alenia ke-empat pembukaan UUD 1945 yang berbunyi “melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Hingga saat ini, pelaksanaan tugas-tugas pemerintah tersebut telah berjalan dan berupaya diwujudkan, namun masih belum optimal terlihat hasilnya. Oleh karenanya, melalui program reformasi birokrasi yang diluncurkan, diharapkan dapat menjadi akselerator bagi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

Reformasi birokrasi adalah kancah dan wahana untuk optimalisasi perubahan penyelenggaraan pemerintahan, yang saat ini masih dikesankan lamban, berbelit-belit, tidak kompeten, dan koruptif. Melalui optimalisasi pelaksanaan reformasi birokrasi maka Kabupaten Tulungagung akan melakukan sebuah perubahan atau reformasi terkait dengan manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, organisasi, tatalaksana, akuntabilitas kinerja, pengawasan, pelayanan publik dan SDM. Dari ke delapan area perubahan reformasi birokrasi tersebut yang menjadi fokus dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Tulungagung adalah peningkatan kemandirian dan akuntabilitas keuangan daerah; serta peningkatan kualitas pelayanan public berbasis IT sehingga dapat mendukung tata Kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Selain itu, juga terdapat 4 (empat) tuntutan yang mewarnai kebutuhan akan reformasi birokrasi saat ini, dan tuntutan ini perlu dipahami secara mendasar oleh seluruh penyelenggara pemerintahan:

1. Tuntutan Daya Saing
2. Tuntutan Masyarakat
3. Tuntutan Hukum
4. Tuntutan Ekonomi

BAB V



Visi Misi Tujuan dan Sasaran



BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1 Visi

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Perubahan adalah Visi Bupati Tulungagung Drs. Maryoto Birowo, MM yang menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun. Adapun visi pembangunan daerah Kabupaten Tulungagung untuk periode RPJMD Perubahan 2018-2023 sesuai dengan visi adalah sebagai berikut:

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TULUNGAGUNG YANG SEJAHTERA, MANDIRI, BERDAYA SAING DAN BERAKHLAK MULIA”

Memperhatikan Visi tersebut dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kabupaten Tulungagung dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup regional, nasional maupun global. Adapun perumusan Visi RPJMD Kabupaten Tulungagung sebagai berikut:

Tabel 5. 1 Perumusan Visi RPJMD Kabupaten Tulungagung

No.	Pernyataan Visi	Penjelasan Visi
1	Terwujudnya Masyarakat Tulungagung Yang Sejahtera	Sejahtera mengandung makna suatu kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Tulungagung telah terpenuhi secara materil, spiritual dan sosial. Kebutuhan dasar tersebut berupa kecukupan dan mutu pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan dan kebutuhan dasar lainnya seperti lingkungan yang bersih, aman dan nyaman, juga terpenuhinya hak asasi dan partisipasi serta terwujudnya masyarakat beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2	Terwujudnya Masyarakat Tulungagung Yang Mandiri	Mandiri mengandung makna suatu kondisi atau keadaan masyarakat Kabupaten Tulungagung yang dengan prakarsa dan potensi lokal mampu memenuhi kebutuhan hidupnya.
3	Terwujudnya Masyarakat Tulungagung Yang Berdaya Saing	Berdaya Saing mengandung makna suatu kemampuan dan ketangguhan terhadap tatanan dasar masyarakat Kabupaten Tulungagung yang memiliki keunggulan kompetitif untuk menghadapi persaingan global dimasa yang akan datang. Tatanan dasar tersebut mencakup infrastruktur yang memadai, sumberdaya manusia yang berkualitas, hasil produksi yang memenuhi standar global, iklim usaha yang kondusif, dan pemerintahan daerah yang profesional dan bersih.
4	Terwujudnya Masyarakat Tulungagung Yang Berakhlak Mulia	Berakhlak mulia mengandung makna cara berfikir masyarakat Kabupaten Tulungagung yang kritis terhadap situasi yang berkembang, sikap optimis dalam menghadapi tantangan serta berperilaku baik dan etis sehingga memiliki karakter. Sehingga dapat meraih kemajuan-kemajuan pada dimensi mental –

No.	Pernyataan Visi	Penjelasan Visi
		spiritual dan keagamaan, agar kehidupan masyarakat benar-benar sejahtera lahir dan batin serta berakhlaqul mulia.

Sumber: Hasil Analisis, 2021

5.2 Misi

Dalam rangka mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Tulungagung yang telah ditetapkan diatas, maka ditetapkan Misi Pembangunan Kabupaten Tulungagung 2018-2023 sebagai berikut:



Gambar 5. 1 Misi Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023

Lima butir misi diatas hasil rekontruksi misi sebelumnya, mengingat didasarkan kepada kebutuhan perencanaan pembangunan. Dalam upaya penyamaan persepsi terhadap misi tersebut serta mengurangi potensi ambiguitas dalam memahami butir misi, maka penjabaran Misi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5. 2 Perumusan Misi RPJMD Kabupaten Tulungagung

No.	Pernyataan Misi	Penjelasan Misi
1	Mewujudkan Keterjangkauan Akses Pembangunan Sumberdaya Manusia Yang Berkualitas, Inklusif Dan Berdaya Saing	Pembangunan difokuskan pada pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Inklusif artinya seluruh lapisan masyarakat Tulungagung dapat mengakses pendidikan dan kesehatan, serta daya beli masyarakat terhadap komoditas pangan. Keterjangkauan akses ditunjang oleh infrastruktur pendidikan dan kesehatan yang merata. Kedepan terciptanya masyarakat Tulungagung yang unggul dan berdaya saing.
2	Mendorong Penguatan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Kearifan Lokal dan Potensi Daerah	Potensi daerah kabupaten Tulungagung sangat melimpah mulai dari laut, tanah yang subur, dan pegunungan. Kekuatan sumber daya alam tulungagung dapat mensejahterakan masyarakat, fokus Kabupaten Tulungagung mendorong usaha masyarakat terutama pada

No.	Pernyataan Misi	Penjelasan Misi
		<p>hilirisasi produk-produk pertanian yang dihasilkan petani dan nelayan, maritim, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Nilai itu didorong dan diperoleh melalui pengembangan inovasi dan teknologi serta membuka peluang investasi bagi pihak swasta baik dalam maupun luar negeri. Sehingga iklim investasi Kabupaten Tulungagung kondusif. Pembangunan ekonomi Tulungagung tidak semata-mata meningkatkan pertumbuhan ekonomi, namun memastikan penurunan kesenjangan pada masyarakat, melalui tumbuhnya lapangan pekerjaan dan menurunnya tingkat pengangguran.</p>
3	<p>Pengentasan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial dalam Mewujudkan Ketentraman, Rasa Aman, serta Ketertiban Masyarakat</p>	<p>Agenda utama pembangunan daerah, yaitu menurunnya angka kemiskinan. Pendekatan jangka pendek dalam pengentasan ekonomi yaitu perlindungan sosial pada masyarakat miskin, pemberdayaan masyarakat dan penguatan usaha mikro. Pemberdayaan masyarakat serta penguatan usaha mikro sangat besar pengaruhnya terhadap pembangunan di daerah terutama jika diarahkan kepada pengelolaan sumberdaya strategis. Penurunan angka kemiskinan diharapkan dapat mewujudkan rasa aman, ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat serta mewujudkan kesejahteraan seluruh masyarakat Tulungagung.</p>
4	<p>Membangun Infrastruktur Wilayah Pinggiran yang Berkualitas dalam Mewujudkan Pemerataan Pembangunan</p>	<p>Pembangunan infrastruktur perannya sangat sentral dalam upaya mendukung keberhasilan pembangunan berbagai sektor di daerah. Sehingga berbagai sektor unggulan di Kabupaten Tulungagung dapat memberikan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi. Ketersediaan infrastruktur juga sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Pembangunan diarahkan tidak hanya pada daerah pusat, namun wilayah pinggiran. dampak yang dirasakan tidak hanya pada pusat, namun merata ke seluruh wilayah Kabupaten Tulungagung.</p>
5	<p>Mewujudkan Pemerintahan yang Akuntabel, Profesional, dan Transparan yang Berorientasi pada Kepuasan Masyarakat.</p>	<p>Dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat yang semakin variatif kebutuhannya maka dibutuhkan kinerja aparatur pemerintah yang profesional termasuk penataan kelembagaannya yang efektif dan efisien, serta bentuk pemerintahan yang berlandaskan pada prinsip <i>good, clean and innovation governance</i>.</p>

Sumber: Hasil Analisis, 2021

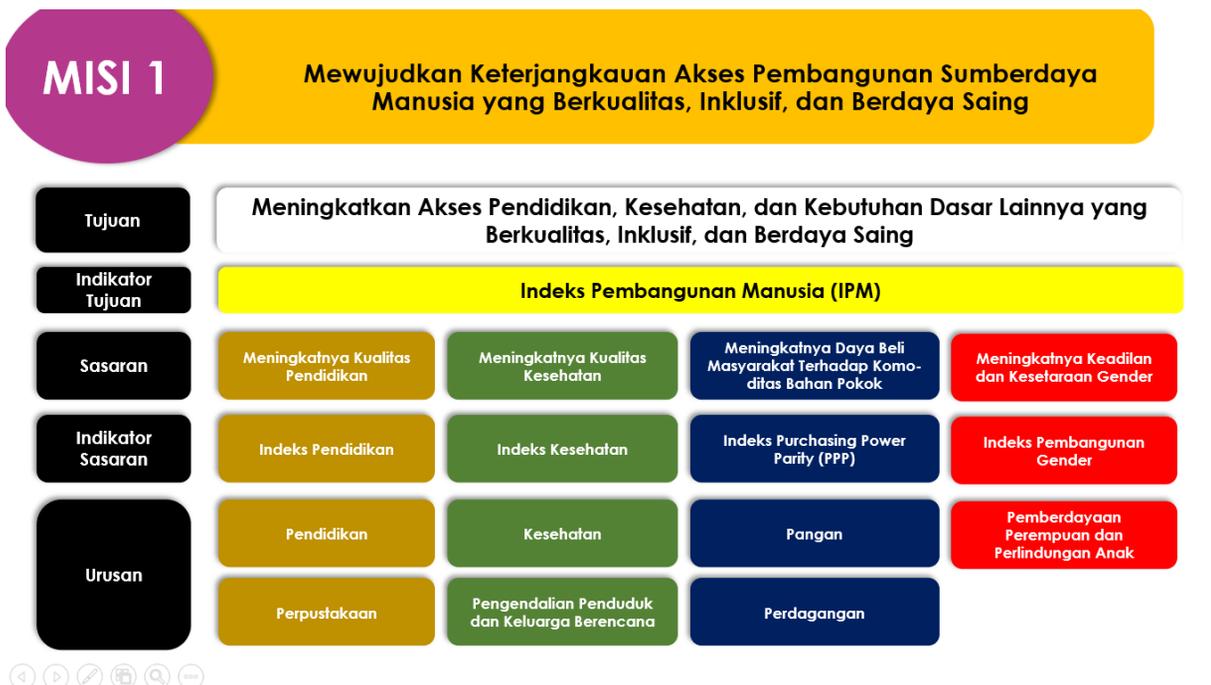
5.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan dan sasaran merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (*policy planning*) yang memiliki kritikal poin dalam penyusunan RPJMD. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Adapun tujuan dan sasaran RPJMD Perubahan Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023, sebagai berikut:

A. Dalam rangka pencapaian misi **Mewujudkan Keterjangkauan Akses Pembangunan Sumberdaya Manusia yang Berkualitas, Inklusif, dan Berdaya Saing** maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Akses Pendidikan, Kesehatan, Dan Kebutuhan Dasar Lainnya Yang Berkualitas, Inklusif, Dan Berdaya Saing, dengan sasaran pembangunan:
 - a. Meningkatnya kualitas pendidikan
 - b. Meningkatnya kualitas kesehatan
 - c. Meningkatnya daya beli masyarakat terhadap komoditas bahan pokok
 - d. Meningkatnya Keadilan dan Kesetaraan Gender

Pemahaman terhadap linieritas Misi, Tujuan hingga Sasaran kemudian dapat Dengan mudah dipahami melalui Desain Pohon Kinerja Pencapaian Misi-1 yang disajikan sebagai berikut:



Gambar 5. 2 Pohon Kinerja Pencapaian Misi 1

Sumber: Hasil Analisis, 2021

B. Dalam rangka pencapaian misi **Mendorong Penguatan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Kearifan Lokal dan Potensi Daerah** maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan, dengan sasaran pembangunan:
 - a. Meningkatnya ekonomi kerakyatan
 - b. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan
 - c. Meningkatnya realisasi investasi.

Pemahaman terhadap linieritas Misi, Tujuan hingga Sasaran kemudian dapat Dengan mudah dipahami melalui Desain Pohon Kinerja Pencapaian Misi-2 yang disajikan sebagai berikut:



Gambar 5. 3 Pohon Kinerja Pencapaian Misi 2

Sumber: Hasil Analisis, 2021

C. Dalam rangka pencapaian misi **Pengentasan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial dalam Mewujudkan Ketentraman, Rasa Aman, Serta Ketertiban Masyarakat** maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut:

1. Mempercepat Penurunan Kemiskinan Untuk Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Aman Dan Tertib, dengan sasaran pembangunan:
 - a. Terjaminnya perlindungan sosial masyarakat
 - b. Meningkatnya Kesempatan Kerja Masyarakat
 - c. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan
 - d. Meningkatnya Rasa Aman di Masyarakat
 - e. Meningkatnya Toleransi pada Kehidupan Masyarakat

Pemahaman terhadap linieritas Misi, Tujuan hingga Sasaran kemudian dapat dengan mudah dipahami melalui Desain Pohon Kinerja Pencapaian Misi-3 yang disajikan sebagai berikut:

MISI 3

Pengentasan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial dalam Mewujudkan Ketentraman, Rasa Aman, Serta Keterlibatan Masyarakat



Gambar 5. 4 Pohon Kinerja Pencapaian Misi 3

Sumber: Hasil Analisis, 2021

D. Dalam rangka pencapaian misi **Membangun Infrastruktur Wilayah Pinggiran yang Berkualitas dalam Mewujudkan Pemerataan Pembangunan** maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Infrastruktur Wilayah Yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan, dengan sasaran pembangunan:
 - a. Meningkatnya Infrastruktur Dasar yang Merata.
 - b. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Menjamin Pembangunan Berkelanjutan.

Pemahaman terhadap linieritas Misi, Tujuan hingga Sasaran kemudian dapat dengan mudah dipahami melalui Desain Pohon Kinerja Pencapaian Misi-4 yang disajikan sebagai berikut:

MISI 4

Membangun Infrastruktur Wilayah Pinggiran yang Berkualitas dalam Mewujudkan Pemerataan Pembangunan



Gambar 5. 5 Pohon Kinerja Pencapaian Misi 4

Sumber: Hasil Analisis, 2021

E. Dalam rangka pencapaian misi **Mewujudkan Pemerintahan yang Akuntabel, Profesional, dan Transparan yang Berorientasi pada Kepuasan Masyarakat** maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut:

1. Mewujudkan Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*), dengan sasaran pembangunan:
 - a. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan
 - b. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Pemahaman terhadap linieritas Misi, Tujuan hingga Sasaran kemudian dapat dengan mudah dipahami melalui Desain Pohon Kinerja Pencapaian Misi-5 yang disajikan sebagai berikut:



Gambar 5. 6 Pohon Kinerja Pencapaian Misi 5

Sumber: Hasil Analisis, 2021

Tabel 5. 3 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Tulungagung (Sebelum Perubahan)

Visi: Terwujudnya Masyarakat Tulungagung Yang Sejahtera, Mandiri, Berdaya Saing Dan Berakhlak Mulia

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	
					2019	2020	2021	2022	2023		
Mewujudkan Keterjangkauan Akses Pembangunan Sumberdaya Manusia yang Berkualitas, Inklusif, dan Berdaya Saing	Meningkatkan Akses Pendidikan, Kesehatan, Dan Kebutuhan Dasar Lainnya Yang Berkualitas, Inklusif, Dan Berdaya Saing		Indeks Pembangunan Manusia	71.49	71.87	72.21	72.50	73.21	73.50	73.50	
		Meningkatnya Kualitas Dan Akses Pendidikan	Indeks Pendidikan	0.62	0.63	0.63	0.63	0.64	0.64	0.64	
		Meningkatnya Kualitas Dan Akses Kesehatan	Indeks Kesehatan	0.83	0.83	0.83	0.84	0.84	0.85	0.85	
		Meningkatnya Daya Beli Masyarakat Terhadap Komoditas Pangan & Non Pangan	Indeks <i>Purchasing Power Parity</i> (PPP)	0.71	0.71	0.72	0.72	0.73	0.73	0.73	
Mendorong Penguatan Ekonomi Kerakyatan Yang Berbasis Kearifan Lokal dan Potensi Daerah	Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan		Pertumbuhan Ekonomi	5.13	5.17	5.22	5.26	5.31	5.35	5.35	
		Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	PDRB	25,900,029.78	27,239,061.32	28,659,578.36	30,167,072.19	31,767,435.37	33,466,993.16	33,466,993.16	
		Meningkatnya Kemandirian Pendapatan Daerah	<i>Spending Of Money</i>	N/A	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat
			Rasio Pad Terhadap Total Pendapatan	15,94	17,17	17,99	18,84	19,60	20,93	20,93	
		Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Masyarakat	Nilai Investasi PMA dan PMDN	1,70 T	1,75 T	1,80 T	1,85 T	1,90 T	1,95 T	1,95 T	
			Gini Rasio	0.35	0.34	0.34	0.33	0.33	0.32	0.32	
	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,22	2,18	2,14	2,10	2,05	2,00	2,00			
Pengentasan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial dalam Mewujudkan Kehidupan	Mempercepat Penurunan Kemiskinan untuk Mewujudkan Kehidupan		Tingkat Kemiskinan	7,27	7,19	7,11	7,02	6,94	6,86	6,86	
		Terjaminnya Perlindungan Sosial Masyarakat	Persentase Penurunan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	1.60	0.75	0.80	0.84	0.88	0.92	0.92	

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
					2019	2020	2021	2022	2023	
Ketentraman, Rasa Aman, Serta Ketertiban Masyarakat	Masyarakat Yang Aman dan Tertib	Meningkatnya Peremberdayaan Masyarakat Dalam Mewujudkan Pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	96.02	96.40	96.78	97.16	97.54	97.92	97.92
			Indeks Desa Membangun (IDM)	0.6656	0.6676	0.6696	0.6716	0.6736	0.6756	0.6756
			Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMAS)	N/A	0.663	0.664	0.667	0.668	0.670	0.670
		Terwujudnya Penguatan Usaha Mikro	Persentase Peningkatan Usaha Mikro	2	2	2	2	2	2	2
Membangun Infrastruktur Wilayah Pinggiran yang Berkualitas Dalam Mewujudkan Pemerataan Pembangu nan	Meningkatkan Infrastruktur Wilayah yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan	Meningkatnya infrastruktur dasar yang merata	Persentase desa/kelurahan yang mendapatkan layanan infrastruktur dan lingkungan berkualitas	38.75	38.75	43.54	45.02	46.49	47.97	47.97
			Rasio Daerah Irigasi Dalam Kondisi Baik (Km/Ha)	1/81	1/81	1/79	1/78	1/77	1/76	1/76
			Persentase Desa/Kelurahan Dengan Rumah Layak Huni > 90%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
			Persentase Desa/Kelurahan Terlayani Sistem Perpipaan Air Minum	52,77	52,77	59,41	60,89	62,36	63,84	63,84
			Persentase Desa/Kelurahan Dengan Jumlah Rumah Tangga Terlayani Sanitasi > 80%	90,41	90,41	92,99	94,10	95,20	96,31	96,31
			Persentase Desa/Kelurahan	78,23	78,23	78,23	78,60	78,97	79,34	79,34

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
					2019	2020	2021	2022	2023	
			Dengan Jalan Kondisi Baik > 80%							
			Indeks Tingkat Pelayanan Jalan	0,51	0,37	0,47	0,54	0,54	0,54	0,54
		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Menjamin Pembangunan Berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	71,23	71,23	63,68	63,24	63,28	63,32	63,32
Mewujudkan Pemerintahan yang Akuntabel, Profesional, dan Transparan yang Berorientasi pada Kepuasan Masyarakat	Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik		Indeks Reformasi Birokrasi	62,42	63.00	64.00	65.00	66.00	67.00	67.00
		Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Sakip	62	72	75	80	80,05	81	81
			Opini WTP BPK Terhadap LKPD	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			Indeks Profesionalisme Aparatur Sipil Negara	29	41	46	51	56	61	61
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	N/A	3,93	3,92	3,94	3,95	3,97	3,97

Sumber: RPJMD Kab. Tulungagung 2018-2023

Tabel 5. 4 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Tulungagung (Setelah Perubahan)

Visi: Terwujudnya Masyarakat Tulungagung yang Sejahtera, Mandiri, Berdaya Saing dan Berakhlak Mulia

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Realisasi		Target			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
					2019	2020	2021	2022	2023	
Mewujudkan Keterjangkau	Meningkatkan Akses		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72.62	72.62	73.00	72.87	73.30	73.50	73.50

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Realisasi		Target			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
					2019	2020	2021	2022	2023	
an Akses Pembangunan Sumberdaya Manusia Yang Berkualitas, Inklusif, dan Berdaya Saing	Pendidikan, Kesehatan, dan Kebutuhan Dasar Lainnya yang Berkualitas, Inklusif, dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Indeks Pendidikan	0,647	0,647	0,634	0,640	0,649	0,650	0,650
		Meningkatnya Kualitas Kesehatan	Indeks Kesehatan	0,832	0,832	0,830	0,834	0,836	0,839	0,839
		Meningkatnya Daya Beli Masyarakat Terhadap Komoditas Bahan Pokok	<i>Indeks Purchasing Power Parity (PPP)</i>	0,722	0,722	0,727	0,725	0,726	0,728	0,728
		Meningkatnya Keadilan dan Kesetaraan Gender	Indeks Pembangunan Gender	95.63	95.63	95.48	95.50	95.53	95.55	95.55
Mendorong Penguatan Ekonomi Kerakyatan yang Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal dan Potensi Daerah	Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan		Pertumbuhan Ekonomi	5.32	5.32	-3.09	3.00	3.65	4.05	4.05
		Meningkatnya ekonomi kerakyatan	Persentase Koperasi Berkualitas	-	-	29.4	31.2	31.6	31.9	31.9
			Persentase Usaha Mikro Berdaya saing	-	-	2.20	2.25	2.27	2.29	2.29
			<i>Spending of Money</i>	-	-	137M	100M	110M	120M	120M
		Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri	6.80	6.80	-2.00	3.94	4.51	4.32	4.32
			Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	5.80	5.80	-8.50	6.87	4.99	4.76	4.76
			Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	1.83	1.83	-0,82	1.51	2.23	1.71	1.71
Meningkatnya realisasi investasi	Realisasi Investasi PMA dan PMDN	-	-	-	300,000,000	350,000,000	400,000,000	400,000,000		
Pengentasan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial dalam Mewujudkan Ketentraman , Rasa Aman,	Mempercepat Penurunan Kemiskinan Untuk Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Aman dan Tertib		Tingkat Kemiskinan	6.74	6.74	7.33	7.55	7.31	7.11	7.11
		Terjaminnya Perlindungan Sosial Masyarakat	Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	0.75	0.75	0.8	0.3	0.5	0.7	0.7
		Meningkatnya Kesempatan Kerja Masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuka	3.36	3.36	4.61	4.91	4.81	4.71	4.71

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Realisasi		Target			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
					2019	2020	2021	2022	2023	
Serta Ketertiban Masyarakat		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mewujudkan Pembangunan	Indeks Desa Membangun (IDM)	0.6781	0.6781	0.6960	0.704 4	0.7123	0.721 4	0.7214
			Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMAS)	0.673	0.673	0.717	0.718	0.719	0.720	0.720
		Meningkatnya rasa aman di masyarakat	Indeks Rasa Aman	0.653	0.653	0.671	0.674	0.677	0.679	0.679
		Meningkatnya Toleransi pada Kehidupan Masyarakat	Indeks Toleransi	0.720	0.720	0.783	0.786	0.789	0.792	0.792
Membangun Infrastruktur Wilayah Pinggiran yang Berkualitas Dalam Mewujudkan Pemerataan Pembangu nan	Meningkatkan Infrastruktur Wilayah yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan		Persentase desa/kelurahan yang mendapatkan layanan infrastruktur dan lingkungan berkualitas	38,75	38,75	43,54	52,40	53,87	55,35	55,35
		Meningkatnya infrastruktur dasar yang merata	Rasio Daerah Irigasi Dalam Kondisi Baik (Km/Ha)	1/81	1/81	1/79	1/78	1/77	1/76	1/76
			Persentase Desa/Kelurahan Dengan Rumah Layak Huni > 90%	97.79	97.79	98.21	100,0 0	100,00	100,0 0	100,00
			Persentase Desa/Kelurahan Terlayani Sistem Perpipaan Air Minum	52,77	52,77	59,41	69,37	70,11	70,85	70,85
			Persentase Desa/Kelurahan Dengan Jumlah Rumah Tangga Terlayani Sanitasi > 80%	90,41	90,41	92,99	98,15	98,52	98,89	98,89
			Persentase Desa/Kelurahan Dengan Jalan Kondisi Baik > 80%	78,23	78,23	78,23	78,60	78,97	79,34	79,34

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Realisasi		Target			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
					2019	2020	2021	2022	2023	
			Indeks Tingkat Pelayanan Jalan	0,37	0,37	0,47	0,54	0,54	0,54	0,54
		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Menjamin Pembangunan Berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	71,23	71,23	63,68	63,24	63,28	63,32	63,32
Mewujudkan Pemerintahan yang Akuntabel, Profesional, dan Transparan yang Berorientasi pada Kepuasan Masyarakat	Mewujudkan Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (<i>Good Governance</i>)		Indeks Reformasi Birokrasi	65.00	65.00	66.09	67.00	68.00	69.00	69.00
		Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Nilai Sakip	75.83	75,83	76,80	78	79	80	80
			Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-	52.35	53.90	55.62	60.61	60.61
			Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	51.59	51.59	55.40	51	56	61	61
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	3.93	3,93	3,94	3,95	4,00	4,10	4,10	

Sumber: Hasil Analisis, 2021

BAB VI



Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah



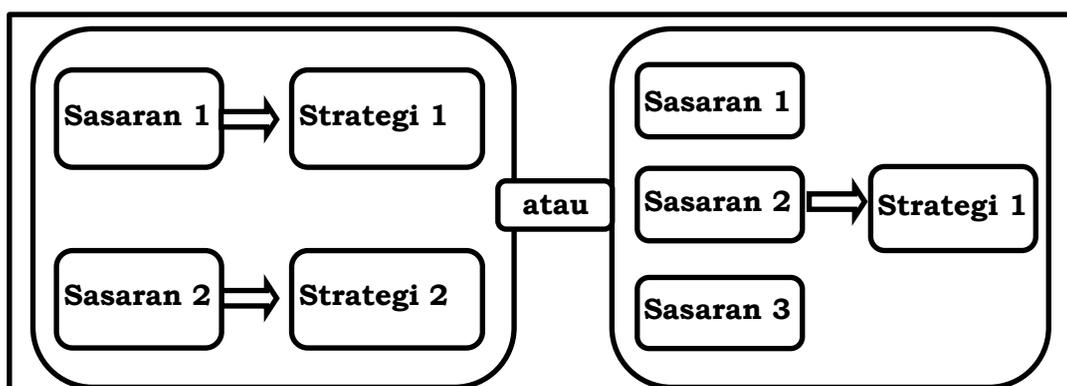
BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

6.1 Strategi

Strategi merupakan wawasan yang diperlukan oleh pemerintah daerah dalam mengelola setiap program kegiatannya dengan menyusun cara, langkah, atau tahapan untuk mencapai tujuan. Sedangkan dalam pengelolaan pembangunan daerah perlu adanya manajemen strategis yang menetapkan tujuan pemerintah daerah, serta pengembangan kebijakan dan perencanaan untuk mencapai visi dan misi kepala daerah melalui pemberdayaan setiap potensi sumber daya yang ada. Sebagai upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran pemerintah daerah, strategi akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan program prioritas setiap tahun dalam pencapaian pembangunan daerah.

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantapan pemerintah daerah dalam memegang prinsipnya sebagai pelayan masyarakat. Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (*value added*) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan.

Berdasarkan penjelasan didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa suatu strategi, dapat secara spesifik dikaitkan dengan satu sasaran atau sekelompok sasaran dengan kerangka logis sebagaimana gambar berikut:



Gambar 6.1 Keterkaitan Sasaran dengan Strategi

Sumber: Hasil Analisis, 2021

Mengacu pada gambar di atas, jelas bahwa perumusan strategi membutuhkan kesatuan tujuan untuk mendapatkan kesatuan tindak. Satu strategi dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran. Dalam hal,

beberapa sasaran bersifat *inherent* dengan satu tema, satu strategi dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa sasaran tersebut. Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah di rumuskan pada tahap perumusan masalah. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penyajian strategi RPJMD Kabupaten Tulungagung tahun 2018-2023 akan didasarkan pada sasaran dari setiap misi. Berikut *cascading* (perencanaan) per-misi Kabupaten Tulungagung pada sisa implementasi RPJMD Tahun 2018-2023.

Tabel 6.1 Cascading Perencanaan Misi 1

MISI 1: Mewujudkan Keterjangkauan Akses Pembangunan Sumberdaya Manusia yang Berkualitas, Inklusif dan Berdaya Saing

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Akhir (2023)	No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran (Impact)	Kondisi Awal (2019)	Kondisi Akhir (2023)	Perangkat Daerah
1	Mewujudkan Keterjangkauan Akses Pembangunan Sumberdaya Manusia yang Berkualitas, Inklusif dan Berdaya Saing	Meningkatkan akses pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya yang berkualitas, inklusif dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73.50	1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Indeks Pendidikan	0.647	0.650	Dikpora
										Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
					2	Meningkatnya Kualitas Kesehatan	Indeks Kesehatan	0.832	0.839	Dinas Kesehatan
										Dinas KBPPPA
					3	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat Terhadap Komoditas Bahan Pokok	<i>Indeks Purchasing Power Parity (PPP)</i>	0.722	0.728	Dinas Ketahanan Pangan
										Disperindag
					4	Meningkatnya Keadilan dan Kesetaraan Gender	Indeks Pembangunan Gender	95.63	95.55	Dinas KBPPPA

Sumber: Hasil Analisis, 2021

Tujuan 1: Meningkatkan Akses Pendidikan, Kesehatan dan Kebutuhan Dasar Lainnya Yang Berkualitas, Inklusif Dan Berdaya Saing

Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Pendidikan

Merujuk sasaran berkenaan dengan meningkatnya kualitas pendidikan, maka indikator yang digunakan adalah mengenai Indeks Pendidikan. Perlunya keterikatan ini agar strategi yang dibuat bisa sesuai dengan sasaran dan memberikan solusi yang tepat. Maka dari itu disajikan ulang beberapa data mengenai keperluan dalam pembuatan strategi yang mengacu pada sasaran tersebut.

Setelah melakukan pengkajian sasaran pembangunan periode sebelumnya dan gambaran umum kondisi daerah dan capaian pembangunan sampai dengan periode awal perencanaan serta permasalahan pembangunan terpenting dan isu-isu strategis pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran meningkatnya kualitas pendidikan, maka langkah selanjutnya adalah melakukan evaluasi untuk menentukan pilihan yang tepat terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah. Oleh karena itu, maka untuk menghasilkan strategi pembangunan yang tajam, dan tepat menggunakan metode SWOT kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*), dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Tabel 6.2 Pemetaan SWOT pada Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Pendidikan

Strength	Opportunity
Tersedianya guru yang berkualitas dengan mempunyai sertifikat pendidik	Terbentuknya Tim TPMPD oleh lembaga penjaminan mutu pendidik (LPMP) Provinsi yang bertujuan untuk meningkatkan Peningkatan Mutu sekolah
Adanya aplikasi Dapodik sehingga kevalidan dan keakurasian data bisa tercapai	Mengaplikasikan pendataan profil sekolah yang nantinya bisa digunakan oleh semua OPD yang terkait
Adanya PERDA dan PERBUP tentang pendanaan pendidikan	
Weakness	Threat
Kurang seimbang antara guru yang pensiun dengan guru tidak tetap (GTT) yang ada	Banyaknya regrouping sekolah
	Belum meratanya fasilitas dan akses pendidikan dan olahraga
Banyak lembaga sekolah yang masih kekurangan siswa	Kurangnya kesejahteraan GTT dan PTT
Belum terpenuhinya SDM yang memadai terkait sekolah inklusi	Kurangnya kepengawasan guru atau pihak sekolah terhadap kondisi siswa

Sumber: Hasil Analisis, 2021

Merujuk hasil analisis penyusunan *Strength*, *Weakness*, *Opportunity*, dan *Threats* (SWOT) yang didasarkan dari permasalahan dan isu strategis terkait meningkatnya kualitas pendidikan selanjutnya adalah dilakukan penyilangan antara kekuatan internal dan kekuatan eksternal sehingga dapat menghasilkan beberapa strategi yang tepat dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan daerah. Dimana penyilangan antara *strength* dan *opportunity* akan menghasilkan strategi (SO), penyilangan antara *strength* dan *threats* menghasilkan strategi (ST), penyilangan antara *Weakness* dan

Opportunity menghasilkan strategi (WO) dan penyilangan antara *Weakness* dan *Threats* menghasilkan strategi (WT) Berikut disajikan pada tabel.

**Tabel 6.3 Analisis SWOT dalam penetapan Strategi Pembangunan Daerah
Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Pendidikan**

Strategi (SO)	Strategi (WO)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanfaatan dana untuk peningkatan tenaga pendidik dan kependidikan serta peserta didik 2. Penyediaan tenaga pendidik dan kependidikan yang bermutu dan berkualitas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan kegiatan evaluasi di setiap sekolah 2. Peningkatan Kualitas Pendidikan Inklusi
Strategi (ST)	Strategi (WT)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Kesejahteraan Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) 2. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan olahraga 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan mutu pendidik di setiap sekolah 2. Peningkatan Penuntasan Wajib Belajar 12 Tahun 3. Pemberlakuan Sistem Zonasi penerimaan peserta didik baru SD/SMSP

Sumber: Hasil Analisis, 2021

Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas Kesehatan

Merujuk sasaran berkenaan dengan meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat, maka strategi yang akan dibuat mengacu pada capaian data di tahun sebelumnya dan visi misi kepala daerah yang terpilih. Perlunya keterikatan ini agar strategi yang dibuat bisa sesuai dengan sasaran dan memberikan solusi yang tepat. Sebagai upaya menuju peningkatan derajat kesehatan masyarakat, maka indikator yang tepat sebagai tolak ukur adalah mengenai Indeks Kesehatan.

Setelah melakukan pengkajian sasaran pembangunan periode sebelumnya dan gambaran umum kondisi daerah dan capaian pembangunan sampai dengan periode awal perencanaan serta permasalahan pembangunan terpenting dan isu-isu strategis pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan maka langkah selanjutnya adalah melakukan evaluasi untuk menentukan pilihan yang tepat terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah. Oleh karena itu, maka untuk menghasilkan strategi pembangunan yang tajam dan tepat menggunakan metode SWOT kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*), dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Tabel 6.4 Pemetaan SWOT pada sasaran 2: Meningkatnya Kualitas Kesehatan

Strength	Opportunity
Aplikasi Sikesta sebagai pusat data kesehatan serta digitalisasi pelayanan	Arah kebijakan pimpinan daerah
Bidang kesehatan salah satu prioritas pembangunan pemerintah daerah dan pusat	
Weakness	Threat
Persebaran dan kompetensi SDM yang belum merata	PHBS masyarakat belum konsisten
Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang belum bersinergi antar lintas program dan lintas sektor	Masyarakat desa belum maksimal diberdayakan
Belum optimalnya fasilitas Kesehatan dengan nilai UKP dan UKM dalam Kategori baik	Meningkatnya laju pertumbuhan penduduk
Terbatasnya informasi dan pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan keluarga	

Sumber: Hasil Analisis, 2021

Berdasarkan hasil analisis penyusunan *Strength*, *Weakness*, *Opportunity*, dan *Threats* (SWOT) yang didasarkan dari permasalahan, dan isu strategis terkait sasaran meningkatnya kualitas kesehatan. Langkah selanjutnya adalah dilakukan penyilangan antara kekuatan internal dan kekuatan eksternal, sehingga dapat menghasilkan beberapa strategi yang tepat dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan daerah. Dimana penyilangan antara *Strength* dan *Opportunity* akan menghasilkan strategi (SO), penyilangan antara *Strength* dan *Threats* menghasilkan strategi (ST), penyilangan antara *Weakness* dan *Opportunity* menghasilkan strategi (WO) dan penyilangan antara *Weakness* dan *Threats* menghasilkan strategi (WT) berikut disajikan pada tabel:

Tabel 6.5 Pemetaan SWOT Silang dalam Pembangunan Daerah Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas Kesehatan

Strategi (SO)	Strategi (WO)
1. Peningkatan pengawasan/pengendalian sediaan farmasi alat kesehatan, makanan minuman	1. Peningkatan kompetensi SDM yang berkualitas 2. Peningkatan Fasilitas Kesehatan dengan nilai UKP dan UKM dalam kategori baik 3. Peningkatan Jumlah Tenaga Kesehatan
Strategi (ST)	Strategi (WT)
1. Meningkatkan pelayanan kesehatan serta pemberdayaan masyarakat 2. Optimalisasi upaya penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk	1. Peningkatan Cakupan Rumah Tangga Sehat 2. Optimalisasi upaya peningkatan pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan keluarga 3. Optimalisasi jejaring kerja sama dengan stakeholder dan mitra kerja dalam promosi dan konseling kespro serta pembangunan keluarga

Sumber: Hasil Analisis, 2021

Sasaran 3: Meningkatnya Daya Beli Masyarakat Terhadap Komoditas Bahan Pokok

Merujuk sasaran berkenaan dengan meningkatnya daya beli masyarakat terhadap komoditas bahan pokok, maka strategi yang akan dibuat mengacu pada capaian data di tahun sebelumnya dan visi misi kepala daerah yang terpilih. Perlunya keterikatan ini agar strategi yang dibuat bisa sesuai dengan sasaran dan memberikan solusi yang tepat. Sebagai upaya menuju peningkatan daya beli masyarakat terhadap komoditas bahan pokok, maka indikator yang tepat sebagai tolak ukur adalah mengenai *Indeks Purchasing Power Parity* (PPP).

Setelah melakukan pengkajian sasaran pembangunan periode sebelumnya dan gambaran umum kondisi daerah dan capaian pembangunan sampai dengan periode awal perencanaan serta permasalahan pembangunan terpenting dan isu-isu strategis pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran meningkatnya daya beli masyarakat terhadap komoditas bahan pokok, maka langkah selanjutnya adalah melakukan evaluasi untuk menentukan pilihan yang tepat terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah. Oleh karena itu, maka untuk menghasilkan strategi pembangunan yang tajam dan tepat menggunakan metode SWOT kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*), dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Tabel 6.6 Pemetaan SWOT pada sasaran 3: Meningkatnya Daya Beli Masyarakat Terhadap Komoditas Bahan Pokok

Strength	Opportunity
Adanya Peta Kerawanan Pangan atau FSVA	Skor PPH tinggi
Adanya Peta SKPG	Kondisi Neraca Bahan Makanan Surplus
Koordinasi yang bagus di internal perangkat daerah	Tersedianya informasi harga pangan
Adanya dokumen rencana kebutuhan infrastruktur pendukung kemandirian pangan	
Weakness	Threat
Jumlah SDM masih belum tercukupi	Terjadinya gejolak harga pangan
Data-data yang diperlukan dari instansi lain sering mengalami keterlambatan	Masih tingginya ketergantungan pada beras dan terigu
Kurangnya kompetensi SDM	Rendahnya kesadaran produsen pangan segar

Sumber: Hasil Analisis, 2021

Berdasarkan hasil analisis penyusunan *Strength*, *Weakness*, *Opportunity*, dan *Threats* (SWOT) yang didasarkan dari permasalahan, dan isu strategis terkait sasaran meningkatnya daya beli masyarakat terhadap komoditas bahan pokok. Langkah selanjutnya adalah dilakukan penyilangan antara kekuatan internal dan kekuatan eksternal, sehingga dapat menghasilkan beberapa strategi yang tepat dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan daerah. Dimana penyilangan antara *Strength* dan *Opportunity* akan menghasilkan strategi (SO), penyilangan antara *Strength* dan *Threats* menghasilkan strategi (ST), penyilangan antara *Weakness* dan

Opportunity menghasilkan strategi (WO) dan penyilangan antara *Weakness* dan *Threats* menghasilkan strategi (WT) Berikut disajikan pada tabel:

Tabel 6.7 Pemetaan SWOT Silang dalam Pembangunan Daerah Sasaran 3: Meningkatnya Daya Beli Masyarakat Terhadap Komoditas Bahan Pokok

Strategi (SO)	Strategi (WO)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Diversifikasi Pangan 2. Optimalisasi penggunaan bahan pengendali hama penyakit 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stabilitas harga pangan 2. Menjaga keseimbangan antara ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan
Strategi (ST)	Strategi (WT)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan fasilitas perdagangan dalam standarisasi dan perlindungan konsumen 2. Peningkatan koordinasi dan pemantauan harga bahan pokok 3. Menambahkan stok bahan pokok dan bahan penting lainnya agar sesuai dengan jumlah permintaan 4. Stabilisasi harga dan jaminan stok barang kebutuhan pokok dan kelancaran distribusinya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi peran Satu Desa Satu Lumbung 2. Peningkatan ketahanan pangan terhadap kebutuhan masyarakat 3. Peningkatan koordinasi yang baik dalam ketahanan pangan 4. Peningkatan kompetensi SDM

Sumber: Hasil Analisis, 2021

Sasaran 4: Meningkatnya Keadilan dan Kesetaraan Gender

Merujuk sasaran berkenaan dengan meningkatnya keadilan dan kesetaraan gender, maka strategi yang akan dibuat mengacu pada capaian data di tahun sebelumnya dan visi misi kepala daerah yang terpilih. Perlunya keterikatan ini agar strategi yang dibuat bisa sesuai dengan sasaran dan memberikan solusi yang tepat. Sebagai upaya menuju meningkatnya keadilan dan kesetaraan gender, maka indikator yang tepat sebagai tolak ukur adalah indeks pembangunan gender.

Setelah melakukan pengkajian sasaran pembangunan periode sebelumnya dan gambaran umum kondisi daerah dan capaian pembangunan sampai dengan periode awal perencanaan serta permasalahan pembangunan terpenting dan isu-isu strategis pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran meningkatnya keadilan dan kesetaraan gender, maka langkah selanjutnya adalah melakukan evaluasi untuk menentukan pilihan yang tepat terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah. Oleh karena itu, maka untuk menghasilkan strategi pembangunan yang tajam dan tepat menggunakan metode SWOT kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*), dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Tabel 6.8 Pemetaan SWOT pada sasaran 4: Meningkatnya Keadilan dan Kesetaraan Gender

Strength	Opportunity
Perda PUG Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan	Adanya Tim Driver yang akan menggerakkan program Pengarusutamaan gender di KabupatenTulungagung
Perda Tulungagung No.23 Tahun 2017 tentang Sistem Penyelenggaraan	Kabupaten Tulungagung tidak ada ego sektoral sehingga sangat mungkin untuk

Perlindungan Anak sebagai amandemen Perda Tulungagung	menggderakkan upaya pengarusutamaan anak lintas sektor untuk saling bersinergi dan berkolaborasi
Adanya komitmen pemerintah dalam mendukung pelaksanaan program peningkatan kualitas hidup perempuan	Terjalannya jejaring antara Dinas/Instansi/PT/LSM/Organisasi yang mendukung program dan kegiatan peningkatan kualitas hidup perempuan
Tersedianya anggaran untuk program peningkatan kualitas hidup perempuan	Masih kurangnya ketersediaan anggaran dalam mendukung pelaksanaan program peningkatan kualitas hidup perempuan
Jumlah Tempat Pelayanan KB Cukup	Kuantitas IMP cukup
Jumlah tenaga pelayanan KB Cukup	Kelompok KB Pria
Kantor Penyuluhan KB Kecamatan	Dukungan LSOM tinggi
Weakness	Threat
Belum adanya pedoman audit responsif Gender Tulungagung yang menjadi pedoman bagi Inspektorat salah satu Tim Driver PUG	Regulasi sebagai payung hukum jika tidak ada perbup implementasi
Upaya pengarusutamaan hak anak masih dianggap sebagai kewajiban salah satu perangkat Daerah	Regulasi sebagai payung hukum jika tidak ada perbup implementasi sama halnya dengan PUG, PUHA jika Peraturan Daerah Tulungagung no.23 Tahun 2017 tentang sistem penyelenggaraan perlindungan Anak, jika tidak ada maka akan kurang optimal
Masih kurangnya koordinasi lintas sektor tentang program peningkatan kualitas hidup perempuan dalam bidang politik, hukum, sosial budaya dan ekonomi	Peningkatan sosialisasi/pelatihan/KIE dan lainnya untuk menjalin koordinasi lintas sektor yang bergerak dalam pemberdayaan perempuan
Masih kurangnya kepedulian kesetaraan gender di segala sektor pemberdayaan perempuan	Meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap program dan kegiatan pemberdayaan perempuan
Jumlah tenaga penyuluh KB kurang	Partisipasi pria terhadap pemakaian MKJP rendah
Jumlah Medis/Bidan terlatih kurang	Pengetahuan masyarakat tentang reproduksi sehat kurang
Tidak ada tenaga administrasi di lini lapangan	Belum optimalnya jasa layanan BPJS dalam pelayanan KB

Sumber: Hasil Analisis, 2021

Berdasarkan hasil analisis penyusunan *Strength*, *Weakness*, *Opportunity*, dan *Threats* (SWOT) yang didasarkan dari permasalahan, dan isu strategis terkait sasaran meningkatnya keadilan dan kesetaraan gender. Langkah selanjutnya adalah dilakukan penyilangan antara kekuatan internal dan kekuatan eksternal, sehingga dapat menghasilkan beberapa strategi yang tepat dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan daerah. Dimana penyilangan antara *Strength* dan *Opportunity* akan menghasilkan strategi (SO), penyilangan antara *Strength* dan *Threats* menghasilkan strategi (ST), penyilangan antara *Weakness* dan *Opportunity* menghasilkan strategi (WO) dan penyilangan antara *Weakness* dan *Threats* menghasilkan strategi (WT) Berikut disajikan pada tabel:

**Tabel 6.9 Pemetaan SWOT Silang dalam Pembangunan Daerah Sasaran
4: Meningkatnya Keadilan dan Kesetaraan Gender**

Strategi (SO)	Strategi (WO)
1. Peningkatan komitmen pemerintah dalam kualitas hidup perempuan serta ketersediaan anggaran	1. Peningkatan koordinasi dan kepedulian dalam kesetaraan gender
Strategi (ST)	Strategi (WT)
1. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak perempuan dan hak anak 2. Mengoptimalkan sosialisasi dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan	1. Penurunan angka kekerasan terhadap perempuan 2. Peningkatan sosialisasi serta koordinasi dalam penyuluhan dan pemberdayaan perempuan

Sumber: Hasil Analisis, 2021

Tabel 6.10 Cascading Perencanaan Misi 2

MISI 2: Mendorong Penguatan Ekonomi Kerakyatan Yang Berbasis Kearifan Lokal dan Potensi Daerah

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Akhir (2023)	No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran (Impact)	Kondisi Awal (2019)	Kondisi Akhir (2023)	Perangkat Daerah
2	Mendorong Penguatan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Kearifan Lokal dan Potensi Daerah	Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi	4.05	5	Meningkatnya ekonomi kerakyatan	Persentase Koperasi Berkualitas	-	31.9	Dinas Koperasi dan UMKM
							Persentase Usaha Mikro Berdaya saing	-	2.29	
							<i>Spending of Money</i>	-	120 M	
					6	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri	6.80	4.32	Disbudpar
							Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	5.80	4.76	Disperindag
							Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	1.83	1.71	Dinas Pertanian Dinas Peternakan dan Keswan Dinas Perikanan
					7	Meningkatnya realisasi investasi	Realisasi Investasi PMA dan PMDN	-	400 M	DPM PTSP

Sumber: Hasil Analisis, 2021

Tujuan 2: Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

Sasaran 5: Meningkatnya Ekonomi Kerakyatan

Merujuk sasaran berkenaan dengan meningkatnya ekonomi kerakyatan, maka strategi yang akan dibuat mengacu pada capaian data di tahun sebelumnya dan visi misi kepala daerah yang terpilih. Perlunya keterikatan ini agar strategi yang dibuat bisa sesuai dengan sasaran dan memberikan solusi yang tepat. Sebagai upaya menuju meningkatnya ekonomi kerakyatan, maka indikator yang tepat sebagai tolak ukur adalah Persentase Koperasi yang Berkualitas, Persentase Usaha Mikro Berdaya Saing, dan *Spending of Money*.

Setelah melakukan pengkajian sasaran pembangunan periode sebelumnya dan gambaran umum kondisi daerah dan capaian pembangunan sampai dengan periode awal perencanaan serta permasalahan pembangunan terpenting dan isu-isu strategis pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran meningkatnya ekonomi kerakyatan, maka langkah selanjutnya adalah melakukan evaluasi untuk menentukan pilihan yang tepat terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah. Oleh karena itu, maka untuk menghasilkan strategi pembangunan yang tajam dan tepat menggunakan metode SWOT kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*), dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Tabel 6.11 Pemetaan SWOT pada sasaran 5: Meningkatnya Ekonomi Kerakyatan

Strength	Opportunity
Koperasi dan Usaha Mikro menjadi salah bidang prioritas unggulan Pemerintah Kabupaten Tulungagung yang akan diintervensi dalam bentuk program kegiatan	Komitmen pemangku kebijakan terhadap pelayanan Koperasi dan Usaha Mikro
Tersedianya pelayanan sarana dan prasarana dalam kondisi baik (PLUT dan Klinik layanan Si Umi)	Adanya dukungan pemerintah pusat dan provinsi serta stakeholder yang lain
Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi di bidangnya	Adanya peran serta BUMN dan perbankan dalam penyediaan akses pembiayaan
Adanya komitmen pimpinan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah	Regulasi kebijakan tentang Koperasi dan usaha mikro
	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Usaha Koperasi dan usaha mikro
	Perkembangan Teknologi yang sangat cepat memicu pelaku koperasi dan usaha mikro untuk berkembang
Weakness	Threat
Minimnya koordinasi dan komunikasi antar pihak terkait / Masih adanya ego sektoral.	Persaingan yang semakin berat dan ketat di era Milenial
Masih minimnya SDM baik dalam kuantitas maupun kualitas guna mendukung keberhasilan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro	Kurangnya pemanfaatan atas perkembangan teknologi yang sangat cepat bisa menjadi tertinggalnya pelaku koperasi dan usaha mikro

Strength	Opportunity
Kurang optimalnya pelayanan di Bidang Koperasi dan Usaha Mikro	Masih banyaknya manajemen Koperasi dan Usaha Mikro yang belum mendasarkan pada prinsip kewirausahaan
Belum optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana pelayanan	Masih adanya ketidak jujuran dalam pengelolaan koperasi
Data dan Informasi yang tidak valid atau tidak akurat	

Sumber: Hasil Analisis, 2021

Berdasarkan hasil analisis penyusunan *Strength*, *Weakness*, *Opportunity*, dan *Threats* (SWOT) yang didasarkan dari permasalahan, dan isu strategis terkait sasaran meningkatnya ekonomi kerakyatan. Langkah selanjutnya adalah dilakukan penyilangan antara kekuatan internal dan kekuatan eksternal, sehingga dapat menghasilkan beberapa strategi yang tepat dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan daerah. Dimana penyilangan antara *Strength* dan *Opportunity* akan menghasilkan strategi (SO), penyilangan antara *Strength* dan *Threats* menghasilkan strategi (ST), penyilangan antara *Weakness* dan *Opportunity* menghasilkan strategi (WO) dan penyilangan antara *Weakness* dan *Threats* menghasilkan strategi (WT), berikut disajikan pada tabel:

Tabel 6.12 Pemetaan SWOT Silang dalam Pembangunan Daerah

Sasaran 5: Meningkatnya Ekonomi Kerakyatan

Strategi (SO)	Strategi (WO)
<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan fasilitas pemerintah daerah terhadap perogram pemerintah pusat Meningkatkan dan mengoptimalkan pembangunan di semua aspek 	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan koordinasi dan komunikasi serta peningkatan kualitas dan kuantitas SDM yang ada Peningkatan koordinasi dan komunikasi serta pemanfaatan teknologi dan informasi
Strategi (ST)	Strategi (WT)
<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan pemanfaatan teknologi dalam peningkatan manajemen koperasi dan usaha mikro 	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan kesadaran kinerja pengelola koperasi Peningkayan intensitas pembinaan dan pendampingan bagi pelaku usaha

Sumber: Hasil Analisis, 2021

Sasaran 6: Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan

Merujuk sasaran berkenaan dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan, maka strategi yang akan dibuat mengacu pada capaian data di tahun sebelumnya dan visi misi kepala daerah yang terpilih. Perlunya keterikatan ini agar strategi yang dibuat bisa sesuai dengan sasaran dan memberikan solusi yang tepat. Sebagai upaya menuju meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan, maka indikator yang tepat sebagai tolak ukur adalah mengenai Pertumbuhan PDRB Sektor Industri, Pertumbuhan PDRB Perdagangan dan Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian.

Setelah melakukan pengkajian sasaran pembangunan periode sebelumnya dan gambaran umum kondisi daerah dan capaian pembangunan sampai dengan periode awal perencanaan serta permasalahan pembangunan terpenting dan isu-isu strategis pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan, maka

langkah selanjutnya adalah melakukan evaluasi untuk menentukan pilihan yang tepat terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah. Oleh karena itu, maka untuk menghasilkan strategi pembangunan yang tajam dan tepat menggunakan metode SWOT kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*), dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Tabel 6.13 Pemetaan SWOT pada sasaran 6: Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan

Strength	Opportunity
Jumlah SDM dan Sarana Prasarana Pelayanan Tera Ulang yang Memadai	Pelaku usaha mampu/mengurus perijinan dibidang perdagangan
Tersedianya Sarana Pertanian	Adanya kerjasama yang baik dengan kelompok tani
Terdapat perlindungan petani bagi yang gagal panen melalui kegiatan AUTP	Adanya kerjasama yang baik dengan pihak ketiga (CV/Perusahaan dan pelaksana kegiatan)
Lahan budidaya yang masih potensial seluas 307.02 Ha	Meningkatnya permintaan produk tangkap laut
Melimpahnya hasil produksi perikanan sebagai bahan industri olahan ikan	Meningkatnya Kebutuhan produk olahan aman pangan
Kelembagaan yang ada sebagai pendukung pembangunan pertanian cukup memadai	Cepatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
Weakness	Threat
Belum adanya fungsional pengawas tera/tera ulang	Tidak tercapainya daerah tertib ukur
Kurangnya Informasi yang di dapat Masyarakat Terhadap Pentingnya Pelaksanaan Tera/ Tera Ulang	Pelaku usaha yang baru melakukan ijin usaha
Kurangnya koordinasi antar petugas lapang	Terjadi bencana alam (banjir, kekeringan, kebakaran lahan) dan serangan OPT
Penyaluran pupuk bersubsidi yang kurang tepat sasaran dan terkendala distribusi Kartu Tani kepada petani	Terjadinya anomali iklim
Belum semua hasil tangkap melalui proses lelang	Menurunnya kualitas dan kuantitas SDI Laut dan PUD
Meningkat harga input produksi (pakan ikan)	Over produksi perikanan budidaya
SDM Aparatur secara kuantitas kurang memadai/kurang jumlahnya	Kualitas produk hasil pertanian dan peternakan rendah
Sarana dan prasarana kantor kurang memadai	Produksi usaha tani dan usaha peternakan yang belum optimal

Sumber: Hasil Analisis, 2021

Berdasarkan hasil analisis penyusunan *Strength*, *Weakness*, *Opportunity*, dan *Threats* (SWOT) yang didasarkan dari permasalahan, dan isu strategis terkait sasaran meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan, langkah selanjutnya adalah dilakukan penyilangan antara kekuatan internal dan kekuatan eksternal, sehingga dapat menghasilkan beberapa strategi yang tepat dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan daerah. Dimana penyilangan antara *Strength* dan *Opportunity* akan menghasilkan strategi (SO), penyilangan antara *Strength* dan *Threats* menghasilkan strategi (ST), penyilangan antara *Weakness* dan *Opportunity*

menghasilkan strategi (WO) dan penyilangan antara *Weakness* dan *Threats* menghasilkan strategi (WT) Berikut disajikan pada tabel:

**Tabel 6.14 Pemetaan SWOT Silang dalam Pembangunan Daerah
Sasaran 6: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan**

Strategi (SO)	Strategi (WO)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan tera/tera ulang 2. Deregulasi kebijakan terkait pangan 3. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana di bidang perikanan 4. Penyediaan sarpras produksi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, fasilitas perijinan produk olahan, promosi produk unggulan, fasilitasi pendanaan, kemitraan dan penguatan kelembagaan 5. Mengoptimalkan kontribusi sub sektor peternakan terhadap PDRB sektor pertanian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan komitmen dari pelaku usaha 2. Meningkatkan kepercayaan diri sebagai pelaku usaha ekspor 3. Memudahkan informasi dan proses dalam mengurus perijinan di bidang perdagangan
Strategi (ST)	Strategi (WT)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan stabilisasi harga dan jaminan stok barang kebutuhan pokok 2. Mengoptimalkan monitoring dalam perijinan usaha 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan kelancaran distribusi barang 2. Peningkatan produksi, kemitraan dan penguatan kelembagaan di sektorusaha perikanan budidaya 3. Pemberian bantuan input produksi setelah terjadinya titik balik dari penurunan ekonomi akibat pandemi Covid-19 4. Memperkuat pasca panen dan pemasaran

Sumber: Hasil Analisis, 2021

Sasaran 7: Meningkatnya Realisasi Investasi

Merujuk sasaran berkenaan dengan Meningkatnya Realisasi Investasi, maka strategi yang akan dibuat mengacu pada capaian data di tahun sebelumnya dan visi misi kepala daerah yang terpilih. Perlunya keterikatan ini agar strategi yang dibuat bisa sesuai dengan sasaran dan memberikan solusi yang tepat. Sebagai upaya menuju meningkatnya realisasi investasi, maka indikator yang tepat sebagai tolak ukur adalah mengenai Realisasi Investasi PMA dan PMDN.

Setelah melakukan pengkajian sasaran pembangunan periode sebelumnya dan gambaran umum kondisi daerah dan capaian pembangunan sampai dengan periode awal perencanaan serta permasalahan pembangunan terpenting dan isu-isu strategis pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan, maka langkah selanjutnya adalah melakukan evaluasi untuk menentukan pilihan yang tepat terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah. Oleh karena itu, maka untuk menghasilkan strategi pembangunan yang tajam dan tepat menggunakan metode SWOT kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*), dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Tabel 6.15 Pemetaan SWOT pada Sasaran 7: Meningkatnya Realisasi Investasi

Strength	Opportunity	
Adanya Perda tentang pembentukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sehingga kelembagaannya lebih kuat	Sinergitas aturan penanaman modal dan perizinan antar kelembagaan yang belum optimal	
Tersedianya aparat/pegawai di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang cukup memadai dari berbagai disiplin ilmu	Pelayanan masih belum berbasis teknologi informasi sepenuhnya	
Besarnya perhatian pemerintah daerah terhadap pembangunan penanaman modal/investasi dan pelayanan terpadu	Masih perlu pengembangan informasi tentang pelayanan perijinan dan investasi penanaman modal	
Tersedianya peraturan perundang-undangan/regulasi lingkup penanaman modal dan pelayanan publik	Belum tercukupinya kebutuhan Sumber Daya Aparatur penanaman modal dan Perizinan yang berkompeten	
Adanya motivasi dan semangat dari jajaran pimpinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk memberikan pelayanan ijin sebaik mungkin	Pemenuhan komitmen perijinan	
Kebijakan pemerintah pusat yang terus berupaya mempermudah ketentuan pelayanan perizinan dan investasi		
Masyarakat semakin sadar pentingnya memiliki ijin usaha		
Dengan terbentuknya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempermudah masyarakat memperoleh ijin usaha yang dibutuhkan terlebih bila ijin tersebut terkait dengan ijin yang lain		
Dengan adanya teknologi website masyarakat bisa langsung mengakses ijin yang ingin diajukan lengkap dengan syarat dan besarnya retribusi		
Weakness		Threat
Belum tercukupinya kebutuhan Sumber Daya Aparatur penanaman modal dan Perizinan yang berkompeten		Semakin berkembangnya informasi global membuat minat masyarakat untuk membuka usaha di berbagai sektor terus meningkat, oleh karenanya ijin usaha semakin dibutuhkan
Pelayanan aparat yang kurang profesional dan bersahabat sehingga pemohon enggan mengurus ijin sendiri ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan memilih menggunakan jasa calo		
Masih kurangnya informasi yang memadai bagi masyarakat terhadap kepengurusan ijin		
Masyarakat semakin sadar pentingnya memiliki ijin usaha		
Masih rendahnya pemahaman masyarakat dan instansi terkait tentang pelayanan perizinan		
Prosedur perijinan yang kadang masih ada yang berbelit dan memakan waktu lama sehingga ijin yang dikeluarkan tidak bisa tepat waktu		

Sumber: Hasil Analisis, 2021

Berdasarkan hasil analisis penyusunan *Strength*, *Weakness*, *Opportunity*, dan *Threats* (SWOT) yang didasarkan dari permasalahan, dan isu strategis terkait sasaran meningkatnya realisasi investasi, langkah

selanjutnya adalah dilakukan penyilangan antara kekuatan internal dan kekuatan eksternal, sehingga dapat menghasilkan beberapa strategi yang tepat dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan daerah. Dimana penyilangan antara *Strength* dan *Opportunity* akan menghasilkan strategi (SO), penyilangan antara *Strength* dan *Threats* menghasilkan strategi (ST), penyilangan antara *Weakness* dan *Opportunity* menghasilkan strategi (WO) dan penyilangan antara *Weakness* dan *Threats* menghasilkan strategi (WT), berikut disajikan pada tabel:

**Tabel 6.16 Pemetaan SWOT Silang dalam Pembangunan Daerah Sasaran
7: Meningkatkan Realisasi Investasi**

Strategi (SO)	Strategi (WO)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Nilai Investasi di Kabupaten Tulungagung 2. Peningkatan Pelayanan Perijinan dan Investasi Penanaman Modal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Pemenuhan Komitmen Perijinan 2. Peningkatan kualitas SDM Penanaman Modal
Strategi (ST)	Strategi (WT)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi potensi-potensi unggulan di daerah 2. Kemudahan Mendapatkan Perijinan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelesaian pengaduan layanan tepat waktu 2. Peningkatan Perijinan Penanaman Modal berbasis elektronik 3. Pengembangan sektor infrastruktur dan tetap mempertahankan reformasi kebijakan yang sudah dikerjakan sebelumnya

Sumber: Hasil Analisis, 2021

Tabel 6.17 Cascading Perencanaan Misi 3

MISI 3: Pengentasan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Dalam Mewujudkan Ketentraman, Rasa Aman, serta Ketertiban Masyarakat

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Akhir (2023)	No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran (Impact)	Kondisi Awal (2019)	Kondisi Akhir (2023)	Perangkat Daerah
3	Pengentasan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Dalam Mewujudkan Ketentraman, Rasa Aman, Serta Ketertiban Masyarakat	Mempercepat Penurunan Kemiskinan Untuk Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Aman dan Tertib	Tingkat Kemiskinan	7.11	8	Terjaminnya Perlindungan Sosial Masyarakat	Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	0.75	0.70	Dinas Sosial
					9	Meningkatnya kesempatan kerja masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3.36	4.71	Disnakertrans
					10	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mewujudkan Pembangunan	Indeks Desa Membangun (IDM)	0.6781	0.7214	DPMD
			Indeks Pembangunan Masyarakat	0.720	11	Meningkatnya Rasa Aman di Masyarakat	Indeks Rasa Aman	0.653	0.679	Satpol PP BPBD
					12	Meningkatnya Toleransi pada Kehidupan Masyarakat	Indeks Toleransi	0.720	0.792	Bakesbangpol

Sumber: Hasil Analisis, 2021

Tujuan 3: Mempercepat Penurunan Kemiskinan Untuk Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Aman Dan Tertib

Sasaran 8: Terjaminnya Perlindungan Sosial Masyarakat

Merujuk sasaran berkenaan dengan terjaminnya perlindungan sosial masyarakat, maka strategi yang akan dibuat mengacu pada capaian data di tahun sebelumnya dan visi misi kepala daerah yang terpilih. Perlunya keterikatan ini agar strategi yang dibuat bisa sesuai dengan sasaran dan memberikan solusi yang tepat. Sebagai upaya menuju terjaminnya perlindungan sosial masyarakat, maka indikator yang tepat sebagai tolak ukur adalah mengenai persentase penurunan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS).

Setelah melakukan pengkajian sasaran pembangunan periode sebelumnya dan gambaran umum kondisi daerah dan capaian pembangunan sampai dengan periode awal perencanaan serta permasalahan pembangunan terpenting dan isu-isu strategis pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran terjaminnya perlindungan sosial masyarakat, maka langkah selanjutnya adalah melakukan evaluasi untuk menentukan pilihan yang tepat terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah. Oleh karena itu, maka untuk menghasilkan strategi pembangunan yang tajam dan tepat menggunakan metode SWOT (kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*), dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Tabel 6.18 Pemetaan SWOT pada Sasaran 8: Terjaminnya Perlindungan Sosial Masyarakat

Strength	Opportunity
Adanya struktur organisasi dan tata kerja serta tupoksi yang jelas	Adanya peraturan perundang-undangan yang dapat memperkuat operasionalisasi pelaksanaan tugas.
Tersedianya kualitas SDM yang memadai	Adanya dukungan dari pimpinan/Bupati.
Diterapkannya sendi-sendi pelayanan di lingkungan Dinas secara konsekuen	
Tersedianya Tenaga Sosial yang terbagi di seluruh kecamatan di Tulungagung	
Weakness	Threat
Kualitas SDM yang ada belum sesuai dengan kualifikasi.	Rendahnya kesadaran hukum masyarakat.
Volume, sarana, prasarana yang tersedia belum mencukupi untuk mendukung kegiatan pelayanan.	Belum optimalnya koordinasi antar instansi/unit kerja terkait.

Sumber: Hasil Analisis, 2021

Berdasarkan hasil analisis penyusunan *Strength*, *Weakness*, *Opportunity*, dan *Threats* (SWOT) yang didasarkan dari permasalahan, dan isu strategis terkait sasaran terjaminnya perlindungan sosial masyarakat. Langkah selanjutnya adalah dilakukan penyilangan antara kekuatan internal dan kekuatan eksternal, sehingga dapat menghasilkan beberapa strategi yang tepat dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan daerah. Dimana penyilangan antara *Strength* dan *Opportunity* akan menghasilkan strategi (SO), penyilangan antara *Strength* dan *Threats* menghasilkan strategi (ST),

penyilangan antara *Weakness* dan *Opportunity* menghasilkan strategi (WO) dan penyilangan antara *Weakness* dan *Threats* menghasilkan strategi (WT), berikut disajikan pada tabel:

Tabel 6.19 Pemetaan SWOT Silang dalam Pembangunan Daerah sasaran 8: Terjaminnya Perlindungan Sosial Masyarakat

Strategi (SO)	Strategi (WO)
1. Peningkatan kualitas pelayanan yang efektif dan tertib	1. Meningkatkan kualitas SDM yang sesuai kualifikasi
Strategi (ST)	Strategi (WT)
1. Peningkatan koordinasi dengan Kementerian Sosial, Dinas Sosial Provinsi dan stakeholder terkait 2. Peningkatan komitmen dari Potensi Sumber kesejahteraan sosial	1. Optimaliasi upaya untuk memotivasi operator data di desa/kelurahan agar lebih aktif dalam melakukan verifikasi dan validasi data 2. Peningkatan sarana prasarana

Sumber: Hasil Analisis, 2021

Sasaran 9: Meningkatnya Kesempatan Kerja Masyarakat

Merujuk sasaran berkenaan dengan meningkatnya kesempatan kerja masyarakat, maka strategi yang akan dibuat mengacu pada capaian data di tahun sebelumnya dan visi misi kepala daerah yang terpilih. Perlunya keterikatan ini agar strategi yang dibuat bisa sesuai dengan sasaran dan memberikan solusi yang tepat. Sebagai upaya menuju meningkatnya kesempatan kerja masyarakat, maka indikator yang tepat sebagai tolak ukur adalah mengenai Tingkat Pengangguran Terbuka.

Setelah melakukan pengkajian sasaran pembangunan periode sebelumnya dan gambaran umum kondisi daerah dan capaian pembangunan sampai dengan periode awal perencanaan serta permasalahan pembangunan terpenting dan isu-isu strategis pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan, maka langkah selanjutnya adalah melakukan evaluasi untuk menentukan pilihan yang tepat terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah. Oleh karena itu, maka untuk menghasilkan strategi pembangunan yang tajam dan tepat menggunakan metode SWOT (kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*), dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Tabel 6.20 Pemetaan SWOT pada Sasaran 9: Meningkatnya Kesempatan Kerja Masyarakat

Strength	Opportunity
Tersedianya program-program penanganan pengangguran	Permintaan tenaga kerja formal antar Negara terus meningkat dan beberapa jenis pekerjaan tidak terpenuhi
Amino transmigran masih cukup besar	Lokasi transmigrasi masih cukup banyak
Tersedianya BLK dan LPKS yang representative	Kebutuhan tenaga kerja yang kompeten yang cukup besar di dunia industri
Adanya regulasi perlindungan tenaga kerja	Tersedianya tenaga fungsional mediator
Weakness	Threat
Terbatasnya lapangan kerja dalam negeri	Industrialisasi mendorong pengurangan tenaga kerja manusia diganti mesin
Transmigran yang sudah ditempatkan seringkali kembali ke daerah asal	Lokasi transmigrasi belum sepenuhnya clear dan clean

Strength	Opportunity
Jumlah infrastruktur yang sangat kurang sehingga kompetensi/keterampilan pencari kerja yang masih rendah	AFTA memudahkan TKA masuk
Beralihnya status kewenangan pengawas ketenagakerjaan ke provinsi	Banyaknya perusahaan yang belum menerapkan UU ketenagakerjaan secara optimal

Sumber: Hasil Analisis, 2021

Berdasarkan hasil analisis penyusunan *Strength*, *Weakness*, *Opportunity*, dan *Threats* (SWOT) yang didasarkan dari permasalahan, dan isu strategis terkait sasaran meningkatnya kesempatan kerja masyarakat. Langkah selanjutnya adalah dilakukan penyilangan antara kekuatan internal dan kekuatan eksternal, sehingga dapat menghasilkan beberapa strategi yang tepat dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan daerah. Dimana penyilangan antara *Strength* dan *Opportunity* akan menghasilkan strategi (SO), penyilangan antara *Strength* dan *Threats* menghasilkan strategi (ST), penyilangan antara *Weakness* dan *Opportunity* menghasilkan strategi (WO) dan penyilangan antara *Weakness* dan *Threats* menghasilkan strategi (WT), berikut disajikan pada tabel:

**Tabel 6.21 Pemetaan SWOT Silang dalam Pembangunan Daerah
Sasaran 9: Meningkatnya Kesempatan Kerja Masyarakat**

Strategi (SO)	Strategi (WO)
1. Penerapkan peraturan tenaga kerja yang baik	1. Peningkatan SDM tenaga kerja yang kompeten
Strategi (ST)	Strategi (WT)
1. Peningkatan kerjasama dengan pihak pengusaha/industri dalam peningkatan penyerapan tenaga kerja	1. Pengembangan pelatihan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar, bagi masyarakat usia Angkatan kerja 2. Memperluas lapangan pekerjaan

Sumber: Hasil Analisis, 2021

Sasaran 10: Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Mewujudkan Pembangunan

Merujuk sasaran berkenaan dengan meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan, maka strategi yang akan dibuat mengacu pada capaian data di tahun sebelumnya dan visi misi kepala daerah yang terpilih. Perlunya keterikatan ini agar strategi yang dibuat bisa sesuai dengan sasaran dan memberikan solusi yang tepat. Sebagai upaya menuju meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan, maka indikator yang tepat sebagai tolak ukur adalah Indeks Desa Membangun (IDM).

Setelah melakukan pengkajian sasaran pembangunan periode sebelumnya dan gambaran umum kondisi daerah dan capaian pembangunan sampai dengan periode awal perencanaan serta permasalahan pembangunan terpenting dan isu-isu strategis pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan, maka langkah selanjutnya adalah melakukan evaluasi untuk menentukan pilihan yang tepat terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah. Oleh karena itu, maka untuk menghasilkan strategi pembangunan yang tajam dan tepat menggunakan metode SWOT (kekuatan (*strengths*),

kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*), dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Tabel 6.22 Pemetaan SWOT pada Sasaran 10: Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dalam Mewujudkan Pembangunan

Strength	Opportunity
Komitmen, konsisten dan kontinyu dalam pelaksanaan SDGs Desa sesuai Permendesa PDTT No. 13/2020	Program Pembangunan Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat Desa (Dana Desa) untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
Perda dan Perbup Perangkat Daerah dan yang berkaitan dengan Pemerintahan Desa menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas	Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa yang semakin meningkat
Peningkatan kapasitas aparatur perangkat daerah melalui diklat teknis	Gerakan terpadu berantas stunting
Dukungan pendanaan dalam APBD	Dukungan Teknologi Informasi untuk mendukung pelaksanaan Pemerintahan Desa
Weakness	Threat
Belum memiliki Rencana Pengembangan Kawasan Pedesaan (RPKP)	Beberapa Desa dengan IDM rendah belum mampu mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
Keterbatasan SDM (kualitas dan kuantitas) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi	Keberadaan lembaga kemasyarakatan belum berperan aktif dalam pembangunan
Sarana Prasarana masih perlu ditingkatkan	Kurang antusiasnya Aparatur Pemerintahan Desa dalam menindaklanjuti pembinaan yang diterima
Belum memiliki Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP)	Partisipasi masyarakat dalam pembangunan masih relatif rendah

Sumber: Hasil Analisis, 2021

Berdasarkan hasil analisis penyusunan *Strength*, *Weakness*, *Opportunity*, dan *Threats* (SWOT) yang didasarkan dari permasalahan, dan isu strategis terkait sasaran meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan. Langkah selanjutnya adalah dilakukan penyilangan antara kekuatan internal dan kekuatan eksternal, sehingga dapat menghasilkan beberapa strategi yang tepat dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan daerah. Dimana penyilangan antara *Strength* dan *Opportunity* akan menghasilkan strategi (SO), penyilangan antara *Strength* dan *Threats* menghasilkan strategi (ST), penyilangan antara *Weakness* dan *Opportunity* menghasilkan strategi (WO) dan penyilangan antara *Weakness* dan *Threats* menghasilkan strategi (WT), berikut disajikan pada tabel:

Tabel 6.23 Pemetaan SWOT Silang dalam Pembangunan Daerah Sasaran 10: Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Mewujudkan Pembangunan

Strategi (SO)	Strategi (WO)
Peningkatan perencanaan dalam segala aspek dengan baik	Peningkatan kapasitas aparatur perangkat daerah
Strategi (ST)	Strategi (WT)
Peningkatan perencanaan desa serta pemberdayaan masyarakat desa	Peningkatan pemberdayaan masyarakat desa

Sumber: Hasil Analisis, 2021

Sasaran 11: Meningkatnya Rasa Aman di Masyarakat

Merujuk sasaran berkenaan dengan Meningkatnya Rasa Aman di masyarakat, maka strategi yang akan dibuat mengacu pada capaian data di tahun sebelumnya dan visi misi kepala daerah yang terpilih. Perlunya keterikatan ini agar strategi yang dibuat bisa sesuai dengan sasaran dan memberikan solusi yang tepat. Sebagai upaya menuju meningkatnya Rasa Aman di masyarakat, maka indikator yang tepat sebagai tolak ukur adalah Indeks Rasa Aman.

Setelah melakukan pengkajian sasaran pembangunan periode sebelumnya dan gambaran umum kondisi daerah dan capaian pembangunan sampai dengan periode awal perencanaan serta permasalahan pembangunan terpenting dan isu-isu strategis pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran meningkatnya Rasa Aman di masyarakat, maka langkah selanjutnya adalah melakukan evaluasi untuk menentukan pilihan yang tepat terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah. Oleh karena itu, maka untuk menghasilkan strategi pembangunan yang tajam dan tepat menggunakan metode SWOT (kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*), dengan langkah langkah sebagai berikut:

Tabel 6.24 Pemetaan SWOT pada Sasaran 11: Meningkatnya Rasa Aman di Masyarakat

Strength	Opportunity
Adanya dasar hukum yang jelas dalam pelaksanaan tugas	Dinamika perkembangan produk hukum daerah
Adanya pengaturan tugas dan jadwal yang jelas	Adanya tuntutan dari masyarakat untuk peningkatan ketertiban ketentraman umum
Adanya kebersamaan dalam satu komando dalam pelaksanaan penegakan Perda dan trantibummas	
Weakness	Threat
Kurangnya profesionalisme anggota Satpol PP	Kurangnya kesadaran masyarakat untuk pelaksanaan Perda
Terbatasnya jumlah dan kualitas sarana dan prasarana	Adanya stigma negatif yang muncul dari masyarakat terhadap aparat Satpol PP
Kurangnya personil anggota Satpol PP	Masyarakat kegiatan ekonomi masyarakat yang melanggar Perda
Kurangnya anggaran untuk menunjang berbagai program dan kegiatan di Satpol PP	

Sumber: Hasil Analisis, 2021

Berdasarkan hasil analisis penyusunan *Strength*, *Weakness*, *Opportunity*, dan *Threats* (SWOT) yang didasarkan dari permasalahan, dan isu strategis terkait sasaran meningkatnya Rasa Aman di masyarakat. Langkah selanjutnya adalah dilakukan penyilangan antara kekuatan internal dan kekuatan eksternal, sehingga dapat menghasilkan beberapa strategi yang tepat dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan daerah. Dimana penyilangan antara *Strength* dan *Opportunity* akan menghasilkan strategi (SO), penyilangan antara *Strength* dan *Threats* menghasilkan strategi (ST), penyilangan antara *Weakness* dan *Opportunity* menghasilkan strategi (WO) dan penyilangan antara *Weakness* dan *Threats* menghasilkan strategi (WT), berikut disajikan pada tabel:

**Tabel 6.25 Pemetaan SWOT Silang dalam Pembangunan Daerah
Sasaran 11: Meningkatnya Rasa Aman di Masyarakat**

Strategi (SO)	Strategi (WO)
1. Mengoptimalkan penegakan hukum yang baik dalam mengatasi tuntutan masyarakat pada ketertiban dan ketentraman	Peningkatan sarana dan prasarana yang ada
Strategi (ST)	Strategi (WT)
1. Meningkatkan Komitmen yang tinggi dari anggota Satpol PP 2. Meningkatkan kompetensi tenaga yang professional	1. Meningkatkan Koordinasi lintas sektor dan antar stakeholder 2. Mengoptimalkan sosialisasi dan binaan dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat

Sumber: Hasil Analisis, 2021

Sasaran 12: Meningkatnya Toleransi Pada Kehidupan Masyarakat

Merujuk sasaran berkenaan dengan meningkatnya toleransi pada kehidupan masyarakat, maka strategi yang akan dibuat mengacu pada capaian data di tahun sebelumnya dan visi misi kepala daerah yang terpilih. Perlunya keterikatan ini agar strategi yang dibuat bisa sesuai dengan sasaran dan memberikan solusi yang tepat. Sebagai upaya menuju meningkatnya toleransi pada kehidupan masyarakat, maka indikator yang tepat sebagai tolak ukur adalah Indeks Toleransi.

Setelah melakukan pengkajian sasaran pembangunan periode sebelumnya dan gambaran umum kondisi daerah dan capaian pembangunan sampai dengan periode awal perencanaan serta permasalahan pembangunan terpenting dan isu-isu strategis pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran toleransi pada kehidupan masyarakat, maka langkah selanjutnya adalah melakukan evaluasi untuk menentukan pilihan yang tepat terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah. Oleh karena itu, maka untuk menghasilkan strategi pembangunan yang tajam dan tepat menggunakan metode SWOT (kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*), dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Tabel 6.26 Pemetaan SWOT pada Sasaran 12: Meningkatnya Toleransi Pada Kehidupan Masyarakat

Strength	Opportunity
Program kerja dan kegiatan efektif	Budaya masyarakat cenderung toleran dan adaptif
Kelembagaan organisasi yang solid dan dinamis	Sinergitas kelembagaan pemerintah yang baik
Sumber daya manusia pegawai yang responsif, akuntabel dan inovatif	Figur tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat masih dominan
Ketersediaan anggaran	Struktur sosial ekonomi masyarakat yang relatif baik
Ketersediaan sarana prasarana	
Weakness	Threat
Jumlah personil ASN yang relatif kurang	Penguasaan teknologi informasi perlu di tingkatkan
Pendidikan dan pelatihan bagi ASN masih kurang	Penggunaan media sosial yang semakin luas dan semakin bebas
Sarana Prasarana kerja perlu ditingkatkan	Tuntutan kualitas pelayanan masyarakat yang semakin tinggi

Sumber: Hasil Analisis, 2021

Berdasarkan hasil analisis penyusunan *Strength*, *Weakness*, *Opportunity*, dan *Threats* (SWOT) yang didasarkan dari permasalahan, dan isu strategis terkait sasaran toleransi pada kehidupan masyarakat. Langkah selanjutnya adalah dilakukan penyilangan antara kekuatan internal dan kekuatan eksternal, sehingga dapat menghasilkan beberapa strategi yang tepat dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan daerah. Dimana penyilangan antara *Strength* dan *Opportunity* akan menghasilkan strategi (SO), penyilangan antara *Strength* dan *Threats* menghasilkan strategi (ST), penyilangan antara *Weakness* dan *Opportunity* menghasilkan strategi (WO) dan penyilangan antara *Weakness* dan *Threats* menghasilkan strategi (WT), berikut disajikan pada tabel:

Tabel 6.27 Pemetaan SWOT Silang dalam Pembangunan Daerah Sasaran 12: Meningkatnya Toleransi Pada Kehidupan Masyarakat

Strategi (SO)	Strategi (WO)
Meningkatkan Pendidikan dan pemberdayaan politik dalam masyarakat	1. Meningkatkan peran kelembagaan dan SDM pegawai yang responsif, akuntabel dan inovatif 2. Peningkatan pendidikan dan pelatihan ASN
Strategi (ST)	Strategi (WT)
Peningkatan kualitas penggunaan teknologi informasi	Meningkatan pengetahuan dan persepsi masyarakat terhadap penyelenggaraan agenda politik

Sumber: Hasil Analisis, 2021

Tabel 6.28 Cascading Perencanaan Misi 4

MISI 4: Membangun Infrastruktur Wilayah Pinggiran yang Berkualitas Dalam Mewujudkan Pemerataan Pembangunan

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Akhir (2023)	No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran (Impact)	Kondisi Awal (2019)	Kondisi Akhir (2023)	Perangkat Daerah
4	Membangun Infrastruktur Wilayah Pinggiran Yang Berkualitas Dalam Mewujudkan Pemerataan Pembangunan	Meningkatkan Infrastruktur Wilayah yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan	Persentase desa/ kelurahan yang mendapatkan layanan infrastruktur dan lingkungan berkualitas	55.35	13	Meningkatnya Infrastruktur Dasar yang Merata	Rasio Daerah Irigasi Dalam Kondisi Baik	1/81	1/76	Dinas PUPR
							Persentase Desa/ Kelurahan Dengan Rumah Layak Huni > 90%	97,79	100	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
							Persentase Desa/ Kelurahan Terlayani Sistem Perpipaan Air Minum	52,77	70,85	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
							Persentase Desa/ Kelurahan dengan Jumlah Rumah Tangga Terlayani Sanitasi >80%	90,41	98,89	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
							Persentase Desa/ Kelurahan dengan Jalan Kondisi Baik > 80%	78,23	79,34	Dinas PUPR
							Indeks Tingkat Pelayanan Jalan	0,37	0,54	Dinas Perhubungan
							14	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Menjamin Pembangunan Berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	71,23

Sumber: Hasil Analisis, 2021

Tujuan 4: Meningkatkan Infrastruktur Wilayah yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan

Sasaran 13: Meningkatnya Infrastruktur Dasar yang merata

Merujuk sasaran berkenaan dengan meningkatnya infrastruktur dasar yang merata, maka strategi yang akan dibuat mengacu pada capaian data di tahun sebelumnya dan visi misi kepala daerah yang terpilih. Perlunya keterikatan ini agar strategi yang dibuat bisa sesuai dengan sasaran dan memberikan solusi yang tepat. Sebagai upaya menuju meningkatnya infrastruktur dasar yang merata, maka indikator yang tepat sebagai tolak ukur adalah terkait rasio daerah irigasi dalam kondisi baik, persentase desa/kelurahan dengan rumah layak huni >90%, persentase desa/kelurahan terlayani sistem perpipaan air minum, persentase desa/kelurahan dengan jumlah rumah tangga terlayani sanitasi >80%, persentase desa/kelurahan dengan jalan kondisi baik >80%, serta indeks tingkat pelayanan jalan.

Setelah melakukan pengkajian sasaran pembangunan periode sebelumnya dan gambaran umum kondisi daerah dan capaian pembangunan sampai dengan periode awal perencanaan serta permasalahan pembangunan terpenting dan isu-isu strategis pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran meningkatnya infrastruktur dasar yang merata, maka langkah selanjutnya adalah melakukan evaluasi untuk menentukan pilihan yang tepat terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah. Oleh karena itu, maka untuk menghasilkan strategi pembangunan yang tajam dan tepat menggunakan metode SWOT (kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*), dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Tabel 6.29 Pemetaan SWOT pada Sasaran 13: Meningkatnya Infrastruktur Dasar yang merata

Strength	Opportunity
Terdapat Perda dan Perbup tentang SOTK Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya alat kerja yang memadai akan mendukung pelaksanaan kegiatan
Adanya SK terkait Jalan Kabupaten	Kompetensi Sumber Daya Manusia yang mumpuni akan meningkatkan kualitas pekerjaan
Memiliki aset jalan Kabupaten	
Memiliki Perda tentang IMB	Kerjasama yang baik dengan OPD teknis lain
Memiliki Perda tentang Bangunan Gedung	Terdapat pedoman dalam pelaksanaan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian Tata Ruang & Tata bangunan
Memiliki Perda RTRW dan 3 Perda RDTR	Memiliki Kewenangan dalam Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
Memiliki Peraturan Perundang-Undangan Jasa Konstruksi	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI)
Memiliki Perda Jasa Konstruksi & Perda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Memberikan Rekomendasi Ijin Usaha Jasa Konstruksi
Memiliki SOP Pelayanan	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Pemanfaatan Jasa Konstruksi

Memiliki Peralatan Pengujian	Pencapaian Akreditasi Sertifikasi ISO 17025:2017
Memiliki Gedung dan Lingkungan yang Luas	Adanya Target Penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
Memiliki SDM yang sudah bersertifikat sesuai dengan tugas dan fungsi	Adanya Pemohon Pengujian Laboratorium dari Luar Daerah
Sarana dan prasarana cukup tersedia	Terciptanya Kerjasama yang Baik dengan Laboratorium Kabupaten/Kota Lain
	Terciptanya Kerjasama dengan OPD/Kelembagaan yang terkait
	Banyaknya Kegiatan yang memerlukan Alat Berat
Weakness	Threat
Terbatasnya anggaran kegiatan	Keterbatasan APBD Kabupaten
Terbatasnya sarana dan prasarana kerja	Penganggaran untuk kegiatan masih kurang
Program kerja dan kegiatan kurang efektif	Rendahnya perekonomian masyarakat menyebabkan kegiatan infrastruktur menurun
Jumlah SDM yang masih terbatas	Tuntutan pelayanan infrastruktur dasar semakin tinggi
Belum memiliki sistem informasi yang baik	Masyarakat yang semakin kritis
Belum memiliki ruang pelayanan yang memadai dan representatif	Banyaknya kegiatan dilapangan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan perijinan yang diajukan
SOP yang dimiliki belum sepenuhnya dapat dijalankan	Banyaknya pelaku jasa konstruksi yang kurang bisa memenuhi target
Kurangnya infrastruktur pelaksanaan kegiatan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian Tata Ruang & Tata Bangunan	Banyaknya pelaku jasa konstruksi yang kurang bisa memenuhi target
Kurang mampu mengikuti permasalahan perkembangan teknologi bangunan gedung yang sangat dinamis	Banyaknya pemberi pekerjaan yang kurang bisa memperhitungkan waktu pelaksanaan kegiatan
Kurang mampu mengikuti permasalahan tata ruang yang dinamis	Proses penetapan perda RTR yang membutuhkan waktu lama
Kurang Mampu Mengikuti SIPJAKI	SIPJAKI belum Berjalan Secara Maksimal
Jenis Peralatan Pengujian Laboratorium masih kurang beragam & Alat Berat yang dimiliki masih kurang <i>update</i>	Adanya Kegiatan Konstruksi yang tidak melakukan Pengujian di Laboratorium Dinas PUPR
Sambungan Internet di Gedung Laboratorium dan Perbengkelan yang tidak memadai	Adanya Laboratorium lain yang dapat melaksanakan pengujian
Kurangnya Kompetensi yang dimiliki oleh Operator dan Mekanik Alat Berat	Adanya Persewaan Alat Berat dari Pihak Lain Suku Cadang berada diluar Kota

Sumber: Hasil Analisis, 2021

Berdasarkan hasil analisis penyusunan *Strength*, *Weakness*, *Opportunity*, dan *Threats* (SWOT) yang didasarkan dari permasalahan, dan isu strategis terkait sasaran meningkatnya infrastruktur dasar yang merata. Langkah selanjutnya adalah dilakukan penyilangan antara kekuatan internal dan kekuatan eksternal, sehingga dapat menghasilkan beberapa strategi yang tepat dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan daerah. Dimana penyilangan antara *Strength* dan *Opportunity* akan menghasilkan strategi (SO), penyilangan antara *Strength* dan *Threats* menghasilkan strategi (ST), penyilangan antara *Weakness* dan *Opportunity* menghasilkan strategi (WO)

dan penyilangan antara *Weakness* dan *Threats* menghasilkan strategi (WT), berikut disajikan pada tabel:

Tabel 6.30 Pemetaan SWOT Silang dalam Pembangunan Daerah Sasaran 13: Meningkatnya Infrastruktur Dasar yang merata

Strategi (SO)	Strategi (WO)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan upaya pelestarian sumber air yang ada dengan melaksanakan pencegahan dan penanggulangan pencemaran air oleh limbah ternak, industri dan domestic 2. Meningkatkan kondisi bangunan dengan mengacu pada Perda IMB dan Perda bangunan gedung 3. Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan dengan mengacu pada Perda RTRW dan Perda RDTR 4. Meningkatkan Perekonomian masyarakat serta mengoptimalkan penganggaran 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun, meningkatkan dan memperluas sistem penyediaan air minum secara tepat berdasarkan data skala prioritas 2. Meningkatkan upaya pembatasan beban kendaraan yang melalui ruas jalan 3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur permukiman berdasarkan skala prioritas 4. Meningkatkan koordinasi antara Pemerintah desa dalam identifikasi aset infrastruktur milik Pemkab
Strategi (ST)	Strategi (WT)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan perbaikan jalan dan pembangunan saluran drainase pengering 2. Meningkatkan pembangunan pengelolaan air limbah pada kawasan rawan sanitasi 3. Mengoptimalkan bantuan pembangunan jamban keluarga kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) 4. Meningkatkan pembangunan TPS 3R dilingkungan permukiman 5. Membangun, Meningkatkan dan merehabilitasi drainase 6. Meningkatkan aspek sarana dan prasarana serta pembangunan manusia 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan pembinaan pengelola air minum perdesaan (HIPPAM) 2. Meningkatkan pemahaman kepada masyarakat terkait pengelolaan air limbah 3. Melakukan pemeliharaan rutin/ berkala serta peningkatan jalan lingkungan

Sumber: Hasil Analisis, 2021

Sasaran 14: Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Yang Menjamin Pembangunan Berkelanjutan

Merujuk sasaran berkenaan dengan meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang menjamin pembangunan berkelanjutan, maka strategi yang akan dibuat mengacu pada capaian data di tahun sebelumnya dan visi misi kepala daerah yang terpilih. Perlunya keterikatan ini agar strategi yang dibuat bisa sesuai dengan sasaran dan memberikan solusi yang tepat. Sebagai upaya menuju meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang menjamin pembangunan berkelanjutan, maka indikator yang tepat sebagai tolak ukur adalah terkait indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH).

Setelah melakukan pengkajian sasaran pembangunan periode sebelumnya dan gambaran umum kondisi daerah dan capaian pembangunan sampai dengan periode awal perencanaan serta permasalahan pembangunan terpenting dan isu-isu strategis pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang menjamin pembangunan berkelanjutan, maka langkah selanjutnya adalah melakukan evaluasi untuk menentukan pilihan yang tepat terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah. Oleh karena itu, maka untuk menghasilkan strategi

pembangunan yang tajam dan tepat menggunakan metode SWOT (kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*), dengan langkah langkah sebagai berikut:

Tabel 6.31 Pemetaan SWOT pada sasaran 14: Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Yang Menjamin Pembangunan Berkelanjutan

Strength	Opportunity
Adanya program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan OPD, sasaran RPJMD, dan misi Bupati Tulungagung	Adanya dukungan dari pemerintah daerah, baik secara operasional maupun keuangan
Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 71 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung	Kondisi geografis Kabupaten Tulungagung yang dapat ditanami dengan banyak jenis tanaman
Adanya <i>Standard Operational Procedure</i> (SOP) dalam pengelolaan lingkungan hidup	Sistem pemerintahan yang kondusif
Pelaksanaan koordinasi internal yang berjalan dengan baik	Tersedianya peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan urusan pengelolaan lingkungan hidup
Laboratorium Lingkungan yang sudah terakreditasi ISO 17025: 2017	Misi Bupati Nomor 4 yang mendukung masalah pengelolaan lingkungan hidup
Adanya pengembangan kompetensi, penyuluhan, dan bimbingan teknis SDM	Pengelolaan kerjasama dengan mitra (masyarakat/swasta/asosiasi/kelompok) berjalan dengan baik
Pengembangan sistem pelayanan publik	Koordinasi dengan instansi lain (Kementerian/Badan/Pemprov/Pemda/OPD/1 embaga) berjalan dengan baik
	Pelaku usaha yang berkomitmen dengan penyelenggaraan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan
Weakness	Threat
Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM serta sarana prasarana yang mendukung kinerja	Pemahaman masyarakat terhadap wawasan pengelolaan lingkungan belum merata
Pengelolaan data dan informasi yang belum sepenuhnya dilakukan secara digital	Kurangnya kepedulian dan komitmen masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan
Kurangnya pemanfaatan teknologi dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup	Masih banyak pelaku usaha/industri yang belum menerapkan penyelenggaraan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan
Kurangnya inovasi dalam metode pengelolaan lingkungan hidup	Keterbatasan kewenangan dalam pelaksanaan rehabilitasi kerusakan lahan

Sumber: Hasil Analisis, 2021

Berdasarkan hasil analisis penyusunan *Strength*, *Weakness*, *Opportunity*, dan *Threats* (SWOT) yang didasarkan dari permasalahan, dan isu strategis terkait sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang menjamin pembangunan berkelanjutan. Langkah selanjutnya adalah dilakukan penyilangan antara kekuatan internal dan kekuatan eksternal, sehingga dapat menghasilkan beberapa strategi yang tepat dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan daerah. Dimana penyilangan antara

Strength dan *Opportunity* akan menghasilkan strategi (SO), penyilangan antara *Strength* dan *Threats* menghasilkan strategi (ST), penyilangan antara *Weakness* dan *Opportunity* menghasilkan strategi (WO) dan penyilangan antara *Weakness* dan *Threats* menghasilkan strategi (WT), berikut disajikan pada tabel:

Tabel 6.32 Pemetaan SWOT Silang dalam Pembangunan Daerah Sasaran 14: Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Yang Menjamin Pembangunan Berkelanjutan

Strategi (SO)	Strategi (WO)
1. Meningkatkan ketaatan usaha/ industri untuk mematuhi hukum lingkungan hidup	2. Mengoptimalkan Pembatasan Timbulan Sampah 3. Mengoptimalkan pendaur Ulangan Sampah 4. Meningkatkan program dan kegiatan serta pengoptimalkan koordinasi yang baik antar instansi terkait 1.
Strategi (ST)	Strategi (WT)
1. Meningkatkan upaya inventarisasi dan pemeliharaan sumber air 2. Meningkatkan persentase volume sampah yang terangkut serta cakupan wilayah yang terlayani 3. Meningkatkan pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah (B3) 4. Mengoptimalkan kembali terkait teknologi informasi yang ada	1. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk peduli kepada lingkungan hidup 2. Meningkatkan kesadaran pelaku usaha untuk melakukan pengelolaan lingkungan 3. Mengoptimalkan Pemberdayaan masyarakat yang berwawasan lingkungan

Sumber: Hasil Analisis, 2021

Tabel 6.33 Cascading Perencanaan Misi 5

MISI 5: Mewujudkan Pemerintahan yang Akuntabel, Profesional, dan Transparan yang Berorientasi pada Kepuasan Masyarakat

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Akhir (2023)	No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran (Impact)	Kondisi Awal (2019)	Kondisi Akhir (2023)	Perangkat Daerah					
5	Mewujudkan Pemerintahan yang Akuntabel, Profesional, dan Transparan yang Berorientasi pada Kepuasan Masyarakat	Mewujudkan Reformasi Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (good governance)	Indeks Reformasi Birokrasi	69.00	15	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Nilai SAKIP	75.83	80	Sekretariat Daerah					
										Inspektorat					
										BAPPEDA					
															Diskominfo
															Sekretariat DPRD
															BPKAD
										Bapenda					
										BKPSDM					
					16	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	3.93	4.10	Dispendukcapil					
														Dinas Kominfo	
														Dispersip	
														DPM PTSP	
										Kecamatan					

Sumber: Hasil Analisis, 2021

Tujuan 5: Mewujudkan Pemerintahan yang Akuntabel, Profesional, dan Transparan yang Berorientasi Pada Kepuasan Masyarakat

Sasaran 15: Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan

Merujuk sasaran berkenaan dengan meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan, maka strategi yang akan dibuat mengacu pada capaian data di tahun sebelumnya dan visi misi kepala daerah yang terpilih. Perlunya keterikatan ini agar strategi yang dibuat bisa sesuai dengan sasaran dan memberikan solusi yang tepat. Sebagai upaya menuju meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan, maka indikator yang tepat sebagai tolak ukur adalah SAKIP, Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah serta Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Setelah melakukan pengkajian sasaran pembangunan periode sebelumnya dan gambaran umum kondisi daerah dan capaian pembangunan sampai dengan periode awal perencanaan serta permasalahan pembangunan terpenting dan isu-isu strategis pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan, maka langkah selanjutnya adalah melakukan evaluasi untuk menentukan pilihan yang tepat terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah. Oleh karena itu, maka untuk menghasilkan strategi pembangunan yang tajam dan tepat menggunakan metode SWOT (kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*), dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Tabel 6.34 Pemetaan SWOT pada Sasaran 15: Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan

Strength	Opportunity
Tersedianya sistem dan prosedur kerja yang baku dalam pengelolaan sumber daya aparatur;	Keputusan. MENPAN tentang Penataan PNS;
Tersedianya pengelola Sumber Daya Aparatur yang memadahi;	Keputusan Kepala BKN No 46 A tentang Standar kompetensi Jabatan Struktural dan No 46 B tentang Evaluasi Jabatan;
Tersedianya uraian tugas yang jelas pada masing-masing fungsi;	Surat Gubernur tentang tes potensi untuk pejabat struktural;
Perbup Nomor 41 tahun 2018 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung	Permenpan 41 tahun 2018 Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah
Perbup Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tulungagung	Tuntutan tentang Standar pelayanan minimal (SPM) dalam Pelayanan Kepegawaian;
Perda No. 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung	Kebijakan kepegawaian secara nasional yang mensyaratkan diklat sebagai bagian sistem pembinaan pegawai;
Perbup 11-2018 tentang Tata Cara Seleksi JPTP secara Terbuka di Tulungagung	Banyaknya lembaga pendidikan dan pelatihan lokal maupun nasional yang bisa diajak kerjasama diindikasikan dengan Kerjasama penyelenggaraan Diklat dengan sistem pola kemitraan;

Perbub No 12 tahun 2017 tentang Perubahan atas peraturan Bupati No 11 tahun 2015 tentang Tata Cara Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kab Tulungagung	Kerjasama dalam proses pelayanan kepegawaian (pensiun, askes, dll);	
Perda No. 9 Tahun 2013 tentang Disiplin PNS	Banyaknya tawaran peningkatan SDM (diklat fungsional, beasiswa, pendidikan formal);	
Perbup 6-2020 tentang Tambahan Penghasilan PNS	Makin banyaknya lembaga pengawasan formal dan non formal.	
Perda No. 5-2013 ttg Keterbukaan Informasi Publik	Globalisasi (transparansi, akuntabel pengelolaan SDM).	
Perbub No 20 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung		
Perbub No 69 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Taata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tulungagung		
Kep Bupati No. 188-45-744-013-2019 ttg Pansel Terbuka JPTP Sekda		
Perda No. 9 Tahun 2013 tentang Disiplin PN		
Perbup 6-2020 tentang Tambahan Penghasilan PNS		
Kep Bupati No 188.45/233/013/2020 tentang Pejabat yang Dinilai, Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai Prestasi Kerja PNS di Lingkungan Pemkab Tulungagung		
Weakness		Threat
		Situasi kondisi politik nasional dan lokal (dalam komitmen pengembangan SDM Aparatur);
Belum tersedianya sarana dan prasarana SIMPEG yang memadai sebagai pengelola SDM Aparatur;	Komitmen pengembangan dan peningkatan kualitas SDM berupa anggaran belum sesuai (dibawah standar) dengan kektentuan SE. MENDAGRI. Dengan diindikasikan terbatasnya kuantitas pengiriman dan penyelenggaraan Diklat Teknis / Fungsional;	
Kurang tersedianya sarana dan prasarana diklat yang memadai;	Adanya Peraturan Perundang-undangan yang kurang mendukung terhadap pelaksanaan Diklat di Daerah;	
Masih terdapatnya pelanggaran disiplin PNS	Belum pulihnya kepercayaan masyarakat terhadap aparatur;	
Belum tersedianya analisa jabatan sebagai dasar perencanaan manajemen SDM;	Semakin kritisnya pola pikir masyarakat;	
	Pengelolaan Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur di daerah lain;	
	Belum optimalnya dampak diklat di masing-masing PD	
	Masih terdapatnya pelanggaran disiplin PNS	

Sumber: Hasil Analisis, 2021

Berdasarkan hasil analisis penyusunan *Strength*, *Weakness*, *Opportunity*, dan *Threats* (SWOT) yang didasarkan dari permasalahan, dan isu

strategis terkait sasaran meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan. Langkah selanjutnya adalah dilakukan penyilangan antara kekuatan internal dan kekuatan eksternal, sehingga dapat menghasilkan beberapa strategi yang tepat dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan daerah. Dimana penyilangan antara *Strength* dan *Opportunity* akan menghasilkan strategi (SO), penyilangan antara *Strength* dan *Threats* menghasilkan strategi (ST), penyilangan antara *Weakness* dan *Opportunity* menghasilkan strategi (WO) dan penyilangan antara *Weakness* dan *Threats* menghasilkan strategi (WT), berikut disajikan pada tabel:

Tabel 6.35 Pemetaan SWOT Silang dalam Pembangunan Daerah Sasaran 15: Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan

Strategi (SO)	Strategi (WO)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan pengelolaan data informasi kepegawaian 2. Meningkatkan kebijakan kepegawaian serta kerjasama dalam proses pelayanan kepegawaian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan Kesetaraan kompetensi ASN 2. Meningkatkan Evaluasi kinerja aparatur yang obyektif
Strategi (ST)	Strategi (WT)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan Penempatan pejabat yang sesuai kualifikasi dan kompetensi 2. Meningkatkan sarana dan prasarana yang memadai 3. Mengoptimalkan pengelolaan informasi, komunikasi publik dan SPBE 4. Mengoptimalkan pemanfaatan data statistik sektoral sebagai dasar perumusan kebijakan 5. Mengoptimalkan pengelolaan, pengawasan persandian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan pelaksanaan pengembangan kompetensi teknis, manajerial dan fungsional 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia

Sumber: Hasil Analisis, 2021

Sasaran 16: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Merujuk sasaran berkenaan dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik, maka strategi yang akan dibuat mengacu pada capaian data di tahun sebelumnya dan visi misi kepala daerah yang terpilih. Perlunya keterikatan ini agar strategi yang dibuat bisa sesuai dengan sasaran dan memberikan solusi yang tepat. Sebagai upaya menuju meningkatnya kualitas pelayanan publik, maka indikator yang tepat sebagai tolak ukur adalah Indeks Pelayanan Publik (IPP).

Setelah melakukan pengkajian sasaran pembangunan periode sebelumnya dan gambaran umum kondisi daerah dan capaian pembangunan sampai dengan periode awal perencanaan serta permasalahan pembangunan terpenting dan isu-isu strategis pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik, maka langkah selanjutnya adalah melakukan evaluasi untuk menentukan pilihan yang tepat terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah. Oleh karena itu, maka untuk menghasilkan strategi pembangunan yang tajam dan tepat menggunakan metode SWOT kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*), dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Tabel 6.36 Pemetaan SWOT pada Sasaran 16: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Strength	Opportunity
Ketersediaan peraturan perundang – undangan yang mengatur penyelenggaraan administrasi kependudukan	
Pengelolaan Administrasi Kependudukan yang sudah berbasis Teknologi Informatika (TI) dengan pengoprasian SIAK Tersedianya data base kependudukan dalam pengolahan pelayanan penyelenggaraan Administrasi Kependuduk akan mendeteksi adanya mobilisasi penduduk	Adanya tuntutan dari lembaga lain yang mensyaratkan dokumen kependudukan dalam pengurusan lain Dokumen kependudukan merupakan salah satu kebutuhan dasar penduduk dalam mengurus dokumen lainnya
Semua layanan administrasi kependudukan gratis	
Weakness	Threat
Masih terbatasnya pemahaman masyarakat akan pentingnya administrasi kependudukan	Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan tertibnya administrasi kependudukan
Terbatasnya tenaga / SDM dalam penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan	Adanya Stigma negatif yang muncul dari masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan yang dianggap rumit
Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung yang memadai dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan	Adanya perubahan regulasi terkait dokumen kependudukan

Sumber: Hasil Analisis, 2021

Berdasarkan hasil analisis penyusunan *Strength*, *Weakness*, *Opportunity*, dan *Threats* (SWOT) yang didasarkan dari permasalahan, dan isu strategis terkait sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik. Langkah selanjutnya adalah dilakukan penyilangan antara kekuatan internal dan kekuatan eksternal, sehingga dapat menghasilkan beberapa strategi yang tepat dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan daerah. Dimana penyilangan antara *Strength* dan *Opportunity* akan menghasilkan strategi (SO), penyilangan antara *Strength* dan *Threats* menghasilkan strategi (ST), penyilangan antara *Weakness* dan *Opportunity* menghasilkan strategi (WO) dan penyilangan antara *Weakness* dan *Threats* menghasilkan strategi (WT), berikut disajikan pada tabel:

Tabel 6.37 Pemetaan SWOT Silang dalam Pembangunan Daerah Sasaran 16: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Strategi (SO)	Strategi (WO)
Meningkatkan dan mengoptimalkan administrasi kependudukan yang berbasis teknologi informasi	Meningkatkan Layanan informasi terkait adminduk sudah tersosialisasikan secara menyeluruh kepada masyarakat
Strategi (ST)	Strategi (WT)
1. Meningkatkan Komitmen pemberi layanan dalam memberikan pelayanan adminduk 2. Meningkatkan kualitas Sarpras bagi pengguna layanan	Meningkatkan kesadaran dan pemberdayaan masyarakat dalam administrasi kependudukan yang berbasis teknologi informasi

Sumber: Hasil Analisis, 2021

Berdasarkan hasil analisis SWOT tersebut diatas, maka dapat diketahui strategi yang akan dilaksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung dalam mencapai Visi, Misi, Tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

Tabel 6.38 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Tulungagung

VISI: "TERWUJUDNYA MASYARAKAT TULUNGAGUNG YANG SEJAHTERA, MANDIRI, BERDAYA SAING DAN BERAKHLAK MULIA"			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Misi 1: Mewujudkan Keterjangkauan Akses Pembangunan Sumberdaya Manusia yang Berkualitas, Inklusif dan Berdaya Saing			
Tujuan 1: Meningkatkan Akses Pendidikan, Kesehatan dan Kebutuhan Dasar Lainnya yang Berkualitas, Inklusif dan Berdaya Saing			
	Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Strategi 1: 1. Dukungan Anggaran untuk peningkatan tenaga pendidik dan kependidikan serta peserta didik 2. Penyediaan tenaga pendidik dan kependidikan yang bermutu dan berkualitas 3. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan olahraga 4. Peningkatan kapasitas tenaga pendidikan dan kependidikan	Arah Kebijakan 1: 1. Peningkatan Akses dan Pemerataan Mutu Pendidikan 2. Pemberlakuan Sistem Zonasi penerimaan peserta didik baru SD/SMP 3. Peningkatan Penuntasan Wajib Belajar 12 Tahun 4. Peningkatan kualitas Pendidikan Inklusi 5. Penyediaan tenaga pendidik dan kependidikan yang bermutu dan berkualitas 6. Peningkatan kesejahteraan Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) 7. Pemanfaatan dana untuk peningkatan tenaga pendidik dan kependidikan serta peserta didik 8. Melakukan kegiatan evaluasi di setiap sekolah 9. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan olahraga 10. Peningkatan pelatihan dalam pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan
	Sasaran 2 Meningkatnya Kualitas Kesehatan	Strategi 2: 1. Peningkatan pelayanan kesehatan 2. Optimalisasi upaya penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk 3. Peningkatan pemberdayaan perempuan	Arah Kebijakan 2: 1. Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan dan KB 2. Peningkatan Fasilitas Kesehatan dengan nilai UKP dan UKM dalam kategori baik 3. Peningkatan pengawasan/pengendalian sediaan farmasi alat kesehatan, makanan minuman 4. Peningkatan Cakupan Rumah Tangga Sehat 5. Optimalisasi upaya penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk 6. Optimalisasi upaya peningkatan pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan keluarga 7. Penguatan partisipasi dan pemberdayaan perempuan dalam kehidupan sosial masyarakat

VISI: "TERWUJUDNYA MASYARAKAT TULUNGAGUNG YANG SEJAHTERA, MANDIRI, BERDAYA SAING DAN BERAKHLAK MULIA"			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			<ul style="list-style-type: none"> 8. Optimalisasi jejaring kerja sama dengan stakeholder dan mitra kerja dalam promosi dan konseling kespro serta pembangunan keluarga 9. Peningkatan pelayanan kesehatan serta pemberdayaan masyarakat 10. Penguatan Kebijakan Pengarusutamaan Gender 11. Peningkatan kompetensi SDM yang berkualitas 12. Peningkatan jumlah tenaga kesehatan 13. Peningkatan Gizi dan Kebutuhan Pangan
	<p>Sasaran 3 Meningkatnya Daya Beli Masyarakat Terhadap Komoditas Bahan Pokok</p>	<p>Strategi 3:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Diversifikasi Pangan 2. Stabilisasi harga dan jaminan stok barang kebutuhan pokok dan kelancaran distribusinya 	<p>Arah Kebijakan 3:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Stabilisasi harga pangan 2. Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan 3. Optimalisasi penggunaan Bahan Pengendali Hama Penyakit 4. Menjaga keseimbangan antara ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan 5. Optimalisasi Peran Satu Desa Satu Lumbung 6. Peningkatan Fasilitas Perdagangan dalam Standarisasi dan Perlindungan Konsumen 7. Peningkatan koordinasi dan pemantauan harga bahan pokok dan bahan penting lainnya sampai dengan pengendalian harga 8. Penambahan stok bahan pokok dan bahan penting lainnya agar sesuai dengan jumlah permintaan 9. Stabilisasi harga dan jaminan stok barang kebutuhan pokok dan kelancaran distribusinya 10. Peningkatan Ketahanan Pangan terhadap kebutuhan masyarakat 11. Peningkatan koordinasi yang baik dalam ketahanan pangan 12. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia
	<p>Sasaran 4 Meningkatnya keadilan dan Kesetaraan Gender</p>	<p>Strategi 4:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Pengarusutamaan gender dalam pembangunan 2. Peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang ekonomi, politik, dan pemerintahan 	<p>Arah Kebijakan 4:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Keberpihakan terhadap perempuan, anak, serta peningkatan perlindungan keamanan masyarakat 2. Penurunan angka kekerasan terhadap perempuan 3. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak perempuan dan hak anak 4. Peningkatan komitmen pemerintah dalam kualitas hidup perempuan serta ketersediaan anggaran

VISI: “TERWUJUDNYA MASYARAKAT TULUNGAGUNG YANG SEJAHTERA, MANDIRI, BERDAYA SAING DAN BERAKHLAK MULIA”			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			5. Mengoptimalkan sosialisasi dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan 6. Peningkatan koordinasi dan kepedulian dalam kesetaraan gender 7. Peningkatan sosialisasi serta koordinasi dalam penyuluhan dan pemberdayaan perempuan
Misi 2: Mendorong Penguatan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Kearifan Lokal dan Potensi Daerah			
Tujuan 2: Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif Dan Berkelanjutan			
	Sasaran 5 Meningkatnya Ekonomi Kerakyatan	Strategi 5: Peningkatan dan pengembangan usaha mikro yang mempunyai nilai ekonomi tinggi	Arah Kebijakan 5: <ol style="list-style-type: none"> 1. Perluasan akses pemodalannya bagi UMKM 2. Peningkatan kesadaran kinerja pengelola koperasi 3. Peningkatan intensitas pembinaan dan pendampingan bagi pelaku usaha 4. Peningkatan fasilitasi pemerintah daerah terhadap program pemerintah pusat 5. Peningkatan dan mengoptimalkan pembangunan di semua aspek 6. Peningkatan pemanfaatan teknologi dalam peningkatan manajemen koperasi dan usaha mikro 7. Peningkatan koordinasi dan komunikasi serta peningkatan kualitas dan kuantitas SDM 8. Peningkatan koordinasi dan komunikasi serta pemanfaatan teknologi dan informasi 9. pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif 10. Peningkatan pemasaran pariwisata melalui media cetak dan elektronik serta mengadakan atraksi wisata
	Sasaran 6 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	Strategi 6: Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui pengoptimalan Potensi Sektor-sektor Unggulan Daerah	Arah Kebijakan 6: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan dan penguatan sektor unggulan/potensial yang menunjang pertumbuhan ekonomi dan perluasan lapangan kerja 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Tera/Tera Ulang 3. Peningkatan komitmen dari pelaku usaha 4. Peningkatan kepercayaan diri sebagai pelaku usaha ekspor 5. Deregulasi kebijakan terkait pangan 6. Optimalisasi stabilisasi harga dan jaminan stok barang kebutuhan pokok

VISI: “TERWUJUDNYA MASYARAKAT TULUNGAGUNG YANG SEJAHTERA, MANDIRI, BERDAYA SAING DAN BERAKHLAK MULIA”			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			<ul style="list-style-type: none"> 7. Optimalisasi kelancaran distribusi barang 8. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana sektor pertanian dan sektor perikanan 9. Optimalisasi monitoring dalam perijinan usaha 10. Penyederhanaan proses dalam mengurus perijinan di bidang perdagangan 11. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan hasil pertanian 12. Pemberian bantuan input produksi setelah terjadinya titik balik dari penurunan ekonomi akibat pandemi Covid-19 13. fasilitasi pendanaan di hilangkan karena PD tidak memfasilitasi terkait pendanaan (pemberian modal usaha) 14. Penguatan pasca panen dan pemasaran
	Sasaran 7 Meningkatnya Realisasi Investasi	Strategi 7: <ul style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Nilai Investasi di Kabupaten Tulungagung 2. Peningkatan Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal 	Arah Kebijakan 7: <ul style="list-style-type: none"> 1. Penyelesaian pengaduan layanan tepat waktu 2. Peningkatan Nilai Investasi di Kabupaten Tulungagung 3. Optimalisasi potensi-potensi unggulan di daerah 4. Peningkatan Pemenuhan Komitmen Perijinan 5. Pelayanan perijinan berbasis elektronik 6. Pengembangan sektor infrastruktur dan tetap mempertahankan reformasi kebijakan yang sudah dikerjakan sebelumnya 7. Peningkatan Pelayanan Perijinan dan Investasi Penanaman Modal 8. Kemudahan Mendapatkan Perijinan 9. Peningkatan kualitas SDM Penanaman Modal
Misi 3: Pergentasan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Dalam Mewujudkan Ketentraman, Rasa Aman, Serta Ketertiban Masyarakat			
Tujuan 3: Mempercepat Penurunan Kemiskinan Untuk Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Aman dan Tertib			
	Sasaran 8 Terjaminnya Perlindungan Sosial Masyarakat	Strategi 8: Peningkatan dan pemerataan kesejahteraan sosial dan keadilan sosial dengan menjamin perluasan cakupan layanan bagi PPKS	Arah Kebijakan 8: <ul style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi perlindungan sosial untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat 2. Peningkatan koordinasi dengan Kementerian Sosial, Dinas Sosial Provinsi dan stakeholder terkait 3. Optimalisasi upaya untuk memotivasi operator data di desa/kelurahan agar lebih aktif

VISI: “TERWUJUDNYA MASYARAKAT TULUNGAGUNG YANG SEJAHTERA, MANDIRI, BERDAYA SAING DAN BERAKHLAK MULIA”			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			<p>dalam melakukan verifikasi dan validasi data</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Peningkatan komitmen dari Potensi Sumber kesejahteraan sosial 5. Peningkatan kualitas pelayanan yang efektif dan tertib 6. Peningkatan kualitas SDM yang sesuai kualifikasi 7. Optimalisasi pemenuhan Hak-Hak dasar PPKS
	Sasaran 9 Meningkatnya Kesempatan Kerja Masyarakat	Strategi 9: <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kerjasama dengan pihak pengusaha/industri dalam peningkatan penyerapan tenaga kerja 2. Peningkatan ketrampilan calon tenaga kerja sesuai pangsa kerja 	Arah Kebijakan 9: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan pelatihan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar, bagi masyarakat usia Angkatan kerja 2. Peningkatan kerjasama dengan pihak pengusaha/industri dalam peningkatan penyerapan tenaga kerja 3. Peningkatan SDM tenaga kerja yang kompeten 4. Penerapan peraturan tenaga kerja yang baik 5. Perluasan lapangan pekerjaan
	Sasaran 10 Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mewujudkan Pembangunan	Strategi 10: Peningkatan kualitas perencanaan desa serta pemberdayaan masyarakat desa dalam pembangunan	Arah Kebijakan 10: <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kapasitas aparatur perangkat daerah 2. Peningkatan pemberdayaan masyarakat desa 3. Peningkatan perencanaan dalam segala bidang aspek pemberdayaan dengan baik 4. Peningkatan perencanaan desa serta pemberdayaan masyarakat desa
	Sasaran 11 Meningkatnya Rasa Aman di Masyarakat	Strategi 11: Optimalisasi penegakan hukum dalam mengatasi tuntutan masyarakat pada ketertiban dan ketentraman	Arah Kebijakan 11: <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Koordinasi lintas sektor dan antar stakeholder 2. Peningkatan Komitmen yang tinggi dari anggota Satpol PP 3. Optimalisasi penegakan hukum yang baik dalam mengatasi tuntutan masyarakat pada ketertiban dan ketentraman 4. Optimalisasi sosialisasi dan binaan dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat 5. Peningkatan sarana dan prasarana yang ada 6. Peningkatan kompetensi tenaga yang professional 7. Penguatan mitigasi /pengurangan risiko bencana
	Sasaran 12 Meningkatnya toleransi pada kehidupan masyarakat	Strategi 12: Peningkatan Pendidikan dan pemberdayaan politik di masyarakat	Arah Kebijakan 12: <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pengetahuan dan persepsi masyarakat terhadap penyelenggaraan agenda politik 2. Peningkatan Pendidikan dan pemberdayaan politik dalam masyarakat

VISI: “TERWUJUDNYA MASYARAKAT TULUNGAGUNG YANG SEJAHTERA, MANDIRI, BERDAYA SAING DAN BERAKHLAK MULIA”			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			<ol style="list-style-type: none"> 3. Peningkatan peran kelembagaan dan SDM pegawai yang responsif, akuntabel dan inovatif 4. Peningkatan pendidikan dan pelatihan ASN 5. Peningkatan kualitas pelayanan dalam menggunakan teknologi informasi
Misi 4: Membangun Infrastruktur Wilayah Pinggiran Yang Berkualitas Dalam Mewujudkan Pemerataan Pembangunan			
Tujuan 4: Meningkatkan Infrastruktur Wilayah Yang Merata, Berkualitas Dan Berkelanjutan			
	Sasaran 13 Meningkatnya Infrastruktur Dasar Yang Merata	Strategi 13: Peningkatan pembangunan infrastruktur dasar yang berorientasi terhadap pemerataan pembangunan	Arah Kebijakan 13: <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan upaya pembatasan beban kendaraan yang melalui ruas jalan 2. Peningkatan perbaikan jalan dan pembangunan saluran drainase pengering 3. Pembangunan, peningkatan dan perluasan sistem penyediaan air minum secara tepat berdasarkan data skala prioritas 4. Peningkatan upaya pelestarian sumber air 5. Pemerataan akses terhadap layanan sumber air minum dan sanitasi layak berkelanjutan 6. Optimalisasi pembinaan pengelola air minum perdesaan (HIPPAM) 7. Peningkatan pembangunan pengelolaan air limbah pada kawasan rawan sanitasi 8. Optimalisasi bantuan pembangunan jamban keluarga kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) 9. Rehabilitasi rumah tidak layak huni dan rumah korban bencana 10. Pembangunan, Peningkatan dan rehabilitasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) 11. Peningkatan pembangunan infrastruktur permukiman berdasarkan skala prioritas 12. Melakukan pemeliharaan rutin/berkala serta peningkatan jalan 13. Peningkatan akses dan kualitas angkutan dan sarpras transportasi 14. Peningkatan panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik 15. Peningkatan kualitas jaringan irigasi
	Sasaran 14 Meningkatnya Kualitas	Strategi 14:	Arah Kebijakan 14: <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan

VISI: “TERWUJUDNYA MASYARAKAT TULUNGAGUNG YANG SEJAHTERA, MANDIRI, BERDAYA SAING DAN BERAKHLAK MULIA”			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Lingkungan Hidup Menjamin Pembangunan Berkelanjutan	Meningkatkan kesadaran dan ketaatan untuk memelihara kualitas lingkungan hidup	<ol style="list-style-type: none"> 2. Peningkatan upaya inventarisasi dan pemeliharaan sumber air 3. Optimalisasi pengelolaan sampah 4. Optimalisasi penanganan sampah melalui perencanaan volume sampah yang terangkut serta cakupan wilayah yang terlayani 5. Peningkatan pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah (B3) 6. Peningkatan kesadaran pelaku usaha untuk melakukan pengelolaan lingkungan 7. Peningkatan ketaatan usaha/ industri untuk mematuhi hukum lingkungan hidup 8. Optimalisasi Pemberdayaan masyarakat yang berwawasan lingkungan 9. Peningkatan kualitas ruang terbuka hijau (RTH)
Misi 5: Mewujudkan Pemerintahan yang Akuntabel			
Tujuan 5: Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik			
	Sasaran 15 Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Strategi 15: Pengembangan sistem pemerintahan yang terintegratif melalui peningkatan reformasi birokrasi	Arah Kebijakan 15: <ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi penyusunan kebijakan daerah 2. Peningkatan penelitian dan pengembangan daerah sebagai bahan perumusan kebijakan dan peningkatan inovasi daerah 3. Optimalisasi Penempatan pejabat yang sesuai kualifikasi dan kompetensi 4. Optimalisasi Kesetaraan kompetensi ASN 5. Peningkatan Evaluasi kinerja aparatur yang obyektif 6. Optimalisasi pelaksanaan pengembangan kompetensi teknis, manajerial dan fungsional 7. Peningkatan kebijakan kepegawaian, kerjasama dalam proses pelayanan kepegawaian serta pengoptimalan pengelolaan data informasi kepegawaian 8. Peningkatan kebijakan kemandirian pendapatan daerah, serta peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah 9. Peningkatan kualitas sumber daya manusia 10. Optimalisasi pengelolaan informasi, komunikasi publik dan SPBE

VISI: "TERWUJUDNYA MASYARAKAT TULUNGAGUNG YANG SEJAHTERA, MANDIRI, BERDAYA SAING DAN BERAKHLAK MULIA"			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			11. Optimalisasi pemanfaatan data statistik sektoral sebagai dasar perumusan kebijakan 12. Optimalisasi pengelolaan, pengawasan persandian 13. Peningkatan kemandirian dan Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
	Sasaran 16 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Strategi 16: Peningkatan kapasitas ASN pemberi layanan dan kualitas layanan publik di segala bidang untuk kesejahteraan masyarakat	Arah Kebijakan 16: 1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis IT 2. Peningkatan Komitmen pemberi layanan dalam memberikan pelayanan adminduk 3. Peningkatan kualitas Sarpras bagi pengguna layanan 4. Peningkatan Layanan informasi terkait adminduk sudah tersosialisasikan secara menyeluruh kepada masyarakat 5. peningkatan dan mengoptimalkan administrasi kependudukan yang berbasis teknologi informasi 6. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam administrasi kependudukan yang berbasis teknologi informasi

Sumber: Hasil Analisis, 2021

6.2 Arah Kebijakan

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir, atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan misi pembangunan. Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi misi kepala daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi. Berdasarkan deskripsi tersebut, arah kebijakan sebagaimana dimaksud diterangkan dalam bentuk tabel berikut ini:

Tabel 6.39 Fokus Pembangunan Lima Tahunan

2019	2020	2021	2022	2023
Penerapan Teknologi Informasi dalam Tata	Penguatan reformasi birokrasi, optimalisasi	Stabilisasi penerapan <i>E-Governance</i> pada system	Penguatan pertumbuhan sektor unggulan	Stabilisasi Kemandirian dan Daya Saing

2019	2020	2021	2022	2023
Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	penguasaan IPTEK dan pembangunan sarana – prasarana pelayanan dasar dan infrastruktur perekonomian pendukung sektor unggulan daerah	tata Kelola pemerintahan, Optimalisasi akses, Kualitas dan kuantitas pelayanan dasar, serta penguatan pertumbuhan ekonomi	daerah dan optimalisasi pemberdayaan masyarakat dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi	Perekonomian Daerah Serta Penguatan Kesejahteraan Masyarakat

Sumber: Hasil Analisis, 2021

1. Tahun 2019

- a) Mengembangkan sistem teknologi informasi pemerintahan yang terintegratif melalui peningkatan reformasi birokrasi, serta mengembangkan unsur perencanaan, penganggaran dan pengendalian yang terpadu;
- b) Meningkatkan kualitas layanan publik di segala bidang untuk kesejahteraan masyarakat; dan
- c) Mewujudkan kesejahteraan sosial dan keadilan sosial dengan menjamin perluasan cakupan layanan bagi PPKS.

2. Tahun 2020

- a) Mengembangkan sistem teknologi informasi pemerintahan yang terintegratif melalui peningkatan reformasi birokrasi, serta mengembangkan unsur perencanaan, penganggaran dan pengendalian yang terpadu;
- b) Meningkatkan kualitas layanan publik di segala bidang untuk kesejahteraan masyarakat;
- c) meningkatkan akses pada layanan pendidikan termasuk memastikan sertifikasi tenaga pendidik;
- d) Memadukan kader lingkungan dan kesehatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan kesehatan;
- e) Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berorientasi terhadap pemerataan pembangunan di wilayah selatan, memunculkan pusat pertumbuhan ekonomi baru.

3. Tahun 2021

- a) Meningkatkan kualitas layanan publik di segala bidang untuk kesejahteraan masyarakat;
- b) Meningkatkan akses pada layanan pendidikan termasuk memastikan sertifikasi tenaga pendidik serta meningkatkan kapasitas daya saing kepemudaan;
- c) Memadukan kader lingkungan dan kesehatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan kesehatan serta meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender;

- d) Meningkatkan kualitas belanja masyarakat baik pada sektor pangan dan non pangan melalui stabilisasi perekonomian Kabupaten Tulungagung dan penguatan sektor strategis Kabupaten Tulungagung;
- e) Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berorientasi terhadap pemerataan pembangunan di wilayah selatan, memunculkan pusat pertumbuhan ekonomi baru dengan tetap menjaga keberlanjutan dan kelestarian alam;
- f) Memperkuat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing melalui pengoptimalan potensi sektor-sektor unggulan daerah serta keunggulan UMKM serta IKM;
- g) Mengoptimalkan kemandirian pendapatan daerah melalui pengoptimalan potensi pajak, peningkatan kapasitas pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah, dan pengembangan destinasi pariwisata;
- h) Meningkatkan akses penanaman modal untuk meningkatkan realisasi investasi daerah
- i) Meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui pemerataan pembangunan wilayah pinggiran, peningkatan kualitas angkatan kerja dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja.
- j) Mewujudkan kesejahteraan sosial dan keadilan sosial dengan menjamin perluasan cakupan layanan bagi PPKS.
- k) Mewujudkan Ketentraman, Rasa Aman, Serta Ketertiban Masyarakat
- l) Stabilisasi penerapan sistem teknologi informasi pemerintahan yang terintegratif melalui peningkatan reformasi birokrasi, serta mengembangkan unsur perencanaan, penganggaran dan pengendalian yang terpadu;

4. Tahun 2022

- a) Memperkuat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing melalui pengoptimalan potensi sektor-sektor unggulan daerah serta keunggulan UMKM serta IKM.
- b) Pendapatan daerah melalui pengoptimalan potensi pajak, peningkatan kapasitas pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah, dan pengembangan destinasi pariwisata
- c) Meningkatkan akses penanaman modal untuk meningkatkan realisasi investasi daerah
- d) Meningkatkan afirmasi pemerintah terhadap program yang memberdayakan masyarakat dalam pembangunan
- e) Meningkatkan kualitas layanan publik di segala bidang untuk kesejahteraan masyarakat;
- f) Meningkatkan akses pada layanan pendidikan termasuk memastikan sertifikasi tenaga pendidik serta meningkatkan kapasitas daya saing kepemudaan
- g) Memadukan kader lingkungan dan kesehatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan kesehatan, serta meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender;

- h) Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berorientasi terhadap pemerataan pembangunan di wilayah selatan, memunculkan pusat pertumbuhan ekonomi baru
- i) Meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui pemerataan pembangunan wilayah pinggiran, peningkatan kualitas angkatan kerja dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja.
- j) Stabilisasi penerapan sistem teknologi informasi pemerintahan yang terintegratif melalui peningkatan reformasi birokrasi, serta mengembangkan unsur perencanaan, penganggaran dan pengendalian yang terpadu;
- k) Mewujudkan kesejahteraan sosial dan keadilan sosial dengan menjamin perluasan cakupan layanan bagi PPKS.

5. Tahun 2023

- a) Memperkuat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing melalui pengoptimalan potensi sektor-sektor unggulan daerah serta keunggulan UMKM serta IKM;
- b) Mengoptimalkan kemandirian pendapatan daerah melalui pengoptimalan potensi pajak, peningkatan kapasitas pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah, dan pengembangan destinasi pariwisata;
- c) Meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui pemerataan pembangunan wilayah pinggiran, peningkatan kualitas angkatan kerja dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja; dan
- d) Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berorientasi terhadap pemerataan pembangunan di wilayah selatan, memunculkan pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Tabel 6.40 Program Pembangunan Prioritas Daerah disertai Pagu Indikatif Kabupaten Tulungagung

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Targ et	R p	Targ et	R p	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Misi 1: Mewujudkan Keterjangkauan Akses Pembangunan Sumberdaya Manusia yang Berkualitas, Inklusif, dan Berdaya Saing																
	Tujuan 1: Meningkatkan Akses Pendidikan, Kesehatan, Dan Kebutuhan Dasar Lainnya Yang Berkualitas, Inklusif, Dan Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Manusia	72.62					72.87	418,322,505,5 00	73.30	462,654,617,6 50	73.50	504,299,195,6 00	73.50	1,385,276,318, 750	
	Sasaran 1.1: Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Indeks Pendidikan	0.647					0.640	232,967,000,0 00	0.649	253,033,000,0 00	0.650	275,844,000,0 00	0.650	761,844,000,0 0	
1.01. 02	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi sekolah usia 7-12 tahun	99.74					99.90	232,000,000,0 00	100.00	252,000,000,0 00	100.00	274,680,000,0 00	100.00	758,680,000,0 0	Dinas Pendidikan , Pemuda dan Olahraga
		Angka Partisipasi sekolah usia 13-15 tahun	98.91					99.5		100.00		100.00	100.00			
2.19. 02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	20.00					65.00	546,000,000	70.00	600,000,000	75.00	654,000,000	100.00	1,800,000,000	
2.23. 02	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase perpustakaan yang memenuhi standar perpustakaan	12.00					12.00	421,000,000	20.00	433,000,000	25.00	510,000,000	25.00	1,364,000,000	Dinas Perpustaka an dan Kearsipan
	Sasaran 1.2: Meningkatnya Kualitas Kesehatan	Indeks Kesehatan	0.832					0.834	179,484,505,5 00	0.836	203,083,777,6 50	0.839	221,361,800,0 00	0.839	603,930,083,15 0	
1.02. 02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya	Presentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Nilai Kinerja UKP dan UKM dalam Kategori Baik	n/a					15.00	167,794,883,4 43	18.00	236,814,148,2 86	20.00	266,023,465,1 72	20.00	670,632,496,90 1	Dinas Kesehatan

**Perubahan RPJMD
Kabupaten Tulungagung 2018-2023**

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Targ et	R p	Targ et	R p	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Kesehatan Masyarakat																
1.02.04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase Sarana Produksi dan Distribusi sediaan, Alat Kesehatan, makanan minuman sesuai standart yang dipersyaratkan	n/a					75.00	968,476,000	75.00	506,145,200	80.00	556,759,720	80.00	2,031,380,920		
1.02.05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan pengembangan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	n/a					74.58	2,516,029,500	81.00	2,767,632,450	81.00	3,044,395,695	81.00	8,328,057,645		
2.14.03	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern contraceptive prevalence rate/mCPR)	61.00					62.00	8,000,000,000	63.00	8,720,000,000	64.00	9,504,800,000	64.00	26,224,800,000		Dinas KB PPPA
2.14.04	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Usia Kawin pertama (UKP) dibawah 20 tahun	12.21					12.11	1,000,000,000	12.01	1,090,000,000	12.00	1,188,000,000	12.00	3,278,000,000		
	Sasaran 1.3: Meningkatkan Daya Beli Masyarakat Terhadap Komoditas Bahan Pokok	Indeks Purchasing Power Parity (PPP)	0.722					0.725	4,295,000,000	0.726	4,820,000,000	0.728	5,220,000,000	0.728	14,335,000,000		
2.09.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Persentase pemanfaatan infrastruktur pangan	100.00					100.00	910,581,000	100.00	957,000,000	100.00	1,005,000,000	100.00	2,872,581,000		Dinas Ketahanan Pangan
2.09.03	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Peningkatan Cadangan Pangan	10.00					15.00	712,000,000	20.00	849,000,000	25.00	893,000,000	25.00	2,454,000,000		

**Perubahan RPJMD
Kabupaten Tulungagung 2018-2023**

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Jumlah konsumsi energi	2150.00					2150.00		2150.00		2150.00		2150.00			
2.09.04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Intervensi Daerah Rawan Pangan	100.00					100.00	751,000,000	100.00	989,000,000	100.00	1,039,000,000	100.00	2,779,000,000		
3.30.04	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase komoditi yang terjaga stabilitasnya	76.00					75.00	85,000,000	75.00	200,000,000	75.00	200,000,000	75.00	485,000,000	Disperindag	
	Sasaran 1.4: Meningkatnya Keadilan dan Kesenjangan Gender	Indeks Pembangunan Gender	95.63					95.50	1,576,000,000	95.53	1,717,840,000	95.55	1,873,395,600	95.55	5,167,235,600		
2.08.02	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Pelaksanaan Pengarusutamaan gender pada perangkat Daerah	100.00					100.00	496,000,000	100.00	540,640,000	100.00	589,297,600	100.00	1,625,937,600	Dinas KB, PPA	
2.08.03	Program Perlindungan Perempuan	Persentase Pengaduan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang tertangani	100.00					100.00	350,000,000	100.00	381,500,000	100.00	415,835,000	100.00	1,147,335,000		
2.08.06	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Pemenuhan Hak Anak	100.00					100.00	230,000,000	100.00	250,700,000	100.00	273,263,000	100.00	753,963,000		
2.08.07	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Pengaduan Kasus Perlindungan Khusus Anak yang tertangani	100.00					100.00	500,000,000	100.00	545,000,000	100.00	595,000,000	100.00	1,640,000,000		
Misi 2: Mendorong Penguatan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Kearifan Lokal dan Potensi Daerah																	
	Tujuan 2: Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi	5.32					3.00	48,569,622,550	3.65	55,214,070,255	4.05	59,195,071,398	4.05	162,978,764,203		
	Sasaran 2.1: Meningkatnya Ekonomi Kerakyatan	Persentase Koperasi Berkualitas	n/a					31.2	14,969,181,000	31.6	19,083,290,000	31.9	20,826,442,500	31.9	54,878,913,500		

**Perubahan RPJMD
Kabupaten Tulungagung 2018-2023**

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ <i>impact</i> / <i>outcome</i>)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Targ et	R p	Targ et	R p	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Spending of Money	n/a					100M		110M		120M		120M		
		Persentase Usaha Mikro Berdaya Saing	n/a					2.25		2.27		2.29		2.29		
2.17.04	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase Koperasi yang Meningkatkan kesehatannya	9.38					12.43	150,000,000	13.62	200,000,000	14.78	300,000,000	14.78	650,000,000	Dinas Koperasi dan UKM
2.17.03	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif	51.79					52.50	200,000,000	53	250,000,000	53.50	300,000,000	53.50	750,000,000	
2.17.06	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi yang meningkat Volume Usahanya	30.68					33.33	460,000,000	34.48	450,000,000	35.62	500,000,000	35.62	1,350,000,000	
2.17.05	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase SDM Pengelola Koperasi bersertifikat	33.64					40.91	700,000,000	44.55	750,000,000	48.18	800,000,000	48.18	2,250,000,000	
2.17.07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Usaha Mikro berizin usaha yang meningkat omsetnya	16.06					17.56	600,000,000	18.27	700,000,000	18.94	800,000,000	18.94	2,100,000,000	
2.17.08	Program Pengembangan UMKM	Persentase Usaha Mikro berizin usaha yang naik kelas	1.16					1.42	400,000,000	1.55	450,000,000	1.62	500,000,000	1.62	1,350,000,000	
3.26.02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Destinasi Wisata yang dikembangkan	37.50					12.50	6,425,000,000	25.00	9,619,250,000	12.50	10,484,982,500	50.00	26,529,232,500	
3.26.03	Program Pemasaran Pariwisata	Angka Kunjungan Wisata	900,000					750,000	1,200,000,000	800,000	1,308,000,000	900,000	1,425,720,000	2,450,000	3,933,720,000	
2.22.02	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dikembangkan	10.00					30.00	5,400,000,000	30.00	5,886,000,000	40.00	6,415,740,000	100.00	17,701,740,000	
	Sasaran 2.2:	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri	6.80					3.94	33,190,979,550	4.51	35,668,318,255	4.32	37,896,166,898	4.32	106,755,464,703	

**Perubahan RPJMD
Kabupaten Tulungagung 2018-2023**

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ <i>impact</i> / <i>outcome</i>)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Targ et	R p	Targ et	R p	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	5.80					6.87		4.99		4.76		4.76		
		Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	1.83					1.51		2.23		1.71		1.71		
3.27. 02	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Pemanfaatan sarana pertanian	100.00					100.00	3,726,225,000	100.00	4,427,127,923	100.00	4,825,569,436	100.00	12,978,922,359	Dinas Pertanian
3.27. 03	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Pemanfaatan Prasarana Pertanian yang berfungsi	100.00					100.00	13,118,805,000	100.00	15,586,452,221	100.00	16,989,232,920	100.00	45,694,490,141	
3.27. 02	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Peningkatan Populasi Ternak	2.00					2.00	1,070,000,000	2.00	1,585,000,000	2.00	1,664,250,000	2.00	4,319,250,000	
3.27. 03	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Daya Guna Prasarana Peternakan	80.00					50.00	100,000,000	75.00	4,459,015,000	80	4,681,965,750	80	9,240,980,750	Dinas Peternakan
3.27. 04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Status Kesehatan Hewan	80.00					81.00	1,895,000,000	82.00	2,325,000,000	82.00	2,441,250,000	82.00	10,110,000,000	
		Presentase Jaminan Mutu Dan Keamanan Produk Hewan	80.00					81.00		82.00		82.00		82.00		
3.25. 03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Nilai Produksi Usaha Perikanan Tangkap	35,754,007,000					36,469,087,140	319,000,000	37,198,468,883	334,866,000	37,942,438,260	351,609,300	111,609,994,283	1,005,475,300	
3.25. 04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Nilai Produksi Usaha Perikanan Budidaya	363,816,172,455					374,730,657,629	2,063,512,500	385,972,577,358	2,376,688,125	397,551,754,678	2,495,522,531	1,158,254,989,665	6,935,723,156	Dinas Perikanan
3.25. 06	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Nilai Produksi Usaha Pengolahan Hasil Perikanan	220,178,461,757					226,988,104,904	820,000,000	232,662,807,527	961,000,000	238,479,377,715	1,009,050,000	698,130,290,147	4,891,580,820	

**Perubahan RPJMD
Kabupaten Tulungagung 2018-2023**

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Targ et	R p	Targ et	R p	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.31.02	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase peningkatan IKM yang terbina	10.00					2.00	1,294,999,700	3.00	1,400,000,000	4.00	1,700,000,000	4.00	4,394,999,700	Disperindag
3.30.03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pasar dengan kondisi baik	75.00					75.20	3,768,975,375	75.30	4,000,000,000	75.40	4,500,000,000	75.40	12,268,975,475	
3.30.06	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase peningkatan metrologi legal	2.00					2.50	150,000,000	3.00	350,000,000	3.50	400,000,000	3.50	900,000,000	
3.30.07	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase peningkatan pemasaran produk dalam negeri	2.00					2.00	99,999,800	3.00	350,000,000	4.00	550,000,000	4.00	999,999,800	
	Sasaran 2.3: Meningkatkan Realisasi Investasi	Realisasi Investasi PMA dan PMDN	n/a					300 Milyar	409,462,000	350 Milyar	462,462,000	400 Milyar	472,462,000	400 Milyar	1,344,386,000	
2.18.02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Nilai Investasi	800 Milyar					810 Milyar	50,000,000	820 Milyar	90,000,000	830 Milyar	100,000,000	830 Milyar	240,000,000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Pelaksanaan Penanaman Modal yang Terkendali	30.00					40.00	400,000,000	45.00	400,000,000	50.00	400,000,000	50.00	1,200,000,000	
Misi 3: Pengentasan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial dalam Mewujudkan Ketentraman, Rasa Aman, Serta Ketertiban Masyarakat																
	Tujuan 3: Mempercepat Penurunan Kemiskinan Untuk Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Aman dan Tertib	Tingkat Kemiskinan	6.74					7.55	15,640,000,000	7.31	17,052,000,000	7.11	18,544,000,000	7.11	51,236,000,000	
		Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMAS)	0.673					0.718		0.719		0.720		0.720		
	Sasaran 3.1: Terjaminnya Perlindungan	Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan	0.75					0.3	4,309,000,000	0.5	4,753,000,000	0.7	5,180,000,000	0.7	14,242,000,000	

**Perubahan RPJMD
Kabupaten Tulungagung 2018-2023**

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Targ et	R p	Targ et	R p	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Sosial Masyarakat	Kesejahteraan Sosial (PPKS)															
1.06.02	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PPKS yang terfasilitasi degan program pemberdayaan	27.18					28.00	2,497,000,000	29.00	2,777,000,000	30.00	3,027,000,000	30.00	8,301,000,000	Dinas Sosial	
1.06.06	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana yang ditangani	100.00					100.00	492,000,000	100.00	537,000,000	100.00	585,000,000	100.00	1,614,000,000		
1.06.04	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PPKS yang mendapat pelayanan Rehabilitasi Sosial	100.00					100.00	500,000,000	100.00	545,000,000	100.00	594,000,000	100.00	1,639,000,000		
1.06.05	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PPKS yang mendapatkan Jaminan pemenuhan kebutuhan dasar	100.00					100.00	820,000,000	100.00	894,000,000	100.00	974,000,000	100.00	2,688,000,000		
	Sasaran 3.2: Meningkatkan Kesempatan Kerja Masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuka	3.36					4.91	1,911,000,000	4.81	2,045,000,000	4.71	2,188,000,000	4.71	6,144,000,000		
2.07.04	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Penempatan Tenaga Kerja	24.29					15.00	825,000,000	20.00	1,177,059,000	24.00	1,294,764,000	24.00	3,296,823,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
2.07.03	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Persentase peserta pelatihan yang memiliki kompetensi	61.72					75.00	722,000,000	80.00	788,494,000	85.00	861,900,000	85.00	2,372,394,000		
2.07.05	Program Hubungan Industrial	Persentase penanganan perselisihan hubungan industrial	100.00					100.00	364,000,000	100.00	407,735,000	100.00	437,500,000	100.00	1,209,235,000		
	Sasaran 3.3: Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mewujudkan Pembangunan	Indeks Desa Membangun (IDM)	0.6781					0.7044	2,100,000,000	0.7123	2,289,000,000	0.7214	2,495,000,000	0.7214	6,884,000,000		
2.13.03	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Desa yang ketahanan ekonomi dan ketahanan	25.00					40.00	500,000,000	45.00	545,000,000	50.00	594,000,000	50.00	1,639,000,000	DPMD	

**Perubahan RPJMD
Kabupaten Tulungagung 2018-2023**

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		lingkungannya meningkat														
2.13.05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Desa yang Ketahanan Sosialnya meningkat	25.00					50.00	1,600,000,000	60.00	2,500,000,000	70.00	1,901,000,000	70.00	6,001,000,000	
	Sasaran 3.4: Meningkatnya rasa aman di masyarakat	Indeks Rasa Aman	0.653					0.674	5,170,000,000	0.677	5,634,000,000	0.679	6,141,000,000	0.679	16,945,000,000	
1.05.02	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase patroli di wilayah Kab. Tulungagung	85.00					85.00	3,625,000,000	90.00	3,951,000,000	95.00	4,306,000,000	95.00	11,882,000,000	Satpol PP
1.05.04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase penanganan kasus kebakaran	75.00					80.00	650,000,000	80.00	708,000,000	80.00	772,000,000	80.00	2,130,000,000	
1.05.03	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Penanganan Penanggulangan Bencana	100					100.00	895,000,000.00	100.00	975,000,000.00	100	1,063,000,000.00	100	2,933,000,000	BPBD
	Sasaran 3.5: Meningkatnya Toleransi pada Kehidupan Masyarakat	Indeks Toleransi	0.720					0.786	2,150,000,000	0.789	2,331,000,000	0.792	2,540,000,000	0.792	7,021,000,000	
8.01.02	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100.00					100.00	150,000,000	100.00	151,000,000	100.00	164,000,000	100.00	465,000,000	Bakesbang pol
8.01.06	Program Peningkatan Kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan	Persentase kewaspadaan nasional dan kualitas dan fasilitasi	100.00					100.00	2,000,000,000	100.00	2,180,000,000	100.00	2,376,000,000	100.00	6,556,000,000	

**Perubahan RPJMD
Kabupaten Tulungagung 2018-2023**

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Targ et	R p	Targ et	R p	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	fasilitasi penanganan konflik sosial	penanganan konflik sosial														
Misi 4: Membangun Infrastruktur Wilayah Pinggiran yang Berkualitas dalam Mewujudkan Pemerataan Pembangunan																
	Tujuan 4: Meningkatkan Infrastruktur Wilayah Yang Merata, Berkualitas Dan Berkelanjutan	Persentase Desa/Kelurahan yang Mendapatkan Layanan Infrastruktur dan Lingkungan Berkualitas	38,75					52,40	79,846,368,239	53,87	177,360,579,961	55,35	192,397,509,872	55,35	449,604,458,072	
	Sasaran 4.1: Meningkatnya Infrastruktur Dasar yang Merata	Rasio Daerah Irigasi dalam Kondisi Baik	1/81					1/78	66,582,368,239	1/77	161,646,199,661	1/76	176,199,357,772	1/76	404,427,925,672	
	Meningkatnya Infrastruktur Dasar yang Merata	Persentase Desa/Kelurahan Dengan Rumah Layak Huni > 90%	97,79					100,00		100,00		100,00		100,00		
		Persentase Desa/Kelurahan Terlayani Sistem Perpipaan Air Minum	52,77					69,37		70,11		70,85		70,85		
		Persentase Desa/Kelurahan Dengan Jumlah Rumah Tangga Terlayani Sanitasi >80%	90,41					98,15		98,52		98,89		98,89		
		Persentase Desa/Kelurahan Dengan Jalan Kondisi Baik > 80%	78,23					78,60		78,97		79,34		79,34		
		Indeks Tingkat Pelayanan Jalan	0,37					0,47		0,54		0,54		0,54		
1.03.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Sumber Daya Air Yang Terpelihara	100					100,00	11,288,912,000,00	100,00	21,448,932,800,00	100	23,379,336,752,00	100	56,117,181,552	DPUPR
1.04.02	Program Pengembangan Perumahan	Prosentase Peningkatan Hunian	0,29					0,35	100,000,000,00	0,38	500,000,000,00	0,41	550,000,000,00	0,41	1,150,000,000	DPKP
1.04.03	Program Kawasan Permukiman	Persentase Rumah Layak Huni	97,79					97,87	4,921,493,000,00	97,92	2,000,000,000,00	97,97	2,180,000,000,00	97,97	9,101,493,000	DPKP

**Perubahan RPJMD
Kabupaten Tulungagung 2018-2023**

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Targ et	R p	Targ et	R p	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.04.05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Prosentase PSU yang ditingkatkan kualitasnya	10					11.00	600,000,000.00	12.00	654,000,000.00	13	712,860,000.00	13	1,966,860,000	DPKP
1.04.04	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Kumuh yang tertangani	39.4					-	-	56.80	5,500,000,000.00	54.94	5,995,000,000.00	54.94	11,495,000,000	DPKP
1.03.03	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Penduduk Terlayani Air Minum yang Aman dengan Cakupan Akses Sambungan Rumah (SR) dan Watermeter	70					86.00	4,138,315,400.00	89.00	6,000,557,330.00	90	6,540,607,489.70	90	16,679,480,220	DPKP
1.03.05	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Prosentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Sanitasi Dasar	83					97.00	5,759,649,000.00	98.00	7,084,368,270.00	98.6	7,721,961,414.30	98.6	20,565,978,684	DPKP
1.03.10	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Jalan Dengan Kondisi Baik	77,49					77.00	33,251,476,373.00	77.50	83,128,690,932.50	78,00	90,610,273,116.43	78	206,990,440,422	DPUPR
2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase perlengkapan jalan, sarana dan prasarana perhubungan yang layak fungsi	70					75.00	6,522,522,466.00	80.00	35,329,650,328.00	85	38,509,319,000.00	85	80,361,491,794	DISHUB
	Sasaran 4.2: Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Menjamin Pembangunan Berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	71.23					63.24	13,264,000,000	63.28	15,714,380,300	63.32	16,198,152,100	63.32	45,176,532,400	
2.11.11	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah yang terkelola	35					45.00	9,448,000,000.00	55.00	10,729,600,000.00	65	11,695,264,000.00	65	31,872,864,000	DLH
2.11.04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	78					80.00	3,286,000,000.00	81.00	3,581,740,000.00	81	3,904,096,600.00	81	10,771,836,600	DLH

**Perubahan RPJMD
Kabupaten Tulungagung 2018-2023**

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ <i>impact</i> / <i>outcome</i>)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Targ et	R p	Targ et	R p	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.11.02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersusun	2					2.00	100,000,000.00	3.00	109,000,000.00	3	118,810,000.00	8	327,810,000	DLH
2.11.03	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah ijin/rekomendasi IPAL untuk pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	31					40.00	315,000,000.00	45.00	1,168,690,300.00	50	343,350,000.00	135	1,827,040,300	DLH
2.11.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase kegiatan usaha yang diawasi	100					100.00	70,000,000.00	100.00	76,300,000.00	100	83,167,000.00	100	229,467,000	DLH
2.11.10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase kasus lingkungan yang tertangani	100					100.00	45,000,000.00	100.00	49,050,000.00	100	53,464,500.00	100	147,514,500	DLH
Misi 5: Mewujudkan Pemerintahan yang Akuntabel, Profesional, dan Transparan yang Berorientasi pada Kepuasan Masyarakat																
	Tujuan 5: Mewujudkan Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Indeks Reformasi Birokrasi	65					67	492,631,134,853	68	577,054,123,430	69	628,287,029,569	69	1,697,972,287,852	
	Sasaran 5.1: Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Nilai SAKIP	75.83					78	484,790,434,853	79	568,444,600,430	80	618,696,109,569	80	1,671,931,144,852	
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	n/a					53.90		55.62		60.61	60.61			
		Indeks Profesionalitas ASN	51.59					51		56		61	61			
4.01.02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase fasilitasi kebijakan bidang pemerintahan dan kesra	86.67					87.67	18,348,623,853	88.67	20,000,000,000	89.66	21,800,000,000	89.66	60,148,623,853	Sekretariat Daerah

**Perubahan RPJMD
Kabupaten Tulungagung 2018-2023**

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ <i>impact</i> / <i>outcome</i>)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Targ et	R p	Targ et	R p	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.01.03	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Fasilitas kebijakan perekonomian dan pembangunan	86.25					87.5	7,324,015,660	88.75	7,690,216,443	90.00	8,074,727,265	90.00	23,088,959,368	
6.01.03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persentase Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi yang Terselamatkan Tepat Waktu	80.00					82.00	3,650,000,000	83.00	3,796,000,000	84.00	3,947,840,000	84.00	11,393,840,000	Inspektorat
5.01.02	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Ketepatan waktu aktivitas Perencanaan, pengendalian dan evaluasi	75.00					80	877,100,000	90	920,955,000	100	967,002,750	100	2,765,057,750	
5.01.03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Program RPJMD	100.00					100	3,850,000,000	100	4,042,500,000	100	4,244,625,000	100	12,137,125,000	Bappeda
5.05.02	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase Hasil Penelitian yang dapat dijadikan Bahan Perumusan Kebijakan	100.00					100	545,500,000	100	572,670,000	100	601,303,500	100	1,719,373,500	
		Indeks Inovasi Daerah	Indeks					30	303,900,000	45	319,095,000	60	335,049,750	60	958,044,750	
2.20.02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Pemanfaatan data statistik sektoral	100.00					100.00	381,000,000	100.00	415,000,000	100.00	453,000,000	100.00	1,249,000,000	Dinas Kominfo
4.02.02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Persentase pencapaian Tugas dan fungsi DPRD yang difasilitasi	100.00					100.00	35,076,000,000	100.00	38,233,000,000	100.00	41,674,000,000	100.00	114,983,000,000	Sekretariat DPRD
6.01.02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan yang Terselamatkan Tepat Waktu	80.00					82.00	2,100,000,000	83.00	2,184,000,000	84.00	2,271,360,000	84.00	6,555,360,000	Inspektorat
5.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase PD yang tepat waktu dalam penyampaian RKA dan DPA	100.00					100.00	2,000,000,000	100.00	2,180,000,000	100.00	2,376,200,000	100.00	6,556,200,000	Badan Pengelolaa n Keuangan

**Perubahan RPJMD
Kabupaten Tulungagung 2018-2023**

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Targ et	R p	Targ et	R p	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Presentase penyaluran belanja daerah yang tertib dan sesuai ketentuan	95.63					96.00	390,012,597,000	97.00	463,974,990,430	98.00	505,732,739,569	98.00	1,359,720,326,999	Dan Aset Daerah
		Presentase PD yang tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangan sesuai SAP(Akrual)	96.49					100.00	1,100,000,000	100.00	1,199,000,000	100.00	1,306,910,000	100.00	3,605,910,000	
5.02.03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Presentase Perangkat Daerah yang tertib dan akuntabel dalam pengelolaan BMD	79.66					90.00	3,480,000,000	95.00	3,654,000,000	100.00	3,836,700,000	100.00	10,970,700,000	
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase realisasi PAD Terhadap Target PAD	118.03					100.00	5,099,214,000	100.00	7,009,110,000	100.00	7,559,165,000	100.00	19,667,489,000	Badan Pendapatan Daerah
5.03.02	Program Kepegawaian Daerah	Persentase Promosi ASN yang sesuai kompetensi	100.00					90.00	4,731,000,000	92.00	5,156,000,000	95.00	5,621,000,000	95.00	15,508,000,000	BKPSDM
		Persentase ASN yang memiliki kinerja Sanagat baik	93.27					90.00		92.00		95.00		95.00		
		Persentase data dan informasi kepegawaian yang dikelola dengan baik	100.00					90.00		92.00		95.00		95.00		
5.04.02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN Yang memiliki kompetensi teknis, manajerial dan Fungsional	n/a					60.00	6,734,000,000	61.00	7,340,000,000	62.00	7,472,000,000	62.00	21,546,000,000	
	Sasaran 5.2: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	3.93					3.95	7,840,700,000	4.00	8,609,523,000	4.10	9,590,920,000	4.10	26,041,143,000	
2.12.02	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	63.00					64.00	1,559,000,000	65.00	1,699,310,000	66.00	1,833,420,000	66.00	5,091,730,000	Dispenduk Capil

**Perubahan RPJMD
Kabupaten Tulungagung 2018-2023**

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ <i>impact</i> / <i>outcome</i>)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.12.03	Program Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan dokumen pencatatan sipil	50.00					51.00	805,700,000	52.00	878,213,000	53.00	957,200,000	53.00	2,641,113,000	
2.12.04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase database kependudukan yang valid dan update sesuai standart SIAK	95.00					96.00	300,000,000	97.00	327,000,000	98.00	356,300,000	98.00	983,300,000	
2.12.04																
2.16.03	Program Aplikasi Informatika	Persentase Aplikasi TIK yang dikelola	80.00					81.00	4,725,000,000	82.00	5,150,000,000	83.00	5,614,000,000	83.00	15,489,000,000	Dinas Kominfo
2.24.02	Program Pengelolaan Arsip	Persentase OPD/ Satker yang menerapkan tata kelola arsip	10.00					10.00	361,000,000	12.00	410,000,000	15.00	630,000,000	15.00	1,401,000,000	Dinas Perpusip
2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang tepat waktu	85.00					90.00	250,000,000	91.00	250,000,000	92.00	250,000,000	92.00	750,000,000	Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu

6.3 Agenda Pembangunan Kab. Tulungagung Tahun 2021-2023

6.3.1 Gerakan Terpadu Berantas Stunting (Gerdu Beranting)



Gambar 6. 2 Gerakan Terpadu Brantas Stunting

Sumber: Agenda Pembangunan Tulungagung 2011-2023

Stunting telah menjadi isu nasional dan menjadi program prioritas yang dituangkan dalam RPJMN dimana tahun 2024 target RPJMN sebesar 24%. Angka stunting nasional berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018 adalah sebesar 30,7%. Berdasarkan Keputusan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Kep 42/M.PPN/HK/04/2020 tanggal 9 April 2020, Kabupaten Tulungagung masuk menjadi salah satu lokus untuk tahun 2021. Prevalensi stunting balita usia 0-59 bulan di Kabupaten Tulungagung sebagai berikut:

Tabel 6. 41 Prevalensi Stunting Balita Usia 0-59 Bulan Kabupaten Tulungagung Tahun 2015-2019

Jenis Penyakit	2015	2016	2017	2018	2019
Prevalensi stunting balita usia 0-59 bulan	17,3	25,7	22,1	10,4	5,32

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung, 2020

Berdasarkan data tabel di atas secara keseluruhan capaian prevalensi stunting balita usia 0-59 bulan menunjukkan naik turun (fluktuatif) dari tahun ke tahun. Pemerintah Kabupaten Tulungagung pada tahun 2017 hingga tahun 2019 telah melaksanakan standar pelayanan minimal bidang kesehatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 sebagaimana terdapat pada tabel berikut.

Tabel 6. 42 Capaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2017-2019

Indikator	Satuan	Target	Capaian 2017	Capaian 2018	Capaian 2019
Pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar pelayanan antenatal (SPM)	%	100	90,35	91,10	91,44
Pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar pelayanan persalinan	%	100	90,99	92.60	91,37

Indikator	Satuan	Target	Capaian 2017	Capaian 2018	Capaian 2019
Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100	92,79	95,77	94,03
Pelayanan kesehatan balita sesuai standar pelayanan kesehatan balita	%	100	85,61	85,98	90,75
Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar skrining kesehatan usia pendidikan dasar	%	100	99,97	99,43	95,51
Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar skrining kesehatan usia produktif	%	100	94,71	94,18	81,28
Pelayanan kesehatan pada usia lanjut sesuai standar skrining kesehatan usia lanjut	%	100	54,00	42,61	66,96
Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar pelayanan kesehatan penderita hipertensi	%	100	95,02	93,86	73,31
Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	%	100	94,11	85,62	76,74
Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar pelayanan kesehatan jiwa	%	100	100	97,67	101,44
Pelayanan kesehatan orang dengan TB sesuai standar pelayanan kesehatan TB	%	100	100	100	89,62
Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV sesuai standar pemeriksaan HIV		100	70,80	64,18	85

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung, 2020

Capaian SPM Kesehatan di Kabupaten Tulungagung memiliki angka yang fluktuatif dan beragam. Berikut peran OPD lintas sektor dalam intervensi.

Tabel 6. 43 Peran OPD Lintas Sektor dalam Intervensi

No	PD	Peran
1	Dinas Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Intervensi Gizi Spesifik dengan sasaran Ibu Hamil, Ibu Menyusui dan Anak Usia 0-6 bulan, Anak Usia 7-23 bulan 2. Peningkatan kesadaran komitmen dan praktik pengasuhan dan gizi ibu dan anak
2	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akses Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan pemantauan tumbuh kembang anak 2. Peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan 3. Penetapan kurikulum muatan lokal dengan memasukkan materi yang lebih berorientasi pada gizi
3	Dinas PU dan Penataan Ruang	Mendorong Peningkatan Akses air minum yang aman dan Akses sanitasi yang layak
4	Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) 2. Penganekaragaman konsumsi pangan 3. Peningkatan Ketersediaan Pangan

No	PD	Peran
5	Dinas Perikanan	1. Pemasaran dan promosi hasil kelautan dan perikanan 2. Promosi Gerakan Makan Ikan (Gemarikan)
6	Dinas Peternakan	1. Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan 2. Gerakan minum susu, telur dan daging
7	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1. Pembinaan tenaga kerja dan pengusaha terkait pencegahan stunting 2. Pola Asuh bagi anak buruh migran
8	Dinas Sosial, dan Dinas KB, PP dan PA	1. Penyediaan konseling kesehatan dan reproduksi untuk remaja 2. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 3. Akses bantuan pangan non tunai (BPNT) untuk keluarga kurang mampu 4. Akses pelayanan Keluarga Berencana KB 5. Jaminan Sosial Bagi Keluarga Miskin
9	DPMD	Melakukan pembinaan fasilitasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemberdayaan dan pemerintahan desa khususnya terkait dengan program percepatan pencegahan stunting di Desa melalui APBDes
10	Bappeda	1. Koordinasi penganggaran kegiatan percepatan penurunan stunting 2. Penguatan koordinasi perencanaan percepatan penurunan stunting
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kampanye terkait Penanganan Stunting
12	Disperindag	1. Pengawasan barang beredar di masyarakat 2. Pengawasan SNI wajib produksi industri hasil tanaman pangan

Sumber: Perangkat Daerah Kab. Tulungagung 2021

Tabel 6. 44 Penanganan Stunting

Urusan	Program	Rencana Aksi	PD
Kelautan dan Perikanan	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	1. Bantuan Ikan Segar dan Produk Olahan Berbahan Perikanan 2. Sosialisasi Gerakan Memasyarakatkan makan Ikan 3. Promosi dan Gelar Produksi Hasil Perikanan	Dinas Perikanan
Kesehatan	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1. Penyusunan regulasi daerah terkait stunting 2. Pemetaan dan analisis situasi program stunting 3. Pelaksanaan rembuk stunting 4. Pembinaan kader pembangunan manusia 5. Pengukuran dan publikasi stunting 6. Pencatatan dan pelaporan 7. Reviu kinerja tahunan aksi integrasi stunting	Dinas Kesehatan
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) • Pembinaan KB • Pengendalian Penduduk 	1. Peningkatan promosi pengasuhan seribu hari pertama kehidupan 2. Pembinaan dan sosialisasi kepada keluarga balita untuk peningkatan pengetahuan dan keterampilan orang tua terhadap pola pengasuhan balita	Dinas KB dan PPA

Urusan	Program	Rencana Aksi	PD
Pertanian	Program Penyuluhan Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kapasitas SDM pertanian 2. Merubah Perilaku masyarakat (Pengetahuan, Keterampilan, Sikap) terkait dengan penganekaragaman pangan 3. Melakukan Sosialisasi di tingkat kecamatan (kelembagaan penyuluhan kecamatan / BPP) 4. Melakukan Demo Percontohan pemanfaatan perkarangan di kecamatan (BPP) 	Dinas Pertanian
Komunikasi dan Informatika	Program Informasi dan Komunikasi Publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyebarluasan Informasi pencegahan dan percepatan penurunan stunting melalui media offline dan online 	Dinas Komunikasi dan Informatika
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 2. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan Ssitem penyediaan air minum 2. Peningkatan sarana prasarana bidang air minum 3. Perluasan dan Pemeliharaan SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) 4. Pengembangan sistem pengelolaan air limbah 5. Penyediaan sarana prasarana bidang air limbah domestik 	Dinas PUPR
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa (Masuk pada APBes tentang penanggulangan stunting) 	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
	Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan kader pembangunan manusia (KPM) *KPM yakni pada kader pembangunan manusia & kader pemberdayaan masyarakat 2. Pembinaan tim penggerak PKK dan pokja posyandu dalam rangka penanggulangan stunting 	
Sosial	Program pemberdayaan sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) 	Dinas Sosial
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian Bantuan PKH 	
Pertanian	Program penyuluhan pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pengolahan dan pemasaran hasil peternakan (pelatihan teknologi produk olahan hasil ternak) 2. Gerakan minum susu, makan telur dan daging (Pemberian susu, telur dan daging kepada ibu hamil/kurang mampu dan batita stunting) 	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Urusan	Program	Rencana Aksi	PD
Pangan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan cadangan pangan Kabupaten/kota 2. Pemenuhan keragaman/ diversifikasi pangan yang di konsumsi masyarakat 	Ketahanan Pangan
	Program Penanganan Kerawanan Pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Aksesibilitas Pangan Masyarakat (Pada pendistribusian) 	
Perindustrian	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan industri kecil dan menengah 2. Pembinaan sumberdaya industri 	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Perdagangan	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan koordinasi terkait ketersediaan kebutuhan barang pokok dan barang penting 	
Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlunya pemantapan Indeks Pendidikan melalui pemerataan kesenjangan pendidikan, peningkatan partisipasi sekolah, penurunan angka putus sekolah dan peningkatan nilai rata-rata ujian nasional 2. Indeks Pendidikan (Angka Rata-rata lama Sekolah & Angka Harapan Lama Sekolah) sebagai variable IPM mengalami kenaikan yang cukup signifikan 	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	Program Pengembangan Kurikulum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Revolusi kharakter bangsa melalui penguatan kurikulum berbasis pendidikan kharakter 2. Pemerataan kesenjangan pendidikan antara penduduk miskin dan penduduk kaya 3. Peningkatan layanan pendidikan luar biasa / pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus 	
	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemenuhan fasilitas dan jaminan hidup bagi tenaga guru dan GTT 2. Kebutuhan jumlah, kualitas dan penyebaran tenaga pendidik dan kependidikan 3. Tantang pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar sesuai dengan SPM dan Jaminan atas karir tenaga pendidik dan kependidikan 4. Rasio jumlah Guru terhadap murid untuk jenjang pendidikan SD, masih cenderung besar 5. Kondisi geografis dapat mempengaruhi rendahnya akses layanan Pendidikan di Kabupaten Tulungagung, sehingga berdampak pada penyebaran layanan tidak merata, termasuk 	

Urusan	Program	Rencana Aksi	PD
		layanan penyebaran dan penataan Tenaga Kependidikan	
Tenaga Kerja	Program Hubungan Industrial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong penyediaan ruang laktasi di perusahaan 2. Fasilitasi Pemberian perlindungan hak reproduksi pekerja wanita 	Dinas Tenaga Kerja

Sumber: Perangkat Daerah Kab. Tulungagung 2021

Dalam mengatasi hal tersebut perlu memastikan ketahanan pangan dan gizi yang baik.

- 1) Mengakhiri kelaparan dan melindungi hak semua orang untuk memiliki akses terhadap makanan dalam jumlah yang cukup, aman, terjangkau harganya, dan bergizi.
- 2) Mengurangi stunting (tumbuh pendek karena kurang gizi) sebanyak x%, *wasting* (tubuh kurus karena kurang gizi) sebanyak y%, dan anemia sebanyak z% bagi semua balita.
- 3) Meningkatkan produktivitas pertanian sebanyak x%, yang berfokus pada meningkatkan secara berkelanjutan hasil pertanian kecil dan akses terhadap irigasi.
- 4) Mengadopsi praktik-praktik pertanian, perikanan laut dan perikanan air tawar yang berkelanjutan dan membangun kembali ketersediaan ikan-ikan tertentu hingga ke tingkat yang berkelanjutan.
- 5) Mengurangi kerugian pasca panen dan makanan yang terbuang sebanyak x%.

6.3.2 Pengembangan Mall Pelayanan Publik (MPP)

Pengembangan *Mall Pelayanan Publik*



Gambar 6. 3 Mall Pelayanan Publik

Sumber: Agenda Pembangunan Tulungagung 2011-2023

Berdirinya MPP merupakan salah satu pelaksanaan reformasi birokrasi yang menjadi visi Presiden Joko Widodo. Pelayanan yang terpadu menciptakan birokrasi yang bersih, sederhana, fleksibel, serta didukung proses tata kelola yang cepat.

Kementerian PANRB menerapkan enam prinsip yang harus ada dalam penyelenggaraan MPP. Prinsip-prinsip itu adalah keterpaduan, berdayaguna,

koordinasi, akuntabilitas, aksesibilitas, dan kenyamanan. Dengan enam prinsip yang saling terpadu, tujuan MPP sebagai pemberi kemudahan dan keterjangkauan pelayanan dalam masyarakat dapat terwujud. Tujuan jangka panjang yang harus dicapai adalah meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha di Indonesia.

Guna memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan, Pemerintah Kabupaten Tulungagung saat ini berencana untuk menyelenggarakan mal pelayanan publik (MPP) dengan melibatkan Perangkat Daerah/Lembaga sebagai berikut:

Tabel 6. 45 Mal Pelayanan Publik

Urusan	Program	Rencana Aksi	PD
Sekretariat Daerah; Perencanaan	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah	Peningkatan pemenuhan pelayanan publik yang prima terhadap kualitas pelayanan barang jasa dan administrasi umum	Bagian Organisasi dan Bappeda
	Program perekonomian dan pembangunan	Meningkatkan kualitas pengadaan barang/jasa secara transparan, terbuka, dan kompetitif	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
		Memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumberdaya manusia pelaku pengadaan barang/jasa	
		Meningkatkan teknologi informasi dan komunikasi serta transaksi elektronik melalui LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik)	
Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Koordinasi dan fasilitasi kebijakan yang mendukung pelayanan publik	Bagian Pemerintahan	
Penanaman Modal	Program Pelayanan Penanaman Modal	Peningkatan kualitas pelayanan melalui pendampingan bagi investor	DPMPTSP
Perindustrian	Program pengendalian ijin usaha industri	Peningkatan pengawasan ijin usaha industri	Disperindag
Perdagangan	Program perijinan dan pendaftaran perusahaan	Peningkatan legalitas usaha	
Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pendaftaran Penduduk	Meningkatkan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk (SDM dan Sarpras)	Dispenduk capil
	Program Pencatatan Sipil	Meningkatnya kualitas pelayanan pencatatan sipil (SDM dan Sarpras)	
	Program Pengelolaan Informasi	Meningkatkan kualitas pengelolaan informasi	

Urusan	Program	Rencana Aksi	PD
	Administrasi Kependudukan	administrasi kependudukan (SDM ADB, Jaringan SIAK)	
Kepegawaian; Pendidikan dan pelatihan	Program Kepegawaian Daerah	Mengoptimalkan data dan informasi dalam mendukung kualitas pelayanan ASN	BKPSDM
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Penataan Bangunan Gedung	Penyediaan sarana, prasarana pendukung mal pelayanan publik	PUPR
Tenaga Kerja	Program Penempatan Tenaga Kerja	Peningkatan kualitas pelayanan tenaga kerja di luar negeri	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Peningkatan layanan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)	

Sumber: Perangkat Daerah Kab. Tulungagung 2021

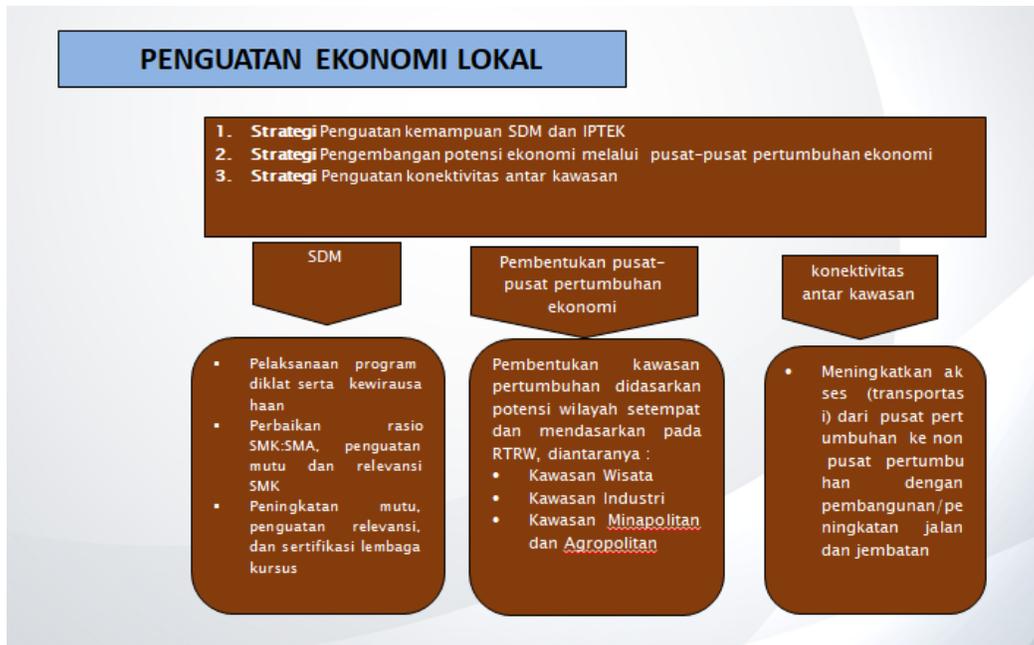
6.3.3 Tulungagung Percepat Penanggulangan Kemiskinan (Tulungagung Pepak)



Gambar 6. 4 Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (PEPAK)

Sumber: Agenda Pembangunan Tulungagung 2011-2023

Permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks dan mendasar yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung, dimana angka kemiskinan Tulungagung pada tahun 2019 sebesar 6,74% dari jumlah penduduk. Namun laju penurunannya cenderung lambat. Pemerintah Kabupaten Tulungagung telah menempatkan program penanggulangan kemiskinan sebagai salah satu Program prioritas sebagaimana termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018-2023. Selanjutnya untuk mempercepat/ akselerasi penurunan kemiskinan sejalan dengan misi pembangunan daerah, maka perlu Program Percepatan.



Gambar 6. 5 Penguatan Ekonomi Lokal

Sumber: Hasil Analisa, 2021

Percepatan penanggulangan kemiskinan tersebut diperlukan keterlibatan Perangkat Daerah/Lembaga yakni sebagai berikut:

Tabel 6. 46 Tulungagung PEPAK

Urusan	Program	Rencana Aksi	PD
Sekretariat Daerah	Perekonomian dan pembangunan	Peningkatan pengambilan ekonomi terapan/kebijakan ekonomi melalui koordinasi, fasilitasi dan pengendalian terhadap distribusi perekonomian	Sekretariat daerah bagian perekonomian & SDA
		Peningkatan koordinasi, fasilitasi dan pengawasan terhadap usaha mikro, kecil dan menengah	
Sosial	perlindungan dan jaminan sosial	Pemberian bantuan PKH Pemutakhiran data DTKS Monitoring dan evaluasi tenaga pendamping untuk pemanfaatan bantuan	Dinas Sosial
	pemberdayaan sosial	Pemberian BPNT	
pemberdayaan masyarakat dan desa	peningkatan kerjasama antar desa	Pembinaan dan pemberdayaan BUMDes dan Lembaga Kerjasama antar desa	DPMDes
		Fasilitasi pengembangan ekonomi pada kawasan pedesaan	
		Fasilitasi bantuan dalam pemberdayaan usaha perempuan di desa	
perumahan dan kawasan permukiman	kawasan permukiman	Meningkatkan pemenuhan rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	DPKP
		Melaksanakan program pemerintah 100-0-100	
		Melaksanakan program "KOTAKU"	

Urusan	Program	Rencana Aksi	PD
		Mengurangi kawasan kumuh melalui program KOTAKU	
	pengembangan perumahan	Menangani angka bachklog	
Perhubungan	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Menambah fasilitas, kenyamanan, keamanan, serta kebersihan angkutan	Dinas Perhubungan
		Menambah fasilitas serta meningkatkan mutu pelayanan pada pengguna jasa Pengujian kendaraan bermotor kabupaten Tulungagung	
		Menata area parkir secara tepat dan pembinaan rutin kepada seluruh petugas parkir	
		Menambah angkutan yang bisa melayani masyarakat tepat waktu	
		Meningkatkan sarana prasarana dan pelayanan pengujian kendaraan bermotor	
		Meningkatkan pemenuhan kebutuhan perlengkapan jalan dan prasarana perhubungan	
		Meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait untuk kelancaran dan ketertiban lalu lintas	
		Meningkatkan pemenuhan fasilitas perlengkapan jalan yang berkeselamatan	
		Melaksanakan pengendalian arus lalu lintas yang tertib dan berkesinambungan	
Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Penanggulangan bencana	Melakukan pelatihan mitigasi bencana bagi masyarakat dan relawan	BPBD
		Meningkatkan kapasitas aparatur dalam penanggulangan bencana	
Pertanian	Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Penyediaan sarana pertanian bibit, alsintan, alat pasca panen	Dinas Pertanian
	Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Penyediaan/pembangunan prasarana pertanian - jalan usaha tani, DAM Parit - Jalan Produksi, Irigasi	
	Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Penyediaan pestisida untuk penanggulangan bencana (serangan OPT)	
	Penyuluhan Pertanian	Peningkatan kapasitas SDM Pertanian - pemberdayaan masyarakat/petani melalui sosialisasi dan pelatihan untuk merubah perilaku (pengetahuan, ketrampilan, sikap) petani sehingga mempunyai kemampuan untuk memecahkan masalahnya sendiri dalam usaha	

Urusan	Program	Rencana Aksi	PD
		atau kegiatan meningkatkan hasil usahanya dan tingkat kehidupannya	
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyelenggaraan Jalan	Perencanaan dan pengawasan jalan atau jembatan dan bangunan pelengkap	Dinas PUPR
		Pembangunan dan peningkatan struktur serta kapasitas jalan/jembatan menuju fasilitas pelayanan publik dan ekonomi	
Pertanian	Penyuluhan Pertanian	Peningkatan Pengolahan dan pemasaran hasil peternakan - gerakan minum susu, makan telur dan daging	Dinas Peternakan dan Keswan
Koperasi, usaha kecil dan menengah	Program pemberdayaan usaha menengah, kecil dan mikro	Pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
	Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi	Peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pasar dan akses pembiayaan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
	Program pendidikan dan pelatihan perkoperasian	Peningkatan kompetensi SDM pengelola koperasi	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Promosi dan KIE tentang hak-hak anak	Dinas KBPPPA
		Peningkatan kompetensi SDM lembaga penyedia layanan perlindungan anak	
		Sinkronisasi pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak	
	Program pengurus utamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Peningkatan partisipasi perempuan di bidang sosial dan ekonomi	
Kesehatan	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Penyediaan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan masyarakat yang bekerjasama dengan BPJS kesehatan	Dinas kesehatan
		<i>Universal health coverage</i>	
Perindustrian	Perencanaan dan pembangunan industri	Pembinaan sumber daya industri	Dinas perindustrian dan perdagangan
		Pembentukan kawasan industri	
Sekretariat Daerah	Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Peningkatan fasilitas bantuan hukum untuk masyarakat miskin	Sekretariat daerah (bagian hukum)
Transmigrasi	Program pembangunan	Peningkatan partisipasi keluarga miskin dalam program transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Urusan	Program	Rencana Aksi	PD
	kawasan transmigrasi		
Tenaga Kerja	Program Penempatan Tenaga Kerja	Pemberian bantuan alat kerja dan pelatihan wirausaha Peningkatan partisipasi perusahaan dalam <i>job fair</i>	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Peningkatan kompetensi pencari kerja	

Sumber: Perangkat Daerah Kab. Tulungagung 2021

Penanggulangan kemiskinan menjadi salah satu prioritas Kabupaten Tulungagung dalam program pembangunan. Ini menjadi perhatian kita semua, dengan prinsip keroyokan atau gotong royong, serta dukungan dan komitmen seluruh *stakeholder* melalui sinergitas program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan. Beberapa strategi penanganan kemiskinan harus diarahkan guna mengurangi beban pengeluaran, meningkatkan kemampuan beli dan pendapatan masyarakat miskin, serta mengembangkan dan menjamin kelanjutan usaha mikro kecil.

6.3.4 Pengembangan Pariwisata Kabupaten Tulungagung



Gambar 6. 6 Pengembangan Pariwisata Tulungagung

Sumber: Agenda Pembangunan Tulungagung 2011-2023

Kabupaten Tulungagung merupakan wilayah potensial untuk pengembangan pariwisata sebagai salah satu alternatif daerah tujuan wisata unggulan Jawa Timur maupun Nasional, karena keanekaragaman obyek wisata yang dimiliki. Proses perencanaan dan pengembangan sektor Pariwisata Kabupaten Tulungagung menggunakan analisis cluster obyek wisata. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan kawasan perencanaan yang mencakup beberapa obyek wisata sehingga mempermudah dalam proses perencanaan dan pengembangannya. Penetapan pusat pengembangan didasarkan kepada pertimbangan sebagai berikut:

1. Kemudahan aksesibilitas

Aksesibilitas merupakan salah satu faktor perkembangan suatu wilayah maupun kawasan. Semakin mudah pencapaian/akses suatu tempat,

maka semakin besar peluang berkembangnya suatu wilayah/kawasan tersebut.

2. Jarak antara obyek wisata

Obyek-obyek wisata yang ada di wilayah perencanaan tersebar di seluruh wilayah. Karena pertimbangan jarak dari obyek yang satu dengan obyek yang lain maka perlu dilakukan pembagian berdasarkan cluster. Salah satunya dilihat dari kedekatan/jarak antara obyek wisata yang ada.

3. Banyaknya pergerakan

Pola pergerakan wisatawan adalah kegiatan/perjalanan wisatawan ke obyek-obyek yang akan maupun telah dikunjungi. Pada umumnya wisatawan memiliki kecenderungan untuk berkunjung ke obyek wisata lain dengan jarak yang dekat dengan lokasi obyek wisata yang telah dikunjungi dan memiliki kegiatan/ragam wisata yang berbeda dan variatif.

4. Arahan oleh rencana tata ruang

Didalam arahan rencana tata ruang dalam pengembangan kawasan dilakukan dengan menumbuhkan embrio-embrio pertumbuhan baru. Embrio-embrio ini diletakkan pada daerah-daerah yang belum berkembang. Adanya embrio ini akan dilengkapi dengan sarana prasarana. Pembagian cluster salah satunya menjadikan obyek sebagai magnet penarik pertumbuhan. Harapan adanya pembagian cluster ini adanya penyebaran sarana prasarana berdasarkan kebutuhan. Kawasan peruntukan pariwisata di Kabupaten Tulungagung diantaranya:

1. Kawasan wisata alam terdiri atas:

- a) Daya tarik wisata goa;
- b) Daya tarik wisata air;
- c) Daya tarik wisata pantai; dan
- d) Agrowisata berada di Desa Sendang Kecamatan Sendang.

2. Kawasan wisata budaya terdiri atas:

- a) Daya tarik wisata peninggalan sejarah dan purbakala.

3. Kawasan wisata buatan sebagaimana terdiri atas:

- a) Pesanggrahan Argowilis berada di Kecamatan Sendang.

Pengembangan pariwisata di Kabupaten Tulungagung diperlukan keterlibatan Perangkat Daerah/Lembaga yakni sebagai berikut:

Tabel 6. 47 Pengembangan Pariwisata Kabupaten Tulungagung

Urusan	Program	Arah Kebijakan	PD
Pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata	Peningkatan kualitas pelayanan kepada wisatawan dengan mengembangkan obyek wisata yang masih berupa potensi menjadi obyek wisata riil	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	Program Pemasaran Pariwisata	Peningkatan pemasaran dan promosi melalui penyebaran informasi di berbagai media baik cetak maupun elektronik	
		Perlunya memotivasi para pengelola obyek wisata agar supaya lebih profesional	

Urusan	Program	Arah Kebijakan	PD
		dalam mengelola obyek wisata	
		Membuat paket wisata sehingga memudahkan para wisatawan	
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Penyelenggaraan Jalan	pembangunan dan peningkatan struktur serta kapasitas jalan/jembatan menuju obyek wisata	Dinas PUPR
Urusan pemerintah bidang koperasi, UKM	Program Pengembangan UMKM	Pengelola dan pelaku usaha wisata perlu dibina dalam menversifikasi atau pengembangan usaha produk wisata agar lebih dapat diminati para wisatawan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Peningkatan keamanan khusus daerah wisata	Satpol PP
	Penanggulangan bencana	Melakukan pelatihan mitigasi bencana bagi masyarakat dan relawan Meningkatkan kapasitas aparaturnya dalam penanggulangan bencana	BPBD
Perhubungan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Peningkatan kemudahan akses angkutan umum maupun kendaraan pribadi untuk mencapai obyek wisata	Dinas Perhubungan
Lingkungan Hidup	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Peningkatan Kualitas RTH	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Pengelolaan Persampahan	Peningkatan Pengelolaan Persampahan di Kawasan Wisata	

Sumber: Perangkat Daerah Kab. Tulungagung 2021

BAB VII



Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah



BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan

Pada Bab ini berisi tentang kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023. Dalam hal urusan atau program yang bersifat strategis, maka perencanaan, pengendalian, dan evaluasi yang dilakukan lebih tinggi intensitasnya dibanding yang operasional. Begitu pula dalam penganggarannya, harus diprioritaskan terlebih dahulu. Hal demikian karena suatu urusan yang bersifat strategis telah ditetapkan temanya dan karena pengaruhnya yang sangat luas maka pelaksanaannya harus diprioritaskan terlebih dahulu. Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab dalam suatu program prioritas, baik strategis maupun operasional. Berkaitan dengan program prioritas yang dikategorikan strategis, hal tersebut menjadi tanggung jawab bersama Kepala OPD dengan kepala daerah pada tingkat kebijakan. Berbeda halnya dengan penyelenggaraan aspek strategik, program prioritas bagi penyelenggaraan urusan pemerintahan dilakukan agar setiap urusan (wajib) dapat diselenggarakan setiap tahun, tidak langsung dipengaruhi oleh visi dan misi kepala daerah terpilih. Artinya, suatu prioritas pada beberapa urusan untuk mendukung visi dan misi serta program kepala daerah terpilih, tidak berarti bahwa urusan lain ditinggalkan atau ditelantarkan. Rencana program prioritas Pemerintah Kabupaten Tulungagung berisi program-program, baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan OPD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah, serta mengakomodir program unggulan dari kepala daerah terpilih.

Pagu indikatif merupakan wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi OPD dalam penyusunan Renstra OPD, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Setelah program prioritas diketahui baik berasal dari perumusan strategis maupun dari rumusan permasalahan pembangunan daerah, dibuatlah alokasi pagu untuk setiap program. Pagu indikatif program merupakan jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program prioritas tahunan yang penghitungannya berdasarkan standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, perhitungan pagu indikatif masing-masing program dipisahkan menjadi pagu indikatif untuk program prioritas yang berhubungan dengan program pembangunan daerah (strategik) dan pagu indikatif untuk program-program yang berhubungan dengan pemenuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Berikut disajikan program pembangunan daerah dan program penyelenggaraan pemerintah beserta kerangka pendanaan Kabupaten Tulungagung:

Tabel 7. 1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2019-2023 Kabupaten Tulungagung

Kode	Kapasitas Riil / Belanja	Proyeksi				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
	Kapasitas riil keuangan	1.269.847.167.973,0 0	1.339.432.642.069,0 0			
	Belanja	2.962.026.036.237,8 0	3.095.001.829.036,1 1			
	Belanja Tidak Langsung	1.692.178.868.264,8 0	1.755.569.186.967,1 1			
	Belanja Pegawai	1.229.034.101.443,50	1.248.117.193.986,26			
	Belanja Bunga	-	-			
	Belanja Subsidi	-	-			
	Belanja Hibah	68.834.287.000,00	89.068.795.414,00			
	Belanja Bantuan Sosial	4.475.000.000,00	7.040.461.505,00			
	Belanja Bagi Hasil	8.757.011.421,30	8.590.293.840,74			
	Belanja Bantuan Keuangan	376.078.468.400,00	400.207.111.992,50			
	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00	2.545.330.228,61			
	Belanja Langsung	1.269.847.167.973,0 0	1.339.432.642.069,0 0			
	Belanja Pegawai	54.603.428.222,84	57.595.603.608,97			
	Belanja Modal	709.395.158.094,27	754.653.001.368,77			
	Belanja Barang dan Jasa	505.848.581.655,89	527.184.037.091,26			
	KAPASITAS RILL KEUANGAN			2.506.260.047.478,0 0	2.530.739.707.028,4 6	2.612.943.464.632,0 3
	Belanja Operasi			1.897.383.460.975,0 0	1.905.146.477.519,8 2	1.931.215.023.489,8 9
	Belanja Pegawai			1.232.380.159.439,00	1.234.043.093.924,19	1.239.627.299.989,22

		Belanja Barang dan Jasa			589.151.733.236,00	589.613.961.076,44	591.166.142.195,41
		Belanja Bunga			0.00	0.00	0.00
		Belanja Subsidi			0.00	0.00	0.00
		Belanja Hibah			72.449.853.300,00	78.049.208.631,03	96.852.086.482,31
		Belanja Bantuan Sosial			3.401.715.000,00	3.440.213.888,16	3.569.494.822,94
		Belanja Modal			220.373.989.503,00	228.911.925.271,15	257.582.683.574,51
		Belanja Tanah			125.000.000,00	1.697.975.766,77	6.980.096.556,93
		Belanja Peralatan dan Mesin			102.128.537.400,00	114.074.199.716,21	154.188.251.442,77
		Belanja Bangunan dan Gedung			61.215.355.700,00	67.753.375.844,15	89.708.330.815,19
		Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan			53.194.361.373,00	41.675.638.914,03	2.995.269.729,62
		Belanja Aset Tetap Lainnya			3.710.735.030,00	3.710.735.030,00	3.710.735.030,00
		Belanja Aset Lainnya			0.00	0.00	0.00
		Belanja Tidak Terduga			15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00
		Belanja Transfer			373.502.597.000,00	381.681.304.237,49	409.145.757.567,62
		Belanja Bagi Hasil			9.100.410.000,00	13.781.287.613,74	29.499.877.487,85
		Belanja Bantuan Keuangan			364.402.187.000,00	367.900.016.623,75	379.645.880.079,77

Sumber: Hasil Proyeksi, 2021

Mengacu pada tujuan dan sasaran yang akan di capai dalam pembangunan jangka menengah, serta memperhatikan arah kebijakan dan kebijakan pembangunan, maka disusun program-program pembangunan yang akan dilaksanakan dalam lima tahun ke depan, berdasarkan Prioritas Program Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Periode 2018-2023. Hal ini tentunya harus memperhatikan kapasitas fiskal daerah sebagaimana yang disajikan dalam tabel 7.1. Sehingga penentuan target dan anggaran selama lima tahun akan dapat didukung dengan kemampuan dan kapasitas fiskal daerah.

7.2 Indikasi Rencana Program Prioritas

Perumusan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan dilakukan berdasarkan kompilasi hasil verifikasi terhadap perencanaan program, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dari setiap rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Penyajian program dan anggaran indikatif yang disusun berdasarkan aspek-aspek pembangunan dan urusan diharapkan dapat menjelaskan program apa saja yang direncanakan dalam perubahan RPJMD. Adapun penyajian indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023 dapat disajikan dalam tabel 7.2 (lampiran).

Tabel 7. 2 Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Tulungagung

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					2019		2020		2021		2022		2023		Kinerja Akhir RPJMD			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
PROGRAM - PERDA 6 TAHUN 2019 TENTANG RPJMD KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2018 - 2023 (Sesuai Permendagri 13 Tahun 2006)																		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB																		
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR																		
PENDIDIKAN																		
1.01.0 1.15	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase Siswa jenjang SD dan SMP yang memiliki akses pada program penyelenggaraan pendidikan	%	22,26	23	Rp 25,650,00 0,000	100	Rp 33,000,00 0,000										Pendidikan
		Persentase peningkatan siswa penerima Bea siswa dalam rangka mendukung proses belajar siswa di Kabupaten Tulungagung	%	20	20		22											
1.01.0 1.16	Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	Persentase Ruang Kelas PAUD Baik	%	25	25	Rp 24,500,00 0,000	30	Rp 25,494,00 0,000										
		Rasio Siswa PAUD Per Kelas	rasio	1:11	1:12		1:13											
		Persentase PAUD yang menerima bantuan Operasional	%	96	96		97											
		Persentase Pendidikan Masyarakat yang dibina	%	90	90		93											
1.01.0 1.17	Program Pembinaan SD	Persentase Lulusan SD melanjutkan ke SMP/MTS	%	100	100	Rp 41,500,00 0,000	100	Rp 43,160,00 0,000										
		APK/SD/MI, Paket/A	%	104	104		104											
		APM/SD/MI, Paket/A	%	98	98		98											
		Persentase Ruang Kelas Baik tingkat SD	%	50	60		75											
		Angka Putus sekolah SD/MI	%	0,20	0,20		0,10											
		Rasio murid per kelas tk. SD/MI	rasio	1:19	1:19		1:22											
1.01.0 1.18	Program Pembinaan SMP	APK SMP/Mts/Paket B	%	97	97	Rp 13,100,00 0,000	97	Rp 13,624,00 0,000										
		APM SMP/Mts/Paket B	%	84	84		84											
		Persentase Lulusan SMP melanjutkan ke SMA/MA	%	99,07	99,15		99,20											

**Perubahan RPJMD
Kabupaten Tulungagung 2018-2023**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					2019		2020		2021		2022		2023		Kinerja Akhir RPJMD			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		Angka Putus Sekolah SMP/MTs	%	0,21	0.21		0,20											
		Rasio Murid per kelas tingkat SMP/MTs	rasio	1:30	1:30		1:31											
		Persentase Ruang Kelas Baik Tingkat SMP	%	70	75		80											
1.01.0 1.20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase guru SD dan SMP berkualifikasi S1	%	97,68	97,68		98											
		Persentase guru SD dan SMP berkualifikasi S2	%	17	17	Rp 3,020,000, 000	17	Rp 3,289,000, ,000										
		Persentase guru SD/SMP memiliki sertifikasi sesuai dengan kompetensi	%	97	97		98											
1.01.0 1.21	Program Penunjang Teknis Operasional Minat dan Bakat	Persentase Kegiatan Seni Pelajar yang berprestasi	%	40	40	Rp 660,000,0 00	43	Rp 690,000,0 00										
KESEHATAN																		
1.01.0 2.16	Program Upaya Pelayanan Kesehatan	Cakupan Pelayanan Kesehatan	%	89	90	63,592,40 3,339.00	91	65,672,40 3,339.00										
1.01.0 2.17	Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan	Persentase tersedianya obat esensial dan perbekalan kesehatan serta sarana dan prasarana untuk Instalasi Farmasi Kabupaten (IFK)	%	100	100	Rp 4,550,000, 000	100	Rp 4,730,000, ,000										
1.01.0 2.18	Program Pencegahan, Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular serta Surveillance Epidemiologi	Persentase Pengendalian Penyakit Menular	%	100	100		100											
		Persentase Pengendalian Penyakit Tidak Menular	%	85	85	Rp 7,100,000, 000	90	Rp 7,380,000, ,000										
		Persentase surveilans epidemiologi	%	70	71		72											
1.01.0 2.19	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Pengembangan UKBM	%	84	86		86.5											
		Cakupan STBM	%	84.07	85		86											
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu	%	91.07	91.1	Rp 7,000,000, 000	91.5	Rp 7,280,000, ,000										
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi	%	94	94		94.5											

**Perubahan RPJMD
Kabupaten Tulungagung 2018-2023**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					2019		2020		2021		2022		2023		Kinerja Akhir RPJMD			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1.01.0 2.15	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas /Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan puskesmas dan jaringannya	%	55	56	Rp 15,004,08 5,054	56.5	Rp 28,603,29 9,300										
1.01.0 2.20	Program Penunjang Teknis Operasional Bidang Kesehatan	Persentase Puskesmas dengan nilai PKP UKM > 75%	%	37	37	Rp 23,826,00 0,000	40	Rp 24,780,00 0,000										
1.01.0 2.21	Program Manajemen Kesehatan	Persentase Puskesmas berbasis SIK	%	100	100	Rp 180,000,0 00	100	Rp 187,000,0 00										
1.01.0 2.22	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Respon time reperfusi kasus stemi Persentase peningkatan rujukan masyarakat yang memanfaatkan PSC	menit %	68 9.91	60 10	Rp 1,150,000, 000	55 10	Rp 1,195,000 ,000										
1.01.0 2.24	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan	Persentase pencapaian SPM Persentase pencapaian mutu unit pelayanan	% %	70.56 27.52	70 30	Rp 275,000,0 00,000	71 35	Rp 300,000,0 00,000										
1.01.0 2.23	Program Pengendalian Pelayanan Kesehatan Rujukan	Persentase kecukupan dana pelayanan masyarakat miskin	%	100	100	Rp 7,000,000, 000	100	Rp 7,000,000 ,000										
1.01.0 2.25	Program Peningkatan Pelayanan Penunjang Kesehatan Rujukan	Persentase pencapaian alat kesehatan menuju standar rumah sakit tipe A	%	60	62	Rp 18,766,00 0,000	65	Rp 19,766,00 0,000										
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																		
	Program Laboratorium, Perbengkelan dan Jasa Konstruksi	Persentase pengujian lab bahan dan material bangunan serta hasil konstruksi	%	92	-	Rp -	94	Rp 2,088,712 ,500										Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.01.0 3.23	Program Pengelolaan Laboratorium	Persentase pengujian lab bahan dan material bangunan serta hasil konstruksi	%	92	92	Rp 463,250,0 00	-	Rp -										Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

**Perubahan RPJMD
Kabupaten Tulungagung 2018-2023**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					2019		2020		2021		2022		2023		Kinerja Akhir RPJMD					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1.01.0 3.24	Program Pengelolaan Perbengkelan dan Alat Berat	Persentase pelayanan penyewaan alat berat	%	80	82	Rp 763,000,000	-	Rp -												
1.01.0 3.25	Program Pengembangan Teknologi Bahan Bangunan	Sosialisasi teknologi bahan bangunan	Kali	2	2	Rp 54,500,000	-	Rp -												
1.01.0 3.17	Program Pengembangan Jasa Kontruksi	Persentase sosialisasi dan fasilitasi regulasi jasa konstruksi	%	90	91	Rp 708,500,000	-	Rp -												
		Persentase kualitas pemberdayaan jasa konstruksi	%	70	71															
		Jumlah kegiatan pengawasan jasa konstruksi	Kegiatan	5	5															
1.01.0 3.18	Program Infrastruktur Persampahan	Persentase bertambahnya bangunan infrastruktur persampahan untuk kelancaran pengelolaan sampah	%	80	81	Rp 708,500,000	-	Rp -											Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.01.0 3.20	Program Instalasi Listrik Penerangan Jalan Umum	Persentase fasilitas PJU dengan kondisi baik	%	80	80	Rp 1,471,500,000	-	Rp -												
1.01.0 3.19	Program Pertamanan dan Pemakaman	Persentase tersedianya taman kondisi baik	%	80	82	Rp 2,234,500,000	-	Rp -												
1.01.0 3.21	Program Tata Ruang	Persentase pengajuan tata ruang yang ditindaklanjuti	%	100	100	Rp 1,253,500,000	100	Rp 1,316,175,000												
1.01.0 3.22	Program Tata Bangunan	Persentase bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik	%	70	70	Rp 18,154,997,000	71	Rp 19,062,746,900												
1.01.0 3.26	Program Penunjang Teknis Operasional Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase jalan terpelihara	%	70	70	Rp 12,862,000,000	72	Rp 13,376,480,000												Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.01.0 3.15	Program Keciptakaryaan	Jumlah penduduk yang terlayani air minum	jiwa	876,172	897,715	Rp 19,313,100,800	917,403	Rp 20,085,624,900												
		Jumlah rumah tangga yang memiliki akses sanitasi	Rmh tangga	328,450	331,662		335,153													

**Perubahan RPJMD
Kabupaten Tulungagung 2018-2023**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					2019		2020		2021		2022		2023		Kinerja Akhir RPJMD				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1.01.0 3.16	Program Kebhinamargaan	Panjang jalan kondisi jalan baik	Km	1.065,13	1.118,38	Rp 206,128,265,000	1.366,91	Rp 214,373,395,600										Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	Program Irigasi dan Sumber Daya Air	Panjang Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik	meter	302,449.68	-	Rp -	313651.52	Rp 48,675,265,600											
1.01.0 4.16	Program Pelestarian Sumber Daya Air	Persentase peningkatan pelestarian sumberdaya air	%	19	0.36	Rp 141,700,000	-	Rp -											
1.01.0 4.18	Program Pengelolaan Pembinaan dan Penyuluhan Jaringan Irigasi	Persentase peningkatan SDM pengelola dan pemanfaat jaringan	%	63	70	Rp 174,400,000	-	Rp -											
1.01.0 4.15	Program Pembangunan dan Pengembangan Sumber Daya Air	Persentase peningkatan jaringan irigasi yang terbangun	%	64	65	Rp 24,487,040,000	-	Rp -											
1.01.0 4.17	Program Operasional dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Persentase peningkatan jaringan irigasi yang kondisi baik	%	54	55	Rp 22,000,000,000	-	Rp -										Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.01.0 4.19	Program Penunjang Teknis Operasional Bidang PKPSDA	Persentase teknis operasional bidang PKPSDA	%	70	70	Rp 2,228,505,000	70	Rp 2,317,645,200											
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN																			
1.01.0 5.15	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase rumah layak huni	%	97.73	97.79	Rp 2,300,000,000	98.11	Rp 2,392,000,000										Perumahan dan Kawasan Permukiman	
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																			
1.01.0 6.16	Program Peningkatan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat	Persentase patroli di 19 kecamatan	%	85	90		91											Ketentraman & Ketertiban Umum serta Linmas	
		Persentase Pemberdayaan/ Peningkatan kapasitas anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peningkatan Tantribum	%	85	85	Rp 900,000,000	88	Rp 1,269,800,000											
1.01.0 6.15	Program Penegakan Peraturan Daerah	Persentase Penegakan Peraturan Daerah / Peraturan Kepala Daerah	%	90	91	Rp 375,000,000	92	Rp 623,660,000											

**Perubahan RPJMD
Kabupaten Tulungagung 2018-2023**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					2019		2020		2021		2022		2023		Kinerja Akhir RPJMD			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	dan Peraturan Bupati	Persentase Pemberdayaan/ Peningkatan kapasitas anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Perda/Perbup	%	65	68		70											
1.01.0 6.17	Program Peningkatan Kapasitas Perlindungan Masyarakat	Persentase Petugas Satuan Linmas di Kabupaten Tulungagung	%	83	85	Rp 665,000,000	86	Rp 797,260,000										
1.01.0 6.19	Program Peningkatan Dan Pengembangan Kapasitas Aparatur Dalam Pelayanan Ketertiban Umum, Ketertarikan Masyarakat	Persentase Pemberdayaan/ Peningkatan kapasitas anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Perda/Perbup	%	65	68	Rp 850,000,000	-											
		Persentase Pemberdayaan/ Peningkatan kapasitas anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peningkatan Tantribum	%	85	85		-											
1.01.0 7.22	Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Persentase penanganan kasus kebakaran	%	70	74	Rp 425,000,000	75	Rp 647,280,000										
SOSIAL																		
1.01.0 7.15	Program Rehabilitasi Dan Pemberdayaan Sosial	Persentase PMKS yang mendapat pelayanan Sosial	%	100	100	Rp 1,170,000,000												
	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS yang mendapat pelayanan Sosial	%	100			100	Rp 717,000,000										
1.01.0 7.16	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase PMKS yang mendapatkan Jaminan pemenuhan kebutuhan dasar	%	100	100	Rp 525,000,000	100	Rp 546,000,000										Sosial
	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PMKS yang terfasilitasi dengan program pemberdayaan sosial	%	0,75			0,80	Rp 675,000,000										
1.01.0 7.19	Program Kedaruratan dan Logistik	Persentase Korban Terdampak Bencana yang ditangani	%	100	100	Rp 599,500,000	100	Rp 623,480,000										
1.01.0 7.20	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Desa Tangguh Bencana	Desa	7.00	8.00	Rp 408,750,000	9.00	Rp 425,100,000										Sosial

**Perubahan RPJMD
Kabupaten Tulungagung 2018-2023**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					2019		2020		2021		2022		2023		Kinerja Akhir RPJMD			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1.01.0 7.21	Program rehabilitasi dan Rekonstruksi	Persentase rencana pemulihan yang direhabilitasi dan rekonstruksi	%	26	60	Rp 9,074,200,000	60	Rp 9,437,168,000										
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR																		
TENAGA KERJA																		
1.02.0 1.16	Program Peningkatan Hubungan Industrial, Perlindungan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Tenaga Kerja	Persentase perusahaan terdaftar yang menerapkan undang-undang ketenagakerjaan	%	65	70	Rp 218,000,000	75	Rp 227,000,000										Tenaga Kerja
1.02.0 1.17	Program Penunjang Teknis Operasional Bidang Pelatihan Tenaga Kerja	Persentase terlaksananya pelatihan kompetensi yang direkomendasikan bidang pelatihan	%	100	100	Rp 436,000,000	100	Rp 454,000,000										
1.02.0 1.15	Program Penempatan Dan Perluasan Kesempatan Kerja	Persentase tingkat kesempatan kerja	%	94.6	94.7	Rp 436,000,000	94.8	Rp 454,000,000										
1.02.0 1.18	Program Data Dan Informasi Ketenagakerjaan	Persentase kebutuhan dokumen data ketenagakerjaan dan ketransmigrasian	%	100	100	Rp 109,000,000	100	Rp 114,000,000										
1.02.0 1.19	Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja terdaftar pelatihan yang memiliki ketrampilan	%	100	100	Rp 218,000,000	100	Rp 227,000,000										
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																		
1.02.0 2.15	Program Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Persentase Pemberdayaan Kelompok Perempuan	%	100	100	Rp 645,000,000	100	Rp 671,000,000										PP dan PA
		Persentase Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	%	100	100		100											
PANGAN																		
1.02.0 3.16	Program Peningkatan Keamanan dan Mutu Pangan	Persentase menurunnya bahan pangan yang mengandung bahan tambahan pangan (BTP) yang berbahaya dan residu pestisida	%	37	30	Rp 900,000,000	25	Rp 936,000,000										Pangan

**Perubahan RPJMD
Kabupaten Tulungagung 2018-2023**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					2019		2020		2021		2022		2023		Kinerja Akhir RPJMD			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	Program Pembangunan Infrastruktur Pangan	Persentase Pemanfaatan infrastruktur pangan	%	100	100	Rp 975,000,000	100	Rp 1,014,000,000										
1.02.0 3.15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Tulungagung	ton	20	25	Rp 1,515,000,000	30	Rp 1,576,000,000										
1.02.0 3.17	Program Pengentasan Daerah Rawan Pangan	Persentase Penanganan Desa Rawan Pangan	%	100	100	Rp 1,400,000,000	100	Rp 1,465,000,000										
PERTANAHAN																		
1.02.0 4.15	Program Pertanahan	Persentase kasus pertanahan yang ditindaklanjuti	%	100	100	Rp 150,000,000	100	Rp 156,000,000										Pertanahan
LINGKUNGAN HIDUP																		
	Program Tata Lingkungan	Persentase tersedianya RTH kondisi baik	%	80	-	Rp -	84	Rp 3,789,708,000										Lingkungan Hidup
1.02.0 5.15	Program Pengelolaan Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Jumlah dokumen dan rencana pengelolaan lingkungan hidup yang tersusun	Dokumen	3	3	Rp 659,450,000	-	Rp -										
1.02.0 5.16	Program Peningkatan Kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	Jumlah penerbitan ijin lingkungan	Ijin	30	30	Rp 750,000,000	-	Rp -										
	Program Peningkatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan masyarakat atas usaha/kegiatan yang menimbulkan pencemaran lingkungan yang ditindaklanjuti	%	100	-	Rp -	100	Rp 463,060,000										
1.02.0 5.19	Program Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang mendapat pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	Lembaga	5 Lembaga / 88 Sekolah	60 Lembaga / 100 Sekolah	Rp 245,250,000	-	Rp -										
1.02.0 5.20	Program Pengawasan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan masyarakat atas usaha/kegiatan yang menimbulkan pencemaran lingkungan yang ditindaklanjuti	%	100	100	Rp 200,000,000	-	Rp -										

**Perubahan RPJMD
Kabupaten Tulungagung 2018-2023**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					2019		2020		2021		2022		2023		Kinerja Akhir RPJMD			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1.02.0 5.18	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah perusahaan yang memiliki ijin pembuangan limbah cair (IPLC)	Perusahaan	16	17	Rp 817,500,000	18	Rp 850,200,000										
1.02.0 5.21	Program Penunjang Teknis Operasional Bidang Laboratorium Lingkungan	Jumlah permintaan uji layanan laboratorium lingkungan	Layanan	6	10	Rp 239,800,000	15	Rp 249,392,000										
1.02.0 5.17	Program Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	Volume sampah yang terangkut	Ton/Tahun	43,070	57,305	Rp 2,728,430,000	71,905	Rp 6,694,407,200										
1.02.0 5.22	Program Penunjang Teknis Operasional Bidang Persampahan	Persentase sampah tertangani	%	100	100	Rp 3,000,000,000	-	Rp -										
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																		
1.02.0 6.15	Program Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Anak yang berakte kelahiran	%	90	90	Rp 300,000,000	92	Rp 400,000,000										
		Persentase Penduduk meninggal yang berakte Kematian	%	12.9	13		14											
1.02.0 6.16	Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan KTP-el	%	97	97	Rp 275,000,000	98	Rp 375,000,000										
		Persentase Kepemilikan KIA	%	10	20		25											
		Persentase Kepemilikan KK	%	100	100		100											
1.02.0 6.17	Program Pengelolaan Informasi Administrasi dan Kependudukan	Persentase sarpras SIAK yang layak fungsi	%	100	100	Rp 150,000,000	100	Rp 156,000,000										
		Persentase laporan data kependudukan yang tepat waktu	%	100	100		100											
1.02.0 6.19	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase ketersediaan dokumen Kependudukan tepat waktu	%	100	100	Rp 2,100,000,000	100	Rp 2,684,000,000										
1.02.0 6.18	Program Pemanfaatan Data dan inovasi	Jumlah Lembaga/PD yang telah melakukan PKS	Lembaga	-	2	Rp 250,000,000	4	Rp 260,000,000										
		Persentase penerapan inovasi pelayanan	%	100	100		100											

**Perubahan RPJMD
Kabupaten Tulungagung 2018-2023**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					2019		2020		2021		2022		2023		Kinerja Akhir RPJMD			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	Pelayanan kependudukan																	
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																		
1.02.0 7.15	Program Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa	Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)	indeks	0.6054	0.6074	Rp 750,000,000	-	Rp -										Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.02.0 7.18	Program Pendayagunaan Sumber Daya Alam Dan Teknologi Tepat Guna	Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)	indeks	0.6362	0.6382	Rp 590,000,000	-	Rp -										
1.02.0 7.16	Program Penataan Dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Prosentasi Desa yang menerapkan SID	%	100	100	Rp 1,225,500,000	-	Rp -										
	Program Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa dan pendayagunaan TTG	Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)	indeks	0.6054	-	Rp -	0.6094											
		Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)	indeks	0.6362	-	Rp -	0.6402	Rp 1,086,500,000										
1.02.0 7.17	Program Partisipasi Dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Indeks Ketahanan Sosial (IKS)	Indeks	0.7228	0.7248	Rp 1,170,000,000	0.7268	Rp 1,500,000,000										
	Program Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa	Prosentasi Desa yang menerapkan SID	%	100	-	Rp -	100	Rp 1,275,000,000										
	Program Perencanaan dan Pembangunan Desa	Persentase desa yang melaksanakan sistem manajemen pembangunan partisipatif	%	100	-	Rp -	100	Rp 1,200,000,000										
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																		
1.02.0 8.16	Program Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan Masyarakat	Persentase Pelaksanaan KIE di Desa dan Kecamatan	%	100	100	Rp 970,000,000	100	Rp 1,009,000,000										Pengendalian Penduduk & KB
1.02.0 8.15	Program Keluarga Berencana, Ketahanan dan	Prevalensi Penggunaan Metode kontrasepsi (CPR) semua cara	%	61.5	61.5	Rp 7,599,000,000	62	Rp 7,903,000,000										

**Perubahan RPJMD
Kabupaten Tulungagung 2018-2023**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					2019		2020		2021		2022		2023		Kinerja Akhir RPJMD			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	Kesejahteraan Keluarga																	
PERHUBUNGAN																		
1.02.0 9.15	Program Keselamatan Jalan	Persentase pengendalian lalu lintas	%	100	100	Rp 272,500,000	100	Rp 283,400,000										Perhubungan
1.02.0 9.16	Program Penunjang Teknis Operasional Bidang Pelayanan Perparkiran	Nilai survey kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perparkiran	%	80	80	Rp 163,500,000	-	Rp -										
1.02.0 9.17	Program Prasarana Perhubungan	Persentase prasarana perhubungan yang terkelola	%	100	100	Rp 426,300,000	100	Rp 1,325,040,000										
1.02.0 9.19	Program Angkutan dan Sarana Perhubungan	Persentase angkutan yang melayani masyarakat	%	20	20	Rp 1,631,400,000	20	Rp 1,633,656,000										
1.02.0 9.18	Program Lalu Lintas Jalan	Persentase fasilitas perlengkapan jalan	%	100	100	Rp 1,962,000,000	100	Rp 3,585,555,000										
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																		
1.02.1 0.16	Program Peningkatan Penyelenggaraan E-Government	Persentase Perangkat Daerah berbasis elektronik	%	28	33	Rp 1,125,000,000	47	Rp 1,170,000,000										
1.02.1 0.14	Program Peningkatan Komunikasi dan Informasi serta Penggunaan Media Massa	Persentase Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	%	84	89	Rp 450,000,000	95	Rp 468,000,000										Komunikasi & Informatika
		Persentase hasil peliputan yang dipublikasikan	%	57	71		79											
1.02.1 0.17	Program Layanan Komunikasi Dan Informatika	Persentase Pengaduan Masyarakat Yang di Tindak Lanjuti	%	3	16	Rp 259,000,000	32	Rp 270,000,000										
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH																		
1.02.1 1.18	Program Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro	Persentase peningkatan Usaha Mikro Naik Kelas Menjadi Usaha Kecil	%	2	2	Rp 1,100,000,000	2	Rp 1,200,000,000										Koperasi UKM
1.02.1 1.16	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Peningkatan Pendapatan Koperasi	%	10	10	Rp 600,000,000	10	Rp 700,000,000										

**Perubahan RPJMD
Kabupaten Tulungagung 2018-2023**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					2019		2020		2021		2022		2023		Kinerja Akhir RPJMD				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1.02.1 1.15	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif	%	80	80	Rp 500,000,000	0	Rp -											
	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan Pengawasan	Persentase Koperasi Aktif Bersertifikat NIK	%	70	0	Rp -	70	Rp 1,400,000,000											
1.02.1 1.19	Program Penumbuhan Wirausaha Baru	Persentase Peningkatan Wirausaha Baru	%	3	3	Rp 200,000,000	3	Rp 300,000,000											
1.02.1 1.17	Program Pengawasan dan Pengendalian Koperasi	Persentase Pertumbuhan Koperasi Cukup Sehat	%	10	10	Rp 720,000,000	0	Rp -											
PENANAMAN MODAL																			
1.02.1 2.22	Program Penguatan Kapasitas Data dan Penanganan Pengaduan Penanaman Modal	Persentase penyediaan data dan layanan informasi DPMPTSP	%	100	100	Rp 875,000,000	100	Rp 1,025,000,000										Penanaman Modal	
		Persentase penyelesaian permasalahan perijinan	%	100	80		0												
		Persentase penyelesaian permasalahan perijinan	%	100	100		100												
1.02.1 2.23	Program Promosi dan Pengembangan Penanaman Modal	Persentase tercapainya target investor di Kabupaten Tulungagung	%	107	85	Rp 1,150,000,000	0	Rp 1,325,000,000											
		Persentase tercapainya Nilai investasi Kabupaten Tulungagung	%	97	85		0												
		Persentase tercapainya Nilai investasi PMA & PMDN Kabupaten Tulungagung	%	100	100		100												
1.02.1 2.21	Program pelayanan penanaman modal	Persentase pelayanan perijinan Non Usaha	%	99	80	Rp 650,000,000	82.5	Rp 755,000,000											
		Persentase pelayanan perijinan Jasa Usaha	%	101	80		82.5												
		Persentase pelayanan perijinan yang tepat waktu	%	83	85		87.5												
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA																			
1.02.1 3.01	Program Pembinaan	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	20	24		28												

**Perubahan RPJMD
Kabupaten Tulungagung 2018-2023**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					2019		2020		2021		2022		2023		Kinerja Akhir RPJMD			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	Pemuda dan Olahraga	Persentase organisasi Olahraga yang berprestasi	%	13	13	Rp 1,487,850,000	14	Rp 1,548,000,000										Kepemudaan & Olahraga
STATISTIK																		
1.02.1 4.15	Program Pengembangan Data/Informasi/Statisik Daerah	Persentase Data/Informasi/Statistik yang dijadikan dasar penentuan kebijakan	%	100	100	Rp 360,000,000	100	Rp 375,000,000										Statistik
PERSANDIAN																		
1.02.1 5.15	Program tata kelola pengawasan dan pengamanan Persandian	Persentase Berita yang diterima dan didistribusikan ke OPD	%	100	100	Rp 164,000,000	100	Rp 179,000,000										Persandian
KEBUDAYAAN																		
1.02.1 6.05	Program Pengelolaan Nilai Budaya dan Kesenian	Persentase peningkatan jumlah organisasi seni budaya yang aktif	%	2	2	Rp 1,950,000,000	2	Rp 2,025,000,000										Kebudayaan
1.02.1 6.06	Program Pengelolaan Sejarah dan Purbakala	Persentase Cagar Budaya, Museum, dan Purbakala yang dilestarikan	%	100	100	Rp 650,000,000	100	Rp 680,000,000										
PERPUSTAKAAN																		
1.02.1 7.15	Program peningkatan kualitas perpustakaan	Persentase Peningkatan pemustaka	%	8,6	9	Rp 490,500,000	-	Rp -										Perpustakaan
	Program pengembangan perpustakaan	Persentase Peningkatan pemustaka	%	8,6	-	Rp -	9,5	Rp 511,000,000										
1.02.1 7.16	Program pembinaan dan Pengawasan Perpustakaan	Persentase Perpustakaan Desa/Kelurahan yang sudah berjalan	%	10	13	Rp 128,000,000	15	Rp 139,000,000										
KEARSIPAN																		
1.02.1 8.15	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Persentase tertib arsip di OPD	%	32.5	35	Rp 450,000,000	37	Rp 468,000,000										Kearsipan
Program Pembinaan dan Pengawasan Arsip Daerah	Persentase OPD/Satker yang menerapkan arsip secara baku	%	8.9	10	Rp 109,000,000	12	Rp 119,000,000											

**Perubahan RPJMD
Kabupaten Tulungagung 2018-2023**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					2019		2020		2021		2022		2023		Kinerja Akhir RPJMD			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
wasan Arsip																		
URUSAN PILIHAN																		
KELAUTAN DAN PERIKANAN																		
2.00.0 1.15	Program Optimalisasi Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Budidaya Ikan Hias	Ekor	52.428.770	53.895.189	Rp 3,490,000,000	56.589.948	Rp 3,088,500,000										Kelautan dan Perikanan
		Jumlah Produksi Budidaya Ikan Konsumsi	Ton	36.909,19	33,373.00		34.442,07											
2.00.0 1.16	Program Optimalisasi Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	ton	5.897,58	5.487,89	Rp 475,000,000	5.594,83	Rp 875,000,000										
2.00.0 1.17	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Usaha Perikanan	Jumlah Kelompok yang meningkat Kelasnya	Kelompok	15	5	Rp 975,000,000	-	Rp -										
		Jumlah Kelompok Perikanan	Kelompok Komulatif	499	450		-											
		Nilai Produksi Olahan Hasil Perikanan	(Juta Rp.)	205.640,02	139.704,44		-											
2.00.0 1.18	Program Pemberdayaan Masyarakat Perikanan	Jumlah Usaha perikanan yang meningkat skala usahanya (unit)	unit	-	-	Rp -	45	Rp 1,150,000,000										
PARIWISATA																		
2.00.0 2.07	Program Pengembangan Destinasi Wisata	Persentase peningkatan daya tarik wisata yang dikembangkan	%	2	2	Rp 1,625,000,000	2	Rp 1,695,000,000										Pariwisata
2.00.0 2.10	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif	Persentase peningkatan pelaku ekonomi kreatif	%	2	2	Rp 650,000,000	2	Rp 685,000,000										
2.00.0 2.09	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan	orang	800,000	800,000	Rp 1,950,000,000	900,000	Rp 2,035,000,000										
2.00.0 2.08	Program Pengembangan Kemitraan	Persentase peningkatan usaha pariwisata yang ber TDUP	%	10	10	Rp 385,000,000	10	Rp 405,000,000										Pariwisata
		Persentase peningkatan SDM kepariwisataan yang terampil	%	5	5		5											
PERTANIAN																		
2.00.0 3.15	Program Peningkatan	Jumlah Produksi tanaman Pangan																Pertanian

**Perubahan RPJMD
Kabupaten Tulungagung 2018-2023**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					2019		2020		2021		2022		2023		Kinerja Akhir RPJMD					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	Produksi Tanaman Pangan	- Padi	Ton	377,740	303,294	Rp 6,705,000,000	303,294	Rp 7,460,000,000												
		- Jagung	Ton	339,955	269,353		269,353													
		- Kedelai	Ton	1,422	1,380		1,380													
2.00.0 3.16	Program Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan	Jumlah Produksi tanaman perkebunan				Rp 11,800,000,000		Rp 12,160,000,000												
		* Tebu (tton tebu basah)	Ton	519,398	507,727		508,825													
		* Tembakau (ton rajangan kering)	Ton	1,904	2,503.87		2,510.87													
		* Kelapa (butir)	Ton	24,970,000	23,450,000		23,550,000													
		* Kakau (ton oce kering)	Ton	409	420		426													
		* Kopi (ton oce kering)	Ton	127	125		130													
		* Cengkeh (ton bunga kering)	Ton	387	414		420													
2.00.0 3.17	Program Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura	Jumlah Produksi tanaman hortikultura				Rp 7,285,000,000		Rp 7,570,000,000												
		* Cabe Rawit	Ton	1,616.30	1,616.30		1,619.30													
		* Cabe Besar	Ton	543.20	543.20		545.20													
		* Bawang Merah	Ton	1,058.60	1,058.60		1,060.60													
		* Belimbing	Ton	11,368.00	11,368.00		11,375.00													
2.00.0 3.23	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Jumlah populasi (Ekor)				Rp 5,865,000,000		Rp 5,315,000,000												
		sapi potong	ekor	122,652	125,105		127,607													
		Sapi Perah	ekor	24,482	24,543		24,650													
		Kambing	ekor	195,720	199,634		203,627													
		Domba	ekor	7,410	7,447		7,484													

**Perubahan RPJMD
Kabupaten Tulungagung 2018-2023**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					2019		2020		2021		2022		2023		Kinerja Akhir RPJMD			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		Ayam Petelur	ekor	5,116,700	5,219,034		5,323,415											
		Ayam Pedaging	ekor	8,644,073	8,816,954		8,993,294											
		Ayam Buras	ekor	2,459,964	2,509,163		2,559,347											
		Itik	ekor	549,302	560,288		571,494											
		Jumlah Produksi Ternak	Ton															
		Daging	Ton	37,833.37	38,117.12		38,403.00											
		Telur	Ton	60,391.26	60,995.17		61,605.12											
		Susu	Ton	48,416.36	48,900.52		49,389.53											
2.00.0 3.21	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Penyakit Hewan	Persentase Angka Kematian Ternak Akibat Penyakit (mortalitas)	%	0.9	0.9	Rp 1,350,000,000	1	Rp 1,407,000,000										
		Persentase kejadian penyakit hewan yang ditangani	%	92	92		92											
		Persentase menurunnya wilayah terancam wabah	%	2	2		2											
2.00.0 3.18	Program Peningkatan Sarana, Prasarana Dan Teknologi Pertanian	Jumlah Pembangunan Infrastruktur Pertanian	Unit	60	60	Rp 29,590,000,000	65	Rp 30,725,000,000										Pertanian
		Jumlah Alat Mesin Pertanian (Alsintan) Yang Dibantukan Kepada Petani	Unit	850	850		115											
2.00.0 3.20	Program Pengembangan Agribisnis Peternakan	Persentase usaha peternakan yang berwawasan agribisnis	%			Rp 550,000,000		Rp 580,000,000										Pertanian
		Usaha peternakan sapi perah	%	44,9	44,9		47,9											
		Usaha peternakan sapi potong	%	54,1	54,1		56,1											
		Usaha peternakan ayam ras petelur	%	51,3	51,3		53,4											
		Usaha peternakan ayam ras pedaging	%	33,16	33,16		35,26											
		Usaha peternakan ayam buras	%	22,1	22,1		23,5											
		Usaha peternakan kambing	%	28,4	28,4		29,4											

**Perubahan RPJMD
Kabupaten Tulungagung 2018-2023**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					2019		2020		2021		2022		2023		Kinerja Akhir RPJMD			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		Usaha peternakan domba	%	25	25		28,8											
		Usaha peternakan itik	%	9,7	9,7		11,2											
2.00.0 3.19	Program Pengembangan SDM Pertanian	Jumlah Kelompok Tani Yang Dibina	Kelompok	1150	1150	Rp 3,045,000,000	1160	Rp 3,125,000,000										Pertanian
2.00.0 3.22	Program Peningkatan Keamanan Produk Asal Hewan	Persentase produk pangan asal hewan yang ASUH	%	90	90		90											Pertanian
		Persentase unit usaha produk hewan yang memenuhi standart hygiene sanitasi	%	90	90	Rp 1,125,000,000	90	Rp 1,190,000,000										Pertanian
PERDAGANGAN																		
2.00.0 4.15	Program Peningkatan Kapasitas Perdagangan	Persentase Peningkatan Kapasitas Perdagangan	%	80	80	Rp 2,200,000,000	80	Rp 2,025,000,000										Perdagangan
2.00.0 4.16	Program Pengelolaan Pasar	Persentase Pasar dengan kondisi baik	%	60	75	Rp 6,000,000,000	75	Rp 6,300,000,000										Perdagangan
	Program Stabilisasi Harga	Persentase Harga Komoditi Barang Pokok yang terjaga stabilitas harganya	%	80	0	Rp -	80	Rp 75,000,000										Perdagangan
	Program Peningkatan Kemetrologian	Persentase peningkatan metrologi legal	%	2	0	Rp -	2	Rp 200,000,000										Perdagangan
PERINDUSTRIAN																		
2.00.0 5.15	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Persentase peningkatan jumlah produksi IKM	%	60	1	Rp 800,000,000	1	Rp 1,215,000,000										Perindustrian
2.00.0 5.16	Program Sistem Informasi Industri dan Perdagangan	Persentase peningkatan sistem Informasi Industri dan Perdagangan	%	25	5	Rp 300,000,000	0	Rp -										Perindustrian
TRANSMIGRASI																		
2.00.0 6.15	Program Ketramigrasian	Persentase Calon transmigran yang mendapat pelayanan	%	100	100	Rp 164,000,000	100	Rp 179,000,000										Transmigrasi
FUNGSI PENUNJANG URUSAN																		
PERENCANAAN																		
3.00.0 1.16	Program Perencanaan	Persentase keselarasan RKPd dengan RPJMD	%	90	90		90											Perencanaan

**Perubahan RPJMD
Kabupaten Tulungagung 2018-2023**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					2019		2020		2021		2022		2023		Kinerja Akhir RPJMD				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	Pembangunan Daerah	Persentase laporan pelaksanaan program pembangunan yang selesai tepat waktu	%	75	75	Rp 2,000,000,000	75	Rp 1,100,000,000											
3.00.0 1.15	Program Perencanaan Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Persentase keselarasan Rencana Kerja PD dengan RPJMD di lingkup Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	%	90	90	Rp 1,200,000,000	-	Rp -											
		Persentase aspirasi masyarakat yang tertampung dalam dokumen perencanaan di lingkup Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	%	90	90		-												
	Program Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase keselarasan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan RPJMD di lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	97	-	Rp -	97	Rp 1,250,000,000											
		Persentase aspirasi masyarakat yang tertampung dalam dokumen perencanaan di lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	90	-		91												
3.00.0 1.17	Program Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Persentase keselarasan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan RPJMD di lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	%	100	100	Rp 1,635,000,000	-	Rp -											
		Persentase aspirasi masyarakat yang tertampung dalam dokumen perencanaan di lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	%	100	100		-												
	Program Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase keselarasan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan RPJMD di lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	100	-	Rp -	100	Rp 1,700,400,000											

**Perubahan RPJMD
Kabupaten Tulungagung 2018-2023**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					2019		2020		2021		2022		2023		Kinerja Akhir RPJMD				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		Persentase aspirasi masyarakat yang tertampung dalam dokumen perencanaan di lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	100	-		100												
3.00.0 1.18	Program Perencanaan Ekonomi	Persentase keselarasan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan RPJMD di lingkup Bidang Ekonomi	%	90	90		-												
		Persentase aspirasi masyarakat yang tertampung dalam dokumen perencanaan di lingkup Bidang Ekonomi	%	90	90														
	Program Perencanaan Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Persentase keselarasan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan RPJMD di lingkup Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	%	90	-		97												
		Persentase aspirasi masyarakat yang tertampung dalam dokumen perencanaan di lingkup Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	%	90	-		91												
KEUANGAN																			
3.00.0 2.15	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase PD yang mengirmkan DPA/DPPA tepat waktu	%	90	100		0												
		Lamanya waktu penyusunan RAPBD	hari	92	68		0												
		Persentase dokumentasi perbendaharaan yang tertib dan sesuai ketentuan	%	100	100		0												
		Ketepatan waktu dalam pelaporan belanja hibah dan bantuan sosial	-	tepat waktu	tepat waktu		0												
		Persentase PD yang tepat waktu dalam menyampaikan Laporan Keuangan berbasis SAP (Akrual)	%	70	70		0												

**Perubahan RPJMD
Kabupaten Tulungagung 2018-2023**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					2019		2020		2021		2022		2023		Kinerja Akhir RPJMD			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		Persentase PD yang tepat waktu dalam menyampaikan SPJ fungsional	%	85	85		0											
3.00.0 2.17	Program Optimalisasi Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Persentase Peningkatan realisasi pendapatan asli daerah	%	10	10	Rp 200,000,000	0	Rp -										
	Program Peningkatan Pengelolaan Anggaran Daerah	Persentase PD yang mengirimkan DPA/DPPA tepat waktu	%	80	80	Rp 1,100,000,000	80	Rp 1,130,000,000										
	Program Peningkatan Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah	Persentase Penerbitan SP2D tepat waktu	%	100	100	Rp 1,000,000,000	100	Rp 1,000,000,000										
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pertanggungjawaban dan Penyusunan Laporan Keuangan	Persentase PD yang tepat waktu dalam menyampaikan Laporan Keuangan sesuai SAP (Akrual)	%	75	75	Rp 1,000,000,000	75	Rp 1,000,000,000										Keuangan
3.00.0 2.16	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	Persentase OPD yang menyampaikan Laporan BMD tepat waktu	%	80	80	Rp 2,150,000,000	80	Rp 2,150,000,000										
3.00.0 2.17	Program Peningkatan Ketetapan Pajak Daerah	Persentase Peningkatan Ketetapan Pajak Daerah	%	31.6	32	Rp 4,860,000,000	0	Rp -										
3.00.0 2.18	Program Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah	Rasio Realisasi Penerimaan Pajak Daerah terhadap Potensi Pajak Daerah	%	87.36	88	Rp 3,185,000,000	0	Rp -										Keuangan
	Program Pengembangan PAD	Jumlah target PAD	Rp.	411.955.754.691,77	0	Rp -	479.615.779.798,1	Rp 2,615,000,000										
	Program Optimalisasi Penerimaan PAD	Rasio Realisasi penerimaan PAD terhadap target PAD	%	109.69	0	Rp -	100	Rp 2,671,857,000										

KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

**Perubahan RPJMD
Kabupaten Tulungagung 2018-2023**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					2019		2020		2021		2022		2023		Kinerja Akhir RPJMD			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	Program Pembinaan dan Pengembangan ASN	Persentase penurunan pelanggaran disiplin PNS	%	-	5	Rp 436,000,000	-	Rp -										Kepegawaian, Pendidikan & Pelatihan
		Persentase layanan pengelolaan jabatan sesuai prosedur	%	100	80		-											
		Persentase rekrutmen ASN berbasis CAT System	%	95.8	95		-											
3.00.0 3.15	Program Penilaian Kinerja dan Pembinaan Aparatur	Persentase kesenjangan kinerja pegawai min rendah	%	-	-	Rp -	70	Rp 400,000,000										
		Persentase penurunan pelanggaran disiplin PNS	%	-	-		10											
	Program Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja Kepegawaian	Persentase kesenjangan kompetensi manajerial pegawai min rendah	%	-	35	Rp 4,620,000,000	-	Rp -										
		Persentase kesenjangan kompetensi sosial kultural pegawai tidak ada kesenjangan	%	-	65		-											
		Persentase kesenjangan kompetensi teknis pegawai min rendah	%	-	30		-											
		Persentase kesenjangan kompetensi fungsional pegawai min rendah	%	-	65		-											
		Persentase kesenjangan kinerja pegawai min rendah	%	-	65		-											
3.00.0 3.16	Program Pengembangan Kompetensi Aparatur	Persentase kesenjangan kompetensi manajerial pegawai min rendah	%	-	-	Rp -	40	Rp 1,470,000,000										
		Persentase kesenjangan kompetensi sosial kultural pegawai tidak ada kesenjangan	%	-	-		70											
		Persentase kesenjangan kompetensi teknis pegawai min rendah	%	-	-		35											
		Persentase kesenjangan kompetensi fungsional pegawai min rendah	%	-	-		65											
	Program Pelayanan Mutasi dan Purna Pegawai	Persentase promosi ASN yang memenuhi kompetensi jabatan	%	-	60	Rp 775,000,000	-	Rp -										

**Perubahan RPJMD
Kabupaten Tulungagung 2018-2023**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					2019		2020		2021		2022		2023		Kinerja Akhir RPJMD			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		Persentase promosi JPT Pratama melalui seleksi terbuka	%	100	100		-											
		Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II)	%	10.3	20		-											
		Proporsi PNS perempuan yang berada di posisi manajerial (eselon IV s.d. II)	%	34.4	30		-											
		Persentase layanan mutasi dan pensiun pegawai tepat waktu	%	100	100		-											
3.00.0 3.17	Program Pelayanan Pensiun dan Pengembangan Karir ASN	Persentase mutasi dan promosi ASN yang memenuhi kompetensi jabatan	%	-	-		70											
		Persentase promosi JPT Pratama melalui seleksi terbuka	%	100	-		100											
		Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif (Eselon II)	%	10.3	-	Rp -	20	Rp 806,000,000										
		Proporsi PNS perempuan yang berada di posisi manajerial (Eselon IV s.d. II)	%	34.4	-		30											
		Persentase layanan kepangkatan dan pensiun pegawai tepat waktu	%	100	-		100											
3.00.0 3.18	Program Peningkatan Data dan Informasi Kepegawaian	Persentase data pegawai akurat dan terkini	%	84.2	90		-											
		Persentase teknologi informasi kepegawaian aktif dan terpakai	%	100	100	Rp 335,000,000	-	Rp -										
		Persentase layanan dokumen dan informasi kepegawaian tepat waktu	%	100	100		-											
3.00.0 3.19	Program Pengadaan, Layanan Informasi	Persentase rekrutmen ASN berbasis CAT system	%	95.8	-		95	Rp 654,000,000										
		Persentase data pegawai akurat dan terkini	%	84.2	-		100											

**Perubahan RPJMD
Kabupaten Tulungagung 2018-2023**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kinerja Akhir RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	dan Fasilitasi Profesi ASN	Persentase layanan pengelolaan jabatan fungsional dan informasi kepegawaian sesuai prosedur	%	-	-		70										
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																	
3.00.0 4.19	Program Penelitian dan Pengembangan	Persentase hasil penelitian yang dapat dijadikan sebagai bahan perumusan kebijakan pembangunan	%	100	100	Rp 650,000,00	100	Rp 2,050,000,000									Penelitian & Pengembangan
		Persentase inovasi sistem dan teknologi yang mendukung program pengembangan daerah	%	100	100		100										
FUNGSI PENDUKUNG URUSAN																	
KESEKRETARIATAN DAERAH																	
4.00.0 1.21	Program Peningkatan Kapasitas Organisasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Perangkat daerah yg akuntabilitas kerjanya Sangat Baik ≥ BB	Lembaga	38	39		42										Kesekretariatan Daerah
		Persentase Perangkat Daerah yang tepat fungsi, tepat proses dan tepat ukuran	%	100	100	Rp 750,000,00	100	Rp 780,000,00									
		Perangkat Daerah yang melaksanakan PMPRB	Perangkat Daerah	45	47		49										
4.00.0 1.05	Program Penguatan Kinerja Pelayanan Publik	Unit Kerja yang menerapkan standar pelayanan publik	Lembaga	39	40	Rp 550,000,00	45	Rp 572,000,00									
4.00.0 1.19	Program Penyusunan Kebijakan dan Pengkoordinasian Administratif Bidang Pembangunan	Persentase Penyusunan Kebijakan dan Pengkoordinasian Bidang Administrasi Pembangunan	%	-	96	Rp 545,000,00	96	Rp 566,800,00									
4.00.0 1.20	Program Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pelayanan Pengadaan Barang / Jasa	%	-	98	Rp 2,544,750,000	98	Rp 2,878,540,000									
4.00.0 1.17	Program Penyusunan Kebijakan dan Pengkoordinasian Bidang Hukum	Persentase produk hukum daerah yg ditetapkan	%	100	82		84										
		Persentase naskah kerjasama yang dihasilkan	%	100	100	Rp 1,308,000,000	100	Rp 1,426,000,000									
		Persentase gugatan perkara yang ditangani	%	100	100		100										

**Perubahan RPJMD
Kabupaten Tulungagung 2018-2023**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					2019		2020		2021		2022		2023		Kinerja Akhir RPJMD			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
4.00.0 1.22	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Pemerintah Daerah	Persentase pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah yang terlaksana dengan baik	%	100	100	Rp 6,549,000,000	100	Rp 6,877,000,000										
4.00.0 1.15	Program Penyusunan Kebijakan Dan Pengkoordinasian Adiministratif Bidang Pemerintahan	Persentase Fasilitasi dan koordinasi perumusan kebijakan Bidang Pemerintahan Umum	%	100	100		100											
		Persentase Fasilitasi dan koordinasi perumusan kebijakan Bidang Aparatur Pemerintahan Desa	%	100	100	Rp 16,318,000,000	100	Rp 1,500,000,000										
		Persentase Fasilitasi dan koordinasi perumusan kebijakan Bidang Penyelenggaraan Kecamatan dan Kelurahan	%	100	100		100											
4.00.0 1.16	Program Penyusunan Kebijakan dan Pengkoordinasian Adiministratif Bidang Kesejahteraan Masyarakat	Persentase terlaksananya kegiatan-kegiatan pada Kegiatan Fasilitasi Pembinaan, Administrasi, Koordinasi Kebijakan bidang pendidikan dan kebudayaan	%	100	100		100											
		Persentase terlaksananya kegiatan-kegiatan pada Kegiatan Fasilitasi Pembinaan, Administrasi, Koordinasi Kebijakan bidang kemasyarakatan dan keagamaan	%	100	100	Rp 2,800,000,000	100	Rp 3,052,000,000										
		Persentase terlaksananya kegiatan-kegiatan pada Kegiatan Fasilitasi Pembinaan, Administrasi, Koordinasi Kebijakan bidang kesejahteraan rakyat	%	100	100		100											
4.00.0 1.18	Program Penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif bidang perekonomian	Persentase Penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif bidang perekonomian	%	80	80	Rp 2,398,000,000	80	Rp 2,493,920,000										

**Perubahan RPJMD
Kabupaten Tulungagung 2018-2023**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					2019		2020		2021		2022		2023		Kinerja Akhir RPJMD				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
4.00.0 1.23	Program Penyesuaian Kebijakan dan Pengkoordinasian Bidang Kehumasan dan Protokol	Persentase publikasi kegiatan pemerintahan daerah	%	100	100		100												
		Persentase pendokumentasian kegiatan, dan liputan berita kegiatan pemerintahan daerah yang dipublikasikan melalui media cetak	%	100	100	Rp 2,689,000,000	100	Rp 2,796,560,000											
		Persentase fasilitasi keprotokolan sesuai dengan SOP	%	100	100		100												
KESEKRETARIATAN DPRD																			
4.00.0 2.15	Program Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Bidang Perundang-Undangan dan Persidangan	Persentase pencapaian tugas dan fungsi DPRD bidang perundang-undangan dan persidangan	%	100	100	Rp 7,592,000,000	100	Rp 7,896,000,000										Kesekretariatan DPRD	
4.00.0 2.16	Program Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Bidang Penganggaran dan Pengawasan	Persentase pencapaian tugas dan fungsi DPRD bidang penganggaran dan pengawasan	%	100	100	Rp 21,405,000,000	100	Rp 22,262,000,000											
FUNGSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN																			
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN																			
5.00.0 1.17	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Persentase Laporan Hasil Evaluasi Kinerja yang terselesaikan tepat waktu	%	80	80	Rp 1,050,000,000	82	Rp 1,092,000,000										Pembinaan & Pengawasan	
5.00.0 1.15	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan yang terselesaikan tepat waktu	%	80	80	Rp 1,075,000,000	82	Rp 1,118,000,000											

**Perubahan RPJMD
Kabupaten Tulungagung 2018-2023**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					2019		2020		2021		2022		2023		Kinerja Akhir RPJMD			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
5.00.0 1.16	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Persentase Keikutsertaan Aparatur Pengawasan dalam Diklat / Bimtek Penjenjangan dan Teknis Penunjang yang Bersertifikat	%	50	50	Rp 218,000,00	52	Rp 227,000,00										
PEMERINTAHAN UMUM																		
KECAMATAN																		
6.00.0 1.18	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Persentase penyelesaian pelayanan publik	%	100	100	Rp 760,000,00	100	Rp 760,000,00										
6.00.0 1.19	Program Peningkatan Penyelenggaraan Fungsi Pemerintahan	persentase Desa yang melaksanakan fungsi sesuai peraturan yang berlaku	%	100	100	Rp 9,900,000,000	100	Rp 9,000,000,000										Pemerintah an Umum
		persentase Kelurahan yang melaksanakan fungsi sesuai peraturan yang berlaku	%	100	100	Rp 21,032,348,000	100	Rp 16,937,174,000										
URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																		
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																		
7.00.0 1.15	Program Peningkatan Kewaspadaan Dini dan Budaya Politik	Persentase Penguatan kewaspadaan dini dan budaya politik	%	100	100	Rp 450,000,00	100	Rp 468,000,00										
7.00.0 1.17	Program Peningkatan Integrasi Bangsa	Persentase Penguatan Integrasi Bangsa	%	100	100	Rp 355,000,00	100	Rp 369,000,00										Kesatuan Bangsa dan Politik
7.00.0 1.16	Program Peningkatan Hubungan antar Lembaga	Persentase Sinergitas hubungan antar lembaga	%	95	95	Rp 273,000,00	95	Rp 298,000,00										
URUSAN PENUNJANG LAINNYA																		
PENUNJANG LAINNYA																		
1.01.0 6.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	%	95	95	Rp 70,762,123,000	100	Rp 74,618,509,040										SELURUH OPD
1.01.0 6.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana yang Layak Fungsi	%	95	95	Rp 67,219,406,780	100	Rp 75,773,489,680										
1.02.1 2.03	Program Program Peningkatan Kapasitas	Persentase peningkatan kapasitas Sumber Daya Apartur	%	95	95	Rp 6,486,225,000	100	Rp 7,197,730,000										

**Perubahan RPJMD
Kabupaten Tulungagung 2018-2023**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					2019		2020		2021		2022		2023		Kinerja Akhir RPJMD			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	Sumberdaya Aparatur																	
1.02.1 2.04	Program penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu	%	95	95	Rp 3,053,825,000	100	Rp 3,541,747,810										
PROGRAM - PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2018 - 2023 (Sesuai Permendagri 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri 050/3708)																		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																		
1.01.0 1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan	Indeks	80.00					80.00	682,000,000,000	81.00	690,000,000,000	82.00	698,000,000,000	82.00	2,070,000,000,000	DINAS PENDIDIKA N, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
1.01.0 2	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi sekolah usia 7-12 tahun	%	99.74					99.90	232,000,000,000	100.00	252,000,000,000	100.00	274,680,000,000	100.00	758,680,000,000		
		Angka Partisipasi sekolah usia 13-15 tahun	%	98.91					99.5		100.00		100.00		100.00			
1.01.0 3	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase kurikulum muatan lokal pendidikan dasar yang dirumuskan	%	85.00					95.00	250,000,000	96.00	270,000,000	99.00	290,000,000	99.00	810,000,000		
1.01.0 4	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase pemenuhan kebutuhan distribusi GTK	%	96.55					98.00	200,000,000	99.00	210,000,000	100.00	230,000,000	100.00	640,000,000		
1.01.0 5	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase perizinan pendidikan yang diterbitkan	%	75.00					90.00	100,000,000	95.00	125,000,000	100.00	150,000,000	100.00	375,000,000		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																		
1.02.0 1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan	Indeks	n/a					80.00	464,049,632,570	81.00	572,493,906,603	82.00	629,743,297,148	82.00	1,666,286,836,321	DINAS KESEHATA N	
		Prosentase Fasyankes Pemereintah yang telah BLUD	%	n/a					30.30		100		100		100			

**Perubahan RPJMD
Kabupaten Tulungagung 2018-2023**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kinerja Akhir RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Presentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Nilai Kinerja UKP dan UKM dalam Kategori Baik	%	n/a					15.00	167,794,883,443	18.00	236,814,148,286	20.00	266,023,465,172	20.00	670,632,496,901	
1.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	%	n/a					25.00	16,043,215,000	30.00	23,614,164,000	35.00	25,975,580,400	35.00	65,632,959,400	
1.02.04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase Sarana Produksi dan Distribusi sediaan, Alat Kesehatan, makanan minuman sesuai standart yang dipersyaratkan	%	n/a					75.00	968,476,000	75.00	506,145,200	80.00	556,759,720	80.00	2,031,380,920	
1.02.05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan pengembangan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	%	n/a					74.58	2,516,029,500	81.00	2,767,632,450	81.00	3,044,395,695	81.00	8,328,057,645	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																	
1.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan	Indeks	80.00					80.00	17,644,896,227	80.00	19,232,936,887	80.00	20,963,901,207	80.00	57,841,734,322	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
1.03.03	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Penduduk Terlayani Air Minum yang Aman dengan Cakupan Akses Sambungan Rumah (SR) dan Watermeter	%	70.00					86.00	4,138,315,400	89.00	6,000,557,330	90.00	6,540,607,490	90.00	16,679,480,220	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
1.03.05	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Prosentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Sanitasi Dasar	%	83.00					97.00	5,759,649,000	98.00	7,084,368,270	98.60	7,721,961,414	98.60	20,565,978,684	
1.03.06	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase jaringan drainase dalam kondisi baik	%	65.00					72.00	220,000,000	74.00	418,000,000	76.00	455,620,000	76.00	1,093,620,000	
1.03.07	Program Pengembangan Permukiman	Jumlah Dokumen Pengembangan Permukiman	dokumen						1.00	30,000,000	1.00	32,400,000	1.00	35,316,000	3.00	97,716,000	

**Perubahan RPJMD
Kabupaten Tulungagung 2018-2023**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kinerja Akhir RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.03.08	Program Penataan Bangunan Gedung	Prosentase rekomendasi penyelenggaraan bangunan gedung yang sesuai dengan kebijakan penyelenggaraan bangunan gedung	%	70.00					72.00	6,175,000,000	73.00	25,317,500,000	74.00	10,127,000,000	74.00	41,619,500,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
1.03.09	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di daerah Kabupaten/Kota											0.00011932	297,435,507			
1.03.10	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Jalan Dengan Kondisi Baik	%	70.00					77.00	33,251,476,373	77.50	83,128,690,933	78.00	90,610,273,116	78.00	206,990,440,422	
1.03.11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Badan Usaha Yang Sudah Mendapatkan Pembinaan	%	90.00					94.00	350,000,000	100.00	381,500,000	100.00	415,835,000	100.00	1,147,335,000	
1.03.12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase pengajuan rekomendasi tata ruang yang ditindaklanjuti	%	100.00					100.00	550,000,000	100.00	599,500,000	100.00	653,455,000	100.00	1,802,955,000	
1.03.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Sumber Daya Air Yang Terpelihara	%	100					100	11,288,912,000.00	100	21,448,932,800.00	100	23,379,336,752.00	100	56,117,181,552	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
1.03.04	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase perencanaan / pembangunan prasarana persampahan	%	100.00					100.00	3,300,000,000	100.00	15,272,247,000	100.00	1,597,000,000	100.00	20,169,247,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN																	
1.04.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan	Indeks	80					80	14,266,595,410.00	80	15,550,588,996.90	80	16,950,142,006.62	80	46,767,326,414	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.02	Program Pengembangan Perumahan	Prosentase Peningkatan Hunian	%	0.29					0.35	100,000,000.00	0.38	500,000,000.00	0.41	550,000,000.00	0.41	1,150,000,000	

**Perubahan RPJMD
Kabupaten Tulungagung 2018-2023**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kinerja Akhir RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.04.03	Program Kawasan Permukiman	Persentase Rumah Layak Huni	%	97.79					97.87	4,921,493,000.00	97.92	2,000,000,000.00	97.97	2,180,000,000.00	97.97	9,101,493,000	
1.04.05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Prosentase PSU yang ditingkatkan kualitasnya	%	10					11	600,000,000.00	12	654,000,000.00	13	712,860,000.00	13	1,966,860,000	
1.04.04	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Kumuh yang tertangani	Ha	39.40					0	-	56.80	5,500,000,000.00	54.94	5,995,000,000.00	54.94	11,495,000,000	
1.04.06	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase Pengembang Perumahan Yang Meningkatkan Kualifikasinya	%	0					0	-	10	15,000,000.00	15	16,350,000.00	15	31,350,000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																	
1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan	Indeks	75					75	4,845,667,632	75	5,281,777,718	75	5,757,137,712	75	15,884,583,062	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Penanganan Penanggulangan Bencana	%	100					100	895,000,000	100	975,000,000	100	1,063,000,000	100	2,933,000,000	
1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	Indeks	70.00					76.00	12,500,000,000	77.00	13,625,000,000	78.00	14,851,250,000	78.00	40,976,250,000	
1.05.02	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase patroli di wilayah Kab. Tulungagung	%	85.00					85.00	2,141,000,000	90.00	2,333,690,000	95.00	2,543,722,100	95.00	7,018,412,100	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase penanganan kasus kebakaran	%	75.00					80.00	650,000,000	80.00	708,000,000	80.00	772,000,000	80.00	2,130,000,000	

**Perubahan RPJMD
Kabupaten Tulungagung 2018-2023**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kinerja Akhir RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL																	
1.06.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan	Indeks	80.00					80.00	4,620,000,000	81.00	5,000,000,000	82.00	5,200,000,000	82.00	14,820,000,000	DINAS SOSIAL
1.06.02	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PPKS yang terfasilitasi dengan program pemberdayaan	%	27.18					28.00	2,497,000,000	29.00	2,777,000,000	30.00	3,027,000,000	30.00	8,301,000,000	
1.06.03	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase penyelesaian pengaduan dari tindak kekerasan pada WNI migran	%	100.00					100.00	50,000,000	100.00	55,000,000	100.00	59,000,000	100.00	164,000,000	
1.06.04	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PPKS yang mendapat pelayanan Rehabilitasi Sosial	%	100.00					100.00	500,000,000	100.00	545,000,000	100.00	594,000,000	100.00	1,639,000,000	
1.06.05	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PPKS yang mendapatkan Jaminan pemenuhan kebutuhan dasar	%	100.00					100.00	820,000,000	100.00	894,000,000	100.00	974,000,000	100.00	2,688,000,000	
1.06.06	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana yang ditangani	%	100.00					100.00	492,000,000	100.00	537,000,000	100.00	585,000,000	100.00	1,614,000,000	
1.06.07	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase taman makam pahlawan yang terkelola dengan baik	%	100.00					100.00	99,000,000	100.00	107,000,000	100.00	117,000,000	100.00	323,000,000	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA																	
2.07.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan	Indeks	86.00					88.00	5,420,668,000	89.00	5,972,400,000	90.00	6,463,940,000	90.00	17,857,008,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIG RASI
2.07.04	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Penempatan Tenaga Kerja	%	24.29					15.00	825,000,000	20.00	1,177,059,000	24.00	1,294,764,000	24.00	3,296,823,000	
2.07.03	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Persentase peserta pelatihan yang memiliki kompetensi	%	61.72					75.00	722,000,000	80.00	788,494,000	85.00	861,900,000	85.00	2,372,394,000	

**Perubahan RPJMD
Kabupaten Tulungagung 2018-2023**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kinerja Akhir RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2.07.05	Program Hubungan Industrial	Persentase penanganan perselisihan hubungan industrial	%	100.00					100.00	364,000,000	100.00	407,735,000	100.00	437,500,000	100.00	1,209,235,000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																	
2.08.02	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Pelaksanaan Pengarusutamaan gender pada perangkat Daerah	%	100.00					100.00	496,000,000	100.00	540,640,000	100.00	589,297,600	100.00	1,625,937,600	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.03	Program Perlindungan Perempuan	Persentase Pengaduan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang tertangani	%	100.00					100.00	350,000,000	100.00	381,500,000	100.00	415,835,000	100.00	1,147,335,000	
2.08.04	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase pembinaan kepada Kelompok usaha ekonomi produktif perempuan	%	100.00					100.00	240,000,000	100.00	261,600,000	100.00	285,144,000	100.00	786,744,000	
2.08.05	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Persentase Pemanfaatan data gender dan anak	%	100.00					100.00	140,000,000	100.00	152,600,000	100.00	166,334,000	100.00	458,934,000	
2.08.06	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Pemenuhan Hak Anak	%	100.00					100.00	230,000,000	100.00	250,700,000	100.00	273,263,000	100.00	753,963,000	
2.08.07	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Pengaduan Kasus Perlindungan Khusus Anak yang tertngani	%	100.00					100.00	500,000,000	100.00	545,000,000	100.00	595,000,000	100.00	1,640,000,000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN																	
2.09.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan	Indeks	80.00					80.00	4,624,649,238	80.00	4,855,882,000	80.00	5,098,677,000	80.00	14,579,208,238	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Persentase pemanfaatan infrastruktur pangan	%	100.00					100.00	910,581,000	100.00	957,000,000	100.00	1,005,000,000	100.00	2,872,581,000	
2.09.03	Program Peningkatan Diversifikasi Dan	Persentase Peningkatan Cadangan Pangan	%	10.00					15.00	712,000,000	20.00	849,000,000	25.00	893,000,000	25.00	2,454,000,000	

**Perubahan RPJMD
Kabupaten Tulungagung 2018-2023**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					2019		2020		2021		2022		2023		Kinerja Akhir RPJMD			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	Ketahanan Pangan Masyarakat																	
		Jumlah konsumsi energi	(kkal/ka pita/hari)	2150.00					2150.00		2150.00		2150.00		2150.00			
2.09.05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase produk pangan segar yang bersertifikat prima	%	n/a					5.00	65,000,000	10.00	100,000,000	15.00	105,000,000	15.00	270,000,000		
2.09.04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Intervensi Daerah Rawan Pangan	%	100.00					100.00	751,000,000	100.00	989,000,000	100.00	1,039,000,000	100.00	2,779,000,000		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN																		
2.10.04	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Sengketa Tanah Garapan Yang Difasilitasi	%	0					50	50,000,000.00	50	54,500,000.00	50	59,405,000.00	50	163,905,000		
2.10.10	Program Penatagunaan Tanah	Persentase Penatagunaan Tanah yang Difasilitasi	%	0					50	50,000,000.00	50	54,500,000.00	50	59,405,000.00	50	163,905,000		
2.10.06	Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	Jumlah Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee Yang Difasilitasi	lokasi	0					1	50,000,000.00	1	54,500,000.00	1	59,405,000.00	3	163,905,000		
2.10.02	Program Pengelolaan Izin Lokasi	Prosentase Ijin Lokasi Yang Difasilitasi	%	0					0	-	50	50,000,000.00	50	54,500,000.00	50	104,500,000.00		
2.10.05	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Prosentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Yang Difasilitasi	%	0					0	-	50	300,000,000.00	50	327,000,000.00	50	627,000,000.00		
2.10.09	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	Prosentase Izin Membuka Tanah Yang Dikelola	%	0					0	-	50	50,000,000.00	50	54,500,000.00	50	104,500,000.00		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP																		
2.11.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan	Indeks	80.00					80.00	19,802,732,734	80.00	21,584,978,680	80.00	23,527,626,761	80.00	64,915,338,175	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	

**Perubahan RPJMD
Kabupaten Tulungagung 2018-2023**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					2019		2020		2021		2022		2023		Kinerja Akhir RPJMD			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	Daerah Kabupaten/Kota																	
2.11.02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersusun	Dokumen	2.00					2.00	100,000,000	3.00	109,000,000	3.00	118,810,000	8.00	327,810,000		
2.11.03	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah ijin/rekomendasi IPAL untuk pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Ijin/rekomendasi	31.00					40.00	315,000,000	45.00	1,168,690,300	50.00	343,350,000	135.00	1,827,040,300		
2.11.04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	%	78.00					80.00	3,286,000,000	81.00	3,581,740,000	81.00	3,904,096,600	81.00	10,771,836,600		
2.11.05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase rekomendasi TPS B3 yang dikeluarkan	%	100.00					100.00	75,000,000	100.00	305,000,000	100.00	131,750,000	100.00	511,750,000		
2.11.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase kegiatan usaha yang diawasi	%	100.00					100.00	70,000,000	100.00	76,300,000	100.00	83,167,000	100.00	229,467,000		
2.11.08	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Jumlah jenis lembaga yang mendapatkan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota	Lembaga	2.00					2.00	25,000,000	2.00	402,150,000	3.00	27,250,000	3.00	454,400,000		
2.11.09	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Jumlah jenis penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat yang diberikan	Penghargaan	2.00					2.00	50,000,000	3.00	54,500,000	3.00	59,405,000	3.00	163,905,000		

**Perubahan RPJMD
Kabupaten Tulungagung 2018-2023**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kinerja Akhir RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2.11.10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase kasus lingkungan yang tertangani	%	100.00					100.00	45,000,000	100.00	49,050,000	100.00	53,464,500	100.00	147,514,500	
2.11.11	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah yang terkelola	%	35.00					45.00	9,448,000,000	55.00	10,729,600,000	65.00	11,695,264,000	65.00	31,872,864,000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																	
2.12.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan	Indeks	80.00					80.00	9,217,177,726	81.00	10,140,887,000	82.00	10,945,485,000	82.00	30,303,549,726	
2.12.02	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	%	63.00					64.00	1,559,000,000	65.00	1,699,310,000	66.00	1,833,420,000	66.00	5,091,730,000	
2.12.03	Program Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan dokumen pencatatan sipil	%	50.00					51.00	805,700,000	52.00	878,213,000	53.00	957,200,000	53.00	2,641,113,000	
2.12.04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase database kependudukan yang valid dan update sesuai standart SIAK	%	95.00					96.00	300,000,000	97.00	327,000,000	98.00	356,300,000	98.00	983,300,000	
2.12.05	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase ketersediaan data profil kependudukan	%	100.00					100.00	25,000,000	100.00	27,250,000	100.00	30,000,000	100.00	82,250,000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																	
2.13.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan	Indeks	75.00					83.00	6,250,000,000	84.00	6,815,000,000	85.00	7,425,000,000	85.00	20,490,000,000	
2.13.02	Program Penataan Desa	Persentase Desa yang menerapkan Manajemen Pembangunan Partisipatif	%	100.00	-	-	-	-	100.00	1,200,000,000	100.00	1,308,000,000	100.00	1,426,000,000	100.00	3,934,000,000	
2.13.03	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Desa yang ketahanan ekonomi dan ketahanan lingkungannya meningkat	%	25.00	-	-	-	-	40.00	500,000,000	45.00	545,000,000	50.00	594,000,000	50.00	1,639,000,000	

**Perubahan RPJMD
Kabupaten Tulungung 2018-2023**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kinerja Akhir RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2.13.04	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menerapkan SID	%	100.00	-	-	-	-	100.00	4,933,290,000	100.00	5,377,000,000	100.00	5,860,000,000	100.00	16,170,290,000	
2.13.05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Desa yang Ketahanan Sosialnya meningkat	%	25.00	-	-	-	-	50.00	1,600,000,000	60.00	2,500,000,000	70.00	1,901,000,000	70.00	6,001,000,000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																	
2.08.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan	Indeks	n/a					77.00	5,750,000,000	78.00	6,267,500,000	79.00	6,831,575,000	79.00	18,849,075,000	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.14.02	Program Pengendalian Penduduk	Angka Kelahiran Total (TFR)	-	2.02					2.01	400,000,000	2.01	436,000,000	2.00	475,000,000	2.00	1,311,000,000	
2.14.03	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern contraceptive prevalence rate/mCPR)	%	61.00					62.00	8,000,000,000	63.00	8,720,000,000	64.00	9,504,800,000	64.00	26,224,800,000	
2.14.04	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Usia Kawin pertama (UKP) dibawah 20 tahun	%	12.21					12.11	1,000,000,000	12.01	1,090,000,000	12.00	1,188,000,000	12.00	3,278,000,000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN																	
2.15.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks kepuasan layanan kesekretariatan	Indeks	80.00					77.00	41,718,332,008	80.00	18,727,950,108	81.00	20,413,466,000	81.00	80,859,748,116	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase perlengkapan jalan, sarana dan prasarana perhubungan yang layak fungsi	%	70.00					75.00	6,522,522,466	80.00	35,329,650,328	85.00	38,509,319,000	85.00	80,361,491,794	

**Perubahan RPJMD
Kabupaten Tulungagung 2018-2023**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kinerja Akhir RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2.15.03	Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase rekomendasi angkutan sungai, danau dan penyeberangan (ASDP) yang disetujui	%	n/a					100.00	350,000,000	100.00	350,000,000	100.00	350,000,000	100.00	1,050,000,000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																	
2.16.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan	Indeks	70.00					72.00	4,800,000,000	74.00	5,232,000,000	76.00	5,703,000,000	76.00	15,735,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.02	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase informasi dan komunikasi publik daerah yang berfungsi mendukung pembangunan daerah	%	80.00					81.00	594,000,000	82.00	647,000,000	83.00	705,000,000	83.00	1,946,000,000	
2.16.03	Program Aplikasi Informatika	Persentase Aplikasi TIK yang dikelola	%	80.00					81.00	4,725,000,000	82.00	5,150,000,000	83.00	5,614,000,000	83.00	15,489,000,000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH																	
2.17.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan	Indeks	75.00					75.00	9,050,000,000	76.00	10,350,000,000	77.00	12,200,000,000	77.00	31,600,000,000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
#N/A	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase rekomendasi izin pembukaan kantor cabang yang disetujui	%	100.00				-	100.00	-	100.00	-	100.00	52,000,000	100.00	52,000,000	
2.17.03	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif	%	51.79					52.50	200,000,000	53	250,000,000	53.50	300,000,000	53.50	750,000,000	
2.17.04	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase Koperasi yang meningkat kesehatannya	%	9.38					12.43	150,000,000	13.62	200,000,000	14.78	300,000,000	14.78	650,000,000	
2.17.05	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase SDM Pengelola Koperasi bersertifikat	%	33.64					40.91	700,000,000	44.55	750,000,000	48.18	800,000,000	48.18	2,250,000,000	
2.17.06	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi yang meningkat Volume Usahanya	%	30.68					33.33	400,000,000	34.48	450,000,000	35.62	500,000,000	35.62	1,350,000,000	

**Perubahan RPJMD
Kabupaten Tulungagung 2018-2023**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kinerja Akhir RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2.17.07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Usaha Mikro berizin usaha yang meningkat omsetnya	%	16.06					17.56	600,000,000	18.27	700,000,000	18.94	800,000,000	18.94	2,100,000,000	
2.17.08	Program Pengembangan UMKM	Persentase Usaha Mikro berizin usaha yang naik kelas	%	1.16					1.42	400,000,000	1.55	450,000,000	1.62	500,000,000	1.62	1,350,000,000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL																	
2.18.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan	Indeks	70.00					78.61	5,628,475,551	78.71	5,698,475,551	78.81	5,728,475,551	78.81	17,055,426,653	
2.18.02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Nilai Investasi	Miliar	800.00					810	50,000,000	820	90,000,000	830	100,000,000	830	240,000,000	
2.18.03	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase pertumbuhan investor	%	5.00					5.00	80,000,000	6.00	105,000,000	7.00	150,000,000	7.00	335,000,000	
2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang tepat waktu	%	85.00					90.00	250,000,000	91.00	250,000,000	92.00	250,000,000	92.00	750,000,000	
2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Pelaksanaan Penanaman Modal yang Terkendali	%	30.00					40.00	400,000,000	45.00	400,000,000	50.00	400,000,000	50.00	1,200,000,000	
2.18.06	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Data Base Penanaman Modal yang dimanfaatkan	%	100.00					100.00	100,000,000	100.00	125,000,000	100.00	175,000,000	100.00	400,000,000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																	
2.19.02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	%	20.00					65.00	546,000,000	70.00	600,000,000	75.00	654,000,000	100.00	1,800,000,000	
2.19.04	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase gugus pendidikan kepramukaan yang aktif	%	75.00					80.00	220,000,000	85.00	240,000,000	90.00	261,600,000	90.00	721,600,000	

**Perubahan RPJMD
Kabupaten Tulungagung 2018-2023**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kinerja Akhir RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2.19.03	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase atlet yang berprestasi	%	13.00					20.00	5,218,000,000	25.00	5,700,000,000	30.00	6,213,000,000	30.00	17,131,000,000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK																	
2.20.02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Pemanfaatan data statistik sektoral	%	100.00					100.00	381,000,000	100.00	415,000,000	100.00	453,000,000	100.00	1,249,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN																	
2.21.02	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persentase Informasi/ Berita Pemerintah Daerah yang disandikan/diamankan	%	80.00					81.00	93,000,000	82.00	100,000,000	83.00	110,000,000	83.00	303,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN																	
2.22.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan layanan kesekretariatan	Indeks	76.50					76.61	9,210,373,750	78.61	10,039,212,000	80.61	17,358,396,500	80.61	36,607,982,250	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.22.02	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dikembangkan	%	10.00					30.00	5,400,000,000	30.00	5,886,000,000	40.00	6,415,740,000	100.00	17,701,740,000	
2.22.03	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Pelaku Seni yang memiliki sertifikat	%	2.00					2.00	400,000,000	4.00	410,000,000	5.00	420,000,000	5.00	1,230,000,000	
2.22.04	Program Pembinaan Sejarah	Persentase Peningkatan Pembinaan Sejarah Daerah	%	5.00					5.00	100,000,000	10.00	109,000,000	15.00	118,810,000	15.00	327,810,000	
2.22.05	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan dan dikelola	%	100.00					100.00	715,000,000	100.00	780,350,000	100.00	851,681,500	100.00	2,347,031,500	
2.22.06	Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase Peningkatan Kunjungan Museum	%	5.00					5.00	300,000,000	5.00	327,000,000	5.00	356,430,000	5.00	983,430,000	

**Perubahan RPJMD
Kabupaten Tulungagung 2018-2023**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kinerja Akhir RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN																	
2.23.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	Indeks	75.00					76.61	4,900,000,000	80.00	5,341,000,000	85.00	5,820,000,000	85.00	16,061,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.02	Program Pembinaan Perpustakaan	Presentase perpustakaan yang memenuhi standar perpustakaan	%	12.00					12.00	421,000,000	20.00	433,000,000	25.00	510,000,000	25.00	1,364,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN																	
2.24.02	Program Pengelolaan Arsip	Persentase OPD/ Satker yang menerapkan tata kelola arsip	%	10.00					10.00	361,000,000	12.00	410,000,000	15.00	630,000,000	15.00	1,401,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN																	
3.25.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks kepuasan layanan kesekretariatan	Indeks	80					80	5,545,104,950	80	5,822,360,197	80	6,113,478,208	80	17,480,943,355	DINAS PERIKANAN
3.25.03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Nilai Produksi Usaha Perikanan Tangkap	Rp	35,754,067,000					36,469,087,140	319,000,000	37,198,468,883	334,866,000	37,942,438,260	351,609,300	111,609,994,283	1,005,475,300	
3.25.04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Nilai Produksi Usaha Perikanan Budidaya	Rp	363,816,172,455					374,730,657,629	2,063,512,500	385,972,577,358	2,376,688,125	397,551,754,678	2,495,522,531	1,158,254,989,665	6,935,723,156	
3.25.06	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Nilai Produksi Usaha Pengolahan Hasil Perikanan	Rp	220,178,461,757					226,988,104,904	820,000,000	232,662,807,527	961,000,000	238,479,377,715	1,009,050,000	698,130,290,147	2,790,050,000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA																	
3.26.02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Destinasi Wisata yang dikembangkan	%	37.50					12.50	6,425,000,000	25.00	9,619,250,000	12.50	10,484,982,500	50.00	26,529,232,500	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.26.03	Program Pemasaran Pariwisata	Angka Kunjungan Wisata	%	900,000					750,000	1,200,000,000	800,000	1,308,000,000	900,000	1,425,720,000	2,450,000	3,933,720,000	

**Perubahan RPJMD
Kabupaten Tulungagung 2018-2023**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kinerja Akhir RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3.26.04	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase Peningkatan Pelaku Ekonomi Kreatif	%	2.00					2.00	300,000,000	2.00	310,000,000	2.00	1,200,000,000	2.00	1,810,000,000	
3.26.05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang tersertifikat	Persentase Sumber Daya Manusia Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif yang tersertifikat	%	5.00					5.00	1,200,000,000	7.00	1,200,000,000	10.00	1,300,000,000	10.00	3,700,000,000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN																	
3.27.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks kepuasan layanan kesekretariatan	Indeks	80.00					80.00	14,639,379,000	80.00	26,045,027,705	80.00	17,393,046,190	80.00	58,077,452,895	
3.27.02	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Pemanfaatan sarana pertanian	%	100.00					100.00	3,726,225,000	100.00	4,427,127,923	100.00	4,825,569,436	100.00	12,978,922,359	
3.27.03	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Pemanfaatan Prasarana Pertanian yang berfungsi	%	100.00					100.00	13,118,805,000	100.00	15,586,452,500	100.00	16,989,232,920	100.00	45,694,490,141	
3.27.05	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Bencana Pertanian yang tertangani	%	65.00					70.00	525,000,000	75.00	623,752,500	80.00	679,890,225	80.00	1,828,642,725	
3.27.06	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase peningkatan rekomendasi usaha pertanian	%	30.00					30.00	30,000,000	30.00	35,643,000	30.00	38,850,870	30.00	104,493,870	
3.27.07	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok	%	3.00					3.00	530,541,000	3.00	392,715,762	3.00	428,060,181	3.00	1,151,316,943	
3.27.02	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Peningkatan Populasi Ternak	%	2.00					2.00	1,070,000,000	2.00	1,585,000,000	2.00	1,664,250,000	2.00	4,319,250,000	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3.27.03	Program Penyediaan Dan Pengembangan	Persentase Daya Guna Prasarana Peternakan	%	50					50	100,000,000	75	4,459,015,000	80	4,681,965,750	80	9,240,980,750	

**Perubahan RPJMD
Kabupaten Tulungagung 2018-2023**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					2019		2020		2021		2022		2023		Kinerja Akhir RPJMD			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	Prasarana Pertanian																	
3.27.04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Status Kesehatan Hewan	%	80.00					81.00	1,895,000,000	82.00	2,325,000,000	82.00	2,441,250,000	82.00	6,661,250,000		
		Presentase Jaminan Mutu Dan Keamanan Produk Hewan	%	80.00					81.00		82.00		82.00		82.00			
3.27.06	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Fasilitasi Perijinan Usaha Peternakan	%	60					60	100,000,000	65	150,000,000	70	157,500,000	70	407,500,000		
3.27.07	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Peternak	%	1.00					1.00	100,000,000	1.00	150,000,000	1.00	157,500,000	1.00	407,500,000		
3.27.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan	Indeks	80.00					80	8,900,889,885	80	8,765,235,405	80	9,203,497,175	80	26,869,622,465		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN																		
3.30.02	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase tertib perijinan dan Pendaftaran Perusahaan	%	n/a					0.00	-	2.00	60,000,000	3.00	65,000,000	3.00	125,000,000		
3.30.03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pasar dengan kondisi baik	%	75.00					75.20	3,768,975,375	75.30	4,000,000,000	75.40	4,500,000,000	75.40	12,268,975,375		
3.30.04	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase komoditi yang terjaga stabilitasnya	%	76.00					75.00	85,000,000	75.00	200,000,000	75.00	200,000,000	75.00	485,000,000		
3.30.05	Program Pengembangan Ekspor	Persentase peningkatan pelaku ekspor	%	4.00					5.00	36,848,000	5.00	100,000,000	5.00	200,000,000	5.00	336,848,000		
3.30.06	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase peningkatan metrologi legal	%	2.00					2.50	150,000,000	3.00	350,000,000	3.50	400,000,000	3.50	900,000,000		
																	DINAS PERINDUS TRIAN DAN PERDAGANGAN	

**Perubahan RPJMD
Kabupaten Tulungagung 2018-2023**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kinerja Akhir RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3.30.07	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase peningkatan pemasaran produk dalam negeri	%	2.00					2.00	99,999,800	3.00	350,000,000	4.00	550,000,000	4.00	999,999,800	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN																	
3.31.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan	Indeks	n/a					76.00	19,854,288,399	76.00	19,869,617,405	77.00	20,017,348,275	77.00	59,741,254,079	
3.31.02	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase peningkatan IKM yang terbina	%	10.00					2.00	1,294,999,700	3.00	1,400,000,000	4.00	1,700,000,000	4.00	4,394,999,700	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.03	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Persentase pengawasan perizinan IUI	%	n/a						0	50.00	100,000,000	50.00	100,000,000	50.00	200,000,000	
3.31.04	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase peningkatan data	%	n/a				0.00	-	0.20	125,000,000	0.30	150,000,000	0.30	275,000,000		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI																	
3.32.03	Program pembangunan kawasan transmigrasi	Persentase transmigran yang ditempatkan	%	100.00					100.00	178,000,000	100.00	190,000,000	100.00	204,000,000	100.00	572,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	
SEKRETARIAT DAERAH																	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan	Indeks	n/a					78.00	55,038,485,310	79.00	59,991,948,988	80.00	65,391,224,397	80.00	180,421,658,695	SEKRETARIAT DAERAH
		Persentase tercapainya pelayanan bidang administrasi umum	%	100.00					100.00		100.00		100.00		100.00	-	
		Persentase fasilitasi penataan organisasi	%	100.00					100.00		100.00		100.00		100.00	-	

**Perubahan RPJMD
Kabupaten Tulungagung 2018-2023**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kinerja Akhir RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase fasilitasi kebijakan bidang pemerintahan dan kesra	%	86.67					87.67	18,348,623,853	88.67	20,000,000,000	89.66	21,800,000,000	89.66	60,148,623,853	
	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Fasilitasi kebijakan perekonomian dan pembangunan	%	86.25					87.5	7,324,015,660	88.75	7,690,216,443	90.00	8,074,727,265	90.00	23,088,959,368	
SEKRETARIAT DPRD																	
4.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Layanan Keskretariatian	Indeks	77.00					77.00		78.00		79.00		79.00	151,025,000,000	SEKRETARIAT DPRD
		Persentase Layanan Administrasi dan Keuangan DPRD yang difasilitasi	%	100.00					100.00	46,071,000,000	100.00	50,217,000,000	100.00	54,737,000,000	100.00		
4.02.02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Persentase pencapaian Tugas dan fungsi DPRD yang difasilitasi	%	100.00					100.00	35,076,000,000	100.00	38,233,000,000	100.00	41,674,000,000	100.00	114,983,000,000	
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
PERENCANAAN																	
5.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Layanan Keskretariatian	Indeks	73.00					76	11,640,089,880	78	12,222,094,374	80	12,833,199,093	80	36,695,383,347	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.02	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Ketepatan waktu aktivitas Perencanaan, pengendalian dan evaluasi	%	75.00					80	877,100,000	90	920,955,000	100	967,002,750	100	2,765,057,750	
5.01.03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Program RPJMD	%	100.00					100	3,850,000,000	100	4,042,500,000	100	4,244,625,000	100	12,137,125,000	
KEUANGAN																	
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Layanan Keskretariatian	Indeks	80.00					85.00	45,751,233,450	87.00	48,038,795,123	90.00	50,440,734,879	90.00	144,230,763,452	BADAN PENGELOLAAN

**Perubahan RPJMD
Kabupaten Tulungagung 2018-2023**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					2019		2020		2021		2022		2023		Kinerja Akhir RPJMD			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	Daerah Kabupaten/Kota																	KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase PD yang tepat waktu dalam penyampaian RKA dan DPA	%	100.00					100.00	2,000,000,000	100.00	2,180,000,000	100.00	2,376,200,000	100.00	6,556,200,000		
		Persentase penyaluran belanja daerah yang tertib dan sesuai ketentuan	%	95.63					96.00	390,012,597,000	97.00	463,974,990,430	98.00	505,732,739,569	98.00	1,359,720,326,999		
		Persentase PD yang tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangan sesuai SAP(Akrual)	%	96.49					100.00	1,100,000,000	100.00	1,199,000,000	100.00	1,306,910,000	100.00	3,605,910,000		
5.02.03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang tertib dan akuntabel dalam pengelolaan BMD	%	79.66					90.00	3,480,000,000	95.00	3,654,000,000	100.00	3,836,700,000	100.00	10,970,700,000		
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan	Indeks	80					77.5	11,120,634,810	78.00	15,620,903,740	78.50	15,162,708,740	78.50	41,904,247,290	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase realisasi PAD Terhadap Target PAD	%	118.03					100.00	5,099,214,000	100.00	7,009,110,000	100.00	7,559,165,000	100.00	19,667,489,000		
KEPEGAWAIAN																		
5.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan	Indeks	78.44					80.00	6,824,000,000	81.00	7,506,000,000	82.00	8,256,000,000	80.00	22,586,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5.03.02	Program Kepegawaian Daerah	Persentase Promosi ASN yang sesuai kompetensi	%	100.00					90.00	4,731,000,000	92.00	5,156,000,000	95.00	5,621,000,000	95.00	15,508,000,000		
		Persentase ASN yang memiliki kinerja Sanagat baik	%	93.27					90.00		92.00		95.00	95.00				
		Persentase data dan informasi kepegawaian yang dikelola dengan baik	%	100.00					90.00		92.00		95.00	95.00				

**Perubahan RPJMD
Kabupaten Tulungagung 2018-2023**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kinerja Akhir RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN																	
5.04.02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN Yang memiliki kompetensi teknis, manajerial dan Fungsional	%	n/a					60.00	6,734,000,000	61.00	7,340,000,000	62.00	7,472,000,000	62.00	21,546,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																	
5.05.02	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase Hasil Penelitian yang dapat dijadikan Bahan Perumusan Kebijakan	%	100.00					100	545,500,000	100	572,670,000	100	601,303,500	100	1,719,373,500	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Indeks Inovasi Daerah	Indeks						30	303,900,000	45	319,095,000	60	335,049,750	60	958,044,750	
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN																	
INSPEKTORAT DAERAH																	
6.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan	Indeks	90.00					92.00	9,177,785,000	93.00	11,790,984,000	94.00	12,261,523,000	94.00	33,230,292,000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan yang Terselesaikan Tepat Waktu	%	80.00					82.00	2,100,000,000	83.00	2,184,000,000	84.00	2,271,360,000	84.00	6,555,360,000	
6.01.03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persentase Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi yang Terselesaikan Tepat Waktu	%	80.00					82.00	3,650,000,000	83.00	3,796,000,000	84.00	3,947,840,000	84.00	11,393,840,000	
UNSUR KEWILAYAHAN																	
KECAMATAN																	
KECAMATAN BANDUNG																	
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Indeks kepuasan layanan kesekretariatan	Indeks	83.20					85.00	3,705,000,000	86.00	3,215,000,000	87.00	3,526,000,000	87.00	10,446,000,000	KECAMATA

**Perubahan RPJMD
Kabupaten Tulungagung 2018-2023**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					2019		2020		2021		2022		2023		Kinerja Akhir RPJMD			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	Daerah Kabupaten/Kota																	N BANDUNG
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan administrasi kecamatan yang sesuai SOP	%	100.00					100.00	90,000,000	100.00	98,000,000	100.00	106,000,000	100.00	294,000,000		
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Program dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang difasilitasi	%	100.00					100.00	100,000,000	100.00	109,000,000	100.00	118,000,000	100.00	327,000,000		
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase desa tertib peraturan perundangan	%	100.00					100.00	100,000,000	100.00	109,000,000	100.00	118,000,000	100.00	327,000,000		
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase urusan pemerintahan umum yang difasilitasi dalam kegiatan kecamatan	%	100.00					100.00	78,000,000	100.00	85,000,000	100.00	92,000,000	100.00	255,000,000		
7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pemerintahan desa yang tertib administrasi	%	100.00					100.00	180,000,000	100.00	196,000,000	100.00	213,000,000	100.00	589,000,000		
KECAMATAN BESUKI																		
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks kepuasan layanan kesekretariatan	Indeks	80.00					83.00	2,967,820,224	85.00	3,234,924,044	87.00	3,526,067,208	87.00	9,728,811,476		KECAMATAN BESUKI
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan administrasi kecamatan yang sesuai SOP	%	100.00					100.00	150,000,000	100.00	163,500,000	100.00	178,215,000	100.00	491,715,000		
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Program dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang difasilitasi	%	100.00					100.00	100,000,000	100.00	109,000,000	100.00	118,810,000	100.00	327,810,000		
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase desa tertib peraturan perundangan	%	100.00					100.00	150,000,000	100.00	163,500,000	100.00	178,215,000	100.00	491,715,000		

**Perubahan RPJMD
Kabupaten Tulungagung 2018-2023**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kinerja Akhir RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	persentase urusan pemerintahan umum yang difasilitasi dalam kegiatan kecamatan	%	100.00					100.00	150,000,000	100.00	163,500,000	100.00	178,215,000	100.00	491,715,000	
7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pemerintahan desa yang tertib administrasi	%	100.00					100.00	150,000,000	100.00	163,500,000	100.00	178,215,000	100.00	491,715,000	
KECAMATAN BOYOLANGU																	
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan	Indeks	85.00					84.00	5,684,200,000	85.00	6,195,778,000	86.00	6,753,398,020	86.00	18,633,376,020	
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan administrasi kecamatan yang sesuai SOP	%	100.00					100.00	175,000,000	100.00	190,750,000	100.00	207,917,500	100.00	573,667,500	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Program dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang difasilitasi	%	100.00					100.00	118,000,000	100.00	128,620,000	100.00	140,195,800	100.00	386,815,800	
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Desa Tertib Peraturan dan Perundang-Undangan	%	100.00					100.00	185,000,000	100.00	201,650,000	100.00	219,798,500	100.00	606,448,500	
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang Difasilitasi Dalam Kegiatan Kecamatan	%	100.00					100.00	166,000,000	100.00	180,940,000	100.00	197,224,600	100.00	544,164,600	
7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pemerintahan Desa Yang Tertib Administrasi	%	100.00					100.00	133,000,000	100.00	144,970,000	100.00	158,017,300	100.00	435,987,300	
KECAMATAN CAMPURDARAT																	
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan	Indeks	70.00					77.00	2,300,000,000	80.00	2,507,000,000	83.00	2,732,630,000	83.00	7,539,630,000	

**Perubahan RPJMD
Kabupaten Tulungagung 2018-2023**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kinerja Akhir RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan administrasi kecamatan yang sesuai SOP	%	100.00					100.00	150,000,000	100.00	163,500,000	100.00	178,000,000	100.00	491,500,000	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Program dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang difasilitasi	%	100.00					100.00	100,000,000	100.00	109,000,000	100.00	118,810,000	100.00	327,810,000	
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Desa Tertib Peraturan dan Perundang-Undangan	%	100.00					100.00	150,000,000	100.00	163,500,000	100.00	178,215,000	100.00	491,715,000	
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang Difasilitasi Dalam Kegiatan Kecamatan	%	100.00					100.00	150,000,000	100.00	163,500,000	100.00	178,215,000	100.00	491,715,000	
7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pemerintahan Desa Yang Tertib Administrasi	%	100.00					100.00	100,000,000	100.00	109,000,000	100.00	118,810,000	100.00	327,810,000	
KECAMATAN GONDANG																	
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan	Indeks	70.00					86.00	3,550,000,000	87.00	3,869,500,000	88.00	4,218,000,000	88.00	11,637,500,000	
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan administrasi kecamatan yang sesuai SOP	%	100.00					100.00	150,000,000	100.00	163,000,000	100.00	178,000,000	100.00	491,000,000	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Program dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang difasilitasi	%	100.00					100.00	100,000,000	100.00	109,000,000	100.00	118,000,000	100.00	327,000,000	
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase desa tertib peraturan perundangan	%	100.00					100.00	100,000,000	100.00	109,000,000	100.00	118,000,000	100.00	327,000,000	
KECAMATAN GONDANG																	

**Perubahan RPJMD
Kabupaten Tulungung 2018-2023**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kinerja Akhir RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	persentase urusan pemerintahan umum yang difasilitasi dalam kegiatan kecamatan	%	100.00					100.00	160,000,000	100.00	174,000,000	100.00	190,000,000	100.00	524,000,000	
7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pemerintahan desa yang tertib administrasi	%	100.00					100.00	100,000,000	100.00	109,000,000	100.00	118,000,000	100.00	327,000,000	
KECAMATAN KALIDAWIR																	
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan	Indeks	84.00					84.00	2,802,000,000	86.00	3,055,000,000	88.00	3,329,000,000	88.00	9,186,000,000	KECAMATAN KALIDAWIR
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan administrasi kecamatan yang sesuai SOP	%	100.00					100.00	200,000,000	100.00	218,000,000	100.00	237,000,000	100.00	655,000,000	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Program dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang difasilitasi	%	100.00					100.00	150,000,000	100.00	163,000,000	100.00	178,000,000	100.00	491,000,000	
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase desa tertib peraturan perundangan	%	100.00					100.00	150,000,000	100.00	163,000,000	100.00	178,000,000	100.00	491,000,000	
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	persentase urusan pemerintahan umum yang difasilitasi dalam kegiatan kecamatan	%	100.00					100.00	108,000,000	100.00	117,000,000	100.00	128,000,000	100.00	353,000,000	
7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pemerintahan desa yang tertib administrasi	%	100.00					100.00	100,000,000	100.00	109,000,000	100.00	118,000,000	100.00	327,000,000	
KECAMATAN KARANGREJO																	
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan	Indeks	80.00					86.00	2,960,000,000	87.00	3,227,000,000	88.00	3,517,000,000	88.00	9,704,000,000	KECAMATAN KARANGREJO

**Perubahan RPJMD
Kabupaten Tulungagung 2018-2023**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kinerja Akhir RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan administrasi kecamatan yang sesuai SOP	%	100.00					100.00	150,000,000	100.00	163,000,000	100.00	178,000,000	100.00	491,000,000	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Program dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang difasilitasi	%	100.00					100.00	100,000,000	100.00	109,000,000	100.00	118,000,000	100.00	327,000,000	
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase desa tertib peraturan perundangan	%	100.00					100.00	180,000,000	100.00	196,000,000	100.00	213,000,000	100.00	589,000,000	
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	persentase urusan pemerintahan umum yang difasilitasi dalam kegiatan kecamatan	%	100.00					100.00	200,000,000	100.00	218,000,000	100.00	237,000,000	100.00	655,000,000	
7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pemerintahan desa yang tertib administrasi	%	100.00					100.00	100,000,000	100.00	109,000,000	100.00	118,000,000	100.00	327,000,000	
KECAMATAN KAUMAN																	
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan	Indeks	70.00					87.00	3,361,000,000	88.00	3,663,000,000	89.00	3,993,000,000	89.00	11,017,000,000	
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan administrasi kecamatan yang sesuai SOP	%	100.00					100.00	150,000,000	100.00	163,000,000	100.00	178,000,000	100.00	491,000,000	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Program dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang difasilitasi	%	100.00					100.00	100,000,000	100.00	109,000,000	100.00	118,000,000	100.00	327,000,000	
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase desa tertib peraturan perundangan	%	100.00					100.00	100,000,000	100.00	109,000,000	100.00	118,000,000	100.00	327,000,000	

**Perubahan RPJMD
Kabupaten Tulungagung 2018-2023**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kinerja Akhir RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase urusan pemerintahan umum yang difasilitasi dalam kegiatan kecamatan	%	100.00					100.00	100,000,000	100.00	109,000,000	100.00	118,000,000	100.00	327,000,000	
7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pemerintahan desa yang tertib administrasi	%	100.00					100.00	100,000,000	100.00	109,000,000	100.00	118,000,000	100.00	327,000,000	
KECAMATAN KEDUNGGWARU																	
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan	Indeks	90.00					84.00	3,550,000,000	85.00	3,869,500,000	86.00	4,217,755,000	86.00	11,637,255,000	
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan administrasi kecamatan yang sesuai SOP	%	100.00					100.00	150,000,000	100.00	163,000,000	100.00	178,000,000	100.00	491,000,000	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Program dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang difasilitasi	%	100.00					100.00	100,000,000	100.00	109,000,000	100.00	118,000,000	100.00	327,000,000	
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase desa tertib peraturan perundangan	%	100.00					100.00	100,000,000	100.00	109,000,000	100.00	118,000,000	100.00	327,000,000	
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase urusan pemerintahan umum yang difasilitasi dalam kegiatan kecamatan	%	100.00					100.00	100,000,000	100.00	109,000,000	100.00	118,000,000	100.00	327,000,000	
7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pemerintahan desa yang tertib administrasi	%	100.00					100.00	100,000,000	100.00	109,000,000	100.00	118,000,000	100.00	327,000,000	
KECAMATAN NGANTRU																	
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan	Indeks	70.00					82.00	2,946,000,000	83.00	3,215,000,000	84.00	3,485,000,000	84.00	9,646,000,000	

**Perubahan RPJMD
Kabupaten Tulungagung 2018-2023**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kinerja Akhir RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan administrasi kecamatan yang sesuai SOP	%	100.00					100.00	150,000,000	100.00	163,000,000	100.00	178,000,000	100.00	491,000,000	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Program dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang difasilitasi	%	100.00					100.00	100,000,000	100.00	109,000,000	100.00	118,000,000	100.00	327,000,000	
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase desa tertib peraturan perundangan	%	100.00					100.00	100,000,000	100.00	109,000,000	100.00	118,000,000	100.00	327,000,000	
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	persentase urusan pemerintahan umum yang difasilitasi dalam kegiatan kecamatan	%	100.00					100.00	100,000,000	100.00	109,000,000	100.00	118,000,000	100.00	327,000,000	
7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pemerintahan desa yang tertib administrasi	%	100.00					100.00	100,000,000	100.00	109,000,000	100.00	118,000,000	100.00	327,000,000	
KECAMATAN NGUNUT																	
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan	Indeks	70.00					84.00	3,200,000,000	86.00	3,488,000,000	88.00	3,801,920,000	88.00	10,489,920,000	
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan administrasi kecamatan yang sesuai SOP	%	100.00					100.00	150,000,000	100.00	163,500,000	100.00	178,215,000	100.00	491,715,000	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Program dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang difasilitasi	%	100.00					100.00	100,000,000	100.00	109,000,000	100.00	118,810,000	100.00	327,810,000	
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase desa tertib peraturan perundangan	%	100.00					100.00	150,000,000	100.00	163,500,000	100.00	178,215,000	100.00	491,715,000	

**Perubahan RPJMD
Kabupaten Tulungagung 2018-2023**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kinerja Akhir RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	persentase urusan pemerintahan umum yang difasilitasi dalam kegiatan kecamatan	%	100.00					100.00	100,000,000	100.00	109,000,000	100.00	118,810,000	100.00	327,810,000	
7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pemerintahan desa yang tertib administrasi	%	100.00					100.00	100,000,000	100.00	109,000,000	100.00	118,810,000	100.00	327,810,000	
KECAMATAN PAGERWOJO																	
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan	Indeks	80.00					80.00	2,687,000,000	82.00	2,929,000,000	84.00	3,192,000,000	84.00	8,808,000,000	
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan administrasi Kecamatan yang sesuai SOP	%	100.00					100.00	150,000,000	100.00	168,000,000	100.00	178,000,000	100.00	496,000,000	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Program dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang difasilitasi	%	100.00					100.00	100,000,000	100.00	109,000,000	100.00	118,000,000	100.00	327,000,000	
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase desa tertib peraturan perundangan	%	100.00					100.00	150,000,000	100.00	163,000,000	100.00	178,000,000	100.00	491,000,000	
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase urusan pemerintahan umum yang difasilitasi dalam kegiatan Kecamatan	%	100.00					100.00	150,000,000	100.00	163,000,000	100.00	178,000,000	100.00	491,000,000	
7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pemerintahan Desa yang Tertib Administrasi	%	100.00					100.00	100,000,000	100.00	109,000,000	100.00	118,810,000	100.00	327,810,000	
KECAMATAN PAKEL																	
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan	Indeks	80.00					81.00	3,300,000,000	81.50	3,597,000,000	82.00	3,920,730,000	82.00	10,817,730,000	

**Perubahan RPJMD
Kabupaten Tulungagung 2018-2023**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kinerja Akhir RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan administrasi Kecamatan yang sesuai SOP	%	100.00					100.00	150,000,000	100.00	163,500,000	100.00	178,215,000	100.00	491,715,000	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Program dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang difasilitasi	%	100.00					100.00	130,000,000	100.00	141,700,000	100.00	154,453,000	100.00	426,153,000	
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase desa tertib peraturan perundangan	%	100.00					100.00	150,000,000	100.00	163,500,000	100.00	178,215,000	100.00	491,715,000	
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase urusan pemerintahan umum yang difasilitasi dalam kegiatan Kecamatan	%	100.00					100.00	140,000,000	100.00	152,600,000	100.00	166,334,000	100.00	458,934,000	
7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pemerintahan Desa yang Tertib Administrasi	%	100.00					100.00	100,000,000	100.00	109,000,000	100.00	118,810,000	100.00	327,810,000	
KECAMATAN PUCANGLABAN																	
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan	Indeks	80.00					85.00	2,250,000,000	86.00	2,452,500,000	87.00	2,673,225,000	87.00	7,375,725,000	
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Presentase Pelayanan Administrasi Kecamatan yang sesuai SOP	%	100.00					100.00	150,000,000	100.00	163,000,000	100.00	178,000,000	100.00	491,000,000	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Program Dan Kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang difasilitasi	%	100.00					100.00	137,000,000	100.00	149,000,000	100.00	162,000,000	100.00	448,000,000	
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	presentase desa tertib peraturan perundangan	%	100.00					100.00	146,000,000	100.00	159,000,000	100.00	173,000,000	100.00	478,000,000	

**Perubahan RPJMD
Kabupaten Tulungagung 2018-2023**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kinerja Akhir RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	presentase urusan pemerintahan umum yang difasilitasi dalam kegiatan kecamatan	%	100.00					100.00	133,000,000	100.00	145,000,000	100.00	158,000,000	100.00	436,000,000	
7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Presentase pemerintah desa yang tertib administrasi	%	100.00					100.00	170,000,000	100.00	185,000,000	100.00	202,000,000	100.00	557,000,000	
KECAMATAN REJOTANGAN																	
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan	Indeks	85.00					83.00	3,500,000,000	85.00	3,815,000,000	87.00	4,158,350,000	87.00	11,473,350,000	
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan administrasi kecamatan yang sesuai SOP	%	100.00					100.00	150,000,000	100.00	163,500,000	100.00	178,215,000	100.00	491,715,000	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase program dan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang difasilitasi.	%	100.00					100.00	100,000,000	100.00	109,000,000	100.00	118,810,000	100.00	327,810,000	
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase desa tertib peraturan perundangan.	%	100.00					100.00	150,000,000	100.00	163,500,000	100.00	178,215,000	100.00	491,715,000	KECAMATAN REJOTANGAN
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase urusan pemerintahan umum yang difasilitasi dalam kegiatan kecamatan.	%	100.00					100.00	150,000,000	100.00	163,500,000	100.00	178,215,000	100.00	491,715,000	
7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pemerintahan desa yang tertib administrasi	%	100.00					100.00	150,000,000	100.00	163,500,000	100.00	178,215,000	100.00	491,715,000	
KECAMATAN SENDANG																	
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan	Indeks	70.00					79.00	2,142,000,000	80.00	2,335,000,000	81.00	2,545,000,000	81.00	7,022,000,000	KECAMATAN SENDANG

**Perubahan RPJMD
Kabupaten Tulungagung 2018-2023**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kinerja Akhir RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan administrasi kecamatan yang sesuai SOP	%	100.00					100.00	150,000,000	100.00	163,000,000	100.00	178,000,000	100.00	491,000,000	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase program dan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang difasilitasi.	%	100.00					100.00	100,000,000	100.00	109,000,000	100.00	118,000,000	100.00	327,000,000	
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase desa tertib peraturan perundangan.	%	100.00					100.00	100,000,000	100.00	109,000,000	100.00	118,000,000	100.00	327,000,000	
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase urusan pemerintahan umum yang difasilitasi dalam kegiatan kecamatan.	%	100.00					100.00	160,000,000	100.00	174,000,000	100.00	190,000,000	100.00	524,000,000	
7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pemerintahan desa yang tertib administrasi	%	100.00					100.00	100,000,000	100.00	109,000,000	100.00	118,000,000	100.00	327,000,000	
KECAMATAN SUMBERGEMPOL																	
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan	Indeks	84.00					85.00	3,500,000,000	85.00	3,815,000,000	85.00	4,158,350,000	85.00	11,473,350,000	
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan administrasi kecamatan yang sesuai SOP	%	100.00					100.00	150,000,000	100.00	163,500,000	100.00	178,215,000	100.00	491,715,000	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase program dan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang difasilitasi.	%	100.00					100.00	100,000,000	100.00	109,000,000	100.00	118,810,000	100.00	327,810,000	
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase desa tertib peraturan perundangan.	%	100.00					100.00	150,000,000	100.00	163,500,000	100.00	178,215,000	100.00	491,715,000	
KECAMATAN SUMBERGEMPOL																	

**Perubahan RPJMD
Kabupaten Tulungagung 2018-2023**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kinerja Akhir RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase urusan pemerintahan umum yang difasilitasi dalam kegiatan kecamatan.	%	100.00					100.00	100,000,000	100.00	109,000,000	100.00	118,810,000	100.00	327,810,000	
7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pemerintahan desa yang tertib administrasi	%	100.00					100.00	100,000,000	100.00	109,000,000	100.00	118,810,000	100.00	327,810,000	
KECAMATAN TANGGUNGUNUNG																	
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan	Indeks	70.00					77.00	2,383,000,000	79.00	2,598,000,000	81.00	2,832,000,000	81.00	7,813,000,000	
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan administrasi kecamatan yang sesuai SOP	%	100.00					100.00	150,000,000	100.00	163,000,000	100.00	178,000,000	100.00	491,000,000	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Program dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang difasilitasi	%	100.00					100.00	100,000,000	100.00	109,000,000	100.00	118,000,000	100.00	327,000,000	
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase desa tertib peraturan perundangan	%	100.00					100.00	100,000,000	100.00	109,000,000	100.00	118,000,000	100.00	327,000,000	
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	persentase urusan pemerintahan umum yang difasilitasi dalam kegiatan kecamatan	%	100.00					100.00	100,000,000	100.00	109,000,000	100.00	118,000,000	100.00	327,000,000	
7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pemerintahan desa yang tertib administrasi	%	100.00					100.00	100,000,000	100.00	109,000,000	100.00	118,000,000	100.00	327,000,000	
KECAMATAN TULUNGAGUNG																	
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan	Indeks	81.00					83.00	20,000,000,000	85.00	21,800,000,000	87.00	23,762,000,000	87.00	65,562,000,000	

**Perubahan RPJMD
Kabupaten Tulungagung 2018-2023**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kinerja Akhir RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan administrasi kecamatan yang sesuai SOP	%	100.00					100.00	200,000,000	100.00	218,000,000	100.00	237,620,000	100.00	655,620,000	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Program dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang difasilitasi	%	100.00					100.00	10,230,000	100.00	11,150,700	100.00	12,154,263	100.00	33,534,963	
7.01.04	Program Koordinasi Ketentrangan Dan Ketertiban Umum	Persentase desa tertib peraturan perundangan	%	100.00					100.00	3,400,000	100.00	3,706,000	100.00	150,000,000	100.00	7,256,000	
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	persentase urusan pemerintahan umum yang difasilitasi dalam kegiatan kecamatan	%	100.00					0	0	100.00	109,000,000	100.00	118,810,000	100.00	327,810,000	
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM																	
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																	
8.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan	Indeks	78.00					86.00	4,950,000	87.00	5,359,000	88.00	5,841,000	100.00	16,150,000	
8.01.02	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	%	100.00					100.00	150,000,000	100.00	151,000,000	100.00	164,000,000	100.00	465,000,000	
8.01.03	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan dalam Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	%	100.00					100.00	1,500,000	100.00	1,635,000	100.00	1,782,000	100.00	4,917,000	
8.01.04	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	%	100.00					100.00	1,500,000	100.00	1,635,000	100.00	1,782,000	100.00	4,917,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

**Perubahan RPJMD
Kabupaten Tulungagung 2018-2023**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kinerja Akhir RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
8.01.05	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	%	100.00					100.00	150,000,000	100.00	151,000,000	100.00	164,000,000	100.00	465,000,000	
8.01.06	Program Peningkatan Kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	Persentase kewaspadaan nasional dan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	%	100.00					100.00	2,000,000,000	100.00	2,180,000,000	100.00	2,376,000,000	100.00	6,556,000,000	

Sumber: Perangkat Daerah, 2021

BAB VIII



Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah



BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

8.1 Indikator Kinerja Utama

Pengukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat tercermin dalam dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023 yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa Jabatan. Guna mengukur capaian pembangunan daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023, maka dipilih Indikator Kinerja Utama dan target capaian selama lima tahun yang disajikan dalam tabel 8.1 yaitu sebelum perubahan dan tabel 8.2 yaitu setelah perubahan.

Tabel 8. 1 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023 (Sebelum Perubahan)

No	Indikator	Target Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71.87	72.21	72.50	73.21	73.50
2	Pertumbuhan Ekonomi	5.17	5.22	5.26	5.31	5.35
3	Tingkat Kemiskinan	7,19	7,11	7.02	6,94	6,86
4	Persentase Desa Yang Mendapatkan Layanan Infrastruktur dan Lingkungan Berkualitas	37	39	41	43	45
5	Indeks Reformasi Birokrasi	63.00	64.00	65.00	66.00	67.00
1	Indeks Pendidikan	0.63	0.63	0.63	0.64	0.64
2	Indeks Kesehatan	0.83	0.83	0.84	0.84	0.85
3	Indeks <i>Purchasing Power Parity</i> (PPP)	0.71	0.72	0.72	0.73	0.73
4	PDRB	27,239,06 1.32	28,659,57 8.36	30,167,07 2.19	31,767,43 5.37	33,466,99 3.16
5	<i>Spending of Money</i>	meningkat	meningkat	meningkat	meningkat	meningkat
6	Rasio PAD terhadap total Pendapatan	17,17	17,99	18,84	19,60	20,93
7	Nilai Investasi PMA dan PMDN	1,75 T	1,80 T	1,85 T	1,90 T	1,95 T
8	Gini Rasio	0.34	0.34	0.33	0.33	0.32
9	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,18	2,14	2,10	2,05	2,00
10	Persentase Penurunan Penyandang	0.75	0.80	0.84	0.88	0.92

No	Indikator	Target Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
	Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)					
11	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	96.40	96.78	97.16	97.54	97.92
12	Indeks Desa Membangun (IDM)	0.6676	0.6696	0.6716	0.6736	0.6756
13	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	0.663	0.664	0.667	0.668	0.670
14	Persentase Peningkatan Usaha Mikro	2	2	2	2	2
15	Rasio Daerah Irigasi dalam kondisi baik (Km/Ha)	1/ 81	1/ 79	1/78	1/77	1/76
16	Persentase desa dengan rumah layak huni > 90%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	Persentase Penduduk Terlayani Air Minum Yang Aman Dengan Cakupan Akses Sambungan Rumah (SR) Dan Watermeter	52,40	52,77	86,00	89,00	90,00
18	Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Sanitasi Yang Sehat	90,41	92,99	97,00	98,00	98,60
19	Persentase Jalan Dengan Kondisi Baik	77,86	78,23	77,00	77,50	78,00
20	Indeks Tingkat Pelayanan Jalan	0,54	0,56	0,54	0,54	0,54
21	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	71,23	63,68	63,24	63,28	63,32
22	SAKIP	72	75	80	80,05	81
23	Opini WTP BPK terhadap LKPD	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
24	Indeks Profesionalisme Aparatur Sipil Negara	41	46	51	56	61
25	Indeks Pelayanan Publik	3,93	3,92	3,94	3,95	3,97

Sumber: Hasil Proyeksi, 2021

Tabel 8. 2 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023 (Setelah Perubahan)

No	Indikator	Realisasi		Target		
		2019	2020	2021	2022	2023
INDIKATOR KINERJA UTAMA						
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,62	73.00	72.87	73.30	73.50
2	Pertumbuhan Ekonomi	5.32	-3.09	3.00	3.65	4.05
3	Tingkat Kemiskinan	6.74	7.33	7.55	7.31	7.11
4	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	0.673	0.717	0.718	0.719	0.720
5	Persentase Desa/ Kelurahan Yang Mendapatkan Layanan Infrastruktur dan Lingkungan Berkualitas	38.75	43.54	52.40	53.87	55.35
6	Indeks Reformasi Birokrasi	65.00	66.09	67.00	68.00	69.00
INDIKATOR KINERJA DAERAH						
7	Indeks Pendidikan	0,647	0,634	0,640	0,649	0,650
8	Indeks Kesehatan	0,832	0,830	0,834	0,836	0,839
9	Indeks <i>Purchasing Power Parity</i> (PPP)	0,722	0,727	0,725	0,726	0,728
10	Indeks Pembangunan Gender	95.63	95.48	95.50	95.53	95.55
11	Persentase Koperasi Berkualitas	-	29.4	31.2	31.6	31.9
12	Persentase usaha mikro Berdaya saing	-	2.20	2.25	2.27	2.29
13	<i>Spending of Money</i>	-	137,720,28 1,624	100,000,0 00,000	110,000,0 00,000	120,000,0 00,000
14	Pertumbuhan PDRB Sektor industri	6.80	-2.00	3.94	4.51	4.32
15	Pertumbuhan PDRB Sektor perdagangan	5.80	-8.50	6.87	4.99	4.76
16	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	1.83	-0,82	1.51	2.23	1.71
17	Realisasi Investasi PMA dan PMDN	-	-	300,000,0 00,000	350,000,0 00,000	400,000,0 00,000

No	Indikator	Realisasi		Target		
		2019	2020	2021	2022	2023
18	Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	0.75	0.8	0.3	0.5	0.7
19	Tingkat Pengangguran Terbuka	3.36	4.61	4.91	4.81	4.71
20	Indeks Desa Membangun (IDM)	0.6781	0.6960	0.7044	0.7123	0.7214
21	Indeks Rasa Aman	0.653	0.671	0.674	0.677	0.679
22	Indeks Toleransi	0.720	0.783	0.786	0.789	0.792
23	Rasio Daerah Irigasi dalam Kondisi Baik	1/81	1/79	1/78	1/77	1/76
24	Persentase Desa/Kelurahan Dengan Rumah Layak Huni > 90%	97.79	98.21	100,00	100,00	100,00
25	Persentase Desa/Kelurahan Terlayani Sistem Perpipaan Air Minum	52,77	59,41	69,37	70,11	70,85
26	Persentase Desa/Kelurahan Dengan Jumlah Rumah Tangga Terlayani Sanitasi >80%	90,41	92,99	98,15	98,52	98,89
27	Persentase Desa/Kelurahan Dengan Jalan Kondisi Baik > 80%	78,23	78,23	78,60	78,97	79,34
28	Indeks Tingkat Pelayanan Jalan	0,37	0,47	0,54	0,54	0,54
29	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	71,23	63,68	63,24	63,28	63,32
30	Nilai SAKIP	75,83	76,80	78	79	80
31	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	-	52.35	53.90	55.62	60.61
32	Indeks Profesionalitas ASN	51.59	55.40	51	56	61
33	Indeks Pelayanan Publik	3,93	3,94	3,95	4,00	4,10
34	Prevalensi Stunting	-	5.51	5.51	5.23	4.97

Sumber: Hasil Proyeksi, 2021

8.2 Indikator Kinerja Daerah

Indikator Kinerja Daerah (IKD) adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah oleh Kepala Perangkat Daerah (PD). Tujuan dalam penetapan IKD Kepala PD adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator sasaran daerah (outcome). Pencapaian indikator sasaran tersebut merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program. Secara rinci, IKD Kepala PD dapat dilihat pada Tabel 8.3.

Tabel 8. 3 Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023

Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2019	2020	2021	2022	2023	
		Realisasi	Realisasi	Target	Target	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							
Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan	Indeks			80.00	81.00	82.00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Angka Partisipasi sekolah usia 7-12 tahun	%			99.90	100.00	100.00	
Angka Partisipasi sekolah usia 13-15 tahun	%			99,5	100.00	100.00	
Persentase kurikulum muatan lokal pendidikan dasar yang dirumuskan	%			95.00	96.00	99.00	
Persentase pemenuhan kebutuhan distribusi GTK	%			98.00	99.00	100.00	
Persentase perizinan pendidikan yang diterbitkan	%			90.00	95.00	100.00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							
Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan	Indeks			80.00	81.00	82.00	DINAS KESEHATAN
Prosentase Fasyankes Pemereintah yang telah BLUD	%			30.30	100	100	
Presentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Nilai Kinerja UKP dan UKM dalam Kategori Baik	%			15.00	18.00	20.00	
Persentase peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	%			25.00	30.00	35.00	
Persentase Sarana Produksi dan Distribusi sediaan, Alat Kesehatan, makanan minuman sesuai standart yang dipersyaratkan	%			75.00	75.00	80.00	
Cakupan pengembangan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	%			74.58	81.00	81.00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							
Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan	Indeks			80.00	80.00	80.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Persentase Sumber Daya Air Yang Terpelihara	%			100	100	100	

Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2019	2020	2021	2022	2023	
		Realisasi	Realisasi	Target	Target	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8
Jumlah Dokumen Pengembangan Permukiman	dokumen			1.00	1.00	1.00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
Prosentase rekomendasi penyelenggaraan bangunan gedung yang sesuai dengan kebijakan penyelenggaraan bangunan gedung	%			72.00	73.00	74.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Persentase Jalan Dengan Kondisi Baik	%			77.00	77.50	78.00	
Persentase Badan Usaha Yang Sudah Mendapatkan Pembinaan	%			94.00	100.00	100.00	
Persentase pengajuan rekomendasi tata ruang yang ditindaklanjuti	%			100.00	100.00	100.00	
Persentase Penduduk Terlayani Air Minum yang Aman dengan Cakupan Akses Sambungan Rumah (SR) dan Watermeter	%			86.00	89.00	90.00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
Prosentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Sanitasi Dasar	%			97.00	98.00	98.60	
Persentase jaringan drainase dalam kondisi baik	%			72.00	74.00	76.00	
Persentase perencanaan / pembangunan prasarana persampahan	%			100.00	100.00	100.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							
Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan	Indeks			80	80	80	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
Prosentase Peningkatan Hunian	%			0,35	0,38	0,41	
Persentase Rumah Layak Huni	%			97.87	97.92	97.97	
Prosentase PSU yang ditingkatkan kualitasnya	%			11	12	13	
Luas Kawasan Kumuh yang tertangani	Ha			0	56.80	54.94	
Persentase Pengembang Perumahan Yang Meningkatkan Kualifikasinya	%			0	10	15	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							
Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan	Indeks			75	75	75	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Persentase Penanganan Penanggulangan Bencana	%			100	100	100	

Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2019	2020	2021	2022	2023	
		Realisasi	Realisasi	Target	Target	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8
Indeks Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	Indeks			76.00	77.00	78.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Persentase patroli di wilayah Kab. Tulungagung	%			85.00	90.00	95.00	
Persentase penanganan kasus kebakaran	%			80.00	80.00	80.00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							
Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan	Indeks			80.00	81.00	82.00	DINAS SOSIAL
Persentase PPKS yang terfasilitasi dengan program pemberdayaan	%			28.00	29.00	30.00	
Persentase penyelesaian pengaduan dari tindak kekerasan pada WNI migran	%			100.00	100.00	100.00	
Persentase PPKS yang mendapat pelayanan Rehabilitasi Sosial	%			100.00	100.00	100.00	
Persentase PPKS yang mendapatkan Jaminan pemenuhan kebutuhan dasar	%			100.00	100.00	100.00	
Persentase korban bencana yang ditangani	%			100.00	100.00	100.00	
Persentase taman makam pahlawan yang terkelola dengan baik	%			100.00	100.00	100.00	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA							
Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan	Indeks			88.00	89.00	90.00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Persentase Penempatan Tenaga Kerja	%			15.00	20.00	24.00	
Persentase peserta pelatihan yang memiliki kompetensi	%			75.00	80.00	85.00	
Persentase penanganan perselisihan hubungan industrial	%			100.00	100.00	100.00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							
Persentase Pelaksanaan Pengarusutamaan gender pada perangkat Daerah	%			100.00	100.00	100.00	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
Persentase Pengaduan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang tertangani	%			100.00	100.00	100.00	

Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2019	2020	2021	2022	2023	
		Realisasi	Realisasi	Target	Target	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8
Persentase pembinaan kepada Kelompok usaha ekonomi produktif perempuan	%			100.00	100.00	100.00	PERLINDUNGAN ANAK
Persentase Pemanfaatan data gender dan anak	%			100.00	100.00	100.00	
Persentase Pemenuan Hak Anak	%			100.00	100.00	100.00	
Persentase Pengaduan Kasus Perlindungan Khusus Anak yang tertangani	%			100.00	100.00	100.00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN							
Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan	Indeks			80.00	80.00	80.00	DINAS KETAHANAN PANGAN
Persentase pemanfaatan infrastruktur pangan	%			100.00	100.00	100.00	
Persentase Peningkatan Cadangan Pangan	%			15.00	20.00	25.00	
Jumlah konsumsi energi	(kkal/kapita/hari)			2150.00	2150.00	2150.00	
Persentase produk pangan segar yang bersertifikat prima	%			5.00	10.00	15.00	
Persentase Intervensi Daerah Rawan Pangan	%			100.00	100.00	100.00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN							
Persentase Sengketa Tanah Garapan Yang Difasilitasi	%			50	50	50	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
Persentase Penatagunaan Tanah yang Difasilitasi	%			50	50	50	
Jumlah Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee Yang Difasilitasi	lokasi			1	1	1	
Prosentase Ijin Lokasi Yang Difasilitasi	%			0	50	50	
Prosentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Yang Difasilitasi	%			0	50	50	
Prosentase Izin Membuka Tanah Yang Dikelola	%			0	50	50	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							
Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan	Indeks			80.00	80.00	80.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2019	2020	2021	2022	2023	
		Realisasi	Realisasi	Target	Target	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8
Jumlah dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersusun	Dokumen			2.00	3.00	3.00	
Jumlah ijin/rekomendasi IPAL untuk pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Ijin/rekomendasi			40.00	45.00	50.00	
Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	%			80.00	81.00	81.00	
Persentase rekomendasi TPS B3 yang dikeluarkan	%			100.00	100.00	100.00	
Persentase kegiatan usaha yang diawasi	%			100.00	100.00	100.00	
Jumlah jenis lembaga yang mendapatkan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/ kota	Lembaga			2.00	2.00	3.00	
Jumlah jenis penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat yang diberikan	Penghargaan			2.00	3.00	3.00	
Persentase kasus lingkungan yang tertangani	%			100.00	100.00	100.00	
Persentase sampah yang terkelola	%			45.00	55.00	65.00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							
Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan	Indeks			80.00	81.00	82.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	%			64.00	65.00	66.00	
Persentase Kepemilikan dokumen pencatatan sipil	%			51.00	52.00	53.00	
Persentase database kependudukan yang valid dan update sesuai standart SIAK	%			96.00	97.00	98.00	
Persentase ketersediaan data profil kependudukan	%			100.00	100.00	100.00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							
Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan	Indeks			83.00	84.00	85.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Persentase Desa yang menerapkan Manajemen Pembangunan Partisipatif	%	-	-	100.00	100.00	100.00	

Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2019	2020	2021	2022	2023	
		Realisasi	Realisasi	Target	Target	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8
Persentase Desa yang ketahanan ekonomi dan ketahanan lingkungannya meningkat	%	-	-	40.00	45.00	50.00	
Persentase Desa yang menerapkan SID	%	-	-	100.00	100.00	100.00	
Persentase Desa yang Ketahanan Sosialnya meningkat	%	-	-	50.00	60.00	70.00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							
Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan	Indeks			77.00	78.00	79.00	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Angka Kelahiran Total (TFR)	-			2,01	2,01	2.00	
Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (<i>Modern contraceptive prevalence rate/mCPR</i>)	%			62.00	63.00	64.00	
Persentase Usia Kawin pertama (UKP) dibawah 20 tahun	%			12,11	12,01	12.00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							
Indeks kepuasan layanan kesekretariatan	Indeks			77.00	80.00	81.00	DINAS PERHUBUNGAN
Persentase perlengkapan jalan, sarana dan prasarana perhubungan yang layak fungsi	%			75.00	80.00	85.00	
Persentase rekomendasi angkutan sungai, danau dan penyeberangan (ASDP) yang disetujui	%			100.00	100.00	100.00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							
Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan	Indeks			72.00	74.00	76.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Persentase informasi dan komunikasi publik daerah yang berfungsi mendukung pembangunan daerah	%			81.00	82.00	83.00	
Persentase Aplikasi TIK yang dikelola	%			81.00	82.00	83.00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							
Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan	Indeks			75.00	76.00	77.00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
Persentase rekomendasi izin pembukaan kantor cabang yang disetujui	%			100.00	100.00	100.00	
Persentase Koperasi Aktif	%			52.50	53	53.50	

Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2019	2020	2021	2022	2023	
		Realisasi	Realisasi	Target	Target	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8
Persentase Koperasi yang meningkat kesehatannya	%			12.43	13.62	14.78	
Persentase SDM Pengelola Koperasi bersertifikat	%			40.91	44.55	48.18	
Persentase Koperasi yang meningkat Volume Usahanya	%			33.33	34.48	35.62	
Persentase Usaha Mikro berizin usaha yang meningkat omsetnya	%			17.56	18.27	18.94	
Persentase Usaha Mikro berizin usaha yang naik kelas	%			1.42	1.55	1.62	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							
Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan	Indeks			78.61	78.61	78.61	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Nilai Investasi	Miliar			810.00	820.00	830.00	
Persentase pertumbuhan investor	%			5.00	6.00	7.00	
Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang tepat waktu	%			90.00	91.00	92.00	
Persentase Pelaksanaan Penanaman Modal yang Terkendali	%			40.00	45.00	50.00	
Persentase Data Base Penanaman Modal yang termanfaatkan	%			100.00	100.00	100.00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							
Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	%			65.00	70.00	75.00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Persentase gugus pendidikan kepramukaan yang aktif	%			80.00	85.00	90.00	
Persentase atlet yang berprestasi	%			20.00	25.00	30.00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK							
Persentase Pemanfaatan data statistik sektoral	%			100.00	100.00	100.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN							
Persentase Informasi/ Berita Pemerintah Daerah yang disandakan/ diamankan	%			81.00	82.00	83.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2019	2020	2021	2022	2023	
		Realisasi	Realisasi	Target	Target	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							
Indeks Kepuasan layanan kesekretariatan	Indeks			76.61	78.61	80.61	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dikembangkan	%			30.00	30.00	40.00	
Persentase Pelaku Seni yang memiliki sertifikat	%			2.00	5.00	5.00	
Persentase Peningkatan Pembinaan Sejarah Daerah	%			5.00	10.00	15.00	
Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan dan dikelola	%			100.00	100.00	100.00	
Persentase Peningkatan Kunjungan Museum	%			5.00	5.00	5.00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN							
Indeks Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	Indeks			76.61	80.00	85.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Persentase perpustakaan yang memenuhi standar perpustakaan	%			12.00	20.00	25.00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN							
Persentase OPD/ Satker yang menerapkan tata kelola arsip	%			10.00	12.00	15.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							
Indeks kepuasan layanan kesekretariatan	Indeks			80	80	80	DINAS PERIKANAN
Nilai Produksi Usaha Perikanan Tangkap	Rp			36,469,087,140	37,198,468,883	37,942,438,260	
Nilai Produksi Usaha Perikanan Budidaya	Rp			374,730,657,629	385,972,577,358	397,551,754,678	
Nilai Produksi Usaha Pengolahan Hasil Perikanan	Rp			226,988,104,904	232,662,807,527	238,479,377,715	

Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2019	2020	2021	2022	2023	
		Realisasi	Realisasi	Target	Target	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							
Persentase Destinasi Wisata yang dikembangkan	%			12.50	25.00	12.50	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Angka Kunjungan Wisata	%			750.000	800.000	900.000	
Persentase Peningkatan Pelaku Ekonomi Kreatif	%			5.00	5.00	5.00	
Persentase Sumber Daya Manusia Kepariwisatan dan Ekonomi Kreatif yang tersertifikat	%			5.00	7.00	10.00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							
Indek kepuasan layanan kesekretariatan	Indeks			80.00	80.00	80.00	DINAS PERTANIAN
Persentase Pemanfaatan sarana pertanian	%			100.00	100.00	100.00	
Persentase Pemanfaatan Prasarana Pertanian yang berfungsi	%			100.00	100.00	100.00	
Persentase Bencana Pertanian yang tertangani	%			70.00	75.00	80.00	
Persentase peningkatan rekomendasi usaha pertanian	%			30.00	30.00	30.00	
Persentase Peningkatan Kelas Kelompok	%			3.00	3.00	3.00	
Persentase Peningkatan Populasi Ternak	%			2.00	2.00	2.00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
Persentase Daya Guna Prasarana Peternakan	%			50.00	75.00	80.00	
Persentase Status Kesehatan Hewan	%			81.00	82.00	82.00	
Persentase Jaminan Mutu Dan Keamanan Produk Hewan	%			81.00	82.00	82.00	
Persentase Fasilitasi Perijinan Usaha Peternakan	%			60	65	70	
Persentase Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Peternak	%			1.00	1.00	1.00	
Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan	Indeks			80.00	80.00	80.00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							

Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2019	2020	2021	2022	2023	
		Realisasi	Realisasi	Target	Target	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8
Persentase tertib perijinan dan Pendaftaran Perusahaan	%			0.00	2.00	3.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Persentase pasar dengan kondisi baik	%			75.20	75.30	75.40	
Persentase komoditi yang terjaga stabilitasnya	%			75.00	75.00	75.00	
Persentase peningkatan pelaku ekspor	%			5.00	5.00	5.00	
Persentase peningkatan metrologi legal	%			2.50	3.00	3.50	
Persentase peningkatan pemasaran produk dalam negeri	%			2.00	3.00	4.00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN							
Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan	Indeks			76.00	76.00	77.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Persentase peningkatan IKM yang terbina	%			2.00	3.00	4.00	
Persentase pengawasan perizinan IUI	%			0.00	50.00	50.00	
Persentase peningkatan data	%			0.00	0.20	0.30	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI							
Persentase transmigran yang ditempatkan	%			100.00	100.00	100.00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							
SEKRETARIAT DAERAH							
Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan	Indeks			78.00	79.00	80.00	SEKRETARIAT DAERAH
Persentase tercapainya pelayanan bidang administrasi umum	%			100.00	100.00	100.00	
Persentase fasilitasi penataan organisasi	%			100.00	100.00	100.00	
Persentase fasilitasi kebijakan bidang pemerintahan dan kesra	%			87,67	88,67	89,66	

Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2019	2020	2021	2022	2023	
		Realisasi	Realisasi	Target	Target	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8
Persentase Fasilitasi kebijakan perekonomian dan pembangunan	%			87,5	88,75	90.00	
SEKRETARIAT DPRD							
Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan	Indeks			77.00	78.00	79.00	SEKRETARIAT DPRD
Persentase Layanan Administrasi dan Keuangan DPRD yang difasilitasi	%			100.00	100.00	100.00	
Persentase pencapaian Tugas dan fungsi DPRD yang difasilitasi	%			100.00	100.00	100.00	
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							
PERENCANAAN							
Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan	Indeks			76.00	78.00	80.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Persentase Ketepatan waktu aktivitas Perencanaan, pengendalian dan evaluasi	%			80.00	90.00	100.00	
Persentase Keselarasan Program RPJMD	%			100.00	100.00	100.00	
KEUANGAN							
Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan	Indeks			85.00	87.00	90.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Persentase PD yang tepat waktu dalam penyampaian RKA dan DPA	%			100.00	100.00	100.00	
Persentase penyaluran belanja daerah yang tertib dan sesuai ketentuan	%			96.00	97.00	98.00	
Persentase PD yang tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangan sesuai SAP(Akrual)	%			100.00	100.00	100.00	
Persentase Perangkat Daerah yang tertib dan akuntabel dalam pengelolaan BMD	%			90.00	95.00	100.00	
Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan	Indeks			77,5	78.00	78.50	BADAN PENDAPATAN DAERAH
Persentase realisasi PAD Terhadap Target PAD	%			100.00	100.00	100.00	
KEPEGAWAIAN							
Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan	Indeks			80.00	81.00	82.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN

Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2019	2020	2021	2022	2023	
		Realisasi	Realisasi	Target	Target	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8
Persentase Promosi ASN yang sesuai kompetensi	%			90.00	92.00	95.00	PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Persentase ASN yang memiliki kinerja Sanagat baik	%			90.00	92.00	95.00	
Persentase data dan informasi kepegawaian yang dikelola dengan baik	%			90.00	92.00	95.00	
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN							
Persentase ASN Yang memiliki kompetensi teknis, manajerial dan Fungsional	%			60.00	61.00	62.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							
Persentase Hasil Penelitian yang dapat dijadikan Bahan Perumusan Kebijakan	%			100.00	100.00	100.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Indeks Inovasi Daerah	Indeks			30	45	60	
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN							
INSPEKTORAT DAERAH							
Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan	Indeks			92.00	93.00	94.00	INSPEKTORAT DAERAH
Persentase Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi yang Terselesaikan Tepat Waktu	%			82.00	83.00	84.00	
Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan yang Terselesaikan Tepat Waktu	%			82.00	83.00	84.00	
UNSUR KEWILAYAHAN							
KECAMATAN							
KECAMATAN BANDUNG							
Indeks kepuasan layanan kesekretariatan	Indeks			85.00	86.00	87.00	KECAMATAN BANDUNG
Persentase Pelayanan administrasi kecamatan yang sesuai SOP	%			100.00	100.00	100.00	

Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2019	2020	2021	2022	2023	
		Realisasi	Realisasi	Target	Target	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8
Persentase Program dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang difasilitasi	%			100.00	100.00	100.00	
Persentase desa tertib peraturan perundangan	%			100.00	100.00	100.00	
Persentase urusan pemerintahan umum yang difasilitasi dalam kegiatan kecamatan	%			100.00	100.00	100.00	
Persentase pemerintahan desa yang tertib administrasi	%			100.00	100.00	100.00	
KECAMATAN BESUKI							
Indeks kepuasan layanan kesekretariatan	Indeks			83.00	85.00	87.00	KECAMATAN BESUKI
Persentase Pelayanan administrasi kecamatan yang sesuai SOP	%			100.00	100.00	100.00	
Persentase Program dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang difasilitasi	%			100.00	100.00	100.00	
Persentase desa tertib peraturan perundangan	%			100.00	100.00	100.00	
persentase urusan pemerintahan umum yang difasilitasi dalam kegiatan kecamatan	%			100.00	100.00	100.00	
Persentase pemerintahan desa yang tertib administrasi	%			100.00	100.00	100.00	
KECAMATAN BOYOLANGU							
Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan	Indeks			84.00	85.00	86.00	KECAMATAN BOYOLANGU
Persentase pelayanan administrasi kecamatan yng sesuai SOP	%			100.00	100.00	100.00	
Persentase Program dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang difasilitasi	%			100.00	100.00	100.00	
Persentase Desa Tertib Peraturan dan Perundang-Undangan	%			100.00	100.00	100.00	
Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang Difasilitasi Dalam Kegiatan Kecamatan	%			100.00	100.00	100.00	
Persentase Pemerintahan Desa Yang Tertib Administrasi	%			100.00	100.00	100.00	
KECAMATAN CAMPURDARAT							
Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan	Indeks			77.00	80.00	83.00	KECAMATAN CAMPURDARAT

Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2019	2020	2021	2022	2023	
		Realisasi	Realisasi	Target	Target	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8
Persentase pelayanan administrasi kecamatan yng sesuai SOP	%			100.00	100.00	100.00	
Persentase Program dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang difasilitasi	%			100.00	100.00	100.00	
Persentase Desa Tertib Peraturan dan Perundang-Undangan	%			100.00	100.00	100.00	
Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang Difasilitasi Dalam Kegiatan Kecamatan	%			100.00	100.00	100.00	
Persentase Pemerintahan Desa Yang Tertib Administrasi	%			100.00	100.00	100.00	
KECAMATAN GONDANG							
Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan	Indeks			86.00	87.00	88.00	KECAMATAN GONDANG
Persentase Pelayanan administrasi kecamatan yang sesuai SOP	%			100.00	100.00	100.00	
Persentase Program dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang difasilitasi	%			100.00	100.00	100.00	
Persentase desa tertib peraturan perundangan	%			100.00	100.00	100.00	
persentase urusan pemerintahan umum yang difasilitasi dalam kegiatan kecamatan	%			100.00	100.00	100.00	
Persentase pemerintahan desa yang tertib administrasi	%			100.00	100.00	100.00	
KECAMATAN KALIDAWIR							
Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan	Indeks			84.00	86.00	88.00	KECAMATAN KALIDAWIR
Persentase Pelayanan administrasi kecamatan yang sesuai SOP	%			100.00	100.00	100.00	
Persentase Program dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang difasilitasi	%			100.00	100.00	100.00	
Persentase desa tertib peraturan perundangan	%			100.00	100.00	100.00	
persentase urusan pemerintahan umum yang difasilitasi dalam kegiatan kecamatan	%			100.00	100.00	100.00	
Persentase pemerintahan desa yang tertib administrasi	%			100.00	100.00	100.00	
KECAMATAN KARANGREJO							

Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2019	2020	2021	2022	2023	
		Realisasi	Realisasi	Target	Target	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8
Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan	Indeks			86.00	87.00	88.00	KECAMATAN KARANGREJO
Persentase Pelayanan administrasi kecamatan yang sesuai SOP	%			100.00	100.00	100.00	
Persentase Program dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang difasilitasi	%			100.00	100.00	100.00	
Persentase desa tertib peraturan perundangan	%			100.00	100.00	100.00	
persentase urusan pemerintahan umum yang difasilitasi dalam kegiatan kecamatan	%			100.00	100.00	100.00	
Persentase pemerintahan desa yang tertib administrasi	%			100.00	100.00	100.00	
KECAMATAN KAUMAN							
Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan	Indeks			87.00	88.00	89.00	KECAMATAN KAUMAN
Persentase Pelayanan administrasi kecamatan yang sesuai SOP	%			100.00	100.00	100.00	
Persentase Program dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang difasilitasi	%			100.00	100.00	100.00	
Persentase desa tertib peraturan perundangan	%			100.00	100.00	100.00	
Persentase urusan pemerintahan umum yang difasilitasi dalam kegiatan kecamatan	%			100.00	100.00	100.00	
Persentase pemerintahan desa yang tertib administrasi	%			100.00	100.00	100.00	
KECAMATAN KEDUNGWARU							
Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan	Indeks			84.00	85.00	86.00	KECAMATAN KEDUNGWARU
Persentase Pelayanan administrasi kecamatan yang sesuai SOP	%			100.00	100.00	100.00	
Persentase Program dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang difasilitasi	%			100.00	100.00	100.00	
Persentase desa tertib peraturan perundangan	%			100.00	100.00	100.00	
Persentase urusan pemerintahan umum yang difasilitasi dalam kegiatan kecamatan	%			100.00	100.00	100.00	
Persentase pemerintahan desa yang tertib administrasi	%			100.00	100.00	100.00	

Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2019	2020	2021	2022	2023	
		Realisasi	Realisasi	Target	Target	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8
KECAMATAN NGANTRU							
Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan	Indeks			82.00	83.00	84.00	KECAMATAN NGANTRU
Persentase Pelayanan administrasi kecamatan yang sesuai SOP	%			100.00	100.00	100.00	
Persentase Program dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang difasilitasi	%			100.00	100.00	100.00	
Persentase desa tertib peraturan perundangan	%			100.00	100.00	100.00	
persentase urusan pemerintahan umum yang difasilitasi dalam kegiatan kecamatan	%			100.00	100.00	100.00	
Persentase pemerintahan desa yang tertib administrasi	%			100.00	100.00	100.00	
KECAMATAN NGUNUT							
Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan	Indeks			84.00	86.00	88.00	KECAMATAN NGUNUT
Persentase Pelayanan administrasi kecamatan yang sesuai SOP	%			100.00	100.00	100.00	
Persentase Program dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang difasilitasi	%			100.00	100.00	100.00	
Persentase desa tertib peraturan perundangan	%			100.00	100.00	100.00	
persentase urusan pemerintahan umum yang difasilitasi dalam kegiatan kecamatan	%			100.00	100.00	100.00	
Persentase pemerintahan desa yang tertib administrasi	%			100.00	100.00	100.00	
KECAMATAN PAGERWOJO							
Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan	Indeks			80.00	82.00	84.00	KECAMATAN PAGERWOJO
Persentase Pelayanan administrasi Kecamatan yang sesuai SOP	%			100.00	100.00	100.00	
Persentase Program dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang difasilitasi	%			100.00	100.00	100.00	
Persentase desa tertib peraturan perundangan	%			100.00	100.00	100.00	
Persentase urusan pemerintahan umum yang difasilitasi dalam kegiatan Kecamatan	%			100.00	100.00	100.00	

Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2019	2020	2021	2022	2023	
		Realisasi	Realisasi	Target	Target	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8
Persentase Pemerintahan Desa yang Tertib Administrasi	%			100.00	100.00	100.00	
KECAMATAN PAKEL							
Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan	Indeks			81.00	81.50	82.00	KECAMATAN PAKEL
Persentase Pelayanan administrasi Kecamatan yang sesuai SOP	%			100.00	100.00	100.00	
Persentase Program dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang difasilitasi	%			100.00	100.00	100.00	
Persentase desa tertib peraturan perundangan	%			100.00	100.00	100.00	
Persentase urusan pemerintahan umum yang difasilitasi dalam kegiatan Kecamatan	%			100.00	100.00	100.00	
Persentase Pemerintahan Desa yang Tertib Administrasi	%			100.00	100.00	100.00	
KECAMATAN PUCANGLABAN							
Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan	Indeks			85.00	86.00	87.00	KECAMATAN PUCANGLABAN
Persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan yang sesuai SOP	%			100.00	100.00	100.00	
Persentase Program Dan Kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang difasilitasi	%			100.00	100.00	100.00	
presentase desa tertib peraturan perundangan	%			100.00	100.00	100.00	
presentase urusan pemerintahan umum yang difasilitasi dalam kegiatan kecamatan	%			100.00	100.00	100.00	
Presentase pemerintah desa yang tertib administrasi	%			100.00	100.00	100.00	
KECAMATAN REJOTANGAN							
Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan	Indeks			83.00	85.00	87.00	KECAMATAN REJOTANGAN
Persentase pelayanan administrasi kecamatan yang sesuai SOP	%			100.00	100.00	100.00	
Persentase program dan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang difasilitasi.	%			100.00	100.00	100.00	
Persentase desa tertib peraturan perundangan.	%			100.00	100.00	100.00	

Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2019	2020	2021	2022	2023	
		Realisasi	Realisasi	Target	Target	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8
Persentase urusan pemerintahan umum yang difasilitasi dalam kegiatan kecamatan.	%			100.00	100.00	100.00	
Persentase pemerintahan desa yang tertib administrasi	%			100.00	100.00	100.00	
KECAMATAN SENDANG							
Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan	Indeks			79.00	80.00	81.00	KECAMATAN SENDANG
Persentase pelayanan administrasi kecamatan yang sesuai SOP	%			100.00	100.00	100.00	
Persentase program dan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang difasilitasi.	%			100.00	100.00	100.00	
Persentase desa tertib peraturan perundangan.	%			100.00	100.00	100.00	
Persentase urusan pemerintahan umum yang difasilitasi dalam kegiatan kecamatan.	%			100.00	100.00	100.00	
Persentase pemerintahan desa yang tertib administrasi	%			100.00	100.00	100.00	
KECAMATAN SUMBERGEMPOL							
Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan	Indeks			85.00	85.00	85.00	KECAMATAN SUMBERGEMPOL
Persentase pelayanan administrasi kecamatan yang sesuai SOP	%			100.00	100.00	100.00	
Persentase program dan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang difasilitasi.	%			100.00	100.00	100.00	
Persentase desa tertib peraturan perundangan.	%			100.00	100.00	100.00	
Persentase urusan pemerintahan umum yang difasilitasi dalam kegiatan kecamatan.	%			100.00	100.00	100.00	
Persentase pemerintahan desa yang tertib administrasi	%			100.00	100.00	100.00	
KECAMATAN TANGGUNGUNUNG							
Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan	Indeks			77.00	79.00	81.00	KECAMATAN TANGGUNGUNUNG
Persentase Pelayanan administrasi kecamatan yang sesuai SOP	%			100.00	100.00	100.00	
Persentase Program dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang difasilitasi	%			100.00	100.00	100.00	

Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2019	2020	2021	2022	2023	
		Realisasi	Realisasi	Target	Target	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8
Persentase desa tertib peraturan perundangan	%			100.00	100.00	100.00	
persentase urusan pemerintahan umum yang difasilitasi dalam kegiatan kecamatan	%			100.00	100.00	100.00	
Persentase pemerintahan desa yang tertib administrasi	%			100.00	100.00	100.00	
KECAMATAN TULUNGAGUNG							
Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan	Indeks			83.00	85.00	87.00	KECAMATAN TULUNGAGUNG
Persentase Pelayanan administrasi kecamatan yang sesuai SOP	%			100.00	100.00	100.00	
Persentase Program dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang difasilitasi	%			100.00	100.00	100.00	
Persentase desa tertib peraturan perundangan	%			100.00	100.00	100.00	
persentase urusan pemerintahan umum yang difasilitasi dalam kegiatan kecamatan	%			100.00	100.00	100.00	
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM							
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							
Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan	Indeks			86.00	87.00	88.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Persentase Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	%			100.00	100.00	100.00	
Persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama	%			100.00	100.00	100.00	
Persentase Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan dalam Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	%			100.00	100.00	100.00	
Persentase Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	%			100.00	100.00	100.00	
Persentase kewaspadaan nasional dan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	%			100.00	100.00	100.00	

Sumber: Hasil Proyeksi, 2021

BAB IX



Penutup



BAB IX PENUTUP

Dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023 ini pada dasarnya merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan program Pemerintah Kabupaten Tulungagung. Dokumen ini merupakan pedoman bagi pemerintah, masyarakat serta seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan Kabupaten Tulungagung, yang telah disesuaikan dengan masa jabatan kepala daerah, yakni periode 2018-2023. Perubahan RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023 ini disusun dengan mempertimbangkan hasil kajian dan konsepsi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, mempertimbangkan asas kesinambungan dengan program-program pembangunan yang termuat dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023, dan mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan sebagaimana dimuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulungagung.

Perubahan RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023 ini menjadi landasan dan rujukan dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Pemerintah Kabupaten Tulungagung. Selanjutnya Perubahan RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023 ini akan dijabarkan ke dalam rencana pembangunan tahunan daerah, yakni Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tulungagung, yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode satu tahun.

9.1 Pedoman Transisi Tahun 2024 Merupakan Tahun Transisi Pemerintahan Bupati Dan Wakil Bupati

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023 ini selanjutnya menjadi pedoman bagi penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) mulai tahun 2021 hingga 2023. Perencanaan pembangunan untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD 2005-2025 Kabupaten Tulungagung dan mengacu pada RKP Tahun 2024. Hal ini karena pada tahun

2024 merupakan masa transisi antara perodesasi RPJMD 2018-2023 dengan RPJMD periode 2023-2028, dimana pada tahun 2023 yang merupakan masa penyusunan RKPD 2024, RPJMD Tahun 2023-2028 masih dalam proses penyusunan.

Untuk itu diperlukan pedoman transisi guna menjembatani kekosongan dokumen perencanaan pada Tahun 2024, yang terdiri dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) maupun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2024 yang harus disusun pada Tahun 2023. Program-program pembangunan pada masa transisi diarahkan untuk menjaga kesinambungan aktifitas dan capaian program pembangunan daerah. Program pembangunan pada Tahun 2024 melanjutkan program-program yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu, setiap perangkat daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan pada Tahun 2024 tetap mengacu kepada program-program Kabupaten yang telah ditetapkan dalam dokumen ini.

Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023 disusun dengan memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Timur serta RPJM Nasional dalam kerangka sinkronisasi pembangunan regional dan nasional. Dengan adanya Dokumen RPJMD Perubahan ini, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. RPJMD Perubahan Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran dan program kerja kepala daerah.
2. Seluruh PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung agar melaksanakan program-program yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023 dengan sebaik-baiknya.
3. Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023 ini selanjutnya dijabarkan dalam RKPD mulai Tahun 2021 hingga 2023.
4. Seluruh PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung berkewajiban untuk melakukan revisi terhadap Renstra PD dengan menyesuaikan Tujuan, sasaran, indikator kinerja, program beserta anggaran yang tertuang dalam dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023 untuk menjamin konsistensi dan kontinuitas program, kegiatan beserta pendanaan yang ditetapkan oleh kepala PD dan disahkan oleh Bupati.
5. Renstra PD sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) PD yang selanjutnya dilaksanakan melalui program dan kegiatan.

6. Sasaran dan indikator kinerja serta program yang tercantum dalam Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023 adalah merupakan sasaran dan indikator kinerja Kabupaten, PD sebagai instansi pelaksana wajib mendukung tercapainya sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen tersebut, disamping merumuskan sasaran dan indikator kinerja bagi kepentingan masing-masing PD. Sehingga seluruh PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung berkewajiban menjamin konsistensi antara Perubahan RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023 dengan Renstra PD, RKPD PD, dan Renja PD.
7. Konsepsi prioritas dalam dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023 ini baik mengenai aspek program maupun wilayah, hanya mempunyai implikasi terhadap konsentrasi intervensi terhadap program dan wilayah prioritas, baik dalam kerangka anggaran maupun kegiatan, dan tidak berimplikasi terhadap peniadaan program maupun wilayah non prioritas
8. Hal-hal yang terkait dengan rencana aksi alokasi anggaran pada dasarnya tidak bersifat mutlak namun akan menyesuaikan dengan kondisi serta kemampuan pendanaan tahun berjalan.

BUPATI TULUNGAGUNG,

ttd.

MARYOTO BIROWO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



GATUT HERMONO, S.H., M.H
Pembina Tk. I
NIP. 19700418 199503 1 002